



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BUKU II LAPORAN UTAMA



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021**



WALI KOTA CIMAHI

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 061.1/2290/DUH.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LETKOL (PURN) NGATIYANA

Jabatan : Plt. WALI KOTA CIMAHI

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas pada Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 telah disasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan Organisasi Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lapisan masyarakat lainnya sebagai pemangku kepentingan di wilayah Kota Cimahi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Cimahi, 26 Agustus 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon / Fax. (022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK SETYANINGSIH, S.H.

NIP : 19650818 199003 2 007

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Menyatakan bahwa validitas dan keabsahan data yang terdapat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021 (Tahun Data 2020) merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Cimahi, 3 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,

Mengetahui,
Pit. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA CIMAHI,

LILIK SETYANINGSIH, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650818 199003 2 007



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021 yang merupakan laporan tentang gambaran kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen IKPLHD disusun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) yang mengacu pada Pedoman Penyusunan DIKPLHD Tahun 2020. Dokumen ini terwujud dengan melibatkan pemangku kepentingan di Kota Cimahi.

Demikian dokumen ini disampaikan, saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi DIKPLHD dalam mempertimbangkan perumusan dan penerapan kebijakan dan/atau program kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang secara tidak langsung merupakan upaya penerapan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Cimahi, Agustus 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PURN) NGATIYANA



2.1.2	Pressure	II-10
2.1.2.1	Peningkatan Permintaan Lahan Permukiman	II-10
2.1.2.2	Kota Cimahi Sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional	II-11
2.1.2.3	Pelanggaran Izin Lingkungan.....	II-12
2.1.2.4	Peningkatan Timbulan Limbah	II-13
2.1.2.5	Daya Dukung Pangan.....	II-13
2.1.3	State	II-14
2.1.3.1	Keadaan Lahan Kota Cimahi	II-14
2.1.3.2	Kualitas Tanah.....	II-18
2.1.3.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	II-19
2.1.3.4	Kondisi Kepadatan Penduduk.....	II-21
2.1.4	Impact	II-23
2.1.4.1	Kejadian Bencana	II-23
2.1.4.2	Degradasi Lahan.....	II-23
2.1.4.3	Perubahan Iklim	II-26
2.1.4.4	Penurunan Muka Air Tanah	II-27
2.1.4.5	Kekurangan Air Bersih.....	II-29
2.1.5	Response.....	II-32
2.1.5.1	Penghijauan dan Pengoptimalan RTH.....	II-32
2.1.5.2	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Alam.....	II-34
2.1.5.3	Penetapan Status Kerusakan Tanah	II-35
2.1.5.4	Pengembangan Hunian Vertikal	II-36
2.1.5.5	Penerapan Vertikultur	II-36
2.1.5.6	Pengawasan Izin Lingkungan.....	II-36
2.1.5.7	Diversifikasi Pangan untuk Mewujudkan ketahanan Pangan pada Masa Pandemi	II-37
2.2	Kualitas Air	II-38
2.2.1	Driving Force	II-39
2.2.1.1	Pertumbuhan Penduduk	II-39
2.2.1.2	Kontribusi Volume Limbah di Kota Cimahi.....	II-40
2.2.1.3	Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum.....	II-43



2.2.1.4	Aktivitas Domestik	II-44
2.2.2	Pressure	II-45
2.2.2.1	Tingginya Lahan Terbangun	II-45
2.2.2.2	Beban Pencemar Sungai	II-46
2.2.2.3	Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri	II-47
2.2.3	State	II-48
2.2.3.1	Kualitas Air Sungai	II-48
2.2.3.2	Status Mutu Air	II-61
2.2.3.3	Indeks Kualitas Air (IKA)	II-62
2.2.3.4	Kualitas Air Sumur	II-64
2.2.4	Impact	II-68
2.2.4.1	Kekurangan Air	II-68
2.2.4.2	<i>Waterborne Disease</i>	II-69
2.2.4.3	Penurunan Kandungan Oksigen dalam Air	II-70
2.2.4.4	Penurunan Muka Air Tanah	II-70
2.2.5	Response	II-71
2.2.5.1	Izin Mengelola Limbah	II-71
2.2.5.2	Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala	II-72
2.2.5.3	Program Penurunan Beban Pencemar Sungai	II-74
2.2.5.4	Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	II-77
2.2.5.5	Penambahan Cadangan Air	II-78
2.2.5.6	Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan	II-78
2.2.5.7	Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Usaha	II-79
2.3	Kualitas Udara	II-79
2.3.1	Driving Force	II-80
2.3.1.1	Pertumbuhan Penduduk	II-80
2.3.1.2	Jumlah Kendaraan Bermotor	II-81
2.3.1.3	RPJMD Kota Cimahi 2017-2022	II-82
2.3.2	Pressure	II-82
2.3.2.1	Kemacetan	II-82
2.3.2.2	Emisi Bahan Bakar	II-83
2.3.2.3	Efek Rumah Kaca dari Kegiatan Industri	II-85



2.3.3	State	II-86
2.3.3.1	Kualitas Udara Ambien	II-86
2.3.3.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	II-88
2.3.3.3	Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	II-90
2.3.4	Impact	II-91
2.3.4.1	Penyakit yang Diderita Masyarakat.....	II-91
2.3.4.2	Pemanasan Global	II-92
2.3.5	Response.....	II-93
2.3.5.1	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala	II-93
2.3.5.2	Rekayasa Lalu Lintas dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	II-93
2.3.5.3	Ramp Check	II-94
2.3.5.4	Penataan Jalan	II-95
2.3.5.5	Kegiatan <i>Earth Hour</i>	II-95
2.3.5.6	Penghargaan Lingkungan bagi Industri	II-96
2.4	Risiko Bencana.....	II-96
2.4.1	Driving Force	II-97
2.4.1.1	Kondisi Topografis Kota Cimahi.....	II-97
2.4.1.2	Struktur Sesar Lembang	II-98
2.4.1.3	Peningkatan Lahan Permukiman	II-99
2.4.1.4	Pandemi COVID-19 di Dunia.....	II-100
2.4.2	Pressure	II-101
2.4.2.1	Pertumbuhan Penduduk	II-101
2.4.2.2	Kondisi Saluran Drainase	II-101
2.4.2.3	Perilaku Masyarakat	II-103
2.4.2.4	Peningkatan <i>Run Off</i>	II-104
2.4.2.5	Pandemi COVID-19 di Indonesia	II-104
2.4.3	State	II-106
2.4.3.1	Kebencanaan.....	II-106
2.4.3.2	Banjir	II-109
2.4.3.3	Angin Kencang	II-110
2.4.3.4	Kebakaran	II-110
2.4.3.5	Tanah Longsor	II-111



2.4.3.6	Kasus COVID-19 di Kota Cimahi.....	II-111
2.4.4	Impact	II-112
2.4.4.1	Dampak Bencana Banjir	II-112
2.4.4.2	Dampak Angin Kencang	II-112
2.4.4.3	Dampak Bencana Kebakaran	II-112
2.4.4.4	Dampak Bencana Tanah Longsor	II-113
2.4.4.5	Timbulan Limbah B3 Medis.....	II-113
2.4.5	Response.....	II-114
2.4.5.1	Upaya Penanggulangan Bencana	II-114
2.4.5.2	Pemeliharaan Drainase.....	II-115
2.4.5.3	Kegiatan Fisik oleh Instansi	II-116
2.4.5.4	Penghijauan	II-117
2.4.5.5	Pengadaan Sumur Resapan	II-118
2.4.5.6	Inovasi Lingkungan.....	II-118
2.4.5.7	Pengelolaan Limbah B3 Medis.....	II-120
2.4.5.8	Sosialisasi Kebersihan Lingkungan	II-121
2.5	Perkotaan	II-121
2.5.1	Driving Force	II-122
2.5.1.1	Proyeksi Timbulan Sampah.....	II-122
2.5.1.2	Kurangnya Fasilitas Tempat Buang Air Besar	II-123
2.5.1.3	Rendahnya Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	II-125
2.5.1.4	Ketersediaan TPS Terbatas.....	II-126
2.5.1.5	Tidak Memiliki TPPAS Mandiri	II-126
2.5.2	Pressure	II-127
2.5.2.1	Tingkat Kemiskinan Masyarakat	II-127
2.5.2.2	Tingkat Pendidikan	II-129
2.5.2.3	Umur TPA Sarimukti.....	II-130
2.5.2.4	Anggaran Pengelolaan Persampahan.....	II-131
2.5.2.5	Peran Serta Masyarakat.....	II-131
2.5.3	State	II-132
2.5.3.1	Timbulan Sampah	II-132
2.5.3.2	Kondisi Teknis Operasional Pengelolaan Sampah ..	II-133



2.5.4	Impact	II-135
2.5.4.1	Penyakit.....	II-135
2.5.4.2	Kejadian Bencana	II-136
2.5.5	Response.....	II-136
2.5.5.1	Sosialisasi dan Edukasi.....	II-136
2.5.5.2	Anggaran Pengelolaan Persampahan.....	II-136
2.5.5.3	Bank Sampah	II-137
2.5.5.4	Program Hari Organik dan Hari Anorganik (HO-HA)	II-137
2.5.5.5	Program <i>Zero Waste</i> untuk Kelola Sampah di Sumber	II-138
2.5.5.6	Kegiatan Fisik Oleh Instansi.....	II-138
2.5.5.7	Komitmen Pengangkutan Sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka.....	II-138
2.6	Tata Kelola	II-139
2.6.1	Driving Force	II-141
2.6.1.1	Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup.....	II-141
2.6.1.2	Pengawasan Pembangunan Sesuai Kebijakan Kota Cimahi.....	II-142
2.6.1.3	Misi Peningkatan Taraf Ekonomi pada RPJMD Kota Cimahi.....	II-142
2.6.2	Pressure	II-143
2.6.2.1	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	II-143
2.6.2.2	Pelanggaran Izin Lingkungan.....	II-144
2.6.2.3	Status Pengaduan Masyarakat.....	II-145
2.6.3	State	II-145
2.6.3.1	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia.....	II-145
2.6.3.2	Alokasi Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup..	II-147
2.6.3.3	Perkembangan PDRB	II-148
2.6.3.4	Implementasi Izin Lingkungan	II-150
2.6.4	Impact	II-150
2.6.4.1	Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat.....	II-150
2.6.4.2	Pengawasan Izin Lingkungan.....	II-152



2.6.5	Response.....	II-152
2.6.5.1	Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup	II-152
2.6.5.2	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-155
2.6.5.3	Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-155
2.6.5.4	Kemitraan	II-156
2.6.5.5	Progres Pengaduan Masyarakat	II-157
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		II-1
3.1	Perumusan Isu Prioritas.....	II-1
3.2	Studi Literatur	II-2
3.2.1	Sustainable Development Goals	II-2
3.2.2	Visi dan Misi Kota Cimahi	II-4
3.2.3	Rencana Strategis DLH Kota Cimahi 2018-2022	II-8
3.2.4	DIKPLH Kota Cimahi Tahun 2020	II-10
3.3	Analisis D-P-S-I-R Tahun 2021	II-10
3.4	Penetapan Isu Potensial	II-18
3.5	Kriteria Penetapan.....	II-19
3.6	Analisis Isu Prioritas	II-25
3.7	Verifikasi dan Klarifikasi	II-26
3.8	Penetapan Isu Prioritas.....	II-27
BAB IV INOVASI DAERAH		IV-1
4.1	Cimahi Barengras.....	IV-2
4.1.1	Sayembara Logo Cimahi Zero Waste	IV-4
4.1.2	AWAS PANIK	IV-6
4.1.3	Stungta	IV-9
4.1.4	Pengelolaan Sampah Mandiri	IV-11
4.1.5	Pengolahan Bio-teknologi Magot <i>Black Soldier Flies</i> (BSF) di Kelurahan Padasuka.....	IV-12
4.2	Cimahi Smart City	IV-13
4.2.1	<i>Smart Environment</i>	IV-16
4.2.1.1	Patali	IV-16
4.2.1.2	Sistem Informasi Tata Ruang (SITARUNG)	IV-21
4.2.2	<i>Smart Governance</i>	IV-23



4.2.2.1	SiPinter	IV-23
4.2.2.2	SiBeda	IV-24
4.2.2.3	SiKonci	IV-25
4.2.2.4	SiMakci	IV-26
4.2.2.5	SiKaci.....	IV-26
4.2.2.6	SiManda	IV-27
4.2.2.7	SiIdola	IV-27
4.2.2.8	<i>One Day Service 3 in 1</i>	IV-30
4.2.2.9	Pengaduan Trantibum.....	IV-31
4.2.2.10	JDIH Kota Cimahi.....	IV-32
4.2.3	<i>Smart Economy</i>	IV-33
4.2.3.1	<i>Smart PKB</i>	IV-33
4.2.3.2	<i>Smart Traffic</i>	IV-34
4.3	Eco Wisata.....	IV-34
4.3.1	Pasar Wisata Legok Awi.....	IV-35
4.3.2	<i>Gastrodiplomacy</i> Cireundeu	IV-36
4.4	Pengembangan Lahan dan Varietas Lokal	IV-37
4.4.1	POKER 4P	IV-37
4.4.2	SEGAPT	IV-38
4.4.3	<i>Urban Farming</i>	IV-40
4.4.4	Cimahi Agri Market.....	IV-41
4.4.5	<i>Bemara Nurseries</i>	IV-42
4.4.6	TTIC (Toko Tani Indonesia Centre) Kota Cimahi	IV-44
4.4.7	Pengembangan Komoditas Lokal Durian Kamarung	IV-45
4.5	Cimahi Walagri.....	IV-47
4.5.1	SiMandra	IV-47
4.5.2	Griya Plus	IV-48
4.5.3	Sahabat Gagah	IV-49
4.5.4	Goyang Gotik.....	IV-51
4.6	Pembangunan Fisik	IV-52
4.6.1	Mal Pelayanan Publik (MPP).....	IV-52
4.6.2	<i>Double Track</i>	IV-54



4.6.3	<i>Underpass Sriwijaya</i>	IV-54
4.7	Inovasi COVID-19	IV-56
BAB V PENUTUP		V-1
5.1	Simpulan	V-1
5.2	Rencana Tindak Lanjut	V-2
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Cimahi	I-4
Gambar 1.2 Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi	I-6
Gambar 1.3 Peta Aliran Sungai Kota Cimahi	I-8
Gambar 1.4 Ekoregion Kota Cimahi.....	I-13
Gambar 1.5 Alur Perumusan Isu Prioritas.....	I-17
Gambar 2.1 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi.....	II-5
Gambar 2.2 Kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi	II-6
Gambar 2.3 Pola Ruang Kota Cimahi	II-9
Gambar 2.4 Tren Luas Penggunaan di Kota Cimahi.....	II-11
Gambar 2.5 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi	II-13
Gambar 2.6 Daya Dukung Pangan Kota Cimahi	II-14
Gambar 2.7 Tren Luas Kawasan Lindung di Kota Cimahi	II-16
Gambar 2.8 Tren Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-18
Gambar 2.9 Tren Nilai IKTL di Kota Cimahi.....	II-21
Gambar 2.10 Tren Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi.....	II-22
Gambar 2.11 Lahan Kritis.....	II-25
Gambar 2.12 Tren Curah Hujan Rata-Rata di Kota Cimahi.....	II-26
Gambar 2.13 Peta Penurunan Muka Air Tanah	II-28
Gambar 2.14 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015	II-30
Gambar 2.15 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015	II-30
Gambar 2.16 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015	II-31
Gambar 2.17 Sebaran Taman Lingkungan.....	II-33
Gambar 2.18 Persentase Volume Limbah Kota Cimahi.....	II-42
Gambar 2.19 Tren Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Cimahi ...	II-44
Gambar 2.20 Tren Luas Penggunaan Lahan di Kota Cimahi.....	II-45
Gambar 2.21 Daya Tampung Beban Pencemaran DAS Citarum.....	II-47
Gambar 2.22 Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi	II-48
Gambar 2.23 Konsentrasi TSS Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-50

Gambar 2.24 Konsentrasi DO Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020	II-52
Gambar 2.25 Konsentrasi BOD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020	II-54
Gambar 2.26 Konsentrasi COD di Kota Cimahi Tahun 2020	II-56
Gambar 2.27 Konsentrasi Total Fosfat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020	II-58
Gambar 2.28 Konsentrasi <i>Fecal Coliform</i> Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020	II-60
Gambar 2.29 Tren Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi	II-63
Gambar 2.30 Sumber Air Minum Masyarakat Kota Cimahi	II-64
Gambar 2.31 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter NO ₃	II-65
Gambar 2.32 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter Mangan	II-66
Gambar 2.33 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter Total Coliform	II-67
Gambar 2.34 Selisih Ketersediaan Air Kota Cimahi	II-69
Gambar 2.35 Penyakit yang Diderita Masyarakat Kota Cimahi	II-70
Gambar 2.36 Jumlah Izin yang Dikeluarkan.....	II-72
Gambar 2.37 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Domestik	II-74
Gambar 2.38 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan	II-75
Gambar 2.39 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian	II-76
Gambar 2.40 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi.....	II-81
Gambar 2.41 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi.....	II-82
Gambar 2.42 Jenis Bahan Bakar yang Banyak Digunakan Masyarakat Kota Cimahi	II-84
Gambar 2.43 Jenis Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar yang Digunakan	II-85
Gambar 2.44 Konsentrasi SO ₂ di Kota Cimahi	II-87
Gambar 2.45 Konsentrasi NO ₂ di Kota Cimahi.....	II-88
Gambar 2.46 Tren Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi.....	II-89
Gambar 2.47 Penyakit Utama Penduduk Kota Cimahi.....	II-92
Gambar 2.48 Lokasi Sesar Lembang	II-99
Gambar 2.49 Tren Perubahan Penggunaan Lahan Kota Cimahi.....	II-100



Gambar 2.50 Kondisi Saluran Drainase di Kota Cimahi	II-102
Gambar 2.51 Tren Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi	II-104
Gambar 2.52 Grafik Perkembangan COVID-19 per Kelurahan	II-112
Gambar 2.53 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi.....	II-123
Gambar 2.54 Persentase Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi Tahun 2020	II-124
Gambar 2.55 Tren Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi.....	II-125
Gambar 2.56 TPA yang Digunakan Kota Cimahi.....	II-126
Gambar 2.57 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi	II-128
Gambar 2.58 Tren Rumah Tangga Miskin.....	II-129
Gambar 2.59 Tren Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi	II-130
Gambar 2.60 Distribusi Timbulan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2020	II-132
Gambar 2.61 Jumlah Penderita Penyakit di Kota Cimahi.....	II-135
Gambar 2.62 Komitmen Kota Cimahi dalam Pengangkutan Sampah ke TPPAS Legok Nangka	II-139
Gambar 2.63 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi	II-144
Gambar 2.64 Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi	II-148
Gambar 2.65 Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Kota Cimahi	II-149
Gambar 2.66 Penerima Penghargaan Lingkungan ProKlim di Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-154
Gambar 3.1 Alur Perumusan Isu Prioritas.....	III-1
Gambar 3.2 <i>Sustainable Development Goals</i>	III-2
Gambar 3.3 Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi.....	III-10
Gambar 3.4 DPSIR Tata Guna Lahan	III-11
Gambar 3.5 DPSIR Kualitas dan Kuantitas Air.....	III-12
Gambar 3.6 DPSIR Kualitas Udara	III-13
Gambar 3.7 DPSIR Risiko Bencana	III-14
Gambar 3.8 DPSIR Perkotaan.....	III-15
Gambar 3.9 DPSIR Tata Kelola	III-16

Gambar 4. 1 Inovasi Prioritas Kota Cimahi	IV-1
Gambar 4. 2 Neraca Pengelolaan Sampah dalam Ton per Hari Tahun 2017-2020.....	IV-3
Gambar 4. 3 Deskripsi Logo Cimahi Barengras	IV-5
Gambar 4. 4 <i>Launching</i> Logo Cimahi Zero Waste.....	IV-6
Gambar 4. 5 Business Process AWAS PANIK.....	IV-8
Gambar 4. 7 Grafik Persentase Pengelolaan Sampah AWAS PANIK	IV-9
Gambar 4. 6 Kegiatan AWAS PANIK di Kota Cimahi	IV-9
Gambar 4. 8 Operasional Stungta	IV-11
Gambar 4. 9 Pengelolaan Sampah Mandiri di RW 07 Pasirkaliki	IV-12
Gambar 4. 10 Magot Black Soldier Flies	IV-13
Gambar 4. 11 Tampilan Website Cimahi Smart City	IV-15
Gambar 4. 12 Tampilan Aplikasi Cimahi Smart City versi Android.....	IV-16
Gambar 4. 13 Business Process PATALI	IV-18
Gambar 4. 14 Sosialisasi dan Simulasi Pelaporan Pemantauan Lingkungan kepada Pelaku Usaha di Kota Cimahi.....	IV-19
Gambar 4. 15 Halaman Awal Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	IV-20
Gambar 4. 16 Tampilan Informasi Menara Telekomunikasi di Kota Cimahi	IV-22
Gambar 4. 17 Tampilan Registrasi Akun Melalui SIPINTER	IV-24
Gambar 4. 18 Penanganan Kebakaran oleh BPBD	IV-25
Gambar 4. 19 Aplikasi Sikonci BKPSDMD.....	IV-26
Gambar 4. 20 Halaman Awal SIMANDA Kota Cimahi	IV-27
Gambar 4. 21 Tampilan Website SIIDOLA.....	IV-29
Gambar 4. 22 One Day Service dalam Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan	IV-31
Gambar 4. 23 Landing Page Website Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi	IV-32
Gambar 4. 24 Landing Page Website JDIH Kota Cimahi	IV-33
Gambar 4. 25 Smart Card dan Buku Uji Kendaraan Bermotor	IV-34



Gambar 4. 26 Pemantauan Lalu Lintas di Aplikasi Cimahi Smart City..	IV-34
Gambar 4. 27 Pasar Wisata Legok Awi	IV-36
Gambar 4. 28 Business Process Proker 4P	IV-38
Gambar 4. 29 Business Process SERGAPT	IV-39
Gambar 4. 30 Kegiatan Urban Farming	IV-41
Gambar 4. 31 Kegiatan Cimahi Agri Market	IV-42
Gambar 4. 32 Kegiatan Bemara Nurseries	IV-43
Gambar 4. 33 Kegiatan TTIC	IV-45
Gambar 4. 34 Pembibitan dan Penanaman Durian Kamarung	IV-46
Gambar 4. 35 Tampilan SIMANDRA	IV-48
Gambar 4. 36 Rumah yang Direnovasi pada Program Griya Plus.....	IV-49
Gambar 4. 37 Data Rumah Tidak Layak Huni Terbangun Kota Cimahi Tahun 2016-2020	IV-49
Gambar 4. 38 Pemasangan Sumur Resapan	IV-50
Gambar 4. 39 Warga Menabung Sampah untuk Pembangunan Tangki Septik	IV-52
Gambar 4. 40 Tampak Atas Mal Pelayanan Publik.....	IV-53
Gambar 4. 41 Tahapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi	IV-53
Gambar 4. 42 Proses Pembangunan Double Track Jembaran Leuwigajah	IV-54
Gambar 4. 43 Gambar Rencana Tiga Dimensi Underpass Sriwijaya	IV-55
Gambar 4. 44 Proses Perencanaan Pembangunan Underpass Sriwijaya	IV-55
Gambar 4. 45 Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19	IV-56
Gambar 4. 46 Pembelajaran Jarak Jauh melalui AKTV.....	IV-56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Kecamatan di Kota Cimahi.....	I-3
Tabel 1.2 Luas Lahan Menurut Peruntukannya	I-5
Tabel 1.3 Luas Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi	I-9
Tabel 1.4 Keterangan Debit Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi	I-10
Tabel 1.5 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi	I-12
Tabel 1.6 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan	I-15
Tabel 2.1 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Tata Guna Lahan	II-2
Tabel 2.2 Jumlah dan Proyeksi Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kecamatan	II-4
Tabel 2.3 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Cimahi.....	II-10
Tabel 2.4 Perubahan Luas Kawasan Lindung Kota Cimahi	II-15
Tabel 2.5 Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Cimahi	II-17
Tabel 2.6 Hasil Pengamatan Kualitas Tanah di Kota Cimahi.....	II-18
Tabel 2.7 Klasifikasi Luas Tutupan Hutan di Kota Cimahi.....	II-20
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi.....	II-21
Tabel 2.9 Tren Lahan Kritis di Kota Cimahi	II-24
Tabel 2.10 Realisasi Penghijauan Tahun 2020	II-32
Tabel 2.11 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Kualitas Air	II-38
Tabel 2.12 Volume Limbah Padat dan Cair dalam Ton per Tahun	II-41
Tabel 2.13 Profil Desa/Kelurahan Program Citarum Harum.....	II-43
Tabel 2.14 Status Mutu Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-61
Tabel 2.15 Indeks Kualitas Air Tahun 2020	II-63
Tabel 2.16 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Kualitas Udara	II-79
Tabel 2.17 Jumlah dan Proyeksi Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kecamatan	II-80
Tabel 2.18 Emisi Gas Rumah Kaca dari Kegiatan Industri	II-86
Tabel 2.19 Indeks Kualitas Udara	II-89



Tabel 2.20 Perhitungan Nilai ISPU Setiap Pencemar Udara	II-90
Tabel 2.21 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng	II-97
Tabel 2.22 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng	II-98
Tabel 2.23 Luas Perubahan Penggunaan Lahan	II-99
Tabel 2.24 Bencana yang Terjadi di Kota Cimahi Tahun 2020	II-106
Tabel 2.25 Kegiatan Fisik Oleh Instansi	II-117
Tabel 2.26 Pemetaan Tabel utama Terhadap Isu Perkotaan	II-122
Tabel 2.27 Jumlah Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi Tahun 2020	II-124
Tabel 2.28 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi	II-128
Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Miskin	II-129
Tabel 2.30 Proporsi Sampah yang Terangkut ke TPA Sarimukti	II-133
Tabel 2.31 Kegiatan Pengelolaan Persampahan	II-137
Tabel 2.32 Pengurangan Sampah di Kota Cimahi	II-137
Tabel 2.33 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Tata Kelola	II-140
Tabel 2.34 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-143
Tabel 2.35 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-146
Tabel 2.36 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan	II-147
Tabel 2.37 Kegaitan/Program yang Diinisiasi Masyarakat	II-151
Tabel 2.38 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	II-153
Tabel 2.39 Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2020	II-156
Tabel 2.40 Progres Pengaduan Masyarakat	II-158
Tabel 2.41 Rekapitulasi Hasil Analisis DPSIR	II-164
Tabel 3.1 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja dalam Renstra DLH Kota Cimahi 2018-2022	III-9
Tabel 3.2 <i>Longlist</i> Analisis DPSIR	III-17
Tabel 3.3 Pengkategorian Isu	III-18
Tabel 3.4 <i>Scoring</i> Isu Prioritas	III-26
Tabel 3.5 Hasil <i>Scoring</i> Isu Prioritas pada FGD Kota Cimahi	III-28
Tabel 4. 1 Spesifikasi Teknis Incenerator Stungta	IV-11



Tabel 4. 2 Kawasan yang Mengaplikasikan Bemara Nurseries.....	IV-44
Tabel 4. 3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020	IV-48
Tabel 4. 4 Instansi yang Bergabung pada MPP	IV-52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kelengkapan Administrasi Penyusunan DIKPLHD Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none">- SK Tim Penyusun- Biodata Penyusun- Undangan Rapat Pengumpulan Data- Notulensi Rapat Pengumpulan Data- Daftar Hadir Pengumpulan Data- Undangan Fokus Grup Diskusi (FGD)- Berita Acara Fokus Grup Diskusi (FGD)- Notulensi Fokus Grup Diskusi (FGD)- Daftar Hadir Fokus Grup Diskusi (FGD)
Lampiran II	Tabel Utama
Lampiran III	Tabel Tambahan
Lampiran IV	Peta Spasial



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dalam pemanfaatannya, terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup dan apabila hubungan timbal balik ini berjalan secara teratur maka terbentuklah komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, agar keseimbangan alam tetap terjaga serta tetap mendapat manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia baik saat ini maupun yang akan datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 62 ayat (1-3) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kota Cimahi berada di Provinsi Jawa barat dan memiliki visi pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022 yaitu "MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA". Sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah Kota Cimahi, salah satu misi Kota Cimahi adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi kepada publik dalam mencapai misi tersebut.

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat. DIKPLHD ini disusun secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting sarana penyediaan data pada sistem informasi lingkungan. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi atau sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan, sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi.

1.2 Profil Daerah Kota Cimahi

1.2.1 Letak Geografis

Kota Cimahi secara geografis terletak diantara $107^{\circ}30'30''$ – $107^{\circ}34'30''$ BT dan $6^{\circ}50'00''$ – $6^{\circ}56'00''$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Cimahi menurut UU No. 9 Tahun 2001 memiliki luas sebesar $40,2 \text{ km}^2$ (4.020 Ha) dengan batas-batas wilayahnya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

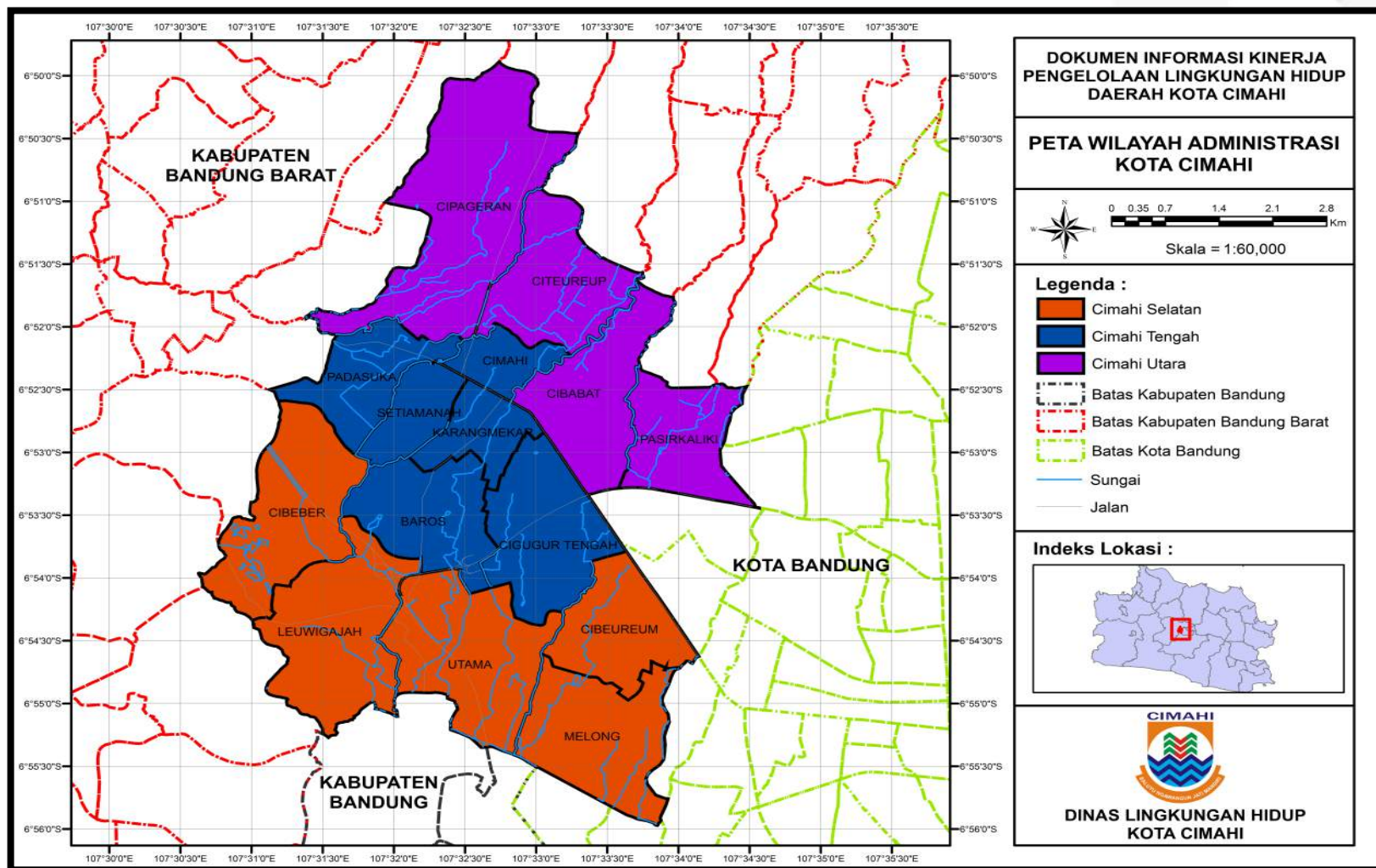
Kota Cimahi memiliki luas 40,2 km². Luas ini terbagi menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Cimahi Selatan memiliki lahan yang paling luas jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Luas Kecamatan Cimahi Selatan sebesar 16,94 km² atau setara dengan 41,96 persen dari luas Kota Cimahi. Sedangkan Kecamatan Cimahi Tengah dengan persentase paling kecil yaitu 25,05 persen dari luas Kota Cimahi atau 10,11 km².

Tabel 1.1 Luas Kecamatan di Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Cimahi Utara	Utama	13,32	32,99
2	Cimahi Tengah	Cimahi	10,11	25,05
3	Cimahi Selatan	Cibabat	16,94	41,96
Jumlah			40,25	100

(Sumber: Statistik Daerah Kota Cimahi, 2020)

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan yaitu, Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Peta wilayah administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Cimahi

1.2.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan fungsi kota secara umum, jenis kegiatan Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Kecamatan Cimahi Tengah, jenis kegiatannya diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, serta pendidikan. Kecamatan Cimahi Selatan, jenis kegiatannya diarahkan untuk Industri, perumahan, pendidikan dan pelayanan umum.

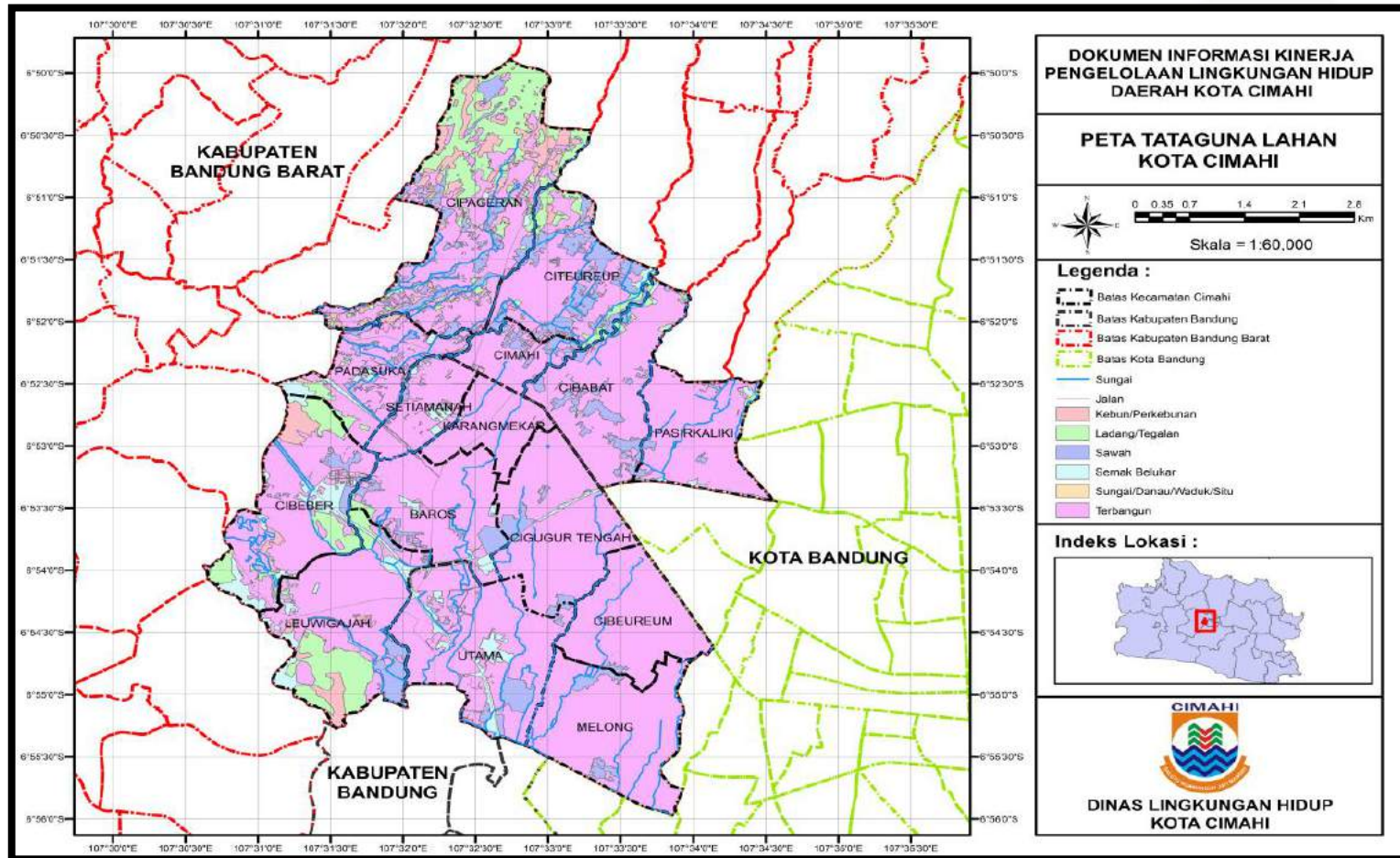
Secara keseluruhan penggunaan lahan di Kota Cimahi, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Luas Lahan Menurut Peruntukannya

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	No	Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)
1	Perumahan Teratur	625.542	15	Sawah	201.142
2	Perumahan Tidak Teratur	4.876	16	Tegalan	139.819
3	Kuburan	32.079	17	Kebun Campur	182.349
4	Pasar	4.375	18	Taman Kota	5.255
5	Perdagangan Umum	131.634	19	Jalan Tol	59.184
6	Rumah Makan	1.608	20	Akomodasi dan Rekreasi	7.922
7	Industri	468.401	21	Danau/Situ/Waduk	5.349
8	Fasilitas Pemerintahan	22.787	22	Fasilitas Olahraga	91.048
9	Bangunan Militer	203.462	23	Hutan	32.478
10	Fasilitas Pendidikan	95.261	24	Kampung	149.943
11	Fasilitas Kesehatan	18.065	25	Padang	302.376
12	Fasilitas Peribadatan	8.880	26	Rel Kereta Api	7.567
13	Fasilitas Layanan Umum	3.823	27	Lain-lain	6.924
14	Tanah Kosong	21.821			

(Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2019)

Secara visual, peruntukan lahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi

1.2.3 Hidrologi

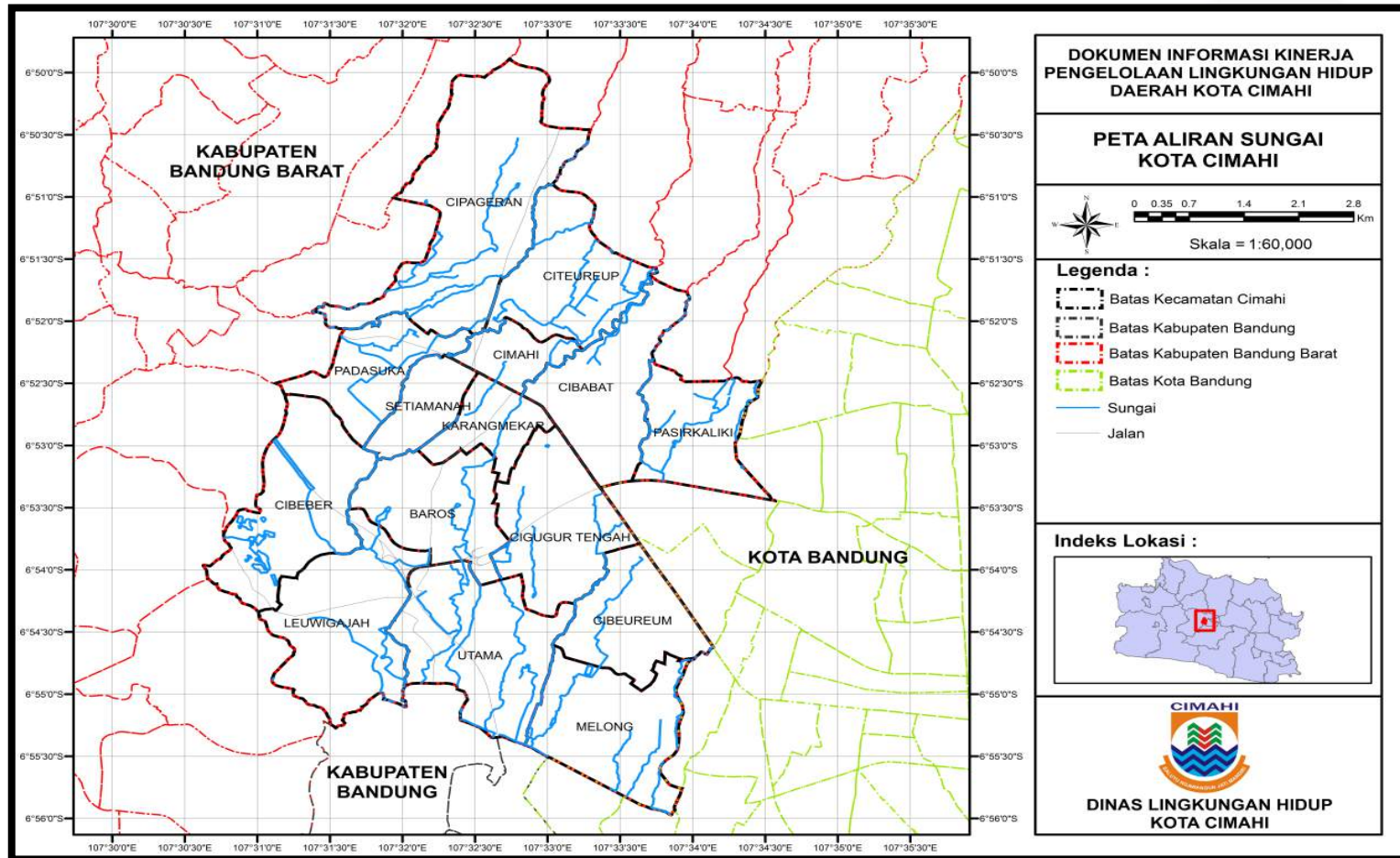
Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 l/dt. Anak Sungai Cimahi ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum dan Kali Cisangkan, sementara itu mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok dengan debit air 93 l/dt.

Bila ditinjau dari beban pencemar yang diterima badan air, terdapat tiga sungai yang menjadi badan air penerima buangan limbah industri, domestik, rumah sakit, dan lain sebagainya, adalah :

1. Sungai Cimahi, panjang 7 km, lebar (5-10) m, melintasi tiga kecamatan, yaitu Cimahi Tengah, Utara dan Selatan.
2. Sungai Cisangkan, panjang 4,5 km, lebar (3-7) m, melintasi Kec. Cimahi Tengah dan Selatan.
3. Sungai Cigugur/Cibaligo, panjang 2 km, lebar (3-5) m, melintasi Kec. Cimahi Selatan.

Kota Cimahi diproyeksikan memiliki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m³ per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m³ dan air tanah sebesar 13,61 juta m³. Zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi saat ini didominasi oleh zona pemanfaatan rawan, kritis, dan rusak yang mencakup 50,6% dari total zona pemanfaatan air tanah.

Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologis Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Potensi air tanah CAT Bandung-Soreang diperkirakan mencapai 795 juta m³ air bebas (*free water*) dan 117 juta m³ air tertekan (*confined water*). Peta aliran sungai Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Peta Aliran Sungai Kota Cimahi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah. Zona konservasi air tanah terdiri atas: (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 zona, yaitu: zona aman, zona aman pada akuifer 50-150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.

Air tanah di Kota Cimahi terdiri dari kondisi aman, aman pada akuifer 50-150 m, rawan, kritis hingga rusak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Luas Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Zona Pemanfaatan Air Tanah (Ha)					Total
		Aman	Aman Pada Akuifer 50- 150m	Rawan	Kritis	Rusak	
1	Cimahi Selatan	-	334,04	869,52	293,93	156,81	1.654,30
2	Cimahi Tengah	-	453,00	92,74	204,35	239,53	989,62
3	Cimahi Utara	485,89	729,32	118,18	49,70	25,87	1.408,96
Jumlah		485,89	1.516,37	1.080,44	547,98	422,21	4.052,88

(Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150 m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2.050,63 ha atau mencakup 50,60% dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kendala dalam pengembangan perumahan di Kota Cimahi. Adapun debit maksimal dari air tanah yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010).

Tabel 1.4 Keterangan Debit Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi

No	Kondisi Cekungan Air Tanah	Keterangan
1	Aman	Kedalaman muka air tanah <25m, sebagai zona resapan. Pengembangan air tanah pada semua kedalaman akuifer dengan debit maksimum 100 m ³ /bulan/sumur
2	Aman pada akuifer 50-150 m	Kedalaman muka air tanah 25 m. Pengambilan air tanah pada akuifer kedalaman <50 m dengan debit maksimum 100 m ³ /bulan/sumur, pada akuifer 50-150 m debit maksimum 260 m ³ /hari/sumur, Pengambilan air tanah baru lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 320 m ³ /hari/sumur dengan jumlah sumur terbatas setiap km ²
3	Rawan	Kedalaman muka air tanah 25-35m. pengambilan air tanah baru pada akuifer kedalaman <50m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga, dengan debit maksimum 100 m ³ /bulan/sumur, pada akuifer 50-150m debit maksimum 90 m ³ /hari/sumur, pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 260 m ³ /hari/sumur
4	Kritis	Kedalaman muka air tanah 35-55 m. pengambilan air tanah pada akuifer kedalaman <150 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m ³ /bulan/sumur, pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 200 m ³ /hari/sumur, setelah melakukan eksplorasi
5	Rusak	Kedalaman muka air tanah 550 m. pengambilan air tanah baru pada akuifer kedalaman 50-150 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m ³ /bulan/sumur, Pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 90 m ³ /hari/sumur, setelah melakukan eksplorasi

(Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Pada Tabel 1.4 dijelaskan bahwa pemanfaatan air tanah pada zona ini dibatasi untuk air minum dan rumah tangga dengan debit yang berbeda untuk kedalaman yang berbeda pada kisaran 90-260 m³/hari/sumur. Pemanfaatan air tanah pada zona terbatas ini harus diperhatikan untuk cadangan air tanah yang berkelanjutan, karena sumber air tanah merupakan sumber air yang terbatas.

Pada kondisi aman jumlah debit maksimum 100 m³/bulan/sumur yang diperuntukkan sebagai zona resapan air yang berada di bagian utara Kota Cimahi atau yang sering disebut sebagai Kawasan Bandung Utara dengan kedalaman muka air sebesar <25 m. Untuk kondisi aman pada akuifer 50-

150 m yang mendominasi di Kota Cimahi memiliki debit maksimum 100 m³/bulan/sumur, pada akuifer 50-150 m debit maksimum 260 m³/hari/sumur dengan kedalaman muka air tanah 25 m (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010).

Adapun pada kondisi air tanah rawan, kritis, dan rusak hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga di Kota Cimahi dengan masing-masing debit maksimum 90 m³/hari/sumur pada akuifer 50-150 m dan pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 260 m³/hari/sumur untuk kondisi air tanah rawan, debit maksimum 200 m³/hari/sumur untuk kondisi air tanah kritis (melalui eksplorasi) dan untuk kondisi rusak dengan debit maksimum 90 m³/hari/sumur (melalui eksplorasi).

1.2.4 Topografi

Topografi wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang relatif melandai ke arah selatan selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian di bagian utara mencapai 1.040 m dpl (Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara), yang berupa lereng kaki kompleks pegunungan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 m dpl (Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Secara umum, kondisi topografi dan kemiringan lahan Kota Cimahi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

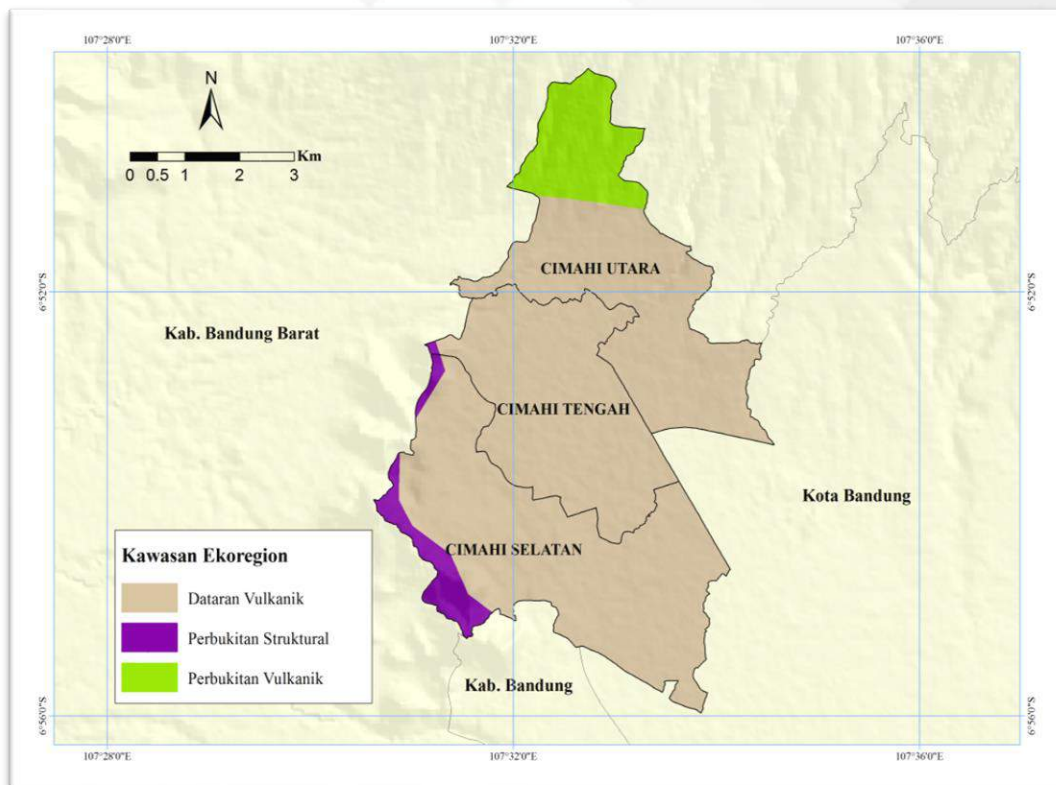
- a. Tingkat kemiringan (0 – 8)%, terletak di kawasan seluruh Kota Cimahi yang berada pada ketinggian antara 700 – 850 m dpl.
- b. Tingkat kemiringan (8 – 15)%, berada di kawasan utara Kota Cimahi, yaitu di Kel. Cipageran dengan ketinggian 850 – 1.075 m dpl.
- c. Tingkat kemiringan (15 – 40)%, terletak di kawasan Kec. Cimahi Selatan, tepatnya di perbukitan Gunung Bohong, Kel. Cibeber dan Kel. Leuwigajah pada ketinggian 725 – 800 m dpl.

Tabel 1.5 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total Km ²
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	
1	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	16,9
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	10,0
3	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	13,3
Total		36,20	1,40	1,33	0,99	0,28	40,2

(Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2019)

Secara umum di Kota Cimahi merupakan daerah dataran, hanya ada 1 kelurahan yang topografinya memiliki daerah perbukitan yaitu kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara. Dengan lahan yang tidak terlalu luas, daya jangkau pusat Pemerintahan Kota Cimahi ke kecamatan-kecamatan relatif singkat, rata-rata berjarak 1-2 km. Kota Cimahi berada pada lokasi strategis, dimana jarak ke Ibukota Provinsi hanya sejauh 10 km. Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Peta ekoregion Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Ekoregion Kota Cimahi

Dataran vulkanik hampir mencakup seluruh kecamatan di Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kondisi iklim di ekoregion dataran vulkanik secara umum relatif basah dengan curah hujan tahunan sedang hingga tinggi (2.000-4.000 mm) dengan suhu berkisar antara 22-26°C. Topografi berupa dataran dengan morfologi datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Material penyusun ekoregion ini umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi yang baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, semakin ke atas semakin halus). Proses penyebaran dan pengendapan material dibantu oleh aktivitas aliran sungai (fluvial) dan angin serta gravitasi berupa material jatuhan (*airborne deposit*).

Perbukitan struktural Cimahi terletak di sebagian wilayah administratif Kota Cimahi yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Perbukitan struktural merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusif dan batuan sedimen (batu gamping dan batu pasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (< 300 m) dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Kondisi iklim pada umumnya termasuk tropika basah, namun semakin ke arah timur cenderung semakin kering. Suhu udara relatif sejuk (20-22°C).

Perbukitan Vulkanik memiliki topografi berbukit dengan morfologi, amplitudo relief 0 – 30 m, dan kemiringan lereng yang curam (25 – 45%). Ekoregion ini sebagian besar dapat ditemukan di bagian lereng tengah gunung berapi yang ada. Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini didominasi oleh Podsolik dan Latosol yang memiliki tingkat kesuburan yang bervariasi. Sedangkan pada daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup tinggi dapat dijumpai tanah Andosol yang kesuburannya cukup tinggi. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, hutan, semak belukar, lahan pertanian dan permukiman (KLH, 2014).

1.2.5 Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatuapung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
	A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,1	-	-	1.654,30
Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11	-	989,62
Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96

(Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan)

Keterangan: A=Andesit, B= Basal, Pb=Breksi Tufaan lava, Batupasir, Konglomerat, Qyt= Tufa Batuapung, Qyd= Tufa Pasir, dan Qyl= Lava

Berdasarkan Tabel 1.6 jenis batuan diatas dapat diketahui bahwa jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan Tufa Berbatu apung dengan luas sebesar 2.682,59 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan Tufa Berbatu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batupasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung tangkuban perahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973).

1.2.6 Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,70 C – 23,20 C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6 C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan, 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700–4.000 mm per tahun dan luar wilayah 4.052,88 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m³ per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

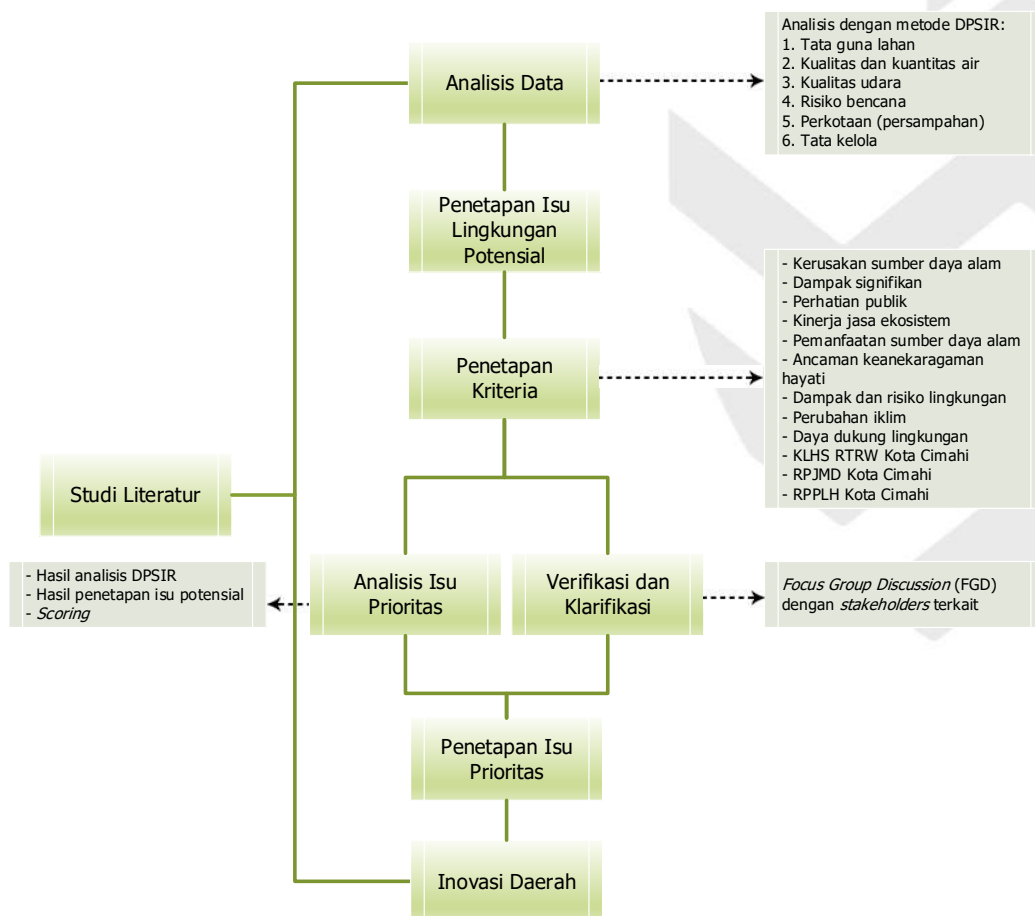
1.3 Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota Cimahi yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi.

Anggota tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri atas Dinas Pehubungan, Kantor Pertanaha, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pusat Statistik, Dinas Lingkungan hidup, Perwakilan masyarakat, Perwakilan akademisi.

Langkah-langkah penyusunan dan perumusan isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.5. Dalam alur tersebut, terlihat bahwa terdapat 5 (lima) langkah dalam penyusunan isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi, yakni studi literatur, penetapan isu lingkungan potensial, penetapan kriteria, verifikasi dan klarifikasi, serta penetapan isu lingkungan prioritas.

Langkah **studi literatur** meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Tahap ini sangat penting sebagai dasar berpijak dalam penentuan isu prioritas lingkungan di Kota Cimahi. Diantara literatur yang diacu adalah Visi Misi Kota Cimahi, DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2019, Renstra DLH Kota Cimahi tahun 2018-2022 dan *Sustainable Development Goals*.



Gambar 1.5 Alur Perumusan Isu Prioritas

Langkah **analisis data** dilakukan dengan metode DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Response*). Metode ini merupakan rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan *driving force* atau kekuatan pendorong, melalui *pressure* atau tekanan ke *state* atau status, dan memberikan *impact* atau dampak pada manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut mengarah pada *response* atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada.

Langkah **penetapan isu lingkungan potensial** merupakan hasil isu lingkungan dari studi literatur dan analisis DPSIR. Isu lingkungan tersebut merupakan isu yang tertuang di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi diperkuat dengan review literatur sebelumnya.

Langkah **penetapan kriteria** dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan prioritas. Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi dalam berbagai studi terkait lingkungan di Kota Cimahi, kriteria ini menjadi penting untuk membuat daftar isu lingkungan yang tidak terlalu panjang (*short listing*). Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD 2020 dari KLHK, UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga kriteria yang ditetapkan diantaranya kerusakan sumber daya alam, dampak signifikan, perhatian publik, kinerja jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, ancaman keanekaragaman hayati, dampak dan resiko lingkungan, perubahan iklim, daya dukung lingkungan, RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, dan KLHS RPJMD Kota Cimahi.

Langkah **penetapan isu prioritas** dilakukan dengan menggunakan metode *scoring* yang dilakukan oleh peserta *Focus Group Discussion* (FGD). Penilaian/*scoring* berdasarkan 4 (empat) kriteria yaitu (1) kerusakan sumber daya alam; (2) kerusakan keanekaragaman hayati; (3) pencemaran

atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek social, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup; (4) mendapat perhatian public luas dan perlu segera ditangani. Isu lingkungan potensial yang sudah ditetapkan kemudian dipilih lima isu dengan bobot tertinggi dengan mempertimbangkan kriteria penetapan. Analisis isu prioritas ini akan dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi untuk penetapan akhir isu prioritas lingkungan.

Langkah **verifikasi dan klarifikasi** dilakukan untuk mengerucutkan isu lingkungan potensial yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan potensial terhadap stakeholder lingkungan di Kota Cimahi. Metode yang dilakukan adalah dengan cara *Focus Group Discussion* yang kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi ini, isu prioritas yang sesungguhnya sudah dapat ditetapkan.

Langkah **inovasi daerah** merupakan jawaban dari permasalahan lingkungan. Dijelaskan mengenai inovasi apa saja yang dilakukan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi yang dilaksanakan setiap tahun memiliki maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi ini adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Kota Cimahi, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang dan sebagai laporan rutin Kepala Daerah yang menjamin akses informasi lingkungan hidup termutakhir secara ilmiah bagi publik.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2020 yang terdiri atas buku Ringkasan Eksekutif dan buku Laporan Utama adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik dalam bentuk data dasar dan analisis dari data yang disampaikan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai media informasi yang terbuka dan bertanggung jawab bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menentukan isu prioritas tahun 2021, status kualitas lingkungan hidup kritis dan perubahannya, faktor pendorong serta sumber tekanan terhadap lingkungan dan dampaknya serta upaya yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2021 (*Driving Force-Pressure-State-Response*).
4. Menyiapkan dokumen yang mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau secara sinergis dengan pelaku lain.

1.4.3 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021:

1. Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk semua sektor pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan selama kurun waktu tahun 2020 sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan program/kegiatan kedepan.
3. Mengembangkan laporan kualitas lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam pemaparan kondisi lingkungan serta dapat mendorong terjadinya partisipasi aktif dari stakeholder dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan.
4. Mengembangkan jaringan informasi pertukaran data dan informasi lingkungan sehingga dapat menuju terciptanya suatu standar pertukaran data lingkungan (*standard format exchange*).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah Kota Cimahi yang meliputi wilayah darat.
2. Ruang lingkup materi yang tercantum dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2021 dianalisis dengan metode D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Response*).
3. Ruang lingkup kedalaman data mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu (1) buku I, menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; (2) Buku II, merupakan buku yang berisi laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi, profil daerah Kota Cimahi, proses penyusunan dan perumusan isu prioritas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response* menyajikan analisis terhadap beberapa isu lingkungan seperti tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, perkotaan, dan tata Kelola.

BAB III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah berisi mekanisme perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan studi literatur hingga penetapan isu prioritas.

BAB IV Inovasi Daerah terdiri atas kajian dan uraian terhadap inovasi kebijakan, inovasi implementatif dan inovasi masyarakat/kearifan local dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi atau rencana tindak lanjut pengelolaan lingkungan hidup Kota Cimahi.



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021





BAB II

ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE* PADA ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA CIMAHI

Pada tahun 1994, *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD) mempublikasikan bahwa model awal dari indikator kondisi lingkungan adalah dalam susunan *Pressure-State-Response* (PSR), yang didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas manusia yang memberikan *pressure* terhadap lingkungan sehingga menyebabkan perubahan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Selanjutnya, *The European Environment* (EEA) mengembangkan model awal yang sudah ada menjadi DPSIR (*driving forces, pressure, state, impact, response*) model. Lima indikator utama dalam analisis DPSIR terhadap isu lingkungan hidup, yaitu:

1. *Driving Force / Drivers* (Faktor Pemicu), yaitu aktivitas antropogenik yang mungkin memiliki efek terhadap lingkungan.
2. *Pressure* (Tekanan), indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.
3. *State* (Kondisi lingkungan hidup), indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. *Impact* (Dampak), indikator ini menggambarkan dampak lingkungan yang muncul akibat adanya *pressure*.
5. *Response* (Respons), indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

2.1 Tata Guna Lahan

Lahan merupakan lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Lahan secara alami dapat terus berkembang tanpa adanya suatu intervensi (campur tangan) dari manusia. Demi memenuhi kebutuhan manusia baik sekarang maupun yang akan datang, upaya menata lahan yang tersedia harus dioptimalkan. Tata guna lahan mengatur penggunaan lahan melalui kebijakan dan program tata ruang. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Isu terkait tata guna lahan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan data tabel utama panduan tabel 1-tabel 17. Namun beberapa tabel tersebut tidak dilakukan analisis karena kondisi geografis di Kota Cimahi yang tidak terdapat lahan pada kondisi tersebut, seperti mangrove, padang lamun, hutan, tambang dan terumbu karang. Kondisi-kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting geografis dan fungsi lahan di Kota Cimahi sehingga tidak terdapat bahasan tersebut. Isu lingkungan tata guna lahan di Kota Cimahi bisa dipetakan terhadap tabel yang ada untuk memudahkan analisis, pemetaan isu tata guna lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Tata Guna Lahan

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
1	Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya	-	-	✓	-	-	
2	Tabel-2. Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama	-	✓	-	-	-	
3	Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status	-	-	-	-	-	Data Tidak Berubah
4	Tabel-4 Keadaan Flora dan Fauna	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
5	Tabel-5 Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
6	Tabel-6 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	-	-	-	✓	-	



No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
7	Tabel-7 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
8	Tabel-8 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering	-	-	✓	-	-	
9	Tabel-9 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
10	Tabel-10 Luas dan Kerapatan Hutan mangrove	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
11	Tabel-11 Luas dan Kerusakan Padang Lamun	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
12	Tabel-12 Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
13	Tabel-13 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	-	-	-	-	-	Data Tidak Berubah
14	Tabel-14 Jenis Pemanfaatan Lahan	-	-	-	-	-	Tidak Ada Perubahan Data
15	Tabel-15 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
16	Tabel-16 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi	-	-	-	-	✓	
17	Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
18	Tabel-24 Curah Hujan Rata-rata Bulanan	-	-	-	✓	-	
19	Tabel-43 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))	-	✓	-	-	-	
20	Tabel-44 Kebencanaan	-	-	-	✓	-	
21	Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	✓	-	-	-	-	
22	Tabel-47 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari	-	✓	-	-	-	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.1.1 Driving Force

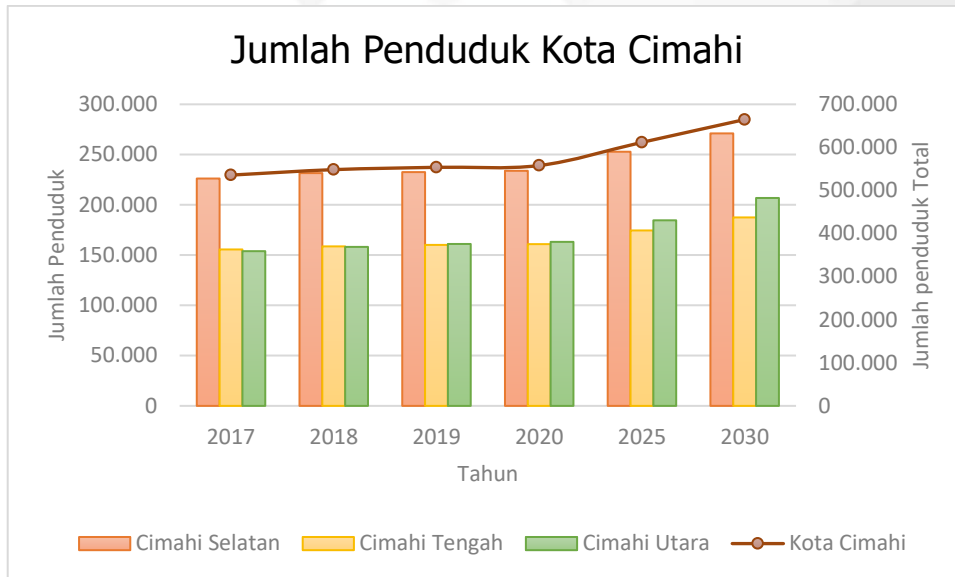
2.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu adanya perubahan lahan atau penambahan kebutuhan lahan permukiman di Kota Cimahi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang menimbulkan berbagai masalah termasuk meningkatnya permintaan perumahan/permukiman penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cimahi tahun 2021, jumlah penduduk Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tren pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Tabel 2.2 Jumlah dan Proyeksi Penduduk Kota Cimahi
Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*				Proyeksi Penduduk (Jiwa)**	
		2017	2018	2019	2020	2025	2030
1	Cimahi Selatan	226.167	231.560	232.555	233.850	252.822	271.054
2	Cimahi Tengah	155.610	158.663	160.134	160.906	174.511	187.472
3	Cimahi Utara	153.908	158.150	161.066	163.155	184.600	206.818
	Kota Cimahi	535.685	548.373	553.755	557.911	611.705	664.603

(Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020; **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.1 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2021)

2.1.1.2 Perda Kawasan Bandung Utara (KBU)

Adanya perubahan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat mengakibatkan adanya perubahan cakupan luasan KBU pada Kota Cimahi yang semula mencakup 2 Kecamatan (8 Kelurahan) menjadi 2 Kecamatan 9 Kelurahan (penambahan sebagian Kel. Cigugur Tengah). Hampir semua perumahan lama di Kota Cimahi yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) tidak memenuhi aturan, terutama soal syarat 30 persen Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Permukiman yang akan dibangun di wilayah KBU Kota Cimahi harus memenuhi syarat peraturan/izin lingkungan yang ketat, maka Perda Kawasan Bandung Utara menjadi faktor pemicu peningkatan kebutuhan lahan permukiman, izin lingkungan, serta peningkatan timbulan limbah.



Gambar 2.2 Kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi

(Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2017)

Perda Kawasan Bandung Utara (KBU) mengategorikan Kota Cimahi ke dalam zona L2, B4 dan B5, adapun penjelasannya :

- a. Zona L-2, adalah Zona Lindung Tambahan, meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan rawan bencana II dan I Gunung Api Tangkuban Parahu, kawasan perdesaan dengan fungsi resapan air tinggi

- b. Zona B-4, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air sedang
- c. Zona B-5, adalah Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air tinggi.

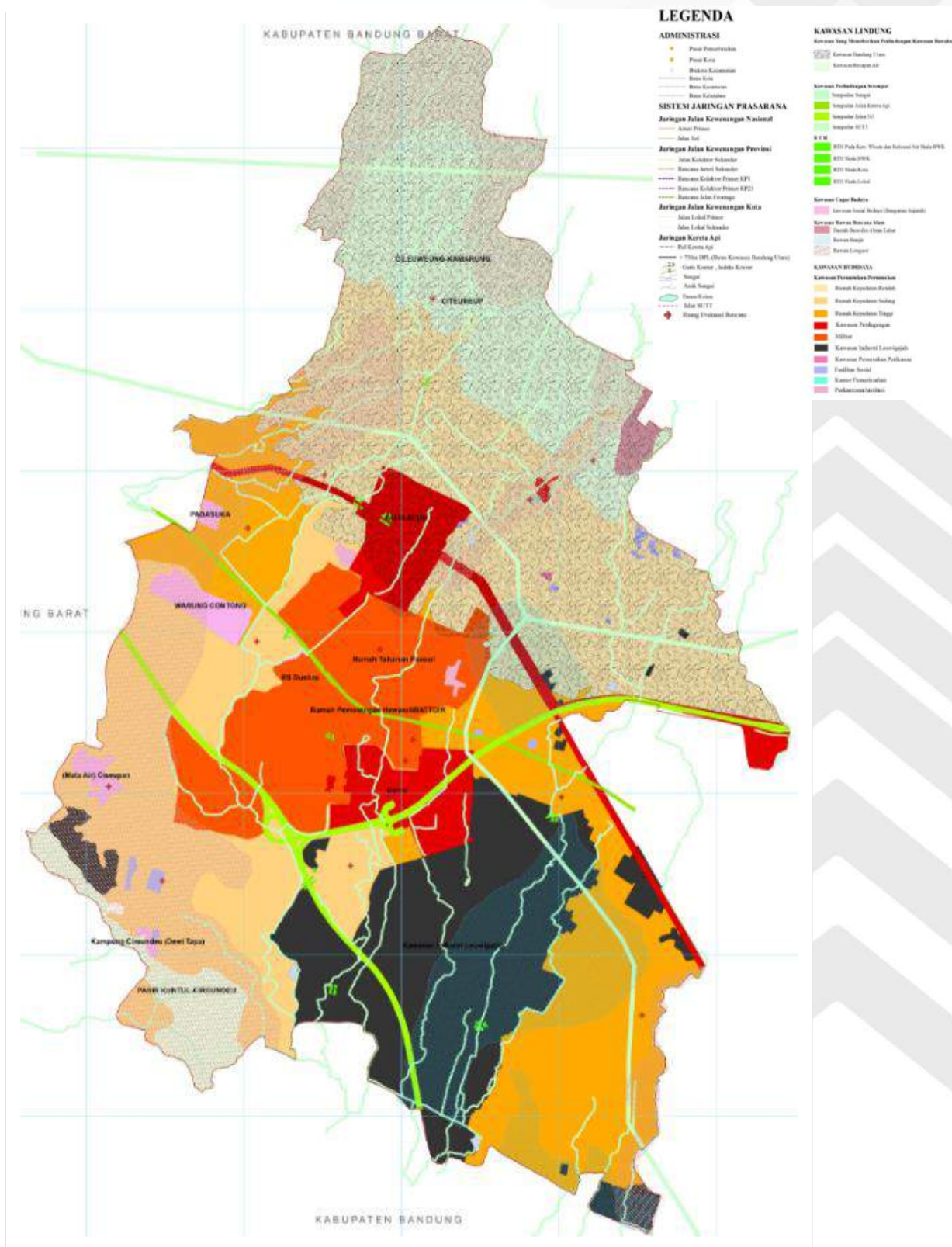
2.1.1.3 Arahan RTRW Kota Cimahi untuk Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota pada hakikatnya adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah kota. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi permasalahan utama suatu wilayah kota. Potensi, keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hendaknya terpetakan dalam rencana pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam RTRW Kota.

Berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, terdapat dua kebijakan dan strategi dalam pengembangan pola ruang di Kota Cimahi, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup (mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan). Sedangkan kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Arahan RTRW Kota Cimahi dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan peruntukkan lahan. Peningkatan lahan hijau dapat mempertimbangkan pola ruang Kota Cimahi yang dapat disesuaikan dengan program-program dari setiap



instansi Jika program pembangunan tidak sesuai dengan RTRW, akan menjadi faktor pemicu perubahan tata guna lahan, contohnya strategi pembangunan di Kota Cimahi. Adanya program pembangunan juga seharusnya memiliki izin lingkungan yang nantinya menjadi tekanan terhadap penggunaan lahan di Kota Cimahi Peta pola ruang Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Pola Ruang Kota Cimahi
(Sumber: RTRW Kota Cimahi 2012-2032, 2013)

2.1.2 Pressure

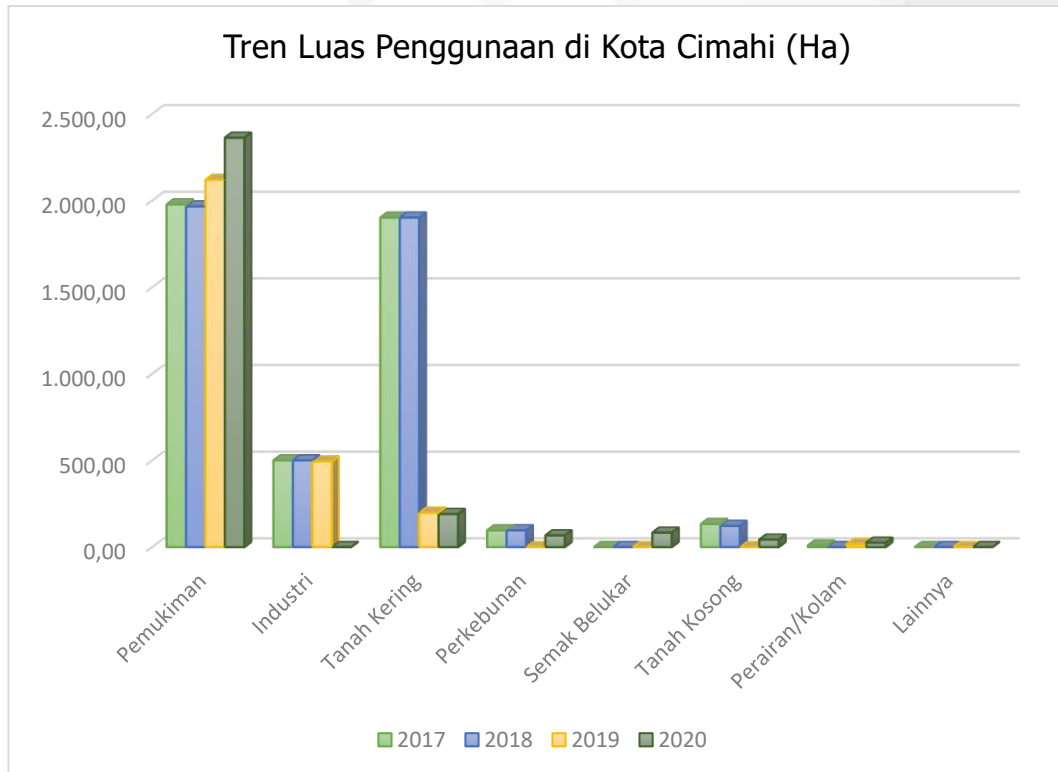
2.1.2.1 Peningkatan Permintaan Lahan Permukiman

Tekanan pertama yang mempengaruhi tata guna lahan adalah peningkatan lahan permukiman, sebagai akibat dari faktor pemicu perda Kawasan Bandung Utara, dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan semakin tingginya jumlah permintaan lahan permukiman, yang pada akhirnya berdampak pada kelangkaan lahan dan tingginya harga lahan. Pertumbuhan penduduk kota berasal dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu penambahan penduduk alamiah, migrasi, serta reklasifikasi. Selain memperhatikan penambahan penduduk alami, Kota Cimahi juga harus memperhatikan perpindahan penduduk (migrasi). Hal ini tentunya akan diikuti dengan perubahan pemanfaatan lahan, guna memenuhi kebutuhan permukiman dan infrastruktur dasar bagi penduduk. Perubahan lahan permukiman di Kota Cimahi tiap tahunnya terus meningkat, hal ini menjadi tekanan terhadap berbagai kondisi lahan seperti keadaan lahan, kepadatan, hingga kualitas tanah. Tren perubahan lahan permukiman tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.3 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Cimahi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan			
		2017	2018	2019	2020
1	Permukiman	1.977,92	1.966,38	2.120,05	2.363,00
2	Industri	500,575	500,575	494,43	N/A
3	Tanah Kering	1.901,77	1.901,773	198,64	191
4	Perkebunan	96,894	96,744	N/A	67,35
5	Semak Belukar	N/A	N/A	N/A	83,14
6	Tanah Kosong	133,509	122,329	N/A	42,92
7	Perairan/Kolam	9,13	N/A	16,69	25,05
8	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.4 Tren Luas Penggunaan di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020 dan Hasil Perhitungan, 2021)

2.1.2.2 Kota Cimahi Sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional

Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Faktor pemicu dari RTRW Kota Cimahi bersinggungan dengan strategi RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Disamping itu, dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 arah kebijakan Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan utama yang diarahkan yaitu meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Peningkatan perekonomian juga berperan sebagai pemicu yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi.



Sebaran kawasan perdagangan dan jasa di Kota Cimahi sebagian besar berada pada titik-titik keramaian atau pusat kota. Kawasan perdagangan tersebut tersebar di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Setiamanah. Sebaran ini cenderung memiliki pola jaringan jalan seperti halnya pasar, swalayan, toko-toko, serta kaki lima. Lokasi sebaran perdagangan dan jasa di Kota Cimahi sebagian besar berpusat di Kecamatan Cimahi Tengah sebagai area atau kawasan komersial. Persebaran kawasan industri ini dapat menekan status penggunaan lahan. Secara tidak langsung, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas tutupan lahan, dan kualitas tanah.

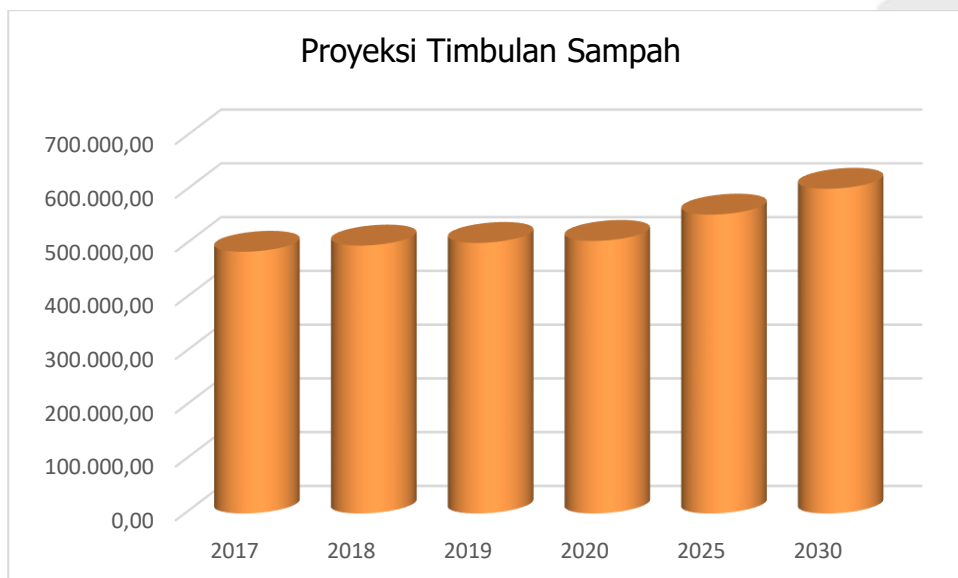
2.1.2.3 Pelanggaran Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan yang tidak ditaati, bisa menjadi tekanan pada keadaan lahan, nilai indeks kualitas tutupan lahan, dan kualitas tanah.

Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Data pengawasan izin lingkungan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-43. Hasil pengawasan menunjukkan terdapat 11 pemrakarsa yang telah taat izin lingkungan, 37 pemrakarsa yang tidak taat, dan 4 pemrakarsa yang sudah diberikan sanksi dari DLH Kota Cimahi.

2.1.2.4 Peningkatan Timbulan Limbah

Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu terhadap perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan aspek lingkungan lainnya, secara tidak langsung pertumbuhan penduduk akan diiringi dengan peningkatan timbulan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat (sampah). Beberapa penelitian menyebutkan perkiraan air yang akan menjadi air limbah dari hasil kegiatan manusia yaitu sebesar 70%-80%. Sedangkan timbulan limbah padat atau sampah untuk setiap sumber (rumah, kantor, pasar, jalan, dan sebagainya) berbeda-beda, mulai dari 0,05 liter/orang/hari hingga 3 liter/orang/hari. Data menunjukkan jumlah penduduk Kota Cimahi terus meningkat, tentu tidak sedikit limbah yang ditimbulkan dan akan menjadi tekanan terhadap kualitas tanah. Proyeksi timbulan limbah padat (sampah) di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.5.



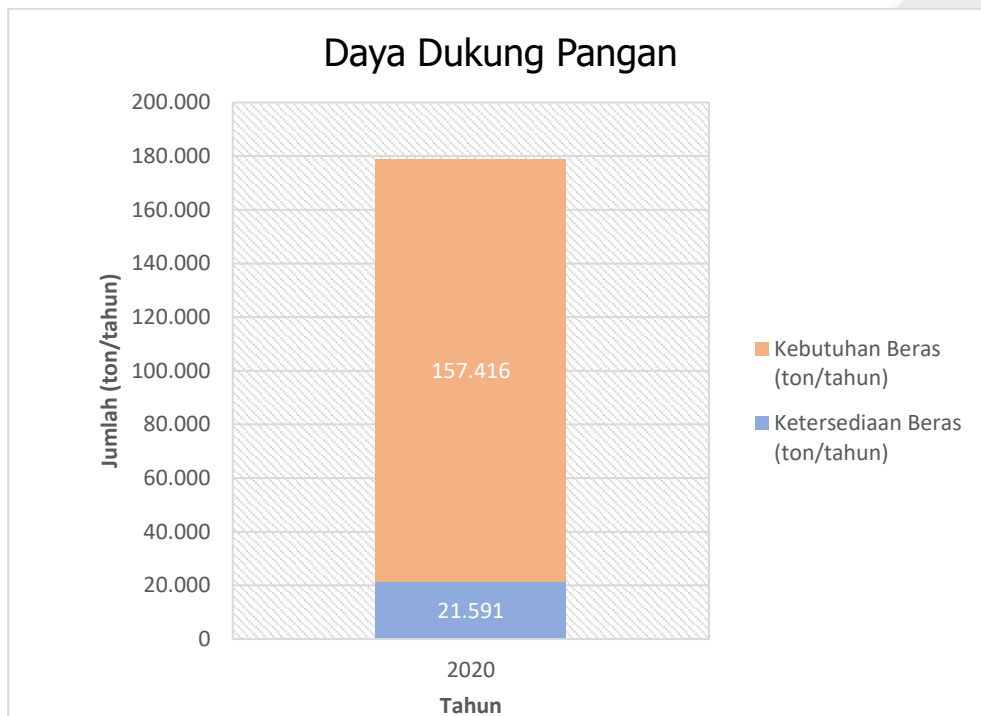
Gambar 2.5 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020 dan Hasil Perhitungan, 2021)

2.1.2.5 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan diperoleh dari selisih ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan di suatu wilayah. Daya dukung pangan menunjukkan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar lahan yang dimanfaatkan

untuk kebutuhan pertanian, maka semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk sebagai salah satu faktor pemicu tentunya berhubungan dengan daya dukung pangan di Kota Cimahi. Namun, Kota Cimahi dalam kemandirian pangan belum mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, daya dukung pangan Kota Cimahi sebagai berikut: Luas Panen sebesar 305 Ha, Produksi Tanaman Pangan sebesar 70,790 Ha/tahun, Ketersediaan Beras sebesar 21.590,95 ton/tahun, sedangkan Kebutuhan Beras sebesar 157.416 ton/tahun. Kondisi ini membuat daya dukung pangan menjadi tekanan terhadap keadaan lahan di Kota Cimahi.



Gambar 2.6 Daya Dukung Pangan Kota Cimahi
(Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020)

2.1.3 State

2.1.3.1 Keadaan Lahan Kota Cimahi

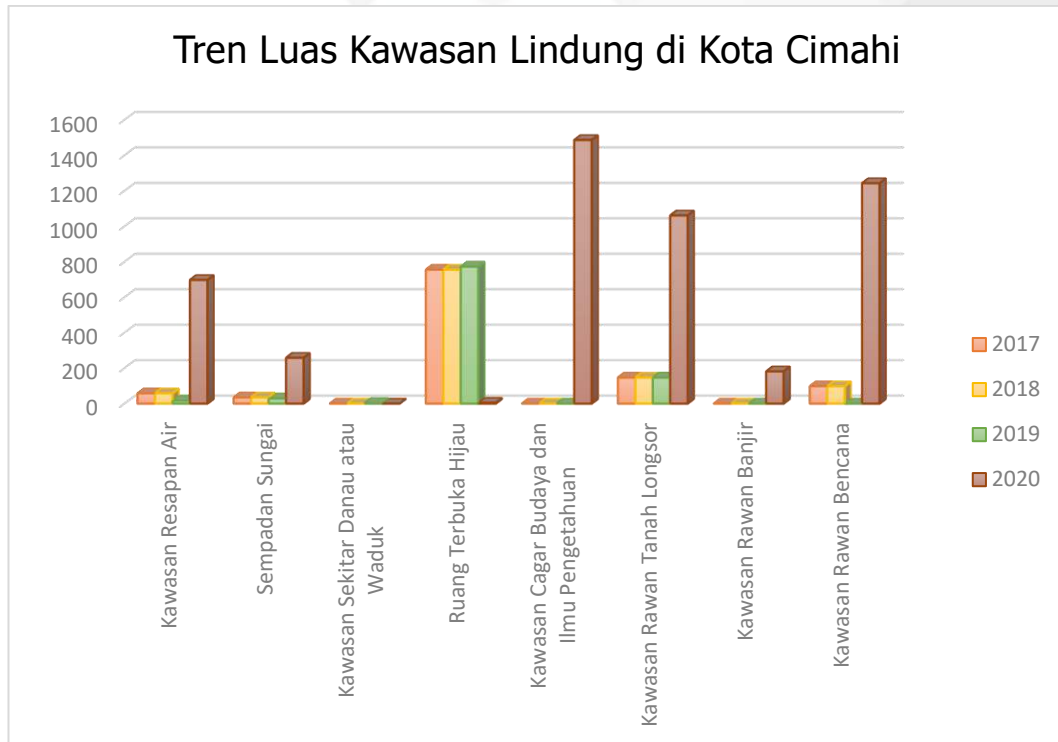
Lahan memegang peranan penting karena lahan merupakan wadah dari sumber daya yang ada di muka bumi. Kondisi lahan saat ini tidak terlepas

dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032 yang telah disebutkan, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Namun kondisi lahan Kota Cimahi saat ini telah terjadi perubahan. Perubahan luas kawasan lindung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.4 perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 komponen RTH berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Regulasi terkait komponen RTH yang semula diatur dalam PerMenPU, beberapa komponen RTH disesuaikan dengan PerMen ATR/BPN sehingga luas RTH berkurang dan luas Kawasan lainnya meningkat. Data luas kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan Lahannya tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-1.

Tabel 2.4 Perubahan Luas Kawasan Lindung Kota Cimahi

No.	Nama Kawasan Lindung	Luas Kawasan (Ha)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kawasan Resapan Air	58	58	16,69	697,12
2	Sempadan Sungai	35	35	29,2	258,26
3	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0	0	3,0	0
4	Ruang Terbuka Hijau	755,46	755,46	772,5	4,17
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	0	0	0	1.486,7
6	Kawasan Rawan Tanah Longsor	147	147	147	1.061,25
7	Kawasan Rawan Banjir	0	0	0	181,72
8	Kawasan Rawan Bencana	0	0	0	1.242,97

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.7 Tren Luas Kawasan Lindung di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2020)

Berdasarkan Gambar 2.7, luas kawasan lindung menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang perlu diperhatikan keberadaannya. Kawasan hutan lindung termasuk dalam zonasi perlindungan dalam RPPLHD Kota Cimahi, yaitu daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal. Kawasan-kawasan tersebut juga akan berpotensi bencana jika bentang alam dan/atau tutupan lahannya berubah. Didalam zona perlindungan tidak diperkenankan dilakukan pemanfaatan lahan. Di Kota Cimahi sendiri, tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan. Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, pengelolaan air tanah, penahan angin, dan lain sebagainya. Besarnya hutan kota di Kota Cimahi menunjukkan tren meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun

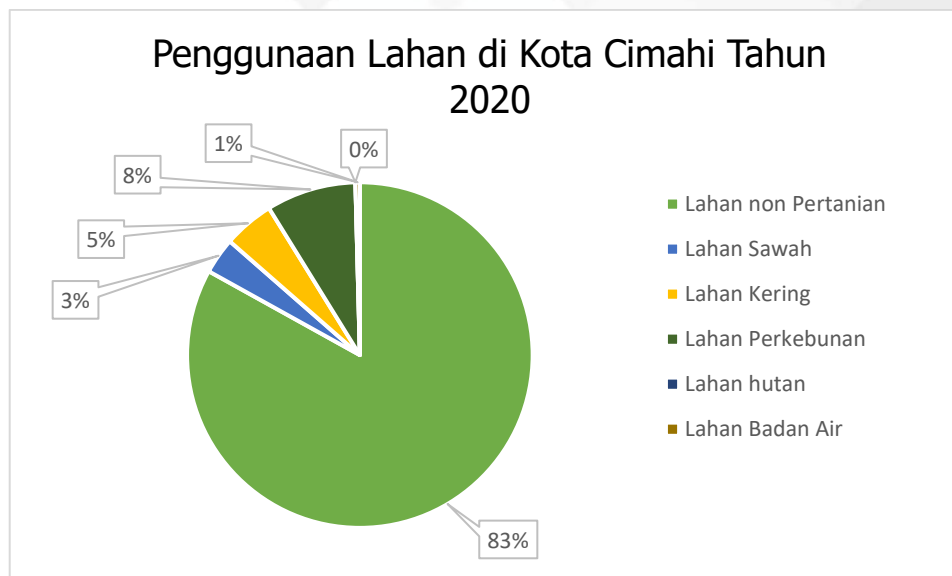
pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan karena komponen RTH yang dihitung berbeda dengan tahun sebelumnya.

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan melibatkan manajemen dan modifikasi lingkungan alam. Penggunaan lahan dan pengelolaan lahan memiliki kaitan yang erat dengan sumber daya alam seperti air, tanah, nutrisi, tanaman dan hewan. Luas wilayah menurut penggunaan lahan di Kota Cimahi pada tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-2. Penggunaan lahan di Kota Cimahi terjadi perubahan pada beberapa sektor yang cukup signifikan. Perubahan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.5. Berdasarkan Gambar 2.8 lahan non pertanian di tahun 2020 mencapai hingga >80% dari luas Kota Cimahi.

Tabel 2.5 Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Cimahi

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)			
		2017	2018	2019	2020
1	Lahan non Pertanian	1.540,18	3.501,93	3.492,21	3.343,73
2	Lahan Sawah	272	137,14	136	136
3	Lahan Kering	1.901,77	185	198,64	191
4	Lahan Perkebunan	0	0	184	338,33
5	Lahan hutan	0	0	6,67	0
6	Lahan Badan Air	14,31	N/A	3,48	16,67

(Sumber: DPUPR dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.8 Tren Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: DPUPR dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2020)

2.1.3.2 Kualitas Tanah

Lahan kering merupakan lahan yang tidak mengandung banyak air, sehingga biasanya lahan ini bergantung pada curah hujan. Lahan kering dapat digunakan sebagai lahan pertanian, lahan permukiman, lokasi industri, perkantoran, serta pembangunan lainnya yang menunjang kemajuan suatu daerah. Karena kualitas tanah biasanya banyak ditemui secara luas, maka evaluasi kualitas tanah dalam analisis ini difokuskan pada lahan kering saja. Terdapat 11 parameter uji pada tanah di Kota Cimahi, lokasi pengujian berada di 9 titik, yaitu Cileuweung, Paku Haji, Terobosan, Cimenteng 2, Lebaksaat, Ciuyah, Warung Muncang, Permana, dan Cimenteng Kecamatan Cimahi Utara. Hasil pengamatan kualitas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Hasil Pengamatan Kualitas Tanah di Kota Cimahi

No.	Parameter	Satuan	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan
1	Ketebalan Solum	Cm	<20	Memenuhi
2	Kebatuan Permukaan	%	>40	Memenuhi
3	Komposisi Fraksi	%koloid	<18	Memenuhi
4	Komposisi Fraksi	%pasir	>80	Memenuhi
5	Berat Isi	g/cm ³	>1,4	Memenuhi

No.	Parameter	Satuan	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan
6	Porositas	%	<30 ; >70	Memenuhi
7	Permeabilitas	Cm/jam	<0,7 ; >8,0	Cileuweung, Terobosan, Cimenteng 2, Lebaksaat, Ciuyah, Warung Muncang Permana, Cimenteng tidak memenuhi ambang kritis
8	pH	-	<4,5 ; <8,5	Memenuhi
9	DHL	mS/m	>4,0	Memenuhi
10	Redoks	mV	<200	Cileuweung, Paku Haji, Terobosan, Cimenteng 2, Lebaksaat, Ciuyah, Warung Muncang, Permana, Cimenteng tidak memenuhi ambang kritis
11	Jumlah Mikroba	Cfu/g tanah	<10 ²	Memenuhi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Secara umum kondisi lahan kering di Kota Cimahi masih banyak yang memenuhi ambang kritis, hanya 2 parameter saja yang tidak memenuhi ambang kritis yaitu Permeabilitas (8 lokasi tidak memenuhi) dan Redoks (9 lokasi tidak memenuhi).

2.1.3.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan, IKTL dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan luas administrasi. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Untuk menghitung IKTL dilakukan penghitungan tutupan hutan dengan menjumlahkan luas tutupan lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan dibagi luas wilayah provinsi. Klasifikasi luas tutupan hutan sebagai berikut:

- Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman.
- Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan



lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25%. Dihitung sebesar 0,6 dari tutupan hutan.

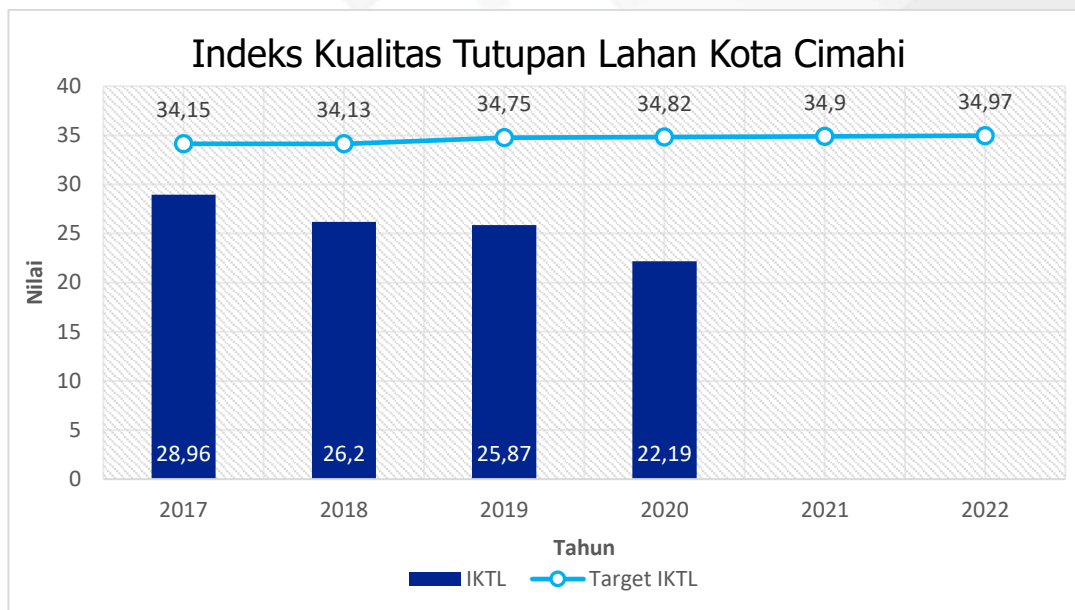
- c) Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Dihitung sebesar 0,6 dari tutupan hutan.

Perhitungan IKTL dilakukan dengan metode perhitungan IKLH berdasarkan S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Informasi IKTL dapat memberikan manfaat sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian kerusakan lingkungan, serta menjadi nilai tawar bagi pemerintah daerah dalam menarik sumber-sumber pendanaan lainnya. Tabel 2.7 menggambarkan perhitungan indeks kualitas tutupan lahan di Kota Cimahi tahun 2020. Gambar 2.9 menjelaskan indeks kualitas tutupan lahan Kota Cimahi tahun 2020 memiliki angka dibawah target capaian RPJMD Kota Cimahi 2017-2022.

Tabel 2.7 Klasifikasi Luas Tutupan Hutan di Kota Cimahi

Kategori	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)
a	Hutan Lahan Kering Primer	0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	0
	Hutan Rawa Primer	0
	Hutan Rawa Sekunder	0
	Hutan Mangrove Primer	0
	Hutan Mangrove Sekunder	0
	Hutan Tanaman	0
b	Semak/belukar	0
	Sempadan sungai	258,26
	Sempadan sungai sekitar danau/waduk	0
c	Sempadan pantai	0
	Lahan dengan kemiringan lebih dari 25%	0
	Ruang terbuka hijau	4,17
	Hutan Kota	237,12
	(Luas Tutupan Lahan)	299,73
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,19

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.9 Tren Nilai IKTL di Kota Cimahi
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

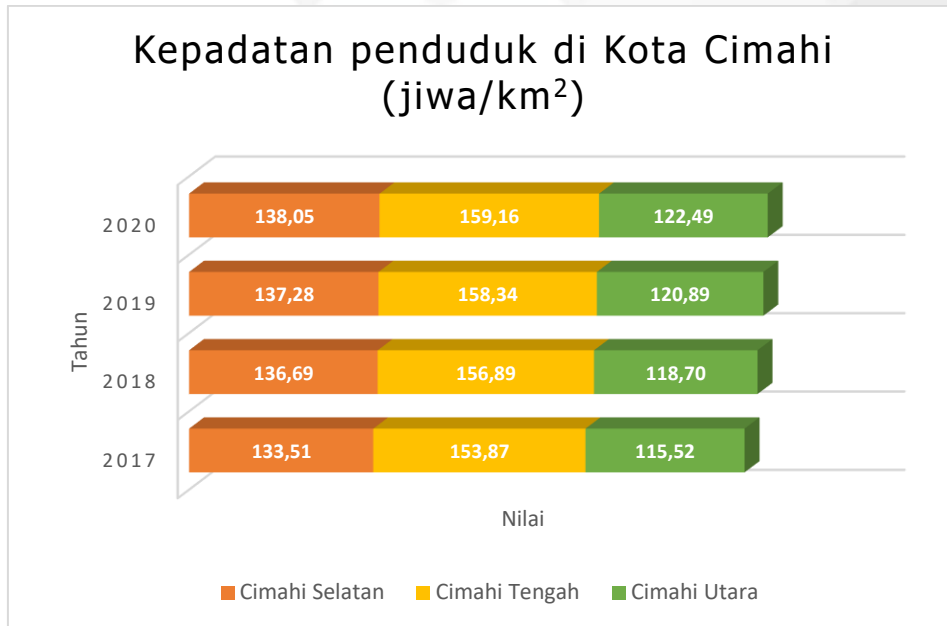
2.1.3.4 Kondisi Kepadatan Penduduk

Bergesernya fungsi lahan juga merupakan akibat dari meningkatnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika kepadatan penduduk terus menerus meningkat dan tidak terkendali, maka akan berdampak pada kualitas hidup penduduknya. Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
		2017	2018	2019	2020
1	Cimahi Selatan	133,51	136,69	137,28	138,05
2	Cimahi Tengah	153,87	156,89	158,34	159,16
3	Cimahi Utara	115,52	118,70	120,89	122,49

(Sumber: Profil Kependudukan Tahun 2020, 2020)



Gambar 2.10 Tren Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Profil Kependudukan Tahun 2020, 2020)

Kecamatan Cimahi Tengah yang merupakan wilayah terpadat. Kecamatan ini didominasi untuk permukiman, perkantoran dan pertokoan. Kecamatan Cimahi Tengah juga merupakan pusat Kota Cimahi dan urat nadi perekonomian Kota Cimahi. Kepadatan penduduk di wilayah Kota Cimahi perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Kecamatan Cimahi Utara yang dahulunya merupakan sentra pertanian sekarang menjadi daerah permukiman, perkantoran, pabrik dan sebagainya. Padahal Kecamatan Cimahi Utara seluruh wilayahnya termasuk ke dalam wilayah Kawasan Bandung Utara, dan telah direncanakan sebagai kawasan konservasi dan sebagai kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*) untuk wilayah cekungan Bandung. Wilayah Kecamatan Cimahi utara secara geografis berada di dataran yang lebih tinggi dan udara yang sejuk, sehingga menjadi daya tarik masyarakat dan investor untuk berinvestasi dalam bidang properti, yang pada akhirnya akan mengurangi luas lahan terbuka di Kota Cimahi.



2.1.4 Impact

2.1.4.1 Kejadian Bencana

Dampak dari perubahan penggunaan lahan, kepadatan, bahkan kualitas tanah yang terus memburuk yaitu terjadi beberapa kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran. Banjir dapat terjadi akibat jumlah air yang ada di danau, sungai, ataupun daerah aliran air lainnya melebihi kapasitas atau daya dukung kondisi eksisting di wilayah tersebut (daya serap oleh tanah/tanaman dan kondisi drainase). Sedangkan bencana longsor dapat terjadi akibat pergerakan tanah maupun pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Namun, jumlah vegetasi atau pepohonan yang cukup dapat mencegah atau meminimalkan dampak longsor tersebut. Sehingga lahan yang digunakan untuk ruang terbuka hijau tentu sangat bermanfaat dalam pengendalian bencana ini. Kondisi Kebakaran sering disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya konsleting listrik, dan kelapangan manusia. Faktor lain seperti Alih fungsi lahan permukiman yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah meningkatkan potensi bencana kebakaran. Data kejadian bencana dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-44.

2.1.4.2 Degradasi Lahan

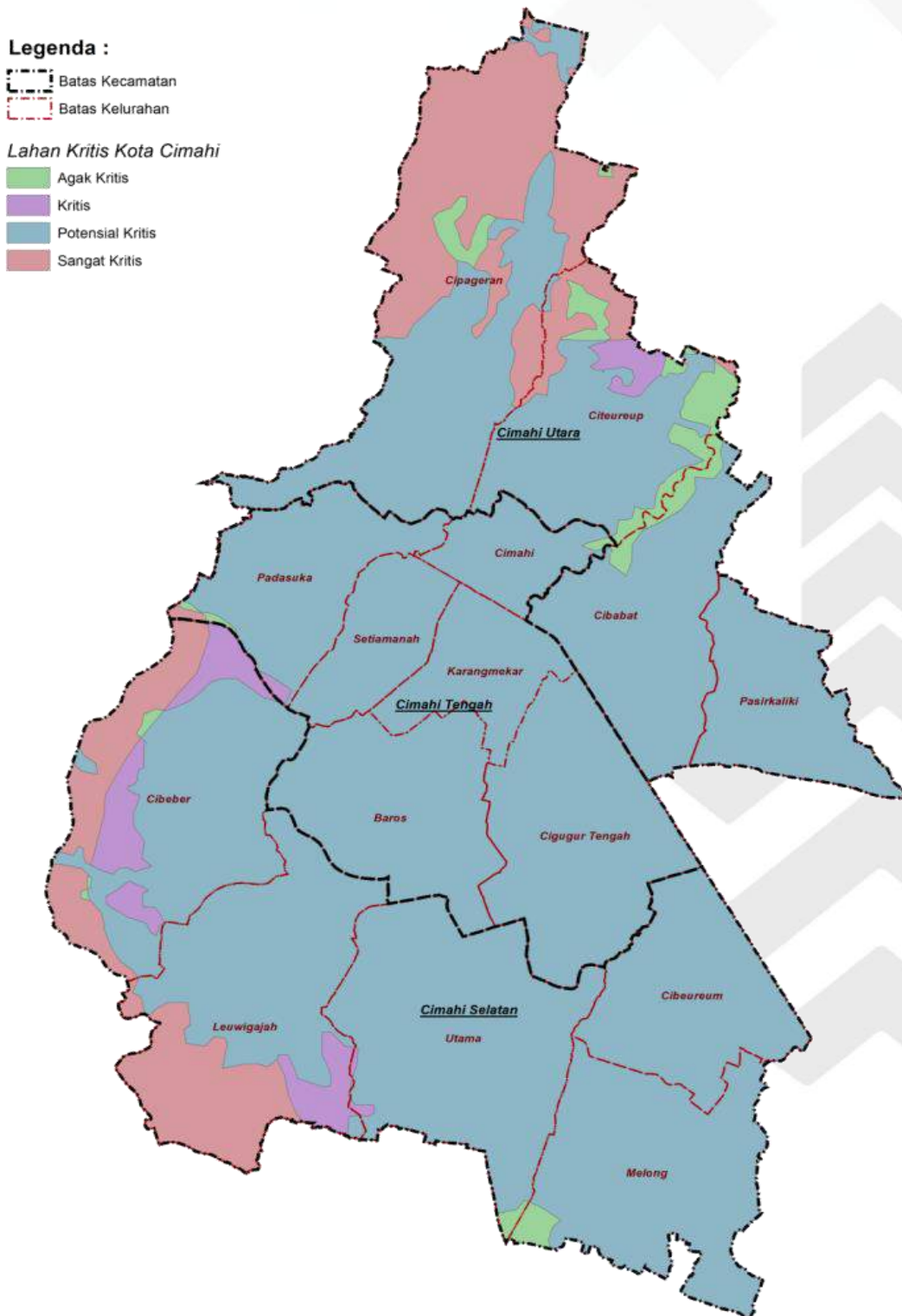
Kerusakan tanah merupakan proses atau fenomena penurunan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan. Kerusakan tanah bisa juga didefinisikan sebagai menurunnya fungsi tanah, baik sebagai sumber unsur hara tumbuhan maupun sebagai matriks tempat akar tumbuhan berjangkar dan menyimpan air. Kerusakan tanah diakibatkan dari berubahnya fungsi lahan, seperti berubahnya lahan pertanian menjadi lahan permukiman, lokasi industri, perkantoran, serta pembangunan lainnya yang menunjang kemajuan suatu daerah. Hasil pengamatan evaluasi kerusakan tanah di lahan kering dapat dilihat pada Lampiran III Tabel-8a. Terdapat 9 (Sembilan) lokasi yang diuji dan melebihi ambang kritis parameter derajat pelulusan air serta redoks. Secara umum luas lahan kritis di Kota Cimahi

dapat dilihat pada Tabel 2.9. Peta lahan kritis di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Tabel 2.9 Tren Lahan Kritis di Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Lahan Kritis (Ha)				Lahan Sangat Kritis (Ha)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Cimahi Utara	N/A	19,08	84,95	84,95	N/A	335,71	439,99	439,99
2	Cimahi Tengah	N/A	3,43	3,43	3,43	N/A	2,97	2,97	2,97
3	Cimahi Selatan	N/A	99,35	33,48	33,48	N/A	228,95	124,66	124,66

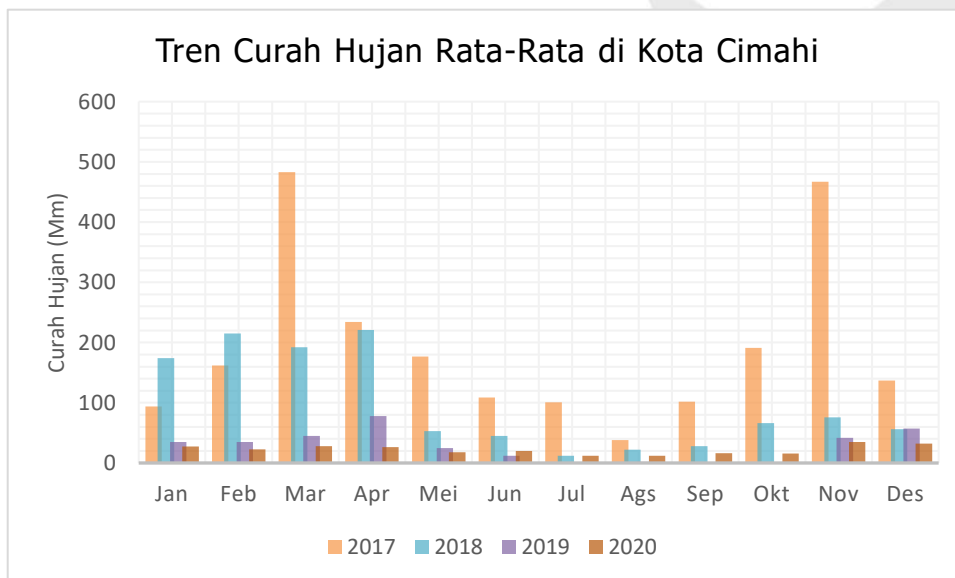
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.11 Lahan Kritis
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2020)

2.1.4.3 Perubahan Iklim

Berubahnya lahan akan menyebabkan perubahan habitat bagi jenis-jenis flora atau fauna tertentu yang dapat memicu perubahan ekosistem. Kota Cimahi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak, data keadaan flora dan fauna di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-4. Keberagaman hayati bisa memberikan banyak manfaat. Menurut Samsodin (dalam Kusmawati, 2010) tanaman Angsana (*Pterocarpus indicus*), dan Beringin (*Ficus benyamina*) berfungsi sebagai penyerap timbal (Pb). Ruang terbuka hijau juga berperan dalam produksi gas oksigen (O₂) yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup (manusia dan hewan). Perubahan penggunaan lahan selain menambah proporsi luas lahan terbangun, juga mengubah tutupan lahan. Perubahan lahan akan mempercepat proses perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi apabila kondisi rata-rata parameter iklim berubah, seperti suhu udara, curah hujan, kelembaban, dan lainnya. Menurut BMKG tahun 2021, suhu udara di Kota Cimahi di tahun 2020 berkisar antara 22-25⁰C. Bahkan curah hujan rata-rata di Kota Cimahi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tren Curah hujan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.12.



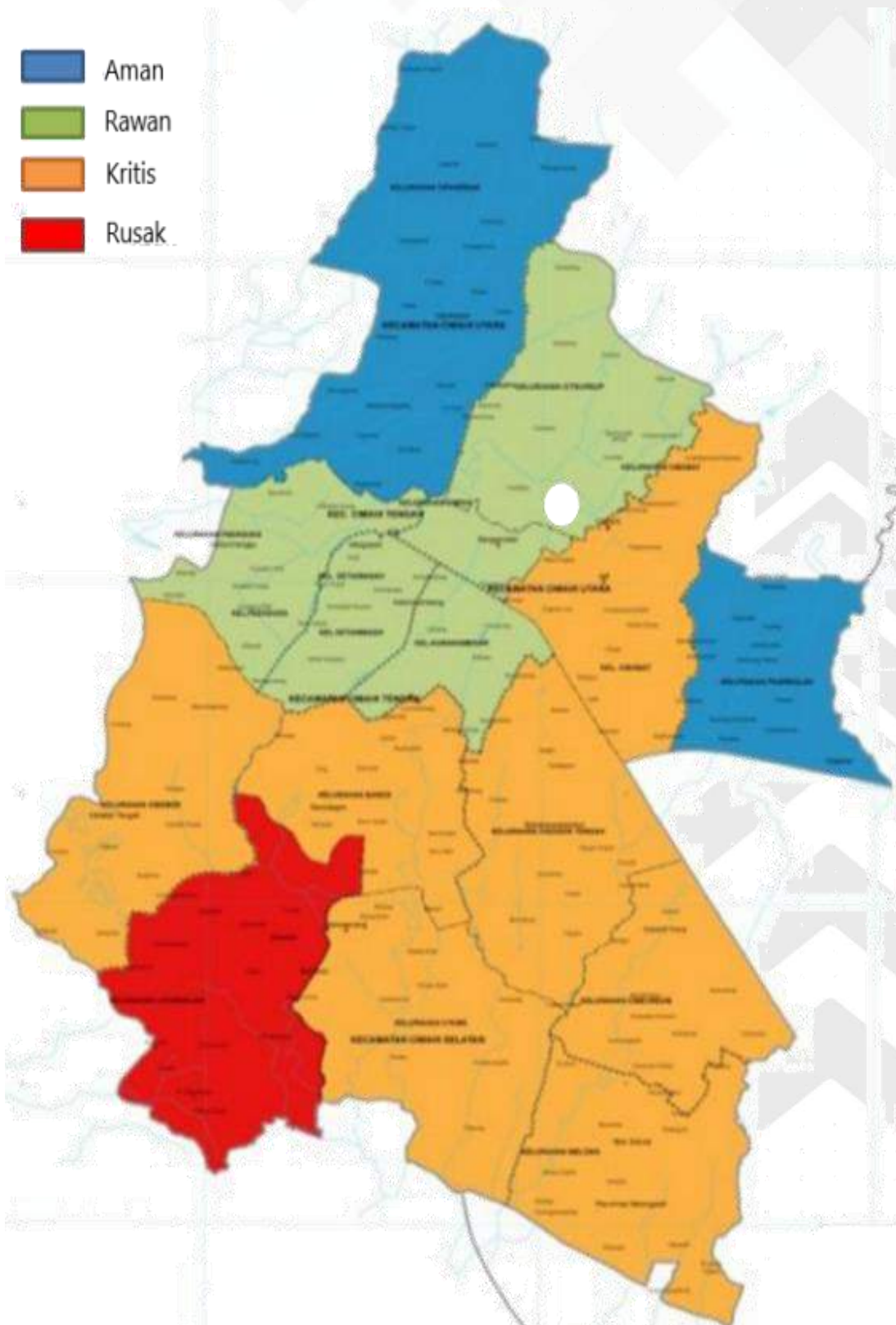
Gambar 2.12 Tren Curah Hujan Rata-Rata di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.1.4.4 Penurunan Muka Air Tanah

Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Potensi pemanfaatan air di Kota Cimahi berasal dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi). Pengambilan air tanah umumnya dilakukan sebagian besar dengan menggunakan sumur bor untuk usaha industri, usaha komersial lainnya atau masyarakat, dimana beberapa pengambilan air tanah telah melebihi kapasitas yang diizinkan dalam SIPA/Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

Berdasarkan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, sejumlah kawasan di cekungan Bandung yang sudah masuk dalam zona merah diantaranya kawasan industri di Kota Cimahi dan Bandung bagian selatan dan di Rancaekek Kab. Bandung. Sesuai peta konservasi air tanah, kawasan Cimahi Selatan seperti di Leuwigajah, Rancaekek dan Bandung Selatan termasuk zona merah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tahun 2008 lalu, dari potensi imbuhan air tanah di Cekungan Bandung sebesar 117 m³/tahun, 55 persen dari jumlah tersebut sudah dipergunakan, sebagian besar diambil oleh industri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung (ITB), penurunan muka tanah terjadi di sejumlah titik di Bandung, termasuk Cimahi dapat mencapai 1-20 cm per tahun. Kota Cimahi terutama di kawasan industri seperti di Kelurahan Leuwigajah mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penurunan muka air tanah.

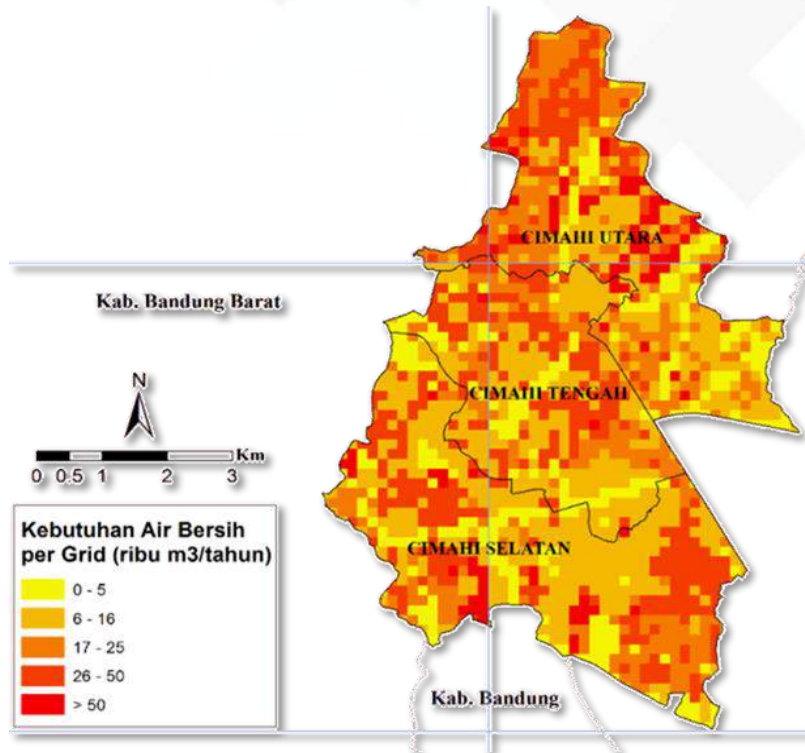


Gambar 2.13 Peta Penurunan Muka Air Tanah
(Sumber: Hastuti, 2017)

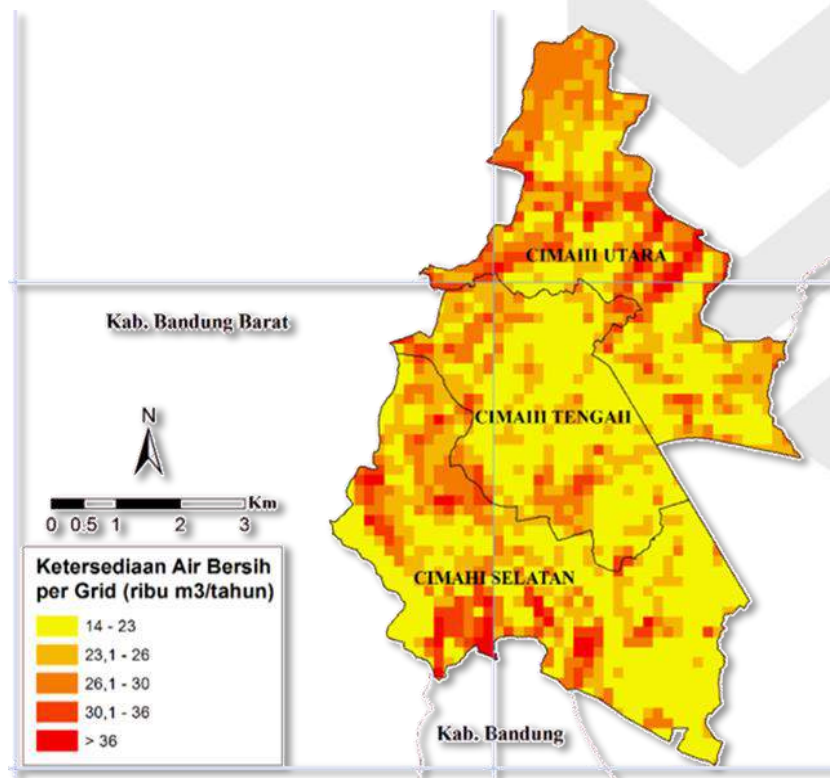
2.1.4.5 Kekurangan Air Bersih

Lahan yang digunakan untuk pembangunan memang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi. Namun, jika pembangunan tersebut tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, tentu tujuan pembangunan tersebut tidak tercapai secara optimal di masa mendatang atau bahkan merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak terkait tata guna lahan ini dapat berupa keterbatasan air bersih. Alasan isu ini dapat menyebabkan terbatasnya air bersih yaitu ketika jumlah penduduk terus meningkat, secara tidak langsung jumlah air yang digunakan pun meningkat, termasuk penggunaan air tanah. Tidak hanya penggunaan untuk aktivitas domestik tetapi juga aktivitas non domestik seperti industri. Eksploitasi air tanah oleh industri dan masyarakat serta alih fungsi lahan serapan menjadi kawasan terbangun (kawasan beton) memperburuk kondisi ini.

Pada Gambar 2.14, terlihat kebutuhan air bersih di Kota Cimahi Tahun 2015 beragam di setiap wilayahnya, bergantung jumlah penduduk dan peruntukan wilayahnya. Jika mempertimbangkan pasokan air bersih yang tersedia, tidak semua wilayah mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Gambar 2.15). Pasokan air bersih yang cukup berada di sebagian kecil Cimahi Utara dan sebagian kecil Cimahi Selatan.

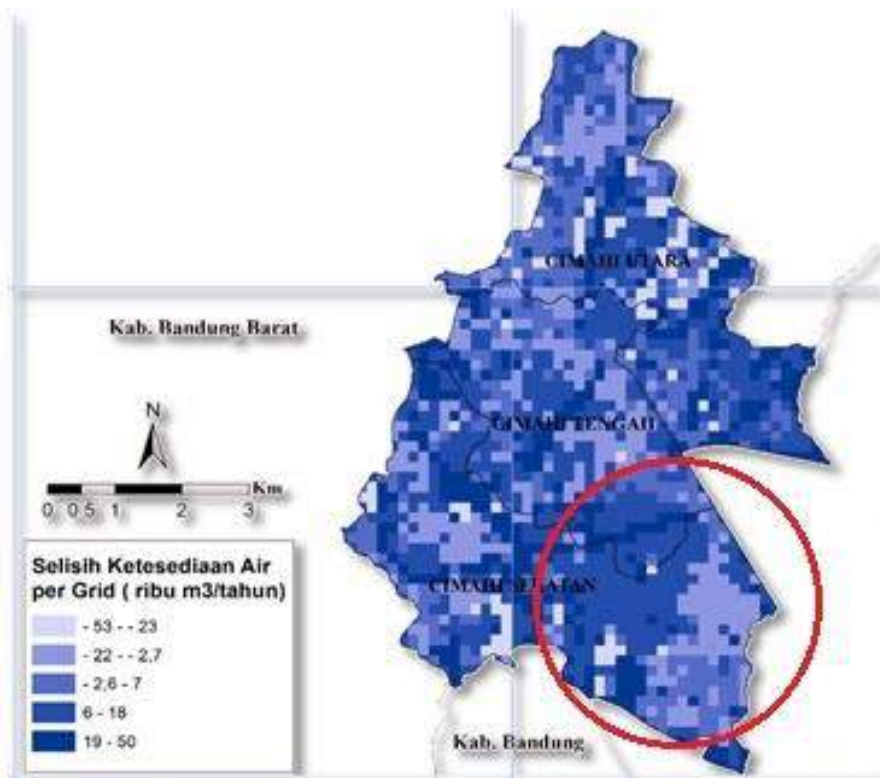


Gambar 2.14 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)



Gambar 2.15 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

Aspek keterjangkauan air bersih tidak akan terpenuhi. Dapat dilihat pada Gambar 2.16 wilayah yang tidak memenuhi kebutuhan air bersih penduduknya. Wilayah yang paling krisis air bersih khususnya air tanah ini sebagian besar berada di Kelurahan Melong dan Cibeureum, sebagian kecil Kelurahan Leuwigajah dan Cibeber, Setiamanah, Cigugur Tengah, dan Cipageran.



Gambar 2.16 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

Jika kekurangan air bersih sudah terjadi, maka aspek pembangunan berkelanjutan tidak akan terealisasi. Tidak menutup kemungkinan krisis air bersih akan semakin meluas, mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah. Dalam RTRW tahun 2012-2032, sebagian wilayah Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis fungsi sosial yang didukung dengan padatnya sebaran penduduk. Dampak ini akan terus terjadi jika pengawasan eksploitasi air tanah masih belum ditingkatkan.

2.1.5 Response

2.1.5.1 Penghijauan dan Pengoptimalan RTH

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi perubahan tata guna lahan adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyebutkan penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan, sedangkan reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Selain untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, vegetasi ini juga dapat meminimalkan risiko banjir karena aliran air mampu diserap oleh akar-akar tanaman. Upaya penghijauan dilakukan pemerintah Kota Cimahi pada setiap kecamatan. Pada tahun 2020, realisasi penghijauan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.10. Penambahan pepohonan atau vegetasi tersebut sangat perlu dilakukan di sekitar permukiman dan industri.

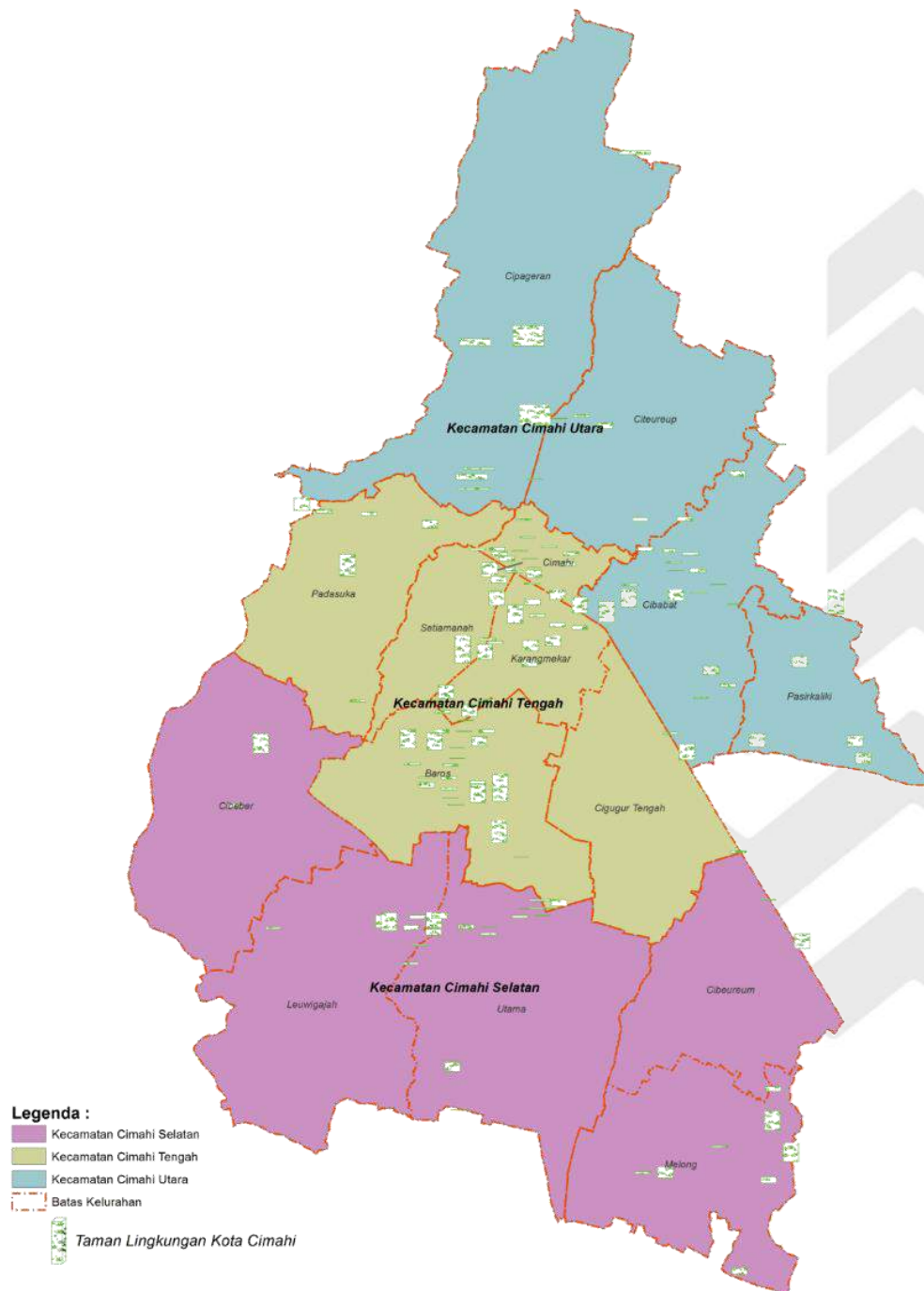
Tabel 2.10 Realisasi Penghijauan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penghijauan		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	Cimahi Utara	0,15	0,01806	301
2	Cimahi Tengah		0,09246	1541
3	Cimahi Selatan		0,02424	404

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Di Kota Cimahi, tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan. Kota Cimahi mengandalkan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, dan sebagainya. Peningkatan RTH di wilayah Kota Cimahi terus diupayakan oleh pemerintah Kota Cimahi, guna memenuhi 30% lahan untuk RTH sesuai arahan pada RTRW yang telah ada untuk lokasi-lokasi penambahan RTH di Kota Cimahi. Diharapkan dengan adanya realisasi penghijauan ini dapat menyeimbangkan ekosistem

yang ada antara lingkungan sosial dan ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Kota Cimahi. Upaya yang dilakukan dalam penambahan ruang terbuka hijau ini berupa taman lingkungan dengan persebaran seperti yang terlihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Sebaran Taman Lingkungan
(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2019)

2.1.5.2 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Alam

Perkembangan pariwisata memiliki peran yang banyak dalam memberikan kontribusi pada perekonomian suatu kota. Namun, seiring dengan berkembangnya pariwisata, muncul dampak negatif bagi lingkungan sekitar daerah tersebut karena adanya eksploitasi pada sumber daya alam. Menurut Arkhovi (2017), bahwa ekowisata muncul sebagai langkah yang dapat menekan dampak negatif dari pariwisata. Perda Kota Cimahi No. 1 tahun 2015 menyebutkan pariwisata berbasis ekologis (Ekowisata) adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam serta kawasan budaya. Berdasarkan www.cimahikota.go.id Pemerintah Kota Cimahi akan mengembangkan ekowisata di Kampung Torobosan, RT 02/12, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Lahan yang akan digarap adalah objek Desa Wisata Cimahi Torobosan (Dewi Citos).

Di Kota Cimahi masih terdapat masyarakat adat yang tinggal di Kampung Cireundeu yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajahlangu. Masyarakat adat Kampung Cireundeu memiliki keunikan dalam pedoman prinsip hidup yang mereka anut yaitu "*Teu Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat*". Pedoman ini memiliki arti supaya manusia ciptaan Tuhan tidak bergantung pada satu bahan makanan pokok saja, bahkan masyarakat Kampung Adat Cireundeu memiliki alternatif lain sebagai bahan makanan pokok yaitu ketela atau singkong yang diolah menjadi beras singkong (rasi). Upaya Pelestarian Kampung Adat Cireundeu dimaksudkan untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat adat, namun juga mempertahankan keberadaan ruang terbuka

hijau di Kota Cimahi. Masyarakat adat menjaga dan melestarikan kampung ini supaya tidak berubah fungsi lahan.

Dilansir dari www.cimahikota.go.id masyarakat adat Cireundeu mengagungkan kearifan lokal dengan cara menjunjung tinggi 4 unsur penting alam yaitu tanah, air, matahari, dan udara. Kampung Cireundeu terkenal dengan Desa Wisata Ketahanan Pangan (Dewi Tapa) sebab masyarakat Kampung Cireundeu mampu membangun kemandirian pangan berkat perilaku mereka yang bersahabat dengan alam. Singkong sebagai bahan makanan pokok banyak dibudidayakan. Ada dua macam singkong yang ditanam masyarakat Kampung Cireundeu yaitu singkong karikil dan singkong yang biasa beredar dipasaran. Tidak hanya singkong, masyarakat Kampung Cireundeu juga membudidayakan umbi ganyong, talas, dan umbi-umbi lainnya. Beragam tanaman tersebut bisa menjadi bahan makanan hingga sebagai sumber pendapatan mereka. Maka pelestarian kampung adat ini menjadi response dari beberapa isu lingkungan yang telah disebutkan, seperti daya dukung pangan, pemanfaatan ruang, kejadian bencana, degradasi lahan, serta perubahan iklim.

2.1.5.3 Penetapan Status Kerusakan Tanah

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya dan tanpa adanya pengelolaan tanaman yang kurang tepat akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan dalam memproduksi hasil pertanian dan menimbulkan lahan kritis. Penentuan tingkat kekritisan lahan mengacu pada Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dephut, SK.167/V-SET/2004, berupa skoring dari beberapa parameter. Informasi mengenai jumlah dan distribusi lahan kritis yang akurat dan *ter-update* mempunyai arti sangat penting terhadap tekanan dari peningkatan permintaan lahan permukiman, pelanggaran izin lingkungan, peningkatan timbulan limbah (sampah), serta degradasi lahan dan kejadian bencana tanah longsor.

2.1.5.4 Pengembangan Hunian Vertikal

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, wilayah Kota Cimahi yang termasuk ke dalam Cekungan Bandung harus bisa mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi lahan. Arahan pembangunan permukiman yang dimaksud yaitu pengembangan hunian vertikal. Pendirian rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) bisa menjadi solusi dari peningkatan permintaan lahan permukiman di Kota Cimahi. Menurut Diskominfoarpus Kota Cimahi (2018), bahwa Kota Cimahi telah memiliki tiga unit hunian berkonsep vertikal, diantaranya Rusunawa Leuwigajah, Rusunawa Melong, serta Rusunawa Cigugur Tengah.

2.1.5.5 Penerapan Vertikultur

Lahan yang terbatas dan kebutuhan pangan yang terus meningkat menjadi perkara yang kerap muncul dalam permasalahan suatu kota. Salah satu solusi yang dapat mengoptimalkan lahan sempit untuk bercocok tanam adalah vertikultur atau *vertical culture*. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam diruang/lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Struktur yang mudah dan bahan pembuatan yang mudah didapat menjadikan vertikultur sebagai solusi bercocok tanam di rumah-rumah. Dikutip dari www.sulbar.litbang.pertanian.go.id tahun 2021, sistem pertanian vertikultur memiliki kelebihan seperti menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, mudah dalam hal monitoring, serta mudah dipindahkan. Rumah tangga di Kota Cimahi dapat menerapkan sistem pertanian ini sehingga dalam beberapa tahun kedepan sebagian hasil pertanian disumbangkan melalui vertikultur sebagai *urban farming*.

2.1.5.6 Pengawasan Izin Lingkungan

Eksplorasi air tanah bukan lagi isu yang asing bagi masyarakat terutama pemerintah Kota Cimahi. Lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi air tanah industri ini menjadi salah satu penyebab tak langsung kasus



kekurangan air bersih. Sehingga diharapkan dengan peningkatan pengawasan masalah ini, jumlah kekurangan air bersih di Kota Cimahi dapat dikurangi. Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Pengawasan izin lingkungan menjadi jawaban terhadap perda Kawasan Bandung Utara, kota pusat kegiatan nasional, pelanggaran izin lingkungan, peningkatan timbulan limbah, bahkan penurunan muka air tanah, dan kekurangan air bersih.

2.1.5.7 Diversifikasi Pangan untuk Mewujudkan ketahanan Pangan pada Masa Pandemi

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan diamanatkan dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana didalamnya telah dinyatakan bahwa ketahanan pangan diartikan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kota Cimahi sebagai sebuah kota yang berpenduduk sangat padat dengan luas wilayah yang relatif sempit, memiliki tugas yang cukup berat untuk membangun ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 yang terjadi, mengubah aktivitas manusia. Sektor yang harus tetap bisa bertahan selama pandemi terjadi adalah pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat dalam menanggulangi keadaan yang terjadi dengan mengadakan kegiatan pelatihan untuk membangun ketahanan pangan melalui pengolahan produk pertanian.

2.2 Kualitas Air

Seperti yang kita tahu dan kita rasakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang selalu ada di setiap kebutuhan sehari-hari manusia. Keberlanjutan sumber daya air berkaitan dengan 3 (tiga) faktor yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sumber daya air dikelola dengan menjaga siklus daur hidrologi. Apabila sumber daya air tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan maupun kehancuran ekosistem di kemudian hari. Air sungai dan air tanah merupakan sumber air baku yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kota Cimahi. Walaupun beberapa masyarakat telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kedua sumber air tersebut masih digunakan oleh sebagian besar penduduk.

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan anak sungainya yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum, dan Cisangkan. Mata air yang ada di Kota Cimahi adalah Mata Air Cikuda dan Mata Air Cisintok. Berikut ini penjelasan dan analisis faktor pemicu, tekanan, kondisi eksisting, dampak, serta upaya dalam mengelola kualitas air di Kota Cimahi. Data pendukung untuk analisis isu kualitas air dapat menggunakan tabel 22 sampai dengan tabel 30 tabel utama panduan penyusunan DIKPLHD, untuk memudahkan menganalisis maka pemetaan tabel tersebut terhadap analisis D-P-S-I-R dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Kualitas Air

No	Judul Tabel	Analisis				Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	
1	Tabel-2. Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama	-	✓	-	-	-
2	Tabel-22 Kualitas Air Sumur	-	-	✓	-	-

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
3	Tabel-23 Kualitas Air Laut	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
4	Tabel-24 Curah Hujan Rata-rata Bulanan	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
5	Tabel-25 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum	-	-	✓	-	-	
6	Tabel-26 Kualitas Air Hujan	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
7	Tabel-27 Kondisi Sungai	-	-	-	-	-	Data Tidak Berubah
8	Tabel-28 Kondisi Danau/Waduk/Situ/ Embung	-	-	-	-	-	Data Tidak Berubah
9	Tabel-29 Kualitas Air Sungai	-	-	✓	-	-	
10	Tabel-30 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/E mbung	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
11	Tabel-31 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	✓	-	-	-	-	
12	Tabel-32 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
13	Tabel-33 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	-	-	-	✓	-	
14	Tabel-34 Jumlah Rumah Tangga Miskin	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
15	Tabel-35 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar	✓	-	-	-	-	
16	Tabel-42 Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3	-	-	-	-	✓	
17	Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	✓	-	-	-	-	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.2.1 Driving Force

2.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Hal pertama yang menjadi faktor pendorong/pemicu tentang pengelolaan kualitas air ialah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan

penduduk yang tidak diiringi dengan pengendalian terkait pengelolaan lingkungan dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas air di Kota Cimahi. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 1,66 persen, lebih tinggi dibandingkan LPP Provinsi Jawa Barat yaitu 1,48 persen dan nasional yaitu 1,31 persen. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mempengaruhi peningkatan berbagai aktivitas manusia. Munculnya berbagai aktivitas domestik serta meluasnya lahan permukiman dan lahan perdagangan/jasa memperbesar peluang terjadinya pencemaran air. Contoh kecil hubungan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan penurunan kualitas dan kuantitas air yaitu apabila kebutuhan (*demand*) air melebihi jumlah yang tersedia pada suatu periode tertentu, maka masyarakat akan mengalami kekurangan air bersih. Lebih lanjut lagi jika masuknya bahan pencemar ke dalam air permukaan dengan jumlah diatas ambang batas yang ditetapkan maka kualitas air akan terpengaruh.

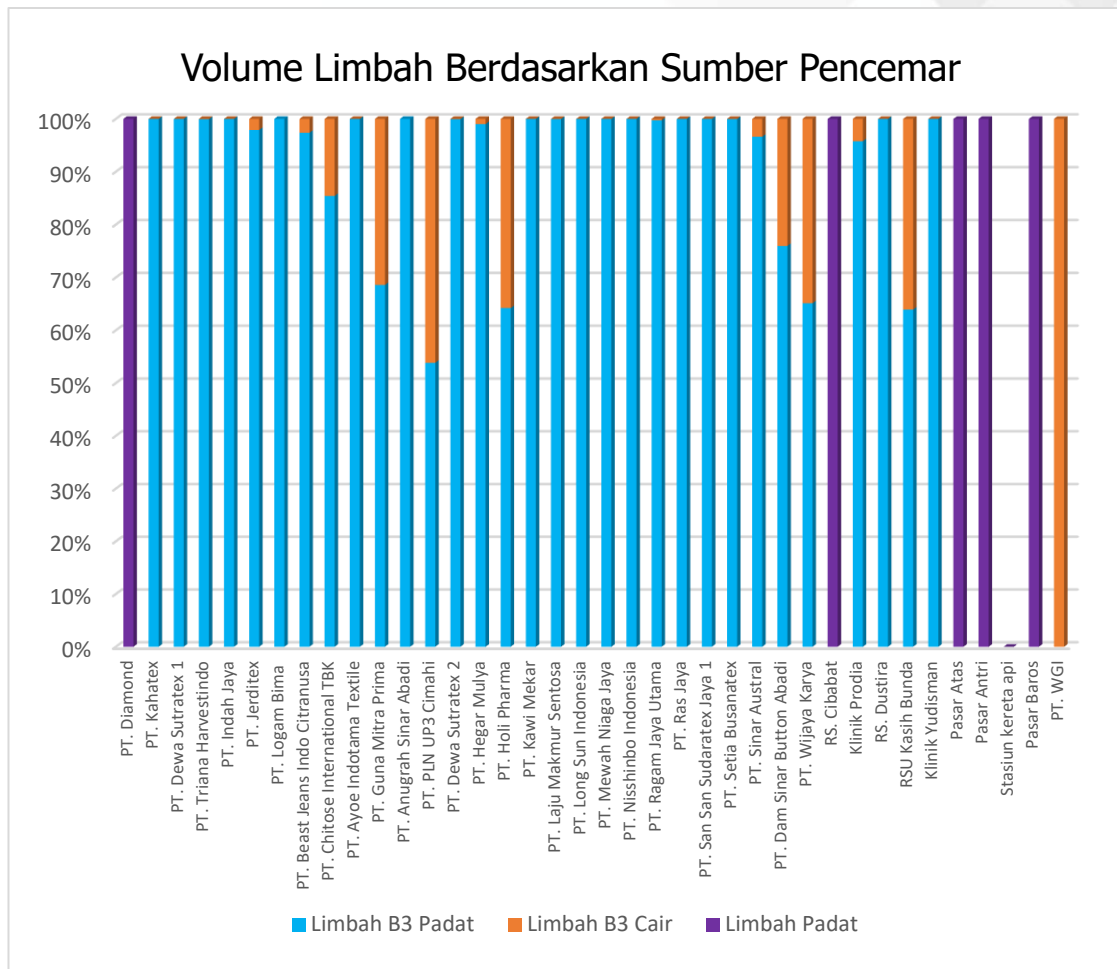
2.2.1.2 Kontribusi Volume Limbah di Kota Cimahi

Tumbuhnya sektor perindustrian dan kegiatan jasa lainnya seperti pertokoan, hotel, rumah sakit, dan tempat wisata memiliki tujuan meningkatkan perekonomian Kota Cimahi. Namun, aktivitas sektor perindustrian berpotensi menghasilkan limbah padat, limbah cair, bahkan limbah B3. Banyaknya industri yang tersebar di Kota Cimahi berkontribusi menurunkan kualitas air permukaan, salah satunya kualitas Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Industri tekstil menjadi salah satu sumber pencemar yang mengakibatkan tingginya parameter COD dalam kualitas air. Keberadaan industri juga berpengaruh terhadap parameter lainnya. Maka tingginya volume limbah menjadi faktor pemicu kualitas dan kuantitas air. Volume limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemar dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.18.

Tabel 2.12 Volume Limbah Padat dan Cair dalam Ton per Tahun

Sumber Pencemar		Limbah B3 Padat	Limbah B3 Cair	Limbah Padat	
Industri	PT. Diamond	N/A	N/A	167,9	
	PT. Kahatex	2.336.084	92	N/A	
	PT. Dewa Sutratex 1	554.600	0	N/A	
	PT. Triana Harvestindo	579.795	290	N/A	
	PT. Indah Jaya	79.010	0	N/A	
	PT. Jerditek	459.337	9.790	N/A	
	PT. Logam Bima	162	N/A	N/A	
	PT. Beast Jeans Indo Citranusa	6.768	182	N/A	
	PT. Chitose International TBK	46.844	8.000	N/A	
	PT. Ayoe Indotama Textile	751.661	6	N/A	
	PT. Guna Mitra Prima	298.731	136.963	N/A	
	PT. Anugrah Sinar Abadi	103.001	N/A	N/A	
	PT. PLN UP3 Cimahi	7	6	N/A	
	PT. Dewa Sutratex 2	28.337	14	N/A	
	PT. Hegar Mulya	327.907	3.290	N/A	
	PT. Holi Pharma	809	451	N/A	
	PT. Kawi Mekar	76.127	0	N/A	
	PT. Laju Makmur Sentosa	509.883	124	N/A	
	PT. Long Sun Indonesia	188.430	0	N/A	
	PT. Mewah Niaga Jaya	573.028	0	N/A	
	PT. Nisshinbo Indonesia	995.002	2	N/A	
	PT. Ragam Jaya Utama	288.784	780	N/A	
	PT. Ras Jaya	145.607	0	N/A	
	PT. San Indorama Sudaratex Jaya 1	354.770	0	N/A	
	PT. Setia Busanutex	333.055	95	N/A	
	PT. Sinar Austral	45.275	1.580	N/A	
	PT. Dam Sinar Button Abadi	316	100	N/A	
	PT. Wijaya Karya	28	15	N/A	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RS. Cibabat	N/A	N/A	270,1
		Klinik Prodia	3.303	146	N/A
RS. Dustira		35.514	0	N/A	
RSU Kasih Bunda		16.545	9.341	N/A	
Terminal/Pasar/Stasiun	Klinik Yudisman	535	0	N/A	
	Pasar Atas	N/A	N/A	10.592	
	Pasar Antri	N/A	N/A	6.220	
	Stasiun kereta api	N/A	N/A	0	
Lainnya	Pasar Baros	N/A	N/A	2.117	
	PT. WGI	0	2.628.383	N/A	

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.18 Persentase Volume Limbah Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Berdasarkan Gambar 2.18, kontribusi limbah di Kota Cimahi yang terdata didominasi dengan limbah B3 padat. Sebanyak 29 perusahaan menimbulkan lebih banyak limbah B3 padat ketimbang limbah B3 cair. Jumlah limbah paling banyak ditimbulkan oleh PT. Kahatex sebesar 2.336.084 ton/tahun. Volume limbah B3 cair paling banyak ditimbulkan oleh PT. WGI yaitu 2.628.383 ton/tahun, PT. WGI merupakan industri pengumpul limbah B3. Rumah Sakit Dustira merupakan fasilitas kesehatan di Kota Cimahi yang menimbulkan limbah B3 padat paling banyak sebesar 35.514 ton/tahun. Aktivitas terminal, pasar, dan stasiun memberikan kontribusi limbah padat yang terlayani angkutan sampah

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Volume limbah padat terbanyak berasal dari Pasar Atas sebesar 10.592 ton/tahun.

2.2.1.3 Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum

Terdapat satu program yang mendorong Kota Cimahi untuk membenahi pengelolaan air sungai, yaitu Program Nasional Citarum Harum. Program tersebut didasari atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Keberadaan Kota Cimahi di daerah hulu (sungai orde 2 dan 3) menjadi faktor pemicu kualitas air selanjutnya ke bagian tengah hingga hilir, sehingga wilayah sungai di Kota Cimahi harus memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, hal tersebut tentu dapat berdampak terhadap aliran selanjutnya.

Berdasarkan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2019-2025 bahwa data dan informasi kualitas air DAS Citarum yang lebih representatif dan termutakhir merupakan target *outcome* pemantauan kualitas air sebagai evaluasi Program Citarum Harum. Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas air baik secara manual maupun secara *online monitoring*. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 332 titik yang dipantau, dan *stakeholder* Kota Cimahi melakukan pemantauan kualitas air pada 15 titik. Target *outcome* penanganan air limbah domestik terdiri dari aspek kondisi infrastruktur sanitasi layak dan kondisi kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Terdapat 11 desa/kelurahan yang difokuskan melakukan kegiatan penanganan air limbah domestik dan dapat dilihat pada Tabel 2.13.

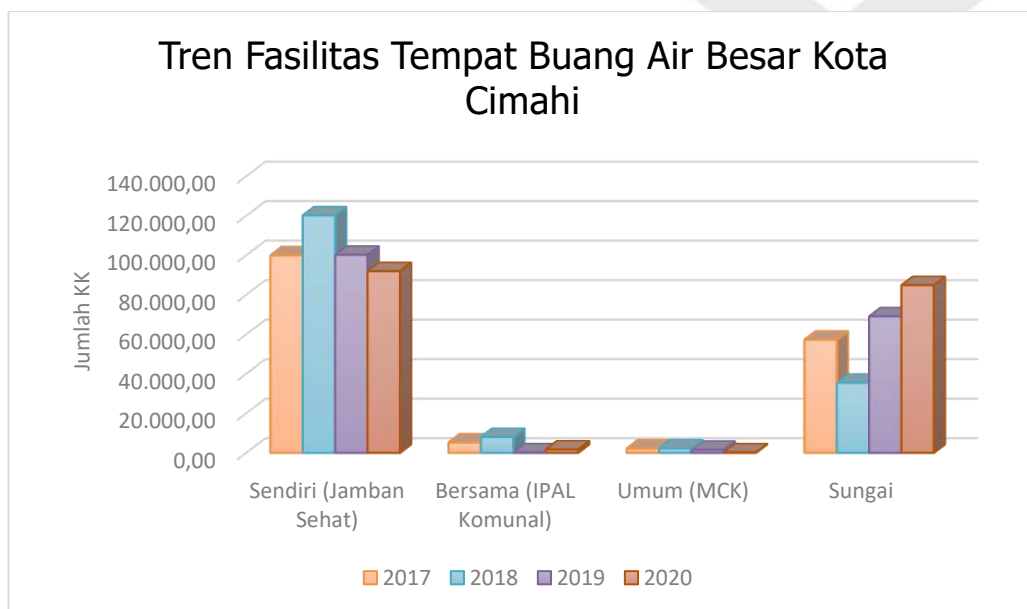
Tabel 2.13 Profil Desa/Kelurahan Program Citarum Harum

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Cimahi Utara	Cibabat, Citeureup
2	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah, Cimahi, Karang Mekar, Setiamanah
3	Cimahi Selatan	Cibeber, Cibeureum, Leuwigajah, Melong, Utama

(Sumber: Satgas Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, 2019)

2.2.1.4 Aktivitas Domestik

Penyediaan sarana prasarana permukiman seperti sanitasi yang layak pakai harus terpenuhi untuk masyarakat Kota Cimahi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Cimahi yang sudah mendapat akses sanitasi layak tercatat baru mencapai 72,73 persen (Bangkit, 2019). Masih ada masyarakat tidak terlayani oleh sarana prasarana yang layak sebesar 27,27 persen. Tren fasilitas tempat buang air besar di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.19, masih banyak masyarakat yang membuang limbah ke sungai bahkan semakin meningkat jumlahnya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman serta potensi yang ada dalam masyarakat maupun dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah, perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air belum memadai dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah menjadi faktor pemicu lainnya dalam penurunan kualitas dan kuantitas air.



Gambar 2.19 Tren Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.2.2 Pressure

2.2.2.1 Tingginya Lahan Terbangun

Isu mengenai kualitas dan kuantitas air secara tidak langsung juga berkaitan dengan penggunaan lahan. Sebagai contoh, tingginya lahan terbangun, baik perumahan hingga industri. Hal ini akan mengurangi kemampuan tanah untuk meresap air sehingga dalam hal ini, kuantitas air tanah akan terkena dampaknya. Selain kuantitas, kualitas air tanah dan air sungai juga akan terpapar dampak jika limbah yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan tidak dikendalikan dengan baik. Semakin banyak limbah yang dibuang ke lingkungan sebelum diolah, akan semakin berpotensi pula dalam menurunkan kualitas air tanah dan air sungai. Berkaitan dengan faktor pertumbuhan penduduk, aktivitas domestik, dan kontribusi volume limbah di Kota Cimahi memicu tingginya lahan terbangun di Kota Cimahi, dan dapat dilihat pada Gambar 2.20. Luas penggunaan lahan non pertanian di Kota Cimahi mendominasi lahan yang ada. Tingginya lahan yang terbangun memberikan tekanan terhadap kualitas air sungai maupun kualitas air tanah.

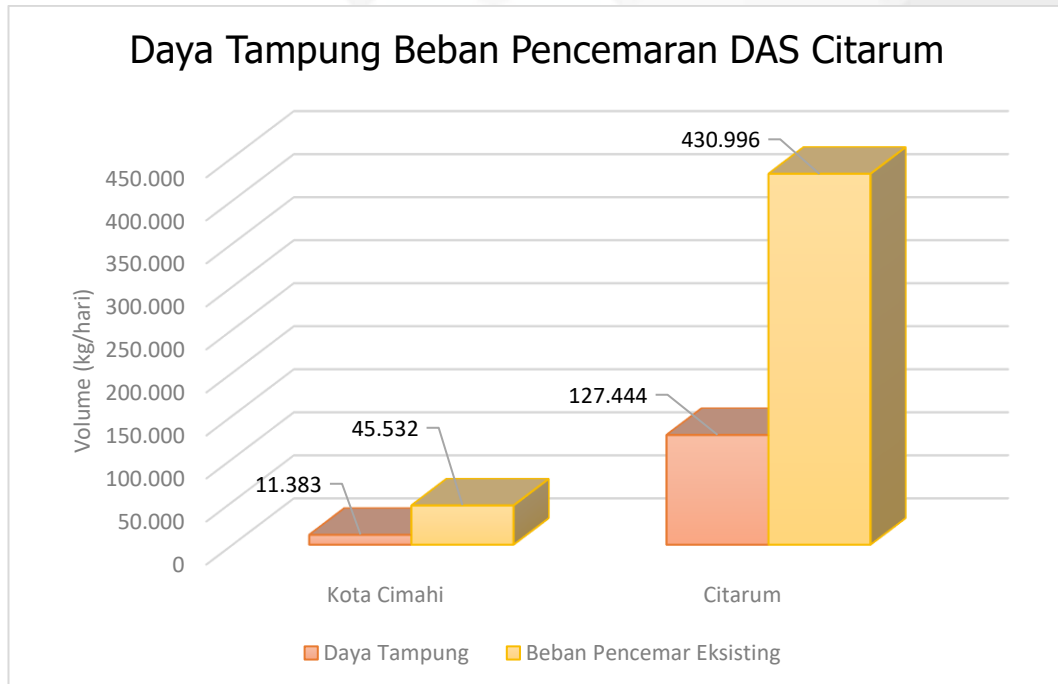


Gambar 2.20 Tren Luas Penggunaan Lahan di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.2.2.2 Beban Pencemar Sungai

Faktor pemicu berupa kontribusi volume limbah, rencana aksi pengendalian pencemaran Program Nasional Citarum Harum, dan aktivitas domestik memicu tekanan terhadap kualitas air berupa beban pencemaran dari timbulan limbah yang ditampung pada sungai. Timbulan limbah yang tidak sedikit dan semakin bertambah setiap tahunnya menyebabkan badan air sungai tercemar dan menurun kualitasnya karena badan air sungai memiliki daya tampung. Limbah yang tidak terkendali sangat berpotensi untuk membebani daya tampung sungai.

Kota Cimahi memiliki beberapa sungai yang bermuara pada Sungai Citarum, diantaranya adalah Sungai Cibaligo, Cimahi, Cisangkan, Cibeureum dan Cilember. Mengacu SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Citarum, alokasi beban pencemar pada Sungai Citarum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.21. Daya tampung beban pencemaran DAS Citarum sudah melewati batas, Kota Cimahi berkontribusi mencemari DAS Citarum sebesar 10 persen dari total beban pencemaran. Sumber beban pencemar yang berada di Kota Cimahi diantaranya berasal dari beberapa sektor, seperti sektor domestik, pertanian, peternakan dan industri.

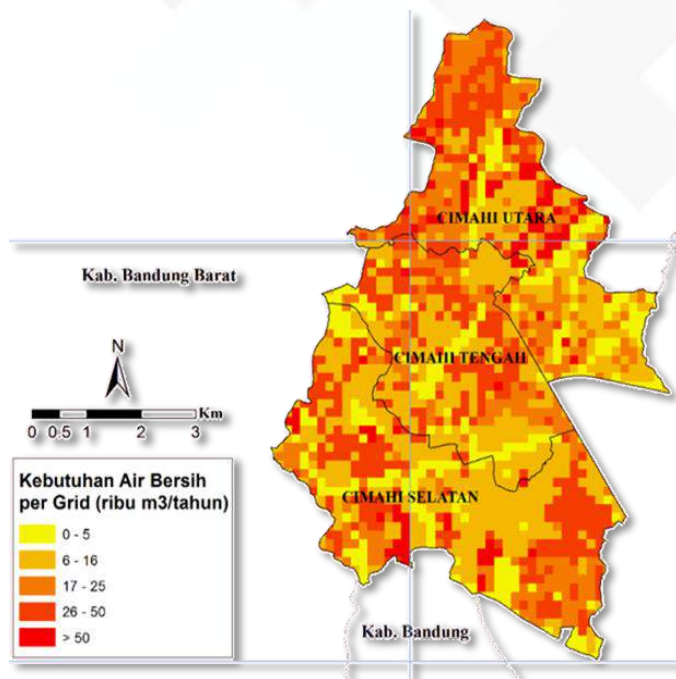


Gambar 2.21 Daya Tampung Beban Pencemaran DAS Citarum

(Sumber: SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017)

2.2.2.3 Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri

Faktor pendorong berupa aktivitas domestik dan pertumbuhan penduduk yang terus terjadi di setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan air bersih. Potensi sumber daya air Provinsi Jawa Barat adalah 66.256 juta m³ per tahunnya, yaitu air permukaan sekitar 42.821 juta m³/tahun dan sekitar 23.435 juta m³/tahun untuk air tanah (RPPLH Kota Cimahi, 2017). Sementara itu kebutuhan air untuk industri diperoleh dari data penggunaan air tanah oleh perusahaan di Kota Cimahi yang didata oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, penggunaan air tanah oleh 69 industri di Kota Cimahi mencapai 7.871.356.400 m³/tahun. Kebutuhan total air bersih di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.22 Berdasarkan pola spasial kebutuhan air di Kota Cimahi pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling tinggi yaitu sebesar >50 ribu m³/tahun. Atas dasar kebutuhan ini, Kota Cimahi mengalami tekanan terkait ketersediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.



Gambar 2.22 Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

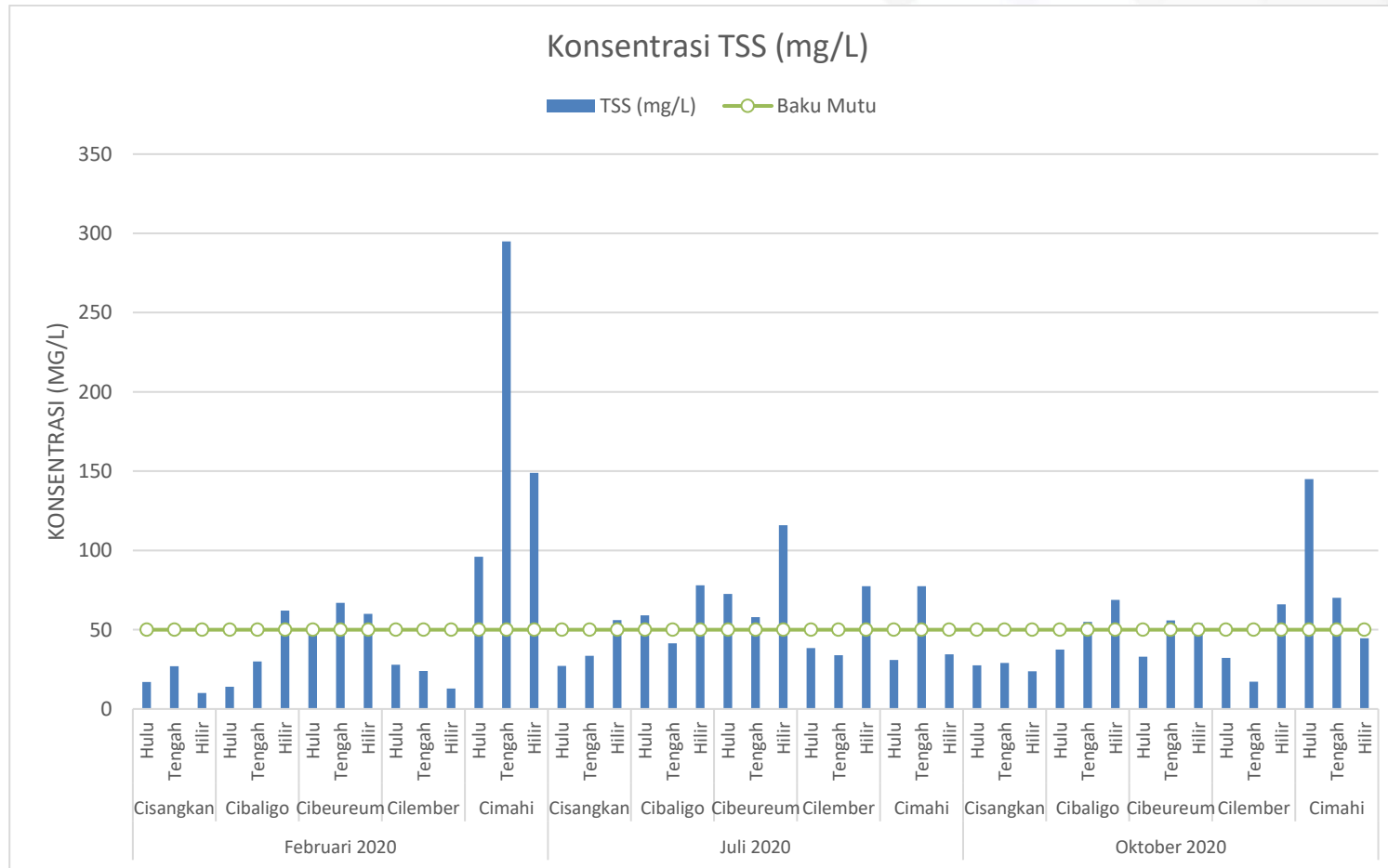
2.2.3 State

2.2.3.1 Kualitas Air Sungai

Secara umum sungai mengalami degradasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kualitas air sungai dikatakan tercemar jika terdapat parameter pencemar yang melebihi baku mutu. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Kualitas sungai dipantau berdasarkan baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Tujuan dilakukan pemantauan kualitas air sungai ini antara lain untuk mengetahui kecenderungan perubahan air serta mengetahui indeks pencemaran air sungai sebagai evaluasi indikator keberhasilan pengendalian pencemaran air, serta menetapkan kebijakan dan strategi lebih lanjut. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Februari (bulan basah), Bulan Juli (bulan kering) dan Bulan Oktober (bulan basah), terdapat 35 parameter yang diuji oleh UPTD Laboratorium untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Hasil pemantauan kualitas air sungai dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-29.



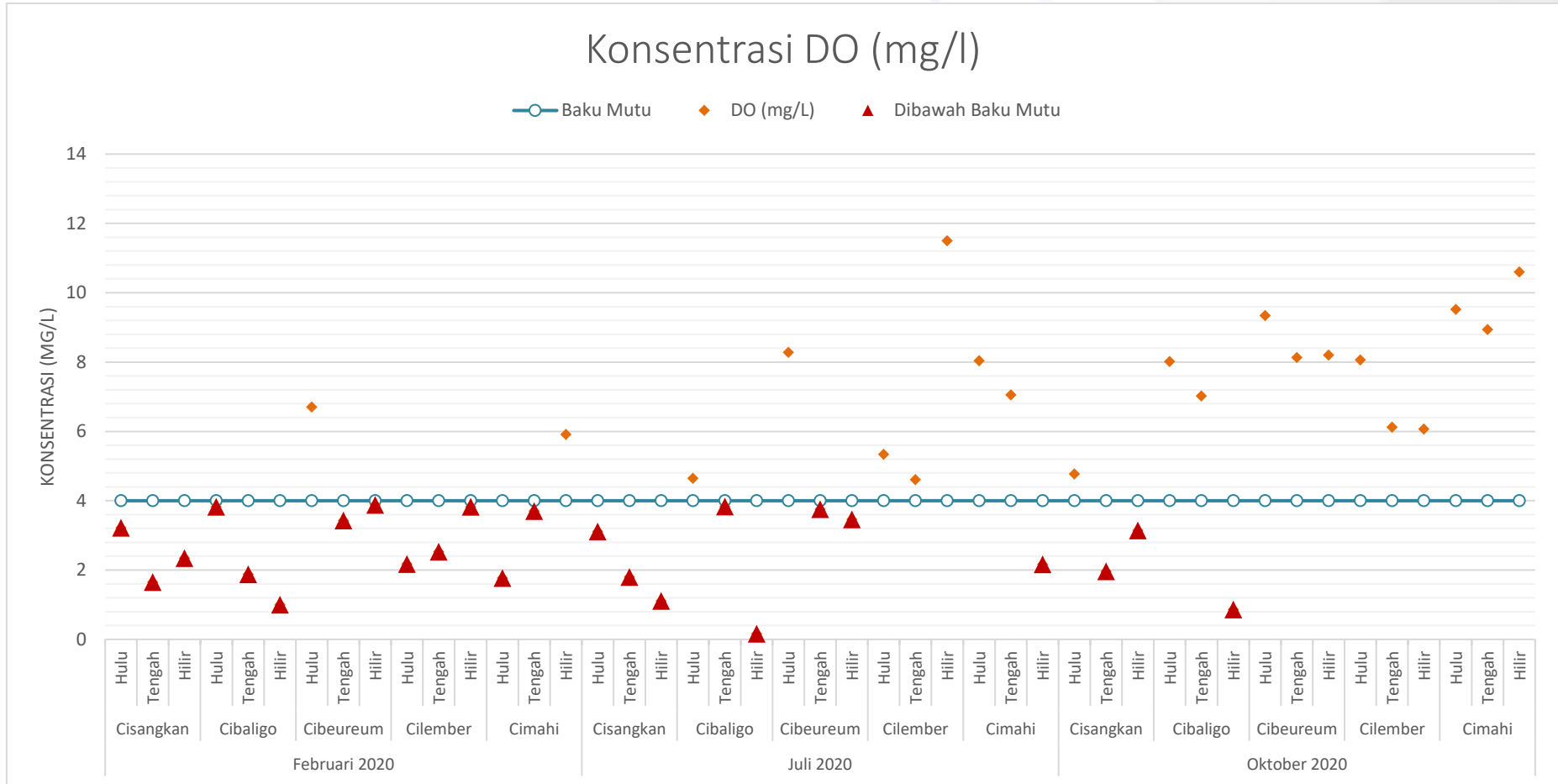
Total Suspended Solid. Analisis tingginya parameter *Total Suspended Solid* (TSS) disebabkan oleh adanya buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, serta kehadiran zat padat di dalam badan air juga dapat disebabkan oleh adanya kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa oleh air (Tchobanoglous, et al., 2014). Nilai TSS di 5 sungai pemantauan yang tertinggi ada di titik pemantauan Cimahi Tengah dengan nilai mencapai 295 mg/L pada bulan Februari tahun 2020. Kondisi ini bisa terjadi karena padatnya aktivitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci yang banyak menggunakan air sungai sehingga mengakibatkan TSS air sungai menjadi tinggi. Selain itu debit sungai di pagi hari sering kali meningkat dimana airnya berasal dari hulu sungai sehingga mengakibatkan konsentrasi sedimentasi tersuspensi juga meningkat. Baku mutu yang digunakan untuk parameter TSS sebesar 50 mg/lt. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bahwa konsentrasi TSS pada air sungai di Kota Cimahi terdapat 20 titik yang melebihi baku mutu. Hasil uji konsentrasi TSS pada sungai-sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23 Konsentrasi TSS Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Dissolved Oxygen. Parameter DO merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Semakin besar nilai kandungan DO, maka kualitas air tersebut semakin bagus. Parameter DO memiliki baku mutu kelas air (kelas 2) sebesar 4 mg/lit. Berbeda dengan parameter lainnya, parameter DO merupakan parameter khusus. Nilai DO semakin besar akan semakin baik untuk sumber oksigen terlarut pada proses respirasi. Jika nilai DO di sungai melebihi 4 mg/lit maka itu akan lebih baik ketimbang nilai DO di sungai di bawah 4 mg/lit. Berdasarkan data, konsentrasi DO di beberapa sungai Kota Cimahi memiliki konsentrasi yang baik, namun masih terdapat 24 titik dengan konsentrasi DO dibawah baku mutu. Hasil uji konsentrasi DO pada sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.24.

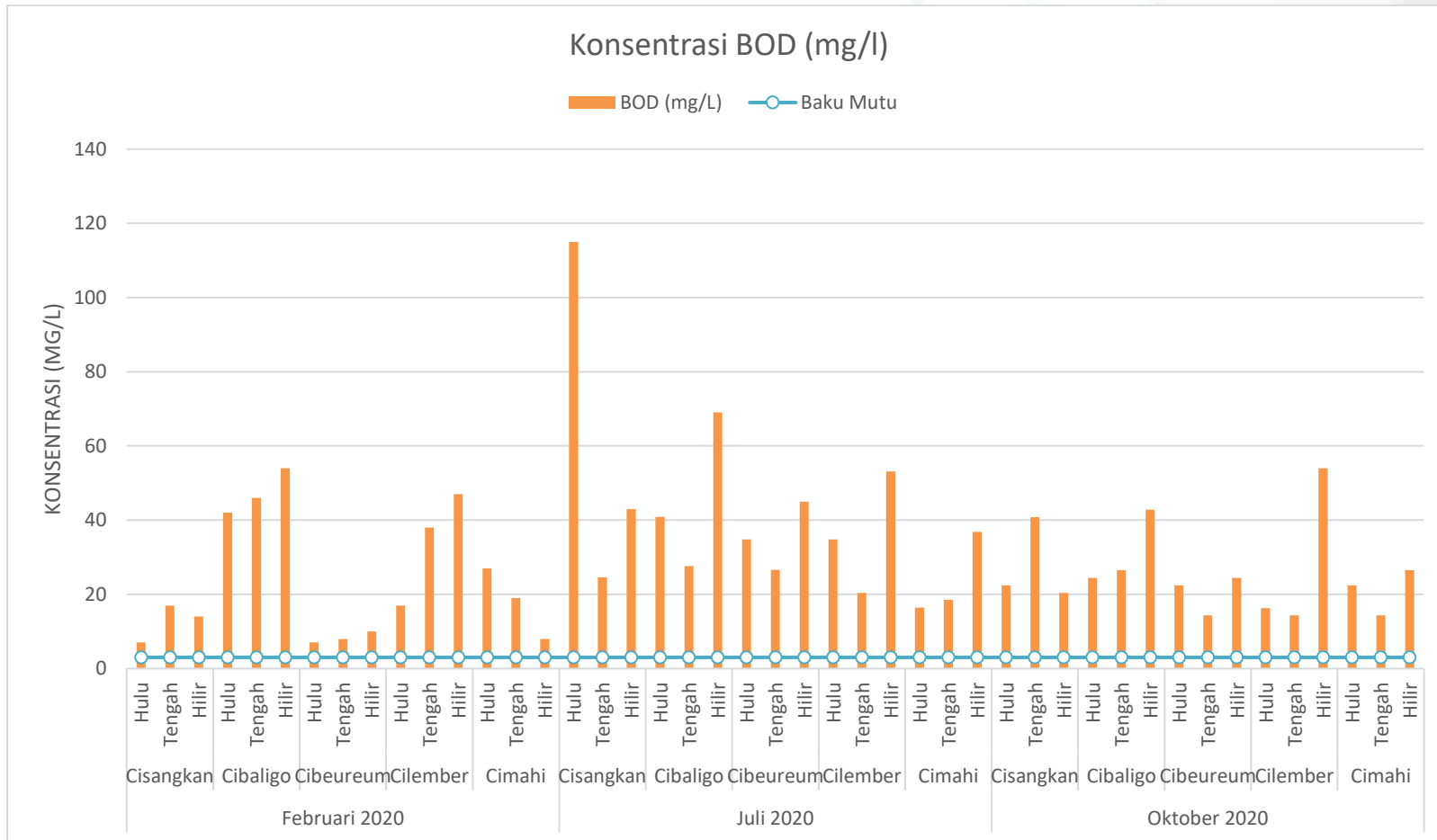


Gambar 2.24 Konsentrasi DO Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Biochemical Oxygen Demand. Parameter BOD merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan hampir semua zat organik yang terlarut dan Sebagian zat-zat organik yang tersuspensi dalam air. Parameter BOD memiliki nilai baku mutu sebesar 3 mg/lit sebagai peruntukan kelas II. Berdasarkan data pemantauan, konsentrasi BOD pada anak sungai di Kota Cimahi belum ada yang memenuhi baku mutu. Pengendalian pencemaran sungai di Kota Cimahi belum optimal, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir nilai konsentrasi BOD belum ada yang memenuhi baku mutu (tahun 2017 terdapat 15 titik yang melebihi baku mutu, tahun 2018 terdapat 14 titik yang melebihi baku mutu, dan tahun 2019 terdapat 15 titik yang melebihi baku mutu). Tren konsentrasi BOD dapat dilihat pada Gambar 2.25 dimana kualitas sungai masih berpotensi tercemar pada tahun-tahun berikutnya.

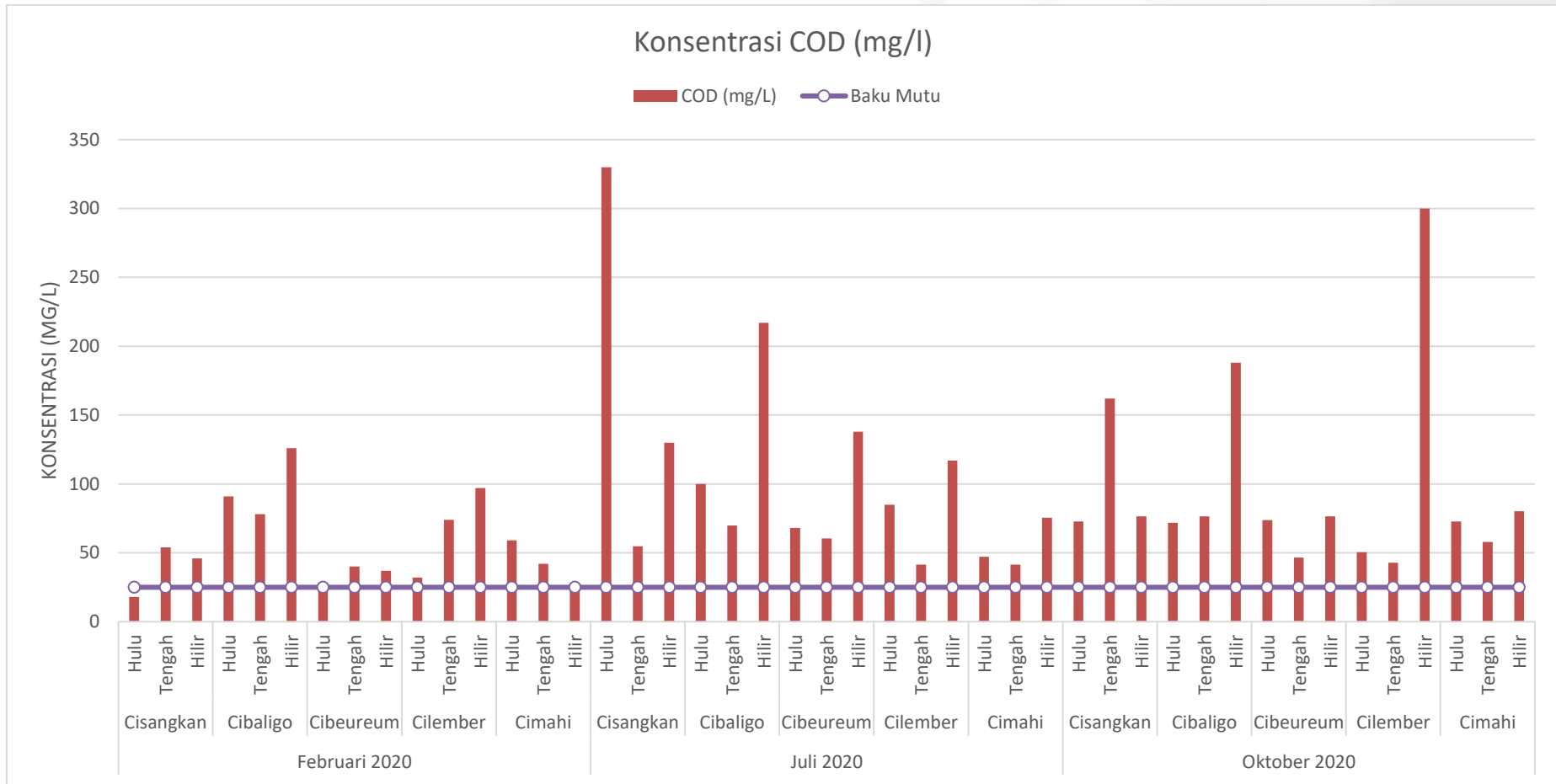


Gambar 2.25 Konsentrasi BOD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Chemical Oxygen Demand. Parameter COD merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis, menjadi karbon dioksida dan air (Effendi, 2003). Dengan demikian, nilai COD juga merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik. Parameter COD memiliki nilai baku mutu sebesar 25 mg/lit sebagai peruntukan kelas II. Sama halnya dengan parameter BOD, konsentrasi COD pada anak-anak sungai di Kota Cimahi masih belum menunjukkan pengendalian pencemaran yang optimal. Sebanyak 30 titik uji belum memenuhi baku mutu. Konsentrasi COD tiap tahunnya juga melebihi baku mutu, tahun 2017 terdapat 13 titik yang melebihi baku mutu, tahun 2018 terdapat 14 titik yang melebihi baku mutu, dan tahun 2019 terdapat 14 titik yang melebihi baku mutu konsentrasi COD. Hasil uji konsentrasi COD dapat dilihat pada Gambar 2.26.

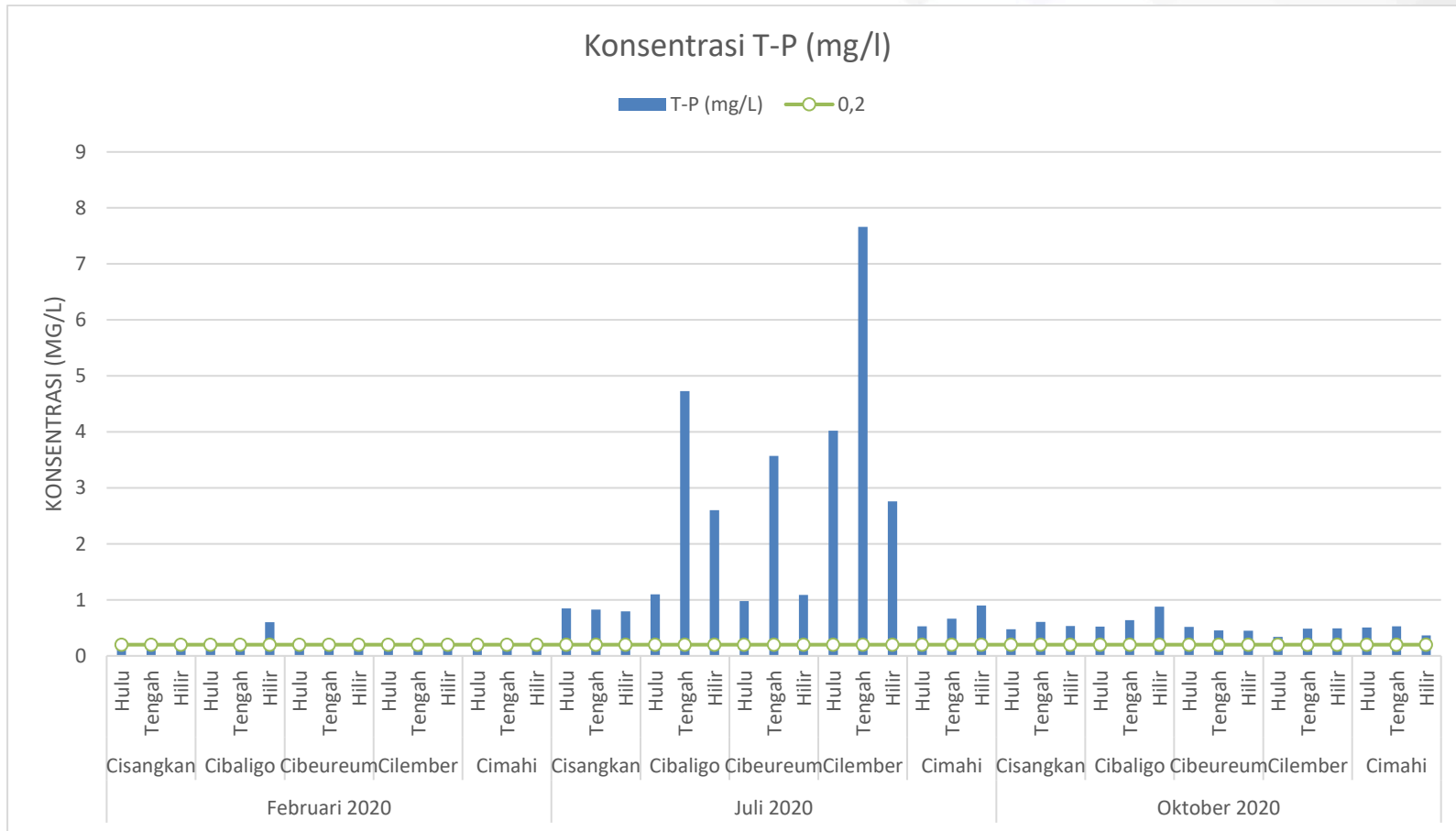


Gambar 2.26 Konsentrasi COD di Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Total Phosphat. Unsur fosfor ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut (ortofosfat dan poliofosfat). Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan mineral, dan dekomposisi bahan organik. Baku mutu total fosfat dalam perairan yaitu 0,2 mg/lit. Konsentrasi total fosfat pada sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.27.

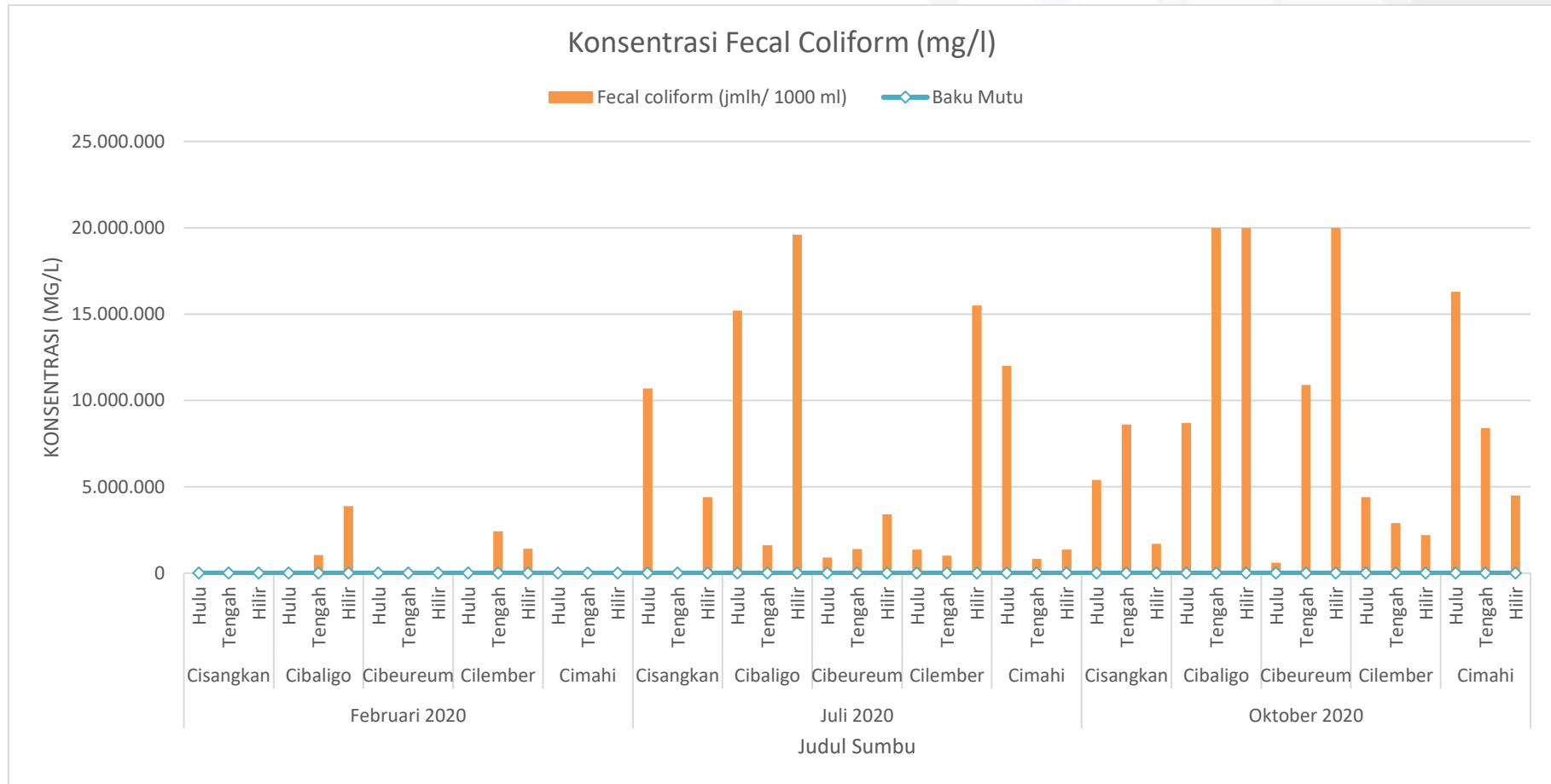


Gambar 2.27 Konsentrasi Total Fosfat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Fecal Coliform. Bakteri *coliform* total meliputi semua jenis bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. Oleh karena itu, bakteri *coliform* total terdiri dari *Eschereichia*, *Citrobacter*, *Klebsiella*, dan *Enterobacter*. Adapun kandungan bakteri *coliform* total dalam tinja manusia sekitar 10⁷ sel/g tinja (Yates, 1992 dalam Effendi, 2003). Sedangkan yang dimaksud dengan *fecal coliform* adalah anggota dari *coliform* total yang mampu memfermentasikan laktosa pada suhu 44,5°C. Sekitar 97% dari total kandungan bakteri *coliform* tinja manusia merupakan *fecal coliform*, yang terdiri atas *Escherichia* dan beberapa jenis *Klebsiella*. Hasil uji kualitas air sungai menunjukkan nilai *coliform* total dan *fecal coliform* yang sangat tinggi. Pada tahun 2017 terdapat 11 titik uji *fecal coliform* yang melebihi baku mutu, pada tahun berikutnya 2018 dan 2019 sebanyak 15 titik uji, dan tahun 2020 semua titik melebihi baku mutu *fecal coliform*. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut, tingginya konsentrasi parameter mikrobiologi juga akan mencemari sungai bahkan menjadi pemicu penyakit bawaan air. Tren konsentrasi *fecal coliform* dapat dilihat pada Gambar 2.28. Hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, sehingga konsentrasi *fecal coliform* terlampaui tinggi. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Sehingga diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, tindakan pencegahan, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.



Gambar 2.28 Konsentrasi *Fecal Coliform* Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.2.3.2 Status Mutu Air

Status mutu air dihitung lebih detail dan menyeluruh terhadap parameter-parameter kualitas air yang diuji. Perhitungan dan penentuan kelas cemar air sungai dilakukan dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Dalam pedoman tersebut, status mutu air terklasifikasi menjadi empat kelas: kondisi baik, cemar ringan, cemar sedang, dan cemar berat.

Beberapa sungai yang melintasi Kota Cimahi dan berpotensi tercemar akibat adanya aktivitas alam dan manusia yaitu Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, Sungai Cilember, dan Sungai Cimahi. Adapun parameter yang digunakan dalam perhitungan yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃, Total Fosfat, *Fecal Coliform*. Oleh karena itu, dilakukan penilaian status mutu air untuk setiap sungai di 3 titik pantau (hulu, tengah, hilir) dengan 3 periode pemantauan. Hasil analisis menunjukkan status mutu air sungai di Kota Cimahi termasuk ke dalam kelas cemar berat ($PI_j > 10$). Hasil perhitungan menunjukkan kondisi cemar berat untuk semua titik pantau.

Tabel 2.14 Status Mutu Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2020

Sungai	Titik Pantau	Pemantauan Bulan Februari		Pemantauan Bulan Juli		Pemantauan Bulan Oktober	
		Indeks Pencemar	Status	Indeks Pencemar	Status	Indeks Pencemar	Status
Cisangkan	hulu	2,04	Cemar Ringan	15,42	Cemar Berat	14,20	Cemar Berat
	tengah	3,45	Cemar Ringan	4,59	Cemar Ringan	14,98	Cemar Berat
	hilir	3,07	Cemar Ringan	13,97	Cemar Berat	12,41	Cemar Berat
Cibaligo	hulu	4,87	Cemar Ringan	15,89	Cemar Berat	14,94	Cemar Berat
	tengah	11,68	Cemar Berat	12,46	Cemar Berat	16,24	Cemar Berat
	hilir	13,77	Cemar Berat	16,40	Cemar Berat	16,33	Cemar Berat
Cibeureum	hulu	2,12	Cemar Ringan	11,52	Cemar Berat	10,81	Cemar Berat
	tengah	2,36	Cemar Ringan	12,21	Cemar Berat	15,25	Cemar Berat
	hilir	2,63	Cemar Ringan	13,63	Cemar Berat	16,22	Cemar Berat
Cilember	hulu	3,43	Cemar Ringan	12,20	Cemar Berat	13,84	Cemar Berat
	tengah	12,95	Cemar Berat	11,73	Cemar Berat	13,19	Cemar Berat
	hilir	12,10	Cemar Berat	15,99	Cemar Berat	12,93	Cemar Berat

Sungai	Titik Pantau	Pemantauan Bulan Februari		Pemantauan Bulan Juli		Pemantauan Bulan Oktober	
		Indeks Pencemar	Status	Indeks Pencemar	Status	Indeks Pencemar	Status
Cimahi	hulu	4,12	Cemar Ringan	15,47	Cemar Berat	15,94	Cemar Berat
	tengah	3,71	Cemar Ringan	11,31	Cemar Berat	14,86	Cemar Berat
	hilir	2,39	Cemar Ringan	12,12	Cemar Berat	13,91	Cemar Berat

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.2.3.3 Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air tidak hanya ditunjukkan dengan besaran konsentrasi dan status mutu saja, melainkan dapat pula dengan menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA). Ketiga hasil uji tersebut saling berkaitan yang mana kualitas air yang didapat dari hasil pengukuran digunakan untuk menghitung dan menentukan status mutu air, kemudian data tersebut digunakan untuk menentukan indeks kualitas airnya (IKA). Indeks kualitas air Kota Cimahi tahun 2021 dihitung berdasarkan persentase jumlah titik pantau tiap status mutu terhadap total data terpantau. Pada analisis ini, perhitungan indeks kualitas air disesuaikan dengan indeks kualitas air pada tahun-tahun sebelumnya dengan menghitung kualitas air di bulan kering (Bulan Juli) dan bulan basah (Bulan Oktober). Dari hasil penentuan status mutu air dari 5 sungai (30 titik) dan kebanyakan data berstatus cemar berat. Berikut hasil perhitungan indeks kualitas air berdasarkan status mutunya.

- Kondisi baik $= \left(\frac{0}{30}\right) \times 100\% = 0\%$
 $= 0\% \times \text{Nilai bobot (70)} = 0$
- Cemar ringan $= \left(\frac{1}{30}\right) \times 100\% = 3,33\%$
 $= 3,33\% \times \text{Nilai bobot (50)} = 1,67$
- Cemar sedang $= \left(\frac{0}{30}\right) \times 100\% = 0\%$
 $= 0\% \times \text{Nilai bobot (30)} = 0$
- Cemar berat $= \left(\frac{29}{30}\right) \times 100\% = 96,67\%$
 $= 96,67\% \times \text{Nilai bobot (10)} = 9,67$

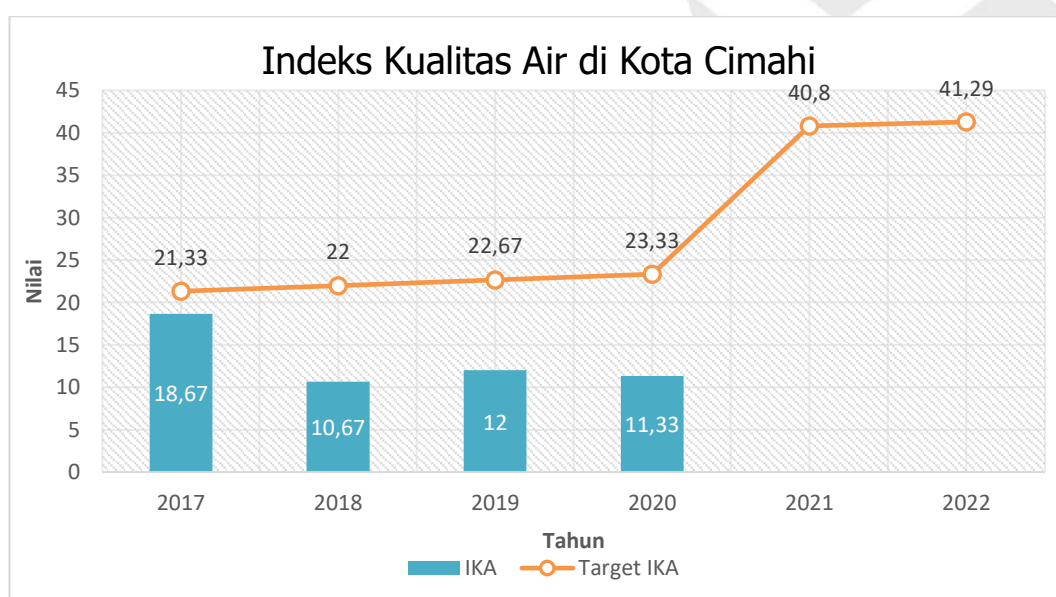
$$\text{Indeks Kualitas Air (IKA)} = 0 + 1,67 + 0 + 9,67 = 11,34$$

Tabel 2.15 Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot	Nilai Indeks
Memenuhi	0	0,00 %	70	0,00
Cemar Ringan	1	3,33 %	50	1,67
Cemar Sedang	0	0,00 %	30	0
Cemar Berat	29	96,67 %	10	9,67
Total	30			
Indeks Kualitas Air Kota Cimahi 2020				11,34

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2020 indeks kualitas air sungai di Kota Cimahi bernilai 11,34. Nilai tersebut sangat kecil, status tercemar air cenderung meningkat pada Bulan Oktober (bulan hujan). Jika perhitungan IKA menggunakan metode yang sama, nilai IKA di Kota Cimahi tahun-tahun terakhir ini masih termasuk ke dalam klasifikasi buruk. Tren nilai Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.29. Berdasarkan indeks kualitas air tahun 2020 bahwa kondisi air sungai/saluran irigasi yang melewati Kota Cimahi memiliki angka indeks dibawah target capaian RPJMD Kota Cimahi 2017-2022.

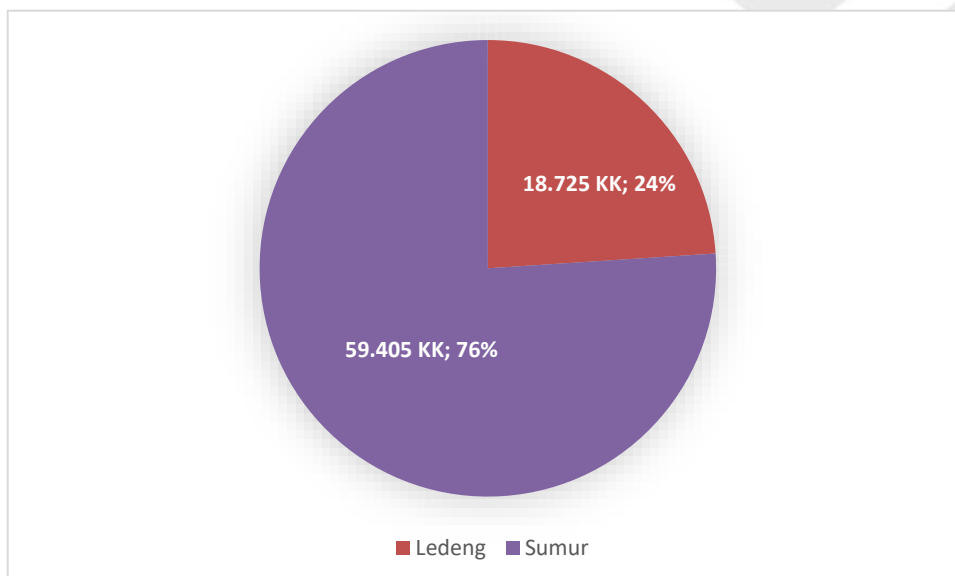


Gambar 2.29 Tren Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

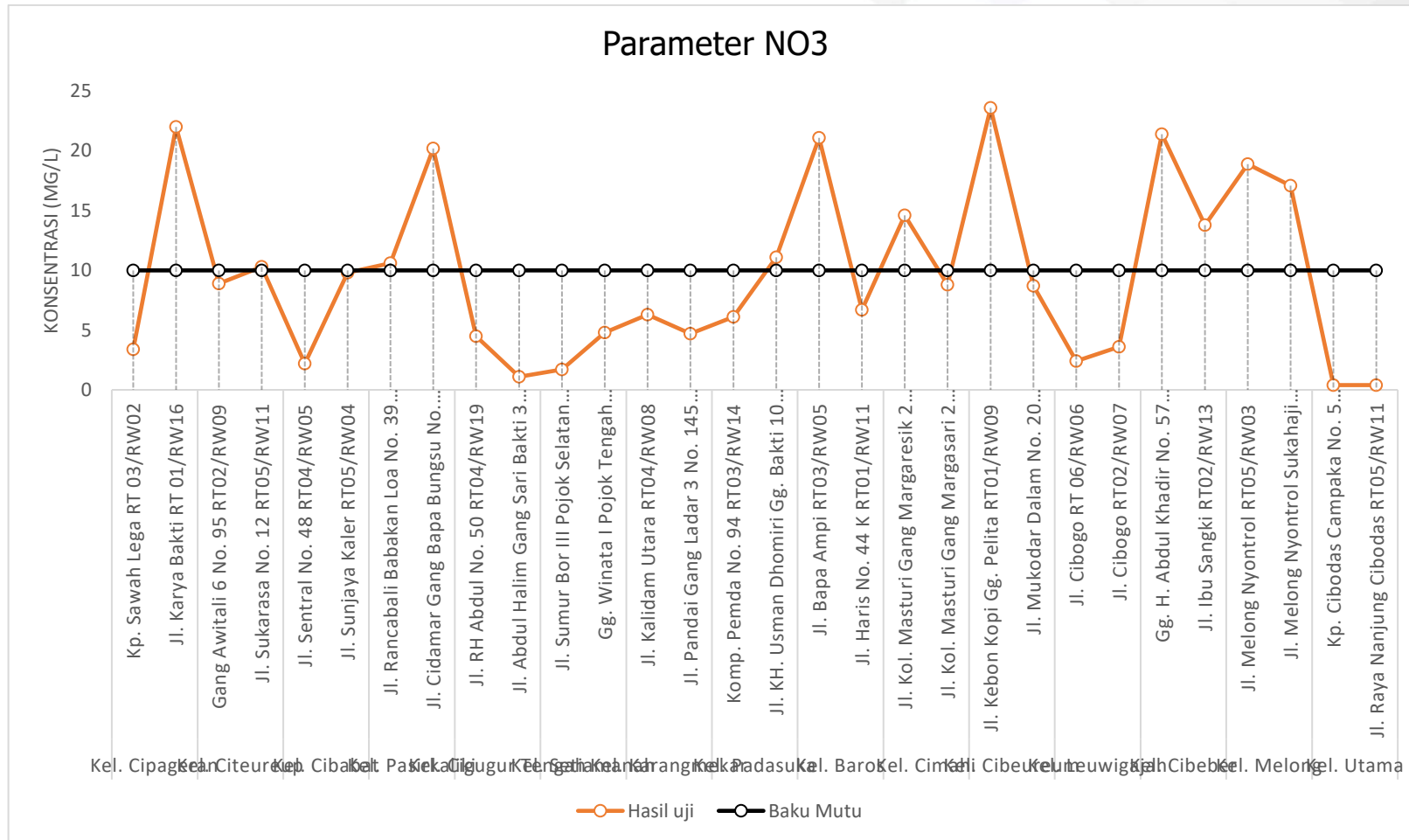
2.2.3.4 Kualitas Air Sumur

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cimahi maka timbulan limbah domestik akan meningkat, disamping itu terbatasnya sumber daya air juga menjadi tekanan terhadap kualitas air di Kota Cimahi. Sumber air minum masyarakat di Kota Cimahi terbagi atas air ledeng dan air sumur (Gambar 2.30). Penggunaan air sumur menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka perlu ada pengujian kualitas air sumur untuk mengetahui kelayakan air sumur sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama. Parameter yang diukur antara lain suhu, pH, kekeruhan, warna, rasa, bau, TDS, NO₃, khrom (VI), besi, mangan, seng, nitrit, sulfat, dan total coliform. Pengujian kualitas air sumur dalam analisis ini dibandingkan dengan PerMenKes No. 32 Tahun 2017. Baku mutu yang digunakan adalah standar pemakaian air tanah untuk higiene sanitasi, yaitu kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Terdapat 3 parameter yang melebihi baku mutu, yaitu NO₃, Mangan, dan Total Coliform dan grafiknya dapat dilihat pada Gambar 2.31 sampai 2.33.



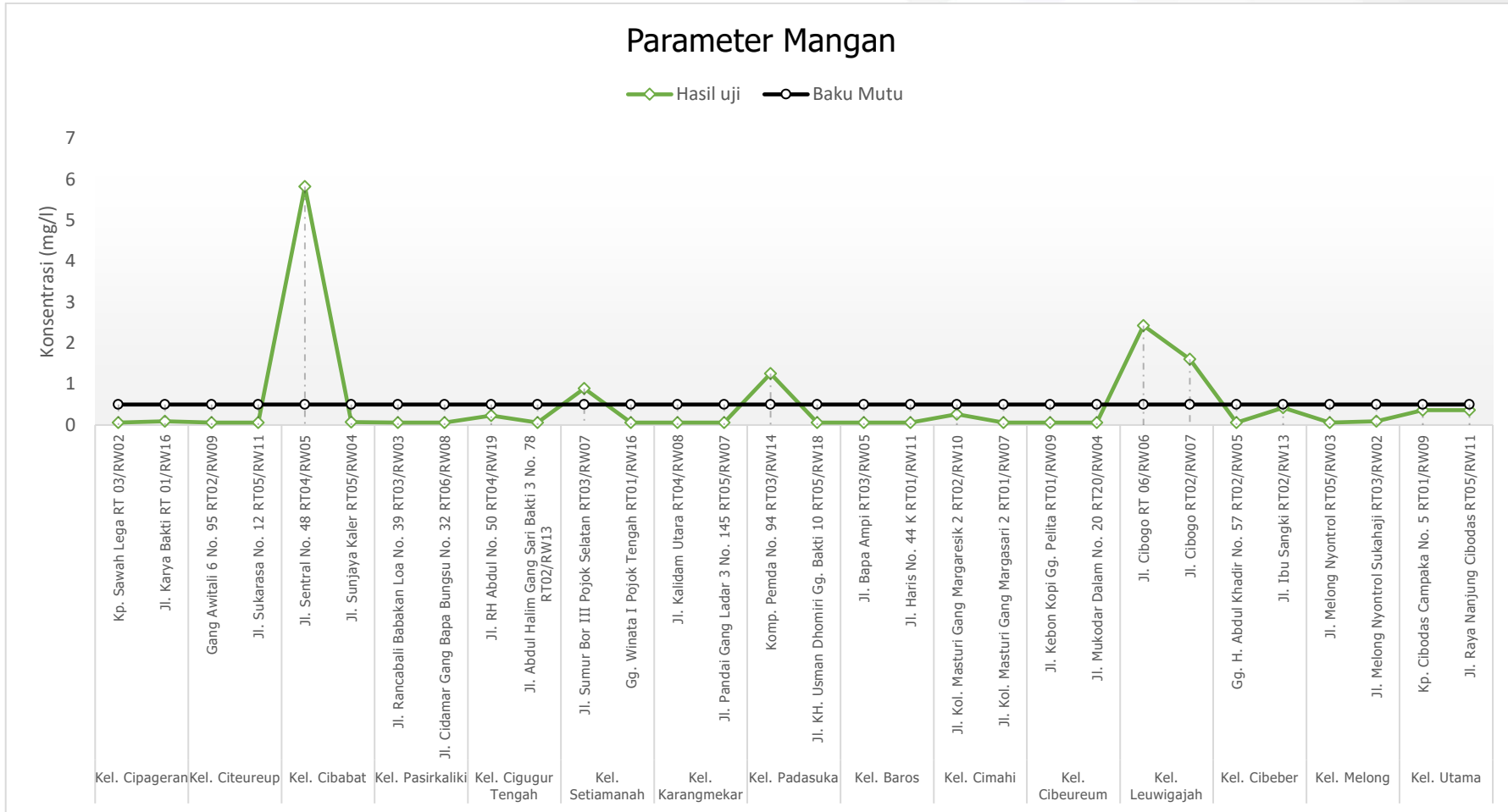
Gambar 2.30 Sumber Air Minum Masyarakat Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

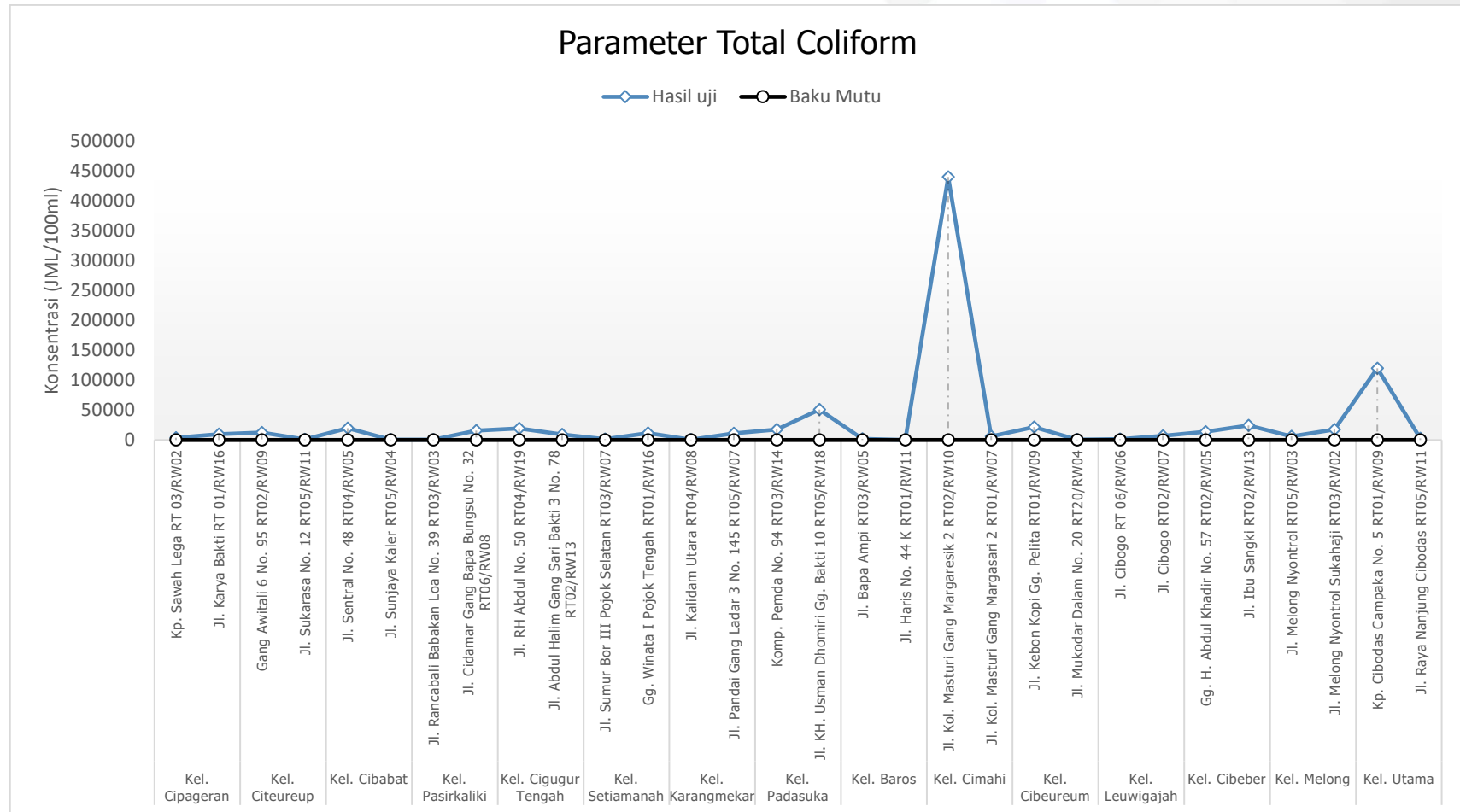


Gambar 2.31 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter NO₃

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Analisis, 2021)



Gambar 2.32 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter Mangan
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Analisis, 2021)



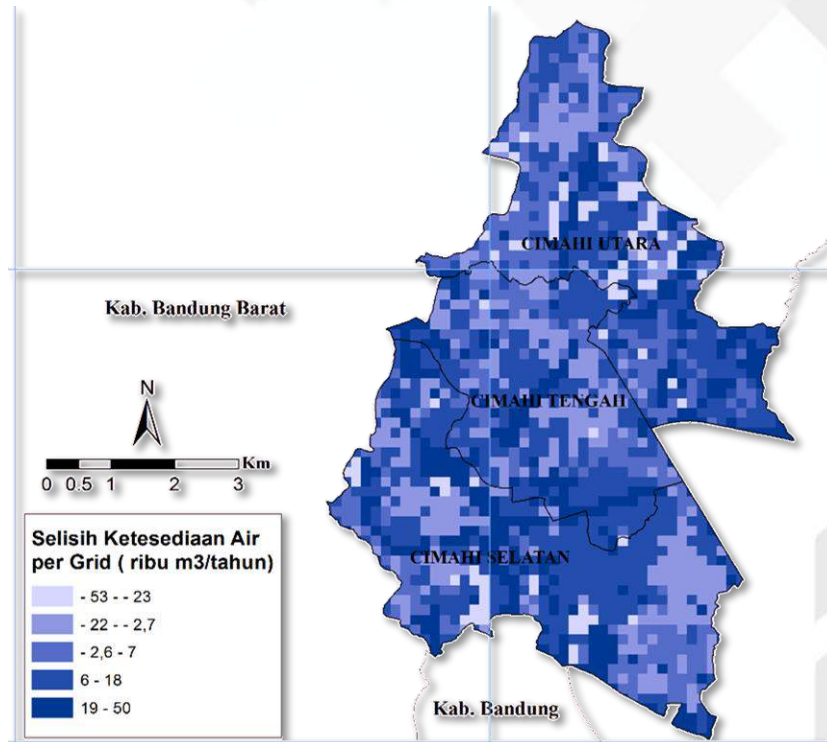
Gambar 2.33 Kualitas Air Sumur Untuk Parameter Total Coliform
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Analisis, 2021)

Berdasarkan Gambar 2.31 hingga Gambar 2.33, terdapat beberapa titik yang kualitas air sumurnya tidak memenuhi baku mutu. Tingginya konsentrasi parameter-parameter tersebut dapat dipengaruhi oleh pengikisan batuan atau garam mineral dalam tanah (mangan) serta pengaruh dari pupuk tanaman (NO_3 dan pH). Faktor antropogenik erat kaitannya dengan pencemaran air tanah yaitu pembuangan limbah yang tidak terkelola, baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair. Jarak *septic tank* dengan sumur warga juga harus diperhatikan karena air sumur dapat tercemar oleh bakteri coli dari tinja.

2.2.4 Impact

2.2.4.1 Kekurangan Air

Ketersediaan air di Kota Cimahi di beberapa lokasi sangat tinggi mencapai $>36 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Hal tersebut perlu seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan. Semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan air akan meningkat dan ketersediaan air akan menurun jika terus menerus digunakan tanpa adanya pengelolaan/pengendalian terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Selisih ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih mengalami defisit di sebagian kecil wilayah Kec. Cimahi Tengah dan Kec. Cimahi Selatan. Wilayah kecamatan Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah mengalami defisit berdasarkan daya dukung antara kebutuhan ketersediaan air.

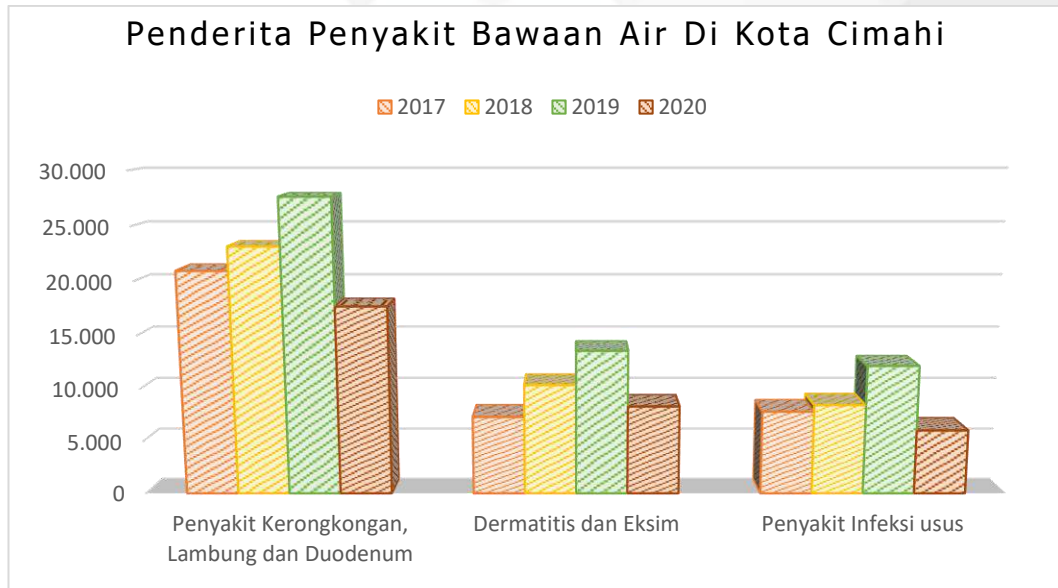


Gambar 2.34 Selisih Ketersediaan Air Kota Cimahi

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

2.2.4.2 Waterborne Disease

Kualitas air dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan juga berdampak terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang berkaitan dari buruknya kualitas air adalah terkait kesehatan masyarakat atau penyakit bawaan air (*waterborne disease*). Terdapat penyakit dermatitis, infeksi saluran pencernaan (usus), dan penyakit kerongkongan, lambung dan duodenum dengan jumlah kasus/penderita yang tidak sedikit. Penyakit-penyakit tersebut memang tidak diidentifikasi penyebabnya, namun konsumsi air dengan kualitas buruk cenderung berpotensi menimbulkan gejala penyakit-penyakit tersebut. Tren jumlah penderita penyakit di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.35.



Gambar 2.35 Penyakit yang Diderita Masyarakat Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

2.2.4.3 Penurunan Kandungan Oksigen dalam Air

Masuknya bahan kimia (khususnya fosfat yang terkandung dalam limbah detergen) ke dalam badan air sehingga mendorong pertumbuhan alga disebut dengan eutrofikasi. Algae akan membentuk lapisan di atas perairan sungai dan mengurangi kandungan oksigen dalam air.

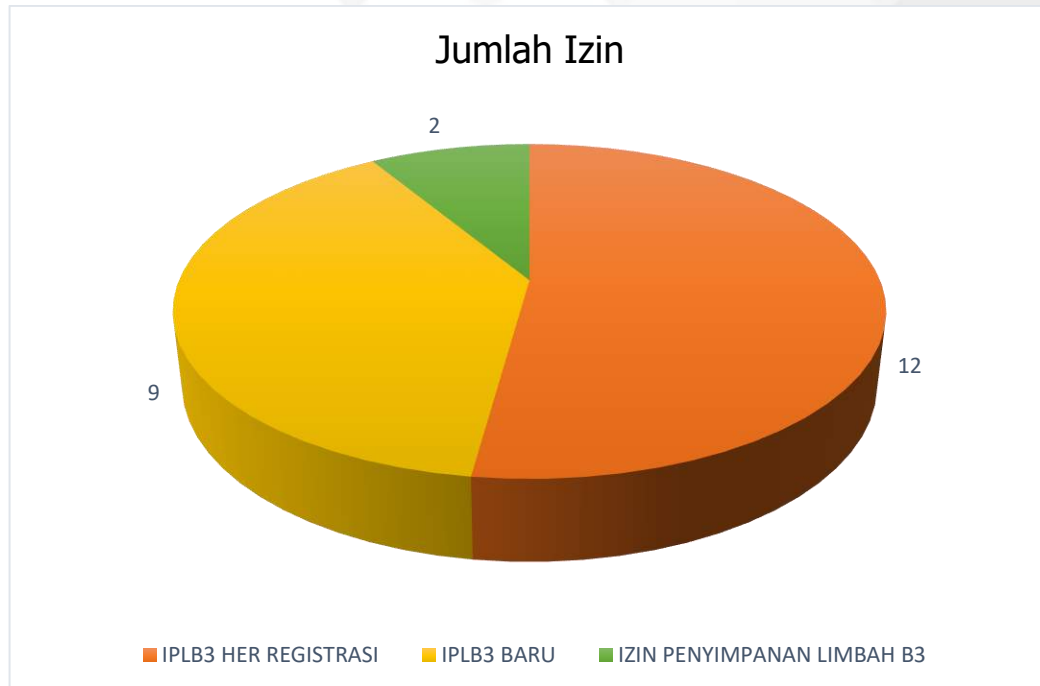
2.2.4.4 Penurunan Muka Air Tanah

Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra berbagai kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Potensi pemanfaatan air di Kota Cimahi berasal dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi). Pengambilan air tanah umumnya dilakukan sebagian besar dengan menggunakan sumur bor untuk usaha industri, usaha komersial lainnya atau masyarakat, dimana beberapa pengambilan air tanah telah melebihi kapasitas yang diizinkan dalam SIPA/Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

2.2.5 Response

2.2.5.1 Izin Mengelola Limbah

Limbah B3 sesuai definisi pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 yang langsung dibuang ke lingkungan dapat mencemari lingkungan air, tanah maupun udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena sifat B3-nya, limbah ini perlu perlakuan khusus sebelum dihancurkan, yaitu dengan cara disimpan di TPS LB3 dan harus berizin. Bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 diwajibkan untuk mengurus Izin TPS LB3 melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah memberikan 23 izin pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan usaha yang mengajukan izin dan melengkapi persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin mengelola limbah B3 dapat dilihat pada Lampiran II Tabel 42. Secara ringkas izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.36. Hal ini menjawab permasalahan isu kualitas air dari kontribusi volume limbah di Kota Cimahi, serta dalam rangka menjaga kualitas air sungai di Kota Cimahi.



Gambar 2.36 Jumlah Izin yang Dikeluarkan

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

2.2.5.2 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi setiap tahunnya melakukan pemantauan air sungai secara rutin. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data series kualitas air setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 Sungai dengan 3 titik pemantauan di setiap sungainya, sungai yang dilakukan pemantauan yaitu:

- Sungai Cisangkan
- Sungai Cibaligo
- Sungai Cibeureum
- Sungai Cilember
- Sungai Cimahi

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Juli dan Oktober 2020. Hasil monitoring dapat menjadi acuan dalam menganalisis sebab akibat dari

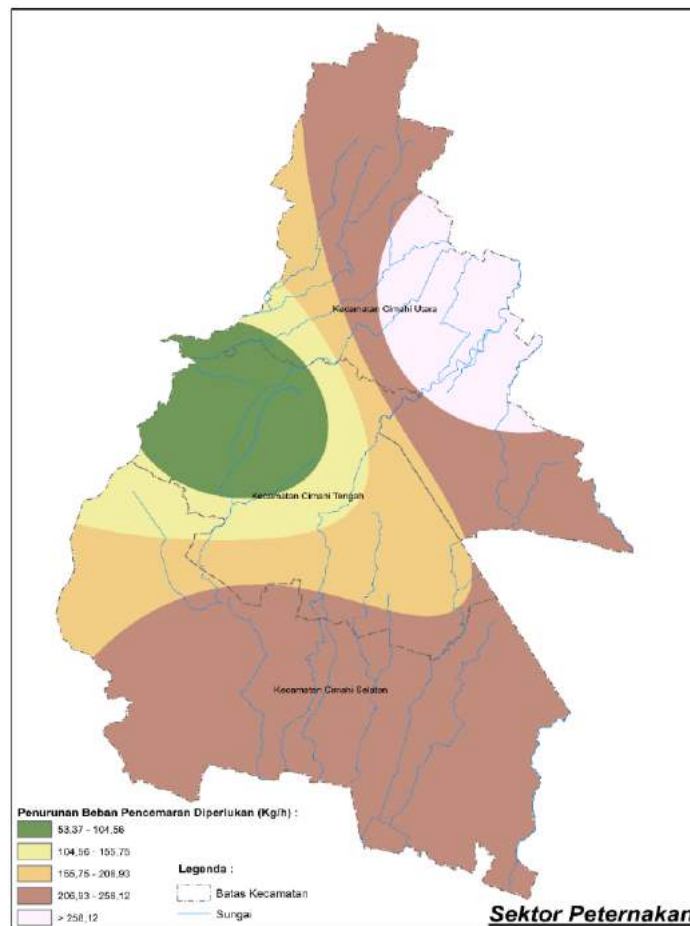
hasil kualitas air sungai tersebut yang nantinya akan dilakukan pengelolaan atau suatu pengendalian untuk pemulihan kualitas air sungai.

Selain air sungai, DLH Kota Cimahi melakukan pemantauan air tanah dalam setahun yaitu 1 (satu) kali periode pemantauan pada bulan September 2020. Lokasi pemantauan air tanah sebanyak 30 (tiga puluh) titik sampling yang dilakukan pemantauan di Kota Cimahi, diantaranya:

- Kelurahan Cipageran (2 titik pantau)
- Kelurahan Citeureup (2 titik pantau)
- Kelurahan Cibabat (2 titik pantau)
- Kelurahan Pasirkaliki (2 titik pantau)
- Kelurahan Cigugur Tengah (2 titik pantau)
- Kelurahan Setiamanah (2 titik pantau)
- Kelurahan Karangmekar (2 titik pantau)
- Kelurahan Padasuka (2 titik pantau)
- Kelurahan Baros (2 titik pantau)
- Kelurahan Cimahi (2 titik pantau)
- Kelurahan Cibeureum (2 titik pantau)
- Kelurahan Leuwigajah (2 titik pantau)
- Kelurahan Cibeber (2 titik pantau)
- Kelurahan Melong (2 titik pantau)
- Kelurahan Utama (2 titik pantau)

Tujuan dari pemantauan air tanah tersebut, sama halnya dengan pemantauan kualitas air sungai, yaitu sebagai upaya dari DLH Kota Cimahi secara objektif mengetahui kualitas dari air tanah di Kota Cimahi. Pemantauan kualitas dan kuantitas air bisa menjadi dasar dalam penentuan kebijakan ataupun kegiatan yang memperbaiki kualitas air. DLH Kota Cimahi juga telah menerapkan sistem informasi lingkungan sebagai bentuk upaya pemantauan pengelolaan lingkungan di kota ini.

- b) Sektor Peternakan. Selain sektor domestik, Kota Cimahi berupaya menurunkan beban pencemar yang masuk ke sungai melalui sektor peternakan agar dapat mendukung memenuhi daya tampung sungai Citarum. Sektor peternakan di Kota Cimahi terdiri dari hewan sapi, domba, ayam, itik, kerbau, kuda, dan kambing. Sama halnya dengan sektor domestik, program penurunan sektor peternakan direncanakan dengan skala wilayah. Peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor peternakan dapat dilihat pada Gambar 2.38.

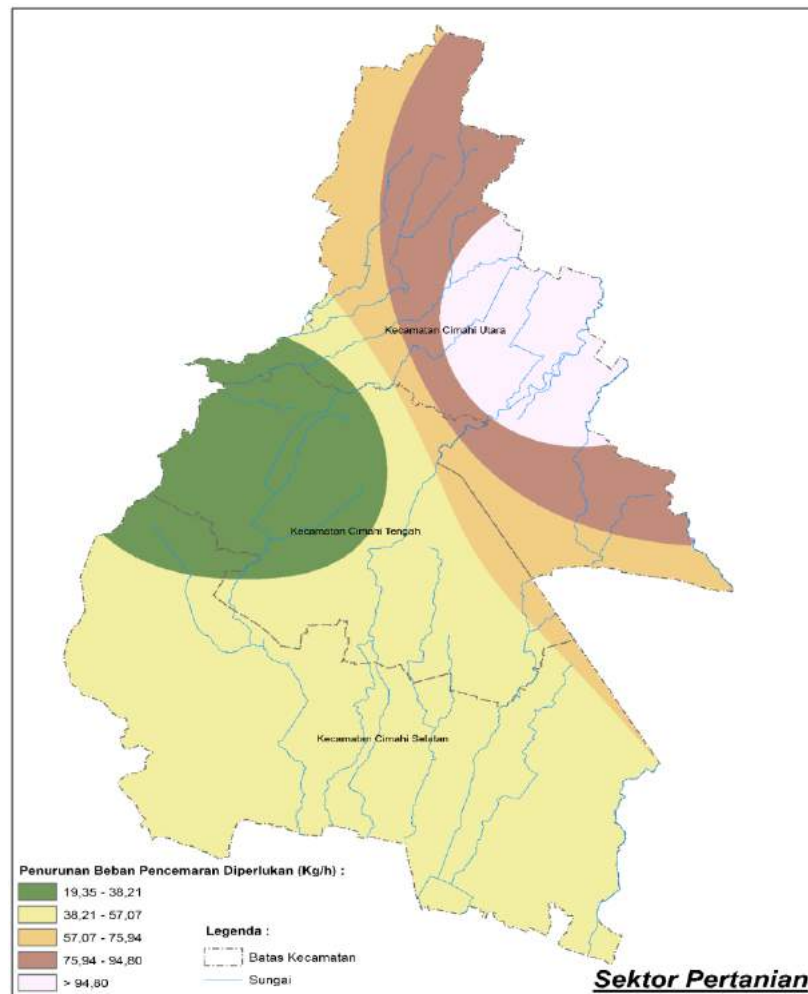


Gambar 2.38 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan

(Sumber: Review RPPLH, 2018; DIKPLHD Kota Cimahi, 2020)

- c) Sektor Pertanian. Adanya kebijakan yang mengharuskan Kota Cimahi menurunkan beban pencemar dari sektor pertanian. Dari arahan tersebut, Kota Cimahi mengembangkan program penurunan beban

pencemar dengan skala wilayah. Dimana sektor sumber pencemar dari sawah dan kebun setiap kecamatan berasal dari persentase luasan total penggunaan lahan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi yang salah satunya dilakukan melalui sektor pertanian. Berikut ini peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor pertanian.



Gambar 2.39 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian

(Sumber: Review RPPLH,2018; DIKPLHD Kota Cimahi, 2020)



- d) Sektor Industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.300/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung beban Pencemaran Air dan Alokasi beban Pencemaran Air Sungai Citarum, Kota Cimahi perlu menurunkan beban pencemar BOD sebesar 2.081,5 kg/hari dari sektor industri.

Beberapa program terkait upaya penurunan beban pencemar ke badan air yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi di antaranya adalah Wirausaha Sanitasi, Program Karismatik, Program Pengerukan Sedimen Sungai dan Drainase, Program Mantri Kamalir, dan Program Kajian Pembentukan Sentra Industri Pengolahan Kota Cimahi, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar Atas, GAS (Gerakan Anti Sembarangan), Solar STBM, dan Program Haur Hiber.

2.2.5.4 Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana sanitasi pada dasarnya erat dengan aspek Kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta ekonomi. Semakin besar akses penduduk kepada fasilitas sanitasi domestik serta pemahaman tentang higiene, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air dan tanah. Sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS merupakan salah satu program unggulan dalam pencapaian akses sanitasi di Kota Cimahi. Berdasarkan www.cimahikota.go.id Pemerintah Kota Cimahi telah membangun lebih dari 40 unit IPAL sanimas yang tersebar di 15 kelurahan. Pada tahun 2019, Kota Cimahi menambahkan 7 unit IPAL sanimas yang berada di Kelurahan Cipageran, Citeureup dan Cibabat. Selain sanimas, Kota Cimahi juga telah mengembangkan sistem perpipaan skala kawasan yang dikelola oleh UPT pengelola air limbah domestik Kota Cimahi dengan jumlah pemanfaatan lebih dari 13.000 jiwa.

2.2.5.5 Penambahan Cadangan Air

Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Ketiga jenis ekoregion tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal. Ekoregion ini memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah yang melimpah, sehingga pegunungan vulkanik berperan sebagai sumber cadangan air yang sangat besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani permasalahan kekurangan air adalah mengendalikan pembangunan dengan peraturan daerah, kemudian menginventarisasi sumur resapan dan biopori. Selama tahun 2020, Kota Cimahi telah mendata aset sumur resapan di tiap Kecamatan. Total sumur resapan di Kota Cimahi sebanyak 42 buah sumur resapan yang tersebar di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Pasir Kaliki, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Cimahi *Technopark*, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka.

2.2.5.6 Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan

Air larian yang tercampur sampah dan masuk ke badan air akan berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Selain itu juga sampah-sampah organik maupun non organik yang dibuang secara sembarangan ke badan air, akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas air, sedangkan pengaruh terhadap kuantitas air sungai yang disebabkan oleh sampah, diantaranya adanya potensi banjir karena aliran di sungai tersumbat oleh sampah.

Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengelola/mengendalikan kualitas air sungai yang disebabkan oleh sampah adalah dengan meningkatkan sarana prasarana persampahan di Kota Cimahi, dengan adanya sarana prasarana yang memadai dapat mengurangi sampah yang masuk ke sungai. Beberapa inovasi atau program yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi di antaranya adalah Program KTT (Kumpul Tukar Tebus) di bank sampah,

Program HO-HA (Hari Organik dan Hari Anorganik), GPS (Gerakan Pungut Sampah), Program siswa ber-*tumbler*, Program Katapel, dan Program Pengelolaan Pasar Rakyat.

2.2.5.7 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Usaha

Bagi pemrakarsa kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, harus menyertakan dokumen lingkungan dengan surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan. Secara rutin, kegiatan usaha yang berlokasi di Kota Cimahi perlu dipantau kesanggupannya dalam mengelola lingkungan yang telah tercantum dalam dokumen lingkungan masing-masing pemrakarsa kegiatan. Kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan limbah cair diwajibkan membuat IPAL untuk mengolah air limbahnya sebelum dialirkan ke badan air. Pada tahun 2020, terdapat 74 kegiatan usaha yang telah tercatat timbulan limbahnya dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-35.

2.3 Kualitas Udara

Kondisi kualitas udara di Kota Cimahi mengacu terhadap data tabel 36 – tabel 40. Selain itu juga didapatkan data penunjang lainnya yang dapat digunakan sebagai data analisis DPSIR pada isu kualitas udara di Kota Cimahi. Pemetaan tabel utama terhadap isu lingkungan kualitas udara dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Kualitas Udara

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
1	Tabel-36 Suhu Udara Rata-rata Bulanan	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
2	Tabel-37 Kualitas Udara Ambien	-	-	✓	-	-	
3	Tabel-38 Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga	-	✓	-	-	-	
4	Tabel-39 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan	✓	-	-	-	-	

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
5	Tabel-40 Perubahan Penambahan Ruas Jalan	-	-	-	-	-	Data Tidak Berubah
6	Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	✓	-	-	-	-	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.3.1 Driving Force

2.3.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatan, Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan penduduk Kota Cimahi. Salah satu kebutuhannya adalah bahan bakar. Bahan bakar ini dibutuhkan untuk kegiatan transportasi, memasak, maupun industri. Peningkatan jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan kecamatannya menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.17.

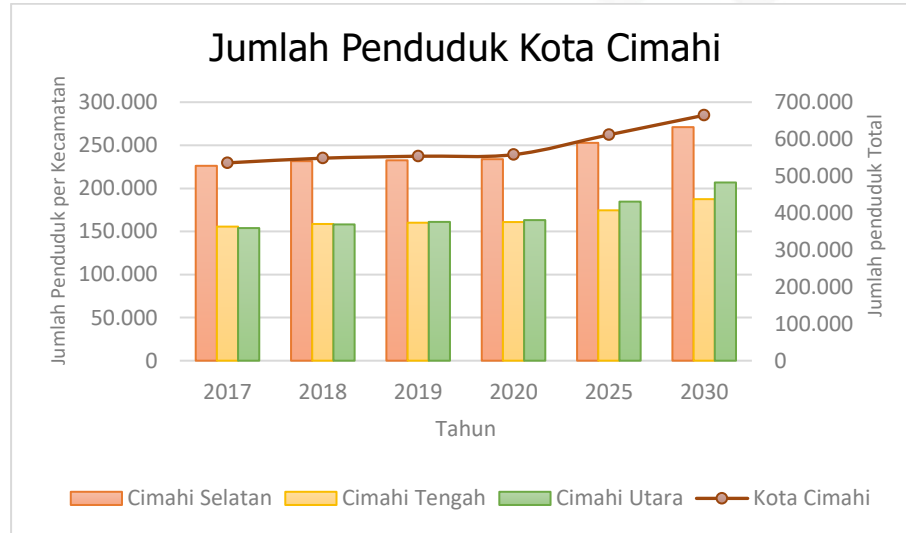
Tabel 2.17 Jumlah dan Proyeksi Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*				Proyeksi Penduduk (Jiwa)**	
		2017	2018	2019	2020	2025	2030
1	Cimahi Selatan	226.167	231.560	232.555	233.850	252.822	271.054
2	Cimahi Tengah	155.610	158.663	160.134	160.906	174.511	187.472
3	Cimahi Utara	153.908	158.150	161.066	163.155	184.600	206.818
	Kota Cimahi	535.685	548.373	553.755	557.911	611.705	664.603

(Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020; **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2020)

Dari Tabel 2.17 didapatkan jumlah penduduk total Kota Cimahi Tahun 2020 sebanyak 557.911 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan konsumsi bahan bakar dan menyebabkan meningkatnya emisi yang disebabkan oleh pembakaran

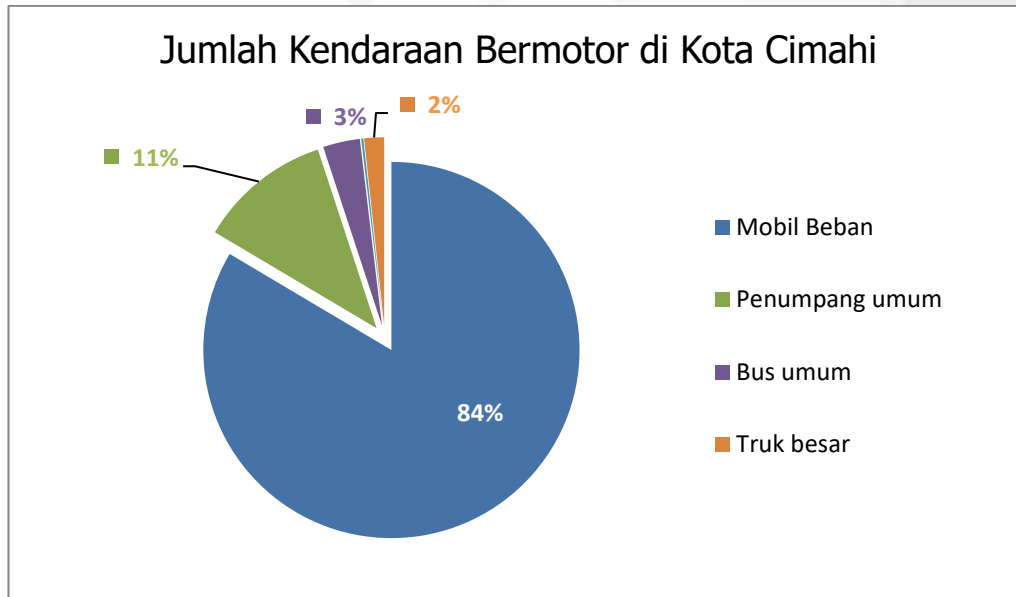
bahan bakar. Peningkatan penduduk juga dapat dilihat melalui peningkatan kepadatan penduduk di Kota Cimahi. Tren jumlah penduduk di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.40.



Gambar 2.40 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.3.1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor

Menurut Dinas perhubungan Kota Cimahi, minat penduduk Kota Cimahi menggunakan angkutan umum semakin menurun. Penduduk Kota Cimahi lebih memilih kendaraan pribadi atau kendaraan online. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan dalam penggunaan kendaraan bermotor di Kota Cimahi. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor maka emisi gas buang akan meningkat dan berpotensi menurunkan kualitas udara. Kualitas udara menurun dikarenakan oleh kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas buang atau emisi. Emisi tersebut akan mempengaruhi komposisi di udara ambien, sehingga dianggap sebagai pencemar udara. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.41.



Gambar 2.41 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020)

2.3.1.3 RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022, salah satu misinya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan guna untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Misi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sehingga kualitas udara Kota Cimahi semakin meningkat. Selain itu juga dalam RPJMD Kota Cimahi, terdapat program peningkatan kualitas udara. Maka program ini memicu kualitas udara untuk semakin baik.

2.3.2 Pressure

2.3.2.1 Kemacetan

Bertambahnya penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan transportasi (kendaraan bermotor). Peningkatan kendaraan bermotor tanpa diimbangi penambahan jalan menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas merupakan bertumpuknya beberapa jumlah

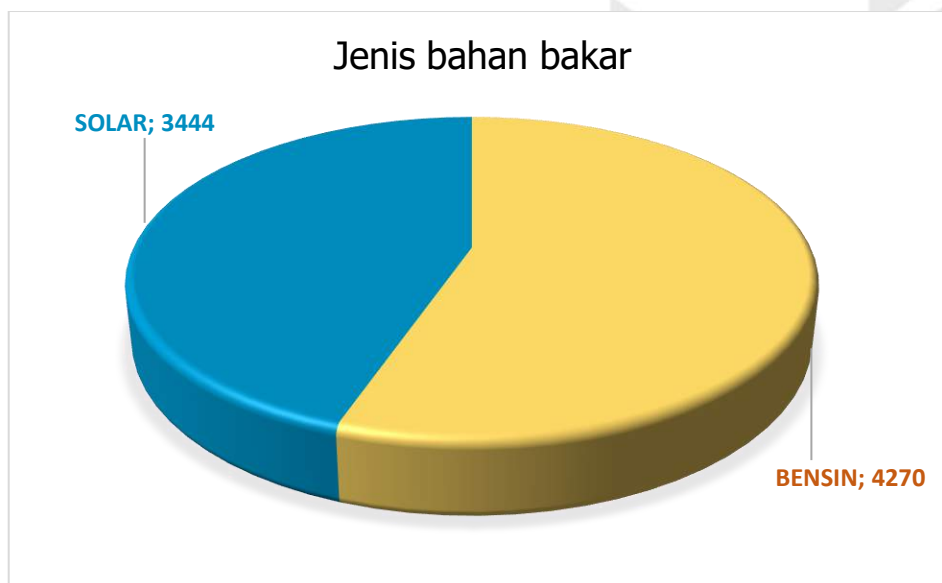
kendaraan dalam suatu ruas jalan tertentu. Lalu lintas yang padat memengaruhi kecepatan dan volume kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Kemacetan umumnya terjadi pada jam-jam sibuk. Terdapat beberapa titik kemacetan di Kota Cimahi, titik-titik kemacetan tersebut berada di sekitar Pemkot Cimahi, Rumah Sakit Dustira, daerah Baros, Cimindi, Jalan Amir Mahmud dan Citeureup. Berdasarkan DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2019, volume kendaraan di beberapa ruas jalan didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua rata-rata sebesar 76% kemudian kendaraan mobil penumpang 23% dan kendaraan angkutan barang sebesar 7%. Jumlah kendaraan bermotor bisa terus meningkat diiringi pertumbuhan penduduk, sedangkan ruas jalan di Kota Cimahi tidak mengalami penambahan, maka pemerintah harus berupaya lebih untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

2.3.2.2 Emisi Bahan Bakar

Sumber pencemar udara berasal dari sumber titik, garis, dan area. Sumber titik adalah sumber tidak bergerak yang biasanya berupa industri manufaktur besar yang memiliki cerobong asap atau unit pembakaran. Sumber bergerak meliputi kendaraan darat dan berbasis rel, seperti kereta api, kendaraan air di sungai, danau dan laut dan kendaraan udara. Sumber area adalah sumber yang terdiri dari sumber-sumber titik kecil yang bersama-sama dapat mempengaruhi kualitas udara di suatu daerah. Emisi bahan bakar disebabkan oleh kegiatan bahan bakar bagi untuk domestik, transportasi maupun industri. Emisi yang dihasilkan berupa gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida (CO_2), Metana (CH_4), dan Dinitrogen Oksida (N_2O), selain gas rumah kaca dihasilkan juga pencemar udara berupa Nitrogen oksida (NO_x), Sulfur oksida (SO_x), Hidrokarbon (HC), Black Karbon (BC), *Non methane volatile organic compound* (NMVOC), *Particulate Matter* 10 (PM₁₀), dan *Particulate Matter* 2,5 (PM_{2,5}). Unsur-unsur tersebut merupakan parameter pencemaran udara, jika mengalami peningkatan konsentrasi di udara maka akan menyebabkan pencemaran udara karena

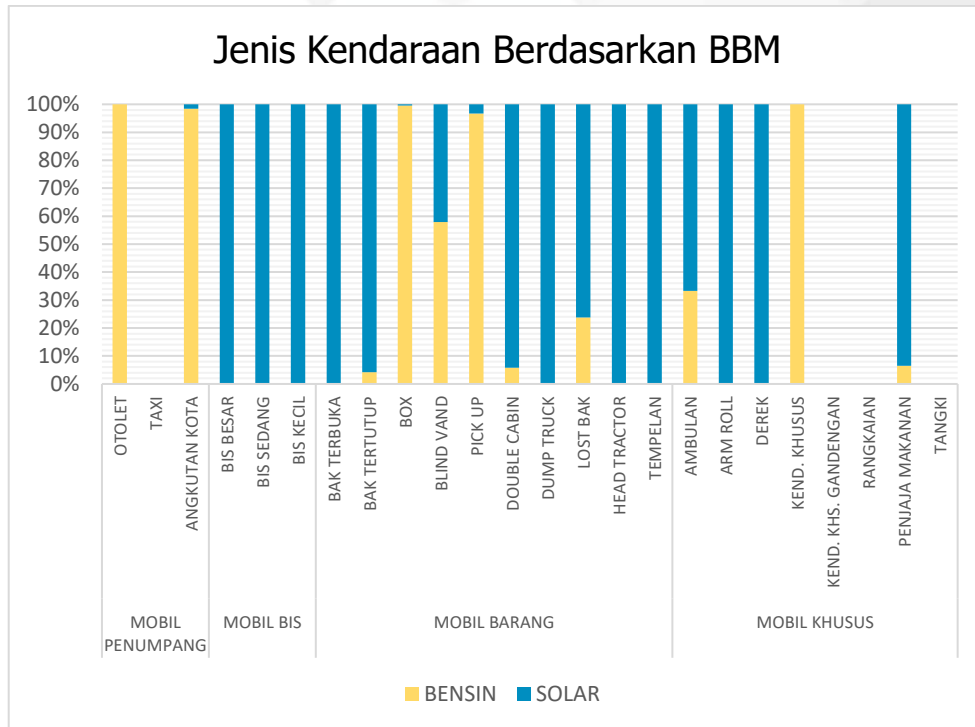
kadarnya melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan, dengan meningkatnya kadar tersebut dampak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun manusia. Emisi bahan bakar juga dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakannya. Bahan bakar tambahan yang umum dipakai oleh industri di Kota Cimahi adalah solar dan batu bara.

Salah satu tekanan dari perubahan kualitas udara di Kota Cimahi adalah emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan berbagai jenis gas dan partikel halus yang mengandung berbagai macam senyawa anorganik dan organik dengan berat molekul yang besar. Jenis bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Cimahi yaitu bensin dan solar, sebanyak 55% masyarakat Kota Cimahi menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan sisanya 45% menggunakan solar. Visualisasi jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.42 dan Gambar 2.43.



Gambar 2.42 Jenis Bahan Bakar yang Banyak Digunakan Masyarakat Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.43 Jenis Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar yang Digunakan

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020)

2.3.2.3 Efek Rumah Kaca dari Kegiatan Industri

Efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas tersebut menyerap radiasi panas dari sinar inframerah dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke lapisan bawah troposfer. Hal tersebut menyebabkan panas terperangkap di permukaan bumi. Gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca adalah *kloro fluoro karbon* (CFC), uap air, karbon dioksida (CO_2), *dinitrous oksida* (N_2O), dan metana (CH_4). Meningkatnya efek rumah kaca akan menimbulkan peristiwa yang dinamakan dengan pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan naiknya suhu di seluruh permukaan bumi yang terjadi di seluruh dunia. Kenaikan suhu ini akan mengakibatkan makhluk hidup kesusahan dalam menjalani hidupnya, hal tersebut karena makhluk hidup harus terus beradaptasi akan iklim yang ada, tidak jarang terjadinya badai, musim kering, banjir, angin topan dan gejala cuaca lainnya yang mempunyai dampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

Gas-gas rumah kaca umumnya disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Sektor industri pada masih banyak yang menggunakan bahan bakar, sehingga sektor industri berkontribusi dalam menimbulkan efek rumah kaca. Berikut adalah kontribusi kegiatan industri dalam menghasilkan gas rumah kaca terdapat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Emisi Gas Rumah Kaca dari Kegiatan Industri

Jenis Bahan Bakar	Jumlah Penggunaan bahan Bakar	Satuan	Beban Emisi CO ₂ (ton/tahun)	Total (ton CO ₂ /tahun)
Bensin	4.258.258	Liter	221.323	
Solar	12.649.711	Liter	779.870	
Minyak Tanah	13.853.738	Liter	831.730	
Batu Bara	153.510.873	Kg	14.752.395	16.776.436
Gas PGN	1.721.209	m ³	67.592	
Gas LPG	347.708	kg	21.940	
Pelumas	1.732.366	Liter	101.586	

(Sumber: DIKPLHD Kota Cimahi, 2020)

Menurut Tabel 2.18, sektor industri mengemisikan gas rumah kaca (CO₂) sebesar 16.776.436 ton CO₂ setiap tahunnya. Tingginya emisi CO₂ dikarenakan masih banyaknya penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama.

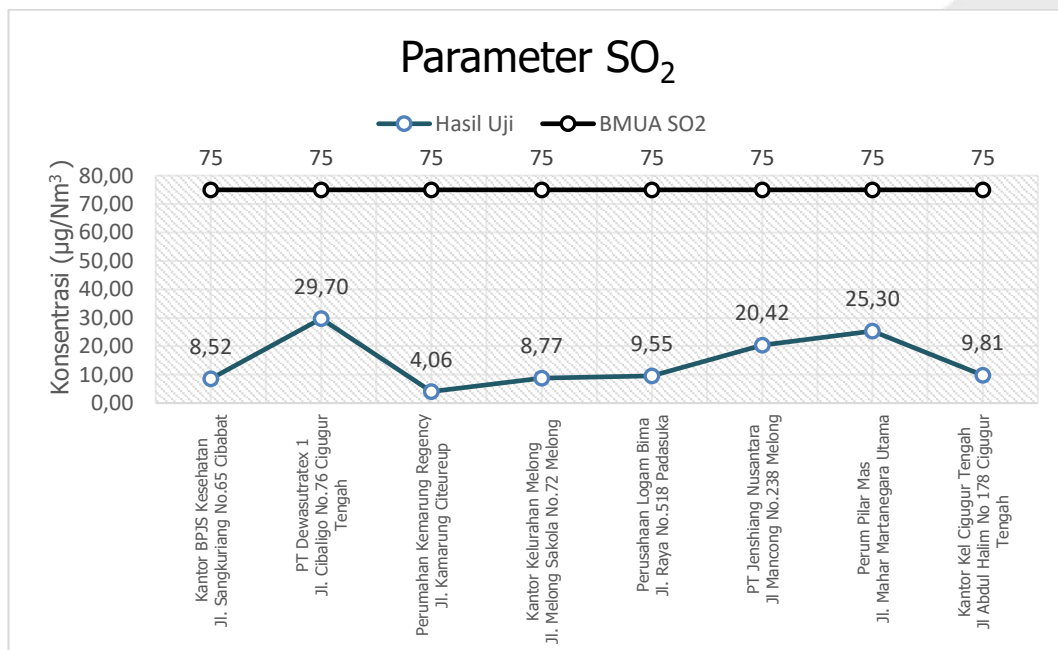
2.3.3 State

2.3.3.1 Kualitas Udara Ambien

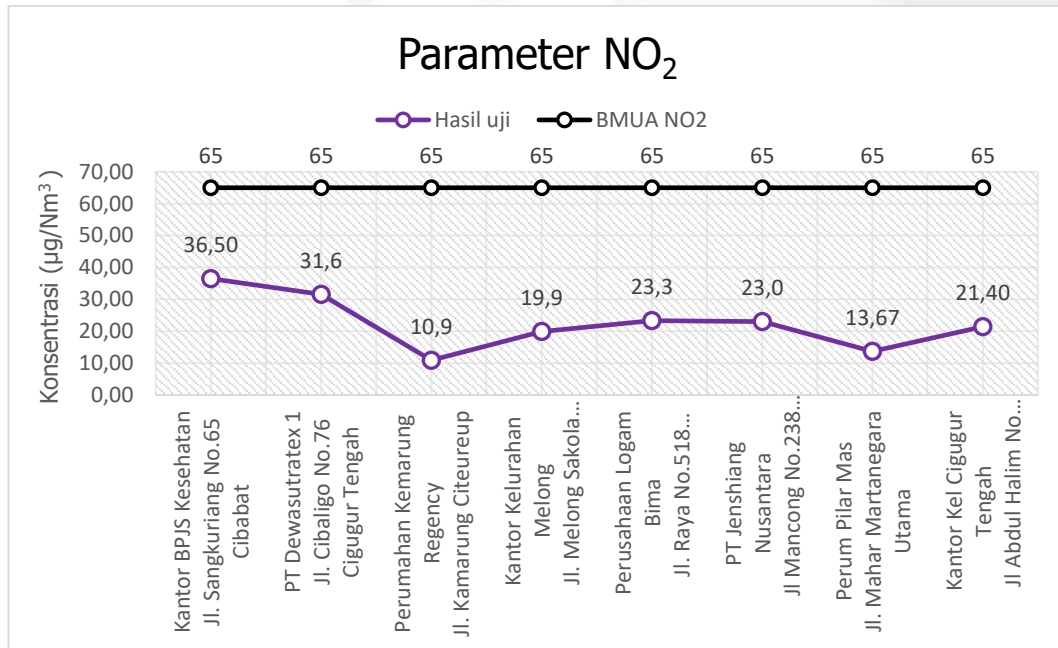
Pengukuran kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk mengetahui dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kualitas udara di Kota Cimahi, pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah melakukan pemantauan kualitas udara di beberapa titik lokasi dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien. Kualitas udara ambien di Kota Cimahi dipengaruhi oleh pencemaran udara yang terjadi di Kota Cimahi. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sumber sumber pencemar udara pada Kota Cimahi diantaranya yaitu kegiatan industri, transportasi, perniagaan dan permukiman. Selain dari keempat sektor tersebut pencemaran udara di Kota Cimahi juga dipengaruhi oleh kegiatan pembakaran sampah yang masih banyak dilakukan. Kondisi kualitas udara ambien di Kota Cimahi pada pemantauan tahun 2020 dapat pada Lampiran II Tabel-37.

Pada pengukuran kualitas udara ambien, baku mutu yang digunakan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsentrasi SO_2 yang diperbolehkan yaitu $75 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ (waktu pengukuran 24 jam) dan konsentrasi NO_2 yang diperbolehkan yaitu $65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ (waktu pengukuran 24 jam).



Gambar 2.44 Konsentrasi SO_2 di Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.45 Konsentrasi NO₂ di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Berdasarkan Gambar 2.44 dan Gambar 2.45 hasil pengukuran parameter NO₂ dan SO₂ disetiap titik sampling masih memenuhi baku mutu PP No. 21 tahun 2021 tentang Pengendalian pencemaran udara.

2.3.3.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat, termasuk di Kota Cimahi. Bertambahnya jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan transportasi dan energi. Penyusunan indeks kualitas udara (IKU) bertujuan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pengelolaan kualitas udara yang berdasarkan hasil indeks, juga dapat memberikan masukan berupa pengambilan keputusan dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas udara.

Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan 8 area lokasi tersebar di area industri, perkantoran dan perumahan. Parameter yang digunakan dalam penentuan IKU adalah SO₂ dan NO₂ sesuai dengan

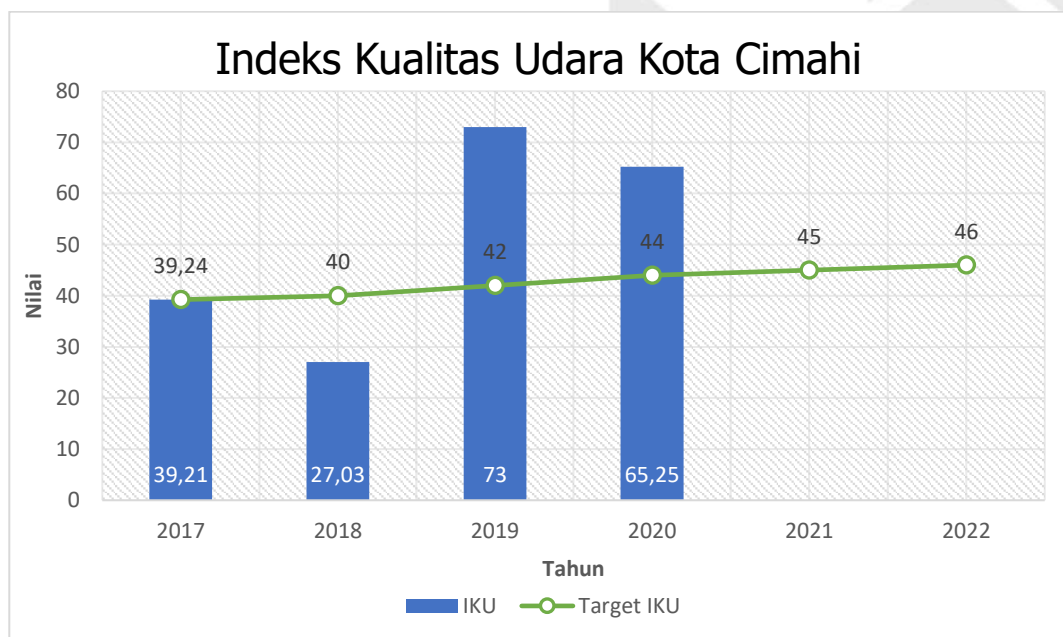
S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Digunakannya parameter NO_2 karena mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin sedangkan untuk parameter SO_2 merepresentasikan emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Setelah mendapatkan konsentrasi dari SO_2 dan NO_2 , kemudian konsentrasinya dirata-rata lalu dibandingkan dengan baku mutu (referensi EU) dan dikonversi menjadi nilai indeks kualitas udara. Nilai indeks kualitas udara Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Indeks Kualitas Udara

Parameter	konsentrasi rata-rata (ug/m ³)	I_{eu}	I_{eu} gabungan	IKU	Kelas Indeks
NO_2	22,99	0,876	0,72	65,25	cukup
SO_2	17,52	0,575			

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 2.46 Tren Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berdasarkan Gambar 2.46, indeks kualitas udara di Kota Cimahi termasuk cukup karena berada didalam rentang 66-74. Dilihat dari tren IKU tahun

2018-2020 bahwa kualitas udara di Kota Cimahi cenderung membaik. Nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, serta dukungan pihak pemerintah daerah dan instansi. Target indeks kualitas udara Kota Cimahi menurut RPJMD tahun 2017-2022 sudah tercapai, namun upaya peningkatan kualitas udara harus tetap dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi. Tahun 2020, sejak diberlakukannya kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka meminimalisasi penyebaran virus COVID-19, turut memberikan dampak positif terhadap kondisi kualitas udara ambien di Kota Cimahi. Adanya kebijakan PSBB, berdampak pada pengurangan operasional industri dan pengurangan volume kendaraan bermotor sejalan dengan meningkatnya kualitas udara di Kota Cimahi.

2.3.3.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, nilai ISPU terbagi menjadi 5 kategori yaitu baik (0-50), sedang (51-100), tidak sehat (101-200), sangat tidak sehat (201-300), dan berbahaya (>301). Hasil perhitungan untuk ISPU di Kota Cimahi dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Perhitungan Nilai ISPU Setiap Pencemar Udara

Lokasi	SO ₂		NO ₂	
	ISPU	Kategori	Nilai ISPU	Kategori
Kantor BPJS Kesehatan Jl. Sangkuriang No.65 Cibabat	8,1923	Baik	22,81	Baik
PT Dewasutratex 1 Jl. Cibaligo No.76 Cigugur Tengah	28,558	Baik	19,75	Baik
Perumahan Kemarung Regency Jl. Kamarung Citeureup	3,9038	Baik	6,81	Baik

Lokasi	SO ₂		NO ₂	
	ISPU	Kategori	Nilai ISPU	Kategori
Kantor Kelurahan Melong Jl. Melong Sakola No.72 Melong	8,4327	Baik	12,44	Baik
Perusahaan Logam Bima Jl. Raya No.518 Padasuka	9,1827	Baik	14,56	Baik
PT Jensiang Nusantara Jl. Mancong No.238 Melong	19,635	Baik	14,38	Baik
Perum Pilar Mas Jl. Mahar Martanegara Utama	24,327	Baik	8,54	Baik
Kantor Kel. Cigugur Tengah Jl. Abdul Halim No. 178 Cigugur Tengah	9,4327	Baik	13,38	Baik

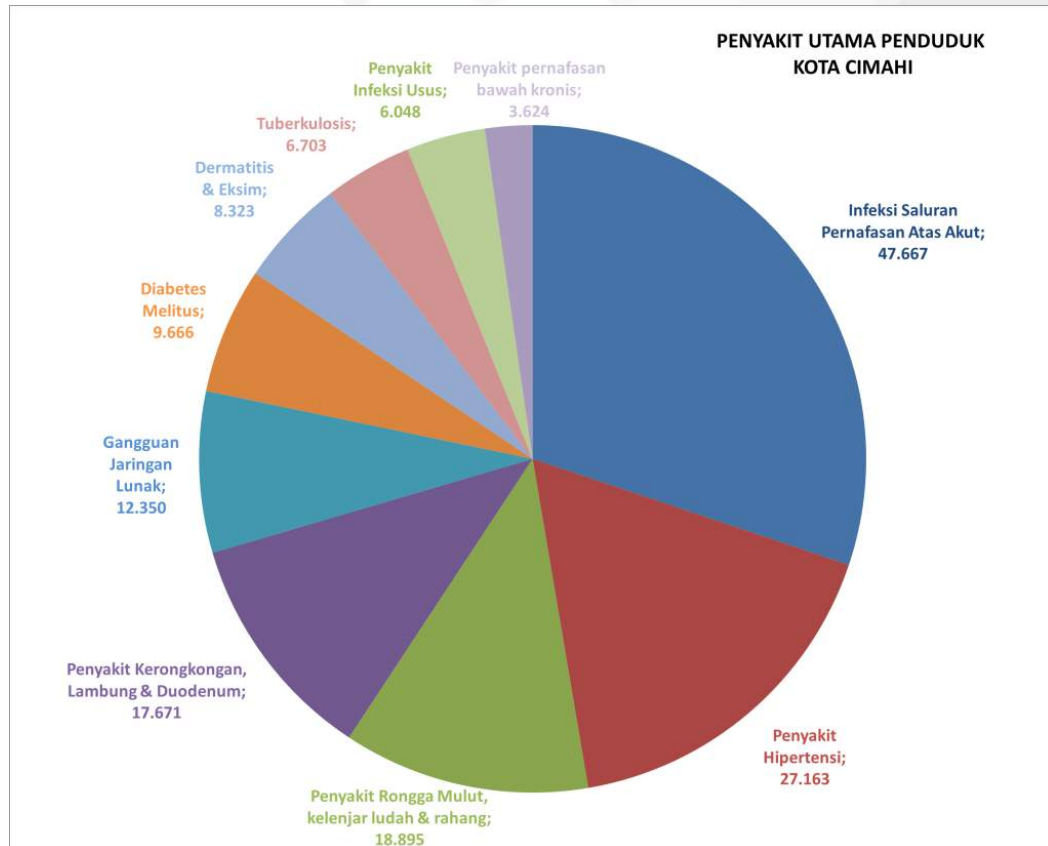
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Dari perhitungan nilai ISPU diperoleh bahwa parameter NO₂ di lokasi Kantor BPJS memiliki nilai tertinggi dan untuk parameter SO₂ di lokasi PT. Dewasutratex, lokasi dengan nilai ISPU tertinggi. Akan tetapi tingginya nilai ISPU dari kedua parameter tersebut, masih termasuk kedalam kategori ISPU baik yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

2.3.4 Impact

2.3.4.1 Penyakit yang Diderita Masyarakat

Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan manusia. Dampak tersebut diantaranya infeksi saluran saluran pernapasan, penyakit paru-paru, penyakit kulit, dan lain-lain. Berikut adalah jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.47.



Gambar 2.47 Penyakit Utama Penduduk Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

Menurut Gambar 2.47 penyakit yang paling diderita yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Salah satu pemicu penyakit infeksi saluran pernafasan antara lain adalah buruknya kualitas udara ambien di Kota Cimahi, dikarenakan pencemar udara terhirup dan masuk kedalam tubuh.

2.3.4.2 Pemanasan Global

Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dengan pencemaran udara saat ini. Peningkatan gas karbon dioksida yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana seluruh gas berbahaya terjebak pada atmosfer bumi. Panas dan radiasi dari matahari terjebak dan dipantulkan Kembali ke bumi. Polutan yang berada pada atmosfer bisa bertahan hingga bertahun-tahun dan mengakibatkan

suhu permukaan bumi terus meningkat. Polusi yang dihasilkan oleh pabrik juga menjadikan efek rumah kaca semakin parah.

2.3.5 Response

2.3.5.1 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala

Dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara khususnya terkait dengan udara ambien. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas udara di beberapa titik pemantauan. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data series kualitas udara setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik.

Pemantauan yang dilakukan merupakan daerah yang mewakili sektor-sektor sumber pencemar kualitas udara ambien diantaranya sektor perniagaan, permukiman, industri dan transportasi.

Selain pemantauan terhadap sumber tidak bergerak, pemerintah Kota Cimahi melakukan uji emisi terhadap sumber bergerak yaitu pada kendaraan-kendaraan di Kota Cimahi, hasil uji emisi tersebut bertujuan sebagai tolak ukur emisi yang dihasilkan oleh kendaraan yang berada di Kota Cimahi.

2.3.5.2 Rekayasa Lalu Lintas dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Kota Cimahi menyadari salah satu sumber pencemar di Kota Cimahi yang mempengaruhi kualitas udara salah satunya adalah berasal dari kendaraan bermotor. Keberadaan kendaraan bermotor dan padatnya lalu lintas ketika hari kerja di Kota Cimahi menghasilkan emisi-emisi dari kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas setiap hari libur (minggu) dengan dilakukan *Car Free Day* dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan



masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan mengurangi dampak efek pemanasan global yang berbahaya bagi kehidupan akibat makin tingginya jumlah kendaraan bermotor baik itu polusi udara ataupun polusi suara. Selain itu juga rekayasa lalu lintas dilakukan pada hari kerja melalui Dinas Perhubungan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan.

Selain pemberlakuannya *Car Free Day*, Tahun 2020, Kota Cimahi memberlakukan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya kebijakan PSBB masyarakat tidak diperkenankan untuk keluar rumah dengan dan atau tanpa kendaraan bermotor. Dengan pemberlakuannya kebijakan PSBB turut memberikan dampak positif terhadap kondisi kualitas udara ambien di Kota Cimahi.

2.3.5.3 Ramp Check

Pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Pelayanan ini diberikan oleh Dinas perhubungan Kota Cimahi yang bertujuan untuk:

- Memberikan Jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- Memberikan pelayanan umum kepada kendaraan bermotor milik masyarakat.

Kegiatan ramp check (uji kelayakan kendaraan) kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, kegiatan ini melakukan pemeriksaan emisi gas buang dengan menggunakan uji emisi portabel. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap kendaraan bermotor dapat memenuhi standar uji emisi yang ditetapkan.



2.3.5.4 Penataan Jalan

Permasalahan transportasi Kota Cimahi harus ditinjau dari sudut pandang kota sebagai bagian wilayah Metropolitan Cekungan Bandung. Pergerakan lalu lintas orang dan barang yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh internal Kota Cimahi saja, akan tetapi sebagai daerah perlintasan dari kota-kota sekitarnya. Kondisi inilah yang menyebabkan Kota Cimahi mengalami masalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di beberapa titik akan berdampak terhadap emisi kendaraan yang dihasilkan. Sehingga penataan jalan dilakukan sebagai mengurai kemacetan juga untuk dapat meminimalisir emisi kendaraan yang berada di satu lokasi dalam jangka waktu yang lama.

Kota Cimahi dilintasi oleh 2 (dua) Jalan Nasional yaitu Jalan Tol dan Jl. Jend. H. Amir Machmud dan 4 (empat) Jalan Provinsi yaitu Jl. Kol. Masturi, Jl. Gatot Subroto, Jl. Baros dan Jl. Nanjung. Aksesibilitas jalan menuju pintu masuk Jalan Tol di Kota Cimahi (Gerbang Tol Baros) merupakan jalan dengan kewenangan kota (Jl. HMS Mintaredja, SH) yang secara hierarki dua tingkat dibawahnya. Adanya usulan penataan terhadap hierarki jalan di Kota Cimahi dengan melakukan perubahan peningkatan status jalan, yaitu Jl. HMS Mintaredja, SH. dan Jl. Mahar Martanegara yang semula sebagai jalan arteri sekunder (kewenangan kota) menjadi jalan kolektor primer (kewenangan provinsi).

2.3.5.5 Kegiatan *Earth Hour*

Pemanasan global merupakan isu lingkungan yang dihadapi secara bersama-sama dari nasional hingga internasional. Salah satu pengendalian pemanasan global yang bisa dilakukan menghemat penggunaan energi. Pemerintah Kota Cimahi pada turut serta dalam program "*Earth Hour*", program tersebut menyuarakan aksi peduli lingkungan dengan mematikan lampu selama satu jam. Program yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 ini tidak dilakukan dengan pengumpulan massa karena terkendala

Covid-19, namun masyarakat diimbau untuk mematikan lampu dan alat elektronik lainnya di kediamannya masing-masing. Tujuan program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi ini adalah menghemat dan memelihara energi dan berbagai sumberdaya alam maupun buatan, agar pencemaran dapat tereduksi dan panas bumi bisa terkendali.

2.3.5.6 Penghargaan Lingkungan bagi Industri

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini sebagai jawaban dari tekanan emisi dari kegiatan industri. Penghargaan lingkungan yang telah diterima terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebanyak 13 perusahaan dengan kategori PROPER BIRU.

2.4 Risiko Bencana

Menurut UN-ISDR (*United Nations International Strategic of Disaster Reduction*) tahun 2009, risiko bencana adalah potensi kerugian yang diakibatkan bencana terhadap nyawa, status Kesehatan, penghidupan, aset dan layanan yang dapat terjadi pada satu komunitas atau masyarakat tertentu selama jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bencana sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Bencana sering diartikan pula sebagai kecelakaan atau bahaya. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 84,28 dengan kelas risiko sedang. Bencana di Kota Cimahi yang tercatat yaitu banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor. Analisis risiko bencana merumuskan informasi rawan bencana dan faktor-faktor pendorong terjadinya bencana yang berpotensi menimbulkan bencana alam di Kota Cimahi serta respons

yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Analisis risiko bencana menggunakan tabel 44, namun beberapa tabel lainnya juga digunakan untuk menunjang analisis. Pemetaan tabel terhadap analisis isu risiko bencana dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
1	Tabel-2. Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama	✓	-	-	-	-	
2	Tabel-32 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	-	✓	-	-	-	
3	Tabel-44 Kebencanaan	-	-	✓	-	-	
4	Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	✓	-	-	-	-	
5	Tabel-49 Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi	-	-	-	-	✓	
6	Tabel-61 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	✓	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.4.1 Driving Force

2.4.1.1 Kondisi Topografis Kota Cimahi

Kota Sejak awal, potensi bencana sangat dipengaruhi oleh profil geografi dan kependudukan, profil geologi, porfil lingkungan, topografi, dan iklim suatu daerah. Kota Cimahi memiliki kondisi topografi ketinggian yang beragam mulai dari 685 mdpl hingga 1.075 mdpl, hal ini menjadi pendorong timbulnya risiko bencana di suatu wilayah, seperti bencana tanah longsor dan banjir di dataran yang lebih rendah. Dapat dilihat pada Tabel 2.22, kemiringan lereng di Kota Cimahi tersebar beragam di setiap kecamatan. Keadaan topografi seperti ini akan diperburuk dengan perubahan lahan

yang mengganggu kestabilan tanah, seperti dibangunnya perumahan atau bangunan lainnya.

Tabel 2.22 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	Luas Km ²
1	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	13,3
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	10,0
3	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	16,9
Total Luas (km²)		36,20	1,40	1,33	0,99	0,28	40,20

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, Bappeda, 2015)

2.4.1.2 Struktur Sesar Lembang

Di wilayah Kota Bandung terdapat struktur Sesar Lembang dengan Panjang jalur sesar yang mencapai 30 km. Hasil kajian menunjukkan bahwa laju pergeseran Sesar Lembang mencapai 5,0 mm/tahun, sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya beberapa aktivitas seismik dengan kekuatan kecil akibat Sesar Lembang (Aji, 2018). Patahan Lembang terbentang dari timur ke barat di kawasan sebelah utara Bandung, yang dicirikan oleh kelurusan untaian bukit-bukit, mulai dari daerah sebelah timur tempat pariwisata Maribaya sampai ke daerah Cisarua-Cimahi. Berdasarkan BMKG (2017), bahwa adanya potensi gempa bumi di jalur Sesar Lembang dengan magnitudo maksimum M=6,8. Hartadi (dalam Aji, 2018) menyatakan permasalahan utama dari peristiwa-peristiwa gempa adalah sangat potensial mengakibatkan kerugian yang besar, merupakan kejadian alam yang belum dapat diperhitungkan dan diperkirakan secara akurat waktu, tempat dan besar *magnitudonya* dan gempa tidak dapat dicegah.



Gambar 2.48 Lokasi Sesar Lembang

2.4.1.3 Peningkatan Lahan Permukiman

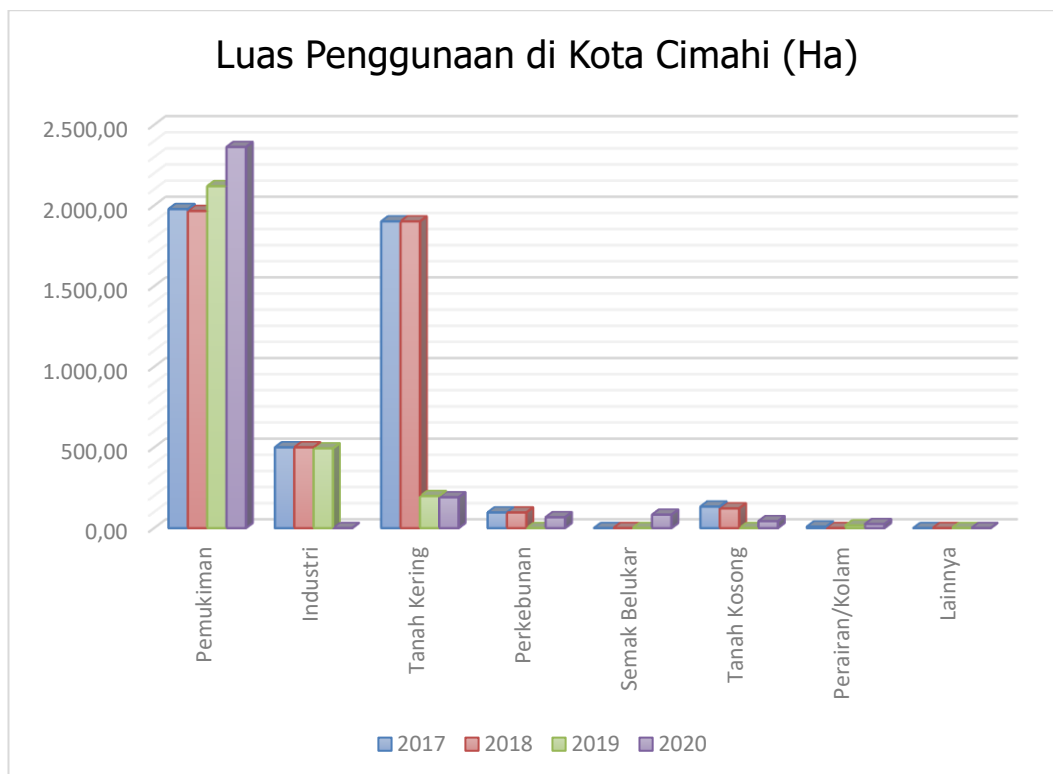
Perubahan penggunaan lahan perlu diperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Selama 4 tahun (2017-2020), perubahan luas lahan di Kota Cimahi berdasarkan pemanfaatannya ditunjukkan pada tabel 2.23. Luas lahan permukiman dari tahun ke tahun cenderung mengalami penambahan karena jumlah penduduknya pun bertambah setiap tahun. Kaitan perubahan penggunaan lahan dengan bencana dapat berupa risiko kebakaran yang tinggi karena padatnya permukiman penduduk, juga perubahan lahan juga akan mengurangi daerah resapan air sehingga air hujan yang turun berpotensi lebih banyak yang menjadi air larian (*run off*). Hal ini akan menyebabkan genangan atau bahkan banjir, jika tidak didukung dengan sistem drainase yang memadai.

Tabel 2.23 Luas Perubahan Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan			
		2017	2018	2019	2020
1	Permukiman	1.977,92	1.966,38	2.120,05	2.363,23
2	Industri	500,575	500,575	494,43	N/A
3	Tanah Kering	1.901,77	1901,773	198,64	191
4	Perkebunan	96,894	96,744	N/A	67,35
5	Semak Belukar	N/A	N/A	N/A	83,14

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan			
		2017	2018	2019	2020
6	Tanah Kosong	133,509	122,329	N/A	42,92
7	Perairan/Kolam	9,13	N/A	16,69	25,02
8	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A

(Sumber: DPUPR dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.49 Tren Perubahan Penggunaan Lahan Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.4.1.4 Pandemi COVID-19 di Dunia

Kehadiran virus jenis baru sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, China menjadi awal dari kejadian luar biasa yang menimpa dunia hingga saat ini. Corona virus atau dikenal dengan nama ilmiah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*. Pada bulan Desember tahun 2019, banyak kasus yang muncul di Wuhan dan dengan cepat menyebar ke tempat lain di China, kemudian Eropa, Amerika Utara dan Asia. Tercatat pada tanggal 5



Maret 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 95.333 jiwa dan 3.282 kematian di seluruh dunia (Fajrin et al., 2021).

Virus Corona memiliki kemampuan penularan yang cepat. Pada awalnya, Virus Corona belum diketahui secara pasti penyebarannya. Kebanyakan pihak berwenang menganggap remeh penularan virus ini dari manusia ke manusia, namun semakin meningkatnya kasus yang terjadi semakin memperjelas penularan virus diantara manusia. Penyebaran virus diperkirakan terjadi dari manusia ke manusia melalui butiran pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan influenza. Tetesan (*droplet*) bisa mencapai mulut atau hidung orang terdekat, bahkan mungkin dihirup ke organ pernapasan. Azizah (2021) mengatakan jumlah kematian akibat infeksi Virus Corona di seluruh dunia mencapai lebih dari 4 juta orang, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih banyak orang yang meninggal tetapi tidak tercatat. Sehingga Direktur Jenderal (Dirjen) organisasi WHO mengatakan dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemic COVID-19, karena varian virus ini yang terus menyebar secara cepat.

2.4.2 Pressure

2.4.2.1 Pertumbuhan Penduduk

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa faktor pendorong berupa perubahan lahan akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya penduduk di suatu kota. Tidak hanya menyebabkan perubahan lahan, pertumbuhan penduduk juga diiringi dengan timbulan sampah yang turut mempengaruhi isu ini. Maka tekanan terhadap risiko bencana salah satunya disebabkan oleh jumlah manusia yang semakin banyak.

2.4.2.2 Kondisi Saluran Drainase

Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang tinggi, hujan terus menerus dengan intensitas yang tinggi akan mengakibatkan genangan air jika penampungan air melebihi kapasitasnya. Dikutip dari pernyataan

Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), hasil kajian *review* rencana induk drainase di tahun 2018 menunjukkan bahwa sungai-sungai di Kota Cimahi perlu diperlebar. Khususnya sungai-sungai yang ada di wilayah hilir yang akan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Sungai-sungai tersebut diantara ialah Sungai Cilember, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibiuk. Menyempitnya sungai bisa menjadi tekanan terhadap terjadinya risiko bencana banjir di Kota Cimahi. Selain itu, kondisi saluran drainase menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Saluran drainase merupakan saluran yang mengalirkan air sebanyak-banyaknya ke sungai dan bermuara di laut. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, kondisi saluran drainase sudah tidak memadai. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sampah dan endapan, bangunan liar di atas saluran, utilitas umum PLN yang melintasi gorong-gorong, saluran yang curam, kurangnya pemeliharaan dan inspeksi, serta terdapatnya bendungan irigasi yang tidak berfungsi dan menghalangi aliran di tengah sungai. Kondisi eksisting dari sistem drainase di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.50.



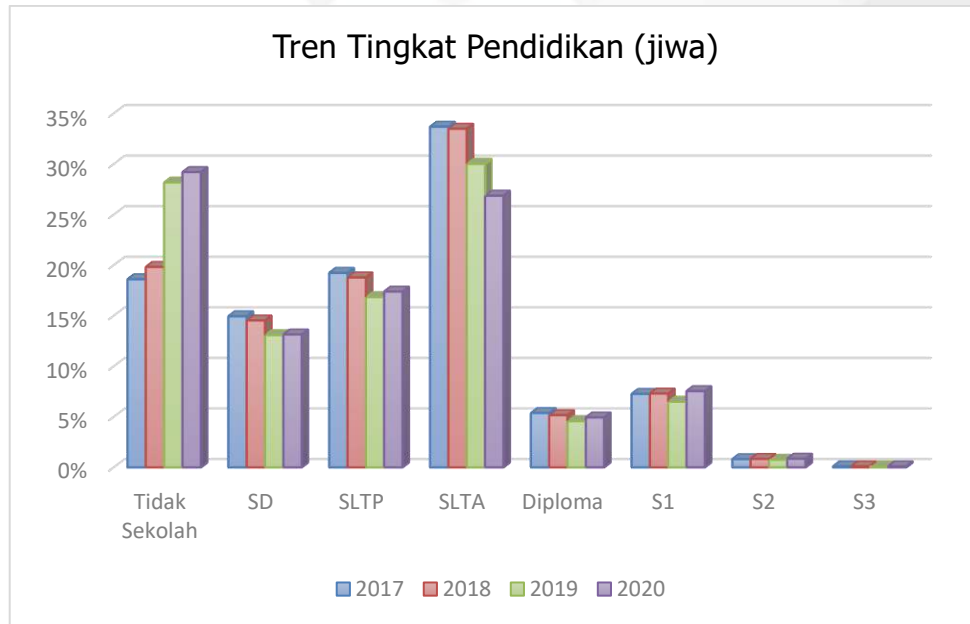
Gambar 2.50 Kondisi Saluran Drainase di Kota Cimahi

2.4.2.3 Perilaku Masyarakat

Faktor perilaku masyarakat berkontribusi terhadap timbulnya bencana. Perilaku masyarakat terkait pembuangan dan pengelolaan sampah mempengaruhi peningkatan volume sampah di Kota Cimahi. Pengelolaan sampah yang tidak maksimal berdampak pada peningkatan pencemaran di sungai dan lokasi lainnya yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah yang dibuangnya ke saluran drainase atau sungai menyebabkan penyumbatan aliran sungai dan drainase sehingga air meluap dan menimbulkan bencana banjir ketika hujan lebat datang.

Tingkat perekonomian suatu kota berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada taraf dan pola konsumsi masyarakat. Dalam Dokumen "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2016" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran masyarakat Kota Cimahi lebih banyak digunakan untuk bahan non makanan dibanding bahan makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup sejahtera. Pola konsumsi seperti ini juga menunjukkan jumlah sampah yang ditimbulkan. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin banyak pula sampah yang ditimbulkan.

Di samping pola konsumsi, edukasi tentu merupakan hal yang perlu ditekankan terkait timbulan sampah. Edukasi berupa penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan penanganan sampah, seperti tidak membakar sampah, tidak sampah ke saluran drainase atau sungai sangat perlu dilaksanakan kepada pemangku kepentingan dari kecamatan hingga desa-desa. Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak mendapat pendidikan yang memadai. Tren tingkat pendidikan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.51.



Gambar 2.51 Tren Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi

(Sumber: Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.4.2.4 Peningkatan *Run Off*

Pembangunan areal kota yang cepat akibat peningkatan taraf ekonomi menyebabkan kebutuhan lahan tempat tinggal dan kegiatan usaha semakin diminati. Alih fungsi lahan menjadi tidak terkendali, sehingga mengurangi daerah resapan air. Peningkatan air larian (*run off*) menjadi salah satu parameter yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan air. Selain karena penyempitan lahan, topografi juga mempengaruhi aliran air *run off*, aliran air meningkat seiring bertambahnya kemiringan lahan. Semakin banyak air *run off*, risiko bencana akan semakin meningkat. Air larian yang mengalir di tanah curam berpotensi untuk menyebabkan terjadinya tanah longsor.

2.4.2.5 Pandemi COVID-19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia menjadi perhatian utama hingga saat ini, terutama di Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang (Ratcliffe, 2020). Sampai tanggal 20 Juli 2021, Indonesia telah melaporkan 2.950.058



kasus positif dengan 76.200 kasus kematian. Jumlah kasus positif-sembuh-meninggal terus direkam dengan cermat dan disajikan di portal resmi pemerintahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalkan penyebaran virus tersebut seperti pembatasan sosial, penerapan "*lockdown*" pada beberapa wilayah, termasuk diwajibkannya penggunaan masker. Namun, jumlah timbulan limbah medis yang dibuang selama masa penanganan COVID-19 menjadi permasalahan lain yang harus diperhatikan dengan serius. Jumlah limbah medis terus bertambah seiring dengan terus meningkatkan angka penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam periode beberapa hari setelah pasien pertama dikonfirmasi positif COVID-19, sampai dengan 4 Februari 2021 timbulan limbah medis COVID-19 mencapai 6.417,95 ton (Violleta, 2021).

Perlu kita ketahui limbah medis ialah segala jenis limbah yang mengandung bahan infeksius (atau bahan yang berpotensi infeksius). Limbah medis terdiri dari fase cair dan padat. Penanganan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Limbah medis COVID-19 dihasilkan oleh beberapa sumber antara lain RS rujukan COVID-19, fasilitas khusus yang digunakan pasien terkait COVID-19, fasyankes yang berfungsi selama ini, rumah tangga serta fasilitas umum yang menghasilkan sampah biasa. Limbah medis ini tidak hanya dihasilkan dari aktivitas fasilitas kesehatan saja, namun juga dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) masyarakat sehari-hari seperti masker, sarung tangan, *face shield* yang sebagian besar berbahan dasar plastik dengan masa penggunaan sekali pakai. Limbah medis COVID-19 juga dapat berupa specimen, bahan farmasi bekas, alat kesehatan bekas, dan kemasan bekas makanan/minuman pasien COVID-19 (Prasetiawan, 2020). Harono (2020) menjelaskan bahwa limbah medis

merupakan jenis limbah infeksius yang perlu penanganan khusus untuk mengurangi risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.

2.4.3 State

2.4.3.1 Kebencanaan

Selama tahun 2020, Kota Cimahi dilanda bencana beberapa bencana. Bencana-bencana yang terjadi tidak memakan korban jiwa, tapi menyebabkan beberapa korban harus mengungsi, bahkan perkiraan kerugian akibat bencana mencapai ±Rp12.000.000.000. Wilayah yang terkena bencana banjir yaitu RT01, RT02, dan RT04 RW02 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan. Bencana tanah longsor terjadi di RT04 RW20 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah. Bencana angin puting beliung terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan, serta terdapat rumah roboh di Kecamatan Cimahi Utara. Selain itu, bencana kebakaran juga kerap terjadi di Kota Cimahi terutama di Kecamatan Cimahi Utara yang tercatat sebanyak 4 kasus kebakaran, lalu terdapat 3 kasus kebakaran di Kecamatan Cimahi Selatan, dan 1 kasus di Kecamatan Cimahi Tengah. Data kebencanaan yang terjadi di Kota Cimahi selama tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Bencana yang Terjadi di Kota Cimahi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak	Kerugian
1	Cimahi Selatan	RT. 01, 02 dan 04 RW. 02 Melong	Banjir	3100	Tidak diketahui
2	Cimahi Tengah	Kp. Kebon Manggu RT. 04 RW. 20 Padasuka	Tanah Longsor	300	Tidak diketahui
3	Cimahi Utara	Jl. Cikendal RT. 01 RW. 04 Cipageran	Rumah Roboh	6	Tidak diketahui
4	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo RT. 03 RW. 06 Leuwigajah	Angin kencang	100	Tidak diketahui
5	Cimahi Tengah	Jl. Dustira RT 02 Rw 20	Kebakaran	40	Rp65.000.000
6	Cimahi Utara	Komp. Buciper Jl. Bina No.33 Rt.04 Rw.16 Kel. Citereup. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	63	Rp23.000.000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak	Kerugian
7	Cimahi Selatan	Jl.Mukodar dalam No.67 Rt. 01 Rw. 08 Ciberem Cimahi Selatan	Kebakaran	0	Rp20.000.000
8	Cimahi Tengah	Jl. Abdul Halim No. 14	Kebakaran	60	Rp3.000.000
9	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.70	Kebakaran	15	Rp3.000.000.000
10	Cimahi Selatan	Jl. Melong asih gg delima 2 kel melong kecamatan cimahi selatan	Kebakaran	-	Tidak diketahui
11	Cimahi Selatan	jl. Nanjung no 108 rt 4 rw 13 kel. Utama	Kebakaran	-	Rp1.000.000
12	Cimahi Selatan	Komp. Melong Green Garden Jl. Hercules Raya No 26. RT 2 RW 23 Kel. Melong	Kebakaran	100	Rp450.000.000
13	Cimahi Tengah	Jl. Cisangkan Girang Rt6 Rw 2 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	-	Rp80.000.000
14	Cimahi Selatan	Jl. Industri IV No.2 Kel Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	-	Rp40.000.000
15	Cimahi Selatan	jl. Mahar Martanegara No. 151 RT.02 RW.08 Cimahi Selatan	Kebakaran	450	Rp250.000.000
16	Cimahi Selatan	Jl. Mahar Martanegara, bawahflyofer cimindi	Kebakaran	-	Rp35.000.000
17	Cimahi Utara	Jl. Paneli 1 2A Rt 5 Citereup	Kebakaran	-	Tidak diketahui
18	Cimahi Utara	Komplek Cimindi raya Blok B No 4 Rt 4 Rw4. Pasirkaliki, Cimahi Utara	Kebakaran	200	Rp50.000.000
19	-	Tol km 124 DarI Arah Jakarta ke bandung	Kebakaran	-	Rp100.000.000
20	Cimahi Utara	Jl.Pasantren No 24 Rt 01 Rw 05 Kel. Cibabat. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	25	Rp900.000.000
21	Cimahi Tengah	Jl Cilember No 278 Kel. Cigugur	Kebakaran	7.5	Tidak diketahui
22	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Ganirah No.148 RT 05 Rw 05 Kel. Cibeber. Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	52	Rp55.000.000
23	Cimahi Tengah	Jl. Mhs Mintareja Bo.234	Kebakaran	3	Rp100.000.000
24	Cimahi Selatan	Jl.Nanggaleng Cirahayu Cibeber RW 07 Cimahi selatan	Kebakaran	-	Tidak diketahui

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak	Kerugian
25	Cimahi Selatan	Jl.Ibu Ganirah RT.01 RW.06 Kel. Cibeber Kec. Cimahi selatan	Kebakaran	-	Tidak diketahui
26	Cimahi Selatan	Jl.Aki Gang Muasim 1 No. 266B Leuwigajah Kecamatan Cimahi selatan Kota Cimahi	Kebakaran	30	Rp2.015.000.000
27	Cimahi Utara	Jl. Kolonel Masturi No. 130 RT.03 RW.01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	-	Rp7.000.000
28	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Sangki Gg. Permata 5 RT.04 RW.13 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	15	Rp10.000.000
29	Cimahi Tengah	Jl. Tarumanegara no 57 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	21	Rp20.000.000
30	Cimahi Selatan	Jl. Dakota Selatan 3 Komp. Melong Green Garden No.369B RT.05 RW.23 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	50	Rp50.000.000
31	Cimahi Selatan	Jl. Karang Sari No12 Rt 01 Rw 02. Kel. Cibereum	Kebakaran	-	Rp1.000.000
32	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.75 KM.1,75	Kebakaran	60	Rp20.000.000
33	Cimahi Tengah	Jl. Purbasari 1 Gg. H.Didi RT 07 Rw 12 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	20	Rp500.000
34	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeui RT.05 RW. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	200	Tidak diketahui
35	Cimahi Utara	Jl. Pakuhaji Rt.03 Rw.17 Kel. Cipageran. Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	1500	Tidak diketahui

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak	Kerugian
36	Cimahi Selatan	Jl. Indutri II NO.2 RT.06 RW.09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	10	Tidak diketahui
37	Cimahi Tengah	Jl. HMS Mintareja RT. 01 RW. 09 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	50	Tidak diketahui
38	Cimahi Selatan	Jl. Ranca Bentang RT. 01 RW. 26 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi selatan	Kebakaran	9	Rp7.000.000
39	Cimahi Utara	Jalan Cidamar No. 14 RT.01 RW. 01 Kelurahan Pasir kaliki Cimahi utara	Kebakaran	30	Tidak diketahui
40	Cimahi Tengah	Jl. Stasiun Barat RT. 05 RW. 20 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	12	Rp1.000.000
41	Cimahi Utara	Jl. Pasantren No.101 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cibabat Cimahi Utara	Kebakaran	-	Tidak diketahui
42	Cimahi Selatan	Komp. Baros Indah RT.02 RW.03 Kel.Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	-	Rp3.000.000
43	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeu RT.02 RW. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	120	Rp2.000.000.000
44	Cimahi Selatan	Komp. Pondokmas Blok A10 No.26. RT1 RW16, Kel. Leuwigajah	Kebakaran	24	Rp100.000.000
45	Cimahi Selatan	JL AMIRMAHMUD RT 01 RW 21 CIBEREUM	Kebakaran	850	Rp2.800.000.000

(Sumber: Badan Pengendalian Bencana Daerah Kota Cimahi, 2020)

2.4.3.2 Banjir

Status bencana banjir di Kota Cimahi menjelaskan suatu data yang menunjukkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana banjir terhadap kondisi masyarakat. Selama tahun 2020, Kota Cimahi terendam genangan air, tepatnya di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 3100 areal terdampak banjir. Genangan tersebut menyebabkan terendahnya permukiman dan



beberapa ruas jalan. Bencana banjir kerap terjadi setelah hujan turun dengan intensitas yang tinggi.

2.4.3.3 Angin Kencang

Kota Cimahi dengan segala karakteristik daerah, kota ini sering dilanda oleh Angin Kencang. Kejadian angin kencang atau angin puting beliung sering terjadi di daerah dengan kondisi suhu udara yang tidak stabil. Tahun 2020, suhu udara di Kota Cimahi cukup rendah, suhu terendah selama tahun 2020 terjadi pada bulan Juli dengan suhu 23,03°C. penyebab terjadinya angin puting beliung antara lain adalah udara yang dingin. Udara dingin yang lebih padat didorong oleh udara hangat, biasanya menghasilkan badai petir. Udara hangat naik melalui udara yang lebih dingin, menyebabkan aliran udara ke atas, dan saat menyentuh tanah, hal ini menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Bencana puting beliung merupakan bencana yang relatif tinggi angka kejadiannya. Tahun 2020, tepatnya di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi selatan sebanyak 100 areal terdampak bencana puting beliung. Tidak dapat dipungkiri hal ini dapat menimbulkan kerugian secara materi ataupun jumlah korban meninggal.

2.4.3.4 Kebakaran

Beberapa wilayah di Kota Cimahi masih mengalami kebakaran. Pada tahun 2020, kebakaran terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Utara, dan Cimahi Tengah. Total area yang terdampak untuk lokasi Kecamatan Cimahi selatan sebesar 100 m² lalu untuk lokasi Cimahi Utara sebesar 241 m² dan untuk Kecamatan Cimahi Tengah kebakaran terdampak sebesar 2 m². Dampak kerugian yang terjadi akibat kebakaran di Kota Cimahi mencapai Rp. 701.500.000,-. Kondisi Kebakaran sering disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya konsleting listrik, dan kelalayan manusia. Faktor lain seperti Alih fungsi lahan permukiman yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah meningkatkan potensi bencana kebakaran. Wilayah dengan kepadatan rumah yang tinggi berpotensi terdampak kebakaran. Semakin

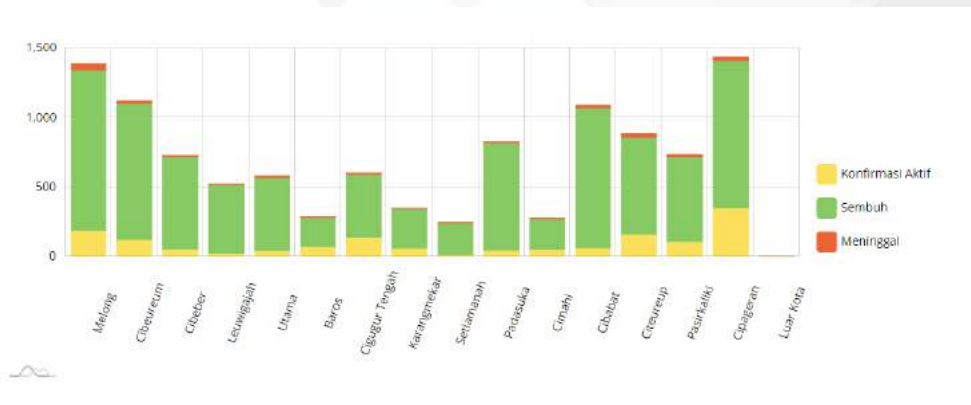
padat suatu wilayah, akan semakin cepat api menyebar serta dapat menimbulkan kerugian lebih banyak.

2.4.3.5 Tanah Longsor

Kondisi topografi Kota Cimahi yang beragam terutama lahan yang curam berpotensi memicu risiko bencana tanah longsor. Diketahui bahwa kelurahan yang berada di dataran paling tinggi Kota Cimahi dan memiliki kemiringan lereng yang cukup curam. Kejadian tanah longsor tidak hanya dipengaruhi oleh topografi saja, tetapi juga penggunaan lahan. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Cimahi tahun 2020 terjadi di Kecamatan Cimahi tengah. Kondisi topografi Cimahi Tengah dengan kemiringan lereng yang cukup curam, sebesar 300 areal terdampak tanah longsor, hal ini menyebabkan sejumlah korban di Kecamatan Cimahi tengah diharusnya mengungsi.

2.4.3.6 Kasus COVID-19 di Kota Cimahi

Awal semester tahun 2020, peningkatan tren kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terjadi di semua daerah, termasuk di Kota Cimahi. Hal ini membuat kota ini memasuki zona merah dengan risiko tinggi penyebaran COVID-19. Menurut Pusat Informasi COVID-19 Cimahi, kasus terkonfirmasi terkait COVID-19 dilaporkan sebanyak 610 kasus aktif, 57 kasus meninggal, dan 1.428 kasus sembuh. Sementara itu, jumlah kontak erat tercatat sebanyak 11.893 kasus dengan 1.794 kasus di antaranya sedang menjalani pemantauan (data tanggal 31 Desember 2020). Jumlah kasus positif aktif, sebagaimana juga jumlah kasus lain terkait pandemi Covid-19, merupakan data yang bersifat dinamis (Pusat Informasi Covid-19 Cimahi, 2020). Grafik perkembangan COVID-19 di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.52.



Gambar 2.52 Grafik Perkembangan COVID-19 per Kelurahan
(Sumber: Pusat Informasi Covid-19 Cimahi, 2020)

2.4.4 Impact

2.4.4.1 Dampak Bencana Banjir

Berdasarkan Bencana banjir yang melanda kota Cimahi selama setahun telah merugikan penduduk Kota Cimahi. Sebanyak 3100 areal di Kota Cimahi terdampak banjir selama periode tahun 2020. Walaupun tidak menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia, bencana banjir yang terjadi hal ini tentu menimbulkan kerugian secara materi.

2.4.4.2 Dampak Angin Kencang

Bencana angin beliung sempat terjadi di Kota Cimahi, tepatnya di Kecamatan Cimahi Selatan, sebanyak 100 areal wilayah terdampak puting beliung. Besaran dampak yang ditimbulkan berbeda-beda setiap kejadiannya.

2.4.4.3 Dampak Bencana Kebakaran

Pada tahun 2020, bencana kebakaran kerap terjadi akibat ulah masyarakat yang membakar sampah dan kecerobohan lainnya seperti konsleting listrik. Terjadinya kebakaran di wilayah Kota Cimahi selama tahun 2020 mengakibatkan kerugian material, diperkirakan sebanyak Rp. 701.500.000,- kerugian yang dialami akibat bencana kebakaran.

Jika diakumulasi, total luas lahan yang terbakar di setiap Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara masing-masing sebesar 100 m²; 2 m²; dan 241 m². Ini berarti pada tahun tersebut kebakaran telah merugikan lahan seluas 343 m², Cimahi Selatan sering terjadi kebakaran dengan dampak (jiwa) yang tidak ringan.

2.4.4.4 Dampak Bencana Tanah Longsor

Bencana terakhir yang dibahas dalam analisis isu ini yaitu bencana tanah longsor. Sebelumnya telah dijelaskan, wilayah Kecamatan Cimahi Tengah tepatnya di Kelurahan Padasuka terjadi bencana tanah longsor. Kejadian tersebut memberi dampak pada sejumlah penduduk, bahkan hingga menyebabkan sejumlah 6 warga diharuskan mengungsi. sebanyak 300 areal lahan yang terdampak akibat bencana tanah longsor yang tentunya hal ini menyebabkan kerugian secara material. Akan tetapi belum dapat diperkirakan seberapa besar kerugian yang dialami akibat kejadian bencana tanah longsor.

2.4.4.5 Timbulan Limbah B3 Medis

Salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia adalah pencemaran sampah. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan baru yang dapat menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Timbulan limbah medis terutama limbah APD paling banyak ditemukan selama masa pandemi menjadi masalah baru bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terdampak. Nurali (dalam Prasetyawan, 2020) memprediksi sebanyak 294,66 ton/hari timbulan limbah medis dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Angka ini belum termasuk limbah yang ditimbulkan pada tingkat rumah tangga berupa masker dan sarung tangan yang jumlahnya kian meningkat. Limbah medis khusus pandemi ini harus ditangani secara kolektif untuk menjamin pemutusan mata rantai penularan virus. Dampak yang akan dihadapi akibat kegagalan pengelolaan limbah medis COVID-19 akan menyebabkan pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem,

peningkatan timbunan medis terbungkalai, penyalahgunaan masker bekas, dan dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi COVID-19 di masyarakat.

2.4.5 Response

2.4.5.1 Upaya Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, Kota Cimahi dengan tanggap melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana. Selama banjir terjadi di beberapa tempat, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi yaitu:

- Melakukan *assessment* atau penilaian cepat ke lokasi kejadian
- Melakukan koordinasi antara BPBD Kota Cimahi dengan kepala warga
- Melakukan koordinasi antara BPBD dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk menutup jalan
- Melakukan koordinasi antara BPBD dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk penyedotan air genangan/air banjir
- Memberi bantuan logistik kepada warga yang terkena dampak
- Memantau tinggi muka air banjir

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam menanggulangi kekeringan yang terjadi yaitu dengan melakukan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) serta Pemadam Kebakaran untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terkena dampak. Kegiatan preventif yang perlu ditambahkan oleh pemerintah dalam upaya menghindari berulangnya bencana kekeringan yaitu memantau aliran distribusi air bersih, khususnya terkait kebocoran pipa, mengawasi pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu (baik domestik maupun non domestik), serta mengawasi oknum yang mengeksploitasi air tanah.

Upaya penanggulangan bencana kebakaran memerlukan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menangani kebakaran di Kota Cimahi ini. Jumlah pemadam kebakaran yang terdata sebanyak 54 orang dengan rincian 45 orang pada bidang pencegahan dan 9 orang pada bidang penanggulangan dengan mobil pancar sebanyak 8 unit.

2.4.5.2 Pemeliharaan Drainase

Kota Cimahi memiliki target bebas genangan banjir pada tahun 2022. Rencana pengendalian banjir dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Berikut penjelasan mengenai pengendalian banjir berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032:

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem drainase di Kota Cimahi meliputi sistem saluran drainase primer, sekunder, dan tersier.

Rencana sistem drainase primer:

- a. Pengerukan sungai pada titik-titik yang telah mengalami pendangkalan (sedimentasi) seperti Sungai Cibaligo, Sungai Cisangkan di Bagian Selatan Kota
- b. Pelebaran sungai pada titik-titik yang telah mengalami penyempitan diarahkan pada badan-badan sungai Ciputri, Cibeureum dan Cikendal
- c. Pelurusan atau penyodetan sungai pada titik-titik yang tidak efisien dalam mengalirkan aliran air sungai terutama sistem sungai-sungai dibagian selatan kota

Rencana sistem drainase sekunder:

- a. Penyodetan drainase sekunder yang mengalihkan aliran air hujan yang menggenangi jalan-jalan untuk secepatnya menuju sistem sungai

- terdekat, hal ini diterapkan dibagian utara kota yang memiliki kemiringan curam
- b. Pelebaran drainase sekunder di jalan-jalan utama kota yang dapat mengalihkan aliran air hujan secepatnya menuju sistem sungai, hal ini diterapkan dibagian utara jalan nasional, dan jalan - jalan utama kota lainnya
 - c. Rehabilitasi dan pelebaran drainase sekunder yang melewati kantong-kantong perumahan dilengkapi dengan sarana pembagian aliran air untuk memudahkan operasi pengaliran air baik saat banjir di musim hujan maupun kebutuhan penggelontoran kota pada saat kemarau
 - d. Pembangunan embung terintegrasi dengan drainase sekunder sebagai sarana pengendali banjir maupun cadangan muka air tanah saat kemarau

Rencana sistem drainase tersier:

- a. Pembangunan sumur resapan oleh masyarakat terintegrasi dengan saluran pembuang dari rumah ke drainase tersier lingkungan
- b. Pengaturan tertib membangun dan memelihara saluran drainase tersier di lingkungan perumahan agar sistem drainase berfungsi baik secara hierarkis dari drainase tersier di Perumahan ke drainase sekunder dan primer.

2.4.5.3 Kegiatan Fisik oleh Instansi

Kegiatan fisik yang dilakukan oleh instansi terkait upaya pengendalian dan pencegahan banjir berupa pembersihan saluran air sungai dan embung yang ditanggungjawab oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, kegiatan fisik yang dilakukan oleh DLH Kota Cimahi berupa pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan juga mendukung upaya pencegahan banjir akibat sampah.

Tabel 2.25 Kegiatan Fisik Oleh Instansi

No.	Nama Kegiatan	Kelompok Sasaran	Instansi Penyelenggara
1	Sosialisasi dan Publikasi Satgas Citarum Harum Sektor 21		Sektor Citarum Harum
2	Pelatihan Online Menolah Sampah Organik		Universitas Muhammadiyah Bandung
3	Penanaman Pohon di Eks TPA Leuwigajah		Nemov Foundation
4	Zero Waste Academy		YPBB
5	Jalan Sehat Lingkungan Bersih		SMK Sangkuriang 1
6	Webinar Series Zero Waste Academy Refleksi Berbagi Pengalaman		YPBB
7	Webminar Tantangan dan Peluang pelaksanaan pengurangan pembatasan plastik sekali pakai dan penanganan sampah dengan model zero waste		YPBB
8	Silaturahmi dan Evaluasi Gerakan Mandiri Sampah (GEMAS) RW. 19 Padasuka		RW. 19 Padasuka
9	Peningkatan kemampuan teknis kader perencana	Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Tingkat RW (152 orang)	Bappeda
10	Penguatan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berupa pelaksanaan fasilitasi kegiatan kompetisi inovasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kota Cimahi	Komunitas pegiat penanggulangan kemiskinan (komunitas yang menang adalah komunitas pengelolaan sampah organik melalui magot, komunitas daur ulang sampah organik bernilai ekonomi dan komunitas pendidikan non formal)	Bappeda

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.4.5.4 Penghijauan

Kota Cimahi dengan tanggap melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan mengoptimalkan penggunaan lahan seperti yang direncanakan dalam RTRW tahun 2012-2032. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya ialah melakukan penghijauan. Diharapkan kegiatan penghijauan tetap dilaksanakan setiap tahunnya.

2.4.5.5 Pengadaan Sumur Resapan

Perubahan alih fungsi lahan di Kota Cimahi yang termasuk di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) mengancam kelestarian area resapan air. Mengacu pada RTRW Kota Cimahi, kawasan resapan air termasuk kedalam kawasan lindung. Pengadaan sumur resapan air hujan berguna untuk menambah ketersediaan air tanah, dan mendukung fungsi konservasi kawasan resapan air. Kawasan resapan air bermanfaat bagi kehidupan, salah satunya sebagai pengendali banjir dan pencegahan kekeringan saat musim kemarau.

2.4.5.6 Inovasi Lingkungan

Inovasi Lingkungan merupakan salah satu cara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . Bagian ini akan memuat inisiatif-inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah, inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Inovasi lingkungan Kota Cimahi yang dapat menjadi salah satu response diantara lain:

a) Zero Waste

Zero Waste City merupakan inovasi lingkungan andalan pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah. Program Cimahi Zero Waste City 2037 berisikan perencanaan jangka pendek hingga panjang bersama dengan *stakeholder* mengenai pengelolaan sampah dan strategi dalam penekanan angka timbulan sampah dengan mengurangi sampah sejak dari sumber.

b) Cimahi Walagri

“Wahana lega, lingkungan asri” adalah kepanjangan dari Cimahi Walagri. Program Cimahi Walagri ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi sungai yang lebar. Membuat kondisi sungai agar sesuai dengan kapasitas optimum untuk mengalirkan air, sehingga perumahan dan permukiman yang berada di wilayah daerah aliran sungai dapat terbebas dari banjir, memiliki ruang terbuka hijau hingga dapat

terciptanya lingkungan asli serta masyarakat agar dapat hidup nyaman dan sehat.

c) Pelestarian Kampung Adat

“Teu Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat” merupakan salah satu prinsip hidup yang dimiliki oleh masyarakat di salah satu wilayah di Kota Cimahi yaitu Kampung Cireundeu. Dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat lokal kampung Cirende u, Kampung Cirende u merupakan daerah yang dapat mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi.

d) Pengembangan Varietas Lokal

Varietas lokal dikembangkan dengan Pogram Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Dimana TTI merupakan sebuah wadah pemasaran hasil pertanian lokal yang ada di Kota Cimahi. Pengembangan varietas lokal ini menjaga ruang terbuka hijau yang ada di Kota Cimahi, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup kedepannya.

e) Pemberdayaan Komunitas Lingkungan

Pemberdayaan Komunitas Lingkungan akan melibatkan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam mengelola lingkungan menjadi lebih baik lagi. Program pemberdayaan masyarakat akan komunitas lingkungan di Kota Cimahi antara lain adalah Kades Desa Wisma Pemantau Jentik, Haur Hiber, dan Sekolah Berkebun. Diharapkan dengan program-program tersebut, dapat meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Cimahi.

f) Goyang Gotik

Goyang Gotik merupakan akronim dari “Gotong Royong Nabung Kanggo Tangki Septik”. Program Goyang gotik ini merupakan salah satu penyedia jasa pembuatan tangki septik. Dengan adanya program tersebut, diharapkan Kota Cimahi akan sehat baik dari segi sanitasi

lingkungan ataupun segi kesehatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada lingkungan hidup yang lebih baik.

g) Sistem Informasi Lingkungan

Sistem Informasi Lingkungan dimaksudkan untuk menyediakan basis data dan layanan informasi yang akurat, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.4.5.7 Pengelolaan Limbah B3 Medis

Dalam rangka menjamin pengelolaan limbah medis di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain: Surat MENLHK Nomor 167 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasyankes Darurat COVID-19; Surat Edaran MENLHK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19; dan Surat Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Nomor 156 Tahun 2020 Perihal Pengelolaan Limbah B3 Masa Darurat Penanganan COVID-19. Pada intinya, surat edaran tersebut merupakan upaya optimalisasi kapasitas pengelolaan limbah medis di Indonesia, baik yang dilakukan oleh fasyankes atau jasa pengelola limbah B3 berizin. SE MENLHK Nomor 02 Tahun 2020 memungkinkan fasyankes untuk mengolah limbah B3 meskipun belum mengantongi izin dengan menggunakan incinerator dengan suhu minimal 800°C atau menggunakan *autoclave* yang dilengkapi *shredder* (Prasetiawan, 2020).

Terdapat beberapa *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam penanganan limbah COVID-19, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat yang terdampak. Peran yang dilakukan oleh masyarakat ialah melakukan pemilahan sampah dari sumber, pengemasan sampah sesuai dengan prosedur, dan pengawasan limbah COVID-19 rumah tangga. Peran pemerintah diantaranya adalah sosialisasi dan edukasi, Menyusun MoU dengan pihak pengelola LB3, koordinasi antara pemerintah daerah dan

pemerintah provinsi dan pendampingan penanganan limbah medis COVID-19 rumah tangga.

2.4.5.8 Sosialisasi Kebersihan Lingkungan

Satgas Citarum Sektor 21 giat melakukan sosialisasi Citarum Harum di Kota Cimahi. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mulai sadar dan bergerak untuk mengatasi masalah sampah dan banjir yang sangat krusial dengan mengatasinya bersama-sama. Juniantoro (2020) mengatakan Giat Patroli dilaksanakan oleh Satgas Citarum Harum Sektor 21-13 Cimahi Selatan dalam rangka antisipasi adanya sampah dan limbah industri yang mencemari sungai. Kegiatan Giat Patroli tahun 2020 dilakukan dengan menyosialisasikan penggunaan masker bagi masyarakat. Penyisiran bantaran Sungai Cimahi, Sungai Cikendal, Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat dan Sungai Ciujung dilakukan dan berhasil mengangkat sampah sebanyak 110 kg dengan jarak pengangkatan 60 meter. Sosialisasi juga dilaksanakan secara *door to door* di daerah yang sama dengan tujuan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke bantaran sungai.

2.5 Perkotaan

Permasalahan di perkotaan biasanya ditimbulkan dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan yang semakin sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut permasalahan lingkungan. Kemunduran perkotaan diindikasikan dari aspek fisik seperti maraknya pencemaran air, udara, kerusakan lahan, timbulan sampah dan aspek sosial ekonomi seperti dampak yang membuat kehidupan manusia menjadi kurang nyaman. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan yang sehat adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada sub bab ini akan mengkaji informasi permasalahan lingkungan hidup terkait perkotaan di Kota Cimahi dengan

menganalisis data dari tabel 31, tabel 35, tabel 46 sampai tabel 47. Pemetaan tabel-tabel yang telah disebutkan terhadap isu lingkungan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Pemetaan Tabel utama Terhadap Isu Perkotaan

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
31	Tabel-31 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	✓	-	-	-	-	
32	Tabel-32 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	-	✓	-	-	-	
33	Tabel-33 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	-	-	-	✓	-	
34	Tabel-34 Jumlah Rumah Tangga Miskin	-	✓	-	-	-	
35	Tabel-35 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
46	Tabel-46 Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	✓	-	-	-	-	
47	Tabel-47 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari	✓	-	-	-	-	
48	Tabel-48 Jumlah Bank Sampah	-	-	-	-	✓	
59	Tabel-59 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	✓	

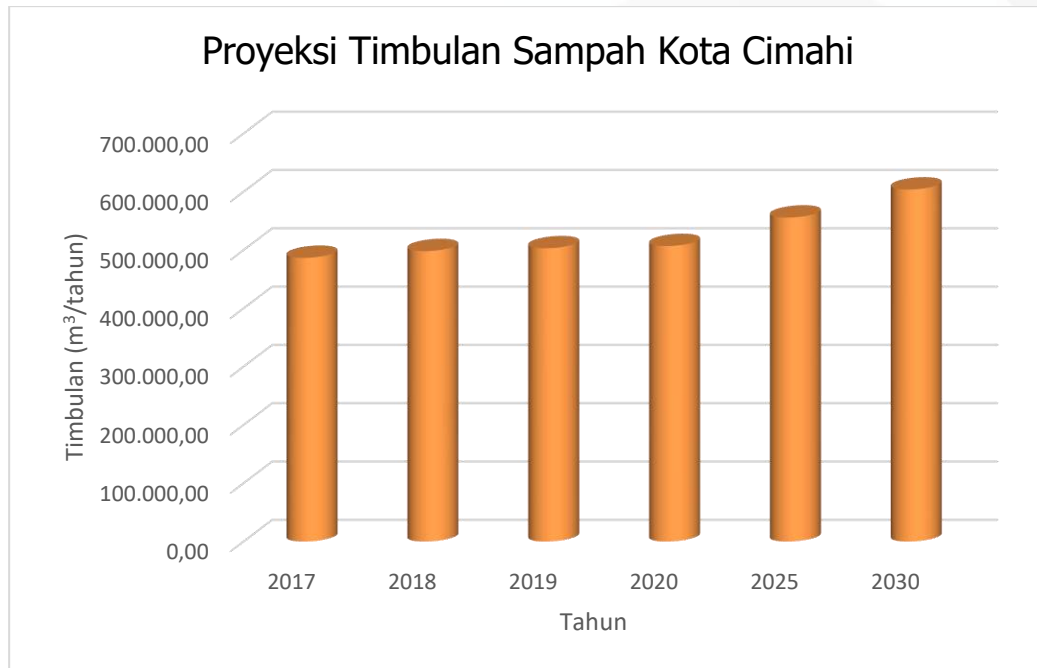
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.5.1 Driving Force

2.5.1.1 Proyeksi Timbulan Sampah

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan suatu kota. Semakin tingginya jumlah penduduk dengan kesadaran lingkungan yang rendah dikhawatirkan akan berdampak pada permasalahan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan akan menimbulkan masalah baru bagi pembangunan suatu daerah. Timbulan sampah di Kota

Cimahi pun tiap tahun kian meningkat seperti digambarkan pada Gambar 2.53.



Gambar 2.53 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2021 dan Hasil Perhitungan, 2021)

2.5.1.2 Kurangnya Fasilitas Tempat Buang Air Besar

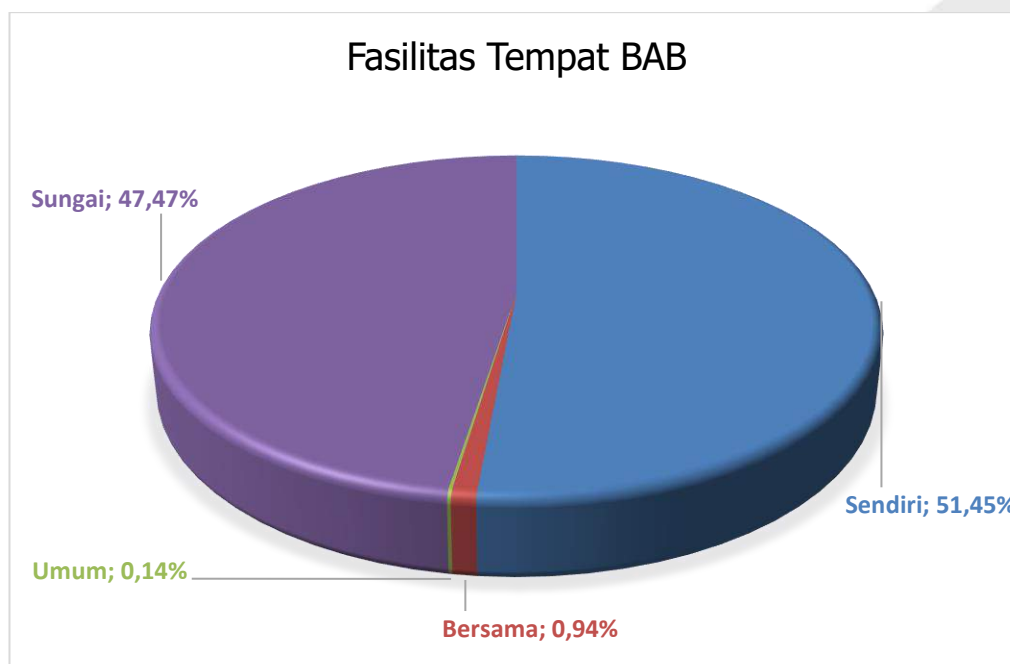
Kebutuhan air juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 60,65 persen rumah tangga yang sudah memiliki tempat buang air besar sendiri, namun masih ada 39,35 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (DIKPLHD Kota Cimahi, 2019). Keadaan ini memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai dan berpotensi mencemari badan air. Sarana jamban di rumah yang dirasa nyaman belum tentu memiliki sarana penampungan dan pengolahan tinja yang sesuai kriteria teknis. Perilaku buang air besar sembarangan dapat menyebabkan penyakit seperti muntaber, diare, tipus, kolera, disentri, dan sebagainya. Sarana tempat buang air besar ini sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Fasilitas tempat buang air

besar di Kota Cimahi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.27. Grafik jumlah fasilitas tempat buang air besar di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.54 dan Gambar 2.55.

Tabel 2.27 Jumlah Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi Tahun 2020

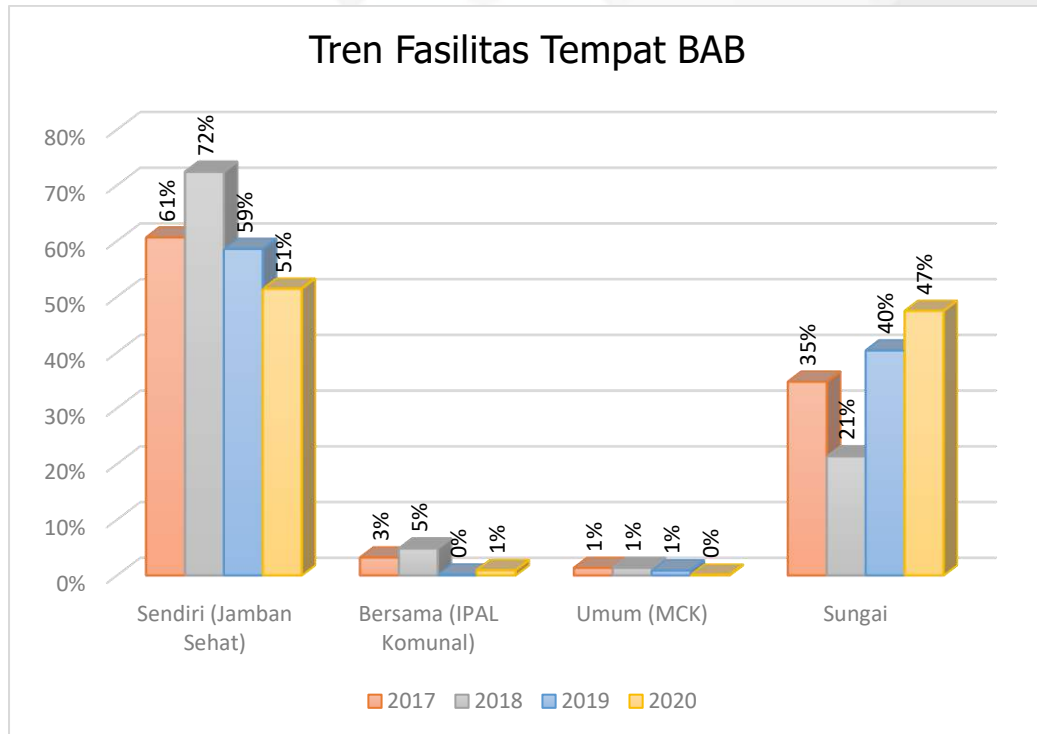
No.	Wilayah Administrasi	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
		Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
1	Cimahi Utara	32.275	41	61	42.482
2	Cimahi Tengah	28.340	1.164	128	22.726
3	Cimahi Selatan	31.396	472	56	19.693

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2021)



Gambar 2.54 Persentase Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.55 Tren Fasilitas Tempat BAB Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.5.1.3 Rendahnya Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Limbah menjadi masalah yang sangat sulit diselesaikan berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya limbah terhadap lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi tekanan dalam mengelola perkotaan. Masyarakat yang tidak mengetahui PHBS tentunya belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dan perairan umum. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kota Cimahi dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Meik (2018) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang dalam menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik pula pengetahuannya sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

2.5.1.4 Ketersediaan TPS Terbatas

Sistem pengumpulan sampah merupakan syarat pertama tercapainya sanitasi lingkungan dari gangguan akibat sampah yang tidak tertangani. Dengan demikian lingkungan menjadi bersih tidak terdapat sampah yang tercecer, dibuang ke saluran, ke sungai ke tempat-tempat ilegal lainnya.

Keberadaan TPS di Kota Cimahi dinilai belum memadai baik dari segi jumlah maupun kapasitas, hal ini terlihat dari kondisi TPS yang tidak pernah kosong dari sampah. Setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki 2-3 unit TPS baik berupa TPS Kontainer maupun TPS Pasangan Bata untuk melayani 4.000-19.000 KK/kelurahan. Umumnya pengangkutan sampah di tiap TPS dilakukan sebanyak 2 rit/hari namun tumpukan sampah di TPS masih belum tuntas.

2.5.1.5 Tidak Memiliki TPPAS Mandiri

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi. Sulitnya Kota Cimahi dalam pencarian lahan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan Kota Cimahi dalam menangani sampahnya. Saat ini Kota Cimahi masih menggunakan TPA Regional Sarimukti sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah.

Jenis: <i>Open Dumping</i>	Luas: 25,5 Ha
TPAS Regional Sarimukti	
Kapasitas: 6.135,91 m ³ /hari	Volume Eksisting: 32.539.045 m ³

Gambar 2.56 TPA yang Digunakan Kota Cimahi

(Sumber: DIKPLHD Kota Cimahi, 2020)

2.5.2 Pressure

2.5.2.1 Tingkat Kemiskinan Masyarakat

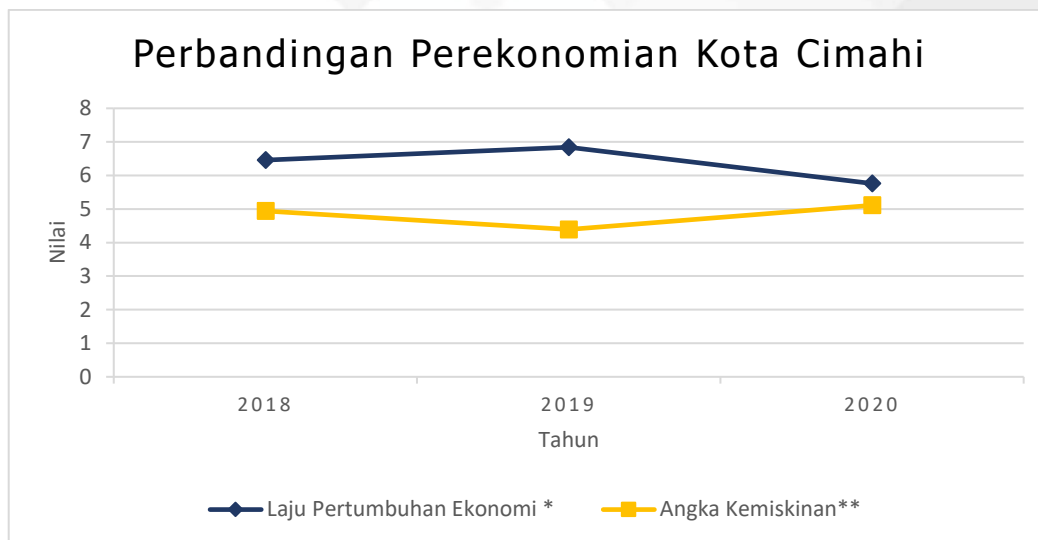
Tingkat ekonomi penduduk suatu kota termasuk dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah, maka daya beli juga meningkat. Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap terhadap pola pikir dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tingkat ekonomi juga memengaruhi timbulan sampah kota.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan peraturan yang di dalamnya memuat tentang peningkatan perekonomian yang menjadi salah satu misi Kota Cimahi dalam lima tahun ke depan. Data perbandingan perekonomian Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi

No.	Uraian	Nilai (%)		
		2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	6,46	6,84	5,76
2	Angka Kemiskinan**	4,94	4,39	5,11

(Sumber: *RKPD Jawa Barat, 2021; **Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2021)



Gambar 2.57 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi

(Sumber: RKPD Jawa Barat, 2021; **Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2021)

Berdasarkan Gambar 2.57, laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi di tahun 2020 turun hingga 5,76 persen. Penyebab penurunan laju ekonomi tahun 2020 yang sangat signifikan ini adalah terjadi pandemi COVID-19 dari awal tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia secara serentak menerapkan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hanya kegiatan ekonomi tertentu yang dapat beroperasi dan bertahan selama pandemi terjadi. Jumlah tangga miskin di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.29 dan Gambar 2.58.

Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Miskin

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	Persentase Rumah Tangga Miskin
1	Kecamatan Cimahi Selatan	74.859	14.424	19,27%
2	Kecamatan Cimahi Tengah	52.358	9.826	18,77%
3	Kecamatan Cimahi Utara	51.617	9.945	19,27%
Jumlah		178.834	34.195	57%

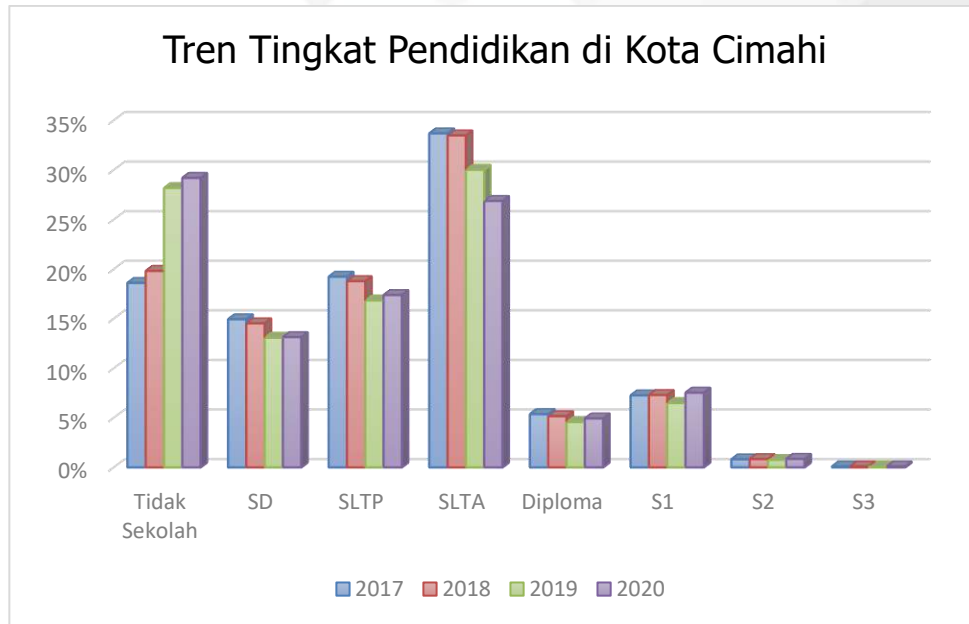
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.58 Tren Rumah Tangga Miskin
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.5.2.2 Tingkat Pendidikan

Lebih lanjut lagi, tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak juga pada tingkat pendidikan karena biaya pendidikan semakin mahal. Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2020 semakin banyak masyarakat yang tidak sekolah, sedangkan sekitar 140.979 jiwa atau 27 persen masyarakat di Kota Cimahi mendapat pendidikan hingga SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk dengan tingkat pendidikan rendah (SLTA kebawah) yaitu sekitar 87%. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat, kesadaran, serta pengetahuan terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup sehat, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah domestik harus disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat teredukasi.



Gambar 2.59 Tren Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.5.2.3 Umur TPA Sarimukti

TPA Sarimukti muncul sebagai tanggap darurat atas longsor TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005. Menurut Cahyana (2018), TPA Sarimukti yang muncul dari keadaan darurat, maka statusnya sementara waktu. Namun, hingga saat ini sudah terhitung lebih dari satu dekade sejak bencana terjadi. Perencanaan akan dibangunnya TPA berbasis *sanitary landfill* juga tidak sesuai dengan kondisi nyata saat ini, TPA Sarimukti adalah *open dumping* untuk 5.000 m³ sampah per hari. Padahal TPA berbasis *open dumping* sudah harus diinggalkan seperti yang dijelaskan pada UU No. 18/2008. TPA harus mengubah sistem dari tempat pembuangan akhir menjadi tempat pemrosesan akhir, seperti *controlled landfill* atau *sanitary landfill*.

Sampah dari Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan KBB masih dibuang ke TPA Sarimukti. Jumlah sampah Bandung Raya mencapai 2.000 ton per hari, sementara daya tampung TPA Sarimukti hanya 1.200 ton per hari (Juniari, 2020).

2.5.2.4 Anggaran Pengelolaan Persampahan

Salah satu program pembangunan Kota Cimahi ialah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Demi mewujudkan misi tersebut, strategi yang direncanakan adalah meningkatkan kualitas permukiman dengan cara meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan.

Permasalahan keuangan tentu menjadi tekanan untuk bisa melaksanakan program pembangunan Kota Cimahi. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, anggaran untuk program peningkatan pelayanan pengelolaan masyarakat tiap tahunnya terus bertambah. Target anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan pada tahun 2020 sebesar Rp67.500.000.000. Anggaran tersebut terbagi kedalam program peningkatan kinerja pengurangan sampah, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan program peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah.

2.5.2.5 Peran Serta Masyarakat

Pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dapat tercapai jika peran serta masyarakat ditingkatkan terus menerus, tidak ada kata berhenti dalam menumbuhkembangkan peran masyarakat ini. Dari peran pasif, yaitu masyarakat hanya mau membayar retribusi, hingga menjadi peran aktif yaitu mulai mau berbuat nyata misalnya mau memilah, dan mengolah sampah dan perilaku aktif yang lebih jauh adalah mau mengubah perilaku hidup yang lebih ramah lingkungan dengan mengubah pola konsumsi dan penggunaan kemasan.

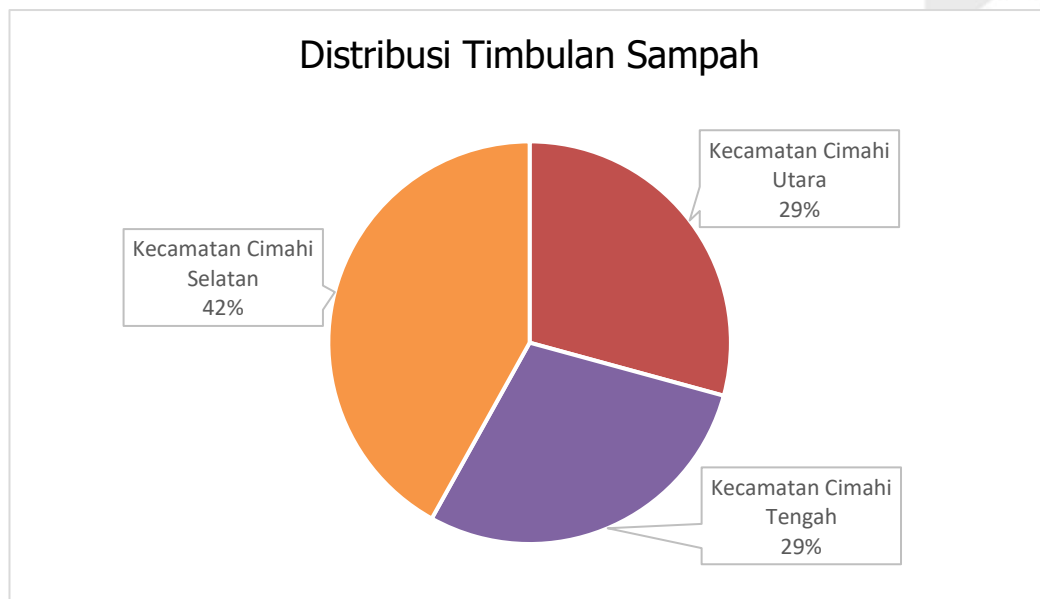
Stakeholders dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, *planner*, pengusaha, penduduk/masyarakat, pers, LSM, dan *informal leader*. Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya

maka *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Para ahli dan akademisi (perencana profesional), serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.5.3 State

2.5.3.1 Timbulan Sampah

Proyeksi timbulan sampah Kota Cimahi telah dijelaskan pada Gambar 2.53 dimana timbulan sampah pada tahun 2020 mencapai 1.389,2 m³ per hari atau jika berat jenis sampah adalah 0,25 maka rata-rata beratnya mencapai ±350.000 ton per hari dan akan terus meningkat. Distribusi timbulan sampah berdasarkan kecamatan di Kota Cimahi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.60. Kecamatan Cimahi Selatan menimbulkan lebih banyak sampah karena jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kecamatan lainnya.



Gambar 2.60 Distribusi Timbulan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2021)

Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non

permukiman hanya 37% saja dari total sampah kota. Berikut adalah hasil survei proporsi timbulan sampah Kota Cimahi berdasarkan hasil studi Kajian Pengukuran Potensi Timbulan Sampah dari Kegiatan Non Domestik di Kota Cimahi.

Tabel 2.30 Proporsi Sampah yang Terangkut ke TPA Sarimukti

No.	Komponen	Rata-rata
1	Permukiman	63%
2	Industri	1%
3	Pasar	31%
4	Rumah Sakit	1%
5	Instansi	4%
6	Kawasan komersial	0%
Total		100%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019)

Permukiman menjadi penyumbang terbesar sampah yang dihasilkan di Kota Cimahi. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar dikarenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya. Sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak segera terangkut dapat menyebabkan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi kesehatan dan lingkungan.

2.5.3.2 Kondisi Teknis Operasional Pengelolaan Sampah

Teknis operasional pengelolaan sampah terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2017-2037, kondisi teknis operasional pengelolaan Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut:

- Pemilahan/pewadahan
Keberadaan wadah sampah dan penerapan kegiatan pemilahan di Kota Cimahi masih ditemui beberapa masalah. Kapasitas wadah sampah di beberapa lokasi belum memadai. Kemudian penerapan kegiatan pemilahan belum berjalan maksimal.
- Pengumpulan

Berdasarkan sistem pengumpulan yang telah berjalan di Kota Cimahi, tingkat pengumpulan sampah di kawasan permukiman dapat dinilai kecukupannya berdasarkan ketersediaan kendaraan pengumpul. Pelayanan pengumpulan sampah permukiman masih terbilang rendah, dimana satu kelurahan memiliki ± 16 unit armada pengumpul untuk melayani 200 hingga 1.200 KK. Masalahnya, permukiman yang belum mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah menangani sampahnya dengan cara dibakar dan ditimbun dalam tanah.

- Pemindahan

Sarana pemindahan sampah di Kota Cimahi dibagi menjadi dua jenis TPS, yaitu kontainer dan pasangan bata. TPS kontainer dan pasangan bata memiliki kapasitas $\pm 6 \text{ m}^3$ dan $\pm 3 \text{ m}^3$. Terdapat 38 unit sarana pemindahan atau TPS di Kota Cimahi yang terdiri atas 19 unit TPS kontainer, 15 unit TPS pasangan bata, dan 4 lokasi titik kumpul yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kota Cimahi.

- Pengangkutan

Sarana pengangkutan sampah di Kota Cimahi terdiri atas *Arm Roll* sebanyak 23 unit, *dump truck* sebanyak 15 unit, *compacted truck* sebanyak 3 unit, mobil *pick up* sebanyak 8 unit, mobil roda 4 sebanyak 8 unit, motor triseda sebanyak 34 unit, dan motor sebanyak 11 unit.

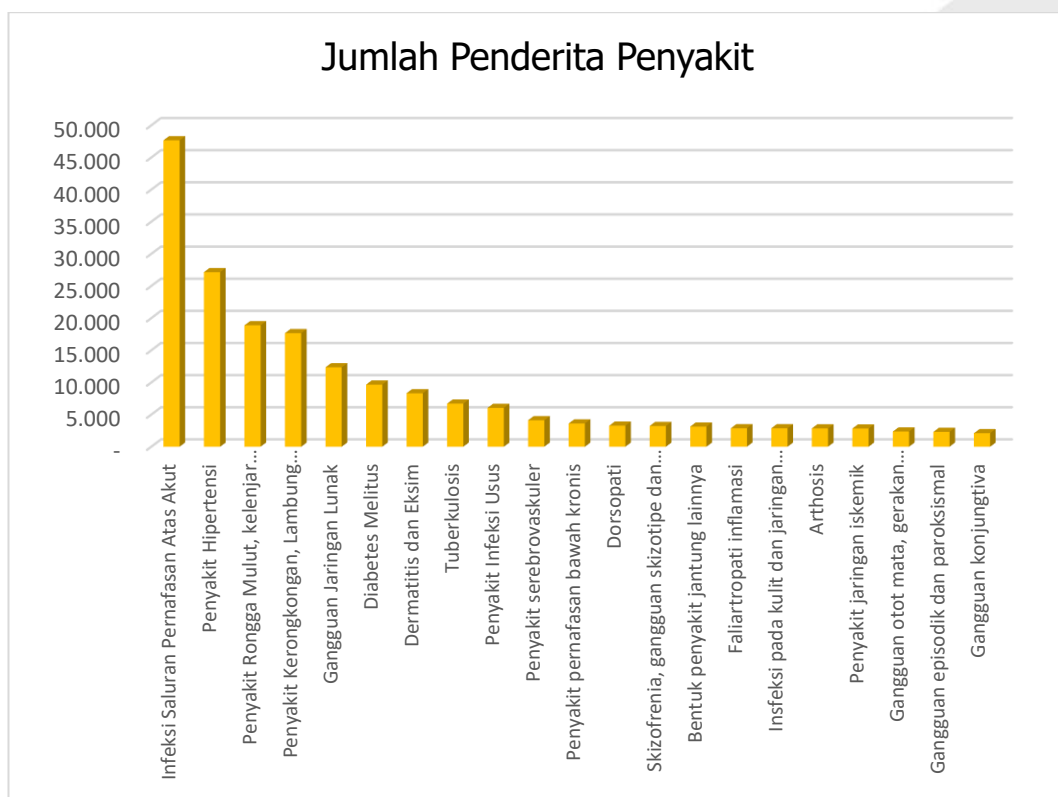
- Pengolahan

Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) telah banyak melakukan usaha pengolahan sampah terutama sampah organik. Metode pengolahan sampah organik yang diujicobakan oleh DKP yaitu tatakura, bioreaktor mini, hingga pengomposan. Sebagian besar sarana pengolahan sampah yang dibangun diserahkan kepada masyarakat untuk dioperasikan.

2.5.4 Impact

2.5.4.1 Penyakit

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia, kualitas kesehatan ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Lingkungan yang tidak layak huni dan permukiman yang kumuh dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Pada Gambar 2.61 ditampilkan perbandingan jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Cimahi.



Gambar 2.61 Jumlah Penderita Penyakit di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

Berdasarkan Tabel 2.67, penyakit yang paling banyak diderita adalah infeksi saluran pernafasan akut. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kota Cimahi yang melakukan pembakaran sampah. Pembakaran sampah sendiri dapat menghasilkan gas dioksin yang dapat memicu penyakit kanker.

2.5.4.2 Kejadian Bencana

Hal yang perlu diwaspadai terkait permasalahan perkotaan adalah terjadinya bencana. Di Kota Cimahi selama tahun 2020 terjadi beberapa bencana yang terjadi akibat ulah manusia yang mengabaikan kondisi alam, seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi sebagian besar diakibatkan oleh tersumbatnya aliran drainase dan sungai oleh sampah. Bencana kebakaran juga kerap terjadi di Kota Cimahi.

2.5.5 Response

2.5.5.1 Sosialisasi dan Edukasi

Masyarakat di Kota Cimahi harus memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang diperuntukkan perwakilan masyarakat dari seluruh kelurahan yang tinggal di sekitar bantaran sungai yang ada di Kota Cimahi. Hal ini berlandaskan rendahnya tingkat pendidikan di Kota Cimahi sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum tertanamkan. Tujuan kegiatan sosialisasi dan edukasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dan perairan, dan secara tidak langsung akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.

2.5.5.2 Anggaran Pengelolaan Persampahan

Dalam upaya mengatasi isu lingkungan persampahan yang terjadi di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) membuat program/kegiatan yang bersumber dari APBD. Response pemerintah dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan atau persampahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.31. Sebanyak 6 kegiatan dianggarkan untuk pengelolaan persampahan kota dari total 70 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.31 Kegiatan Pengelolaan Persampahan

No.	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran
1	Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Organik	Rp777.160.300
2	Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Non Organik	Rp922.609.500
3	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Rp10.217.870.000
4	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Rp5.380.961.200
5	Peningkatan Kinerja Pengangkutan Sampah Terpilah	Rp78.750.000
6	Peningkatan Kinerja Pengumpulan Sampah Terpilah	Rp1.833.281.469

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2020)

2.5.5.3 Bank Sampah

Sarana pengolahan sampah di Kota Cimahi dilakukan dengan cara komposter, *composting plant*, *reactor* kompos, biodigester, bank sampah dan TPS 3R. Penjelasan lebih detail dari program-program tersebut, dapat dilihat pada bagian Lampiran II Tabel-61. Selain itu, alternatif upaya yang juga dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah dapat dilakukan disetiap kecamatan. Jumlah bank sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.32

Tabel 2.32 Pengurangan Sampah di Kota Cimahi

Tahun	Jumlah Bank Sampah
2014	26 Unit
2015	16 Unit
2016	7 Unit
2017	17 Unit
2018	32 Unit
2019	43 Unit
2020	12 Unit
Total	153 Unit

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.5.5.4 Program Hari Organik dan Hari Anorganik (HO-HA)

Program ini merupakan program yang dilakukan di masyarakat dalam penjadwalan pengangkutan sampah. Sesuai dengan amanat perda pengelolaan sampah, bahwa sampah yang dihasilkan disumber sampah harus dipilah sejak dari sumber sampah, sehingga mencegah terjadinya tercampur kembali sampah dan pemberian edukasi kepada masyarakat

agar mau memilah, maka ditetapkan hari pengangkutan khusus sampah organik dan sampah an-organik secara terpisah, sebagai contoh di RW. 07 Pasirkaliki ditetapkan hari pengangkutan sampah organik adalah pada hari Kamis dan hari sampah an-organik adalah hari minggu.

2.5.5.5 Program *Zero Waste* untuk Kelola Sampah di Sumber

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berkomitmen meneruskan program *zero waste*, dengan mengelola sampah sejak dari sumber. Pengelolaan sampah sejak dari sumber dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Program *zero waste* menargetkan sekolah, serta RW-RW di Kota Cimahi. Pihak instansi juga terus mendukung pengelolaan sampah sejak dari sumber.

2.5.5.6 Kegiatan Fisik Oleh Instansi

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan perkotaan di Kota Cimahi adalah dengan kegiatan fisik oleh instansi. Pada tahun 2020, terdapat 56 kegiatan fisik terkait yang dilaksanakan. Kegiatan fisik tersebut misalnya revitalisasi 3R, pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bimbingan teknis, dan penyusunan Perwal Jakstrada Kota Cimahi. Kegiatan fisik oleh instansi Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-49.

2.5.5.7 Komitmen Pengangkutan Sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka

Dilansir dari www.bandung.bisnis.com, penyusunan perjanjian Kerjasama pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka terus dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama enam pemerintah daerah kota dan kabupaten. Enam kabupaten/kota yang terlibat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Berdasarkan situs resmi Kota Cimahi (www.cimahikota.go.id), Pemerintah Kota Cimahi merespon dengan cepat terkait komitmen dalam mendukung percepatan realisasi program TPPAS Legok Nangka.



Gambar 2.62 Komitmen Kota Cimahi dalam Pengangkutan Sampah ke TPPAS Legok Nangka

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2021)

2.6 Tata Kelola

Tata kelola menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau disebut juga *good governance*. Keberhasilan dan kegagalan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Tata kelola mencakup rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi yang bergerak mencapai visi suatu kota. Pada skala perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan untuk memastikan perkembangan kegiatan perkotaan tidak berdampak secara signifikan pada lingkungan. Adanya tata kelola lingkungan hidup yang baik dapat memastikan Kota Cimahi tetap bisa melakukan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Data pendukung yang digunakan dalam analisis isu lingkungan tata kelola yaitu tabel 18 - tabel 21, tabel 41 – tabel 43, tabel 50 – tabel 61. Pemetaan tabel utama terhadap isu tata kelola dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Pemetaan Tabel Utama Terhadap Isu Tata Kelola

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
1	Tabel-18 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
2	Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
3	Tabel-20 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
4	Tabel-21 Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	-	-	-	Tidak Ada Data
5	Tabel-41 Dokumen Izin Lingkungan	-	-	✓	-	-	
6	Tabel-42 Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3	-	-	-	-	-	Tidak Dilakukan Analisis
7	Tabel-43 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))	-	✓	-	-	-	
8	Tabel-50 Status Pengaduan Masyarakat	-	✓	-	-	-	
9	Tabel-51 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	-	-	-	-	✓	
10	Tabel-52 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan	-	-	✓	-	-	
11	Tabel-53 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat	-	-	✓	-	-	
12	Tabel-54 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	✓	
13	Tabel-55 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat	-	-	-	✓	-	
14	Tabel-56 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	-	-	✓	-	-	
15	Tabel-57 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	-	-	✓	-	-	
16	Tabel-58 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	✓	

No	Judul Tabel	Analisis					Keterangan
		Driving Force	Pressure	State	Impact	Response	
17	Tabel-59 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	✓	-	-	-	
18	Tabel-60 Pendapatan Asli Daerah	-	-	✓	-	-	
19	Tabel-61 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	✓	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2.6.1 Driving Force

2.6.1.1 Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus digalakkan demi mengendalikan dampak negatif dan dampak positif dapat dikembangkan sejak awal perencanaan. Penataan dan pengelolaan lingkungan bergantung pada regulasi umum terkait izin lingkungan. Segala hal yang berkaitan dengan perizinan tersebut akan menjadi landasan pemerintah dalam menerapkan tata kelola. Regulasi terkait yang menjadi panduan dalam hal ini antara lain:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dan sebagainya.



2.6.1.2 Pengawasan Pembangunan Sesuai Kebijakan Kota Cimahi

Faktor pemicu kedua ialah adanya penetapan lahan sebagai kawasan budidaya yang tercantum dalam rencana tata ruang dan wilayah Kota Cimahi. Kawasan budidaya merupakan area yang dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 menyebutkan pengembangan kawasan budidaya termasuk dalam salah satu kebijakan dan strategi pola ruang di Kota Cimahi. Strategi tersebut dilakukan dengan mengembalikan fungsi lindung dari kawasan budidaya di Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- Pengembangan dan pengendalian perumahan
- Pengendalian kawasan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional
- Pengembangan industri kreatif dan industri yang ramah lingkungan
- Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan
- Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana
- Pengembangan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai salah satu ruang publik kota
- Pengembangan potensi wisata terpadu, wisata budaya lokal dan fasilitas olahraga

2.6.1.3 Misi Peningkatan Taraf Ekonomi pada RPJMD Kota Cimahi

Faktor pemicu berikutnya yaitu misi peningkatan taraf ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Tujuan misi tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi aspek teknis dan non teknis jelas harus mempertimbangkan tujuan tersebut. Misi yang direncanakan

oleh pemerintah ini akan mempengaruhi pendapatan daerah, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, penerapan izin lingkungan beserta pengawasannya, jumlah dan kapasitas SDM, dan sebagainya.

2.6.2 Pressure

2.6.2.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup Kota Cimahi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kota Cimahi dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan penataan dan pengelolaan lingkungan ialah anggaran yang mencukupi. Semakin banyaknya pencemaran lingkungan mengakibatkan banyaknya kegiatan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan anggaran. Secara tidak langsung, alokasi dana berperan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan melihat dan mencermati APBD akan terlihat apakah suatu sektor lingkungan hidup mendapat skala prioritas. Komposisi APBD dari tahun ke tahun berikutnya juga akan memperlihatkan tingkat kepedulian sektor lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.34 dan Gambar 2.63.

Tabel 2.34 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan
1	2016	19	Rp59.635.443.526
2	2017	48	Rp83.019.714.186
3	2018	64	Rp89.153.134.394
4	2019	72	Rp197.375.882.434
5	2020	70	Rp168.381.214.308

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2020)



Gambar 2.63 Perbandingan Perekonomian Kota Cimahi
(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2020)

Tren jumlah anggaran dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terus meningkat, dalam hal ini tren peningkatan merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Cimahi dalam menganggarkan keuangan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi.

2.6.2.2 Pelanggaran Izin Lingkungan

Para pelaku usaha dapat menjadi tekanan terhadap tata kelola Kota Cimahi, terutama jika para pelaku usaha tersebut tidak taat dalam izin lingkungan. Masih ada kegiatan usaha yang tidak menaati upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan di Kota Cimahi. Data pengawasan izin lingkungan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-43. Hasil pengawasan menunjukkan terdapat 11 pemrakarsa yang telah taat izin lingkungan, 37 pemrakarsa yang tidak taat, dan 4 pemrakarsa yang sudah diberikan sanksi dari DLH Kota Cimahi.

2.6.2.3 Status Pengaduan Masyarakat

Pengaduan adalah informasi lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Jumlah pengaduan yang terjadi selama tahun 2020 sebanyak 7 kasus. Pengaduan tersebut dipicu oleh permasalahan yang mereka hadapi, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pembakaran sampah dan sebagainya. Pengaduan masalah lingkungan dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-50.

Setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pengaduan masyarakat sejatinya adalah bentuk kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terkait layanan publik. Tidak adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan menunjukkan kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi aduan yang masuk. Sedangkan pengaduan yang selesai menunjukkan peningkatan fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

2.6.3 State

2.6.3.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sesuai dengan dasar hukum Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 dan Perwal Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 bertugas membantu Wali Kota Cimahi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kota Cimahi diantaranya merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjang dengan sumber daya manusia atau personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pada tahun 2020, jumlah personil yang terikat dengan lembaga pengelola lingkungan hidup yaitu 92 orang dengan keterangan berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	2	8
2	S1	12	15	27
3	D IV	2	1	3
4	D III	1	2	3
5	SMA	28	-	28
6	SMP	8	1	9
7	SD	14	-	14
Jumlah		71	21	92

(Sumber: Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Semakin berkembangnya permasalahan lingkungan di Kota Cimahi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup di Kota Cimahi memang terbatas, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terus meningkatkan kualitas personilnya. Peningkatan kapasitas dan kompetensi personil pengelola lingkungan hidup dilakukan melalui diklat. Pendidikan dan pelatihan bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan motivasi kerja, membangun kemampuan berpikir, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kedisiplinan, dan sebagainya. Pada tahun 2020, jumlah staf yang telah mengikuti diklat dapat dilihat pada tabel 2.36.



Tabel 2.36 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional		Staf Yang Sudah Diklat		
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	DLH	PPLH	1	1	2	2
2	DLH	PPNS LH	2	0	2	0
3	DLH	PPNS	0	0	0	0
4	DLH	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.3.2 Alokasi Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kondisi eksisting atau status kedua Kota Cimahi dalam tata kelola yang perlu diperhatikan adalah anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Rencana anggaran sektor lingkungan hidup dalam APBD menjadi suatu hal yang penting, mengingat lingkungan hidup adalah persoalan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengindikasikan keseriusan suatu daerah untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran. Daerah yang memiliki APBD besar dimungkinkan memiliki anggaran lingkungan hidup yang cukup besar.

Besaran dana yang dialokasikan disesuaikan dengan jumlah program, total program dijadikan dasar oleh DLH Kota Cimahi mencapai 70 kegiatan. Selama tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp168.381.214.308. Rincian dana tersebut dapat dilihat pada Lampiran II Tabel 59.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan asli daerah Kota Cimahi diperoleh dari pajak dan pendapatan lainnya yang sah (Gambar 2.64). Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah

tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Pendapatan lainnya yang sah ialah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Pendapatan lainnya yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lainnya.



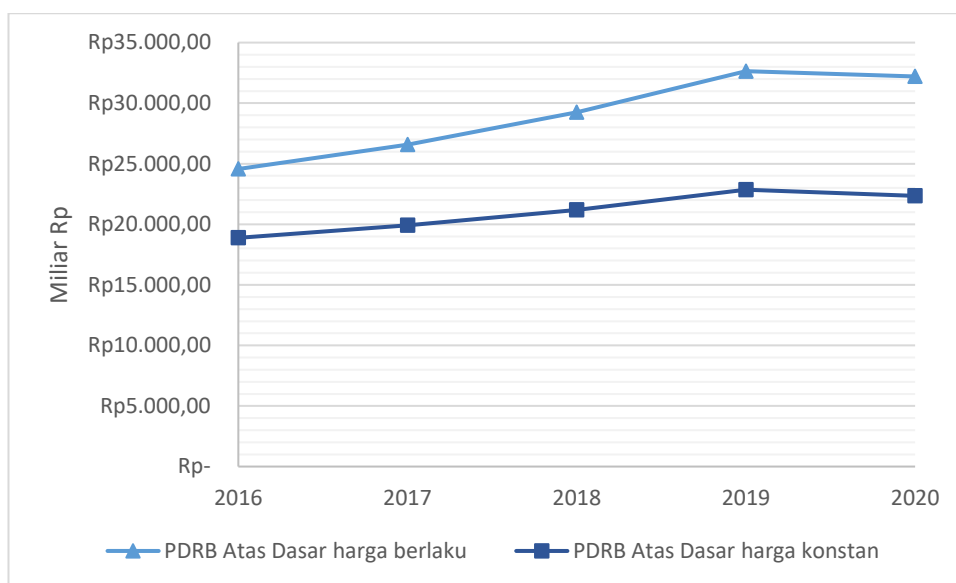
Gambar 2.64 Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi

(Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi, 2020)

2.6.3.3 Perkembangan PDRB

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-56 dan Tabel-57. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Kota Cimahi periode 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.65.



Gambar 2.65 Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan Kota Cimahi

(Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2020)

Dari Gambar 2.64, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Pada periode tahun 2016 hingga 2019 PDRB Kota Cimahi atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 24.563,81 miliar Rupiah (tahun 2016); 26.580,08 miliar Rupiah (tahun 2017); 29.240,03 miliar rupiah (tahun 2018) dan 32.639,54 miliar Rupiah (tahun 2019). Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Cimahi berkurang menjadi 32.210,69 milyar Rupiah secara harga Berlaku. Penurunan pertumbuhan

perekonomian pada tahun 2020 disebabkan dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka hanya kegiatan ekonomi tertentu yang tetap dapat beroperasi dan bertahan selama pandemi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang rentan saat pandemi, mengalami dampak yang cukup berat. Masyarakat yang bekerja pada kegiatan ekonomi yang rentan ini akhirnya mengalami dampak buruk misalnya pengurangan jam kerja atau bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat dan pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat, bahkan masyarakat cenderung memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu.

2.6.3.4 Implementasi Izin Lingkungan

Kondisi eksisting dari implementasi tata kelola dapat dilihat salah satunya dari daftar perusahaan yang telah mendapatkan izin lingkungan. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kota Cimahi telah mengeluarkan 279 dokumen izin lingkungan berupa SPPL, UKL-UPL, maupun DPLH kepada pemrakarsa. Rincian terkait kegiatan dan pemrakarsa tercantum dalam Lampiran II Tabel-41. Selain itu, penerapan izin lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan di Kota Cimahi juga ditandai dengan perizinan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hingga tahun 2020, terdapat 23 perusahaan yang telah mendapat izin mengelola Limbah B3. Daftar perusahaan yang telah mendapat izin tersebut dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-42.

2.6.4 Impact

2.6.4.1 Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat

Sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mencatat terdapat 10 kegiatan yang diinisiasi masyarakat. Hal ini cukup membantu pemerintah dalam mengatasi

permasalahan lingkungan yang ada di Kota Cimahi. Kegiatan yang diinisiasi masyarakat dapat dilihat Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi dan Publikasi Satgas Citarum Harum Sektor 21	Sektor Citarum Harum	Januari 2020
2	Pelatihan Online Menolah Sampah Organik	Universitas Muhammadiyah Bandung	Januari 2020
3	Penanaman Pohon di Eks TPA Leuwigajah	Nemov Foundation	Februari 2020
4	Zero Waste Academy	YPBB	Maret - April 2020
5	Jalan Sehat Lingkungan Bersih	SMK Sangkuriang 1	Maret 2020
6	Webinar Series Zero Waste Academy Refleksi Berbagi Pengalaman	YPBB	Agustus 2020
7	Webinar Tantangan dan Peluang pelaksanaan pengurangan pembatasan plastik sekali pakai dan penanganan sampah dengan model zero waste	YPBB	Agustus 2020
8	Silaturahmi dan Evaluasi Gerakan Mandiri Sampah (GEMAS) RW. 19 Padasuka	RW. 19 Padasuka	November 2020
9	Peningkatan kemampuan teknis kader perencana	Bappeda	Pelatihan selama 2 (dua) hari
10	Penguatan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berupa pelaksanaan fasilitasi kegiatan kompetisi inovasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kota Cimahi	Bappeda	Kompetisi dilaksanakan bulan Oktober-Desember 2019

(Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.4.2 Pengawasan Izin Lingkungan

Tata kelola yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya sengketa terkait lingkungan. Bila pemerintah tidak tegas dalam menegakkan aturan atau izin membangun usaha, maka penyelewengan izin lingkungan dapat terjadi. Sengketa lingkungan dapat mempengaruhi isu tata guna lahan, kualitas air dan kuantitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan persampahan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Data pengawasan izin lingkungan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-43. Dengan demikian, pemerintah harus tegas memberikan sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan. Hasil pengawasan tahun 2020 menunjukkan terdapat 11 pemrakarsa yang telah taat izin lingkungan, 37 pemrakarsa yang tidak taat, dan 4 pemrakarsa yang sudah diberikan sanksi.

2.6.5 Response

2.6.5.1 Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup

Peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan merupakan hal yang perlu didukung, salah satunya dengan penghargaan-penghargaan lingkungan hidup. Penghargaan ini dapat sebagai bentuk kepedulian pihak *stakeholder* dalam mengelola lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk terus berlomba-lomba dalam memperbaiki lingkungan. Pada tahun 2020, Kota Cimahi mendapatkan 15 penghargaan lingkungan hidup baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan yang didapat ini juga dapat memberi gambaran mengenai kinerja pemerintah untuk mengendalikan perusahaan/kelompok di

bawahnya. Daftar penerima penghargaan lingkungan hidup di Kota Cimahi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.33. Kota Cimahi juga mendapatkan 2 buah penghargaan ProKlim di RW 5 Kelurahan Citeureup dan RW 18 Kelurahan Padasuka.

Tabel 2.38 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

No.	Nama Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	RW 5 Kelurahan Citeureup	Lokasi Program Kampung Iklim (Proklm) Kategori Utama	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2020
2	RW 18 Kelurahan Padasuka	Lokasi Program Kampung Iklim (Proklm) Kategori Utama	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2020
3	PT. Trisula Textile Industries	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2020
4	PT. Central Georgette Nusantara	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2020
5	PT. Chitose Internasional Tbk	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2020
6	PT. Kahatex Indah	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
7	PT. Bina Nusantara Prima	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
8	PT. Dewa Sutratex I	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
9	PT. Guna Mitra Prima	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
10	PT. Ayoe Indotama Textile	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
11	PT. Oriental Embroidery	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
12	PT. Sanbe Farma	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020

No.	Nama Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
13	PT. Holy Pharma	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
14	PT. Heksatex Indah	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
15	PT. Fuji Palapa Textile	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020

(Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Cimahi, 2020)

Program Kampung Iklim (Proklam) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan. Hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 2.66 Penerima Penghargaan Lingkungan ProKlim di Kota Cimahi Tahun 2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.5.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh. Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2020 menyusun beberapa produk hukum bidang pengelolaan lingkungan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup (dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-58). Produk hukum yang paling umum biasanya berupa peraturan. Sejak tahun 2003 hingga 2020 Kota Cimahi telah menghasilkan 89 produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2020, Kota Cimahi mengeluarkan 6 produk hukum yang terdiri dari 2 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Walikota. Peraturan-peraturan tersebut yakni:

- 1) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
- 2) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Rumah yang Terdampak Bencana Alam di Kota Cimahi
- 4) Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 5) Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Laik Fungsi
- 6) Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2020 tentang Izin Tempat Usaha

2.6.5.3 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demi mencapai tujuan tersebut inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pengusulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Walikota, anggota DPRD, ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, agar seluruh elemen terwadahi dan dapat mengusulkan inovasinya masing-masing. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Cimahi mencatat terdapat 146 inovasi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-61.

2.6.5.4 Kemitraan

Salah satu peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terlihat melalui hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan keuntungan dari kegiatannya. Keberadaan LSM bidang lingkungan merupakan dampak terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus berperan sebagai lembaga pengontrol terhadap program dan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi.

Program pengelolaan yang disusun oleh pemerintah terkadang masih belum efektif dan tidak mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan bisa saja melibatkan masyarakat untuk mendukung berjalannya program. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah dengan membentuk kemitraan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahun 2020, Kota Cimahi memiliki 10 LSM lingkungan hidup, dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2020

No.	Nama LSM	Lokasi
1	LSM Sadar	Kota Cimahi
2	KPPLH Zarambah	Kota Cimahi
3	GPI Kota Cimahi	Kota Cimahi



No.	Nama LSM	Lokasi
4	Earth Hour Kota Cimahi	Kota Cimahi
5	Komunikasi Gowes Onthel	Kota Cimahi
6	Komunikasi Reptil	Kota Cimahi
7	LSM Kompas	Kota Cimahi
8	LSM Solusi	Kota Cimahi
9	KNPI	Kota Cimahi
10	FPRB Kota Cimahi	Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.5.5 Progres Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat sejatinya adalah bentuk kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terkait layanan publik. Tidak adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan menunjukkan kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi aduan yang masuk. Sedangkan pengaduan yang selesai menunjukkan peningkatan fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sebanyak 7 aduan yang diajukan masyarakat, semua pengaduan sudah diselesaikan dengan baik, adapun progres pengaduan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Progres Pengaduan Masyarakat

No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
1	Okib Suryadi	1/13/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan penjelasan kepada pengadu bahwa ini bukan pengaduan yang disebabkan pencemaran lingkungan. 2. Dugaan air sumur berbau kemungkinan disebabkan letak air sumur berdekatan dengan septitank warga setempat. 3. Disarankan untuk melakukan uji lab air sumur ke UPTD Laboratorium DLH Kota Cimahi untuk memastikan air sumur tersebut layak tidaknya di konsumsi. 4. Pengaduan selesai
2	Surat dari kelurahan leuwigajah nomor surat 400/018/kel. LG	31/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH mengirimkan surat ke dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk dianalisa lebih lanjut 2. Melakukan sampling air sumur di 2 titik. 3. melakukan titik lokasi sampling dan uji air sampling di 7 titik di sekitar sumur Bpk Hambali tanggal 2 Maret 2020 4. rapat pembahasan sumur warga Kel. Leuwigajah tanggal 10 Juni 2020 dengan dinas terkait (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas kesehatan dan UPTD Lab Lingkungan Kota Cimahi) 5. Hasil rapat telah dilaporkan kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Kadis DLH berupa nota dinas nomor 660/071/PHL tanggal 23 Juni 2020 • Wali Kota berupa Nota dinas nomor 660.3/679-ND/PHL tanggal 26 Juni 2020 Hasil Rapat Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> -akan meningkatkan program IPAL komunal -sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan lingkungan -menguatkan program PPM (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) di kelurahan leuwigajah agar diprioritaskan untuk pembuatan septic tank 6. Pengaduan Selesai

No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
3	Surat dari Kelurahan Melong Green Kecamatan Cimahi Selatan (RW 28)	20 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Cipta Aneka Pangan Prima untuk melakukan uji kualitas kebauan spesifik industri makanan <ul style="list-style-type: none"> - telah melakukan uji lab kebisingan dan kebauan di lokasi sebanyak 6 titik - hasil uji lab dibawah baku mutu yang dipersyaratkan. 2. Tanggal 16 Juni 2020 telah dilakukan mediasi dengan PT Cipta Aneka Pangan di kelurahan Melong. <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil mediasi disampaikan ke Wali Kota berupa Nota dinas Nomor 337/674-ND/PHL tanggal 25 Juni 2020 - Hasil mediasi tidak ada kesepakatan antara warga RW28 dan PT cipta aneka pangan. 3. Tanggal 23 Juni 2020 telah terjadi permufakatan dalam permusyawarahan tentang penanganan lingkungan akibat aktivitas produksi di PT Cipta Aneka Pangan Prima berupa perjanjian kesepakatan antara PT Cipta Aneka pangan Prima dengan masyarakat RW 28 Melong Green Garden yang ditandatangani oleh Natalia Alimmargono direktur PT CAPP dengan Tri Djoko Kuntjoro ketua RW 28 4. Verifikasi pengaduan lanjutan pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan hasil: PT Cipta Aneka Pangan Prima telah melakukan usaha pengurangan bau di proses produksi, dengan cara memasang alat hepafilter dan filter karbon dan kebisingan dengan memasang peredam berupa pemasangan triplek permesin di lokasi (blower di lantai 3, hummermill di lantai 2 dan pulvilizner di lantai 1). 5. Verifikasi pengaduan bersama DLH Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum Harum pada tanggal 1 September 2020, dengan hasil: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Aneka Cipta Pangan Prima yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, dengan mengenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02



No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
			<p>Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan SK sanksi administratif nomor 660/Kep. 71-DLH/2020 tanggal 10 September 2020 kepada PT CAPP, penyerahan SK Sanksi diserahkan pada tanggal 15 September 2020. 7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah berkirin surat nomor 337/984/PHL tanggal 17 September 2020, ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah berkirin surat ke Direktur Pengaduan, pengawasan dan sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor surat 337/1144/PHL tanggal 27 Oktober 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Verifikasi sudah disampaikan ke pengadu via telepon 9. Pengaduan Selesai
4	Surat dari Kelurahan Citeureup Cimahi Utara (RT 5, RW 1)	2 Juli 2020 (no BA 003)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan hasil verifikasi pengaduan pembakaran sampah tanggal 13 juli 2020 yang dipimpin oleh Kepala DLH dan dihadiri oleh ketua RW 5 dan perwakilan warga RT1 dan RT5 2. Hasil rapat disimpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah Warga Di RT 05 / RW 01 siap untuk iuran sampah - Petugas pengangkut sampah disiapkan oleh ketua RW 01 - Motor sampah segera dipinjamkan dari DLH Kota Cimahi sampai diganti dengan motor bantuan yang baru. - Setelah motor sampah diterima ketua RW 01 maka tempat sampah dibongkar dan tidak ada lagi pembakaran sampah. 3. Membuat laporan berupa Nota dinas nomor 660/85/PHL ke kepala dinas DLH Tanggal 13 Juli 2020 4. Pengaduan Selesai

No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
5	Anda Suherman (Kp. Kihapit Barat NO. 295, kel. Leuwigajah)	30 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat pelimpahan penanganan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat nomor 067/870/PHL Hal Pelimpahan Pengaduan tanggal 14 agustus 2020, surat tembusan Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPMPTSP Provinsi, ESDM Prov, Sekda Kota Cimahi, Camat CimSEI, Lurah Leuwigajah, Lurah Cibeber 2. DLH Kota Cimahi tidak memiliki kewenangan dalam penanganan pengaduan karena lokasi kegiatan di KBB sedangkan dampak tercemarnya Kota Cimahi sesuai Permen Nomor P.22 /MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang tatacara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan/atau perusakan hutan dan izin usaha operasional pertambangan dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. dan lokasi kegiatan di KBB 3. Telah dilakukan pembahasan hasil verifikasi pengaduan terhadap pertambangan H Nunu Abidin pada tanggal 15 september 2020 di Kantor DLH Provinsi Jawa Barat dengan Nomor BA : 12/BA-Bid.IV/2020 4. Telah mengirim surat ke lurah leuwigajah dan cibeber nomor 337/990/PHL perihal tindak lanjut pengaduan terkait rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan H. Nunu Abidin wajib memasang patok batas wilayah izin usaha pertambangan dengan pengawasan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Tambang. b. Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan H. Nunu Abidin wajib menindaklanjuti temuan hasil verifikasi lapangan. c. Sesuai Pasal 76 Undang-Undang no 32 Tahun 2009, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti temuan hasil verifikasi dengan memberikan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pemberhentian Kegiatan Kepada Pertambangan H. Nunu Abidin sampai dilaksanakannya seluruh kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan dan dokumen lingkungan 5. Pengaduan dinyatakan selesai

No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
6	Wartawan Saktimedianews.id	24/09/2020	<p>Permasalahan akan diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan warga RW 7 kelurahan utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pihak perusahaan ada mis komunikasi dengan operator mesin pada waktu itu mesin pengering limbah dalam keadaan bermasalah seharusnya mesin dimatikan namun oleh operator mesin tetap digunakan dan melakukan proses pengeringan <i>sludge</i>. 2. Pihak perusahaan akan memberi peringatan kepada operator jika mesin masih bermasalah akan tetapi tetap dijalankan , akan ditindak sesuai dengan prosedur perusahaan. 3. Dilakukan uji kualitas udara ambien dan udara emisi tanggal 11 September 2020 oleh Lab terakreditasi LPKL , denga hasil memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan . 4. Pada tanggal 16 November 2020 DLH memberikan SK sanksi administratif berupa teguran tertulis nomor 660/Kep.80-DLH/2020 5. Poin Sanksi yang diberikan berupa optimalisasi IPAL dengan batas waktu 120 hari kalender (PT AyouTex melaporkan hasil uji kualitas air limbah di bln oktober, November dan Desember ke DLH Kota Cimahi) 6. Closing Sanksi Administratif tanggal 25 Februari 2021 7. Pengaduan Selesai.
7	H. Deden Hidayat	5 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis dan kajian lebih lanjut atas pengaduan tersebut berupa : Hasil laboratorium sampling air yang telah diambil (14 hari kerja dar tanggal 5 Oktober) 2. Verifikasi lapangan lanjutan untuk mengetahui adanya rembesan /kebocoran atau bypass dari industri sekitar. 3. Kajian potensi cemaran lain di lokasi kejadian

No.	Pihak yang Mengadukan	Waktu	Progres Pengaduan
			<ol style="list-style-type: none">4. Bila hasil uji laboratorium mengindikasikan bahwa pencemaran akibat kegiatan industri di sekitar lokasi maka diperlukan Verifikasi lapangan pada industri sekitar yaitu PT. Nisshinbo, PT. Ragam Jaya Utama, PT. Long Sun dan PT Sukses Investa Anugrah Propertindo5. Dari hasil uji kualitas lab bahwa air permukaan sungai disamping diduga tercemar6. Tanggal 5 November 2020 melakukan verifikasi pengaduan ke PT SIAP dengan hasil :<ul style="list-style-type: none">- telah melakukan perbaikan dan merubah arah cerobong asap ke lokasi PT SIAP- telah menutup saluran pembuangan air limbah domestik dari toilet karyawan.7. akan menyampaikan laporan hasil verifikasi pengaduan ke H Deden Hidayat sebagai pengadu.8. Pengaduan selesai

(Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Cimahi, 2020)

Tabel 2.41 Rekapitulasi Hasil Analisis DPSIR

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Tata Guna Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Arahan Pemanfaatan Ruang pada RTRW Kota Cimahi Perda Kawasan Bandung Utara Pertumbuhan Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Lahan Permukiman Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional Pelanggaran Izin Lingkungan Peningkatan Timbulan Limbah Daya Dukung Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan Lahan Kota Cimahi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kondisi Kepadatan Penduduk Kualitas Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan Iklim Degradasi Lahan Penurunan Muka Air Tanah Kekurangan Air Bersih Kejadian Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Vertikultur Pengawasan Izin Lingkungan Pengembangan Hunian Vertikal Penghijauan dan Pengoptimalan RTH Pengembangan Ekowisata dan Jasa Alam Penetapan Status Kerusakan Tanah Diversifikasi Pangan di Masa Pandemi
Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas Domestik Pertumbuhan Penduduk Program Nasional Citarum Harum Kontribusi Volume Limbah 	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya Lahan Terbangun Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri Beban Pencemar Sungai 	<ol style="list-style-type: none"> Status Mutu Air Kualitas Air Sungai Indeks Kualitas Air Kualitas Air Sumur 	<ol style="list-style-type: none"> Kekurangan Air <i>Waterborne Disease</i> Penurunan Kandungan DO Penurunan Muka Air Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Mengelola Limbah Evaluasi dan Monitoring Penambahan Cadangan Air Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Program Penurunan Beban Pencemar Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk 2. Jumlah Kendaraan Bermotor 3. Rencana Peningkatan Kualitas Udara pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emisi Bahan Bakar 2. Kemacetan 3. Efek Rumah Kaca dari Kegiatan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Udara 2. Kualitas Udara Ambien 3. Indeks Standar Pencemaran Udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanasan Global 2. Penyakit yang Diderita Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Jalan 2. Rekayasa Lalu Lintas 3. <i>Ramp Check</i> 4. Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala 5. Penghargaan Lingkungan bagi Industri 6. Kegiatan <i>Earth Hour</i>
Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Sesar Lembang 2. Kondisi Topografis Kota Cimahi 3. Perubahan Tata Guna Lahan 4. Pandemi COVID-19 di Dunia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku Masyarakat 2. Pertumbuhan Penduduk 3. Kondisi Saluran Drainase 4. Peningkatan <i>Run Off</i> 5. Pandemi COVID-19 di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebencanaan 2. Angin Kencang 3. Tanah Longsor 4. Kebakaran 5. Banjir 6. Kasus COVID-19 di Kota Cimahi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Bencana Banjir 2. Dampak Bencana Angin Kencang 3. Dampak Bencana Tanah Longsor 4. Dampak Bencana Kebakaran 5. Timbulan Limbah Medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Inovasi Lingkungan 3. Pemeliharaan Drainase 4. Kegiatan Fisik Oleh Instansi 5. Pengadaan Sumur Resapan 6. Upaya Penanggulangan Bencana 7. Pengelolaan Limbah B3 Medis
Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Penduduk 2. Kurangnya Fasilitas Tempat BAB 3. Tidak Memiliki TPPAS Mandiri 4. Rendahnya PHBS 5. Jumlah TPS Sedikit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pengelolaan Persampahan 2. Tingkat Pendidikan 3. Umur TPA Sarimukti 4. Peran Serta Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbulan Sampah 2. Kondisi Operasional Pengelolaan Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit 2. Kejadian Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Strategi Pengurangan Sampah 3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Program HO HA 5. Kerjasama TPPAS Regional Legok Nangka



Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
		5. Tingkat Kemiskinan Masyarakat			6. Kegiatan Fisik Oleh Instansi 7. Zero Waste
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Bidang Lingkungan 2. Pengawasan Pembangunan Sesuai Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi 3. Misi Peningkatan Taraf Ekonomi pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Izin Lingkungan 2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Status Pengaduan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan Kuantitas SDM 2. Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup 3. Perkembangan PDRB 4. Implementasi Izin Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat 2. Pengawasan Izin Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Hukum 2. Inovasi Pengelolaan Lingkungan 3. Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup 4. Kemitraan 5. Progres Pengaduan Masyarakat

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BAB III

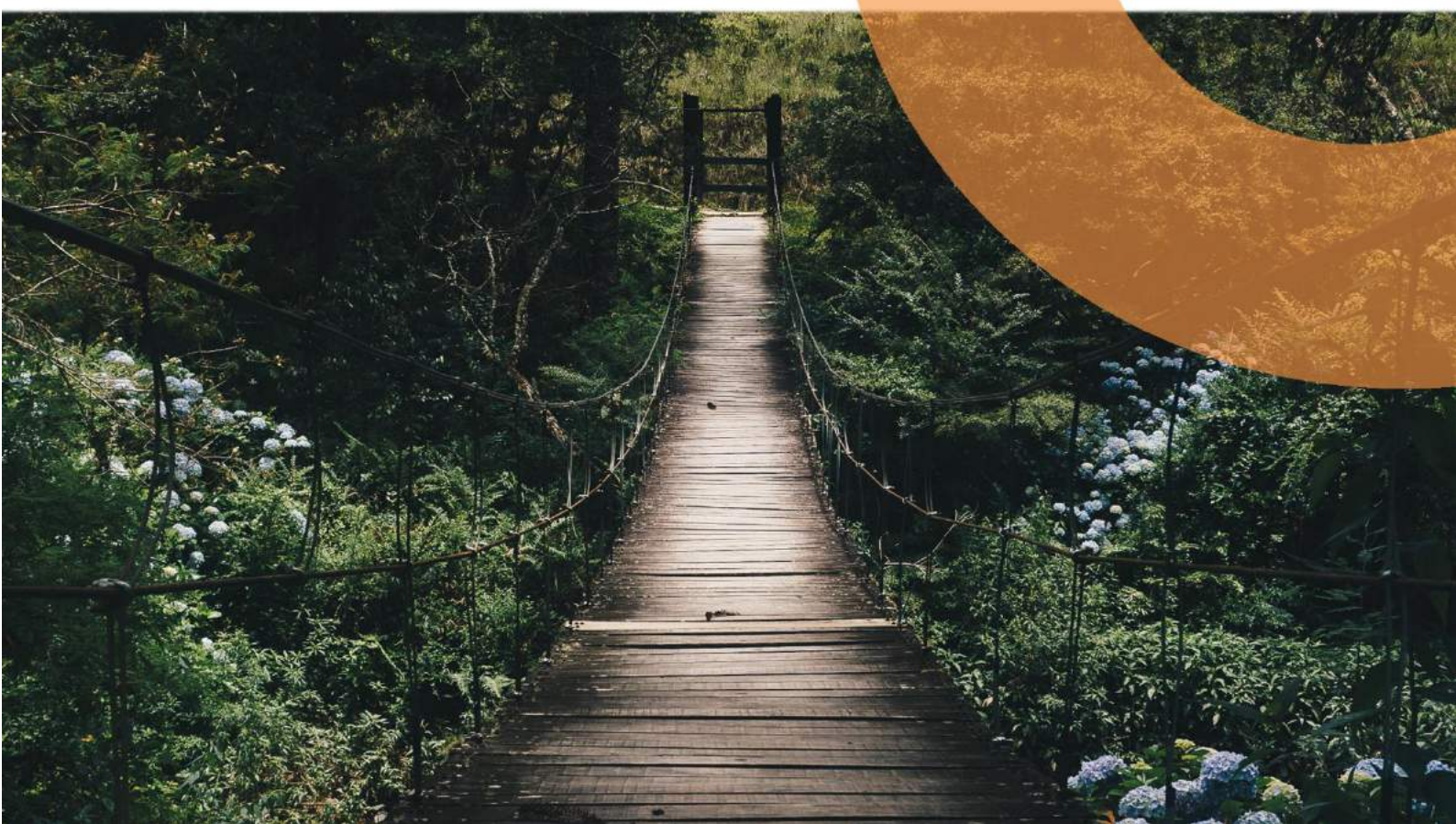
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN

HIDUP DAERAH

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHU

TAHUN 2021

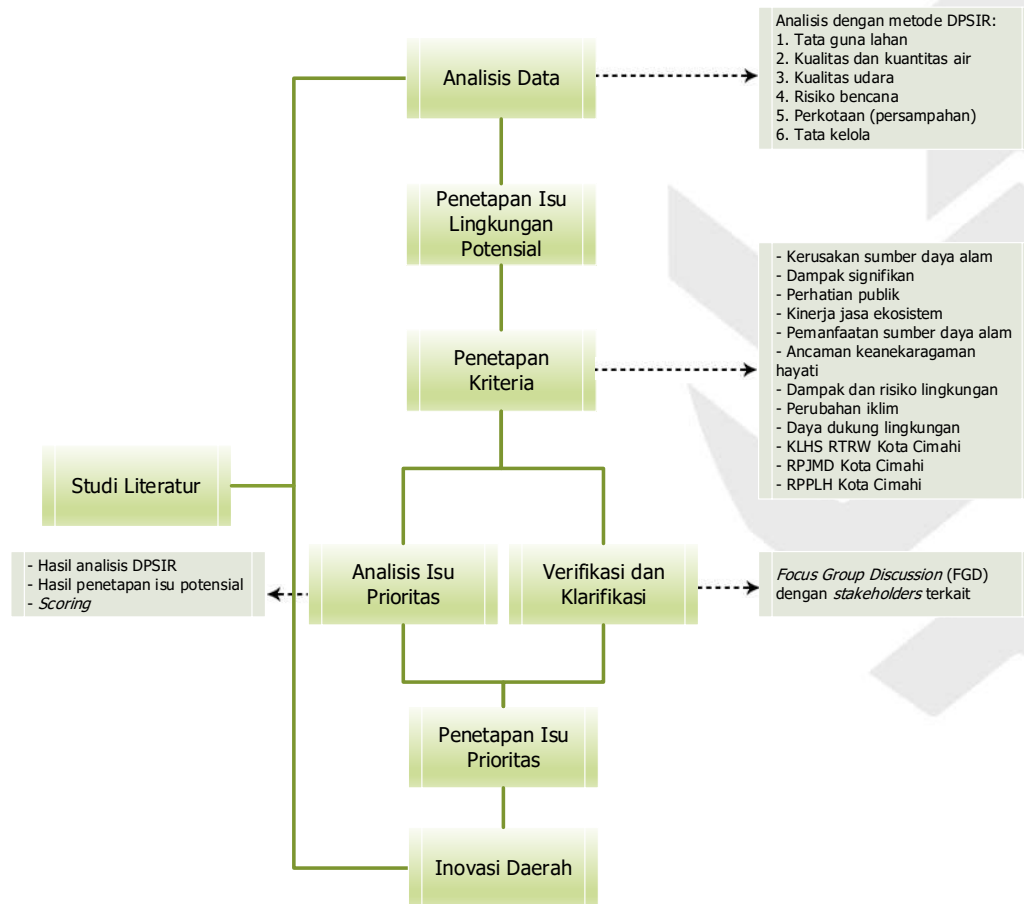


BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 Perumusan Isu Prioritas

Dengan menganalisis keenam isu lingkungan menggunakan metode *driving force-pressure-state-impact-response*, penapisan perlu dilakukan untuk memilih isu yang sangat diprioritaskan. Pada bagian dokumen ini, tahap *screening* tersebut dijelaskan dengan metode *scoring* untuk memilih tiga hingga 5 isu terpenting untuk dievaluasi. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1, berikut merupakan alur dalam penyusunan isu prioritas lingkungan hidup Kota Cimahi tahun 2020.



Gambar 3.1 Alur Perumusan Isu Prioritas
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Alur tersebut menjelaskan perumusan isu prioritas memerlukan beberapa tahapan. Tahapan dimulai dengan analisis DPSIR 6 isu utama yang disarankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pedoman Penyusunan DIKPLHD (tercantum dalam Bab II). Sedangkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi akan dijelaskan pada Bab IV.

3.2 Studi Literatur

3.2.1 Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan erat dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep dari SDGs ini merupakan komitmen untuk melanjutkan pencapaian dan tetap mengejar berbagai perbaikan dari segala aspek kehidupan manusia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, maka SDGs dimulai pada Tahun 2015 hingga Tahun 2030.



Gambar 3.2 *Sustainable Development Goals*

Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Rincian dari definisi pembangunan berkelanjutan disini didasarkan kepada SDGs, dimana tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali (Liu, 2017; Wellard, 2017).

SDGs memiliki lima fondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Di antara 17 target sasaran utama (Gambar 3.2), terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan aspek lingkungan yaitu:

- a. *Goal 2*. Tanpa Kelaparan, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan.
- b. *Goal 6*. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Berkelanjutan Sumber Daya Air dan Sanitasi Untuk Semua Orang
- c. *Goal 7*. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Terpercaya, Berkelanjutan serta Modern Untuk Semua Orang
- d. *Goal 9*. Membangun Infrastruktur dan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- e. *Goal 11*. Mewujudkan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berketahanan serta Berkelanjutan.
- f. *Goal 12*. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan.
- g. *Goal 13*. Melakukan Aksi Nyata Memerangi Perubahan Iklim dan Dampak yang Ditimbulkan.
- h. *Goal 14*. Konservasi dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan
- i. *Goal 15*. Melindungi, Mengembalikan dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat, Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Menghentikan Tukar Guling serta Degradasi Tanah dan Kerugian Akibat Penurunan Keanekaragaman Hayati

3.2.2 Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah:

“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni: Maju, Agamis, dan Berbudaya.

Maju: Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Agamis: Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Berbudaya: Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut

pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan fondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam berbagai bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Misi kedua dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang

menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya usaha kecil menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidelines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada bidang lingkungan tercantum dalam Misi ke-4, yaitu **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.**

Pada misi tersebut pilar dari konsep pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat digambarkan sebagai pilar yang saling tergantung dan berhubungan secara mutualisma satu sama lain (Juwana, Perera & Muttill, 2010). Lebih jauh visi tersebut, pembangunan

(yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) di Kota Cimahi harus dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak menimbulkan polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource* (Salim, 1990). Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan harus dijadikan salah satu acuan penting. Sasaran dari visi bidang lingkungan sangat jelas merupakan sasaran dari pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan terpenuhinya kepentingan dasar manusia dalam pengelolaan lingkungan.

Jika diperhatikan dan dibandingkan antara arahan misi dan sasaran dari pembangunan, maka sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan tersebut diarahkan pada unsur penekan dominan yaitu penduduk dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya: Penataan ruang berkelanjutan; Pemulihan kualitas lingkungan; Pelestarian fungsi kawasan lindung; Menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

3.2.3 Rencana Strategis DLH Kota Cimahi 2018-2022

Literasi kedua merujuk pada Rencana Strategis DLH Kota Cimahi yang menyantumkan informasi terkait rencana pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2018-2022 sebagai rencana utamanya. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penentuan isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi. Sehingga isu prioritas yang dihasilkan nantinya ada keterkaitan satu sama lain dengan Rencana Strategis yang telah di buat oleh DLH Kota Cimahi. Perlunya mempertimbangkan Rencana Strategis ini untuk menentukan isu prioritas dan inovasi yang saling terintegrasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif. Adapun beberapa poin

penting dalam renstra DLH Kota Cimahi yang meliputi sasaran, program, dan indikator kinerja, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja dalam Renstra DLH Kota Cimahi 2018-2022

Sasaran	Program	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terselenggaranya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Cimahi
	Program Peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah berwawasan lingkungan	Cakupan Layanan pengelolaan sampah terpilah (kombinasi target SDGs dan jakstranas) (Prosentase sumber sampah terlayani sistem pengumpulan dan pengangkutan terpilah)
	Program Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah	Pengurangan timbulan sampah yang diangkut ke TPA dibandingkan dengan total timbulan sampah
Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan (Air, Tanah dan Udara)
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlindunginya kondisi lingkungan melalui upaya pengendalian dampak perubahan iklim serta pemantauan tingkat emisi gas rumah kaca di Kota Cimahi
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya usaha pengendalian polusi di Kota Cimahi
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Program Peningkatan Kualitas Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien
	Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air	Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan
Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlindunginya kondisi lingkungan melalui upaya pengendalian dampak perubahan iklim serta pemantauan tingkat emisi gas rumah kaca di Kota Cimahi

Sasaran	Program	Indikator Kinerja
	Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2018)

3.2.4 DIKPLH Kota Cimahi Tahun 2020

Rujukan berikutnya dalam melakukan studi literatur dapat didasari oleh Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan hidup Daerah (DIKPLH) Kota Cimahi tahun 2020. DIKPLH menunjukkan bahwa isu lingkungan yang dihadapi kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi

(Sumber: DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020)

Isu lingkungan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan isu prioritas di tahun 2021, isu yang sedang dihadapi Kota Cimahi masih dalam lingkup isu di tahun sebelumnya dengan program dan kegiatan yang masih berjalan.

3.3 Analisis D-P-S-I-R Tahun 2021

Dengan melihat keterkaitan antara elemen pemicu (D), tekanan (P), kondisi eksisting (S), dampak (I), upaya yang dilakukan (R), penetapan isu prioritas diharapkan akan lebih mudah dan representatif.

a. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan mengatur penggunaan lahan melalui kebijakan dan program tata ruang. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Isu terkait tata guna lahan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan data tabel utama Lampiran II Tabel 1-Tabel 17.



Gambar 3.4 DPSIR Tata Guna Lahan

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

b. Kualitas dan Kuantitas Air

Lingkup dari analisis DPSIR isu ini ialah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Analisis air ini ditunjangi oleh beberapa data dasar yang tercantum dalam lampiran tabel utama (Tabel 22 s/d Tabel 30)

yang terdiri dari hasil uji kualitas air sungai, hasil uji kualitas air tanah, kondisi lahan kritis, data penyakit, dan data pembuangan limbah padat dan limbah cair. Berikut Gambar 3.5 yang menunjukkan rangkaian poin-poin dalam analisis DPSIR isu kualitas dan kuantitas air.

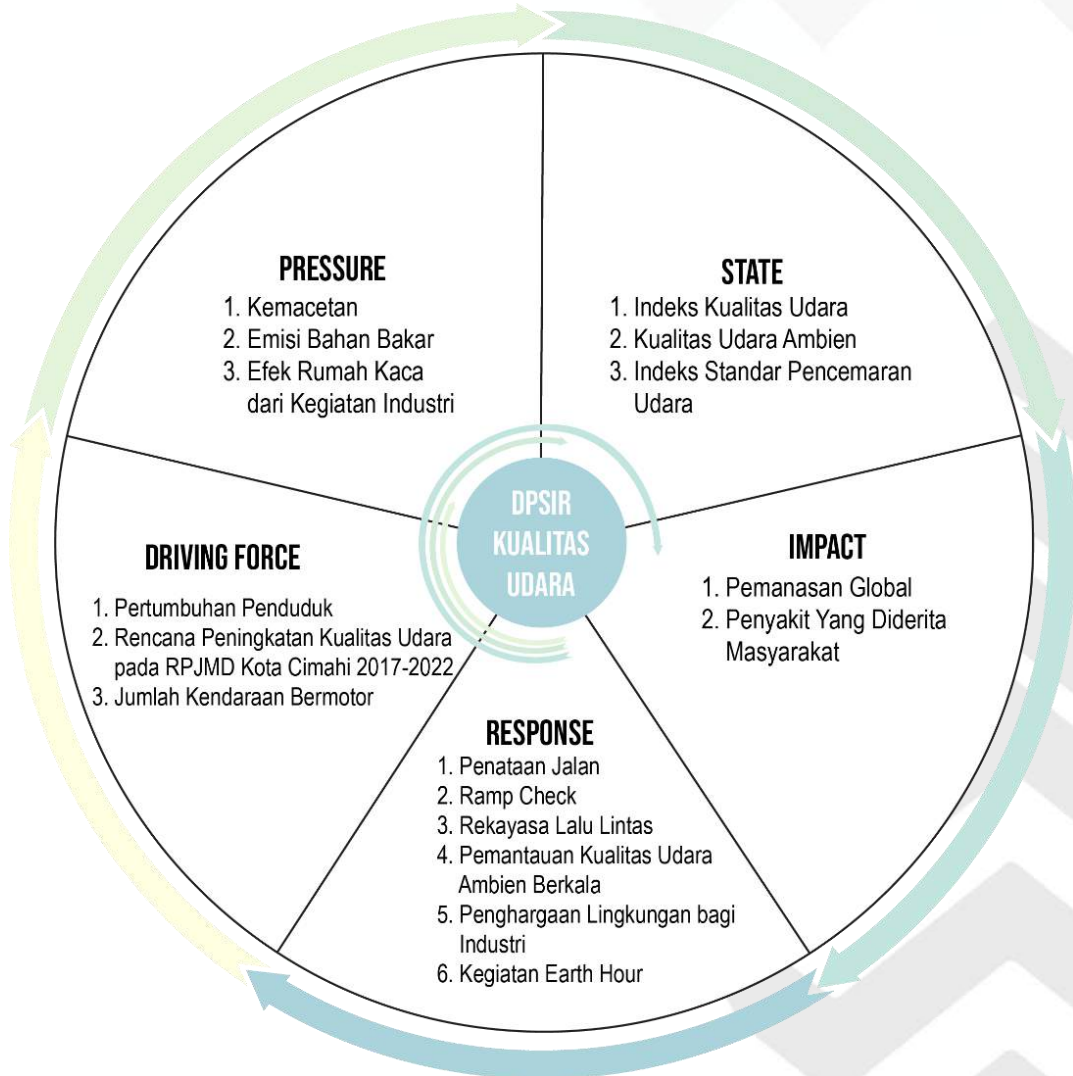


Gambar 3.5 DPSIR Kualitas dan Kuantitas Air
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

c. Kualitas Udara

Analisis isu lingkungan ketiga yaitu kualitas udara, didasari oleh data utama yang terdiri dari data kependudukan, jumlah kendaraan bermotor beserta jenis bahan bakarnya, dan kualitas udara ambien. Sedangkan info lainnya terkait kualitas udara dalam analisis ini merupakan hasil pengolahan data utama, seperti emisi bahan bakar, Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks

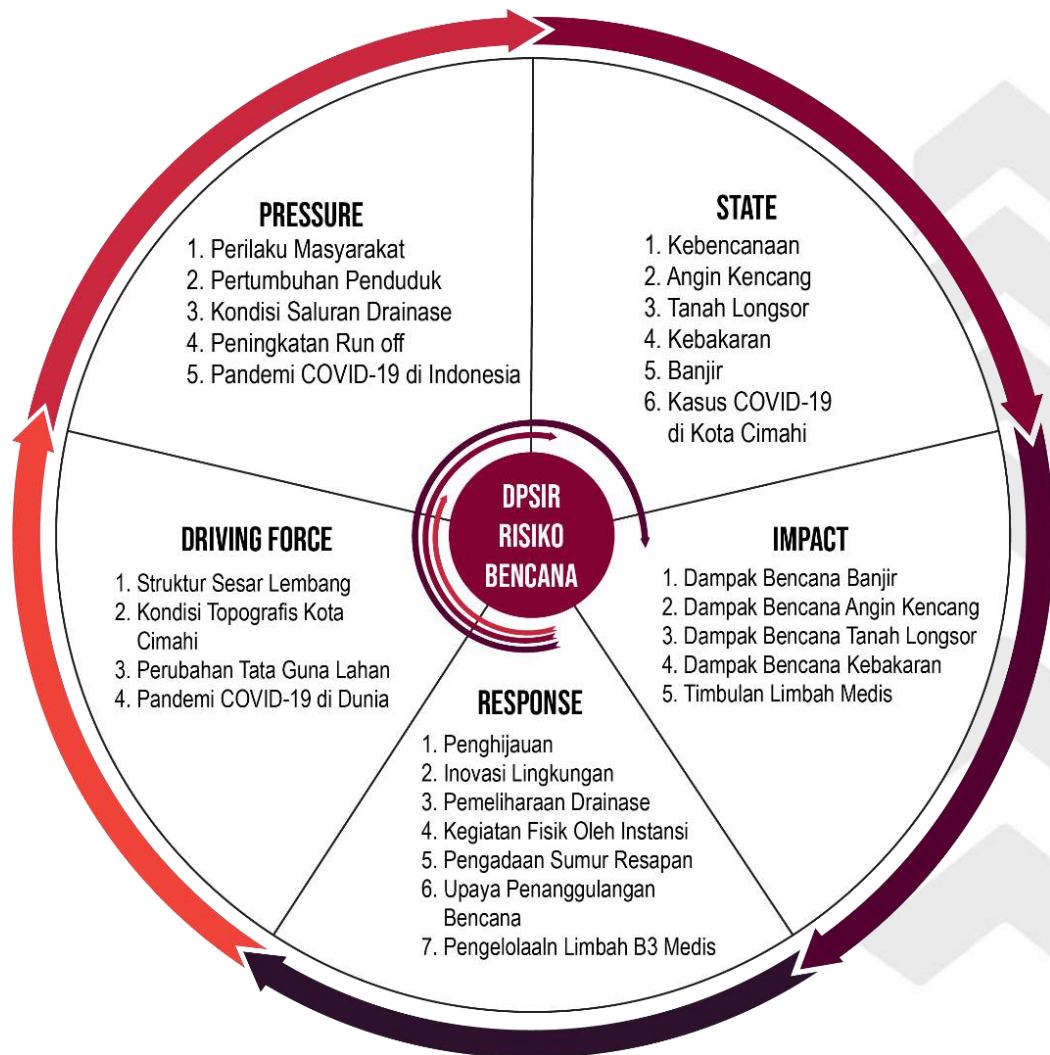
Standar Pencemaran Udara (ISPU), dan efek rumah kaca. Berikut Gambar 3.6 yang menunjukkan rangkuman dari hasil analisis DPSIR isu kualitas udara di Kota Cimahi.



Gambar 3.6 DPSIR Kualitas Udara
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

d. Risiko Bencana

Melalui analisis DPSIR, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki risiko untuk terjadinya bencana. Bencana tersebut terdiri dari banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Data yang meliputi kejadian bencana pada tahun 2020 tercantum pada lampiran Tabel 44. Informasi yang tercantum dalam tabel tersebut meliputi waktu kejadian, lokasi kejadian, dampak yang ditimbulkan, hingga penanggulangan saat bencana terjadi.

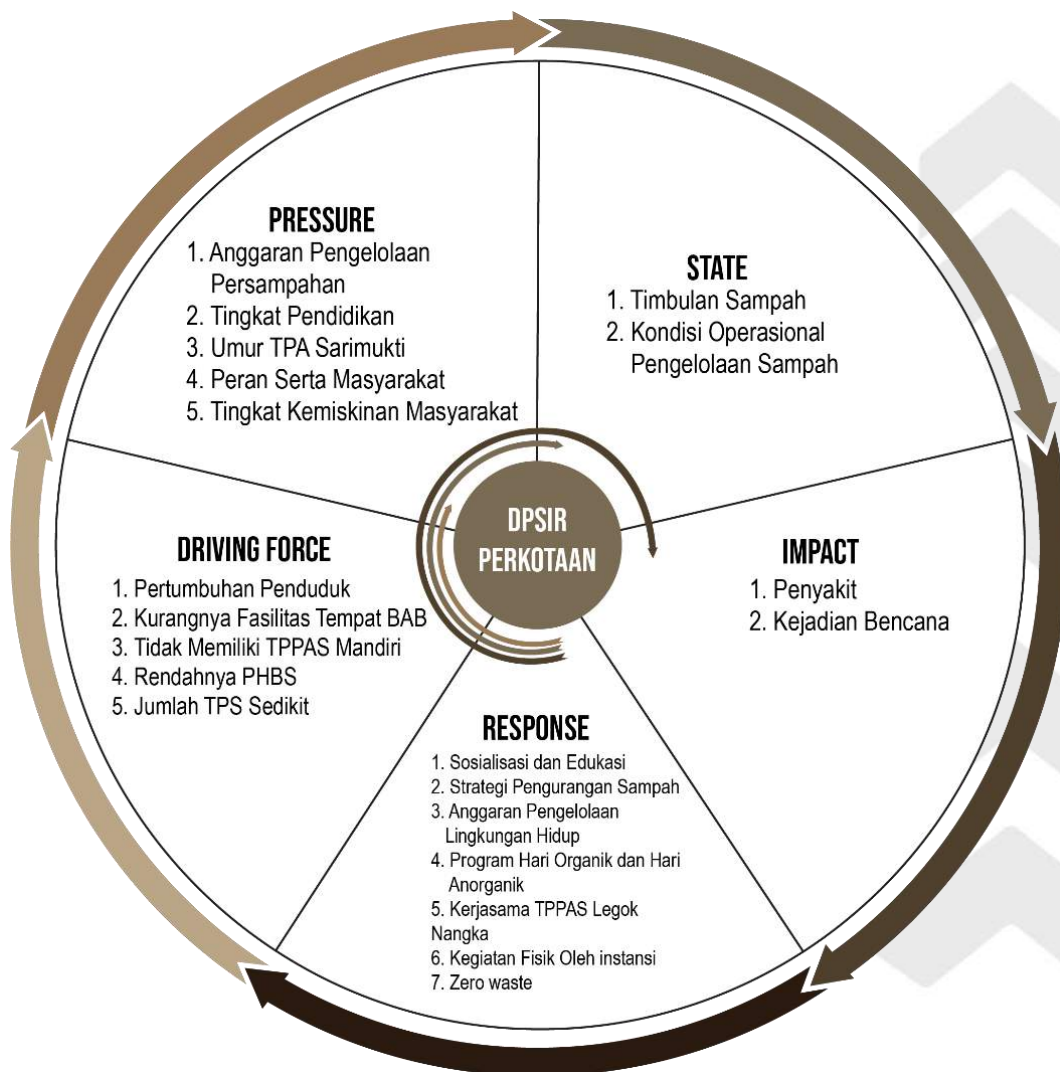


Gambar 3.7 DPSIR Risiko Bencana

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

e. Perkotaan

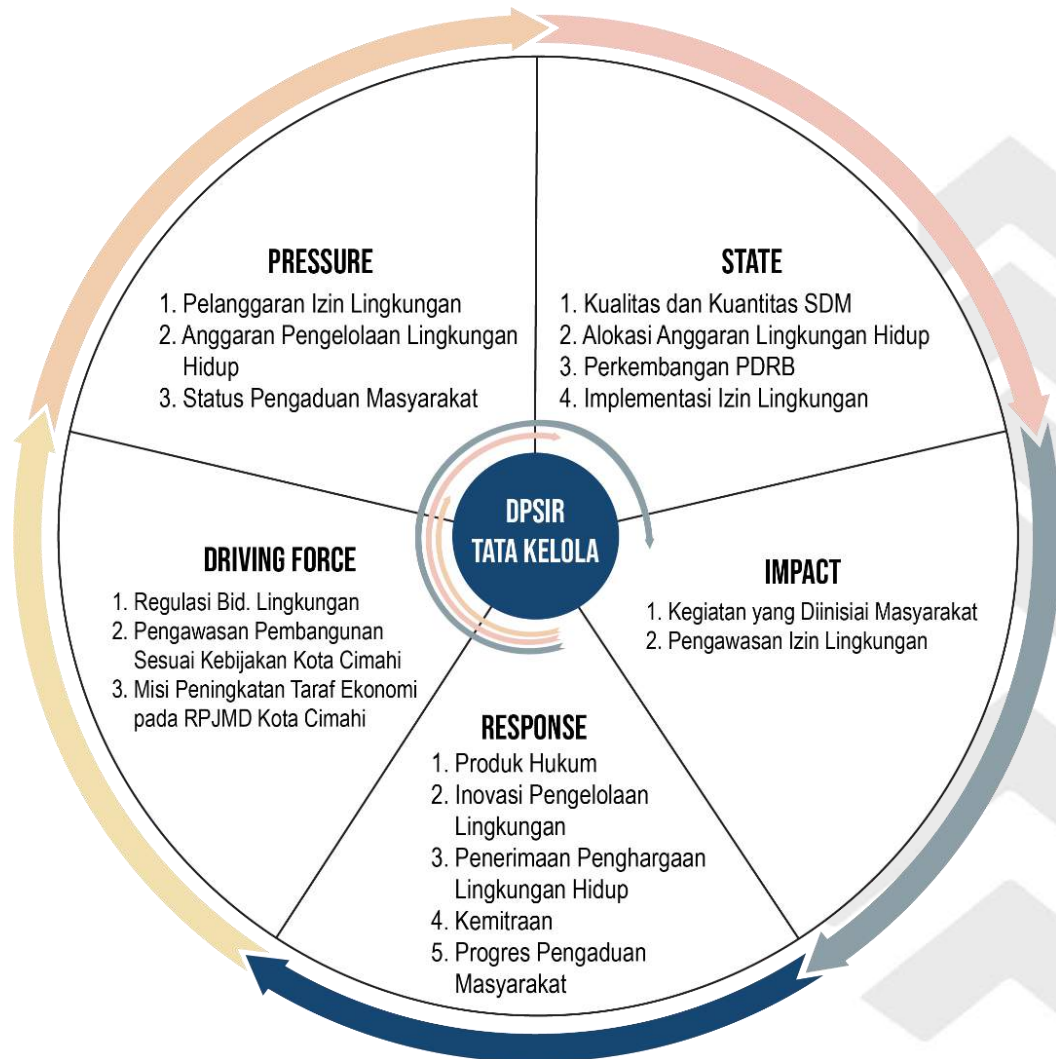
Isu persampahan kota yang dicakup dalam analisis DPSIR ini secara umum mencakup pengelolaan eksisting persampahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Adapun data pendukung yang digunakan yaitu data timbulan sampah, data bank sampah, anggaran yang digunakan, upaya/inovasi pemerintahdan, serta data lainnya (Tabel 31, 35, dan Tabel 46 s/d Tabel 48).



Gambar 3.8 DPSIR Perkotaan
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

f. Tata Kelola

Sedikit berbeda dengan analisis isu-isu lingkungan sebelumnya, isu terakhir yang merupakan tata kelola ini membahas isu dalam pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan yang mencakup keuangan, kelembagaan, perizinan, dan sebagainya. Berikut ringkasan dari analisis tata kelola Kota Cimahi dengan metode DPSIR (Gambar 3.9).



Gambar 3.9 DPSIR Tata Kelola
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Tabel 3.2 Longlist Analisis DPSIR

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Tata Guna Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Arahan Pemanfaatan Ruang pada RTRW Kota Cimahi Perda Kawasan Bandung Utara Pertumbuhan Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Lahan Permukiman Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional Pelanggaran Izin Lingkungan Peningkatan Timbulan Limbah Daya Dukung Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan Lahan Kota Cimahi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kondisi Kepadatan Penduduk Kualitas Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan Iklim Degradasi Lahan Penurunan Muka Air Tanah Kekurangan Air Bersih Kejadian Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Vertikultur Pengawasan Izin Lingkungan Pengembangan Hunian Vertikal Penghijauan dan Penguoptimalan RTH Pengembangan Ekowisata dan Jasa Alam Penetapan Status Kerusakan Tanah Diversifikasi Pangan di Masa Pandemi
Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas Domestik Pertumbuhan Penduduk Program Nasional Citarum Harum Kontribusi Volume Limbah 	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya Lahan Terbangun Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri Beban Pencemar Sungai 	<ol style="list-style-type: none"> Status Mutu Air Kualitas Air Sungai Indeks Kualitas Air Kualitas Air Sumur 	<ol style="list-style-type: none"> Kekurangan Air Waterborne Disease Penurunan Kandungan DO Penurunan Muka Air Tanah 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Mengelola Limbah Evaluasi dan Monitoring Penambahan Cadangan Air Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Program Penurunan Beban Pencemar Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala
Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan penduduk Jumlah Kendaraan Bermotor Rencana Peningkatan Kualitas Udara pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 	<ol style="list-style-type: none"> Emisi Bahan Bakar Kemacetan Efek Rumah Kaca dari Kegiatan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara Kualitas Udara Ambien Indeks Standar Pencemaran Udara 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanasan Global Penyakit yang Diderita Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Penataan Jalan Rekayasa Lalu Lintas Ramp Check Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala Penghargaan Lingkungan bagi Industri Kegiatan Earth Hour
Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> Struktur Sesar Lembang Kondisi Topografis Kota Cimahi Perubahan Tata Guna Lahan Pandemi COVID-19 di Dunia 	<ol style="list-style-type: none"> Perilaku Masyarakat Pertumbuhan Penduduk Kondisi Saluran Drainase Peningkatan Run Off Pandemi COVID-19 di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Kebencanaan Angin Kencang Tanah Longsor Kebakaran Banjir Kasus COVID-19 di Kota Cimahi 	<ol style="list-style-type: none"> Dampak Bencana Banjir Dampak Bencana Angin Kencang Dampak Bencana Tanah Longsor Dampak Bencana Kebakaran Timbulan Limbah Medis 	<ol style="list-style-type: none"> Penghijauan Inovasi Lingkungan Pemeliharaan Drainase Kegiatan Fisik Oleh Instansi Pengadaan Sumur Resapan Upaya Penanggulangan Bencana Pengelolaan Limbah B3 Medis
Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Penduduk Kurangnya Fasilitas Tempat BAB Tidak Memiliki TPPAS Mandiri Rendahnya PHBS Jumlah TPS Sedikit 	<ol style="list-style-type: none"> Anggaran Pengelolaan Persampahan Tingkat Pendidikan Umur TPA Sarimukti Peran Serta Masyarakat Tingkat Kemiskinan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Timbulan Sampah Kondisi Operasional Pengelolaan Sampah 	<ol style="list-style-type: none"> Penyakit Kejadian Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Edukasi Strategi Pengurangan Sampah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Program HO HA Kerjasama TPPAS Regional Legok Nangka Kegiatan Fisik Oleh Instansi Zero Waste
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi Bidang Lingkungan Pengawasan Pembangunan Sesuai Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Misi Peningkatan Taraf Ekonomi pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 	<ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Izin Lingkungan Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Status Pengaduan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan Kuantitas SDM Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Perkembangan PDRB Implementasi Izin Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat Pengawasan Izin Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Produk Hukum Inovasi Pengelolaan Lingkungan Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup Kemitraan Progres Pengaduan Masyarakat

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.4 Penetapan Isu Potensial

Sebelum penetapan isu prioritas, hasil analisis DPSIR diurai menjadi daftar *longlist* isu lingkungan yang dinamakan sebagai isu potensial. Penetapan isu potensial ini juga didasari atas studi literatur yang dilakukan selama analisis. Selain itu, isu potensial ini juga mengacu pada Panduan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup (10 pilihan isu potensial) dan Kehutanan serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu isu potensial termasuk ke dalam isu utama dalam analisis. Penetapan isu potensial ini juga didapat dari hasil penyimpulan, baik secara tersurat maupun tersirat dari analisis DPSIR (Tabel 3.2). Adapun uraian daftar isu yang perlu dipertimbangkan sebelum penentuan isu prioritas, yaitu:

Tabel 3.3 Pengkategorian Isu

No.	Isu Lingkungan Utama	Isu Potensial (<i>Longlist</i>)
1.	Tata Guna Lahan	a. Penggunaan Lahan
		b. Kualitas Air Sungai dan Air Tanah
2.	Kualitas dan Kuantitas Air	c. Kuantitas Air
		d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		e. Kualitas Udara
3.	Kualitas Udara	f. Perubahan Iklim
		g. Kemacetan
4.	Risiko Bencana	h. Bencana Alam
5.	Tata Kelola	i. Tata Kelola
		j. Persampahan
6.	Perkotaan	k. Sanitasi dan Higiene Perseorangan

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.5 Kriteria Penetapan

Penetapan kriteria dilakukan sesuai dengan pedoman Nirwasita Tantra, UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga didapatkan kriteria sebagai berikut :

1. *Kerusakan sumber daya alam*, yakni seberapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan dengan adanya isu lingkungan tersebut.
2. *Dampak signifikan*, kriteria ini membantu penetapan isu lingkungan potensial dengan menganalisis isu lingkungan yang memberikan dampak signifikan (penting) terhadap berbagai aspek lain, kriteria dampak signifikan juga dapat dilihat dari perkembangan tren isu lingkungan.
3. *Perhatian publik*, isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian publik dan mendapatkan sorotan tajam dalam berbagai diskusi ilmiah, forum masyarakat, serta media massa menjadi salah satu parameter untuk ditetapkan sebagai isu lingkungan potensial.
4. *Kinerja jasa ekosistem*, yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
 - Layanan fungsional (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumberdaya genetica, makanan, air dll.
 - Layanan regulasi (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim.
 - Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
 - Layanan pendukung kehidupan (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air dan lainnya.

5. *Pemanfaatan sumber daya alam*, yang berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 12 menjelaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Namun, apabila RPPLH sebagaimana dimaksud belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat
6. *Ancaman keanekaragaman hayati*, kondisi lingkungan yang diukur menggunakan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.
7. *Dampak dan resiko lingkungan*, yaitu dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; dapat diukur berdasarkan beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
 - Perubahan iklim;
 - Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 - Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia
8. *Perubahan iklim*, seperti dijelaskan pada UU No.32 Tahun 2009 pasal 1 bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan

langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Kerentanan terhadap perubahan iklim adalah kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.

9. *Daya dukung lingkungan*, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (UU.No.32 Tahun 2009). Daya dukung lingkungan juga merupakan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu; Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
10. *KLHS RTRW*, merupakan salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mana setiap daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU.No.32 Tahun 2009).
11. *KLHS RPJMD*, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia terdiri dari 319 indikator yang mengacu indikator yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Aspek pembangunan berkelanjutan ini terdiri dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD. Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Cimahi.

Pilar-pilar lingkungan yang tercantum dalam SDGs di antaranya air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Pemerintah daerah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memegang tanggung jawab sebesar 10 indikator TPB. Indikator tersebut umumnya adalah bagian dari pilar-pilar lingkungan. Isu-isu strategis yang tertuang dalam KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2030, penerapan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu pada semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk kedalam penanganan sampah kota.
- Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, seiring dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

12. *RPPLH Kota Cimahi*, yaitu Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH Kota Cimahi bertujuan dalam memberikan indikasi arahan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

Kota Cimahi yang didasarkan pada tantangan utama dan isu strategis lingkungan hidup di setiap ekoregion di wilayah Kota Cimahi. Indikasi arahan kebijakan tersebut meliputi indikasi arahan bagi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seluruh indikasi arahan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus pengendali pembangunan wilayah dan sektor di Kota Cimahi.

Berdasarkan dokumen RPPLH, rumusan tantangan utama dan isu strategis di Kota Cimahi sebagai berikut:

- Kualitas air sungai di Kota Cimahi sudah tercemar berat. Terkait kualitas air sungai, khususnya parameter kunci BOD, COD, dan TSS dengan potensi beban pencemar paling besar di ekoregion dataran vulkanik. Tingginya parameter-parameter kunci ini disebabkan oleh aktivitas domestik dan juga pertanian. Tantangan dan isu strategis untuk kualitas air sungai adalah mengembalikan fungsi sungai untuk dapat digunakan kembali sebagaimana fungsi ekosistemnya.
- Status kualitas air sumur di ekoregion Kota Cimahi tidak layak dijadikan sebagai sumber air minum. Tantangan dan isu strategis terkait kualitas air sumur adalah investigasi penyebab kualitas air sumur yang tidak memenuhi baku mutu, diantaranya investigasi terhadap hubungan antara kualitas air sumur dengan air sungai, sanitasi warga dan aktivitas pertanian.
- Kondisi kualitas udara pada setiap parameter di Kota Cimahi masih tergolong baik, terkecuali parameter CO. Terkait kualitas udara dengan beban emisi pencemar CO₂ yang tinggi pada kawasan ekoregion Dataran Vulkanik. Sedangkan untuk emisi udara lainnya:

HC, CO, SO₂, NO_x, PM₁₀ juga tinggi di kawasan ekoregion Dataran Vulkanik, dan rendah di kawasan ekoregion Perbukitan Vulkanik dan Perbukitan Struktural.

- Persebaran RTH di Kota Cimahi dipengaruhi oleh jasa pendukung keanekaragaman hayati dan jasa pengaturan iklim. Jasa pengaturan iklim sedang (nilai IJE 0,3 -0,6) dan tinggi (nilai IJE 0,6 – 1,0) berpotensi sebagai RTH.

3.6 Analisis Isu Prioritas

Terdapat 11 kriteria yang sudah ditetapkan untuk menentukan isu prioritas lingkungan di Kota Cimahi. Penetapan isu prioritas dipilih dengan menggunakan metode *scoring* yang ditentukan berdasarkan 12 kriteria yang ditetapkan. Metode *scoring* ditentukan dengan memberikan nilai 1-5 pada setiap isu lingkungan potensial. Penilaian/skor berdasarkan 12 kriteria tersebut, dengan bobot nilai 1-5 dimana 5 = sangat prioritas, 4 = prioritas, 3 = cukup prioritas, 2 = kurang prioritas, dan 1 = tidak prioritas. Hasil analisis skor isu prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. Penetapan isu prioritas secara keseluruhan dilakukan berdasarkan analisis dan berdasarkan verifikasi serta klarifikasi dengan *stakeholders* terkait melalui *forum Group Discussion* (FGD). Berdasarkan Tabel 3.4, terdapat 6 isu yang bernilai paling tinggi sehingga perlu dijadikan prioritas. Karena dalam pedoman Nirwasita Tantra, isu priortas dipilih 3 hingga 5 dari total *shortlist* isu potensial. Dalam hal ini, kualitas air dan kuantitas air dapat dilebur menjadi satu kesatuan isu yang sama. Sehingga isu prioritas yang didapat dari hasil analisis *scoring* ini yaitu:

1. Kualitas air sungai dan air tanah
2. Kuantitas air
3. Persampahan
4. Penggunaan lahan
5. Bencana alam

Tabel 3.4 Scoring Isu Prioritas

No.	Isu lingkungan potensial	Kriteria												Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kualitas air sungai dan air tanah	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	57
2	Kuantitas air	4	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	53
3	Kualitas udara	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	44
4	Persampahan	5	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	53
5	Penggunaan lahan	5	4	4	3	5	3	4	5	4	5	4	5	51
6	Sanitasi masyarakat dan higiene perseorangan	4	5	5	3	5	3	4	2	3	3	3	3	43
7	Limbah B3	4	5	5	4	3	3	5	4	3	4	4	4	48
8	Bencana alam	5	4	4	3	5	5	5	3	4	4	4	4	50
9	Perubahan iklim	3	3	2	3	3	4	4	5	3	4	4	4	42
10	Tata kelola	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	32
11	Kemacetan	2	2	4	3	2	2	3	4	2	4	3	2	31

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Keterangan kriteria:

1 : Kerusakan SDA	5 : Pemanfaatan SDA	9 : Daya dukung lingkungan
2 : Dampak signifikan	6 : Ancaman keanekaragaman hayati	10 : KLHS RTRW
3 : Perhatian publik	7 : Dampak dan risiko lingkungan	11 : KLHS RPJMD
4 : Kinerja jasa ekosistem	8 : Perubahan iklim	12 : RPPLH Kota Cimahi

3.7 Verifikasi dan Klarifikasi

Isu lingkungan prioritas yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya ditegaskan melalui tahap ini yaitu verifikasi dan klarifikasi. Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan terhadap *stakeholders* yang ada di Kota Cimahi, *stakeholders* yang dimaksud mencakup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Cimahi, pemangku kepentingan (akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan filantropi) serta narasumber penyusun DIKPLHD sebagaimana yang terlampir dalam daftar absensi kegiatan. Metode verifikasi dan klarifikasi yang digunakan adalah *Focus*

Group Discussion (FGD), seperti tahun sebelumnya FGD dilaksanakan secara *online* melalui *video conferences* dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir selama proses penyusunan dokumen ini. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk membuka kemungkinan para *stakeholders* untuk berpendapat mengenai isu lingkungan yang terjadi sesuai sudut pandangnya. Diharapkan FGD ini dapat meyakinkan tim penyusun dalam menetapkan isu-isu lingkungan prioritas.

Kegiatan *Focus Group Discussion* dilaksanakan pada 9 Juli 2021 diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Ibu Lilik Setyaningsih, SH. dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Cimahi Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana sekaligus pembuka secara resmi pelaksanaan *Focus Group Discussion*. Kemudian dilanjutkan dengan paparan awal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai pedoman Nirwasita Tantra, paparan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengenai Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah. Berikutnya penyampaian materi hasil analisis DPSIR terhadap 6 isu lingkungan utama oleh Tim Penyusun DIKPLHD Kota Cimahi

3.8 Penetapan Isu Prioritas

Materi telah disampaikan dilanjutkan dengan sesi diskusi, penyampaian pendapat, serta pengisian *ranking* isu prioritas oleh *stakeholders* terkait. Penetapan isu lingkungan prioritas dilakukan dengan pengisian form *online* yang sudah disiapkan setelah pemaparan oleh Tim Penyusun DIKPLHD Kota Cimahi. Sistem *ranking* disesuaikan dengan jumlah isu lingkungan potensial yang telah disebutkan (11 isu lingkungan potensial), semakin kecil *ranking* yang diberikan maka semakin penting isu tersebut. Hasil *ranking* isu prioritas di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Hasil *Scoring* Isu Prioritas pada FGD Kota Cimahi

Ranking	Isu lingkungan potensial	Total Skor
1	Kualitas air sungai dan air tanah	72
2	Kuantitas air	77
3	Persampahan	98
4	Kualitas udara	116
5	Penggunaan lahan	125
6	Sanitasi masyarakat dan higiene perseorangan	134
7	Tata kelola	139
8	Bencana alam	180
9	Perubahan iklim	186
10	Limbah B3	189
11	Kemacetan	202

(Sumber: Hasil FGD, 2021)

Berdasarkan hasil pengisian *ranking*, didapatkan bahwa ada penggabungan isu kualitas air dengan kuantitas air. Berikut empat isu prioritas di Kota Cimahi yang terpilih berdasarkan hasil FGD:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Persampahan
3. Kualitas Udara
4. Tata Guna Lahan (Penggunaan lahan)



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BAB IV **INOVASI DAERAH**

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021

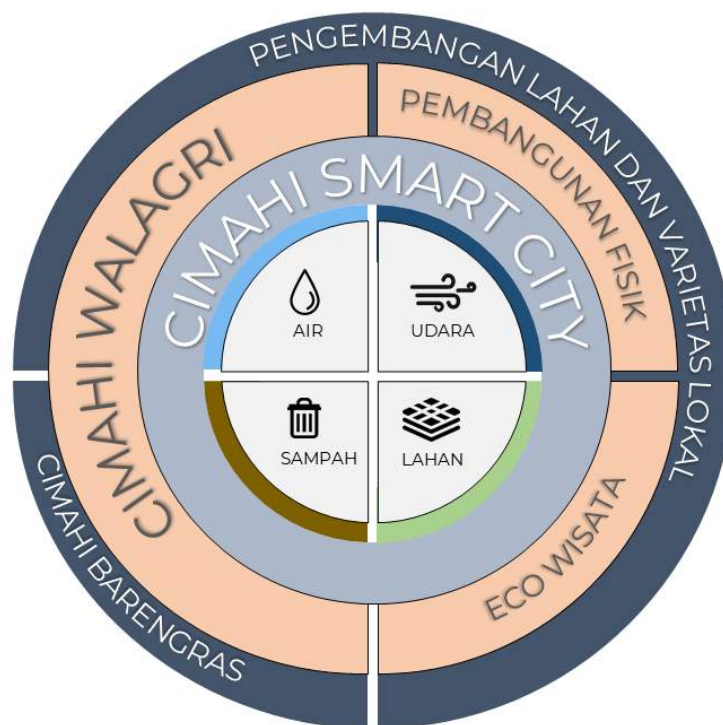


BAB IV INOVASI DAERAH

Dalam penyusunan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah, fokus inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan prioritas yang telah dibahas dan disepakati pada Fokus Grup Diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan, dimana isu lingkungan prioritas yang disepakati adalah :

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Persampahan
3. Kualitas Udara
4. Tata Guna Lahan

Adapun pemetaan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2020 dipetakan terhadap isu prioritas lingkungan hidup di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Inovasi Prioritas Kota Cimahi

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia, dimana dibutuhkan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi dan memulihkan dampaknya, baik dalam sektor kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya yang terdampak, berakibat pada tertundanya beberapa rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 juga telah membuat Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan inovasi untuk penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

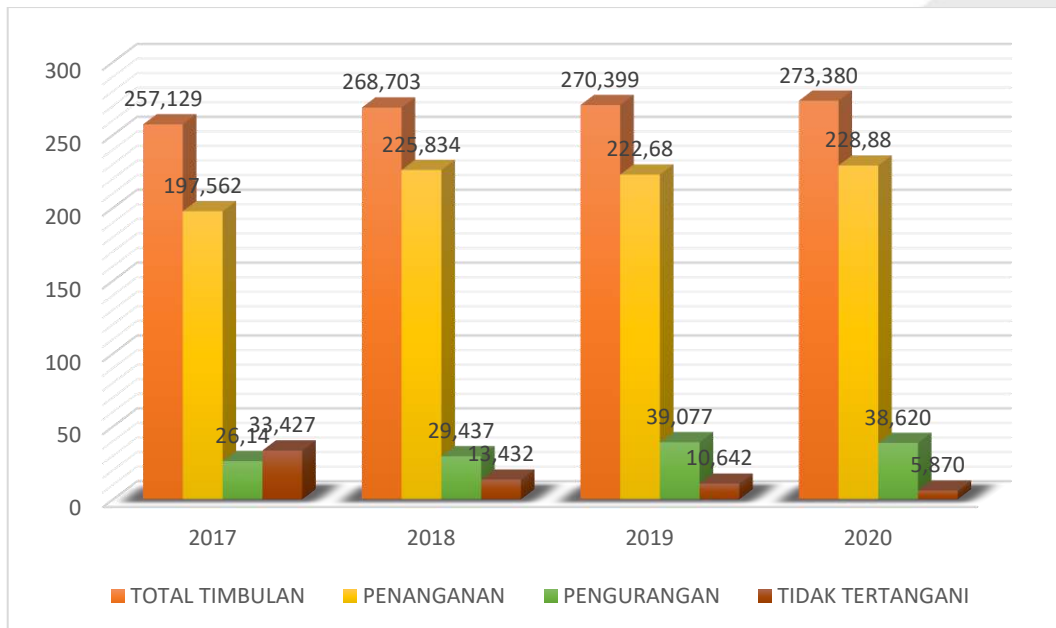
4.1 Cimahi Barengras

Latar belakang inovasi ini adalah masih banyaknya sampah yang dalam kondisi masih tercampur dan langsung dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) atau kontainer sampah sedangkan potensi sampah organik sangat besar untuk dapat diolah menjadi hasil organik yang bermanfaat seperti kompos, pakan ternak dan bahan bakar biogas. Berdasarkan data neraca pengelolaan sampah dalam ton per hari, total timbulan sampah di Kota Cimahi semakin meningkat. Sampah yang tidak terkelola pada tahun 2020 berkurang menjadi 4,772 ton/hari, angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sampah yang tidak terkelola mencapai 10,642 ton/hari.

Berdasarkan data neraca pengelolaan sampah, sampah yang dikelola sebesar 97,61%, dengan persentase pengurangan sampah sebesar 13,19%. Selisih antara capaian pengurangan sampah dengan target pengurangan sampah yang harus dicapai sebesar 30% membuat Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya menyatukan langkah pengelolaan sampah dengan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah skala kawasan dengan penekanan pada pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah. Dengan cara ini diharapkan volume timbulan sampah yang diangkut ke TPA semakin berkurang dari tahun ke tahun sehingga tidak membebani APBD Kota Cimahi.

Cimahi Zero Waste City merupakan gerakan pengurangan sampah yang telah dicanangkan di Kota Cimahi sejak tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi pemilahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah terpilah yang dilakukan di permukiman warga, sekolah, maupun instansi pemerintah. Semenjak diluncurkan pada tahun 2017, dukungan pengurangan sampah di Kota Cimahi secara intensif terus dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi yang berkelanjutan, dengan didukung pula melalui penerapan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Adapun progress penanganan dan pengurangan sampah di Kota Cimahi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Neraca Pengelolaan Sampah dalam Ton per Hari Tahun 2017-2020

4.1.1 Sayembara Logo Cimahi Zero Waste

Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mengadakan kompetisi sayembara logo dan video kreatif (*video awareness*) yang bertemakan *Zero Waste City*. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 28 Februari 2020 dan berlangsung sampai dengan 23 Maret 2020. Dari tiga belas peserta yang mengikuti sayembara logo *Cimahi Zero Waste*, terdapat delapan peserta yang terpilih sebagai nominasi yang kemudian dipilih untuk menjadi pemenang, yang selanjutnya logo terpilih tersebut akan digunakan sebagai icon untuk *Cimahi Zero Waste*. Setelah dilakukan seleksi terhadap delapan nominasi, terpilih logo "Cimahi Barengras" sebagai logo yang digunakan sebagai logo resmi gerakan *Cimahi Zero Waste*. Logo ini akan dipakai di setiap sarana pengelolaan sampah yang kita punya dan menjadi sarana sosialisasi kepada seluruh warga Kota Cimahi untuk bergerak bersama dalam upaya mengurangi sampah. Logo Cimahi Barengras cukup menarik dan familiar karena kata barengras sendiri merupakan serapan dari Bahasa sunda diharapkan dapat menjadi ajakan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam meningkatkan *awareness* terhadap pengelolaan sampah. Adapun bentuk dan makna logo Cimahi Barengras dapat dilihat pada Gambar 4.3



- Logo membentuk huruf "C & B" yaitu inisial untuk **Cimahi Barengras**.
- Logo **Cimahi Barengras** sendiri terinspirasi dari lambang Reduce-Reuse-Recycle yang tanda panahnya dimodifikasi menjadi bentuk tangkai dan daun, hal ini bermakna kepedulian terhadap alam / lingkungan hidup.
- Reduce-Reuse-Recycle merupakan salah satu kegiatan yang disosialisasikan Pemkot Cimahi kepada masyarakat Kota Cimahi agar tercipta paradigma / budaya penanganan sampah yang baik, yaitu mengurangi sampah yang dihasilkan (reduce), memilih atau menggunakan barang yang bisa dipakai berkali-kali (reuse) dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan (recycle), guna mewujudkan program Cimahi Zero Waste.
- Elemen matahari pada logo bermakna suasana yang terang, bersih, dan sehat sekaligus mempertegas arti dari kata "Barengras" itu sendiri.

Cimahi Barengras

Bareng-bareng Kurangi Sampah

- **Barengras** adalah akronim dari "**Bareng-bareng Kurangi Sampah**" Hal ini adalah ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama peduli dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya.
- **Barengras**, merupakan bentuk jamak dari kata **Bengras**. **Bengras** adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berarti terang benderang / Jelas / pemandangan yang jelas & bersih. Sementara bentuk jamaknya (**Barengras**) memiliki arti suasana terang, jelas dan enak dipandang yang **menyeluruh** dalam hal ini berarti kebersihan & kenyamanan kawasan Kota Cimahi.
- Kata **Barengras** familiar di telinga Masyarakat Sunda khususnya Warga Kota Cimahi sehingga diharapkan program-program terkait Zero Waste mampu dengan cepat disosialisasikan & diaplikasikan oleh Warga Kota Cimahi.

Gambar 4. 3 Deskripsi Logo Cimahi Barengras



Gambar 4. 4 *Launching Logo Cimahi Zero Waste*

Launching logo Cimahi Barengras dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 melalui *live* akun media sosial instagram dikarenakan situasi pandemi Covid-19. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian hadiah terhadap pemenang sayembara logo, *video awareness*, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan. Rangkaian sayembara logo dan *video awareness* selengkapnya dapat dilihat melalui akun instagram @cimahi_barengras.

4.1.2 AWAS PANIK

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam bentuk pelayanan barang publik atau jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Pelayanan publik pada pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi diantaranya adalah Awas Panik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi juga telah menetapkan 2 kawasan pengelolaan sampah terpadu yang diberi *tagline* "Awat Panik" (Kawasan Tuntas Pilah Organik). Kawasan tuntas pilah sampah organik atau Awat Panik adalah wilayah yang terintegrasi antara pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah dari warga dengan sistem pengelolaan sampah pada TPS 3R. Kawasan ini bertujuan membentuk sistem yang diimplementasikan dalam rangka mengurangi dan

mengendalikan volume sampah secara terpadu dan terintegrasi mulai dari pemilahan sampah oleh warga, pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas penarik, pengolahan sampah di TPS 3R melalui komposting, maggot BSF, biodigester, dan pemusnahan residu dengan teknologi *incinerator* Stungta skala kawasan, sehingga nihil pembuangan ke TPA.

Kawasan pertama adalah di wilayah sekitar TPS 3R 31 Kelurahan Melong, yang telah mengcover pengelolaan sampah di 7 RW yakni RW 31, 10, 11, 12, 13, 14, dan 17 Kelurahan Melong. Sedangkan kawasan kedua adalah di wilayah sekitar TPS 3R RW 04 Kelurahan Leuwigajah yang telah mengcover pengelolaan sampah di RW 04 dan 05 Kelurahan Leuwigajah.

Latar belakang inovasi ini adalah masih banyaknya sampah yang dalam kondisi masih tercampur dan langsung dibuang ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) atau kontainer sampah sedangkan potensi sampah organik sangat besar untuk dapat diolah menjadi hasil organik yang bermanfaat seperti kompos, pakan ternak dan bahan bakar biogas.

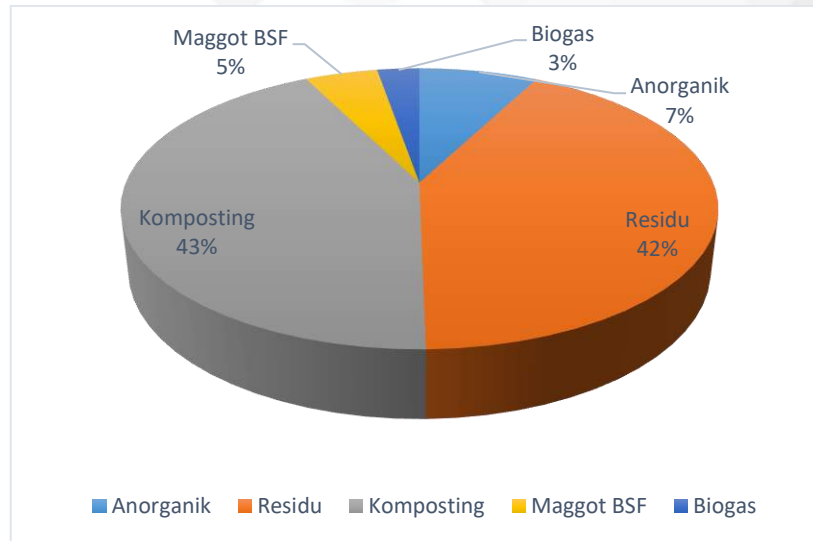
Program ini memiliki kontribusi terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama pada capaian nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan dan nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab karena mengedepankan pengelolaan dan pelayanan persampahan serta pengolahan sampah di suatu wilayah.

Sesudah kegiatan Awas Panik berjalan sampah warga menjadi terpilah. Adanya peran serta masyarakat dalam memilah sampah, petugas penarik terbiasa dengan pemilahan sampah di sumber, sampah organik yang masuk ke TPS3R diolah menjadi kompos, pakan magot, dan bahan baku biogas.



Gambar 4. 5 Business Process AWAS PANIK

Inovasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan berupa manfaat secara finansial yang dihasilkan dari pengelolaan sampah, seperti hasil penjualan maggot, pemanfaatan maggot untuk pakan ternak, pemanfaatan sampah organik untuk ternak, dan pemanfaatan pupuk kompos untuk tanaman serta dapat memberdayakan masyarakat karena apabila telah terbentuk dan telah berjalan maka masyarakat bisa ikut mengelola sampahnya baik sampah organik maupun sampah anorganik, selain itu dapat melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dari Awasi Panik terdapat 71,15% Rumah Tangga yang telah memilah sampahnya dari rumah. Sampah terangkut ke TPA berkurang sebanyak 130,178 ton per tahun.



Gambar 4. 7 Grafik Persentase Pengelolaan Sampah AWAS PANIK



Gambar 4. 6 Kegiatan AWAS PANIK di Kota Cimahi

4.1.3 Stungta

Incinerator Stungta digunakan sebagai alternatif pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang merupakan barang hibah dari Provinsi Jawa Barat untuk pengelolaan sampah. Saat ini operasional Stungta dilakukan satu minggu sekali pada hari Rabu, dan dapat mengolah sampah sekitar 300-500 kg sampah yang

masuk ke TPS 3R Melong. Pengoperasian *incinerator* Stungta dapat dilakukan secara kontinyu, setiap 15 menit sampah residu yang dapat di proses sebanyak 25 kg. Perbandingan sisa hasil pembakaran dari *incinerator* dengan sampah yang diolah adalah 1 : 30. Dari 300 kg sampah residu yang masuk ke *incinerator* menghasilkan 30 kg sisa hasil pembakaran.

Selanjutnya sampah sisa hasil pembakaran *incinerator* yang dihasilkan akan menjadi bahan riset agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan campuran semen yang bermanfaat.

Stungta X Pindad merupakan solusi dalam penanganan masalah sampah dengan menggunakan teknologi *smokeless incinerator*, mesin pembakar sampah yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Kata Stungta diadopsi oleh HEJOTEKNO menjadi akronim dari Sistem Tungku & Treatment Air.

Kelebihan lain dari 'Stungta versi Pindad' diantaranya *flow* negatif chamber berfungsi secara *smokeless* (nir asap), ketika membuka pintu input sampah, sehingga proses kontinuitas input sampah lebih optimal. Stungta *Incinerator* adalah teknologi tepat guna untuk minimasi masalah sampah dengan sistem yang kami kembangkan adalah Sistem Tungku & Treatment Air sehingga sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar. *Incinerator* ini tidak menghasilkan asap dan zat berbahaya lainnya karena sudah melalui pembakaran sempurna (*double burner*), filter, dan treatment asap. Sistem *Continuos* sampah dan pembakaran dapat dilakukan secara terus menerus (*continuous*) yang berbeda dengan *incinerator* lain yang menggunakan sistem buka tutup pintu ruang bakar yang mengharuskan burner dimatikan dan didinginkan ketika akan memasukan sampah baru.

Suhu ruang bakar 800-1200 °C dapat memusnahkan hampir seluruh jenis sampah kering & basah diminimasi menjadi $\pm 5\%$ dari volume awal sampah. Spesifikasi dari Stungta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Spesifikasi Teknis Incenerator Stungta

No	Uraian	Keterangan
1	Bahan bakar	Solar
2	Berat Stungta	3000 kg
3	Pembakaran	Burner 1 dan 2
4	Kapasitas Tungku	1000 kg
5	Suhu	800°C – 1000°C
6	Jenis Sampah	Sampah Domestik dan B3

Di Kota Cimahi, Stungta merupakan barang hibah dari Provinsi Jawa Barat. Digunakannya *incinerator* Stungta dalam mengolah sampah residu di TPS 3R Melong dapat meminimalisir sampah residu yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Jika satuan berat sampah residu semakin sedikit akan memperkecil ritasi pengangkutan sampah residu ke TPA. Selain itu Stungta juga dapat dipergunakan sebagai pengolahan limbah medis dalam penanggulangan Covid-19.



Gambar 4. 8 Operasional Stungta

4.1.4 Pengelolaan Sampah Mandiri

Di Kota Cimahi, RW model yang dapat dijadikan contoh keberhasilan program Cimahi Barengras adalah RW 07 Pasirkaliki. Program *Zero Waste* di RW 07 Kelurahan Pasirkaliki dengan menggunakan metode baru yang disebut Hari Organik dan Hari Anorganik (HOHA). HOHA artinya penjadwalan penarikan sampah organik dan anorganik yang dipisahkan sesuai dengan kesepakatan warga. HOHA ini memudahkan petugas penarik sampah untuk melakukan penarikan sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengolahan di lingkungan RW. Keberhasilan metode HOHA terlihat dari data pengelolaan sampah di RW 7 Pasirkaliki dengan rata-rata timbulan sampah per hari dari pengumpulan data diperoleh sampah residu

yang diangkut ke TPA adalah sekitar 15% dari total timbulan sampah, sisanya sampah organik dapat direduksi di tempat pengolahan sampah kawasan dengan menggunakan metode biodigester dan maggot BSF, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai jual dijual ke Bank Samici dan dijadikan tambahan penghasilan petugas sampah serta menjadi tambahan kas RW.



Gambar 4. 9 Pengelolaan Sampah Mandiri di RW 07 Pasirkaliki

4.1.5 Pengolahan Bio-teknologi Magot *Black Soldier Flies* (BSF) di Kelurahan Padasuka

Piloting pengolahan sampah organik dengan metode *Black Soldier Flies* (BSF) di Kelurahan Padasuka Kota Cimahi. *Best practice* dan menjadikan Cimahi sebagai *locus pilot project* teknologi sederhana dalam penanganan sampah organik di Kelurahan Padasuka Kota Cimahi. Bappeda Kota Cimahi bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Bandung untuk melakukan penelitian & pengembangan produk turunan pengolahan sampah organik menggunakan maggot *Black Soldier Fly* (BSF).

Alasan penggunaan BSF dalam bagian pengelolaan sampah adalah karena larva BSF memiliki selera makan yang sangat rakus dan dapat mengkonsumsi limbah organik lebih banyak. Siklus hidup BSF cepat sehingga *treatment* sampah organik sangat efisien. Larva BSF juga

merupakan sumber protein, residu dari proses larva BSF dapat menghasilkan pupuk organik.



Gambar 4. 10 Magot Black Soldier Flies

Penelitian ini saling terkait dan menunjang inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam pemanfaatan maggot BSF dalam pengolahan sampah organik yaitu inovasi Awasi Panik.

4.2 Cimahi Smart City

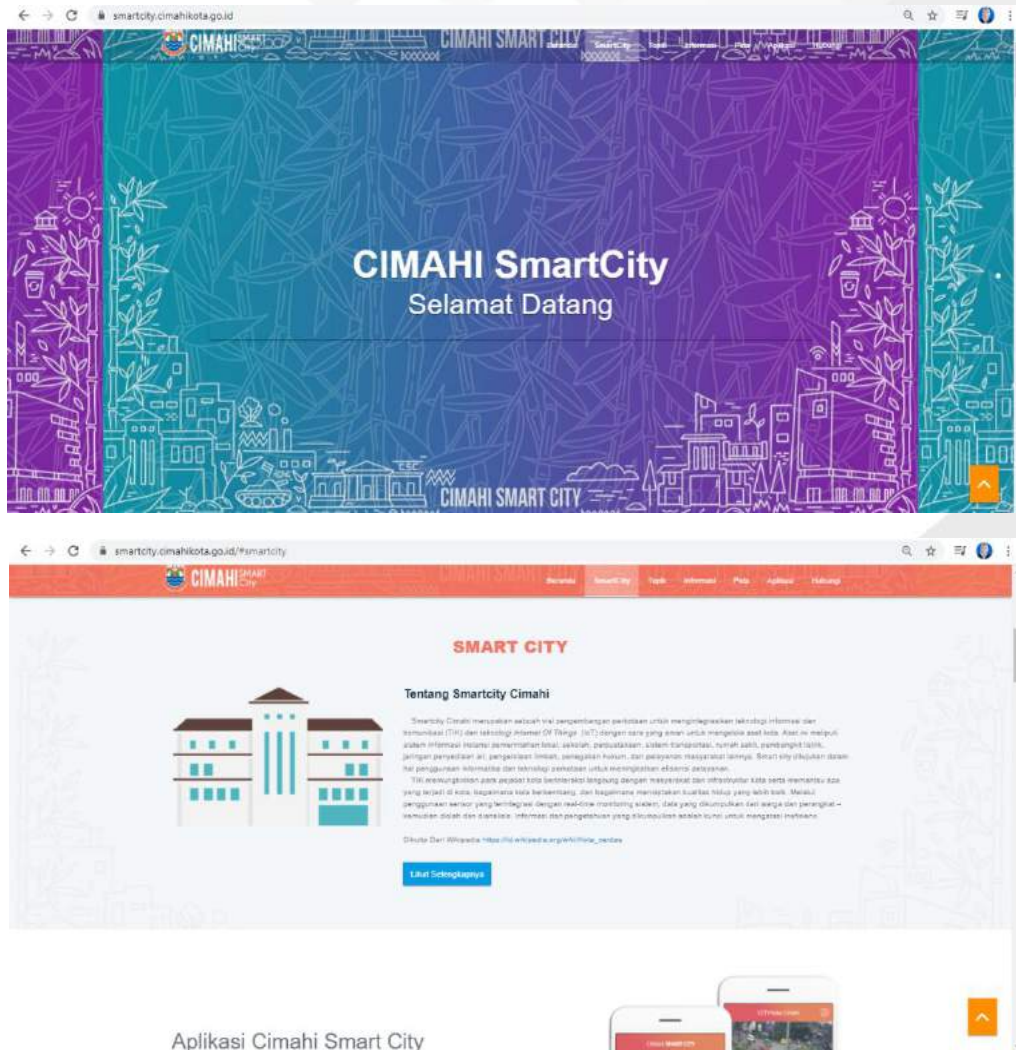
Cimahi adalah kota yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya penduduk di Kota Cimahi akan berpengaruh kepada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dalam semua sektor. Baik itu dalam pelayanan administrasi kependudukan, monitoring lingkungan, pelayanan perizinan, lalu lintas maupun masalah sosial lainnya. Maka dari itu, diperlukan solusi yang cerdas, kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Di era revolusi industri yang sangat memanfaatkan teknologi, Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kinerja pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Arsip dan Perpustakaan menerapkan aplikasi Cimahi *Smart City* yang

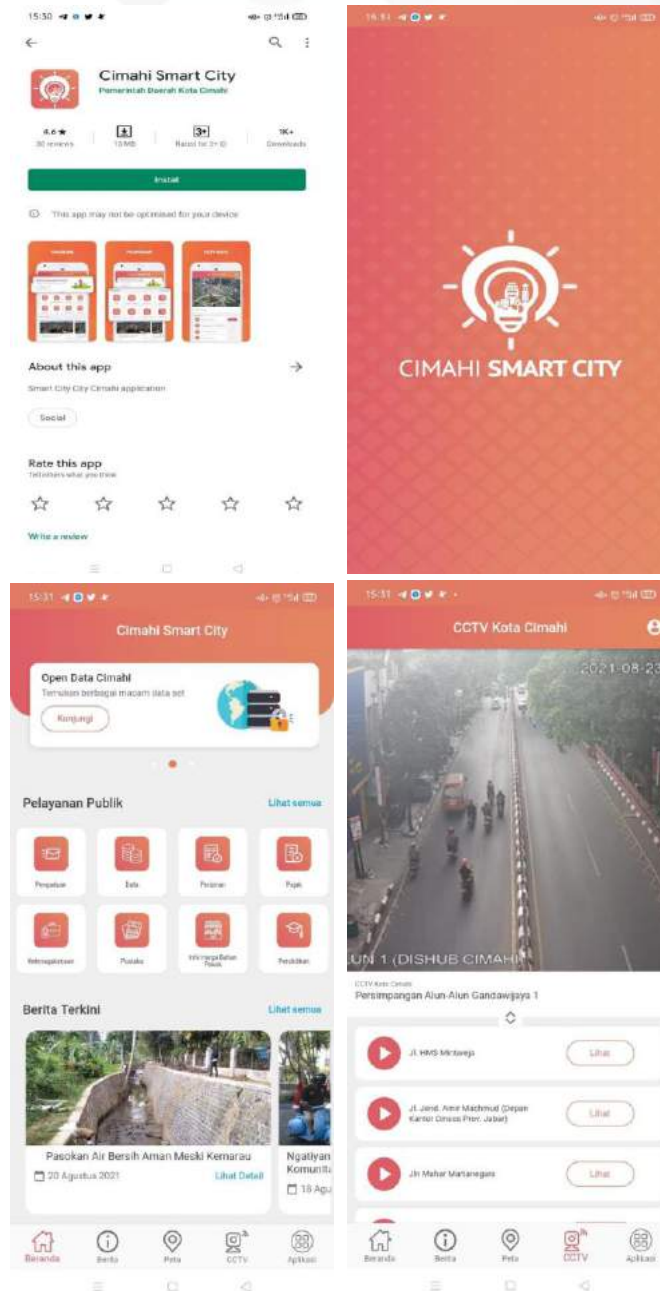
didalamnya memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi lalu lintas maupun informasi pelayanan publik yang ada di Kota Cimahi.

Smart City adalah program - program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan Menuju 100 *Smart City* merupakan sebuah inisiatif untuk membimbing kota/kabupaten dalam menyusun rencana induk (masterplan) *Smart City*. Pemerintah Daerah Kota Cimahi terpilih menjadi salah satu dari 50 Kota/Kabupaten di Indonesia yang dinyatakan Lulus *Assessment* Gerakan Menuju 100 *Smart City* tahap kedua tahun 2018, sebelumnya pada tahun 2017 telah terpilih 25 kab/kota Melalui proses seleksi *assessment*. Kota Cimahi sendiri dikenal sebagai salah satu kota yang giat mewujudkan *Smart City*.

Smart City Cimahi merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi *Internet of Things* (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. *Smart city* ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Informasi seputar Cimahi *Smart City* dapat diakses melalui laman <https://smartcity.cimahikota.go.id> atau melalui aplikasi Cimahi *Smart City* yang telah diluncurkan dan dapat diunduh di Google Play Store.



Gambar 4. 11 Tampilan Website Cimahi Smart City



Gambar 4. 12 Tampilan Aplikasi Cimahi Smart City versi Android

4.2.1 Smart Environment

4.2.1.1 Patali

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pelaporan monitoring lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup.

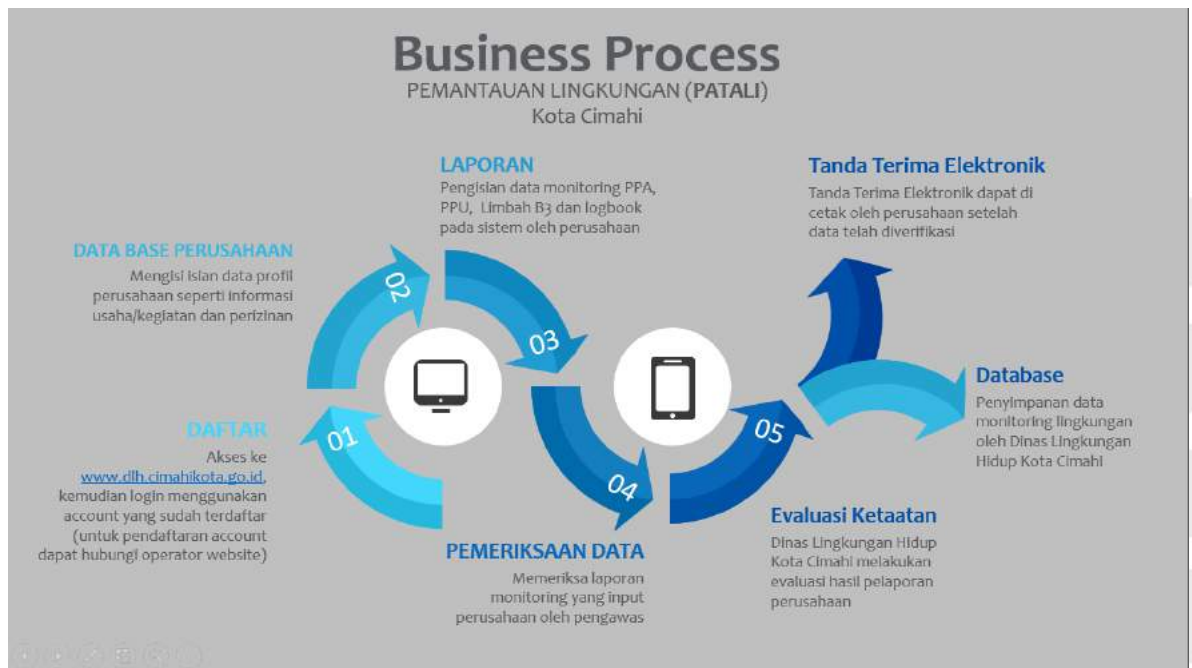
Banyaknya database izin yang dimiliki pelaku usaha/kegiatan yang tidak tersusun dengan baik menjadi hambatan untuk instansi pengawas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam melakukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha atau kegiatan. Adanya sistem informasi lingkungan membantu untuk merekap dan menyusun dokumen dan hasil pemantauan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan ketaatan pelaku usaha. Data yang ada dalam sistem juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan kajian.

Patali atau Pelaporan Persetujuan Lingkungan merupakan sistem yang dibuat untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaporkan monitoring lingkungan. Dengan Patali, perusahaan tidak perlu mengirimkan laporan per triwulan berbentuk hardcopy kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, cukup melaporkan secara online disertai dengan lampiran dokumen pendukung. Selanjutnya pelaku usaha/kegiatan cukup melaporkan Tanda Terima Elektronik (TTE) sebagai bukti bahwa perusahaan telah melaporkan monitoring lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melalui Patali. Sistem ini memfasilitasi pengguna untuk melaporkan data pemantauan kualitas air, kualitas udara baik itu udara ambien maupun udara emisi dan pelaporan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh perusahaan. Sistem juga dilengkapi dengan isian logbook harian yang harus diisi oleh masing-masing pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungannya. Sistem ini dapat diakses melalui laman <https://dlh.cimahikota.go.id>

Dengan adanya Patali, diharapkan dapat membantu dan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan pengawasan lingkungannya dengan efektif dan efisien. Manfaat yang diperoleh dari adanya Patali diantaranya:

1. Kemudahan pelaku usaha dan/atau kegiatan melaksanakan kewajiban pelaporan pemantauan kualitas lingkungan melalui sistem informasi;

2. Tersedianya database digital laporan pemantauan lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan;
3. Kemudahan analisa sebagai bahan pertimbangan dalam kajian dan/atau pengambilan kebijakan;
4. Mengurangi penggunaan kertas untuk laporan ;
5. Mengurangi emisi gas buang dari mobilisasi kendaraan untuk penyerahan laporan.



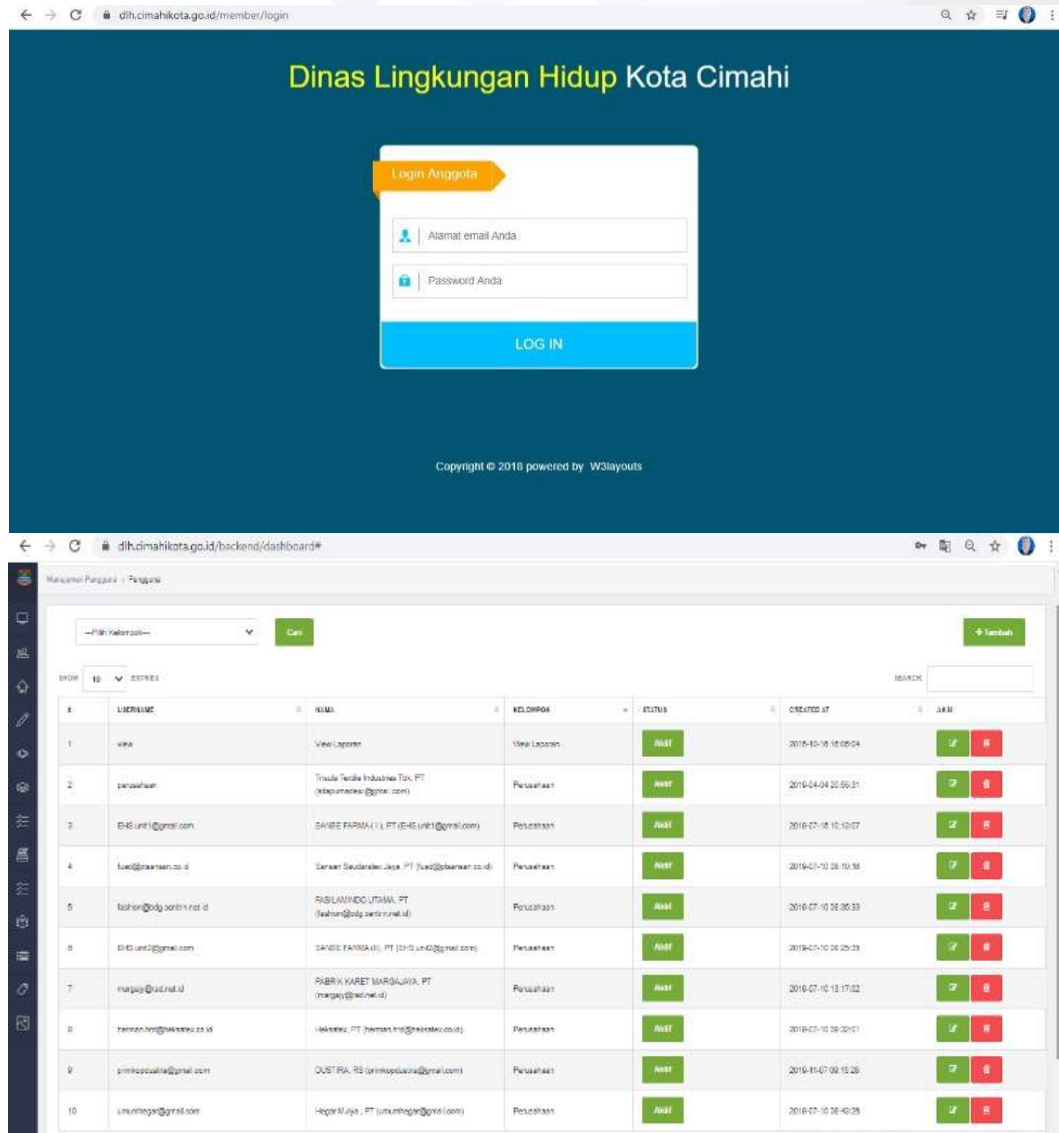
Gambar 4. 13 Business Process PATALI

Perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan mengajukan pembuatan *account* ke admin di Dinas Lingkungan Hidup. Pelaku usaha melengkapi data perusahaan kemudian di verifikasi oleh operator. Melakukan monitoring lingkungan seperti pemantauan pencemaran air, udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta logbook. Laporan yang diajukan selanjutnya diperiksa kesesuaian data dengan dokumen pendukungnya oleh bidang pengawasan untuk dievaluasi. Setelah data diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha dapat mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) sebagai bukti sah bahwa pelaku usaha telah melaporkan pemantauan lingkungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Sosialisasi penggunaan Patali untuk pelaku usaha secara rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi untuk melakukan simulasi pelaporan monitoring basis online ini. Terhitung sampai dengan tahun 2020, sebanyak 34,12% perusahaan di Kota Cimahi telah melaporkan data perusahaan secara online pada sistem.



Gambar 4. 14 Sosialisasi dan Simulasi Pelaporan Pemantauan Lingkungan kepada Pelaku Usaha di Kota Cimahi



Gambar 4. 15 Halaman Awal Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Inovasi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 480 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas :

- a. Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. Pelaporan Persetujuan Lingkungan;
- c. Status Lingkungan Hidup;

- d. Pengelolaan Limbah B3;
- e. Peta Rawan Lingkungan;
- f. Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif;
- g. Informasi Lingkungan Hidup Lainnya.

Patali sendiri merupakan implementasi dari sistem informasi pelaporan persetujuan lingkungan, dimana sistem ini terus dikembangkan agar dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 483 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedepannya, sistem ini juga akan dikembangkan sebagai input data dalam sistem informasi status lingkungan hidup, terutama untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.2.1.2 Sistem Informasi Tata Ruang (SITARUNG)

Informasi geospasial kini menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan menyebarluaskan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang Informasi Geospasial, baik pusat maupun daerah sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi menginisiasi pembuatan aplikasi berbasis website GIS (*Geographic Information System*) yang menyajikan bentuk informasi di dalam hal penataan ruang yang dinamakan SiTarung (Sistem Informasi Penataan Ruang) sehingga pada tanggal 30 Oktober 2018 Pemerintah Daerah Kota Cimahi menerbitkan

Ruang Kota Cimahi yang memiliki wewenang dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam menginput hasil pemantauan serta pengawasan pemanfaatan di lapangan yang dapat sekaligus dievaluasi tingkat kesesuaiannya dengan RTRW yang telah ditetapkan.

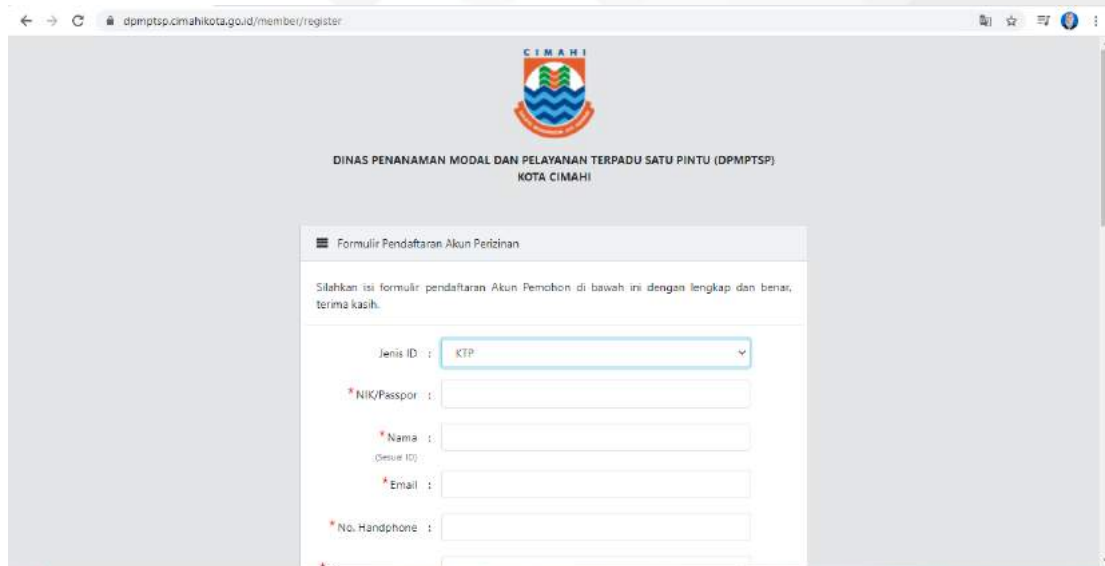
Keunikan yang dimiliki oleh SiTarung adalah masyarakat dapat memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan tata ruang dengan melampirkan foto keadaan di lapangan yang belum dimiliki oleh daerah lain. Masyarakat juga diberi kemudahan karena sistem ini berbasis web GIS (*Geographic Information System*) yang dapat diakses melalui android.

4.2.2 Smart Governance

4.2.2.1 SiPinter

SiPinter atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu berisi informasi izin-izin yang dikelola/diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi, sistem perizinan tersebut dilakukan secara online, untuk dapat melakukan permohonan lewat aplikasi ini pemohon terlebih dahulu wajib memiliki account dengan cara mendaftar melalui portal <http://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/register> .

DADAKAN atau Datang Daftar dan dapatKAN adalah sistem aplikasi permohonan izin via online dengan cara mendaftar melalui portal <http://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/register> yang memudahkan pemohon mengajukan izin yang bisa diakses dirumah, adapun izin yang sudah diterapkan via online tersebut baru Kartu pengawasan dan Izin reklame non permanen. Dengan masuk ke portal tersebut pemohon cukup melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, selanjutnya daftar sesuai layanan yang disediakan. kemudian petugas memverifikasi permohonan tersebut, apabila lengkap akan langsung diproses hari itu juga.



Gambar 4. 17 Tampilan Registrasi Akun Melalui SIPINTER

4.2.2.2 SiBeda

Saat ini pelaporan kondisi kedaruratan Kota Cimahi dapat diakses oleh masyarakat Cimahi melalui hotline dan media sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Kebutuhan masyarakat untuk tanggap darurat perlu respon cepat dari Pemerintah Daerah. Sehingga BPBD Kota Cimahi merencanakan pembuatan sistem untuk meningkatkan fungsi dari BPBD melalui SiBeda.

SiBeda merupakan sistem integrasi kebencanaan yang menggabungkan antara Masyarakat-Pemerintah-Dunia Usaha-Relawan-Hingga Media Massa yang bersama-sama memberikan kontribusi dalam penanganan penanggulangan bencana. SIBEDA terdiri dari 4 Sistem diantaranya 1 (WEB system) dan 3 (System Berbasis Android) yaitu SiEman (Sistem Informasi Bencana Daerah)- SiTana (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana)- SiRere (Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

WEB merupakan fungsi diseminasi, rekapitulasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang didalamnya terdapat standar minimal konten web, peta rawan bencana, peta kejadian bencana, laporan kejadian eksisting, rekapitulasi bencana, trend kejadian tahunan, hingga grafikal;

SiEman merupakan fungsi internal dan eksternal dimana fungsi internal merupakan fungsi *asesment* potensi bencana ditambah fungsi eksternal untuk mengukur indeks ketahanan keluarga yang didalamnya terdapat indikator-indikator ketahanan keluarga yang diisi oleh kepala/anggota keluarga yang kedepannya akan dievaluasi oleh anggota BPBD di rumah.

SiTana merupakan fungsi internal dalam penanganan bencana yang dilakukan seksi kedaruratan dan logistik berupa management tanggap darurat bencana baik dari management informasi-*asesment*-pelaporan-hingga koordinasi dan pelaporan;

SiRere merupakan fungsi Internal dalam pemulihan daerah terdampak bencana berupa management pemulihan (rehabilitasi dan Rekontruksi mulai dari *asesment*-managemen pemulihan-koordinasi-monitoring evaluasi-rekapitulasi- hingga pelaporan..

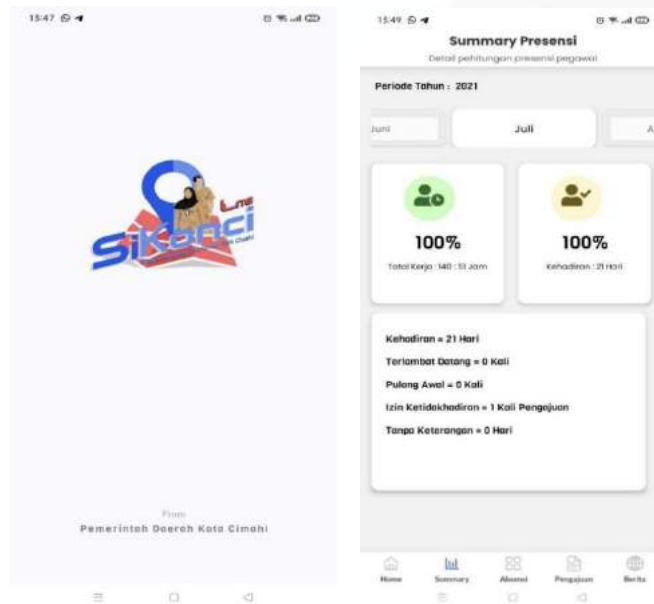


Gambar 4. 18 Penanganan Kebakaran oleh BPBD

4.2.2.3 SiKonci

SiKonci adalah sebuah aplikasi pengembangan pengelolaan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dari mesin fingerprint menjadi foto selfie dan absensi GPS (*geolocation* atau

geotagging attendance) menggunakan Smartphone di masing-masing ASN Kota Cimahi, nama aplikasi Sistem Kehadiran Berlokasi ASN Kota Cimahi.



Gambar 4. 19 Aplikasi Sikonci BKPSDMD

4.2.2.4 SiMakci

SiMakci adalah Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Cimahi yang merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

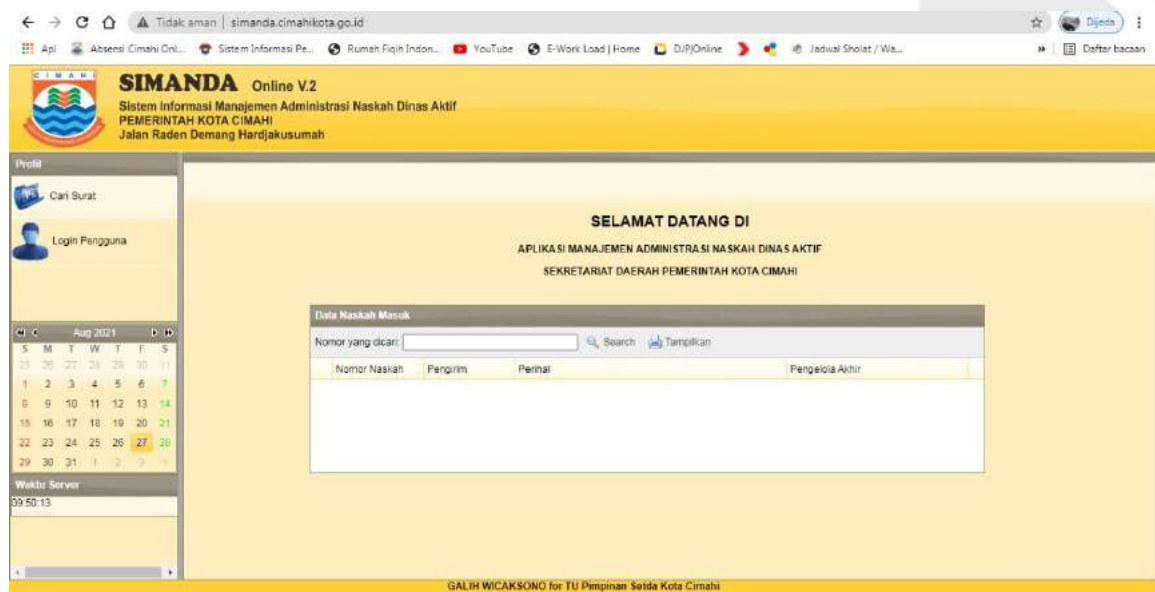
4.2.2.5 SiKaci

SiKaci adalah singkatan dari Sistem Informasi Kinerja ASN Kota Cimahi, yang merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengukur kuantitas dan kualitas kerja pegawai dengan menetapkan indikator kinerja dan identifikasi performance serta penerapannya pada masing-masing jabatan yang ada berdasarkan Indikator Perilaku Kerja, Kehadiran, Kinerja Individu (SKP bulanan) dan Kinerja Organisasi (Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan).

4.2.2.6 SiManda

SiManda atau Sistem Manajemen Administrasi Naskah Dinas Aktif merupakan upaya Tata Usaha Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian Setda Kota Cimahi dalam melaksanakan salah satu tugasnya dalam pelayanan administrasi surat menyurat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. SiManda online dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengadministrasikan naskah dinas yang terdiri atas administrasi naskah dinas masuk, administrasi naskah dinas luar, administrasi balasan dan pencarian data. Dengan sistem ini kita dapat mengelola, mengendalikan dan memonitor seluruh naskah dinas dan disposisi yang telah diadministrasikan.

Simanda hanya dapat diakses pada jaringan LAN di Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada URL <https://simanda.cimahikota.go.id> .



Gambar 4. 20 Halaman Awal SIMANDA Kota Cimahi

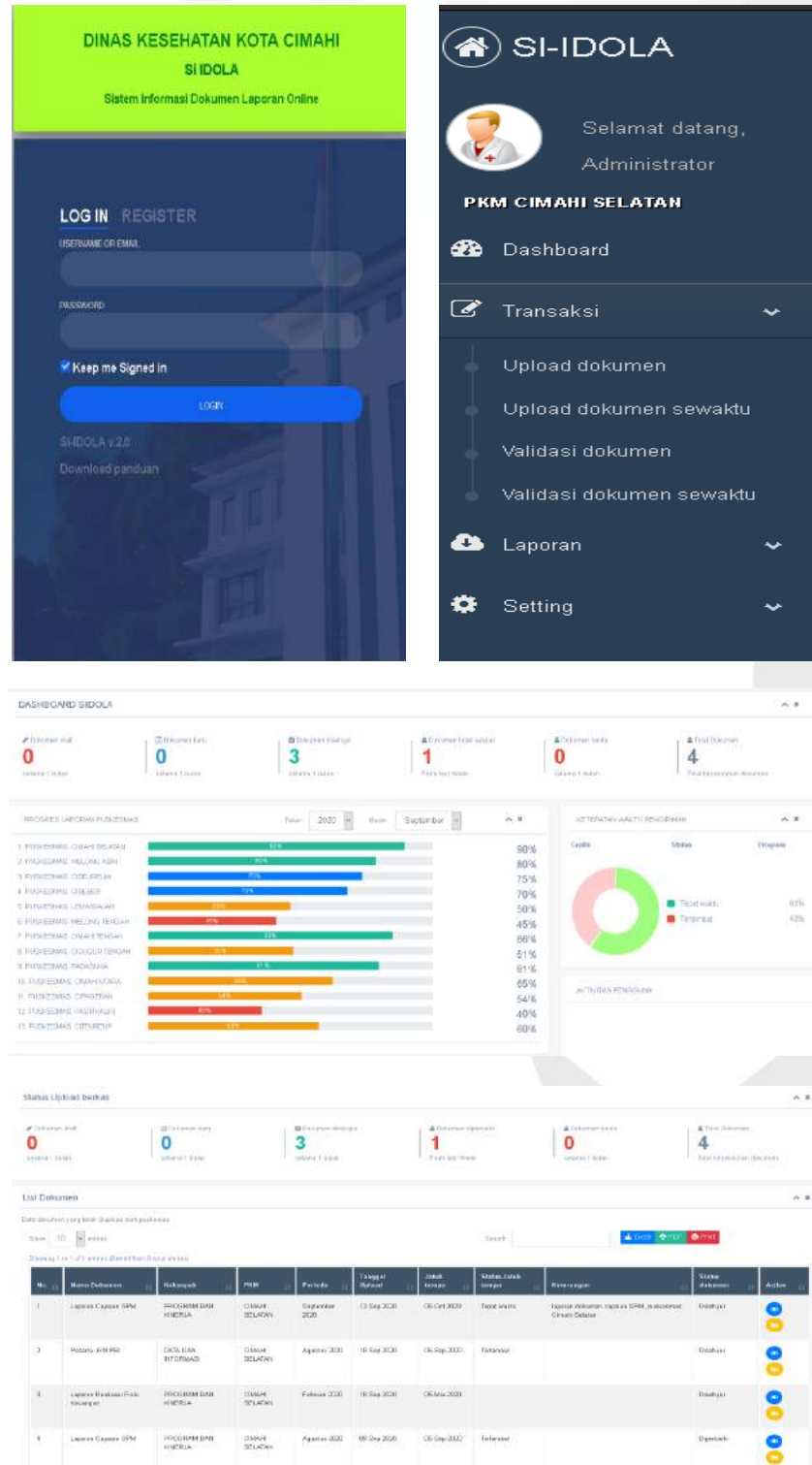
4.2.2.7 SiIdola

SiIdola atau Sistem Informasi Dokumen Laporan Online, merupakan model pengiriman laporan Puskesmas kepada dinas kesehatan secara online. Dokumen Laporan tersimpan dalam Data Center serta pengelolaan

dokumen laporan terintegrasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan laporan, terutama jenis laporan rutin. SiIdola merupakan inovasi di Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang digagas dengan tujuan untuk:

- Efektivitas dan efisiensi dalam penyerahan laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan
- Integrasi sistem pelaporan Dokumen untuk mencapai manajemen arsip yang baik
- Kemudahan dalam proses Monitoring semua jenis laporan
- Menghindari kontak fisik pada masa pandemi (COVID-19)

Laporan puskesmas yang sebelumnya harus dilaporkan langsung ke Dinas Kesehatan secara berkala beralih menggunakan sistem berbasis pelaporan online. SiIdola memudahkan user dalam hal ini adalah Puskesmas untuk menyampaikan laporan dan penyimpanan data laporan terekam dalam website SiIdola yang dapat diakses pada laman <https://siidola.cimahikota.go.id>.



Gambar 4. 21 Tampilan Website SIIDOLA

4.2.2.8 *One Day Service 3 in 1*

Pelayanan *3 in 1* ini merupakan pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya masyarakat mendapatkan paket komplit (3 dokumen) untuk pengajuan satu dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Paket komplit 1 (Surat Pindah datang, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)), paket komplit 2 (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)); Paket komplit 3 (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-El Suami/Istri yang berubah status): paket komplit 4 (Pencatatan perkawinan, Kartu Keluarga baru dan KTP-el bagi suami/istri yang berubah status); dan paket komplit 5 (Pencatatan perceraian, Kartu Keluarga baru dan KTP-el bagi suami/istri yang berubah status).

Ketika ada warga memohon satu dokumen, maka kita sudah langsung buat tiga dokumen yang memang semuanya sudah ter-update datanya. Khusus untuk warga yang satu ini memohon untuk perkawinan, kita sudah langsung di update datanya di kartu keluarga dan untuk warga tersebut kami buat perubahan status di KTP nya menjadi status terbaru, menjadi yang bersangkutan dengan istrinya. Jadi hari ini sudah kami serahkan semuanya.

Inovasi *One Day Service 3 in 1* ini sekaligus melengkapi berbagai upaya dan terobosan lainnya yang sudah dijalankan oleh Disdukcapil Kota Cimahi dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas dan efisien seperti Pelayanan RW Tuntas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan jemput bola dalam bentuk mobil keliling, pelayanan ke lembaga pendidikan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik, pelayanan kunjungan ke rumah penduduk (kategori rentan, lansia, dan disabilitas/penyandang cacat), pelayanan di hari Sabtu-Minggu atau hari libur dan pelayanan online/daring. Adapun jenis-jenis layanan dalam program 3 in 1 yang dijalankan Disdukcapil Kota Cimahi ini terdiri dari:

1. Akta Kelahiran, KK (Penambahan Anggota Keluarga), Kartu Identitas Anak;
2. Akta Kematian, KK (Data yang meninggal ditiadakan dari KK), KTP-EL (Perubahan Status Kematian);
3. Akta Perkawinan, KK (Terbentuk KK baru bagi pasangan suami-istri), KTP-EL Suami-Istri;
4. Akta Perceraian, KK (Perubahan Elemen Data), KTP-EL;
5. SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI), SKDWNI (Surat Keterangan Datang WNI), (KK dan KTP-EL).



Gambar 4. 22 One Day Service dalam Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan

4.2.2.9 Pengaduan Trantibum

Pengaduan Trantibum adalah pelaporan pengaduan masyarakat melalui hotline Satpol PP, berita seputar ketertiban umum di Kota Cimahi selain dapat di akses di media sosial, dapat dilihat melalui website Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi pada laman <http://satpolppdamkar.cimahikota.go.id> . Kemudahan masyarakat dalam mengakses akun resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Gambar 4. 23 Landing Page Website Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

4.2.2.10 JDIIH Kota Cimahi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Diciptakan agar mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kenyamanan yang lebih baik terhadap pelayanan public. JDIIH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. meningkatkan penyebaran dan pemahaman tentang pengetahuan hukum, masyarakat dapat mengakses informasi dimana saja dan kapan saja.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan

penegakan hukum dan kepastian hukum. Penelusuran peraturan di Kota Cimahi dapat dibuka pada tautan <https://jdih.cimahikota.go.id>.



Gambar 4. 24 Landing Page Website JDIH Kota Cimahi

4.2.3 Smart Economy

4.2.3.1 Smart PKB

Smart PKB merupakan akronim dari Pengujian Kendaraan Bermotor yang inovasi yang mendukung pilar *smart living* dan *smart environment*. Adanya *smart PKB* adalah peralihan penggunaan kartu uji menjadi *smart card*. Hadirnya *Smart PKB* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi memudahkan akses data pengujian kendaraan yang semula berupa kartu uji dan lembar pengujian, menjadi *smart card* yang dilengkapi dengan barcode untuk mengakses data pengujian kendaraan.



Gambar 4. 25 Smart Card dan Buku Uji Kendaraan Bermotor

4.2.3.2 *Smart Traffic*

Pemantauan lalu lintas di Kota Cimahi dilakukan dengan adanya kolaborasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip dan Perpustakaan Kota Cimahi. Laman ini memungkinkan pengguna mengetahui kondisi kepadatan lalu lintas di Kota Cimahi. Ruas jalan yang sudah terhubung dengan CCTV diantaranya adalah di Jalan Amir Machmud, Jalan Cihanjuang, Jalan HMS Mintereja, dan Jalan Abdul Halim. Pemantauan lalu lintas dapat diakses pada laman <https://smartcity.cimahikota.go.id/cctv#> atau menggunakan aplikasi smart city Kota Cimahi yang dapat diunduh di Playstore.



Gambar 4. 26 Pemantauan Lalu Lintas di Aplikasi Cimahi Smart City

4.3 Eco Wisata

Eco wisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam,

aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan (Wikipedia). Inovasi berkaitan dengan Eco Wisata di Kota Cimahi diantaranya *Gastrodiplomacy* Cireundeu, Pasar Wisata Legok Awi.

4.3.1 Pasar Wisata Legok Awi

Pengembangan daerah tujuan wisata melalui pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi merupakan kegiatan pengembangan potensi wisata Kota Cimahi yang tidak memiliki banyak daya tarik alam, tetapi memiliki salah satu potensi *culture tourism* sudah selayaknya mendapat perhatian penuh dari pihak pemerintah dan swasta di dalam pengembangan kepariwisataan ke depan.

Kampung Torobosan RW 12 bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi mengagas konsep bertajuk 'Pasar Wisata Legok Awi'. Sesuai namanya yakni legok awi, lokasi pasar wisata tersebut memang terletak di wilayah cekungan atau lebih rendah dari tempat lain. Di wilayah itu terdapat banyak bambu (awi dalam Bahasa Sunda) yang tumbuh.

Wisata ini bisa menjadi contoh bahwa ditengah keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), Kota Cimahi masih tersedia lahan untuk dimanfaatkan menjadi tempat wisata.

Dagangan yang dijual pun adalah jajanan khas Sunda seperti minuman tradisional bandrek. Kemudian makanan seperti awug, burayot dan sebagainya. Cara transaksinya pun adalah dengan uang yang ditukar dengan bambu.



Gambar 4. 27 Pasar Wisata Legok Awi

4.3.2 *Gastrodiplomacy* Cireundeu

Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, luas sawah di Kota Cimahi pada tahun 2018 hanya 173 Ha atau 3,3% dari total luas wilayah 4.248 Ha (40,2 km²). Kecilnya luas areal pertanian dapat mengancam ketersediaan pangan. Hal itu menjadi persoalan karena terdapat ungkapan 'belum makan jika belum makan nasi'. Padahal, makan tidak harus selalu nasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya merubah pola pikir dari awalnya berorientasi pada beras menjadi pangan non-beras. Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terdapat sebuah komunitas adat yang tidak mengkonsumsi beras melainkan singkong beracun yang mengandung asam sianida (HCN) tinggi. Sebelum 2018 program ketahanan pangan Cimahi dilaksanakan dengan strategi (orientasi) mempromosikan atau menjual keluar (*outward*) produk-produk Cireundeu. Akan tetapi strategi ini cenderung hanya menjadikan produk Cireundeu sebagai oleh-oleh dan mengabaikan potensi seni/budaya serta pengetahuan/kearifan lokal konservasi alam dalam berkebun singkong warga adat Cireundeu. Perlu dilakukan perubahan strategi yang mampu mengoptimalkan upaya masyarakat adat dalam mengembangkan misi sosial dan ekonominya melalui penyebaran pengetahuan/budaya ketahanan pangannya sehingga pembeli/pengunjung tertarik untuk datang, tinggal, memperoleh informasi yang tepat, belajar esensi budaya/seni yang terkait dengan praktik budidaya dan konservasi alam Cireundeu. Cireundeu sangat unik dengan produk olahannya yang terbuat dari singkong beracun. Sesuai ungkapan *the best way to win the*



hearts and minds of global publics is through the stomach maka kuliner dipakai sebagai alat diplomasi (gastrodiplomasi) warga adat Cireundeu untuk membagi pengetahuan, kebiasaan, seni dan budaya serta memperoleh perhatian publik. Pada akhir tahun 2017 Litbang Bappeda Kota Cimahi mencoba inovasi melalui strategi *inward* pengembangan potensi di dalam. Dilakukan aktivasi branding ketahanan pangan dengan pengintegrasian kegiatan wisata kuliner, berkesenian, belajar konservasi alam, pemanfaatan media internet dan pengalaman tinggal di homestay. Inovasi pun dilakukan dengan menyusun proses penyelenggaraan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip atau aturan adat (kearifan lokal) yaitu usaha pengolahan produk turunan singkong dan kesenian dilakukan sebagai usaha bersama (komunal). Agar warga mendukung dan terlibat dalam pengembangan desa edukasi ketahanan pangan dilakukan pengembangan homestay rumah – rumah warga. Pengembangan pariwisata juga dilakukan dengan menjadikan Cireundeu sebagai lokus summercourse bidang kewirausahaan sosial, seni, sosiologi/antropologi dan lingkungan hidup bagi mahasiswa nasional/internasional.

4.4 Pengembangan Lahan dan Varietas Lokal

4.4.1 POKER 4P

Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Luas RTH di Kota Cimahi 13,6 % dari total luas wilayah 4.248 Ha (40,2 km²). Persentase tersebut masih dibawah keharusan yg harus dimiliki setiap daerah sesuai amanat undang-undang yaitu 30 % atau 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Private. Hal ini diantaranya disebabkan kurang pemahamannya warga akan pentingnya RTH, kepentingan RTH selalu kalah oleh kepentingan lain, belum efektifnya 4 P (prosedur Penanaman, Pemeliharaan, Penebangan/Pemangkasan dan Penanganan bencana) dll. Jika kondisi dibiarkan tentunya mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun. Sehingga perlu suatu solusi agar

pelaksanaan 4 P lebih efektif, peningkatan pemahaman akan pentingnya RTH dan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Gambar 4. 28 Business Process Proker 4P

4.4.2 SEGAPT

Pemeliharaan pohon merupakan tahapan penting untuk keberlangsungan kelestarian pohon sehingga perlu dibuat prosedur agar dilaksanakan sesuai standar. Aksi cepat tanggap yang dilakukan adalah dengan SERGAPT. SERGAPT merupakan Serangkaian Gerakan Antisipasi Pohon Tumbang dengan melakukan identifikasi kesehatan pohon, pemeliharaan dan penebangan yang dilakukan oleh 3 tim yaitu Identifikasi Kesehatan Pohon (IKP), Tim Jagawana (Pemeliharaan dan Penanaman) dan Tim Topping (Pemangkasan dan Penebangan). Adanya SERGAPT meminimalisir pohon lenyap karena pohon tumbang/sakit



Gambar 4. 29 Business Process SERGAPT

Fasilitasi permohonan pemangkasan/penebangan pohon dari warga merupakan bagian pelayanan pemerintah, secara khusus untuk permohonan penebangan perlu dibuat tahapan terstruktur agar pemberian ijin penebangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan ijin penebangan pohon juga sudah dapat di akses dan diajukan melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.

Bencana pohon tumbang merupakan hal yang tak terhindarkan dan DLH perlu mengambil bagian sebagai pendukung bantuan apabila terjadi bencana pohon tumbang sehingga perlu disusun langkah tepat cepat agar tim dapat dengan segera memberikan kontribusi terhadap kejadian bencana pohon tumbang.

Identifikasi Kesehatan Pohon, Fasilitasi Pemangkasan dan Penanaman Pohon di Kota Cimahi terangkum dalam prosedur Poker 4P (Penanaman, Pemeliharaan, Pemangkasan dan Penebangan Pohon), yang selanjutnya terdokumentasikan pada Simbada Konser (Sistem Basis Data Konservasi). Rekapitulasi data dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pemangkasan dan penanganan bencana terdokumentasi dan tercatat dalam sistem ini. Sehingga, Simbada Konser ini menghasilkan database pelaporan

penanaman, pemeliharaan, pemangkasan dan penanganan bencana (4P) di Kota Cimahi.

Inovasi pelayanan publik berkaitan dengan konservasi lahan ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi untuk bersama menjaga Ruang Terbuka Hijau yang ada di sekitar. Juga sebagai salah satu cara agar masyarakat dapat menghargai keberadaan pohon dan kebermanfaatannya dari pohon itu sendiri. Manfaat dari inovasi berupa nilai ekonomi/efisiensi, meminimalisir pohon lenyap karena pohon tumbang/sakit, 1 pohon bernilai ekonomi lingkungan karena multifungsi penyerap carbon, produksi oksigen, resapan air, tempat tinggal fauna serta berperan dalam perbaikan tata kelola, pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui perwal tata cara izin penebangan pohon.

4.4.3 Urban Farming

Urban Farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanita tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Kegiatan urban farming adalah sebuah pengembangan konsep dari pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Hal ini mengingat bahwa ketersediaan lahan di perkotaan yang sangat terbatas, maka pengembangan pemberdayaan pertanian perkotaan (*urban farming*) menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Hampir seluruh kelurahan di Kota Cimahi telah menerapkan urban farming, menggunakan dinding rumah maupun atap rumah. Urban farming bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi konsumsi sendiri. Kelembagaan urban farming ini disebut dengan KWT atau Kelompok Wanita Tani. Jika hasil dari urban farming ini berlebih, hasilnya dapat dipasarkan ke kelompok tani (poktan) sehingga urban farming ini akan bernilai

ekonomi. Kegiatan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian ini terus disosialisasikan kepada masyarakat di Kota Cimahi.



Gambar 4. 30 Kegiatan Urban Farming

4.4.4 Cimahi Agri Market

Gelar pangan segar / cimahi agri market merupakan inovasi untuk mengurangi tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen dengan memutus mata rantai pemasaran yang panjang dan struktural pasar yang tidak efisien. Cimahi Agri Market menampilkan berbagai jenis kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam dan kentang, 61 jenis tanaman hortikultura, daging ayam, ikan Nila dan Lele serta makanan olahan.

Budidaya pertanian pada lahan kering dan lahan pekarangan dapat dilakukan melalui pengembangan tanaman sumber pangan alternatif seperti singkong, pisang, ubi jalar dan tanaman lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga, disamping dapat pula diolah menjadi aneka macam makanan. Pada dasarnya semua orang dapat melakukan budidaya dan pengolahan hasil pertanian, akan tetapi hanya petani dan pelaku usaha dibidang industry agro yang tergabung kedalam kelompok tani yang mengusahakannya secara komersial, sementara masyarakat lainnya bahkan ibu rumah tangga masih terbatas pada pemanfaatan lahan kering dan pekarangan hanya untuk pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah Kota Cimahi melalui Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tahun Anggaran 2018 akan

melaksanakan beberapa kegiatan baik itu yang bersifat pembinaan maupun bantuan sarana produksi pertanian agar pelaksanaan kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan pada Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan dapat berjalan dengan baik. Cimahi Agri Market merupakan hilirisasi dari kegiatan Urban Farming (Pertanian Perkotaan). Edukasi Urban Farming adalah langkah yang diambil oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan berkurangnya lahan pertanian.



Gambar 4. 31 Kegiatan Cimahi Agri Market

4.4.5 Bemara Nurseries

BEMARA adalah akronim dari BERbasis MAsyARakat, dan NURSERIES adalah kata dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah pembibitan tanaman, dalam pertamanan berarti pembibitan tanaman hias. Jadi BEMARA NURSERIES adalah pembibitan tanaman hias berbasis masyarakat. Dalam dunia industri pertamanan, pembibitan tanaman hias adalah pemasok tanaman hias untuk pembuatan taman. Maksud dari inovasi tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan pembibitan tanaman hias raksasa yang tersebar di setiap RW yang bermitra dengan Petani Tanaman Hias Cihideung.



Gambar 4. 32 Kegiatan Bemara Nurseries

Pengembangan pembibitan tanaman hias berbasis masyarakat di Kota Cimahi sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan dalam hal pemanfaatan pengomposan sampah sebagai media tanam dan kebutuhan akan minimnya lahan pembibitan tanaman hias untuk penyulaman taman Kota Cimahi. Pembibitan tanaman dengan memanfaatkan pekarangan warga jika dibuat massal berpotensi untuk menciptakan pembibitan tanaman hias skala besar sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH Kota terwujud sesuai amanah dalam Perda Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah mendorong pengorganisasian pengelolaan sampah di masyarakat yang lebih baik.

Dinas Pertanaman Kawasan Permukiman Kota Cimahi saat ini telah membina beberapa lokasi untuk pelaksanaan Bemara Nurseries, dapat dilihat pada Tabel 4.2. Pelatihan yang diberikan oleh DPKP Kota Cimahi berupa materi mengenai perbanyak tanaman dan pengomposan

Tabel 4. 2 Kawasan yang Mengaplikasikan Bemara Nurseries

No	Kelurahan	RW
1	Kelurahan Paskal	7
2	Kelurahan Cibabat	1, 5, 18, 19
3	Kelurahan Melong	23, 31
4	Kelurahan Utama	3, 16
5	Kelurahan Padasuka	18,19

(Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2020)

4.4.6 TTIC (Toko Tani Indonesia Centre) Kota Cimahi

Kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam dll. Perlu dilakukan mengendalikan harga-harga pangan, dengan memotong rantai pasok (*supply chain*) pangan yang semula 7-8 pihak menjadi hanya 3-4 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun. Salahsatu bentuk implementasi mendirikan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Kota Cimahi dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu. Memudahkan untuk mendapatkan bahan pangan yang terjangkau.

Dalam upaya pengembangan Cimahi Agri Market, Pemkot Cimahi menggagas Rintisan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) lewat bazaar pangan. Hal itu menjadi upaya penyediaan kebutuhan masyarakat serta memangkas rantai distribusi pasokan pangan. Penyediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat seperti : Beras Medium, Minyak Goreng Kemasan, Gula Pasir, Bawang Merah, Bawang Putih dan Kentang dan sayuran lainnya.



Gambar 4. 33 Kegiatan TTIC

4.4.7 Pengembangan Komoditas Lokal Durian Kamarung

Pengembangan Varietas Lokal Durian Kamarung merupakan Kerjasama Antara Pusat Pengembangan Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjajaran dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Pohon durian Kamarung berada di daerah Kamarung RT 03 RW 04 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Dengan jumlah pohon yang dianggap masih produktif sebanyak 1 (satu) buah dengan kemampuan berbuah yang semakin rendah setiap tahunnya bahkan sempat tidak berbuah dalam kurun waktu tertentu dikarenakan usia pohon yang cukup tua. Berdasarkan Deskripsi Sementara Durian Kamarung bahwa Perkiraan umur pohon induk tunggal \pm 120 tahun. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertanian melakukan konservasi untuk menjaga kelestariannya, dan telah dilakukan pendaftaran varietas lokal dengan nama varietas "KAMAJAYA. Tanda Daftar Varietas Tanaman Varietas Lokal Nomor: 1050/PVL/2019 Tanggal 22 Maret 2019 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian pada Kementerian Pertanian.

Durian Kamarung memiliki beberapa keunggulan berupa potensi produksi yang cukup tinggi dengan tingkat produksi mencapai 1.296 hingga 1.838

kg/pohon/tahun. Pada tahun 2020 dilakukan inokulasi entres dari tanaman induk durian kamarung, Hasil dari 1300 entres, dihasilkan tanaman baru sekitar 150 bibit tanaman durian kamarung, hal ini disebabkan oleh usia tanaman induk yang sudah terlalu tua, mutu entres yang tidak baik. Sebanyak 200 bibit tanaman tersebut telah ditanam tersebar di beberapa lokasi yaitu, di Taman Keanekaragaman Hayati Cimenteng, Kelurahan Citeureup dan di Bukit Padakasih, Kecamatan Cimahi Selatan.



Gambar 4. 34 Pembibitan dan Penanaman Durian Kamarung

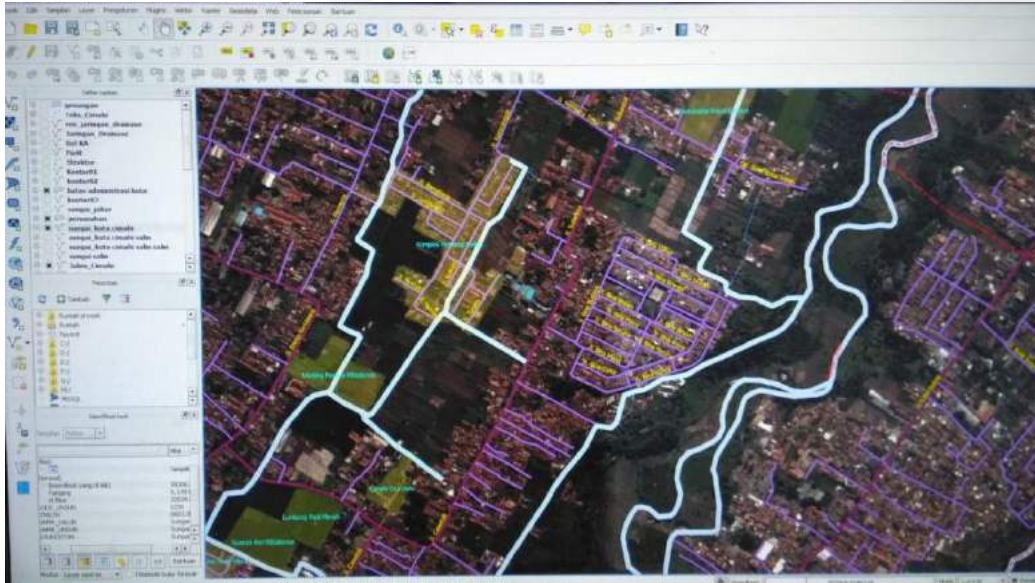
4.5 Cimahi Walagri

WALAGRI adalah akronim dari WAhangan LegA, linGkungan asRI. WALAGRI sendiri adalah kosa kata dari bahasa Sunda yang berarti SEHAT. Maksud dari kalimat tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan kondisi sungai yang lebar (sesuai dengan kapasitas optimumnya untuk mengalirkan air) sehingga perumahan dan permukiman yang ada di daerah aliran sungainya terbebas dari banjir, memenuhi standar sanitasi lingkungan serta memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang mendukung terciptanya lingkungan yang asri sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman dan sehat.

4.5.1 SiMandra

SiMandra adalah akronim dari Sistem Informasi, MANajemen DRAINase. SiMandra merupakan aplikasi system informasi geospasial (GIS) berbasis web yang digunakan untuk menginput data dan memetakan saluran drainase permukiman yang ada di Kota Cimahi. Mulai dilakukan pendataan drainase pada tahun 2016 menggunakan *Microsoft Access*, tahun 2020 SiMandra telah masuk dalam tahap digitasi menggunakan quantum GIS.

Informasi data yang diinput diantaranya adalah nama saluran, jenis saluran, data kondisi fisik saluran meliputi panjang, lebar, tinggi, bentuk dan status saluran. Data kerusakan saluran juga dapat terlihat pada data saluran, kedepannya data kerusakan saluran dapat di perbarui oleh masyarakat dengan disertai dokumentasi.



Gambar 4. 35 Tampilan SIMANDRA

4.5.2 Griya Plus

GRIYA artinya rumah, sedangkan PLUS adalah akronim dari Pastikan Layak huni, Upayakan Sehat. Mewujudkan kondisi rumah masyarakat yang masuk kategori RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) menjadi rumah yang tidak hanya layak huni saja tetapi dapat lebih menjadikan penghuninya sehat. Salah satu syarat hunian layak huni diantaranya adalah tersedianya sanitasi yang baik, dengan adanya sarana pengolahan air limbah domestik (septic tank). Data Rutilahu yang terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

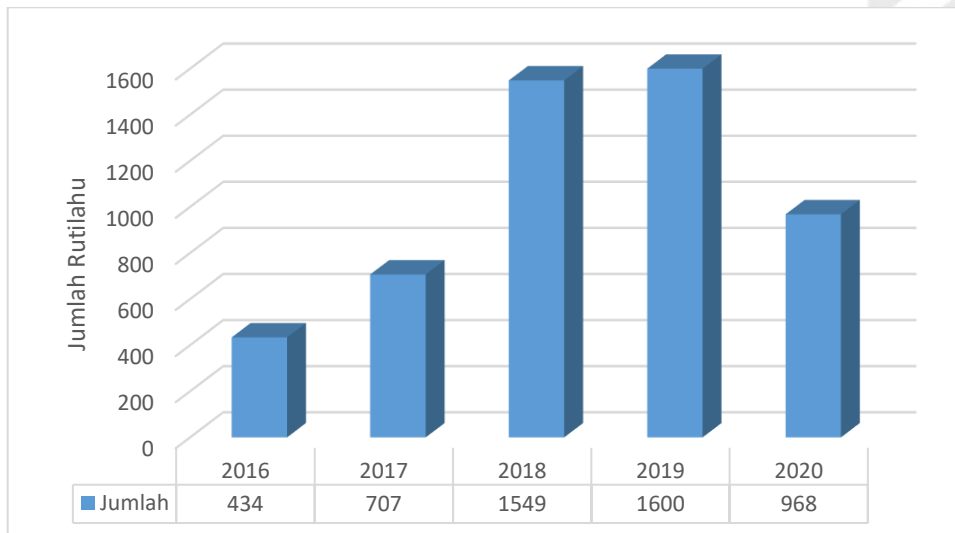
Tabel 4. 3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JUMLAH RUMAH YANG DIPERBAIKI
1	APBD (DID)	215
2	APBD + APBD PERUBAHAN	31
3	DAK	187
4	BBGR	15
5	P2WKSS	10
6	BSPS	210
7	BANPROV	300
TOTAL		968

(Sumber : DPKP, 2020)



Gambar 4. 36 Rumah yang Direnovasi pada Program Griya Plus



Gambar 4. 37 Data Rumah Tidak Layak Huni Terbangun Kota Cimahi Tahun 2016-2020

(Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2020)

4.5.3 Sahabat Gagah

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Kota Cimahi sudah mulai menerapkan konsep eco-drainase secara selektif di lokasi-lokasi genangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberi nama konsepnya dengan SAHABAT GAGAH (Simpan Air HujAn BAwah Tanah, Genangan Air Genangan Air Hilang).

Jika musim penghujan datang, terdapat beberapa titik di Kota Cimahi yang terdampak banjir dan menggenangi permukiman warga. Hal tersebut

terjadi karena kurangnya daerah resapan air dan volume air dari intensitas hujan yang ada melebihi kapasitas drainase yang ada. Sehingga drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan tidak berfungsi dengan maksimal.

Konsepnya sederhana, yaitu memindahkan air limpasan/genangan yang selama ini ada di permukaan tanah (dan masuk ke rumah-rumah penduduk) ke dalam suatu ruang penyimpanan air hujan di bawah tanah (berupa kolam retensi atau kolam detensi yang tertanam di bawah tanah). Dibuatnya inovasi Sahabat Gagah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan kuantitas air yang menjadi sebab adanya banjir di Kota Cimahi.

Tahun 2020 telah terbangun 3 sumur resapan di Kota Cimahi yang berada di RW 10 Cibeber yang merupakan titik terendah yang sering terjadi genangan. Sumur resapan dengan konsep eco-drainase ini dibangun agar berfungsi untuk meresapkan air hujan di bawah tanah. Sebelum di resapkan ke bawah tanah, dilakukan pre-treatment air limpasan yang masuk ke sumur resapan agar air yang diresapkan ke tanah tidak tercemar.



Gambar 4. 38 Pemasangan Sumur Resapan

4.5.4 Goyang Gotik

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan yang digunakan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM.

GOYANG GOTIK adalah akronim dari Gotong Royong Nabung Kanggo Tangki Septik. Warga yang sudah terpicu dan ingin membangun tangki septik, menabung dengan cara mengumpulkan sampah yang masih bernilai guna. Pada prosesnya inovasi ini berkolaborasi dengan Bank Samici Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Inovasi ini menjadi respon terhadap isu lingkungan terkait Persampahan dan Kuantitas dan Kualitas Air.

Program inovasi khusus untuk menangani permasalahan kesehatan lingkungan yang telah dijabarkan diatas dan untuk meningkatkan akses jamban sehat. Program Inovasi Goyang Gotik merupakan upaya kesehatan lingkungan lanjutan setelah kegiatan pemicuan yang dilaksanakan oleh Puskesmas untuk meningkatkan capaian akses jamban sehat.

Goyang Gotik merupakan inovasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, melalui puskesmas, yang telah berjalan dari tahun 2019 di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun 2 tangki septik dari inovasi Goyang Gotik. Selain membiasakan masyarakat untuk mengelola sampah, Goyang Gotik berperan dalam program STBM.



Gambar 4. 39 Warga Menabung Sampah untuk Pembangunan Tangki Septik

4.6 Pembangunan Fisik

4.6.1 Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal pelayanan publik dibangun untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Dilihat dari aspek lingkungan, Mal Pelayanan Publik diperkirakan dapat meningkatkan angka kualitas udara di Kota Cimahi.

Sampai saat ini mal pelayanan publik di Kota Cimahi masih dalam proses pembangunan. Pembangunan mal pelayanan publik di Kota Cimahi dibuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar efektif dan efisien juga mendukung *Smart City* pada pilar *Smart Governance*.

Tabel 4. 4 Instansi yang Bergabung pada MPP

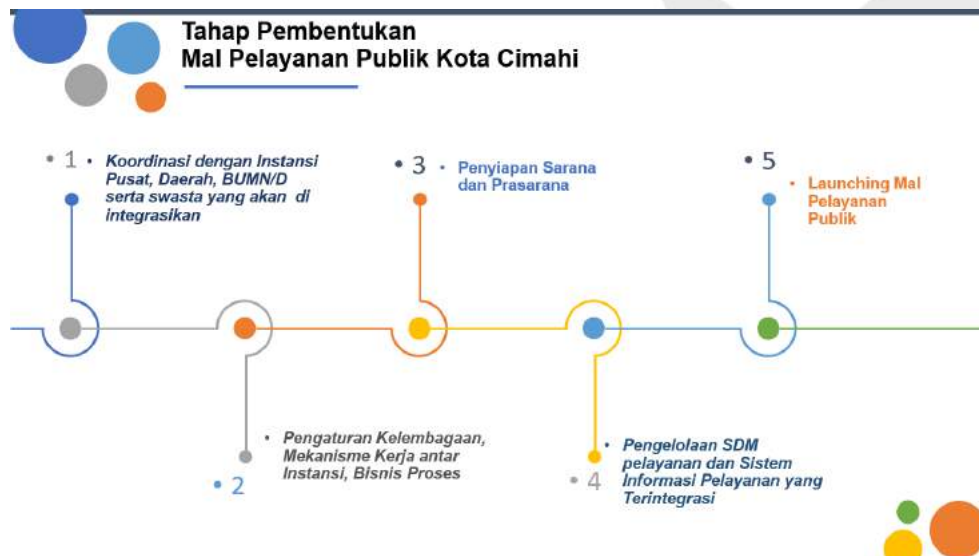
No.	Instansi	Jenis Layanan
1	Kepolisian Resort Kota Cimahi	Layanan Kepolisian : perpanjangan SIM, SKCK
2	Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Cimahi	Layanan Konsultasi Pertanahan
3	KADIN Kota Cimahi	Konsultasi Usaha dan Pembuatan KTA
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi	Penerbitan NPWP dan SKT
5	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
6	BPJS Kesehatan	Pendaftaran BPJS Kesehatan

No.	Instansi	Jenis Layanan
7	PDAM Tirta Raharja	Jasa Pelayanan Air Minum
8	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi (Samsat)	Layanan Pajak Kendaraan
9	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	Layanan OSS dan KBU
10	Kantor Pos Cabang Kota Cimahi	Layanan Postal
11	Kantor Imigrasi	Layanan Passport
12	Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	Layanan Konsultasi Hukum
13	PLN Kota Cimahi	Layanan Kelistrikan
14	Kantor Bea Cukai	Layanan Bea Cukai
15	Badan POM	Layanan Rekomendasi/Sertifikat
16	PT. Taspen	Layanan Pensiun
17	BJB Kota Cimahi	Layanan Perbankan dan Pembayaran

(Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2020)



Gambar 4. 40 Tampak Atas Mal Pelayanan Publik



Gambar 4. 41 Tahapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi

4.6.2 Double Track

Salah satu akses penghubung yang merupakan salah satu titik kemacetan di Kota Cimahi adalah Jembatan Leuwigajah. Jembatan Leuwigajah merupakan penghubung antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga volume kendaraan yang melintasi jalur tersebut cukup tinggi. Volume kendaraan yang masuk melebihi kapasitas jalan dan jembatan yang ada.

Lokasi pembangunan duplikasi Jembatan Leuwigajah terletak di Jalan Baros – Jalan Nanjung, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, tepatnya di jembatan Overpass persilangan tidak sebidang terhadap jalan tol Purbaleunyi.

Pembangunan double track ini diharapkan akan efektif untuk meminimalisir kemacetan di sekitar wilayah Leuwigajah dan mengurangi timbulan pencemaran kualitas udara yang bersumber dari kendaraan bermotor.

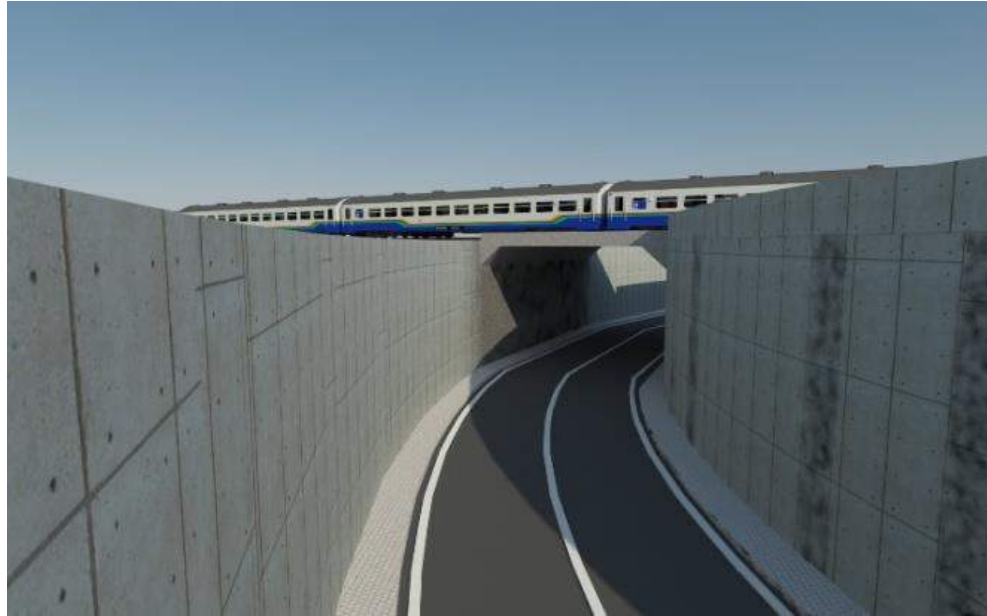


Gambar 4. 42 Proses Pembangunan Double Track Jembaran Leuwigajah

4.6.3 Underpass Sriwijaya

Maksud pembangunan Underpass adalah untuk menggantikan perlintasan sebidang di jalan Dustira - Jalan Sriwijaya sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Masalah keselamatan moda transportasi tersebut tidak hanya berfokus pada penumpang kereta api tetapi juga para pengguna jalan raya. Underpass yang menghubungkan Jalan Dustira dengan Jalan Sriwijaya di Kecamatan Cimahi Tengah ini terbentang sepanjang 30 meter. Adanya underpass ini diharapkan dapat

mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara yang terkonsentrasi disebabkan adanya kemacetan. Selain itu, tujuan dari pembangunan Underpass ini adalah untuk meningkatkan keselamatan transportasi baik penumpang kereta api maupun pengguna jalan.



Gambar 4. 43 Gambar Rencana Tiga Dimensi Underpass Sriwijaya



Gambar 4. 44 Proses Perencanaan Pembangunan Underpass Sriwijaya

4.7 Inovasi COVID-19

Adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor, salahsatu diantaranya adalah terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat. Diperlukan solusi untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 untuk meminimalisir dampak yang muncul. Inovasi yang dilakukan terkait dengan adanya pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19 (KSSC)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat sehingga tercipta Integrasi antara program pemerintah dan kegiatan masyarakat yang terbentuk dalam Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19 di Kota Cimahi. Dimana sasarannya adalah peningkatan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi ini.

Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perwujudan Kelurahan Aman Covid-19, Pemulihan Perekonomian, Peningkatan Kegiatan Kelurahan Siaga Covid-19 dan Jejaringnya, Meningkatkan Gerakan Produksi dan Konsumsi untuk membangkitkan ekonomi disetiap kelurahan.

Kolaborasi masyarakat, TNI/ POLRI, Forum Kecamatan Sehat (FKS) dan PKK Kota Cimahi dalam penanganan pendemi Covid-19. Kegiatan yang dilakukan di 15 kelurahan di Kota Cimahi ini diantaranya melakukan testing dan tracing Covid-19, melakukan kegiatan sosialisasi sebagai tindakan preventif pandemi Covid-19 dan promosi untuk menggalakkan 5M yaitu Mencuci Tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.



Gambar 4. 45 Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19
Program Pembelajaran Jarak Jauh di AKTV

Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan mengantisipasi hal ini dengan melakukan pembelajaran dengan bekerja sama dengan TV lokal yaitu AKTV Cimahi. Siaran pembelajaran bagi siswa SD dan SMP se-Kota Cimahi melalui tayangan TV lokal AKTV sudah mulai berlangsung. Hal tersebut sebagai bagian dari pengayaan selama belajar dari rumah (BDR). Tayangan ini bisa diakses di TV lokal dan youtube AKTV. Pembelajaran

dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 – 10.00 WIB.



Gambar 4. 46 Pembelajaran Jarak Jauh melalui AKTV



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BAB V PENUTUP

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021, dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Penyusunan DIKPLHD oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar data yang dibutuhkan telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini dilakukan guna memberikan informasi dasar mengenai isu lingkungan di Kota Cimahi pada tahun 2021;
- b. Metode analisis yang digunakan adalah DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) untuk 6 (enam) isu lingkungan utama, yaitu Tata Guna Lahan, Kualitas dan Kuantitas Air, Kualitas Udara, Risiko Bencana, Perkotaan (Persampahan), dan Tata Kelola;
- c. Penetapan isu lingkungan prioritas dilakukan berdasarkan analisis DPSIR dan verifikasi serta klarifikasi dengan *stakeholder* guna memperkuat dan menyesuaikan hasil analisis dengan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan;
- d. Isu prioritas lingkungan Kota Cimahi berdasarkan Dokumen IKPLHD 2021:
 1. Kualitas dan Kuantitas Air
 2. Persampahan
 3. Kualitas Udara
 4. Tata Guna Lahan (Penggunaan Lahan);
- e. Tersusunnya DIKPLHD 2021 ini dapat dijadikan dasar bagi pemangku kepentingan dalam penetapan kebijakan, penyusunan program, atau bentuk peningkatan pembangunan berkelanjutan lain terkait lingkungan hidup Kota Cimahi untuk masa yang akan datang.

- f. Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dimaksud dalam hal ini merupakan upaya yang perlu dilakukan dan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan atau isu prioritas tanpa mengesampingkan isu-isu lingkungan lainnya. Berdasarkan analisis dan studi literatur, berikut daftar upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk mengatasi isu lingkungan prioritas tahun 2021:

- A. Cimahi Barengras
- B. Cimahi Smart City
- C. Eco Wisata
- D. Pengembangan Lahan dan Varietas Lokal
- E. Cimahi Walagri
- F. Pembangunan Fisik
- G. Inovasi Covid-19



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021





DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. P. (2018). Studi Sesar Lembang Menggunakan Citra Sentinel-1a Untuk Pemantauan Potensi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 304–313.
- Alaerts, G., & Santika, S. S. (1987). *Metode Penelitian Air*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Arkhoi, M. B. (2017). Perencanaan Paket Ekowisata di Kampung Adat Cireundeu, Cimahi. *Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*, 1, 1–8.
- Azizah, K. N. (2021). Peringatan WHO Soal Pandemi COVID-19: Dunia di Titik Berbahaya! *Detik.Com*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5636734/peringatan-who-soal-pandemi-covid-19-dunia-di-titik-berbahaya>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kota Cimahi Dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Kota Cimahi Dalam Angka 2020*.
- Cahyana, G. H. (2018). (JANGAN) TUTUP TPA SARIMUKTI. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/N2SCG>, diakses pada tanggal 01 Februari 2021
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Kota Cimahi (2018). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2018-2022*.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2017). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017*.
- Effendi, H. (2003). *Telaah kualitas air, bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan*: Kanisius.
- Fajrin, D. H., Que, dr. B. J., & Pitria Permatasari. (2021). *Geliat Dunia Kesehatan Indonesia Di Masa Pandemi Covid -- 19*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=44ESEAAAQBAJ>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
- Gustiani, Herawati Murti dan Utami, Dian (2017). *Strategi Kesatuan Negatif Pada Masyarakat Kampung Adat Cireundeu*. The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for



- International Language Development of Unissula. Website: jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/viewFile/1251/959, Diakses pada tanggal 23 Januari 2018.
- Juniari, T. (2020). KLHK Perpanjang Kontrak TPA Sarimukti Hingga 2025. <https://ayobandung.com/read/2020/02/19/80022/klhk-perpanjang-kontrak-tpa-sarimukti-hingga-2025>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2021
- Juwana, I., Muttill, N., & Perera, B. (2012). Indicator-based water sustainability assessment—A review. *Science of the Total Environment*, 438, 357-371.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttill, N. (2010a). A water sustainability index for West Java—Part 2: refining the conceptual framework using Delphi technique. *Water Science and Technology*, 62(7), 1641-1652.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttill, N. (2010b). A water sustainability index for West Java. Part 1: developing the conceptual framework. *Water Science and Technology*, 62(7), 1629-1640.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Kusmawati, I. K. A. (2010). Penataan Taman Kartini. 10(2), 1–11.
- Meik, Suhartatik, H. S. D. (2018). Keluarga Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kecamatan Tamalarea Kota Makassa. 12, 645–649.
- Prasetiawan, T. (2020). Permasalahan Limbah Medis Covid-19 Di Indonesia. *Info Singkat*, 12(9), 13–18.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pusat Informasi Covid-19 Cimahi. (2020). Pemerintah Daerah Kota Cimahi.



- Ratcliffe, R. (2020). First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for an outbreak. 2 Maret 2020.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cimahi (2017).
- Salim. (1990). Towards a sustainable future Development (Vol. 2, pp. 61-63): Christengraf.
- Soemirat, J. (2011). Epidemiologi Lingkungan Edisi Revisi: UGM Press, Jogjakarta.
- Sustainable Development Goals (SDGs).
- Tchobanoglous, G., Stensel, D., Tsuchihashi, R., Burton, F., Mohammad, A., Bowden, G., & Pfrang, W. (2014). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (Metcalf & Eddy, Inc: McGraw-Hill, New York.
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UNSD. (1996). Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies: New York.
- Violleta, P. T. (2021). Penanganan limbah medis jelang setahun COVID-19 di Indonesia. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/2013933/penanganan-limbah-medis-jelang-setahun-covid-19-di-indonesia>, diakses pada 25 Juli 2021



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

LAMPIRAN I

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021

- SK TIM PENYUSUN
- BIODATA PENYUSUN
- UNDANGAN RAPAT PENGUMPULAN DATA
- NOTULENSI RAPAT PENGUMPULAN DATA
- DAFTAR HADIR RAPAT PENGUMPULAN DATA
- UNDANGAN FOKUS GRUP DISKUSI (FGD)
- BERITA ACARA FOKUS GRUP DISKUSI (FGD)
- NOTULENSI FOKUS GRUP DISKUSI (FGD)
- DAFTAR HADIR FOKUS GRUP DISKUSI (FGD)



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660.1 / Kep. 268 - DLH / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa diperlukan tim untuk menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021, Tanggal 25 Februari 2021, Hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021;
 2. Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Plt. Wali Kota Cimahi, Nomor 061.1/39/TL, Tanggal 8 Januari 2021, Hal Pengajuan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis data pendukung Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 yang dihimpun dari setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan verifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021; dan
- c. melaksanakan penyusunan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai rincian tugas yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c, meliputi:

- a. Buku I, menyajikan ringkasan eksekutif dari informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
- b. Buku II, berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

KEENAM : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR : 660.1 /Kep. 868 - DLH /2021

TANGGAL : 3 Juni 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Plt. Wali Kota Cimahi.
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi;
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
3. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
4. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
6. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
7. Kepala Seksi Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
8. Kepala Sub Bagian Administrasi Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Cimahi;

9. Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Cimahi;
10. Siti Yuniarti, SKM.
NIP. 19840626 200902 2 004;
11. Eri Rukmana
NIP. 19820423 200901 1 002;
12. Agus Rohendi, SE., M.Si.
NIP. 19730817 200701 1 010;
13. Rudi Nugroho Catur Rangga, S.T., M.Si.
NIP. 19800520 200604 1 015;
14. Deby Risyana, S.AP.
NIP. 19870308 201001 2 009;
15. Alan Suryadi, S.AP.
NIP. 19720128 200801 1 004;
16. Jodie Rushal, S.STP.
NIP. 19950526 201808 1 002;
17. Muhammad Andri Darmawan, S.IP.
NIP. 19810506 201001 1 012;
18. Deni Hendra
NIP. 19721217 201001 1 001;
19. Nandang Sunjaya, S.Kom.
NIP. 19731011 200501 1 002;
20. Kadarisman Diputra, SP.
NIP. 19840919 201001 1 006;
21. Nani Widia, S.Si., M.Pd.
NIP. 19791113 201001 2 008;
22. Muhamad Prabowo, S.T.
NIP. 19881125 201902 1 001;
23. Tita Martiana, ST., ME.
NIP. 19790314 200902 2 002;
24. Siti Nursanti, SH.
NIP. 19750517 199402 2 001;
25. Cecep Deri Gusman, A.Md.
NIP. 19860806 201409 1 001;

26. Vidya Adhaninggar Dyah Lukitaningrum, S.T.
NIP. 19950410 201902 2 001;
27. Dewita Rachman, S.T.
NIP. 19820617 201001 2 009;
28. Mohammad Natsir, S.E.
NIP.19760217 200902 1 002;
29. Ita Ruswati, S.Si.T.
NIP. 19790328 201001 2 004;
30. Citra Sylvanite Choerunoer, S.T.
NIP. 19950801 201902 2 002;
31. Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D.
(Institut Teknologi Nasional Bandung)
NPP. 010601;
32. Dr. Susanti Withaningsih, M.Si.
(Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu
Keberlanjutan Universitas Padjadjaran
Bandung)
NIP. 19760519 201604 2 001;
33. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Jenderal Achmad Yani;
34. Yayasan *Greeone Go Green*
(Lembaga Swadaya Masyarakat);
35. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa
Barat (Lembaga Swadaya Masyarakat);
36. Adryan Lukman Indira, S.T.
(Asisten Tenaga Ahli).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 660.1 / Kep. 368 - DLH / 2021

TANGGAL : 3 JUNI 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN
2021

URAIAN TUGAS TIM

- I. Pengarah : Memberikan arahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.
- II. Ketua : 1. Untuk penanggung jawab terhadap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Melakukan pengaturan, pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang ada di bawahnya;
3. Menyusun jadwal tahapan rencana kerja tim penyusun dalam penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan;
4. Mengawasi kerja seluruh anggota tim penyusun;
5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja anggota tim penyusun;
6. Melakukan fungsi kontrol agar pencapaian tujuan kegiatan optimal; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan tim penyusun kepada Plt. Wali Kota Cimahi.
- III. Sekretaris : 1. Menyusun format penyusunan dokumen yang akan digunakan;
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan bersama anggota; dan

3. Menyiapkan draf laporan yang akan disampaikan kepada Plt. Wali Kota Cimahi.

IV. Anggota

- :
1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Melaksanakan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi, baik dengan antar anggota, sekretaris atau ketua tim penyusun dalam rangka pencapaian hasil kegiatan;
 3. Melaksanakan kegiatan penyusunan secara bersama-sama dengan sekretaris dan anggota lainnya; dan
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim penyusun.





CURRICULUM VITAE

Personal Information

Full Name: Iwan JUWANA
Nationality: Indonesia
Date of Birth: 03-01-1977
Gender: Male

Contact Information

Home Address: Citra Asri Permai F12A, Jalan Gunung Batu Dalam, Cimahi
40514
Email: juwana@itenas.ac.id
Telephone: 022-7272215 ext. 144
Mobile: +62 813 2071 9427

Professional Information

Current Employer: National Institute of Technology (ITENAS), Bandung
Current Work Address: JL. PHH Mustafa 23 Bandung, 40123
Current Position: Lecturer

Education Profile

- Philosophy of Doctor (PhD), Water Resource Management, Victoria University – Australia, 2012
- Postgraduate Diploma, Environmental Management, Maastricht School of Management – the Netherlands, 2005
- Master, Environmental Management, University of New South Wales – Australia, 2004
- Bachelor, Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung, 2000

Work Experience

Lecturer, National Institute of Technology (ITENAS) Bandung, 2001 – now
Lecturer, Engineering Academy of Tirta Wiyata (AKATIRTA) Magelang,
2000 - 2001

Recent Publications and Reports (authored or co-authored)

- Juwana, I., N. Muttill, and B. J. C. Perera. "Uncertainty and sensitivity analysis of West Java Water Sustainability Index—A case study on Citarum catchment in Indonesia." *Ecological Indicators* 61 (2016): 170-178.
- Juwana, Iwan, Nitin Muttill, and B. J. C. Perera. "Application of West Java water sustainability index to Citarum catchment in West Java, Indonesia." *Water Science & Technology: Water Supply* 14.6 (2014): 1150-1159.

- Juwana, I., Perera, B., & Muttill, N. (2012). Indicator-based Water Sustainability Index: A Review. *Science of the Total Environment Journal*.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttill, N. (2010a). A water sustainability index for West Java – Part 1: developing the conceptual framework. *Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research*, 62(7), 1629-1640.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttill, N. (2010b). A water sustainability index for West Java – Part 2: refining the conceptual framework using Delphi technique. *Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research*, 62(7), 1641-1652.
- The Development of West Java Environmental Indicators, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2013, (A Report)
- Evaluation of the Implementation of Action Plans for Climate Change Mitigation and Adaptations, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2015 (A Report)
- Development of Action Plans for Climate Change Mitigation and Adaptations for 5 Pilot Cities in Indonesia, GIZ, 2013, (A Report)
- Contributor for book "Contribution Matters", *Association of Indonesian Students in Australia (PPIA)*, 2011
- Contributor for book "Catatan dari Negeri Selatan (A Note from the Land of South)", *Forum Lingkar Pena Australia, Canberra*, 2011
- Contributor for book "The Voice of Indonesian Future Leaders", *Association of Indonesian Students in Australia (PPIA)*, 2011
- Development of Hazardous Waste Manual for Cities in West Java, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2007 (A Report)

Grants Received and/or Participation in Research Projects

- Victoria University Scholarships, Postdoctoral, 2013-2015
- Australian Development Scholarships (AusAid), Doctorate Degree, 2008-2011
- Netherlands Fellowship Programme (NFP), Postgraduate Diplome Degree, 2005
- Australian Development Scholarships (AusAid), Master Degree, 2003-2004

Additional Professional Information

- Trainer, HSE Training – Pertamina Hulu Energi, 2013
- Lead Consultant, Greenhouse Gas Reduction from Waste Sector, GIZ – Indonesia, 2013
- Team Leader, West Java Environmental Indicators, West Java EPA – Indonesia, 2013
- Lead Auditor, OHSAS External Audit, SKK Migas – Indonesia, February, 2013 – March, 2013



- Reviewer for International Journal of Tropical Natural Sciences, 2012 - now
- Reviewer for International Journal: Water Resources Management, 2012 - now
- Reviewer for International Journal: Science of the Total Environment, 2012 – now
- Reviewer for International Journal of Cleaner Production, 2011 - now
- Reviewer for International Journal: Water Science and Technology, 2010 - now

Others

- Guest Speaker, Research Student Induction, *the Office for Postgraduate Research, Victoria University*, 2011

Major Accomplishments/Awards

- Best Lecturer, Faculty of Civil and Planning ITENAS, 2015
- Finalist Three Minute Thesis Competition – Victoria University, 2011
- Secomb Research Grant, Victoria University, 2010
- Australian Development Scholarships (AusAid), 2008-2011
- Netherlands Fellowship Programme (NFP), 2005
- Australian Development Scholarships (AusAid), 2003-2004

Training Courses

- Energy Auditing Course, SGS International, Jakarta, 25-28 May, 2013
- Helicopter Underwater Evacuation (HUET) and Sea Survival (SS) Training, Transafe, Jakarta, 31 Agustus, 2013
- Advanced EMS Auditor Course, SGS International, Jakarta, 4-8 July, 2005
- EMS Course, University of New South Wales, Sydney, 7-9 July, 2003
- OHSAS Lead Auditor Course, SGS International, Jakarta, 29 May - 2 June, 2006
- Environmental Auditing Course, University of New South Wales & QSA International, Sydney, 19-23 April, 2004
- HSE Course, University of New South Wales, Sydney, 2004
- Introduction to Health, Safety, Environment, Sucofindo, Bandung, 2005
- Health, Safety, Environment Management System Training, Itenas – Balai Hiperkes, Bandung, 2001

Professional or Community Membership/Affiliation

IATPI, Indonesian Environmental Engineering Association

MASTAN, Standardisation Community

HATHI, Indonesian Association of Hydraulic Engineers

Other relevant information that demonstrate your leadership potential and communication/ interpersonal skills



- Student Rover, Victoria University, 2010-2011
- Student Assistant, Victoria University, 2010-2011
- Head of Public Affair, VUISA, 2010-2011
- Candidate for President of Indonesian Student Association - Australia (PPIA), 2010-2011
- 20th World IMACS/MODSIM Congress, *Presenter*, December, 12-16, 2011, Perth, Australia
- Committee of International Conference, PPIA Australia, 2010
- 32nd Hydrology and Water Symposium, , *Presenter*, 30 November – 3 December 2009, Newcastle, Australia
- 18th World IMACS/MODSIM Congress, *Presenter*, July, 13-17, 2009, Cairns, Australia
- International Seminar On " Environmental Management, Infrastructure and Spatial Development " – *Presenter*, June, 18-19, 2009, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia
- International Seminar On "Climate Change Impacts On Water Resources And Coastal Management In Developing Countries – *Presenter*, May, 11-13, 2009, Sintesa Peninsula Hotel Manado, Manado, Indonesia
- International Conference on Green Technology 2009 15-17 April 2009 – *Presenter*, April, 15-17, 2009, Universitas Malahayati, Lampung, Indonesia
- Head of Department, Environmental Engineering, ITENAS, 2006-2007
- Head of Centre for Environmental Studies (PUSDAL), ITENAS, 2005-2006

DATA PRIBADI

1. **Nama** : Susanti Withaningsih
2. **Tempat/tanggal lahir** : Bandung, 19 Mei 1976
3. **Kebangsaan** : Indonesia
4. **Minat penelitian** : Keanekaragaman hayati, Biologi Lingkungan & Ilmu Keberlanjutan
5. **Alamat rumah** : Jl. Nagakusuma No. 3 Naganingrum Kota Baru Parahyangan
HP: 0812 2047 571
E-mail: susanti.withaningsih@unpad.ac.id & tuten_210@yahoo.com
- Alamat kantor** : Jalan Sekeloa Selatan No. 1
Tel. 022-2502176
Fax. 022-2504982

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2012 : Doktor (Dr), Konsentrasi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran
- 2002 : Magister Sains (M.Si), Ilmu Lingkungan – Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- 1999 : Sarjana Sains (S.Si), Jurusan Biologi - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

ANGGOTA KEPROFESIAN INTERNASIONAL/NASIONAL

Member of ARRCN (Asian Raptor Research Conservation Network)

Anggota Masyarakat Biodiversitas Indonesia (MBI)



BEASISWA

- a. Students Grant of Presenter on 7st Symposium on Asian Raptor Research Conservation Network 2012. Incheon, Korea Selatan.
- b. Penerima beasiswa penelitian melalui program P3SWOT (2011) dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementrian Pendidikan Nasional.
- c. Penerima Beasiswa Sandwich ke University of Tokyo (2010) dari Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan Nasional.
- d. Students Grant of Presenter on 6st Symposium on Asian Raptor Research Conservation Network 2010. Ulanbaatar, Mongolia.
- e. Penerima Beasiswa Unggulan (2008) untuk Program S3 dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementrian Pendidikan Nasional.
- f. Students Grant of Presenter on 1st Symposium on Asian Raptor Research Conservation Network 1998. Osaka, Japan

VISITING LECTURER/STAFF MOBILITY EXCHANGE

- a. Staff Mobility Exchange di Institute of International Social Studies, Erassmuss Rotterdam, Den Haag Belanda (Oktober 2017)
- b. Visiting Lecturer di Fakultas Bioresource , Mie University Jepang (Oktober s.d Desember 2016)

PENELITIAN

- Ketua tim Penelitian Hibah Kompetensi Internal Universitas Padjadjaran "Keanekaragaman Spesies Langka, Endemik, Terancam Punah dan Dilindungi DI Calon Lokasi Kawasan Geopark Pangandaran Jawa Barat" (2017)
- Anggota tim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) "Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem Pada Sistem Produksi Kopi : Hubungan Antara Keanekaragaman Serangga Penyerbuk, Produktivitas Kebun dan Kualitas Biji Kopi" (2017)
- Anggota tim ALG "Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem Pada Lahan Non Konservasi" (2017)
- Anggota tim ALG "*Sustainability Science in The Context Rural –Urban Linkage*"(2015-sekarang)
- Anggota tim peneliti Riset Utama (RITAMA) "Kondisi Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem Pada Lanskap Pertanian Tropika Basah" (2012)
- Anggota tim peneliti Hibah Strategis Nasional (STRANAS) : Analisis Spasial Keanekaragaman Burung Pemangsa Langka dan Terancam Punah : Landasan Empiris Bagi Penyusunan Kerangka Konseptual dan Arah Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2010 dan 2011)



PUBLIKASI ILMIAH

Irina A. Mustikasari, **Susanti Withaningsih**, Erri N Megantara, Teguh Husodo, Parikesit. Population and distribution of Sunda Porcupine (*Hystrix javanica* F. Cuvier, 1823) in designated area of Cisokan Hydropower, Wet Java, Indonesia. Biodiversitas 20(3) : 762-769.

Parikesit, **Susanti Withaningsih**, Irina. Mustikasari. 2018. Serangga Penyerbuk Pada Agroforestri Kopi. Buku Referensi. Unpad Press (ISBN:978-602-439-414-1)

Susanti Withaningsih, Parikesit, Astrini Ayundari, Ghitaswati Prameswari, Erri N Megantara and Teguh Husodo. 2018. Distribution and habitat of Javan slow loris (*Nycticebus javanicus* E. Goffroy, 1812) in non-conservation area. Proceeding AIP. (ISSN : 978-0-7354-1737-3)

Parikesit and **Susanti Withaningsih**. 2018. The need for sustainability science education in Indonesia. Proceeding AIP (ISSN : 978-0-7354-1737-3)

Parikesit, A. Paramita, S Withaningsih dan H Kasmara. Ecosystem Services in Coffee (*Coffea arabica* L.) Production System in The District of West Bandung, West Java: The Community Structure and Diversity of "Direct and Indirect" Pollinator Insects. Proceeding IoP

Faris Muladi, **Susanti Withaningsih**, Johan Iskandar, Parikesit. Keanekaragaman Jenis Burung REEPS (Rare, Endangered, Endemic, Protected Species) Di Calon Kawasan Geopark Pangandaran, Jawa Barat. 2018. Biotika :16(1) 70-76.

Susanti Withaningsih, Fathimah Noorahya, Erri N Megantara, Parikesit, Teguh Husodo. 2018. Nest existence and population of Pangolin (*Manis javanica* Dermates, 1822) at the designated area of Cisokan Hydropower, West Java, Indonesia.. Biodiversitas : 19 (1) 153-162.

Susanti Withaningsih, Clarisa Dity Andari, Parikesit, Nurullia Fitriani. 2018. The effect of understory plants on pollinators visitation in coffee plantations : case study of coffee plantations in West Bandung District, West Java, Indonesia. Biodiversitas : 19 (2) 559-567.

Zulfadhli Nasution, **Susanti Withaningsih**, Parikesit, Oekan S Abdoellah, Ari Ganjar. 2017. The Extent of Urban Farming Communities in Indonesia (Case studi : Bandung, Bogor and Jakarta). Innovation, Creativity and Development : Strategies for Inclusive & Sustainability. Bookchapter Unpad Press (ISBN : 978-602-439-399-1)



Susanti Withaningsih, Parikesit, Johan Iskandar, Firman Hadi. 2017. Studi Ekologi Lanskap Di Sekitar Sarang Burung Pemangsa di Kawasan Telaga Warna. Jurnal Nasional Prolife (ISSN : 2579-7557)

Susanti Withaningsih, Parikesit, Johan Iskandar, Erri N Megantara. 2017. Breeding behavior of different raptor species in human modified landscape. Biodiversitas : 18 (3) 1234-1242.

Susanti Withaningsih, Jimy Kalthar, Fajar Dwi Noviandri, AB Susanto. 2016. Dampak Kebijakan IUU Fishing (Moratorium Izin Usaha Penangkapan Ikan) Terhadap Penyerapan Lulusan SMK Kelautan dan Perikanan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Susanti Withaningsih, Zulfadhli Nasution, Parikesit, Oekan S Abdoellah, Ari Ganjar. Urban Farming in Indonesia and Its Relation to Food Sovereignty (Case Study : Bandung, Bogor and Jakarta). 2016. 14th Globelics International Conference. Universitas Padjadjaran, Bandung. Indonesia.

Oekan S Abdoellah, Parikesit, Satoru Okubo, **Susanti Withaningsih**, Kazuhiko Takeuchi, Kosuke Mizuno. 2015. Perceptions of Owner on The Roles and Future of Bamboo-Tree Gardens in the Agricultural Landscape of the Upper Citarum Basin, West Java-Indonesia. Agricultural Sciences 2015.

Johan Iskandar, Parikesit, **Susanti Withaningsih**, Satoru Okubo, Firman Hadi. 2012. Spatial analysis rare and threatened raptors diversity: empirical base for establishing conceptual plan and policy guidance in biodiversity conservation (Case Study Cibulao). Proceeding of 7th ARRCN Symposium on Asian Raptors. Raptor Migration and Conservation in Asia. Asian Raptor Research and Conservation Network & National Park Research Institute & Ornithological Society of Korea. Republic of Korea.

Johan Iskandar, Parikesit, **Susanti Withaningsih**, Satoru Okubo, Firman Hadi. 2011. Spatial analysis rare and threatened raptors diversity: empirical base for establishing conceptual plan and policy guidance in biodiversity conservation (Case Study Panaruban). Prosiding Seminar Biologi Nasional. Jurusan Biologi Fakultas Matematika Universitas Padjadjaran & Tokyo University Jepang. Bandung.

Susanti Withaningsih, Parikesit, Satoru Okubo, Firman Hadi, Johan Iskandar. 2010. Spatial analysis rare and threatened raptors diversity: empirical base for establishing conceptual plan and policy guidance in biodiversity conservation (Case Study Panaruban). Proceeding the of 6th International Conference on Asian Raptors. Asian Raptors Science and



Conservation for Present and Future. Asian Raptor Research and Conservation Network & Mongolian Ornithological Society & National University of Mongolia. Ulaanbaatar, Mongolia.

Zaini Rakhman, **Susanti Withaningsih**, Cece Sukanda. 2010. Habitat selection patterns of released eagles in Panaruban area, Mounth Tangkuban Perahu, West Java Indonesia. Proceeding the of 6th International Conference on Asian Raptors. Asian Raptors Science and Conservation for Present and Future. Asian Raptor Research and Conservation Network & Mongolian Ornithological Society & National University of Mongolia. Ulaanbaatar, Mongolia.

ANGGOTA TIM EDITOR

(2019) : 3rd International Conference on Sustainability Science : From Theory to Practices, Universitas Padjadjaran. IoP : Earth & Science.

(2015) : International Symposium on Sustainability Science Understanding Climate Change Phenomena for Human Well Being. Postgraduate Programme on Environmental Studies, Universitas Padjadjaran, 2015.

ISBN : 978-602-72141-0-1

Buku (2012) : Garuda, Mitos dan Faktanya di Indonesia. Penulis : Zaini Rakhman. Raptor Indonesia, 2012. ISBN : 978-602-19635-0-0

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Susanti Withaningsih, **Langkah Kecil Menuju Cita-Cita Besar** . Prosiding Lokakarya Sewindu Beasiswa Unggulan Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Akademik Mahasiswa. Kerjasama BBPKLN Sekjen Kemendikbud & Program Pascasarjana Departemen Agribisnis- Institut Pertanian Bogor. Februari, 2013.

Susanti Withaningsih, **Diklat Perencanaan Apa Yang Diperlukan ?**. Majalah Simpul Perencana volume 1, tahun 7, Januari 2010.

Susanti Withaningsih, **Mengapa Diklat Bappenas Kurang Diminati ?**. Majalah Simpul Perencana volume 10, tahun 5, Agustus 2008.



RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Program Magister Ilmu Lingkungan (PSMIL) Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2005 – sekarang)
 - Anggota tim seleksi mahasiswa baru PSMIL Pascasarjana Unpad (2005 - 2014)
 - Anggota tim seleksi mahasiswa PSMIL Pascasarjana Unpad perseorangan yang mendapatkan beasiswa dalam negeri (BU Kemendikbud, LPDP (Kemenkeu), Pusbindiklatren (Bappenas), BPPT, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan) maupun luar negeri (NESO & UT Belanda, Sakura & JST Jepang) (2005 – 2014)
 - Anggota tim seleksi mahasiswa PSMIL Pascasarjana Unpad kelas kerjasama PSMIL –Ps Unpad dengan Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud (2007 – 2014)
 - Anggota tim seleksi mahasiswa PSMIL Pascasarjana Unpad yang akan melanjutkan Program Double Degree ke Belanda & Jepang (2008 - 2014)
 - Anggota tim seleksi Pegawai Kemendikbud yang mendapatkan Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud (2012-2014)
 - Anggota tim pelaksanaan kegiatan Diklat Non Gelar ToT Green Economy, Green Economy dan Disaster Mitigation Plan (2011 - 2014)
 - Anggota tim teaching untuk matakuliah Dasar-Dasar Ekologi, Pembangunan dan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di PSMIL Pascasarjana Unpad (2011-2014)
 - Anggota tim penyelenggara International Symposium Sustainability Science : Understanding Climate Change Phenomena For Human Well Being kerjasama antara PSMIL-Ps Unpad, University of Twente Belanda, University of Florida (USA) , Mie University & United Nation University Jepang (2014)
 - Anggota tim penyusun Borang Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2014)
 - Anggota tim penyusun Borang Diklat Non Gelar ToT Green Economy, Green Economy & Disaster Mitigation Plan (2014)
 - Koordinator penyusunan proposal perijinan kerjasama Double Degree PSMIL Ps Unpad dengan ISS Erasmus Rotterdam Belanda (2014)
 - Koordinator penyusunan proposal perijinan kerjasama Double Degree PSMIL Ps Unpad dengan Bioresources Mie University Jepang (2014)
 - Anggota tim penyusun Borang Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2012) (Hasil Akreditasi A)
 - Anggota tim penyusunan Business Plan kerjasama PSMIL dengan ISS Erasmuss University Rotterdam Belanda (2012)
 - Anggota tim penyusunan Business Plan kerjasama PSMIL dengan MIE University Jepang (2012)



- Koordinator penyusunan proposal perijinan kerjasama Double Degree PSMIL Ps Unpad dengan MEEM Twente University Belanda (2011)
 - Anggota tim penyusunan Business Plan kerjasama PSMIL dengan University of Twente Belanda yang didanai oleh Pusbindiklatren Bappenas dan NESO Belanda (2011)
 - Anggota tim pembuatan kurikulum TOT Green Economy yang merupakan kerjasama Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (PSMIL) dengan Pusbindiklatren Bappenas & Temple University Jepang (2011)
 - Anggota tim penyusunan proposal pendirian Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran (2011)
 - Anggota tim penyusunan Kajian Pelaksanaan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri & Luar negeri BPKLN, Kemdikbud (2011)
 - Anggota tim penyusunan Business Plan kerjasama PSMIL dengan University of Twente Belanda yang didanai oleh Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud (2008)
 - Anggota tim penyusunan proposal kerjasama PSMIL dengan Kementrian Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan program Beasiswa Unggulan (2007)
 - Anggota tim penyusun Borang Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2006) (Hasil Akreditasi A)
 - Anggota tim pembuatan proposal kerjasama PSMIL dengan Bappenas untuk pelaksanaan program magister 13 bulan (2005)
- b. Staf Peneliti PPSDAL-LPPM Universitas Padjadjaran (2005-sekarang)
- Anggota tim perumus Renstra PPSDAL 2016-2020 (2016)
 - Anggota tim kegiatan Biodiversity Management Plan (BMP) UpperLower Cisokan Pumped Storage yang merupakan kerjasama PPSDAL dengan World Bank (2013-2014)
 - Anggota tim kegiatan revitalisasi pusat lingkungan hidup Unpad yang didanai oleh DIKTI bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup (2010)
 - Anggota tim kegiatan Ecotown yang merupakan kerjasama PPSDAL dengan UNEP (2009)
 - Anggota tim penyusunan panduan pemantauan pesisir berbasis masyarakat yang didanai oleh WWF (2008)
 - Anggota tim penyusunan modul diklat teknis substantif lingkungan hidup tingkat dasar yang didanai oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat (2007)
 - Membuat buku panduan penentuan spesies indikator yang didanai oleh Kementrian Lingkungan Hidup (2006)



- c. Tenaga ahli untuk kegiatan Penyusunan *Block Plan* Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cimahi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi (2017).
- d. Tenaga ahli untuk kegiatan Penyusunan Roadmap Penelitian Kawasan Geopark Ciletuh bekerjasama dengan BP3IPTEK Jabar (2017).
- e. Tenaga ahli untuk kegiatan Penyusunan RPPLH Kota Bekasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi. (2017).
- f. Konsultan *World Bank* untuk kegiatan "POPs Awareness and Capacity Building Post Ratification" kerjasama WB dan Kementerian Lingkungan Hidup (2009)
- g. Konsultan *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk kegiatan "National Capacity Self Assessment" kerjasama UNDP dan Kementerian Lingkungan Hidup (2003-2005).
- h. Tenaga ahli Bappenas untuk kegiatan pembuatan buku " Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung di Indonesia" (2002)

AKTIVITAS LAIN (Symposium, Seminar, Narasumber, Moderator)

- a. Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan DIKPLHD di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Sumedang Tahun 2019.
- b. 3rd International Conference on Sustainability Science , Bandung (Oktober, 2018)
- c. International Conference on Biodiversity, Bogor (September, 2018)
- d. Internasional Conference on Global Resource Conservation, Malang (Maret, 2018)
- e. Narasumber Seminar DIKPLHD (Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018.
- f. International Conference on Biodiversity, Bali (Desember, 2017)
- g. International Conference on Bioscience , Bogor (Agustus 2017)
- h. International Conference on Biodiversity, Bandung (Juni, 2017)
- i. Narasumber Seminar DIKPLHD (Dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017.
- j. International Conference on Biodiversity, Yogyakarta (Maret 2017)
- k. Seminar Nasional Penelitian dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Jakarta, 2016)
- l. 14th Globalic International Conference. Organized by Universitas Padjadjaran (Badung, Indonesia, 2016)
- m. 3rd JSPS/GRENE-EcoHealth joint International Symposium on Development of International Network on Health Risk Assessment in Urban Area. Organized by The University of Tokyo Japan (Bali, Indonesia 2016)



- n. The 4th International Urban Environment and Health in Asia Symposium. Organized by The University of Tokyo & Universitas Indonesia (Depok, Indonesia 2015)
- o. International Symposium on Sustainability Science : Understanding Climate Change Phenomena for Human Well Being , Bandung Indonesia (2014)
- p. Asian Workshop on Carbon Capture and Storage, Bandung Indonesia (2013)
- q. Asian Raptor Research Conservation Network, 7th Symposium , Incheon Korea Selatan (2012)
- r. Asian Raptor Research Conservation Network, 6th Symposium , Ulanbaatar, Mongolia (2010)
- s. Asian Raptor Research Conservation Network, 5th Symposium , Hanoi, Vietnam (2008)
- t. Asian Raptor Research Conservation Network, 4th Symposium , Penang Malaysia (2005)
- u. Internasional Seminar on National Capacity Self Assessment, Hanoi Vietnam (2005)
- v. International Seminar on Toward Rural & Urban Sustainable Community (Restucturing Human-Nature Interaction), Bandung Indonesia (2004)
- w. Asian Raptor Research Conservation Network, 2nd Symposium , Bandung Indonesia (2000)
- x. Asian Raptor Research Conservation Network, 1st Symposium , Osaka Japan (1998)

Biodata

Nama : Adryan Lukman Indira
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 4/12/1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Futsal IV no 10 Arcamanik, Kel.
Sukamiskin, Kota Bandung
Agama : Islam

Pendidikan Formal

2003 – 2009 : SD Patra Mandiri Cilacap
2009 – 2012 : SMP Negeri 1 Cilacap
2012 – 2015 : SMA Negeri 23 Bandung
2015 – 2020 : Institut Teknologi Nasional (ITENAS) – Jurusan Teknik Lingkungan

Pengalaman Organisasi

Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
2014-2017	HMTL (Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan) Itenas – Bandung	Anggota
2017-2018	HMTL (Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan) Itenas – Bandung	Wakil Departemen Media Komunikasi dan Informasi

Seminar dan Training

- 2015, Pelatihan Dasar Pengembangan Diri - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2015, Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi (*Pre University*) - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2016, Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2017, Pelatihan Dasar Pengembangan Kepemimpinan - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2018, Pelatihan Dasar Pengembangan Kewirausahaan - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2018, Volunter Hari Besar Lingkungan, Pemerintah Kota Bandung

Pengalaman Kerja

Waktu	Instansi	Jabatan
Juni-Juli 2018	PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap	Magang/Kerja Praktik



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641963, 6641931, Fax (022) 6654274 Website : www.cimahikota.go.id
Email : dinaslhcimahi@gmail.com Cimahi 40513 JAWA BARAT

Cimahi, 15 Maret 2021

Kepada :

Nomor : 005/673/DCH
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan

Yth. (daftar terlampir)
di-
Cimahi

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Sosialisasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi tahun 2021 secara daring yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Maret 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tautan : Aplikasi Zoom
Meeting ID : 928 9939 4981
Password : DIKPLHD21

Mengingat pentingnya acara ini diharapkan kehadiran tepat pada waktunya. Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui link <https://zfrmz.com/oNlgC1dhyMlhOxUkJ7Ce>. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Citra (082115590893).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannnya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19720520 199901 1 001

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 005/673/DLH.

Tanggal : 15 Maret 2021

Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
3. Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
5. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
6. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
7. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
9. Kepala Seksi Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
10. Kepala Sub Bagian Administrasi Sarana Perekonomian
11. Siti Yuniarti, SKM.
Analisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi
12. Eri Rukmana
Pengelola Keuangan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
13. Agus Rohendi, SE, M.Si.
Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi
14. Rudi Nugroho Catur Rangga, S.T., M.Si.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi
15. Deby Risyana, S.AP.
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
16. Alan Suryadi, SAP.
Analisis Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

17. Jodie Rushal, S. STP.
Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
18. Muhammad Andri Darmawan, S.IP.
Perencana pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi
19. Deni Hendra
Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
20. Nandang Sunjaya, S.Kom.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
21. Kadarisman Diputra, SP.
Analisis Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
22. Nani Widia, S.Si., M.Pd.
Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi
23. Muhamad Prabowo, S.T.
Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi
24. Tita Martiana, ST., ME.
Analisis Perencanaan Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
25. Anggia Yuningtyas, S.T., M.Pd.
Pelaksana Analisis Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
26. Cecep Deri Gusma, A.Md.
Analisis Sistem dan Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
27. Ita Ruswati, S.Si.T
Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
28. Dewita Rachman, ST
Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
29. Citra Sylvanite Choerunoer, ST
Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

30. Vidya Adhaninggar Dyah Lukitaningrum, ST
Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Penataan Hukum Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
31. Mohammad Natsir
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dinas Lingkungan
Hidup Kota Cimahi
32. Adryan Lukman Indira, ST (Asisten Tenaga Ahli)



SEKRETARIS DAERAH,
DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19720520 199901 1 001



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax. (022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat Sosialisasi Penyusunan DIKPLHD Tahun 2021
Hari/Tanggal	:	Rabu, 17 Maret 2021
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, Bagian Administrasi Perekonomian Kota Cimahi, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.

Hasil Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dilanjutkan dengan sosialisasi penyusunan DIKPLHD Tahun 2021.
2. Rapat dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, Bagian Administrasi Perekonomian Kota Cimahi, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.
3. Didasari oleh UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (2) "Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
4. Memperhatikan Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021, Tanggal 25 Februari 2021, Hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021.

5. Ketentuan penyusunan dokumen:

- Disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang melibatkan setidaknya OPD terkait, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat, dikukuhkan dengan **SK Kepala Daerah**.
- Penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metode DPSIR. **Terdiri dari minimal 3 isu prioritas dan maksimal 5 isu**
- Penyusunan DIKPLHD mulai disusun pada bulan Januari dan telah selesai paling lambat di **31 Juli 2021**

6. Kelengkapan Administrasi

- Tanda tangan Kepala Daerah pada Kata Pengantar
- Surat pernyataan Perumusan Isu Prioritas Secara Partisipatif
- SK Kepala Daerah untuk Tim Penyusun DIKPLHD
- Akademisi, LSM, masyarakat dan lainnya dalam SK Tim Penyusun
- Biodata Tim Penyusun Dokumen
- Data daerah berupa Peta Spasial
- Kelengkapan Dokumen Utama dan Ringkasan Eksekutif
- Ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengetahui Kepala Daerah

7. Pengisian dalam Sistem

- a. Tabel diisi lengkap berdasarkan pedoman yang disesuaikan dengan tipologi daerah
- b. Tabel diberi judul dengan urutan Tabel 1, Tabel 2. Tabel 61
- c. Kemutakhiran data yang digunakan adalah data terbaru
- d. Sumber data wajib dicantumkan dan berasal dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Data yang tidak bisa terisi karena perbedaan tipologi diisi *N/A (Not Available)*
- f. Data tidak dilakukan Pengukuran atau pengujian maka diisi dengan strip (-) dan diberi keterangan

8. Tahapan Penilaian

a. Tahapan Penapisan

Penilaian atas buku ringkasan eksekutif dan validitas, akurasi, serta kejelasan data menggunakan metode analisa pembobotan sederhana. Hasil penapisan ini digunakan untuk menentukan nominator yang akan memasuki tahapan selanjutnya

b. Tahapan Penilaian

Hasil dari penilaian buku utama ditetapkan nominator untuk setiap tingkatan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota

c. Tahapan Diskusi Panel

Seleksi tahap akhir dalam bentuk presentasi Kepala Daerah

9. Penjelasan penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi 2021 untuk tabel data alam yang perlu direkapitulasi dari tiap SKPD di Pemerintah Kota Cimahi untuk selanjutnya di upload melalui aplikasi SILHKD (www.dataalam.menlhk.go.id).
10. Terdapat perubahan jumlah tabel yang semula 65 tabel menjadi 61 tabel.
11. Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 yang dimaksud diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 31 Juli 2021 pukul 24.00 dengan mengirimkan copy dokumen melalui email nirwasitantra@menlhk.go.id.

DOKUMENTASI RAPAT

SOSIALISASI PENYUSUNAN DIKPLHD KOTA CIMAH I TAHUN 2021

17 Maret 2021



NOTULEN,

Citra Sylvanite Choerunoer, ST

Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 Report

Form: Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021

Nama	Perangkat Daerah	Phone	Email	Tanda Tangan	Acced Time	Re
Komme, Siringoringo	Seksi konservasi lingkungan CLH	081312320698	Kommessiringoringo@gmail.com		16-Mar-2021 20:57:21	
Nandang, Sunjaya	BPKAD	087838734915	nandangsunjaya82@gmail.com		16-Mar-2021 20:55:20	
Tita, Martiana	Bappeda	082118672525	titamet2014@gmail.com		16-Mar-2021 20:31:14	
Agus, Rohendi	DPMPTSP	081211621092	agusrohendi972@yahoo.com		16-Mar-2021 19:51:17	
Adi, Taufik	Disduk	082315038304	adisns@gmail.com		16-Mar-2021 18:49:20	
Nandang, Sunjaya	BPKAD	087838734915	nandangsunjaya82@gmail.com		16-Mar-2021 18:49:00	
Dani, Hendra	Badan Penanggulangan Daerah Kota Cimahi	082219333072	attyanamulanisa@gmail.com		16-Mar-2021 19:48:46	
Rud', Nugroho	Diskominfoarpus	08988825298	rrrud'99@gmail.com		16-Mar-2021 19:47:53	
Andre, Yuliandi	DLH Kota Cimahi	081221221144	andre.yuliandi@gmail.com		16-Mar-2021 19:47:45	
MUHAMAD, PRABOWO	DINAS PUPR	085724834828	bacharu.mokit@gmail.com		16-Mar-2021 19:46:09	
Christiana, Agussalim	DLH Kota Cimahi	082117981528	chris.agussalim@gmail.com		16-Mar-2021 19:45:45	
Diena, Fadiyah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	081805960171	diena.fadiyah@gmail.com		16-Mar-2021 19:39:54	
Adryan Lukman, Indira	As'ten Tenaga Ahli	082320593882	adryan.lukman@gmail.com		16-Mar-2021 19:31:44	
ITA, RUSWATI	DLH KOTA CIMAH	081910371307	ruswati_ita@yahoo.com		16-Mar-2021 19:30:55	
DEBY, RISYANA	DINAS PERHUBUNGAN	081221806080	dishubkotacimahi@gmail.com		16-Mar-2021 19:30:40	

Nama	Perangkat Daerah	Phone	Email	Tanda Tangan	Added Time	Re
jodie, rushal	Satpol PP Cimahi	081298557939	rushalrais@yahoo.com		16-Mar-2021 19:30:25	
Kadarisman, Diputra	DPKP	08112297013	Kanguday@gmail.com		16-Mar-2021 19:28:30	
MOHAMMAD, NATSIR	DLH	085793434404	mohammadristan@gmail.com		16-Mar-2021 19:28:14	
afif, nugroho	uptd lab.lingkungan dinas lingkungan hidup kota cimahi	081395171756	afifmegonugroho@gmail.com		16-Mar-2021 19:27:18	
NANI, WIDIA	DISDAGKOPERIN	081374879191	widia.nani@gmail.com		16-Mar-2021 19:26:59	
Citra, Sylvanite	DLH Cimahi	082115590893	chsylvanite@gmail.com		16-Mar-2021 19:26:51	
Siti, Yuniarti	Dinas Kesehatan	081380865702	kesling.kesjaorcimahi@gmail.com		16-Mar-2021 19:26:49	
Dewita, Rachman	Dinas Lingkungan Hidup Bidang PSLB3PK	08122074880	withrachman@gmail.com		16-Mar-2021 19:26:48	



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641931, 6641963
Fax (022) 6654274 Website : www.cimahikota.go.id
Email: dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

Cimahi, 2 Juli 2021

Nomor : 005/1928/DUH
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Peserta

Kepada :
Yth. **Daftar terlampir**
di-
TEMPAT


Sehubungan akan dilaksanakannya Fokus Grup Diskusi (FGD) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Fokus Grup Diskusi secara daring menggunakan *Video Conference* menggunakan aplikasi Zoom, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juli 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tautan : *Meeting ID* : 210 620 0109
Password : FGDLH21

Adapun link materi paparan serta saran, masukan dan tanggapan tertulis dapat diakses melalui tautan <http://bit.ly/MATERIFGD2021>. Untuk saran, masukan dan tanggapan tertulis mohon disampaikan selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ita (081910371307).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannnya diucapkan terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KOTA CIMAH I,


Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Cimahi
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

LAMPIRAN SURAT I

Nomor : 005 / 1928 / PLH

Tanggal : Juli 2021

Hal : Undangan Peserta

DAFTAR UNDANGAN

I. PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI


1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
10. Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja
13. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
14. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
17. Kepala Dinas Pendidikan
18. Inspektur
19. Direktur RSUD Cibabat
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
23. Camat Cimahi Utara
24. Camat Cimahi Tengah
25. Camat Cimahi Selatan
26. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
27. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
28. Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
29. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

30. Kepala UPTD Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
31. Kepala UPTD Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32. Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Pangan dan Pertanian
34. Kepala UPTD Technopark Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

II. LEMBAGA MASYARAKAT

1. Ketua LPM Kota Cimahi
2. Ketua TP PKK Kota Cimahi
3. Ketua Karang Taruna Kota Cimahi
4. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara
5. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Tengah
6. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan
7. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Utara
8. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Tengah
9. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Selatan
10. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Utara
11. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Tengah
12. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan

a.n. **SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KOTA CIMAH I,**


Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

LAMPIRAN SURAT II

Nomor : 005 / 1928 / DLH


Tanggal : Juli 2021

Hal : Undangan

SUSUNAN ACARA

No.	Waktu	Acara	Penanggung Jawab Acara
Jumat, 9 Juli 2021			
1.	08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
2.	09.00 - 09.05	Pembukaan	Panitia
	09.05 - 09.15	Laporan Pelaksanaan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
	09.15 - 09.30	Arahan Walikota Cimahi sekaligus Membuka Acara secara Resmi	Plt. Wali Kota Cimahi
	09.30 - 09.35	Pembacaan Doa	Panitia
3.	09.35 - 10.20	Paparan Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi 2021	<ul style="list-style-type: none">- KLHK- Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D- Moderator : Kepala Bidang Tata Lingkungan
	10.20 - 11.05	Diskusi (Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas)	<ul style="list-style-type: none">- Narasumber Pembahas- Peserta- Moderator : Kepala Bidang Tata Lingkungan
	11.05 - 11.20	Penyepakatan isu prioritas	Panitia
5.	11.20 - 11.30	Kesimpulan dan Penandatanganan Berita Acara	Kepala Bidang Tata Lingkungan
6.	11.30	Penutupan	Panitia

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KOTA CIMAH,


Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199601 1 001

BERITA ACARA

FOKUS GRUP DISKUSI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI
TAHUN 2021, Cimahi 9 Juli 2021


Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, melalui Video Conference, telah dilaksanakan Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2021, yang dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Pemangku Kepentingan yang terdiri dari: Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Filantropi serta Fasilitator/Narasumber Penyusunan DIKPLHD sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

Isu prioritas yang disepakati dan akan dibahas dalam dokumen:


1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Persampahan
3. Kualitas Udara
4. Tata Guna Lahan

Demikian Berita Acara Kegiatan Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 ini dibuat dan ditandatangani oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi dan pemangku kepentingan.


Lilik Setyaningsih, SH (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi)




Dr Titin Rohayatin (LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani)




Samsuel Maarif (APINDO)



Eva Yohana (Yayasan Gree One Go Green)



Yana (Kampung Adat Cireundeu)



Dikdik Ahmad Sodikin (Palang Merah Indonesia)





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax. (022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

NOTULEN

Kegiatan	:	FGD Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021
Hari/Tanggal	:	Jumat, 9 Juli 2021
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Video Conference
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Pusdatin KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Akademisi, GGG, APINDO, PMI, Perwakilan Kampung Adat Cireundeu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, Bagian Administrasi Perekonomian Kota Cimahi, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.

Hasil Rapat:

Kegiatan dibuka oleh Plt Wali Kota Cimahi. Letkol (Inf) Ngatiyana, kemudian dilanjutkan dengan paparan dan diskusi pembahasan Isu Prioritas pada penyusunan dokumen yang di moderatori oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, bapak Amy Pringgo Mardhani ST.,MT.

Kegiatan dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting Fokus Grup Diskusi secara daring menggunakan *Video Conference* menggunakan aplikasi Zoom, yang akan diselenggarakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	9 Juli 2021
Pukul	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tautan	:	Meeting ID : 210 620 0109 Password : FGDLH21

Adapun materi paparan dapat diakses melalui tautan bit.ly/MATERIFGD2021

Dasar Penyusunan Nirwasita Tantra (oleh Pak Mahfudz)

- a. Konferensi PBB (*The United Nations Conference on Environment and Development / UNCED*) di Rio Janeiro tahun 1992. Strategi pengelolaan lingkungan hidup (Agenda 21, BAB 40). Perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. UUD 1945 Pasal 28 F:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- c. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62:
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- d. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah (DIKPLHD) terdiri atas 2 buku yaitu Buku I yang berisi ringkasan eksekutif DIKPLHD maksimal 15 halaman dan Buku II berisikan laporan utama yang membahas hubungan kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya untuk memperbaiki lingkungan.

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR.

Pendekatan ini didasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan aktivitas manusia (faktor pemicu) yang menyebabkan adanya tekanan terhadap lingkungan dan kemungkinan mengubah kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.

Berdasarkan hasil Fokus Grup Diskusi dengan seluruh stakeholder diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Isu prioritas yang disepakati dan akan dibahas dalam dokumen:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Persampahan
3. Kualitas Udara
4. Tata Guna Lahan

Diagram DPSIR Isu Tata Guna Lahan



Diagram DPSIR Isu Kualitas Air



Meas: FGD Cemas 2021.pdf

D:\2.2\2020\H\3.20Kegiatan\20PKLM\4.200IKPLHD\0IKPLHD%202021\Surat%20FGD\Materi%20FGD%20Cmah%202021.pdf

ANALISIS DPSIR

Kualitas Udara

Diagram DPSIR Isu Kualitas Udara

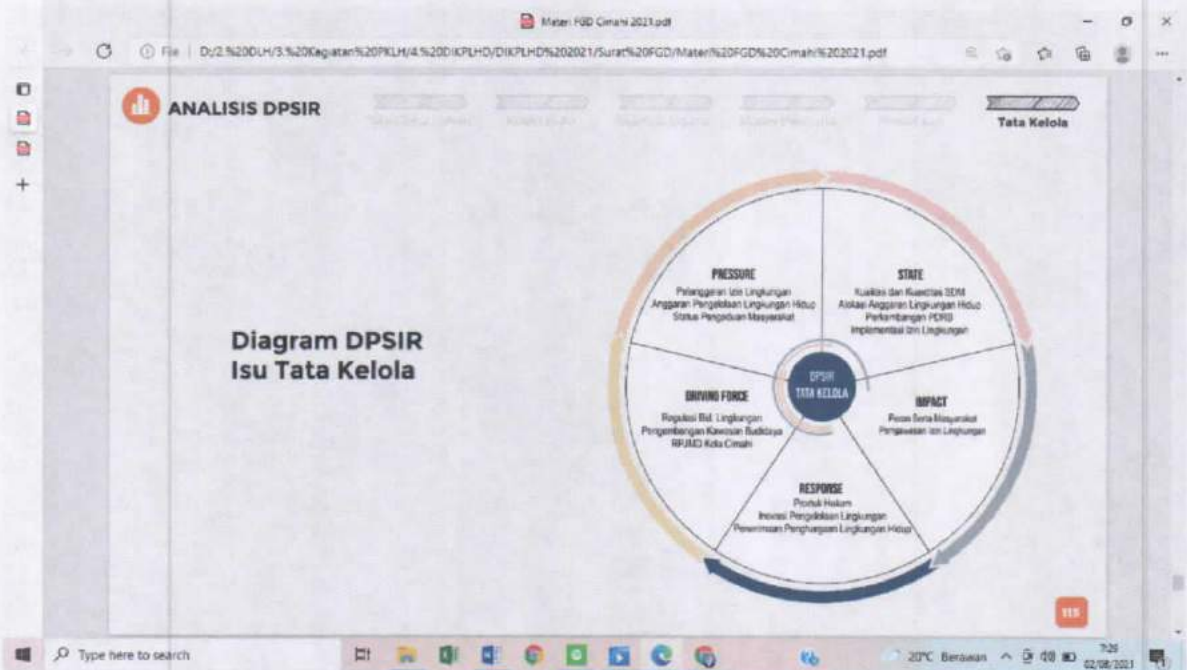
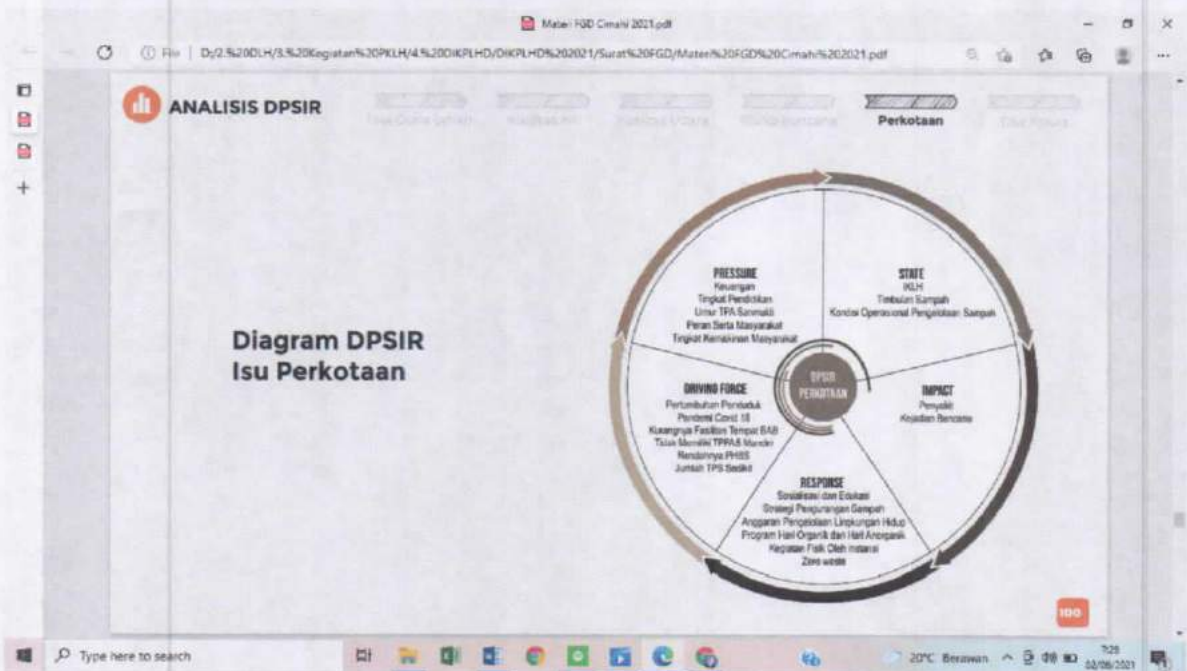
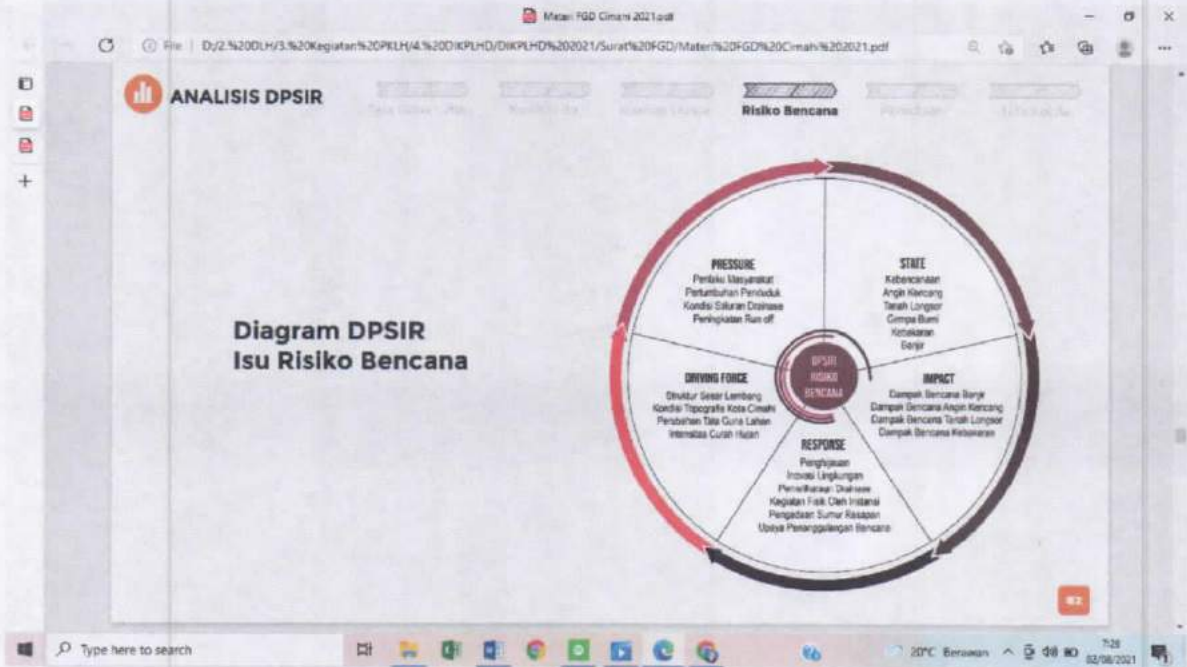
The diagram is a circular DPSIR model with a central hub labeled 'DPSIR KUALITAS UDARA'. It is divided into five segments:

- PRESSURE**: Emisi Bahan Bakar, Kemacetan.
- STATE**: Indeks Kualitas Udara, Kualitas Udara Ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara, Suhu Udara Rata-Rata.
- IMPACT**: Efek Rumah Kaca, Penyakit Yang Diderita Masyarakat.
- RESPONSE**: Penetapan Jalan, Revisi Tata Lintas, Ramp Check dan Uji Emisi, Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala.
- DRIVING FORCE**: Perluasan Pembudak, RPJMD Kota Cemas 2017-2020, Jumlah Kendaraan Bermotor.

 Arrows indicate a clockwise flow from Pressure to State, State to Impact, Impact to Response, Response to Driving Force, and Driving Force back to Pressure.

Type here to search

20°C Berauan 02/05/2021



Saran dan Masukan

APINDO

1. Menindak lanjuti/ merealisasikan niat Kementerian Perindustrian yg dinyatakan pd bulan Nop 2019 di Hotel Manson Pine, menjadikan pembinaan industri di cimahi menjadi pilot proyek kemenperin yg nantinya untuk percontohan secara Nasional.
2. Persiapan pilot proyek telah memadai, tinggal tindak lanjut memohonkan komitmen para stake holder utama.
3. Pilot Proyek berupa penerapan Cleaner Production di industri yg menjadi pilot proyek.
4. DIKPLHD sebagai acuan bersama utk menetapkan target kerja dan pendistribusian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab stakeholder terkait.

Manfaat dari Pilot Proyek tsb diatas:

1. Meningkatkan komitmen dan kerja sama antara stake holder terkait
2. Langkah2 dpt sistemik dan hasil kerja terukur
3. Dapat sebagai langkah inovasi pemkot Cimahi.

GGG (Eva Yohana)

Untuk dlh pemkot cimahi bagian pa ami dan seksi di pa andre bisa lebh mengaktifkan forum komunikasi das kota cimahi ini penting untuk ikut mengedukasi masyarakat bagaimana memelihara sungai yang kita miliki agar bisa berperan mengurangi limbah untuk seksi di pa komme bisa lebih mengaktifkan forum gnp kota cimahi untuk berperan menanam pohon di lahan kritis untuk seksi di pa ogi bisa lebih mencari solusi pasaran untuk sampah plastik multilayer dan mengajak partisipasi masyarakat dalam olah sampah organik yang saat ini sudah dijalankan dengan program cimahi barengras.

Susanti Withaningsih

Masukan

1. Konsistensi dalam penulisan data dan informasi yang digunakan berulang untuk beberapa isu. Mis. Data tataguna lahan yang digunakan pada "state" di isu tataguna lahan dengan data tata guna lahan di "pressure" resiko bencana.

2. Update kebijakan yang baru terutama terkait UU Cipta Kerja sub bab terkait lingkungan dan Peraturan Pemerintah serta PermenLHK. Sebagai contoh : Memasukkan UU Cipta Kerja No. 11/2020; PP No. 22/2021 Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup; PermenLHK No. 4, 5 dan 6 Tahun 2021.
3. Respon sebaiknya dijelaskan lebih rinci bagaimana teknis pelaksanaannya. Sebagai contoh : Dalam meningkatkan cadangan air di Cimahi apa yang akan dilakukan.
4. Pada saat menentukan state sebaiknya dilihat keterkaitan dengan impact dari isu. Sebagai contoh : Pada saat membahas tataguna lahan mungkin bukan data kenaikan suhu yang dimunculkan tetapi data bulan basah dan bulan kering serta curah hujan.

Saran

1. Pada saat penentuan prioritas sebaiknya dikaitkan dengan capaian SDGs sehingga prioritas pengelolaan lingkungan sekaligus menjadi prioritas capaian SDGs Pemerintah Cimahi
2. Dalam menentukan prioritas pertimbangkan "perubahan iklim" menjadi isu prioritas karena isu ini berpengaruh dan dipengaruhi oleh isu lainnya seperti tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan. Disamping itu isu "climate change" telah menjadi salah satu isu Global dalam World Economic Forum 2019 disamping isu "sustainability". Sehingga dengan memasukkan isu "perubahan iklim" menunjukkan Pemerintah Cimahi telah merespon isu global dalam pengelolaan lingkungannya.

Titin Rohayatin

Slide 14 Analisis DPSIR Tata Guna Lahan : Pressure point A, perlu ditinjau kembali sesuaikan dengan ke adaan Kota Cimahi Slide 15 Analisis DPSIR Tata Guna Lahan point D solusi dan stratgi secara kongkrit harus konsisten Slide 17 Analisis DPSIR Impact point B diberikan solusi secara kongkrit Slide 18 Analisis DPSIR Impack point C, sebutkan faktor-faktor penyebab dari perubahan iklim, dan sumber disesuaikan, tertulis tahun 2010. Point D gejala-gejalanya disebutkan secara kongkrit, E solusinya disebutkan secara kongkrit. Slide 20 Analisis DPSIR Tata Guna Lahan Response no 2. perlu ditinjau kembali ekowisata kampung Cireunde, sejak kepemimpinan Wali Kota Bapak Itoc Tohija Pemda Cimahi bekerjasama dengan Unjani dengan sebutan DEWITAPA (Desa Wisata Ketahanan Pangan) Slide 42 Analisis DPSIR Kualitas Air Pressure point C perlu dibedakan kebutuhan masyarakat dan industri Slide 44 Analisis DPSIR Kualitas Air IMPACT perlu konsistensi, solusi dan strateginya dimunculkan Slide 52 Analisis DPSIR Kualitas Udara STATE point B perhitungan ISPU seyogyanya menggunakan peraturan baru yaitu Permen Lingkungan

Hidup Nomor 14 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Kepmen LH no 45 tahun 1997 Slide 67 Analisis DPSIR tentang Resiko Bencana perhatikan UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada 3 (bencana Alam, Non Alam dan Sosial) Slide 67 ini bersinergi dg slide 89 poin F bicara Timbulan sampah masa pandemi. Sebaiknya dalam resiko bencana dimasukan masalah Pandemi, karena ini pun merupakan isue pemerintah pusat yang menamakan Bencana nasional. Slide 105 Driving Force point A, dasar hukum yang terkait perlu dimasukan misalnya ada penambahan UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permen LH no 14 Tahun 2020 tentang ISPU.

Demikian laporan Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI KEGIATAN FGD DIKPLHD KOTA CIMAHI TAHUN 2021
9 JULI 2021



NOTULEN,

Citra Sylvanite Choerunoer, ST

NAMA Report

Form: FGD DIKPLHD 2021

Name	SKPD / Instansi	Phone	Email	Signature
Andre, Yuliandi	DLH Kota Cimahi	081221221144	andre.yuliandi@gmail.com	
Titin, Rohayatin	Unjani	083820083070	titin.rsantoso@gmail.com	
Vidya, Adhaninggar	DLH Kota Cimahi	083176228648	Vidyaadhaninggar@gmail.com	
Hidayat Sadikin	DLH Kota Cimahi	081320641677	hidayatsaadikin124@gmail.com	
ASTUTI, SUMINAR	TP PKK KECAMATAN CIMAHI UTARA	089605207689	astutisuminar07@gmail.com	
Hadi, Yanto	DINAS LH CIMAHI	082266609883	hadinesta2@gmail.com	
Dr. Eka Purna, Yudha	UNPAD	08128811273	eka.purna.yudha@unpad.ac.id	
Ervin, Siahaan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	081294639303	siahaanervin@yahoo.com	
Eka, Putri	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	081294316182	ekaputri2597@gmail.com	
Fitria, Ivadanti	BLUD AM Kota Cimahi	081220967477	bludam.cimahi@gmail.com	
Syandi N Muharam, Syandi	Disdagkoperin Kota Cimahi	081220555894	syandhimuharam@gmail.com	
Citra, Sylvanite	DLH Cimahi	082115590893	chsylvanite@gmail.com	
Muhamad, Prabowo	DPUPR	085724834828	bacharu.mokit@gmail.com	
Nanda, Kusumahsari	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi		nandakusumahsari.nk@gmail.com	
Diena, Fadiah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	081805960171	diena.fadiah@gmail.com	
MUHAMMAD ANDRI, DARMAWAN	DINAS PENDIDIKAN	081220287234	ace51andrisip@gmail.com	
TRI LAKSMIHINDIAH	DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI	082121151579	trilaksmihindiah16@gmail.com	
Ifa, Yasyfina	Bappeda	08112249893	ifa.yasyfina@gmail.com	
yanti, retno	bpkad	081313027007	yri_fasya@yahoo.co.id	
Ita Ruswati	DLH Kota Cimahi	081910371307	ruswati_ita@yahoo.com	
Imas, Kamariah	DLH Provinsi Jawa Barat	08122439476	imaskamariah@gmail.com	
Deasy, Yuliquartiningsih	Kecamatan Cimahi Selatan	081224272280	yuliquartiningsih@gmail.com	

Name	SKPD / Instansi	Phone	Email	Signature
Purmiani Kosasih	Dinsosp2kbp3a	081214126694	purmianikosasih24@gmail.com	
Enden, Nurhasanah,S.Pd	Ketua TP PKK Kec.Cimahi Utara	082117892364	nurhasanahenden@gmail.com	
Susanti, Withaningsih	Universitas Padjadjaran	08122047571	susanti.withaningsih@unpad.ac.id	
imal hambali	DLH Cimahi	08986133599	hambali.imal@yahoo.com	
Ferina Temy, Setiarini	Bappeda	081572648029	inatemy@gmail.com	
Titin, Rohayatin	Unjani	083820083070	titin.rsantoso@gmail.com	
Drs. Asep Herman, Suyatno	SATPOLPPDAMKAR KOTA CIMAHI	085220458879	satpolcimahi2002@gmail.com	
Iwan, Juwana	Institut Teknologi Nasional Bandung	081320719427	juwana@itenas.ac.id	
Deby, Risyana	Dinas Perhubungan	081221806060	debyrisyana12@gmail.com	
ALFI, FAUZIAH	DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI	082128938767	alfifauziah82@gmail.com	
EVA, YOHANA	YAYASAN GREEONE GO GREEN	081214029391	evayohanaharun@gmail.com	
Syahnaniati, Putri	DLH Provinsi Jawa Barat	081321066771	psyahnaniati@yahoo.com	
Siti Rakhmah Tenrisui, Pakki	Dinas Pangan dan Pertanian	081809007676	tenrisui28@gmail.com	
Tita, Martiana	Bappeda Kota Cimahi	082118672525	titamet2014@gmail.com	
Tina, Restiana	DPMPSTSP Kota Cimahi	081320373704	tina.restiana@gmail.com	
Redi, Restian	DPMPSTSP Kota Cimahi	08122191280	rerest@yahoo.co.id	
U, WASTAMAN	KECAMATAN CIMAHI UTARA	081313557578	WASTAMANGT64@GMAIL.COM	
Eka, Purwana Syahroni	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi	082119216182	ekapurwanas@gmail.com	
dadan, subardan	DLH	08112201055	d2ns1012@gmail.com	
Dikdik, Ahmad sodikin	PMI Kota Cimahi	08122330236	dias72.das@gmail.com	
agus isharyanto	DLH	081214646043	ishagush@gmail.com	
Lufiandi	DLH Provinsi Jawa Barat	081214527174	lufiandi@gmail.com	
Siti, Yuniarti	Dinas Kesehatan	081380865702	yuni.ckb26@gmail.com	

Name	SKPD / Instansi	Phone	Email	Signature
Yana		085221357509	yyana6378@gmail.com	
ardhana, mulia	DLH Jabar	082117810056	nde.ardhana@gmail.com	
Ogi, Mardiyanto	DLH Kota Cimahi	0895354421177	omardy209@gmail.com	
afif, nugroho	UPTD Lab.Lingkungan DLH Kota Cimahi	081395171756	afifmeganugroho@gmail.com	
Ir Samsuel, Maarif	Apindo Cimahi	081214706130	samsuelm@yahoo.co.uk	



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

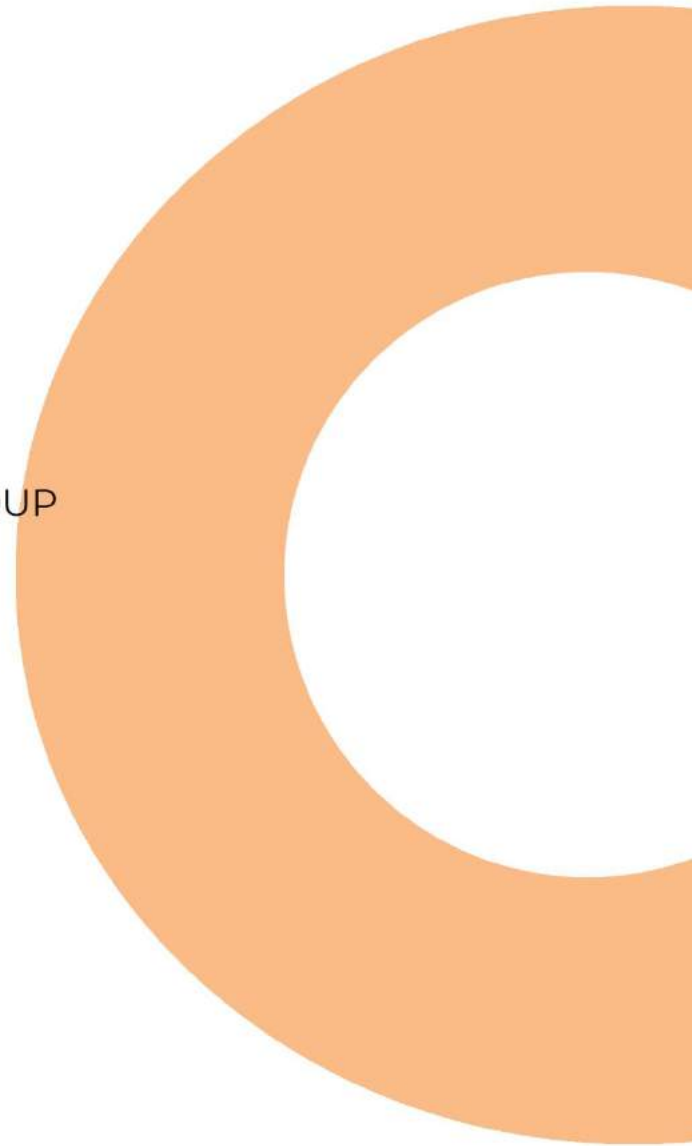
LAMPIRAN II

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021

- TABEL UTAMA



Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		N/A	0	0	0	0
		2. Kawasan Bergambut		N/A	0	0	0	0
		3. Kawasan Resapan Air		697,12	-	-	-	-
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		N/A	0	0	0	0
		2. Sempadan Sungai		258,26	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		N/A	0	0	0	0
		4. Ruang Terbuka Hijau		4,17	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		N/A	0	0	0	0
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya		N/A	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut		N/A	0	0	0	0
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		N/A	0	0	0	0
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		N/A	0	0	0	0
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		N/A	0	0	0	0
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		N/A	0	0	0	0
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		1.486,7	0	0	0	0
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		1.061,25	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		N/A	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Kawasan Rawan Banjir		181,72	0	0	0	0
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	N/A	0	0	0	0
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	1.242,97	0	0	0	0
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	N/A	0	0	0	0
		2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	N/A	0	0	0	0
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	N/A	0	0	0	0
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	N/A	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	N/A	0	0	0	0
			v. Kawasan Rawan Tsunami	N/A	0	0	0	0
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	N/A	0	0	0	0
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	N/A	0	0	0	0
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	N/A	0	0	0	0
			ii. Sempadan Mata Air	N/A	0	0	0	0
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfer		N/A	0	0	0	0
		2. Ramsar		N/A	0	0	0	0
		3. Taman Buru		N/A	0	0	0	0
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		N/A	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		N/A	0	0	0	0
		6. Terumbu Karang		N/A	0	0	0	0
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau BiotaLaut yang Dilindungi		N/A	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada data tersedia

Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2020

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Kota	Luas Lahan Non Pertanian	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Kering	Luas Lahan Perkebunan	Luas Lahan Hutan	Luas Lahan Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi	3.343,73	136	191	338,33	0	16,67

Keterangan:

1. Hutan yang dimaksud merupakan hutan kota di Kota Cimahi

Sumber: DUPR dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2020



Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	N/A
2	Hutan Lindung	N/A
3	Taman Nasional	N/A
4	Taman Wisata Alam	N/A
5	Taman Buru	N/A
6	Cagar Alam	N/A
7	Suaka Margasatwa	N/A
8	Taman Hutan Raya	N/A
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	N/A
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	N/A
3	Hutan Kota	237,12
4	Taman Hutan Raya	N/A
5	Taman Keanekaragaman Hayati	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukkan fungsi hutan tersebut di Kota Cimahi
2. Data diambil dari SK Walikota Tahun 2012 dan Profil Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cimahi Tahun 2016

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hewan menyusui	<i>Canis sp</i>	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Felis silvestris catus</i>	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Felis domestika</i>	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mus sp</i>	Mencit		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rattus rattus</i>	Tikus rumah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rattus argentiventer</i>	Tikus sawah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rattus norvegicus</i>	Tikus got		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rattus tiomanicus</i>	Tikus pohon		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bandicota indica</i>	Tikus wiwok		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Canis familiaris domesticus</i>	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing		Ya	Tidak	Ya
	<i>Lutrogale perspicillata</i>	Berang-berang/Wregul		Ya	Tidak	Ya
	<i>Cynopterus sphinx</i>	Codot		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Herpetes javanicus</i>	Garangan		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Pteropus vampyrus</i>	Kalong		Ya	Tidak	Ya
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang/Luwak		Ya	Tidak	Ya
	<i>Tupaia javanica</i>	Tupai		Ya	Ya	Tidak
	<i>Bos taurus</i>	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bosindicus</i>	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bos taurus</i>	Sapi perah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bubalus bubalis</i>	Kerbau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Equus ferus caballus</i>	Kuda		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Capra aegagrus hircus</i>	Kambing		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ovis aries</i>	Domba		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Sus scrofa demestica</i>	Babi		Tidak	Tidak	Ya
<i>Lepus sp</i>	Kelinci		Tidak	Tidak	Ya	
2. Burung	<i>Passer montanus</i>	Burung gereja		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acciptridae</i>	Alap-alap		Ya	Ya	Tidak
	<i>Falco severus</i>	Alap-alap macan		Ya	Ya	Tidak
	<i>Gallus gallus</i>	Ayam hutan hijau		Ya	Tidak	Ya
	<i>Gallus varius</i>	Ayam hutan merah		Ya	Tidak	Ya
	<i>Leptoptilius javanicus</i>	Bangau		Ya	Tidak	Ya
	<i>Psittacula alexandri</i>	Betet		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Ardeola speciosa</i>	Blekok sawah		Ya	Tidak	Ya
	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Bondol jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Lonchura punctulata</i>	Bondol peking		Ya	Tidak	Ya
	<i>Bubu sp</i>	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Otus migicus beccarii</i>	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Anthreptes malacensis</i>	Burung madu kelapa		Ya	Ya	Tidak
	<i>Nectarinia jugularis</i>	Burung madu Sriganti		Ya	Ya	Tidak
	<i>Centropus bengalensis</i>	Burung but-but		Ya	Tidak	Ya
	<i>Dicaeum trochileum</i>	Cabe Jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Larus sp</i>	Camar		Ya	Tidak	Ya
	<i>Halcyon cyanoventris</i>	Cekakak Jawa		Ya	Ya	Tidak
	<i>Phylloscopus borealis</i>	Cikrak Kutub		Ya	Tidak	Ya
	<i>Orthotomus ruficeps</i>	Cinene Kelabu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Orthotomus sutorius</i>	Cinene Pisang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Aegithina tiphia</i>	Cipoh Kacat		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Cucak Kutilang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Cucak rowo		Ya	Tidak	Ya
	<i>Streptopelia bitorquata</i>	Deruk jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Accipiter soloensis</i>	Elang Alap Cina		Ya	Tidak	Ya
	<i>Spilornis cheela</i>	Elang Ular Bido		Ya	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Lonchura maja</i>	Emprit haji		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Corvus enca</i>	Gagak hutan		Ya	Ya	Tidak
	<i>Pada oryzivora</i>	Gelatik		Ya	Tidak	Ya
	<i>Parus major</i>	Gelatik batu kelabu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Sturnus contra</i>	Jalak suren		Ya	Tidak	Ya
	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih		Ya	Ya	Tidak
	<i>Acridotherus javanicus</i>	Jalak kerbau		Ya	Ya	Tidak
	<i>Leucopsar Rothschildii</i>	Jalak Bali		Ya	Ya	Tidak
	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Kacamata biasa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata jawa (Pleci)		Ya	Tidak	Ya
	<i>Copsychus sechellarum</i>	Kacer jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Cuculus saturatus</i>	Kangkak ranting		Ya	Tidak	Ya
	<i>Hypothymis azurea</i>	Kehicap ranting		Ya	Tidak	Ya
	<i>Oriolus chinensis</i>	Kepodang kuduk hitam		Ya	Tidak	Ya
	<i>Serinus canaria</i>	Kenari		Ya	Tidak	Ya
	<i>Bulbucus ibis</i>	Kuntul		Ya	Ya	Tidak
	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Kutilang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Hirundo rustica</i>	Layang layang api		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Merbah cerucuk		Ya	Tidak	Ya
	<i>Columbia lifia</i>	Merpati		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Copsychus malabaricus</i>	Murai batu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Melopsittacus endulatus</i>	Parkit		Ya	Tidak	Ya
	<i>Malacocincla sepiarium</i>	Pelanduk semak		Ya	Tidak	Ya
	<i>Lanius sp</i>	Pentet		Ya	Tidak	Ya
	<i>Prinia polychroa</i>	Perenjak coklat		Ya	Tidak	Ya
	<i>Prinia inornata</i>	Perenjak padi		Ya	Tidak	Ya
	<i>Prinia familiaris</i>	Perenjak jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Geopelia striata</i>	Perkutut		Ya	Tidak	Ya
	<i>Alcedo atthis</i>	Prenjak		Ya	Tidak	Ya
	<i>Streptopelia bitorquata</i>	Puter		Ya	Tidak	Ya
	<i>Turnix suscifator</i>	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Phyloscocus moratus</i>	Raja udang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Sepah kecil		Ya	Tidak	Ya
	<i>Tyto alba</i>	Serak Jawa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Anthereptes malacensis</i>	Sesap madu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Sikep madu asia		Ya	Tidak	Ya
	<i>Hirundo rustica guturalis</i>	Sriti		Ya	Tidak	Ya
	<i>Streptopelia chinensis</i>	Tekukur biasa		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Terucuk		Ya	Tidak	Ya
	<i>Colocalia esculenta</i>	Walet sapi		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Collocalia linchi</i>	Walet linchi		Ya	Tidak	Ya
	<i>Gallus gallus domesticus</i>	Ayam Buras		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Ras Petelur		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Ras Pedaging		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Anas sp</i>	Itik		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Turnix suscitator</i>	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Meleagris gallopavo</i>	Kalkun		Tidak	Tidak	Ya
3. Reptil	<i>Naja sputatrix</i>	Ular cobra/sendok		Ya	Tidak	Ya
	<i>Trimeresurus albolabris</i>	Ular hijau		Ya	Tidak	Ya
	<i>Acerochordus granulatas</i>	Ular kadut		Ya	Tidak	Ya
	<i>Xenopeltis unicolor</i>	Ular pelangi		Ya	Tidak	Ya
	<i>Python reticulatus</i>	Ular sawah		Ya	Tidak	Ya
	<i>Bungarus javanicus</i>	Ular welang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Rhamphotyphlops braminus</i>	Ular kawat		Ya	Tidak	Ya
	<i>Python reticulatus</i>	Ular sanca kembang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Morelia viridis</i>	Ular sanca hijau.		Ya	Tidak	Ya
	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular kadut belang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Ahaetulla prasina</i>	Ular gadung		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Boiga dendrophila</i>	Ular cincin mas		Ya	Tidak	Ya
	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Ular tambang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Ptyas korros</i>	Ular tikus / ular jali		Ya	Tidak	Ya
	<i>Sibynophis geminatus</i>	Ular serasah		Ya	Tidak	Ya
	<i>Caloselasma rhodostoma</i>	Ular tanah		Ya	Tidak	Ya
	<i>Bungarus canddius</i>	Ular weling		Ya	Tidak	Ya
	<i>Calotes cristatellus</i>	Bunglon		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cosymbotus platyuru</i>	Cecak tembok		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Cecak kayu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gehyra mutilata</i>	Cecak gula		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyrtodactylus marmoratus</i>	Cecak batu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mabuya multifasciata</i>	Kadal kebun		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Takydromus sexlineatus</i>	Kadal rumput		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gecko gecko</i>	Tokek rumah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gecko monarchus</i>	Tokek berbintik		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cerberus rynchops</i>	Ular air		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Varanus salvator</i>	Biawak		Ya	Tidak	Ya
	<i>Chelydra serpentina</i>	Kura-kura		Ya	Tidak	Ya
4. Amphibi	<i>Bufo asper</i>	Bangkong sungai		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Microhyla achatina</i>	Precil jawa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana limnocharis</i>	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana cancrivora</i>	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana erythraea</i>	Katak kolam		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana macrodon</i>	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana chalconota</i>	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana macrodon</i>	Katak hijau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana limnocharis</i>	Katak rawa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rana cancrivora</i>	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
5. Ikan	<i>Monopterus albus</i>	Belut		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Channa sp</i>	Ikan gabus		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Aplocheilus panchax</i>	Ikan kepala timah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Poecilia reticulata</i>	Ikan seribu		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Barbodes gonionotus</i>	Ikan Tawes		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Clarias batrachus</i>	Lele lokal		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oshpronemus gouramy</i>	Gurame		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	Grass carp		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyprinus carpio</i>	Ikan Emas		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Clarias batrachus</i>	Lele		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oreochromis mossambica</i>	Mujair		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oreochromis nilotica</i>	Nila		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pangasius sp</i>	Patin		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Macrobrachium pilimanus</i>	Udang galah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Litopenacus sp</i>	Udang vename		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Xiphophorus maculatus platy</i>	Plati		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Poecillia reticulata guppy</i>	Guppy		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Poecilia latipinna saifin molly</i>	Molly		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Carassius auratus</i>	Koki		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyprinus carpio</i>	Koi		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Betta splendens</i>	Ikan cupang		Tidak	Tidak	Ya
6. Keong	<i>Achatina fulica</i>	Bekicot		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Limnaea javanica</i>	Keong sawah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pomacea canaliculata</i>	Keong mas		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Helix sp</i>	Siput kebun		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Brotia testudinaria</i>	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lymnaea sp</i>	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hydrometridae</i>	Pengukur air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Corbicula javanica</i>	Remis		Tidak	Tidak	Ya
7. Serangga	<i>Oxya japonica</i>	Belalang hijau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Valanga nigricormis</i>	Belalang kayu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Montis religiosa</i>	Belalang sembah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Periplaneta australasiae</i>	Kecoa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Neurothemis sp</i>	Capung air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bombyx mori</i>	Ngengat (ulat sutera)		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Antheraca</i>	Ngengat		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Dundabia manifera</i>	Tonggeret		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Nilaparvata lugens</i>	Wereng coklat		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Leptocorisa oratorius</i>	Walang sangit		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oryctes rhinoceros</i>	Kumbang tanduk		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Diconocoris hewetti</i>	Kepik		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Photuris lucicrescens</i>	Kunang-kunang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Apis cerana</i>	Lebah madu/lokal		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Monomorium pharaonis</i>	Semut pharaoh		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Solenopsis invicta</i>	Semut api		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oecophylla saragillina</i>	Semut rangrang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oxyopes javanus</i>	Laba-laba		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Androctonus sp</i>	Kalajengking		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Musca domestica</i>	Lalat rumah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Culex</i>	Nyamuk		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Julus virgatus</i>	Kaki seribu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Scoloppdridae</i>	Kelabang		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Gryllotalpa sp</i>	Jengkerik		Tidak	Tidak	Ya
8. Tumbuh- tumbuhan	<i>Fragaria vesca</i>	Arben		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Crinum asiaticum L.</i>	Bakung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Henslowia frutescens champ</i>	Benalu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bauhinia purpurea</i>	Bunga kupu-kupu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Allmania nodiflora R.Br.</i>	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Borreria repens D.C.</i>	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyperus aristatus Rottr</i>	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyperus cyperinus V.S</i>	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ipomoea carssicaulis Rob</i>	Krangkongan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Portulaca olerarea L</i>	Krokot		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hibiscus rosasinensis</i>	Kembang Sepatu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Phyllanthus acidus</i>	Maja		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Euphorbia hirta</i>	Patikan kebo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Leucaena leucephala</i>	Petai cina		Tidak	Tidak	Ya
<i>Buchanania arborescens</i>	Popohan		Tidak	Tidak	Ya	

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Mimosa pudica</i>	Putri malu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Euphorbia pulcherrima Willd.</i>	Racunan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Panicum repens</i>	Rumput balungan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Paspalum vaginatum Sw.</i>	Rumput asinan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Corchorus acutangulus lamk.</i>	Rumput bayam		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyperus rotundus L</i>	Rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Heteropogon contortus</i>	Rumput tombak		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Eragrostis uniolooides</i>	Rumput udang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Eleusine indica L.gaertn</i>	Suket tulangan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cassytha filiformis L</i>	Taliputri		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hanguana malayana</i>	Bakung air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cyanotis cristata</i>	Eceng		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Eichhornia crassipes</i>	Eceng gondok		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hydrilla verticillata</i>	Ganggang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ficus septica burm.f</i>	Awar-awar		Ya	Tidak	Ya
	<i>Gigantolochloa apus kurz</i>	Bambu apus		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Bambusa spinosa</i>	Bambu duri		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bambusa vulgaris</i>	Bambu gading		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ficus benyamina</i>	Beringin		Ya	Tidak	Ya
	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Cemara laut/udang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Casuarina junghuniana</i>	Cemara gunung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Durio kutejensis</i>	Durian hutan		Ya	Tidak	Ya
	<i>Ficus glomerata roxb.</i>	Elo		Ya	Tidak	Ya
	<i>Delonix regia</i>	Flamboyan		Ya	Tidak	Ya
	<i>Dioscorea composita</i>	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Glyricidia sepium</i>	Gamal		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Inocarpus edulis</i>	Gayam		Ya	Tidak	Ya
	<i>Pithecelobium jiringa</i>	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Datura metel</i>	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Moringa oleifera lam</i>	Kelor		Ya	Tidak	Ya
	<i>Murraya paniculata</i>	Kemuning		Ya	Tidak	Ya
	<i>Terminalia catapa</i>	Ketapang		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Morinda citrifolia</i>	Mengkudu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Garcinia dulcis</i>	Mundu		Ya	Tidak	Ya
	<i>Morus alba</i>	Murbei		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mesua nagassarium</i>	Nagasari		Ya	Tidak	Ya
	<i>Cycas rumphi</i>	Pakis haji		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ceiba petrandia</i>	Randu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bombaxma labaricum</i>	Randu Alas		Ya	Tidak	Ya
	<i>Manilkara kauki</i>	Sawo kecil		Ya	Tidak	Ya
	<i>Achras zapota var</i>	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Caesalpinia sappan</i>	Secang		Ya	Tidak	Ya
	<i>Sesbania grandiflora</i>	Turi		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Waru		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Avicennia sp</i>	Api-api		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Rhizophora sp</i>	Bakau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Limnocharis flava</i>	Genjer		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ipomoea aquatica</i>	Kangkung air		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Nypa fruticans Wurmb</i>	Nipah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Nasturtium officinale</i>	Selada air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pistia stratiotes</i>	Selada air/kapu-kapu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Bruguiera sp</i>	Tanjang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Nymphoides indica</i>	Teratai		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Marantha arundacea</i>	Garut		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dioscorea hispida dennst</i>	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Canna edulis</i>	Ganyong		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dioscorea aculeata</i>	Gembili		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dioscorea bulbifera L</i>	Gembolo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Zea mays</i>	Jagung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Kacang hijau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Arachis hypogea</i>	Kacang tanah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Glicyne max</i>	Kedelai		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Xanthosoma atrovirens</i>	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oryza sativa</i>	Padi		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Oryza glutinosa</i>	Padi ketan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ipomoea batatas</i>	Ubi Jalar		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Manihot utilisima</i>	Ubi kayu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Colocasia esculenta schott</i>	Talas bogor		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Zea Mays</i>	Jagung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pandanus sp</i>	Pandan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Saccarum officinarum</i>	Tebu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tembakau rakyat		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Persea americana</i>	Alpoket		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Vitis vinifera L.</i>	Anggur		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Averrhoa carambola</i>	Belimbing manis		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Averrhoa bilimbi</i>	Belimbing wuluh		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cucumis melo var canta</i>	Blewah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hylocereus undatus</i>	Buah Naga		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Artocarpus champeden</i>	Cempedak		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Phyllanthus acidus</i>	Cermai		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Punica granatum</i>	Delima		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lansium domesticum</i>	Duku		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Durio zibethinus</i>	Durian		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Syzygium aqueum</i>	Jambu air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Psidium guajava L</i>	Jambu biji		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Syzygium jambos</i>	Jambu mawar		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Eugenia densiflora</i>	Jambu klampok		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Syzygium malaccense</i>	Jambu bol/darsana		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Anacardium occidentale</i>	Jambu mete		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Citrus nobilis</i>	Jeruk siem		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Citrus aurantifolia</i>	Jeruk nipis		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Spondias dulcis</i>	Kedondong		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dimocarpus longan</i>	Kelengkeng		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cucumis sativus L</i>	Ketimum		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dispyros kaki L</i>	Kesemek		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Artocarpus altilis</i>	Kluwih		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Lansium equem (Jacq) Miq</i>	Kokosan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mangifera odorata</i>	Kweni		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mangifera indica L</i>	Mangga		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gracinia mangostana</i>	Manggis		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Passiflora edulis</i>	Markisa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pometia pinnata</i>	Matoa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Passiflora edulio</i>	Markisa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cucumis melo</i>	Melon		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Annona reticulata</i>	Mulwo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Garcinia dulcis</i>	Mundu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Morus alba</i>	Murbei		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Artocarpus communis</i>	Nangka		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ananas comosus</i>	Nanas		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Nephelium lappaceum</i>	Rambutan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Carica papaya Linn</i>	Pepaya		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Musa sp</i>	Pisang		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Salaca edulis</i>	Salak		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Manilkara zapota</i>	Sawo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Achras zapota L</i>	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Citrus vulgaris</i>	Semangka		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Annona muricata</i>	Sirsat		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Annona squamosa</i>	Sirkaya		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Borassus sp</i>	Siwalan		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Fragaria vesca</i>	Stroberi		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Artocarpus commu nis forst</i>	Sukun		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Amaranthus caudatus rumph</i>	Bayam		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Allium cepa L.</i>	Bawang merah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Capsicum annum L.</i>	Cabe merah		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Capsicum trutescens L.</i>	Cabe rawit		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Luffa acutangula</i>	Gambas		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pithecellobium jiringa Prain</i>	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Auricularia auriculatia</i>	Jamur kuping		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Volvariella volvacea</i>	Jamur merang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lentinus edodes</i>	Jamur shitake		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Jamur tiram		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Citrus hystrix</i>	Jeruk purut		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Vigna sinensis</i>	Kacang panjang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cajanus cajan</i>	Kacang gude		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ipomoea aquatica forsk</i>	Kangkung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dolichos lablab</i>	Kara		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Xanthosoma violaceum schoot</i>	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lagenaria leucantha</i>	Labu air		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cucurbita mocshata Duch</i>	Labu parang/kuning		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Sechium edule</i>	Labu siem		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gnetum gnemon L</i>	Melinjo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Momordica charantia</i>	Pare		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Trichosanthes cucumerina</i>	Pare ulo		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Brassica chinensis</i>	Petsai/caisim		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Brassica campestris</i>	Sawi hijau		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Brassica juncea</i>	Sawi putih		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Apium graveolens L</i>	Seledri		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Solanum melongena L.</i>	Terong		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Lycopersicon esculente</i>	Tomat		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Sesbania grandiflora pers</i>	Turi		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Helianthus annus</i>	Bunga matahari		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Clerodendron paniculatum</i>	Bunga pagoda		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Mirabilis jalapa</i>	Bunga pukul empat		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hibiscus rosa sinensis</i>	Bunga sepatu		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Kalanchoe blossfeldiana</i>	Cocor bebek		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dracaena sp</i>	Dracaena		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Euphorbia sp</i>	Euphorbia		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dracaena fragrans</i>	Hanjuang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Coleus sp</i>	Iler		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Celosia cristata L</i>	Jengger ayam		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Gloriosa superba L</i>	Kembang sunsang		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Datura metel L.</i>	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Coriandrum sativum L.</i>	Ketumbar		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Strobilanthes crispus bl.</i>	Keji beling		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Cocos nicifera L.</i>	Kelapa		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Piper cubeba l.f</i>	Kemukus		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Murraya paniculata</i>	Kemuning		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acacia sp</i>	Akasia		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pterocarpus indica willd</i>	Angsana		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Antocephalus cadamba</i>	Jabon		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Tectona grandis L.</i>	Jati		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Swietenia mahagoni jacq</i>	Mahoni		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Albizia falcataria</i>	Sengon		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Dalbergia pinnata</i>	Sono keling		Tidak	Tidak	Ya
	<i>Pithecolobium saman benth</i>	Trembesi		Tidak	Tidak	Ya

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2019



Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat data

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cimahi Utara	N/A	84,95	N/A	439,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah	N/A	3,43	N/A	2,97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cimahi Selatan	N/A	33,48	N/A	174,66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Angka (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Di Kota Cimahi tidak terdapat kawasan hutan sehingga tidak terdapat lahan kritis atau sangat kritis di kawasan hutan
3. Data berdasarkan SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2019

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 20 cm	0,2 – 1,3	N/A	N/A
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	N/A	N/A
3	50 - <100 cm	4,0 - < 9	N/A	N/A
4	100 – 150 cm	9,0 – 12	N/A	N/A
5	> 150 cm	> 12	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukannya pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Parameter	Satuan	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketebalan solum	cm	<20	0-60cm	Tidak ada yang melebihi
2	Kebatuan permukaan	%	>40	-	-
3	Komposisi fraksi	%koloid	<18	-	-
4	Komposisi fraksi	%pasir	>80	-	-
5	Berat isi	g/cm ³	>1,4	0,91-1,25	Tidak ada yang melebihi
6	Porositas	%	<30 ; >70	52,88-63	Tidak ada yang melebihi
7	Permeabilitas	cm/jam	<0,7 ; >8,0	7,39-31,23	8 Lokasi melebihi
8	pH	-	<4,5 ; <8,5	5,28-6,90	Tidak ada yang melebihi
9	DHL	mS/m	>4,0	0,067-0,201	Tidak ada yang melebihi
10	Redoks	mV	<200	-13,1-15,8	9 Lokasi melebihi
11	Jumlah mikroba	cfu/g tanah	<10 ²	(0,54-1,6)) x 10 ¹⁰	Tidak ada yang melebihi

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak ada dilakukannya pengukuran
2. Pengukuran dilakukan di 9 lokasi berbeda

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Subsidence Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10%/5 tahun untuk gambut < 3 m	N/A	N/A
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	N/A	N/A
3	Kedalaman air tanah dangkal	> 25 cm	N/A	N/A

Keterangan :

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kerusakan di lahan yang dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2020

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan mangrove di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan padang lamun di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan laut dan terumbu karang di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-13. Perubahan Lahan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Baru (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	2.120,05	2.363,23
2	Industri	494,43	-
3	Tanah Kering	198,64	191
4	Perkebunan	-	67,35
5	Semak Belukar	-	83,14
6	Tanah Kosong	-	42,92
7	Perairan/Kolam	16,69	25,05
8	Lainnya (Sebutkan)	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2020

Tabel-14. Pemanfaatan Lahan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang	0	Rakyat	N/A	Di Kota Cimahi tidak terdapat Kawasan pertambangan
2	Perkebunan	0	Rakyat	N/A	Tidak ada lahan yang diusahakan untuk tanaman perkebunan
3	Pertanian	136	Rakyat	136	Pertanian berupa sawah yang dikelola masyarakat secara pribadi
4	Pemanfaatan Lahan	0	Rakyat	N/A	Di Kota Cimahi tidak terdapat Kawasan Hutan selain hutan Kota

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Luas dinyatakan dalam satuan Ha

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2020



**Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan di Kota Cimahi tidak terdapat kawasan peruntukan yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Utara	0,15	0,01806	401	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah		0,09246	1.541	N/A	N/A	N/A
3	Cimahi Selatan		0,02424	404	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Permen PU No. 5 Tahun 2008: Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan
2. Dokumen kontrak pengadaan tanaman
3. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukkan tersebut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kota/Kecamatan	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat lahan gambut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-18. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kota/Kecamatan	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat jenis usaha pemanfaatan kayu yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



**Tabel-19. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Kota/Kecamatan	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Ciahi	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat jenis usaha yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

**Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Nama Spesies	Bagian-Bagian Yang Diperdagangkan	Status Menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat perdagangan satwa dan tumbuhan di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: DPMPTSP, 2020

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kp. Sawah Lega RT 03 RW 02 Kel. Cipageran	21/09/2020	6°51'51,54"	107°32'33,23"	25	6,21	4,57	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	187
2	Jl. Karya Bakti RT 01 RW 16 Kel. Cipageran	21/09/2020	6°51'11,66"	107°32'18,90"	24	5,21	4,73	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	147
3	Gang Awitali 6 No. 95 RT 02 RW 09 Kel. Citeureup	21/09/2020	6°52'3,77"	107°33'14,45"	25	6,11	2,47	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	162
4	Jl. Sukarasa No. 12 RT 05 RW 11 Kel. Citeureup	21/09/2020	6°51'38,54"	107°32'18,90"	24	6,04	0,34	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	112
5	Jl. Sentral No. 48 RT 04 RW 05 Kel. Cibabat	21/09/2020	6°52'50.81"	107°33'17.84"	27	6,73	10,9	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	357

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Jl. Sunjaya Kaler RT 05 RW 04 Kel. Cibabat	21/09/2020	6°52'41,09"	107°33'10,50"	24	6,45	2,28	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	246
7	Jl. Rancabali Babakan Loa No. 39 RT 03 RW 03 Kel. Pasirkaliki	21/09/2020	6°53'5,26"	107°33'55,36"	26	6,9	0,65	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	321
8	Jl. Cidamar Gang Bapa Bungsu No. 32 RT 06 RW 08 Kel. Pasirkaliki	21/09/2020	6°53'13,60"	107°34'22,22"	25	6,49	2,8	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	262
9	Jl. RH Abdul No. 50 RT 04 RW 19 Kel. Cigugur Tengah	28/09/2020	6°53'15,00"	107°32'53,04"	24	6,4	1,68	13,5	Tidak berasa	tidak berbau	252

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Jl. Abdul Halim Gang Sari Bakti 3 No. 78 RT 02 RW 13 Kel. Cigugur Tengah	28/09/2020	6°53'22,62"	107°33'9,27"	24	6,4	1,68	17,6	Tidak berasa	tidak berbau	368
11	Jl. Sumur Bor III Pojok Selatan RT 03 RW 07 Kel. Setiamanah	22/09/2020	6°52'41"	107°32'1,16"	26	6,87	4,37	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	339
12	Gg. Winata I Pojok Tengah RT 01 RW 16 Kel. Setiamanah	22/09/2020	6°52'29,65"	107°32'10,23"	25	6,44	2,34	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	98
13	Jl. Kalidam Utara RT 04 RW 08 Kel. Karangmekar	22/09/2020	6°52'48,26"	107°32'43,83"	25	6,75	0,9	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	187
14	Jl. Pandai Gang Ladar 3 No. 145 RT 05 RW 07	22/09/2020	6°52'54,22"	107°32'51,76"	25,5	6,3	1,26	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	209



No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kel. Karangmekar										
15	Komp. Pemda No. 94 RT 03 RW 14 Kel. Padasuka	22/09/2020	6°52'23.54"	107°31'30.65"	26	6,25	0,76	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	147
16	Jl. KH. Usman Dhomiri Gg. Bakti 10 RT 05 RW 18 Kel. Padasuka	22/09/2020	6°52'31,40"	107°31'56,78"	25	6,25	6,65	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	144
17	Jl. Bapa Ampu RT 03 RW 05 Kel. Baros	28/09/2020	6°53'24,57"	107°32'21,17"	25	6,4	1,78	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	255
18	Jl. Haris No. 44 K RT 01 RW 11 Kel. Baros	28/09/2020	6°53'41,0"	107°32'29.45"	26	6,5	1,77	4,25	Tidak berasa	tidak berbau	365
19	Jl. Kolonel Masturi Gang Margaresik 2 RT 02 RW 10 Kel. Cimahi	22/09/2020	6°52'9,87"	107°32'29,8"	23	6,84	631	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	293



No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Jl. Kolonel Masturi Gang Margasari 2 RT 01 RW 07 Kel. Cimahi	22/09/2020	6°52'15,38"	107°32'27,48"	25	6,5	2,82	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	194
22	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	29/09/2020	6°54'40,96"	107°33'43,97"	25	6,97	1,27	1,82	Tidak berasa	tidak berbau	217
23	Jl. Cibogo RT 06 RW 06 Kel. Leuwigajah	29/09/2020	6°54'40,78"	107°31'49,20"	25,5	7,06	4,01	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	395
24	Jl. Cibogo RT 02 RW 07 Kel. Leuwigajah	28/09/2020	6°54'35,20"	107°31'53,29"	26	6,75	4,32	5,19	Tidak berasa	tidak berbau	611
25	Gg. H. Abdul Khadir No. 57 RT 02 RW 05 Kel. Cibeber	28/09/2020	6°53'37,66"	107°31'12,02"	25	6,82	2,41	4,1	Tidak berasa	tidak berbau	65
26	Jl. Ibu Sangki RT 02 RW 13 Kel. Cibeber	28/09/2020	6°53'49,09"	107°31'19,00"	25,5	6,36	2,17	13,3	Tidak berasa	tidak berbau	273

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Jl. Melong Nyontrol RT 05 RW 03 Kel. Melong	28/09/2020	6°55'5,94"	107°33'9,17"	25,5	6,5	1,05	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	340
22	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	29/09/2020	6°54'40,96"	107°33'43,97"	25	6,97	1,27	1,82	Tidak berasa	tidak berbau	217
28	Jl. Melong Nyontrol Sukahaji RT 03 RW 02 Kel. Melong	29/09/2020	6°55'23,52"	107°33'3,85"	25	6,1	1,25	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	436
29	Kp. Cibodas Campaka No. 5 RT 01 RW 09 Kel. Utama	29/09/2020	6°54'37,03"	107°32'45,15"	25	6,73	1,56	1,61	Tidak berasa	tidak berbau	423
30	Jl. Raya Nanjung Cibodas RT 05 RW 11 Kel. Utama	29/09/2020	6°55'18,23"	107°32'19,91"	26	7,07	16,7	8,31	Tidak berasa	tidak berbau	474

Lanjutan Tabel-22.

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1	Kp. Sawah Lega RT 03 RW 02 Kel. Cipageran	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	24,6	-
2	Jl. Karya Bakti RT 01 RW 16 Kel. Cipageran	-	0,126	-	0,091	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	4,42	-
3	Gang Awitali 6 No. 95 RT 02 RW 09 Kel. Citeureup	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	20,1	-
4	Jl. Sukarasa No. 12 RT 05 RW 11 Kel. Citeureup	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	21,1	-
5	Jl. Sentral No. 48 RT 04 RW 05 Kel. Cibabat	-	0,126	-	5,82	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,22	24,6	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
6	Jl. Sunjaya Kaler RT 05 RW 04 Kel. Cibabat	-	0,126	-	0,0741	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	26,6	-
7	Jl. Rancabali Babakan Loa No. 39 RT 03 RW 03 Kel. Pasirkaliki	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	69,3	-
8	Jl. Cidamar Gang Bapa Bungsu No. 32 RT 06 RW 08 Kel. Pasirkaliki	-	0,126	-	0,0595	-	0,156	-	0,01	0,1	0,04	40,4	-
9	Jl. RH Abdul No. 50 RT 04 RW 19 Kel. Cigugur Tengah	-	0,126	-	0,23	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,03	25,2	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
10	Jl. Abdul Halim Gang Sari Bakti 3 No. 78 RT 02 RW 13 Kel. Cigugur Tengah	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,03	28,6	-
11	Jl. Sumur Bor III Pojok Selatan RT 03 RW 07 Kel. Setiamanah	-	0,127	-	0,895	-	0,0606	-	0,01	0,1	0,03	28,6	-
12	Gg. Winata I Pojok Tengah RT 01 RW 16 Kel. Setiamanah	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	32,7	-
13	Jl. Kalidam Utara RT 04 RW 08 Kel. Karangmekar	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	31,4	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
14	Jl. Pandai Gang Ladar 3 No. 145 RT 05 RW 07 Kel. Karangmekar	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	43,5	-
15	Komp. Pemda No. 94 RT 03 RW 14 Kel. Padasuka	-	0,126	-	1,259	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	29,4	-
16	Jl. KH. Usman Dhomiri Gg. Bakti 10 RT 05 RW 18 Kel. Padasuka	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	43,8	-
17	Jl. Bapa Ampu RT 03 RW 05 Kel. Baros	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	34,5	-



No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
18	Jl. Haris No. 44 K RT 01 RW 11 Kel. Baros	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	29,6	-
19	Jl. Kolonel Masturi Gang Margaresik 2 RT 02 RW 10 Kel. Cimahi	-	0,126	-	0,266	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,2	35,4	-
20	Jl. Kolonel Masturi Gang Margasari 2 RT 01 RW 07 Kel. Cimahi	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	39,1	-
21	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,05	86,3	-
22	Jl. Cibogo RT 06 RW 06 Kel. Leuwigajah	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	52,6	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
23	Jl. Cibogo RT 02 RW 07 Kel. Leuwigajah	-	0,126	-	2,43	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,03	22,7	-
24	Gg. H. Abdul Khadir No. 57 RT 02 RW 05 Kel. Cibeber	-	0,126	-	1,61	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	69,3	-
25	Jl. Ibu Sangki RT 02 RW 13 Kel. Cibeber	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,03	46,6	-
26	Jl. Melong Nyontrol RT 05 RW 03 Kel. Melong	-	0,126	-	0,424	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,11	69,7	-
27	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	-	0,126	-	0,0595	-	0,0189	-	0,01	0,11	0,02	69,7	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
28	Jl. Melong Nyontrol Sukahaji RT 03 RW 02 Kel. Melong	-	0,126	-	0,0923	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,03	92,9	-
29	Kp. Cibodas Campaka No. 5 RT 01 RW 09 Kel. Utama	-	0,126	-	0,364	-	0,0189	-	0,01	0,12	0,02	70,2	-
30	Jl. Raya Nanjung Cibodas RT 05 RW 11 Kel. Utama	-	0,126	-	0,362	-	0,0189	-	0,01	0,1	0,02	58,6	-



Lanjutan Tabel-22

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H₂S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kp. Sawah Lega RT 03 RW 02 Kel. Cipageran	-	-	3.800	-	-
2	Jl. Karya Bakti RT 01 RW 16 Kel. Cipageran	-	-	9.800	-	-
3	Gang Awitali 6 No. 95 RT 02 RW 09 Kel. Citeureup	-	-	12.600	-	-
4	Jl. Sukarasa No. 12 RT 05 RW 11 Kel. Citeureup	-	-	1.000	-	-
5	Jl. Sentral No. 48 RT 04 RW 05 Kel. Cibabat	-	-	20.000	-	-
6	Jl. Sunjaya Kaler RT 05 RW 04 Kel. Cibabat	-	-	400	-	-



No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
7	Jl. Rancabali Babakan Loa No. 39 RT 03 RW 03 Kel. Pasirkaliki	-	-	460	-	-
8	Jl. Cidamar Gang Bapa Bungsu No. 32 RT 06 RW 08 Kel. Pasirkaliki	-	-	15.500	-	-
9	Jl. RH Abdul No. 50 RT 04 RW 19 Kel. Cigugur Tengah	-	-	19.200	-	-
10	Jl. Abdul Halim Gang Sari Bakti 3 No. 78 RT 02 RW 13 Kel. Cigugur Tengah	-	-	9.400	-	-



No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H₂S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
11	Jl. Sumur Bor III Pojok Selatan RT 03 RW 07 Kel. Setiamanah	-	-	1.700	-	-
12	Gg. Winata I Pojok Tengah RT 01 RW 16 Kel. Setiamanah	-	-	11.600	-	-
13	Jl. Kalidam Utara RT 04 RW 08 Kel. Karangmekar	-	-	800	-	-
14	Jl. Pandai Gang Ladar 3 No. 145 RT 05 RW 07 Kel. Karangmekar	-	-	11.100	-	-
15	Komp. Pemda No. 94 RT 03 RW 14 Kel. Padasuka	-	-	17.700	-	-



No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H₂S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
16	Jl. KH. Usman Dhomiri Gg. Bakti 10 RT 05 RW 18 Kel. Padasuka	-	-	51.000	-	-
17	Jl. Bapa Ampu RT 03 RW 05 Kel. Baros	-	-	2.200	-	-
18	Jl. Haris No. 44 K RT 01 RW 11 Kel. Baros	-	-	100	-	-
19	Jl. Kolonel Masturi Gang Margaresik 2 RT 02 RW 10 Kel. Cimahi	-	-	440.000	-	-
20	Jl. Kolonel Masturi Gang Margasari 2 RT 01 RW 07 Kel. Cimahi	-	-	6.300	-	-



No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H₂S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
21	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	-	-	21.500	-	-
22	Jl. Cibogo RT 06 RW 06 Kel. Leuwigajah	-	-	600	-	-
23	Jl. Cibogo RT 02 RW 07 Kel. Leuwigajah	-	-	1.600	-	-
24	Gg. H. Abdul Khadir No. 57 RT 02 RW 05 Kel. Cibeber	-	-	7.100	-	-
25	Jl. Ibu Sangki RT 02 RW 13 Kel. Cibeber	-	-	13.900	-	-
26	Jl. Melong Nyontrol RT 05 RW 03 Kel. Melong	-	-	24.500	-	-
27	Jl. Mukodar Dalam No. 20 RT 20 RW 04 Kel. Cibeureum	-	-	6.200	-	-

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
28	Jl. Melong Nyontrol Sukahaji RT 03 RW 02 Kel. Melong	-	-	17.400	-	-
29	Kp. Cibodas Campaka No. 5 RT 01 RW 09 Kel. Utama	-	-	120.000	-	-
30	Jl. Raya Nanjung Cibodas RT 05 RW 11 Kel. Utama	-	-	3.100	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pengujian
2. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi/Kota : Kota Cimahi
Tahun Data : 2021

No	Nama Lokasi	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lanjutan Tabel-23.

No	Nama Lokasi	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD ₅ (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO ₂ -N (mg/l)	NO ₃ -N (mg/l)	PO ₄ -P (mg/l)	Sianida (CN ⁻) (mg/l)	Sulfida (H ₂ S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat laut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-24. Curah Hujan Rata-rata

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Geofisika Bandung	-6,8836	107,5973	83,3	40	51,1	49,7	59	11	8,8	0,2	32,3	26	61	57

Keterangan:

1. Satuan dalam mm

Sumber: BMKG Stasiun Geofisika, 2020



Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cimahi Utara	N/A	3.084	28.622	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah	N/A	10.903	17.068	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cimahi Selatan	N/A	4.738	13.715	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2019

Tabel-26. Kualitas Air Hujan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL ($\mu\text{mhos/cm}$)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Na (mg/L)	Ca ²⁺ (mg/L)	Mg ²⁺ (mg/L)
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06°52'115"	107°33'159"	05 Februari	5,85	82,2	9,36	2,2	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A
2	06°52'115"	107°33'159"	14 Februari	8,81	131	2,33	2,3	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A
3	06°52'115"	107°33'159"	16 Maret	8,42	43,4	2,89	0,5	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A
4	06°52'115"	107°33'159"	19 Mei	7,97	94	3,99	<0,4	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengukuran untuk parameter tersebut

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /det)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cisangkan Hulu-Hilir	16,91					
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0,20	0,99	0,02
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0,30	1,19	0,05
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0,70	2,44	0,3
2	Cibaligo Hulu-Hilir	35,04					
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1,20	1,64	0,05
	Cibaligo Tengah	-	2,5	2,5	0,5	1,54	0,18
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0,65	1,14	0,06
3	Cibabat Hulu-Hilir	35,04					
	Cibabat Hulu	-	1,5	1,5	0,20	1,77	0,08
	Cibabat Tengah	-	4	4	0,60	3,68	0,01
	Cibabat Hilir	-	2	2	0,30	1,11	0,06
4	Cibeureum Hulu-Hilir	24,66					
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0,75	3,02	0,62
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0,50	3,10	0,09
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0,50	6,76	0,46

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /det)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Cimahi Hulu-Hilir	18,61					
	Cimahi Hulu	-	6	6	0,3	1,93	0,14
	Cimahi Tengah	-	4	4	0,5	1,85	0,13
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1,93	0,33

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2020

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Nama Danau/ Waduk/ Situ/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m³)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Embung RSUD Cibabat (Kel. Cibabat)	0,06	3.040
2	Embung Pemkot	0,036	1.333,5
3	Embung Brigif	1,06	10.6665
4	Embung Gg. Keramat (Kel. Leuwigajah 1)	0,108	6.480
5	Embung (Kel. Leuwigajah 2)	0,08	4.020
6	Embung (Kel. Setiamanah)	0,04	1.204,5
7	Embung Melong (Belakang Rusunawa)	0,1	6.336
8	Danau Ciseupan	2	130.000

Keterangan :

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2020

Tabel-29. Kualitas Air Sungai

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06°52'260"	107°32'101"	16 Juli 2020	23	8,1	393	246
		Sungai Cisangkan Tengah	06°52'57,05"	107°31'46,23"	16 Juli 2020	23	7,75	500	240
		Sungai Cisangkan Hilir	06°52'01,17"	107°31'59,83"	16 Juli 2020	25	7,55	1000	530
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	06°53'856"	107°33'336"	15 Juli 2020	24	7,96	500	268
		Sungai Cibaligo Tengah	06°54'508"	107°33'114"	15 Juli 2020	25	7,88	838	450
		Sungai Cibaligo Hilir	06°52'492"	107°32'983"	15 Juli 2020	27	8,19	19,7	1109
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06°54'625"	107°34'133"	15 Juli 2020	23	8	637	351
		Sungai Cibeureum Tengah	06°55'953"	107°33'55,3"	16 Juli 2020	24	7,86	721	460
		Sungai Cibeureum Hilir	06°55'919"	107°32'716"	15 Juli 2020	24	7,91	710	422



No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06°52'483"	107°33'690"	15 Juli 2020	24	8,01	484	234
		Sungai Cilember Tengah	06°52'793"	107°33'688"	15 Juli 2020	24	8,33	489	272
		Sungai Cilember Hilir	06°53'722"	107°33'408"	15 Juli 2020	24	8,36	435	251
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06°51'382"	107°33'750"	15 Juli 2020	21	8,7	221	137
		Sungai Cimahi Tengah	06°55'953"	107°33'55,3"	16 Juli 2020	23	8,09	289	194
		Sungai Cimahi Hilir	06°55'12,01"	107°32'23,72"	16 Juli 2020	25	7,55	1507	888

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (µg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	27,2	3,11	115	330	0,28	1,7	0,053	N/A
		Sungai Cisangkan Tengah	33,5	1,8	24,6	54,8	0,06	2,2	0,053	N/A
		Sungai Cisangkan Hilir	56	1,11	43	130	0,05	3,1	0,053	N/A
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	59	4,65	40,9	100	0,06	4,4	0,053	N/A
		Sungai Cibaligo Tengah	41,5	3,83	27,6	69,9	0,08	0,9	0,053	N/A
		Sungai Cibaligo Hilir	78	0,16	69	217	0,1	2,1	0,053	N/A
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	72,5	8,28	34,8	68	0,81	5,6	0,053	N/A
		Sungai Cibeureum Tengah	58	3,75	26,6	60,4	0,88	3	0,053	N/A
		Sungai Cibeureum Hilir	116	3,46	45	138	0,55	2,7	0,053	N/A
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	38,5	5,34	34,8	85	0,31	1,8	0,053	N/A
		Sungai Cilember Tengah	34	4,61	20,4	41,5	0,25	1,5	0,053	N/A
		Sungai Cilember Hilir	77,5	11,5	53,1	117	0,64	1,8	0,053	N/A
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	31	8,04	16,4	47,2	0,04	3,6	0,053	N/A
		Sungai Cimahi Tengah	77,5	7,05	18,5	41,5	0,28	3,1	0,053	N/A
		Sungai Cimahi Hilir	34,5	2,16	36,8	75,5	0,03	2,2	0,053	N/A

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,85	0,45	4,95	2,72	10.700.000,00	800.000,00	0,013
		Sungai Cisangkan Tengah	0,827	0,79	4,83	3,2	10.000,00	1.120.000,00	0,016
		Sungai Cisangkan Hilir	0,796	0,86	3,44	2,011	4.400.000,00	140.000,00	0,012
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	1,1	1,09	7,55	2,74	15.200.000,00	1.400.000,00	0,015
		Sungai Cibaligo Tengah	4,73	0,69	3,74	1,98	1.620.000,00	1.040.000,00	0,108
		Sungai Cibaligo Hilir	2,6	1,36	13,8	4,24	19.600.000,00	1.400.000,00	0,045
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,98	0,46	6,17	0,574	900.000,00	1.100.000,00	0,011
		Sungai Cibeureum Tengah	3,57	0,66	1,38	1,24	1.390.000,00	720.000,00	0,045
		Sungai Cibeureum Hilir	1,09	0,5	3,18	1,34	3.400.000,00	440.000,00	0,023
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	4,02	0,47	4,89	3,88	1.360.000,00	760.000,00	0,014
		Sungai Cilember Tengah	7,66	0,49	2,17	3,93	1.010.000,00	840.000,00	0,015
		Sungai Cilember Hilir	2,76	1,13	5,96	1,83	15.500.000,00	1.480.000,00	0,016
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,53	0,26	1,38	2,87	12.000.000,00	160.000,00	0,007
		Sungai Cimahi Tengah	0,664	0,44	4,19	0,655	820.000,00	320.000,00	0,0008
		Sungai Cimahi Hilir	0,9	0,57	8,2	1,43	1.360.000,00	920.000,00	0,012

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	H ₂ S (mg/L)	Cd Terlarut (mg/L)	Cr ⁺⁶ (mg/L)	Cu Terlarut (mg/L)(*)	Pb Terlarut (mg/L)	Zn Terlarut (mg/L)(*)	Fe Terlarut (mg/L)(*)
(1)	(2)	(3)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,067	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,0198
		Sungai Cisangkan Tengah	0,087	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,05
		Sungai Cisangkan Hilir	0,364	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,25
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	0,095	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,03
		Sungai Cibaligo Tengah	0,096	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,02	0,05
		Sungai Cibaligo Hilir	0,464	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,14
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,05	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,03	0,02
		Sungai Cibeureum Tengah	0,069	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,03
		Sungai Cibeureum Hilir	0,1	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,01	0,1
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	0,056	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,02	0,04
		Sungai Cilember Tengah	0,094	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,0198
		Sungai Cilember Hilir	0,07	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,1
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,031	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,0198
		Sungai Cimahi Tengah	0,038	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,0127	0,0198
		Sungai Cimahi Hilir	0,121	N/A	0,0367	0,0071	N/A	0,01	0,19

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Mn Terlarut (mg/L)(*)	Klorida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Arsen (mg/L)	Hg (mg/L)	Ba (mg/L)	Co (mg/L)	Se (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(46)	(46)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,26	33,3	0,1	28,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cisangkan Tengah	0,64	45	0,1	24,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cisangkan Hilir	0,71	108	0,1	95,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	0,23	47	0,1	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cibaligo Tengah	0,38	88,1	0,1	69,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cibaligo Hilir	0,45	99,1	0,1	184	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,4	88,1	0,89	72,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cibeureum Tengah	0,58	88,1	0,74	107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cibeureum Hilir	0,38	78,3	0,7	127	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Mn Terlarut (mg/L)(*)	Klorida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Arsen (mg/L)	Hg (mg/L)	Ba (mg/L)	Co (mg/L)	Se (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(46)	(46)
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	0,31	66,5	0,1	22,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cilember Tengah	0,2	43	0,1	13,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cilember Hilir	0,38	78,3	0,1	30,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,0039	15,7	0,11	11,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cimahi Tengah	0,15	27,4	0,1	13,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Sungai Cimahi Hilir	0,54	158	0,1	221	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengukuran pada parameter tersebut

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (µmhos/cm)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Embung Melong/Kolam retensi Cibeureum	31/03/2020	06°54'47,3"	107°33'21,5"	30	N/A	4,33	7,81	N/A
2	Embung Ciseupan	31/03/2020	06°53'37"	107°30'54,9"	31	N/A	10,3	6,53	N/A
3	Embung Brigif	31/03/2020	06°53'36.6"	107°31'49"	29	N/A	26,1	6,39	N/A
4	Embung Setiamanah	31/03/2020	06°52'23,1"	107°32'03,3"	26	N/A	25	6,91	N/A
5	Embung Cibabat	31/03/2020	06°52'39,3"	107°33'04,3"	25	N/A	22,9	6,92	N/A
6	Embung Pemkot Cimahi	31/03/2020	06°52'10,6"	107°37'17,6"	21	N/A	38,3	7,65	N/A

Lanjutan Tabel-30.

No	Nama	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Embung Melong/Kolam retensi Cibeureum	N/A	4,33	5,34	12,2	41,1	N/A	3,9	N/A	N/A	0,118
2	Embung Ciseupan	N/A	10,3	4,21	16,2	50,5	N/A	2,04	N/A	N/A	0,143
3	Embung Brigif	N/A	26,1	8,55	12,2	43	N/A	2,35	N/A	N/A	0,276
4	Embung Setiamanah	N/A	25	2,96	26,8	84,1	N/A	2,6	N/A	N/A	0,437
5	Embung Cibabat	N/A	22,9	2,28	23,2	69,2	N/A	1,9	N/A	N/A	0,404
6	Embung Pemkot Cimahi	N/A	38,3	3,47	16,2	43	N/A	3,99	N/A	N/A	0,252

Lanjutan Tabel-30.

No	Nama	Fenol ($\mu\text{g/L}$)	Minyak dan Lemak ($\mu\text{g/L}$)	Detergen ($\mu\text{g/L}$)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)
(1)	(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Embung Melong/Kolam retensi Cibeureum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Embung Ciseupan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Embung Brigif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Embung Setiamanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Embung Cibabat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Embung Pemkot Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian pada parameter tersebut
2. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cimahi Utara	74.859	32.275	41	61	42482
2	Cimahi Tengah	52.358	28.340	1.164	128	22726
3	Cimahi Selatan	51.617	31.396	472	56	19693

Keterangan: -

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2020

Tabel-32. Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Cimahi Selatan	34.067	32.125	13.063	16.398	20.649	21.762	38.427	33.249	4.374	4.769	7.120	6.576	699	450	82	40
2	Cimahi Tengah	21.930	20.709	6.412	8.707	12.125	13.618	12.125	13.618	3.528	4.289	5.246	5.309	635	405	48	35
3	Cimahi Utara	22.855	21.524	11.231	13.110	11.290	11.762	23.130	21.430	4.177	4.768	8.048	7.253	1.431	845	220	81

Keterangan: -

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, 2020

**Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut	47.667
2	Kota Cimahi	Penyakit Hipertensi	27.163
3	Kota Cimahi	Penyakit Rongga Mulut, kelenjar ludah dan rahang	18.895
4	Kota Cimahi	Penyakit Kerongkongan, Lambung dan Duodenum	17.671
5	Kota Cimahi	Gangguan Jaringan Lunak	12.350
6	Kota Cimahi	Diabetes Melitus	9.666
7	Kota Cimahi	Dermatitis dan Eksim	8.323
8	Kota Cimahi	Tuberkulosis	6.703
9	Kota Cimahi	Penyakit Infeksi Usus	6.048
10	Kota Cimahi	Penyakit serebrovaskuler	4.124
11	Kota Cimahi	Penyakit pernafasan bawah kronis	3.624
12	Kota Cimahi	Dorsopati	3.277
13	Kota Cimahi	Skizofrenia, gangguan skizotipe dan delusi	3.232
14	Kota Cimahi	Bentuk penyakit jantung lainnya	3.140
15	Kota Cimahi	Faliartropati inflamasi	2.877
16	Kota Cimahi	Insfeksi pada kulit dan jaringan subkutan	2.869



No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Kota Cimahi	Arthosis	2.847
18	Kota Cimahi	Penyakit jaringan iskemik	2.830
19	Kota Cimahi	Gangguan otot mata, gerakan binokuler, akomodasi dan refraksi	2.369
20	Kota Cimahi	Gangguan episodik dan paroksismal	2.316
21	Kota Cimahi	Gangguan konjungtiva	2.107

Keterangan: -

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cimahi Utara	74.859	14.424	19,27%
2	Cimahi Tengah	52.358	9.826	18,77%
3	Cimahi Selatan	51.617	9.945	19,27%

Keterangan: Jumlah diatas merupakan jumlah KK

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi, 2020

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pasar Atas	Terminal dan Pasar		29,02			
2	Pasar Antri			17,04			
3	Stasiun kereta api	Stasiun					
4	Pasar Baros	Pasar		5,8			
5	RS. Cibabat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0,74			
6	PT. Diamond	Industri	-	0,46			
7	Klinik Prodia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	3303	146
8	PT. Kahatex	Industri	-	0	0	2336084	92
9	PT. Dewa Sutratex 1	Industri	2,20	0	793,12	554600	0
10	PT. Triana Harvestindo	Industri	4,822	0	323,45	579795	290
11	PT. Indah Jaya	Industri	0,94	0	-	79010	0



No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	PT. Jerditek	Industri	-	0	0	459337	9790
13	PT. Logam Bima	Industri	-	0	-	162	
14	PT. Beast Jeans Indo Citranusa	Industri	0,3254	0	-	6768	182
15	PT. Chitose International TBK	Industri	2,5252	0	127,63	46844	8000
16	PT. Ayoe Indotama Textile	Industri	4,8791	0	1029,19	751661	6
17	PT. Guna Mitra Prima	Industri	4,5005	0	428,38	298731	136963
18	PT. Anugrah Sinar Abadi	Industri	0,0015	-	0	103001	
19	PT. PLN UP3 Cimahi			0	0	7	6
20	PT. Dewa Sutratex 2	Industri	15	0	3486,16	28337	14
21	PT. Hegar Mulya	Industri	55,41	0	304,2	327907	3290
22	PT. Holi Pharma	Industri	0,64	0	3,6	809	451
23	PT. Kawi Mekar	Industri	-	0	-	76127	0
24	PT. Laju Makmur Sentosa	Industri	1,1576	0	180	509883	124
25	PT. Long Sun Indonesia	Industri	22,41	0	-	188430	0
26	PT. Mewah Niaga Jaya	Industri	2,5505	0	0	573028	0
27	PT. Nisshinbo Indonesia	Industri	5,6	0	876,7	995002	2
28	PT. Ragam Jaya Utama	Industri	5,6	0	158,38	288784	780

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	PT. Ras Jaya	Industri	0,27	0	57,02	145607	0
30	PT. San San Sudaratex Jaya 1	Industri	5,5213	0	0	354770	0
31	PT. Setia Busanatex	Industri	10,07	0	20,79	333055	95
32	PT. Sinar Austral	Industri	1,5562	0	0	45275	1580
33	PT. WGI	Pengumpul Limbah B3	-	0	0	0	2628383
34	RS. Dustira	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,525	0	-	35514	0
35	RSU Kasih Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,2724	0	1,35	16545	9341
36	Klinik Yudisman	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	0	535	0
37	PT. Dam Sinar Button Abadi	Industri	1,5038	0	1,47	316	100
38	PT. Wijaya Karya	Industri	-	0	0	28	15



No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	CV. Daya Utama Logam	Industri Pelapisan Logam	0,803		1,5		
40	CV. Suritex	Industri Tekstil	11,4263	-	1157,08		
41	PT. Afiat Industri Farmasi	Industri Farmasi	3,2238	-	1		
42	PT. Antelas	Industri Tekstil	0,61	-	9		
43	PT. Benang Warna Indonusa	Industri Tekstil	1,27	-	2,40		
44	PT. Bina Usaha Cipta Prima	Industri Tekstil	-	-	11,38		
45	PT. Central Gerorgette Nusantara	Industri Tekstil	15,5		325,09		
46	PT. Diamond Cold Storage	Industri Makanan	-	-	-		
47	PT. Dwimulya Tata Tunggal Utama Tekstil	Industri Tekstil	0,62	-	5,56		
48	PT. Elizabeth Hanjaya	Industri Tas	2,681	-	-		
49	PT. Fasilamindo Utama	Industri Tekstil	0,3755	-	-		
50	PT. Fuji Palapa Textile	Industri Tekstil	2,11	-	-		
51	PT. Garuda Mas Semesta	Industri Tekstil	37,94	-	3,79		
52	PT. Gede Indah	Industri Tekstil	1,4117	-	0,87		
53	PT. Ginatex	Industri Tekstil	0,5	-	134,33		
54	PT. Gucci Ratu Textile	Industri Tekstil	8,82	-	-		



No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	PT. Indo Extrusions	Industri Pelapisan Logam	1,86		0,91		
56	PT. Indowira Putra	Industri Cat	1,2206		0,97		
57	PT. Jenshiang Nusantara	Industri Tekstil	1,9495		-		
58	PT. Jerdytex	Industri Tekstil	-	-	-		
59	PT. Kamarga Kurnia Textile	Industri Tekstil	-	-	-		
60	PT. Leuwijaya Utama Tekstil	Industri Tekstil	17,4547		1025		
61	PT. Matahari Sentosa Jaya	Industri Tekstil	2	-	5,18		
62	PT. Mulia Lestari	Industri Tekstil	1,8541		669,41		
63	PT. Nickcrome Indojava	Industri Logam	0,3402		23,28		
64	PT. Oriental Embroidery	Industri Tekstil	40	-	76,54		
65	PT. Rajawali Hiyoto	Industri Cat	2,4938		6,38		
66	PT. Sanbe Farma Unit I	Farmasi	0,17	-	-		
67	PT. Sanbe Farma Unit II	Farmasi	0,56	-	-		
68	PT. Sanbe Farma R&D	Farmasi	-	-	-		
69	PT. Sinar Continental	Industri Tekstil	0,12		138,22		
70	PT. Sinar Pang Jaya Mulya Textile	Industri Tekstil	4,0956		1377,78		



No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
71	PT. Soko Lancar	Industri Tekstil	4,99		102,01		
72	PT. Tegar Prima Nusantara	Industri Garmen	0,0217		2,41		
73	PT. Trisula Textile Industries	Industri Tekstil	13,42	-	383,04		
74	RS Avisena	Fasilitas Kesehatan	0,2183	-	1,1		

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-36. Suhu Udara Rata-rata Bulanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan(°C)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Stasiun Geofisika Bandung		23,68	23,83	23,65	23.,96	23,84	23,32	22,9	23,04	23,84	24,87	24,2	23,74

Keterangan: -

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2020

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2020

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)
		Latitude	Longitude						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kantor BPJS Kesehatan Jl. Sangkuriang No.65 Cibabat	06°51'52,1"	107°32'25,4"	14 hari	8,52	-	36,50	-	-
2	PT Dewasutratex 1 Jl. Cibaligo No.76 Cigugur Tengah	06°54'06,7"	107°33'20,7"	14 hari	29,70	-	31,6	-	-
3	Perumahan Kemarung Regency Jl. Kamarung Citeureup	06°51'23,4"	107°32'58,4"	14 hari	4,06	-	10,9	-	-
4	Kantor Kelurahan Melong Jl. Melong Sakola No.72 Melong	06°55'15,2"	107°33'31,5"	14 hari	8,77	-	19,9	-	-

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)
		Latitude	Longitude						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Perusahaan Logam Bima Jl. Raya No.518 Padasuka	06°52'2"	107°31'52"	14 hari	9,55	-	23,3	-	-
6	PT Jenshiang Nusantara Jl Mancong No.238 Melong	06°55'08"	107°31'49"	14 hari	20,42	-	23,0	-	-
7	Perum Pilar Mas Jl. Mahar Martanegara Utama	06°54'02,7"	107°32'17,5"	14 hari	25,30	-	13,67	-	-
8	Kantor Kel Cigugur Tengah Jl Abdul Halim No 178 Cigugur Tengah	06°53'28,2"	107°33'16,6"	14 hari	9,81	-	21,40	-	-

No.	Lokasi	PM ₁₀ (µg/Nm ³)	PM _{2,5} (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	Perusahaan Logam Bima Jl. Raya No.518 Padasuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT Jensiang Nusantara Jl Mancong No.238 Melong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perum Pilar Mas Jl. Mahar Martanegara Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kantor Kel Cigugur Tengah Jl Abdul Halim No. 178 Cigugur Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan April 2020 oleh PT. Anugrah Analisis Sempurna
2. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batu Bara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kimia Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Mesin dan Logam Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Industri Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Aneka Industri	N/A	N/A	13.853.737,91	1.721.209,29	153.510.873,42	347.708,48	N/A	N/A	N/A	4.258.257,80	12.649.710,82

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi, 2020

**Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil Beban	6.455	N/A	N/A	N/A
2	Penumpang pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Penumpang umum	882	N/A	N/A	N/A
4	Bus besar pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bus besar umum	245	N/A	N/A	N/A
6	Bus kecil pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Bus kecil umum	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Truk besar	132	N/A	N/A	N/A
9	Truk kecil	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Roda tiga	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Roda dua	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020



Tabel-40. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kelas Jalan	Panjang Jalan Dua Tahun Terakhir(Km)	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan	13,89	13,89
2	Jalan Raya	815	815
3	Jalan Sedang	5.542	5.542
4	Jalan Kecil	98.836	98.836

Keterangan:

1. Data inventaris Jalan Kota Cimahi 2019 & 2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2020

Tabel-41. Dokmen Izin Lingkungan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UKL-UPL	Kegiatan pembangunan rumah tinggal toko dan industri (Pencampuran Bahan dan Pengemasan Shampoo dan Sabun Hewan)	CV Bianglala
2	UKL-UPL	Kegiatan Kantor dan Pergudangan an. PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X	PT. Pegadaian (Persero)
3	UKL-UPL	Kegiatan rencana pembangunan perumahan Rosa Lie Hills PT Rosa Lie Propertindo	PT Rosa Lie Propertindo
4	UKL UPL	Kegiatan Pembangunan Jembatan Leuwigajah (duplikasi)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
5	UKL UPL	Kegiatan Pembangunan Toserba Prama atas nama PT Triputra Karya Lestari	PT Triputra Karya Lestari
6	DPLH	Kegiatan Minimarket Yomart PT.Griya Pratama (Jln Warung Contong)	PT.Griya Pratama
7	UKL UPL	Kegiatan rumah tinggal, asrama berbayar dan toko an. Citraresmi	Citraresmi Megantari
8	UKL-UPL	Kegiatan Gedung dan Konveksi (alih fungsi)	Kresna Bayu Eko Haryanto
9	UKL-UPL	Kegiatan Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Sementara (Asrama Berbayar), an. Euis Martini	Euis Martini
10	UKL UPL	Kegiatan Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Sementara (Asrama Berbayar), an. Dini Noviani	Dini Noviani Nurjanah
11	UKL-UPL	Kegiatan Gudang Kain an. Widjaja Trisna	Widjaja Trisna
12	DPLH	Kegiatan Industri Kaleng PT Elang Pakindo Perkasa	PT Elang Pakindo

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
13	UKL UPL	Kegiatan Pembangunan Gedung Hotel Fame	PT Vipro Perkasa Abadi
14	UKL UPL	Kegiatan Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Sementara (Asrama Berbayar), dan Toko an. Zuriati	Zuriati
15	UKL UPL	Kegiatan Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Sementara (Asrama Berbayar), dan Toko an. Amadhea Yudith Eryanti	Amadhea Yudith Eryanti
16	UKL UPL	Rencana Pembangunan Toko PT Eigerindo Multi Produk Industri	PT Eigerindo Multi Produk Industri
17	DPLH	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi PT Solusindo Kreasi Pratama	PT Solusindo Kreasi Pratama
18	UKL UPL	Kegiatan Industri Konveksi PT Angel Jaya Globalindo	PT Angel Jaya Globalindo
19	UKL UPL	Kegiatan Pembangunan Sarana Pendidikan Yayasan Nurul Aulia	Yayasan Nurul Aulia
20	UKL UPL	Kegiatan Minimarket Alfamart dan Cafe Restoran CV Tiga Nanda	CV Tiga Nanda
21	UKL UPL	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Kawasan Melong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
22	UKL UPL	Kegiatan Yayasan Baitul 'Izzah Cimahi	Yayasan Baitul 'Izzah Cimahi
23	UKL UPL	Rumah Tinggal Sementara (asrama Berbayar) a.n. Bernadetta Hayudewi Yudhayanti	Bernadetta Hayudewi Yudhayanti
24	UKL UPL	Rencana Pembangunan Rumah Tinggal, Toko, Restoran, dan Reklame Berkontribusi a.n Chandra Gunawan Iskandar	Chandra Gunawan Iskandar
25	UKL UPL	Kegiatan Operasioanal Rumah Tinggal dan asrama berbayar an. Firmansyah	Firmansyah

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
26	UKL-UPL	Kegiatan rumah tinggal dan tempat usaha (pencucian mobil) an. Eman Sulaeman	Eman Sulaeman
27	DPLH	Kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi	PT Dayamitra Telekomunikasi
28	UKL-UPL	Rumah Tinggal Sementara (asrama Berbayar) a.n. Ningson Tumpal HC	Ningson Tumpal HC
29	UKL UPL	Kegiatan Industri Tekstil PT Mulia Lestari	PT Mulia Lestari
30	UKL-UPL (revisi)	Kegiatan Industri Pemintalan Benang PT Antelas	PT Setia Busanatex
31	DPLH	Kegiatan Rumah Tinggal, Bengkel las dan bubut an. Indah Lestari Wibowo	Indah Lestari Wibowo
32	UKL-UPL	Kegiatan Rumah Tinggal Sementara an. Susan Sugiono	Susan Sugiono
33	DPLH	Kegiatan Penyedia Jasa Menara Telekomunikasi PT Indosat, Tbk	PT Indosat, Tbk.
34	UKL-UPL	Kegiatan Penyedia Jasa Menara Telekomunikasi PT Bali Towerindo Sentra, Tbk	PT Bali Towerindo Sentra, Tbk
35	UKL-UPL	Kegiatan pembangunan klinik utama, klinik bersalin, salon, apotek dan laboratorium an. Nur Farah	Nur Farah
36	UKL-UPL	Kegiatan Rumah tinggal dan rumah tinggal sementara (Asrama Berbayar) an. Ildefonso ADC	Ildefonso ADC
37	UKL-UPL	Kegiatan Rumah tinggal Sementara (Asrama Berbayar) an. Namen siahaan, Ir.	Namen Siahaan, Ir.
38	DPLH	Kegiatan Bengkel dan Showroom CV Nagamas Mitra Abadi	CV Nagamas Mitra Abadi
39	DPLH	kegiatan rumah tinggal dan menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi	PT Dayamitra Telekomunikasi

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
40	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Tower Bersama	Tower Bersama
41	UKL-UPL	Pembangunan perumahan Setra duta	PT Berkat Propertindo Utama
42	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Tower Bersama	Tower Bersama
43	UKL-UPL	kegiatan gedung sekolah yayasan Bangun Tunas Bangsa	Yayasan Bangun Tunas Bangsa
44	UKL-UPL	kegiatan gudang Danny Septiadi	Danny Septiadi
45	UKL-UPL	kegiatan pembangunan perumahan velocity residence	PT Tanah Air Gelora
46	UKL-UPL	kegiatan rumah tinggal dan asrama berbayar an. Lutviana Farida	Lutviana Farida
47	UKL-UPL	kegiatan pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan PT Vipro Perkasa Abadi	PT Vipro Perkasa Abadi
48	UKL-UPL	kegiatan asrama berbayar an Fani Andayani	Fani Andayani
49	DPLH	kegiatan minimarket PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama
50	DPLH	kegiatan pabrik cat PT Indowira Putra	PT Indowira Putra
51	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Tower Bersama	Tower Bersama
52	UKL-UPL	kegiatan asrama berbayar an Acep Kuswara	Acep Kuswara
53	UKL-UPL	kegiatan industri makanan PD Surya	PD Surya
54	UKL-UPL	kegiatan rumah sakit kasih bunda PT Mitra Medika Sejati	PT Mitra Medika Sejati
55	UKL-UPL	kegiatan minimarket PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
56	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
57	DPLH	kegiatan minimarket PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama
58	DPLH	kegiatan minimarket PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama
59	DPLH	kegiatan minimarket PT Indomarco Prismatama	PT Indomarco Prismatama
60	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama	PT Solusi Tunas Pratama
61	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama	PT Solusi Tunas Pratama
62	DPLH	kegiatan operasional menara telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
63	UKL-UPL	Kegiatan Gedung Perkantoran Rekomendasi PT Tegar Prima Nusantara	PT Tegar Prima Nusantara
64	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Wandi Sagala ST
65	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Moch. Syafik
66	SPPL	Gedung Serbaguna & Taman Kreatif	Sodikin, SE
67	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Sahmin
68	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Ulvi Yulviani Jaelani
69	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Nani Lisnawati
70	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Supijan Malik

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
71	SPPL	Asrama Berbayar	Sastra Winata
72	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Indra Trianto
73	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Dalmi
74	SPPL	Klinik dan Toko	Sutjiati
75	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Deni Kusmawan
76	SPPL	Toko	Johnny Hermana
77	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Hasan Putra Mas
78	SPPL	Asrama Berbayar	Sutisna
79	SPPL	Rumah Tinggal dan Tempat Usaha	Kanda Kurniawan
80	SPPL	Klinik	Andres Christina
81	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Hadi Kurniawan
82	SPPL	Asrama Berbayar	Dede Roehendi
83	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Mistar Jayadi
84	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Jayus Brianmay Putra
85	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Irwan Nirwana
86	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Budi Pialing
87	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	A. Setiawan
88	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Rizky Ramadhan
89	SPPL	Asrama Berbayar	Yudhy Chandra Jaya

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
90	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Oom Nandang
91	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Jenny Karim
92	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Jenny Karim
93	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Jenny Karim
94	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Jenny Karim
95	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Jenny Karim
96	SPPL	Asrama Berbayar	Catur Harry Waluyo
97	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Budhi Setiawan
98	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Eva Nuriah Shopa
99	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Edi Sudrajat Ahmad
100	SPPL	Kantor Bertingkat	Yusi Mirawati
101	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Sunarto, SE
102	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Irmina Adiningrih Rahajuni
103	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Suyanet Sari Dewi
104	SPPL	Koperasi	Achmad Dumiyati
105	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Endang Permana
106	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Leni Herlina
107	SPPL	Gedung Serbaguna	Hj. Nia Rahmawati
108	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Nani Tjahja

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
109	SPPL	Kantor	Ansats Pram Andreas
110	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Suherman
111	SPPL	Pembangunan Gedung Sekolah	Drs. H. Muhajir, M.Pd
112	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Ir. Dani Nurhadi
113	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Kenny Reginal
114	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	I Made Tjenthing
115	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Budi Prasetio
116	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Tam Kin Tiong
117	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Sugiharto
118	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Endang Kurmiyati
119	SPPL	Toko a.n Perorangan	Andrew Purnomo
120	SPPL	Sugih Jaya Motor	Wendy Kurniawan
121	SPPL	PT. Sarana Bina Pratama	Yadhi Isnandar
122	SPPL	Rukan a.n Tedi Juliansyah	Tedi Juliansyah
123	SPPL	Ruko a.n Perorangan	H. Djatmiko
124	SPPL	Rukan a.n Yanny Tjahjani	Yani Tjahjani
125	SPPL	PT. Kusuma Karya Teknik	Yudhitia Kusuma
126	SPPL	Ruko (air galon) a.n Tenny Puy	Tenny Puy Lianna
127	SPPL	PT. Ramarayo Perdana	Berlinton Siahaan

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
128	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Kurnia
129	SPPL	Ruko a.n Jelianah Tansur	Jelianah Tansur
130	SPPL	CV. Make Manah	Ria Wahyuni
131	SPPL	Ruko a.n Toyipin Kuswanto	Toyipin Kuswanto
132	SPPL	PT. Bank Yudha Bhakti	Dwi Gustin Catur Roni
133	SPPL	PT. Sakti Berjaya Media	Paulus Noch Bolla
134	SPPL	PT. Prajna Adhi Cakra	Ir. Endang Turyana
135	SPPL	Mega Motor	E. Ahmad Muchsin
136	SPPL	CV. Donat Madu Cihanjuang	Fanina Nisfulaily
137	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Dwi Wahyu Wamenarno
138	SPPL	PT. Ridho Engineering Perkasa	Readi Herdiansyah
139	SPPL	Ruko dan Kantor a.n Perorangan	Rahmat Hidayat
140	SPPL	Toko Raya Sejati	Edi Kanedi
141	SPPL	Yayasan Astrella	Meini Wartini
142	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Agus Syaeful Bahri
143	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Ahmad Gunawan
144	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Yoyon Candra
145	SPPL	Warung Makmur	Moch Paimin
146	SPPL	Warung Soleh	Moch Paimin

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
147	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Holis Firdaus Aidarus
148	SPPL	Asrama Berbayar	Ramli
149	SPPL	Banua Ingkita	Elias Rachmansyah
150	SPPL	Toko dan Apotek a.n Perorangan	Erikson Donald Hasibuan
151	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Adi Cahyadi
152	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Selamet Senjaya
153	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Wawan Syarif Hidayat
154	SPPL	PT. Surganya Motor Indonesia (Melong)	Indra Trianto
155	SPPL	Apotek 214+	Dea Ramadhani Suciati
156	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Asep Hendra Maulana
157	SPPL	Primkop Kartika Perkasa	Koharudin
158	SPPL	Rukan a.n Perorangan	R. Agung Budi Santoso
159	SPPL	Apotek Yusinda Farma	Ade Yusuf Gunawan
160	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Ace S
161	SPPL	Ruko dan Rukan a.n Perorangan	Fera Agustine Theresia
162	SPPL	Toko Anugerah Jaya Sentosa	Dicki Sutjipto
163	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Lina Harjani Sunaryo
164	SPPL	Yayasan Teratai Cimahi	Elly Widya
165	SPPL	GDG dan Foodcourt Perorangan	Endah Suwandari Hidayanty

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
166	SPPL	Toko a.n Tan Lay Moe	Tan Lay Moe
167	SPPL	Ruko a.n Perorangan	H. Sonaji
168	SPPL	Ruko dan Kantor a.n Perorangan	Andreas
169	SPPL	CV. Motorindo Center	Feni Puspa Dewi
170	SPPL	CV. A&B Terang Abadi	Albertus Yuana
171	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Novita Helena
172	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Winarsih
173	SPPL	CV. Multi Sarana Karya	Rahman
174	SPPL	Ruko a.n Herry	Herry
175	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Edwin Putra Jaya Laksana
176	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Utami Lestari
177	SPPL	Pembangunan Masjid	Minardi Nur Muhamad
178	SPPL	Koperasi Kertika 0609 Kabubaci	Iyet Saryana
179	SPPL	PT. Syafiya Hana Bahana	Maki Abdul Sholeh
180	SPPL	Yayasan Aisyah Mandiri Cimahi	Icha Herlina
181	SPPL	Rukan a.n Perorangan	I Made Tjenthina Wirdjana
182	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Asep Rahmat Hidayat
183	SPPL	PT. Sarana Marga Lestari	Asep Ismail Perdana
184	SPPL	PT. Al Three Mulia Rizki	Syarif Sutami

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
185	SPPL	a.n Perorangan	Agung Sulistyawan
186	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Asep Ruhiyat
187	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Leonardo
188	SPPL	Ruko a.n Perorangan	H. Ryan Hendrawan
189	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Samsu Koswara
190	SPPL	CV. Karyatri Mandiri	Hilmi Hudaya
191	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Iwan Sanilan Gunawan
192	SPPL	PT. Salasa Masjid	H. Maman Suherman
193	SPPL	Rumah Makan Pak Kumis	Yuyun Wahyuni
194	SPPL	Apotik Zaid Farma	Astri Listianti
195	SPPL	CV. Vortail	Muchreza Husein
196	SPPL	CV. Abadi Pertiwi	Irfan Firzaddan
197	SPPL	Ruko a.n Lilyana Gunawan	Lilyana Gunawan
198	SPPL	PT. Indomarco Prismatama (Jl. Singosari No.2)	Dedi Yusuf Apriadi
199	SPPL	Gudang Mebel	Itawati Hanidi
200	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Ida Novira
201	SPPL	CV. Inti Bumi Pratama	Doni Setiawan
202	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Febrinda Sary Usefa
203	SPPL	Toko, Kantor dan Salon a.n Perorangan	Anne Handayani

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
204	SPPL	Yayasan Darul Sawargi Handayani	Tantan Hadiansyah
205	SPPL	Rumah Tinggal, Toko dan Kantor	Susan Sugiono
206	SPPL	Lacoga Perfume	Franky Yanto
207	SPPL	Rumah Tinggal, Klinik Pratama dan Apotek	Nabilah Abdurrahman
208	SPPL	Yayasan Hikmat Pena Dunia	Ana Maryana
209	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Dimali Arsyap
210	SPPL	Apotek Deka Farma	Lisna Iswantika
211	SPPL	CV. Kadena	Tomi Nugraha
212	SPPL	PMB Bidan Nia Rosmawati	Nia Rosmawati
213	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Asep Suhendi
214	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Aan Siti Rohani
215	SPPL	PT. Braga Indonesia Perkasa	Adrian Muhammad Irwansyah
216	SPPL	Ruko dan Rukan a.n Perorangan	Mokhamad Muslim
217	SPPL	CV. Nasha Persada	Dadan Sopiana Putra
218	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Giyarto
219	SPPL	Yayasan Fitrah Insani	Didik Agus T
220	SPPL	Rumah Tinggal dan Tempat Usaha (Rumah Makan dan Salon)	Dedi Wahyudi
221	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Hasan Putra Mas
222	SPPL	Rukan dan Ruko a.n Perorangan	Tutusari

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
223	SPPL	Yayasan Mitra Anugerah Lestari	Himzar Sandi Agus
224	SPPL	Rumah Tinggal dan Praktik Bidan	Tuti Herawati
225	SPPL	Rumah Tinggal dan Klinik	Asep Nurdin H
226	SPPL	PT. Atmo Daya Energi	Mukmin Widiyanto A
227	SPPL	PT. Edu Media Digital	Fourizal Novyansyah
228	SPPL	PT. Kabilah Wisata Internasional	Bayu Harisuara Aprianto
229	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Wahyoewono
230	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Citrasari Megantari Sonyarengga
231	SPPL	Ruko, Rukan a.n Perorangan	Tonni Turisman Yusuf
232	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Zamril
233	SPPL	Toko dan Kantor a.n Perorangan	Zulkarnaen Jaelani
234	SPPL	CV. Pradirama Ez Indonesia	Joko Sucahyono
235	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor a.n Perorangan	Fransiskus Aslionius
236	SPPL	CV. Widuri Akbar	Mochamad Taufiq Akbar
237	SPPL	Rumah Tinggal, Toko dan Kegiatan Usaha a.n Perorangan	Minarni Koenady Lauman
238	SPPL	Rumah Tinggal, Asrama Berbayar dan Toko	Citrasresmi Megantari S
239	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Linawati
240	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Ali Asghori
241	SPPL	Klinik dan Toko a.n Perorangan	Zainal Abidin

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
242	SPPL	Kantor Distribusi a.n Perorangan	Kimer Sipayung
243	SPPL	Gedung Serbaguna a.n Perorangan	Hamdi Ismani
244	SPPL	Sarana Olahraga a.n Siti Eliyah	Siti Eliyah
245	SPPL	Koperasi Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)	M. Munir Asrori
246	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Gunawan Suryana
247	SPPL	Bintng Solex	Moch Sholeh
248	SPPL	CV. Vision Plus	Lukman Nul Hakim
249	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Neni Sumarni
250	SPPL	PT. Bartech Media Solusi	Toni Hidayat
251	SPPL	Yayasan Pendidikan dan Masjid Baiturrokhmah	Slameto
252	SPPL	PT. Anjani Mahligai Sejahtera	Aris K Sutanto
253	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Erdita Karina Noer
254	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Ema Kartikawati
255	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Widiastuti
256	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Eddy Supedi
257	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Ilham Taufik H
258	SPPL	Apotek Aneka Baru Farma	Riza Amelia
259	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Anih
260	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Crisandy Suprijatna

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
261	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Christian Suprijatna
262	SPPL	CV. Terang Bulan	Ade Sulaeman
263	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Chrisandy Suprijatna
264	SPPL	Ruko a.n Perorangan	H. M Suheli
265	SPPL	Toko a.n Perorangan	Roni Sutrisna
266	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Christine Suprijatna
267	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Juni Astuti
268	SPPL	Yayasan Nurul Islam Al-Husna Internasional	Sri Nurhayati
269	SPPL	Toko a.n Perorangan	Deden Yana Maulana
270	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Rizky Aria Pradana K
271	SPPL	PT. Nursyatam Jaya Mulia	Ilham Kurniawan
272	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Arif Gampang Utomo
273	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Cucu Hidayat
274	SPPL	Apotek Obat-IN	Budi Satrio Wibowo
275	SPPL	Yayasan Al-Maqom	Raden Wawan Ridwan
276	SPPL	Rumah Tinggal dan Kantor	Endang Budi Setiawan
277	SPPL	SAM Motor a.n Melianah	Melianah
278	SPPL	Gereja Toraja	Ir. Yunus Tonapa Sarungu, MT
279	SPPL	PT. Kemas Central Abadi	Kiemas Damar Raksa

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2020	Yayasan Mitra Anugrah Lestari Rs. Mitra Anugrah Lestari	Jl. Cibaligo No. 76 Rt 008/008 Kel. Cigugur Tengah/ Tengah		IPLB3 Her Registrasi	503.31/0002-HER/0112/DPMPTSP/2020
2	2020	PT. Bunyamin Inovasi Teknik	Jl. Pojok Utara I Gg. Karya Muda Ii No. 119 Rt 004/004 Kel. Setiamanah/Tengah		IPLB3 Baru	503.31/0001/091/DPMPTSP/2020
3	2020	PT. Sinar Pangjaya Mulia	Jl. Mahar Martanegara No. 175 Rt 002/007 Kel. Utama/Selatan	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/001-HER/0166/DPMPTSP/2020
4	2020	PT. Garuda Mas Semesta	Jl. Industri Ii No. 2 Rt 006/009 Kel. Utama/Selatan		IPLB3 Her Registrasi	503.31/0005-HER/0211/DPMPTSP/2020

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	2020	PT. Jensihiang Nusantara Textile Chemical	Jl. Cibaligo Melong Km.3 No.238 Rt 001/001 Kel. Melong/Selatan	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0004- HER/0231/DPMPTSP/2020
6	2020	PT. Laju Makmur Sentosa	Jl. Industri Vi No. 6 Kel.Cibaligo Kec. Leuwigajah	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0003- HER/0210/DPMPTS/2020
7	2020	PT. Kahatex Klinik	Jl. Cigondewah No. 296 Rt 001/032 Kel. Melong/Cimahi Selatan		IPLB3 Baru	503.31/0002/0352/DPMPTSP/2 020
8	2020	PT. Mulia Lestari	Jl. Cibaligo Km 1,7 No. 70 Rt 002/009 Kel. Utama/ Cimahi Selatan	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0006- HER/0357/DPMPTSP/2020
9	2020	PT. Antelas	Jl. Cibaligo No. 88 Rt 005/016 Kel. Cibereum/Cimahi Selatan	Industri Tekstil	IPLB3 Baru	503.31/0003/0527/DPMPTSP/2 020
10	2020	PT. Sanbe Farma Unit 2	Jl. Mahar Martanegara No. 162 Rt 001/012 Kel. Baroskec. Cimahi Tengah	Farmasi	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0007- HER/0592/DPMPTSP/2020



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	2020	PT. Oriental Embroidery	Jl. Mahar Martanegara No. 92 Rt 001/010 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/009-HER/0697/DPMPTSP/2020
12	2020	PT. Dam Sinar Button Factory	Jl. Cibaligo No. 39a Rt 003/015 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan	Kancing	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0008-HER/0755/DPMPTSP/2020
13	2020	PT. Kawi Mekar	Jl. Mahar Martanegara No. 158 Rt 005/012 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Industri Tekstil	IPLB3 Baru	503.31/0004/0801/DPMPTSP/2020
14	2020	PT. Sanbe Farma Unit R&D 174	Jl. Mahar Martanegara No. 174 Rt 01/06 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan	Farmasi	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0010-HER/0876/DPMPTSP/2020
15	2020	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Jl. Mahar Martanegara No. 102 Rt 008/014 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah		IPLB3 Baru	503.31/0005/0899/DPMPTSP/2020



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	2020	PT. Sansan Saudaratex Jaya	Jl. Cibaligo No. 33 Rt 003/016 Kel Cibereum Kec. Cimahi Selatan	Industri Tekstil	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0012- HER/1096/DPMPTSP/2020
17	2020	PT. Rekso Nasional Food	Jl. Jend Amirmachmud Rt 004/012 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi	Makanan Siap Saji	IPLB3 Baru	503.31/0007/1140/DPMPTSP/2 020
18	2020	PT. Sinar Central Parahyangan	Jl. Akses Buangan Tol Baros Rt 003/003 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi		IPLB3 Baru	503.31/0009/1143/DPMPTSP/2 020
19	2020	PT. Cipta Aneka Pangan Prima	Jl. Gempol Sari No. 32 Rt 002/035 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahii	Industri Coklat	IPLB3 Baru	503.31/0006/1141/DPMPTSP/2 020
20	2020	PT. Benang Warna Indonusa	Jl. Industri Ii No. 3 Rt 006/009 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan	Industri Pewarnaan Benang	IPLB3 Her Registrasi	503.31/0011- HER/1045/DPMPTSP/2020

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	2020	PT. Sama Indah	Jl. Baros No. 27 Rt 004/001 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi	Pembuatan Ragi	IPLB3 Baru	503.31/0008/1189/DPMPTSP/2 020
22	2020	Ucu Suryana (PT. Kahatex)		Industri Tekstil	Izin Penyimpanan Limbah B3	503.31/002/0098/DPMPTSP/20 19
23	2020	Yacob Kusmanto (PT. Tegar Primanusantara)		Industri Tekstil	Izin Penyimpanan Limbah B3	503.31/0018- HER/1936/DPMPTSP

Keterangan: -

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2020



**Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	PT Aswindo	27 Januari 2020	Taat
2	2020	PT GINATEX	27 Januari 2020	Tidak Taat
3	2020	PT Sansan 5	28 Januari 2020	Sanksi dari DLH Kota Cimahi
4	2020	PT SIAP	28 Januari 2020	Tidak Taat
5	2020	PT Sinar Austral	29 Januari 2020	Sanksi dari DLH Kota Cimahi
6	2020	CV Suritex	29 Januari 2020	Taat
7	2020	PT Benang Warna Indonusa	12 Februari 2020	Taat
8	2020	Pabrik Kecap	20 Maret 2020	Sanksi dari DLH Kota Cimahi
9	2020	PT Setia Busanutex	08 Juni 2020	Taat
10	2020	PT Leuwitex	09 Juni 2020	Taat
11	2020	PT Chitose Manufacture	10 Juni 2020	Taat
12	2020	CV Suritex	11 Juni 2020	Taat
13	2020	PT Indah Jaya Gemilang	12 Juni 2020	Taat
14	2020	PT Sansan Saudarutex Jaya Unit 2	15 Juni 2020	Tidak Taat
15	2020	PT Soko Lancar	16 Juni 2020	Tidak Taat
16	2020	PT Kahatex	17 Juni 2020	Tidak Taat



No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	2020	PT Triana Harvesindo	25 Juni 2020	Tidak Taat
18	2020	PT Long Sun	6 Juli 2020	Taat
19	2020	PT Tridarma	7 Juli 2020	Tidak Taat
20	2020	PT Niagatama Hijau Raya	8 Juli 2020	Sudah tidak beroperasi
21	2020	PT Cipta Aneka Pangan	8 Juli 2020	Sanksi dari DLH Kota Cimahi
22	2020	PT Garuda Mas Semesta	9 Juli 2020	Taat
23	2020	PT Gucci Ratu Textile	10 Juli 2020	Tidak Taat
24	2020	PT Ras Jaya	21 Juli 2020	Tidak Taat
25	2020	PT Trisula Textile	22 Juli 2020	Tidak Taat
26	2020	PT Kawi Mekar	23 Juli 2020	Tidak Taat
27	2020	PT Ayoetex	23 Juli 2020	Taat
28	2020	PT Indo Extrusions	11 Agustus 2020	Tidak Taat
29	2020	PT Sinar Pangjaya Mulya	12 Agustus 2020	Tidak Taat
30	2020	PT Hegar Mulya	13 Agustus 2020	Tidak Taat
31	2020	PT Sansan Saudaratex Jaya 1	18 Agustus 2020	Tidak Taat
32	2020	PT Sinar Continental	1 September 2020	Tidak Taat
33	2020	CV Ragam Jaya Utama	2 September 2020	Tidak Taat
34	2020	PT Sama Indah	14 September 2020	Tidak Taat
35	2020	PT Guna Mitra Prima	15 September 2020	Tidak Taat
36	2020	PT Indowira Putra	16 September 2020	Tidak Taat
37	2020	PD SURYA	16 September 2020	Tidak Taat



No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	2020	PT NISSHINBO INDONESIA	24 September 2020	Tidak Taat
39	2020	PT WIJAYA KARYA	07 Oktober 2020	Tidak Taat
40	2020	PT. Anugrah Sinar Abadi	10 November 2020	Tidak Taat
41	2020	PT Ichitex	10 November 2020	Tidak Taat
42	2020	PT Setiabusanatex	17 November 2020	Tidak Taat
43	2020	CV Asiantex	17 November 2020	Tidak Taat
44	2020	PT Gede Indah	18 November 2020	Tidak Taat
45	2020	CV Suritex	19 November 2020	Tidak Taat
46	2020	PT ANTELAS	23 November 2020	Tidak Taat
47	2020	CV ALTATEX	23 November 2020	Tidak Taat
48	2020	PT AYASA DAYA ARSA	24 November 2020	Tidak Taat
49	2020	PT Helli Furniture	24 November 2020	Tidak Taat
50	2020	PT Wira Swasta Gemilang	7 Desember 2020	Tidak Taat
51	2020	CV Daya Utama Logam	10 Desember 2020	Tidak Taat
52	2020	PT Logam Bima	10 Desember 2020	Tidak Taat
53	2020	PT Gucci Ratu Textile	11 Desember 2020	Tidak Taat

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-44. Kebencanaan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Selatan	Rt. 01, 02 dan 04 Rw. 02 Melong	Banjir	3100	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah	Kp. Kebon Manggu Rt. 04 Rw. 20 Padasuka	Tanah Longsor	300	6	N/A	N/A
3	Cimahi Utara	Jl. Cikendal Rt. 01 Rw. 04 Cipageran	Rumah Roboh	6	6	N/A	N/A
4	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo Rt. 03 Rw. 06 Leuwigajah	Angin Puting Beliung (Angin Kencang)	100	N/A	N/A	N/A
5	Cimahi Tengah	Jl. Dustira Rt 02 Rw 20	Kebakaran	40	N/A	N/A	65.000.000
6	Cimahi Utara	Komp. Buciper Jl. Bina No.33 Rt.04 Rw.16 Kel. Citereup. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	63	N/A	N/A	23.000.000
7	Cimahi Selatan	Jl.Mukodar Dalam No.67 Rt. 01 Rw. 08	Kebakaran	0	N/A	N/A	20.000.000



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ciberem Cimahi Selatan					
8	Cimahi Tengah	Jl. Abdul Halim No. 14	Kebakaran	60	N/A	N/A	3.000.000
9	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.70	Kebakaran	15	N/A	N/A	3.000.000.000
10	Cimahi Selatan	Jl. Melong Asih Gg Delima 2 Kel Melong Kecamatan Cimahi Selatan	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	Tidak diketahui
11	Cimahi Selatan	Jl. Nanjung No. 108 Rt 4 Rw 13 Kel. Utama	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	1.000.000
12	Cimahi Selatan	Komp. Melong Green Garden Jl. Hercules Raya No. 26. Rt 2 Rw 23 Kel. Melong	Kebakaran	100	N/A	N/A	450.000.000
13	Cimahi Tengah	Jl. Cisangkan Girang Rt6 Rw 2 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	80.000.000
14	Cimahi Selatan	Jl. Industri Iv No.2 Kel Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	40.000.000
15	Cimahi Selatan	Jl. Mahar Martanegara No. 151 Rt.02 Rw.08 Cimahi Selatan	Kebakaran	450	N/A	N/A	250.000.000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Cimahi Selatan	Jl. Mahar Martanegara, Bawahflyofer Cimindi	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	35.000.000
17	Cimahi Utara	Jl. Paneli 1 2a Rt 5 Citereup	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	Tidak diketahui
18	Cimahi Utara	Komplek Cimindi Raya Blok B No. 4 Rt 4 Rw4. Pasirkaliki, Cimahi Utara	Kebakaran	200	N/A	N/A	50.000.000
19	-	Tol Km 124 Dari Arah Jakarta Ke Bandung	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	100.000.000
20	Cimahi Utara	Jl.Pasantren No. 24 Rt 01 Rw 05 Kel. Cibabat. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	25	N/A	N/A	900.000.000
21	Cimahi Tengah	Jl Cilember No. 278 Kel. Cigugur	Kebakaran	7.5	N/A	N/A	Tidak diketahui
22	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Ganirah No.148 Rt 05 Rw 05 Kel. Cibeber. Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	52	N/A	N/A	55.000.000
23	Cimahi Tengah	Jl. Mhs Mintareja Bo.234	Kebakaran	3	N/A	N/A	100.000.000
24	Cimahi Selatan	Jl.Nanggaleng Cirahayu Cibeber RW 07 Cimahi Selatan	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	Tidak diketahui



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Cimahi Selatan	Jl.Ibu Ganirah RT.01 RW.06 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	Tidak diketahui
26	Cimahi Selatan	Jl.Aki Gang Muasim 1 No. 266B Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi	Kebakaran	30	N/A	N/A	2.015.000.000
27	Cimahi Utara	Jl. Kolonel Masturi No. 130 Rt.03 Rw.01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	7.000.000
28	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Sangki Gg. Permata 5 Rt.04 Rw.13 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	15	N/A	N/A	10.000.000
29	Cimahi Tengah	Jl. Tarumanegara No. 57 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	21	N/A	N/A	20.000.000
30	Cimahi Selatan	Jl. Dakota Selatan 3 Komp. Melong Green Garden No.369b Rt.05 Rw.23 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	50	N/A	N/A	50.000.000
31	Cimahi Selatan	Jl. Karangsari No12 Rt 01 Rw 02. Kel. Cibereum	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	1.000.000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.75 Km.1,75	Kebakaran	60	N/A	N/A	20.000.000
33	Cimahi Tengah	Jl. Purbasari 1 Gg. H.Didi Rt 07 Rw 12 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	20	N/A	N/A	500.000
34	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeu Rt.05 Rw. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	200	N/A	N/A	Tidak diketahui
35	Cimahi Utara	Jl. Pakuhaji Rt.03 Rw.17 Kel. Cipageran. Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	1500	N/A	N/A	Tidak diketahui
36	Cimahi Selatan	Jl. Indutri Ii No.2 Rt.06 Rw.09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	10	N/A	N/A	Tidak diketahui
37	Cimahi Tengah	Jl. Hms Mintareja Rt. 01 Rw. 09 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	50	N/A	N/A	Tidak diketahui

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Cimahi Selatan	Jl. Ranca Bentang RT. 01 RW. 26 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	9	N/A	N/A	7.000.000
39	Cimahi Utara	Jalan Cidamar No. 14 RT.01 RW. 01 Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi Utara	Kebakaran	30	N/A	N/A	Tidak diketahui
40	Cimahi Tengah	Jl. Stasiun Barat Rt. 05 Rw. 20 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	12	N/A	N/A	1.000.000
41	Cimahi Utara	Jl. Pasantren No.101 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cibabat Cimahi Utara	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	Tidak diketahui
42	Cimahi Selatan	Komp. Baros Indah Rt.02 Rw.03 Kel.Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	N/A	N/A	N/A	3.000.000
43	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeu Rt.02 Rw. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	120	N/A	N/A	2.000.000.000



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Cimahi Selatan	Komp. Pondokmas Blok A10 No.26. Rt1 Rw16, Kel. Leuwigajah	Kebakaran	24	N/A	N/A	100.000.000
45	Cimahi Selatan	Jl Amirmahmud Rt 01 Rw 21 Cibereum	Kebakaran	850	N/A	N/A	2.800.000.000

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2020



**Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Kota	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cimahi Selatan	1.694	233.850	1,39	13,73
2	Cimahi Tengah	1.011	160.906	1,43	15,83
3	Cimahi Utara	1.332	163.155	2,27	12,09
	Cimahi	4.037	557.911	1,66	13,72

Keterangan:

1. Data Konsolidasi Bersih Kota Cimahi

Sumber: Profil Kependudukan Kota Cimahi, 2020

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kota	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m³/hari)	Volume Eksiting (m³)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)			
1	Kota Cimahi	Desa Sarimukti Kabupaten Bandung Barat	TPPAS Regional Sarimukti	Open Dumping	25,5	6.135,91	32,539,045

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m³/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cimahi Utara	163.155	406,25595
2	Cimahi Tengah	160.906	400,65594
3	Cimahi Selatan	233.850	582,2865

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-48. Jumlah Bank Sampah

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kelurahan Padasuka Kota Cimahi	2014	Bank Sampah Induk Kota Cimahi (Bank SAMICI)	-	18.614,51		Kota Cimahi	288 Unit, dan 1296 Nasabah perorangan	
2	RW. 17 Kelurahan Padasuka	2014	Bank Sampah PKK RW. 17 Padasuka	-	121,2				
3	RW. 08 Cibeureum	2014	Bank Sampah RW. 08 Cibeureum	-	11,31				
4	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2014	Bank Sampah RSUD Cibabat	-	1459,21				
5	Jl. Gedung empat Cimahi	2014	Bank Sampah Rumah Zakat	-	13,67				
6	Leuwigajah	2014	Bank Sampah SMAN 4 Cimahi	-	9,25				
7	Melong	2015	Bank Sampah SMAN 6 Cimahi	-	49,46				
8	Jl. Sukarasa No.26	2015	Bank Sampah SD Nurul Aulia	-	27,36				
9	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2015	Bank Sampah RS Kasih Bunda	-	296,13				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Leuwigajah	2015	Bank Sampah PT. Trisula	-	188,58				
11	Jl. KH Usman Dhomiri	2015	Bank Sampah Kantor Samici	-	40,42				
12	RT. 02 RW. 15 Kelurahan Leuwigajah	2015	Bank Sampah Leuwigajah Permai	-	15,88				
13	RW.03 Baros	2015	Bank Sampah Sehati	-	263,94				
14	Rw. 08 Kelurahan Cimahi	2015	Bank Sampah Rw. 08 Kelurahan Cimahi	-	243,92				
15	RT.02 RW.04 Permata	2015	Bank Permata 2	-	187,85				
16	Leuwigajah	2016	Bank Sampah Koperasi PT. Trisula	-	465,92				
17	RW. 12 Leuwigajah	2016	Bank Sampah RW. 12 Leuwigajah	-	22,96				
18	RW. 17 Cigugur Tengah	2016	Bank Sampah Anyelir RW. 17 Cigugur Tengah	-	245,98				
19	Kelurahan Cipageran	2016	Bank Sampah Eropa	-	121,97				
20	RW. 14 Pasirkaliki	2016	Bank Sampah Teratai	-	121,53				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2016	Bank Sampah SD Hikmah Teladan	-	10,54				
22	Jl. Kalidam	2016	Bank Sampah SMK Pusdikhub	-	10				
23	Jl. Sangkuriang No. 30	2017	Bank Sampah Pagar Nusantara SMK TI Garuda Nusantara	-	34,5				
24	Jl. Kebon Manggu No. 352 RT.03 RW. 21 Padasuka	2017	Bank Sampah Puskesmas Padasuka	-	14,46				
25	Jl. Encep Kartawirya No.20A Citeureup	2017	Bank Sampah Puskesmas Citeureup	-	11,88				
26	Jl. Jati Serut Cibabat	2017	Bank Sampah Puskesmas Cimahi Utara	-	128,13				
27	Pemkot Cimahi	2017	Bank Sampah Bagian Pemerintahan Pemkot	-	12,79				
28	RT.03 RW.05 Pasirkaliki	2017	Bank Sampah RT.03 RW.05 Paskal	-	376				
29	RW.03 Baros Seneng Utama	2017	Bank Sampah RW. 03 Baros	-	397,98				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	RW. 07 Pasirkaliki	2017	Bank Sampah RW. 07 Pasirkaliki	-	62,96				
31	RT.01 RW.19 Cigugur Tengah	2017	Bank Sampah Lavender	-	400,06				
32	Bandung	2018	Bank Sampah RSKB Halmahera	-	50,86				
33	Jl. Djulaeha Karmita Cimahi	2018	Bank Sampah Puskesmas Cimahi Tengah	-	11,08				
34	Citeureup	2018	Bank Sampah SLB	-	54,17				
35	Pemkot Cimahi	2018	Bank Sampah Dinkes Cimahi	-	9,46				
36	Jl. Amitr Mahmud No.675 Cimahi	2018	Bank Sampah PLN Area Cimahi	-	26,75				
37	Pemkot Cimahi	2018	Bank Sampah UPTD Labling	-	12,42				
38	Jl. Nanjung No. 82 Lagadar Margaasih	2018	Bank Sampah PT. Gistex	-	122,79				
39	RT.05 RW. 31 Melong	2018	Bank Sampah RT.05 RW. 31 Melong	-	297,08				
40	Komplek Ciptamas RW. 16 Leuwigajah	2018	Bank Sampah Ciptamas RW. 16 Leuwigajah	-	8,38				
41	RW. 04 Citeureup	2018	Bank Sampah RW. 04 Citeureup	-	100,5				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42	RT.01 RW. 18 Cibeureum	2018	Bank Sampah Cetar	-	159,63				
43	Komplek POLRI RW. 12 Cigugur Tengah	2018	Bank Sampah RW. 12 Komplek POLRES Cimahi	-	288,24				
44	RT.03 RW. 05 Cigugur Tengah	2018	Bank sampah Ciputri RW.05 Cigugur Tengah	-	150,04				
45	RT. 01 RW. 08 Cigugur Tengah	2018	Bank Sampah Bismillah	-	256,17				
46	RT.03 RW. 16 Baros	2018	Bank Sampah Sarbuk	-	208,54				
47	RT.03 RW. 04 Cigugur Tengah	2018	Bank Sampah Citaman RW. 04 Cigugur	-	223,5				
48	RT. 01 RW. 26 melong	2018	Bank Sampah Tabah	-	147,92				
49	RT.01 RW. 06 Leuwigajah	2018	Bank sampah Mawar	-	225,5				
50	RT. 07 RW. 18 Cibeureum	2018	Bank sampah Bambu Cimindi	-	267,5				
51	RT. 03 RW. 02 Cigugur Tengah	2018	Bank Sampah Salfa Marwah	-	340,2				
52	Jl. Rancabentang RT.06 RW. 27 Cibeureum	2018	Bank Sampah Cibeureum RT.06 RW. 27	-	263,33				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	Kp. Tangkil RT.04 RW. 07 Cigugur Tengah	2018	Bank sampah berkah RW. 07 Cigugur	-	162,32				
54	Jl. Kolonel Masturi GG. Margasari II RW.07 Cimahi tengah	2018	Bank sampah Marsa RW. 07 Kolmas	-	401,75				
55	Margamulya RT.03 RW. 01 Cimahi	2018	Bank Sampah Ecolillage Rena Margamulya	-	26,98				
56	RW. 22 Bukit Permata	2018	Bank sampah Puspa Bukit RW. 22 Permata	-	256,75				
57	RW. 11 Pasirkaliki Cimahi Utara	2018	Bank Sampah RW. 11 Pasirkaliki	-	85,23				
58	Jl. Baros No. 109 Cimahi	2019	Bank Sampah SMP Santo Mikael	-	33				
59	Jl. Taman Kartini Baros Cimahi	2019	Bank Sampah SD Kartika XIX-5	-	24,83				
60	Jl. Industri III No.5 Leuwigajah	2019	Bank Sampah PT. Chitose	-	282,75				
61	Jl. Kebon Rumput	2019	Bank Sampah Koperasi Yon Armed	-	101				
62	Jl. Padat Karya No.212 Cimahi Utara	2019	Bank Sampah Inaka Coffee	-	40,58				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
63	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2019	Bank Sampah PT. Griya Pratama Yogya Cimahi	-	508,28				
64	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2019	Bank Sampah Staff Tulipware	-	12,96				
65	Jl. Cidamar No.34 Pasirkaliki	2019	Bank Sampah Puskesmas Pasirkaliki	-	9,96				
66	Kp. Cibogo RT.02 RW. 06 Leuwigajah	2019	Bank Sampah Mawar 2	-	99,19				
67	Gg. H. Kodir RT.03 RW.17 Cibeureum	2019	Bank Sampah RW. 17 Cibeureum	-	112,5				
68	Blok Cisegel RT.06 RW. 09 Melong	2019	Bank Sampah Mekar Harapan 6 RW.09 Melong	-	291,83				
69	Jl. H. Nur No.17 RT.04 RW. 10 Cibabat Cimahi Utara	2019	Bank Sampah Mutty RW. 10 Cibabat	-	188				
70	Jl. Bina Remaja No. 20 Ciawitali RT.04 RW. 17 Citeureup	2019	Bank Sampah RW. 17 Kenanga Komplek Buciper	-	146,67				
71	Jl. Kebon Kopi Gg. Tirta Indah II RT.03 TW. 27 Cibeureum	2019	Bank Sampah Obor 327	-	129,87				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
72	Kihapit Timur No. 10 RT.10 RW. 08 Leuwigajah	2019	Bank sampah Blok Baru RW.08 Kihapit	-	116,94				
73	Jl. Sangkuriang Barat 2 Kp. Anggaraja RT. 04 Cipageran	2019	Bank Sampah Anggaraja RW. 04 Cipageran	-	350,89				
74	Komp. Unjani No. 53 RT.05 RW. 10 Cibeber	2019	Bank sampah Lestari RW. 10 Cibeber	-	57,78				
75	Jl. Joyodikromo RT.09 RW. 07 Kel. Utama	2019	Bank Sampah Hujung Kidul RW. 07	-	30,09				
76	Rusunawa Leuwigajah A2.14 RT. 12 RW. 09 Leuwigajah	2019	Bank Sampah Rusunawa Leuwigajah Gd. A RT. 12 RW. 09	-	31,89				
77	Rusunawa Leuwigajah Gedung B RT. 12 RW. 09 Leuwigajah	2019	Bank Sampah Rusunawa Leuwigajah Gd. B	-	28,08				
78	Perumnas Cijerah Blok 20 RT.02 RW. 16 Melong	2019	Bank sampah Pancalaksana RW. 16 Cijerah	-	262,18				
79	Cijerah II RW. 14 Melong	2019	Bank sampahMawar 14 Cijerah	-	170,73				



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
80	Komplek Cibogo Permai RT.06 RW. 14 Leuwigajah	2019	Bank Sampah Kartini RW. 14 Cibogo Permai	-	20,68				
81	Jl. Panday No. 104 RT.04 RW. 06 Karangmekar	2020	Bank sampah Panday	-	51,78				
82	Jl. Kihapit Barat Leuwigajah	2020	Bank Sampah Rusunawa Leuwigajah Gd. C	-	9,43				
83	Cibeber	2020	Bank Sampah Pondok Dominikus	-	60,03				
84	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2020	Bank Sampah RKM Cibabat	-	136,92				
85	Pemkot Cimahi	2020	Bank Sampah Bagian Hukum Pemkot	-	28,83				
86	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2020	Bank Sampah PT. Ayo Indotama Textile	-	35,33				
87	Jl. Kerkof GG. Warga RT.02 RW. 09 Leuwigajah	2020	Bank Sampah RA Mitahus Shiddiq	-	10,88				
88	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2014	Bank Sampah SDN Karangmekar Mandiri 1	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
89	Jl. Jend Sudirman No. 152 Cimahi	2014	Bank Sampah SMPN 2 Cimahi	-					
90	Jl. Djulaeha Karmita Cimahi	2014	Bank Sampah SDN Cimahi Mandiri 2	-					
91	Jl. Gatot Subroto Cimahi	2014	Bank Sampah SMA Santa Maria 2 Cimahi	-					
92	Jl. Baros Cimahi	2014	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 2	-					
93	Jl. Baros Cimahi	2014	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 6	-					
94	Jl. Rd Embang Artawidjaya No. 12	2014	Bank Sampah SMPN 1 Cimahi	-					
95	Jl. Pesantren Cimahi	2014	Bank Sampah SMAN 3 Cimahi	-					
96	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2014	Bank Sampah SMKN 1 Cimahi	-					
97	Jl. Raya Melong	2014	Bank Sampah SMPN 4 Cimahi	-					
98	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2014	Bank Sampah SMPN 9 Cimahi	-					
99	Jl. Cipageran	2014	Bank Sampah SMPN 5 Cimahi	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
100	Jl. Sukarasa No.136	2014	Bank Sampah SMKN 3 Cimahi	-					
101	Jl. Permana	2014	Bank Sampah BEM STKIP Pasundan	-					
102	Cibeber	2014	Bank Sampah Alelopati Unjani	-					
103	Leuwigajah	2014	Bank Sampah MAN Cimahi	-					
104	Jl. Kihapit Barat Leuwigajah	2014	Bank Sampah SMPN 8 Cimahi	-					
105	Jl. Sriwijaya	2014	Bank Sampah TK Kartika X-14	-					
106	Cimahi	2014	Bank Sampah TK Tunas Mekar	-					
107	Jl. Cihanjuang	2014	Bank Sampah SDIT Nur Ar Rahman	-					
108	Jl. Pecinan Cimahi	2015	Bank Sampah SMAN 1 Cimahi	-					
109	KPAD Sriwijaya	2015	Bank Sampah SMAN 2 Cimahi	-					
110	Jl. Terusan Jend. Sudirman	2015	Bank Sampah Stikes A. Yani	-					
111	Jl. Djulaeha Karmita Cimahi	2015	Bank Sampah SDN Cimahi Mandiri 5	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
112	Jl. Ciawitali Cimahi	2015	Bank Sampah SMP Pasundan 1 Cimahi	-					
113	Jl. Sangkuriang	2015	Bank Sampah SMK Taruna Mandiri	-					
114	Jl. Encep Kartawirya No.153 Citeureup	2015	Bank Sampah SMK PGRI 2	-					
115	KPAD Sriwijaya	2016	Bank Sampah SMPN 3 Cimahi	-					
116	Jl. Kolonel Masturi Cimenteng Terobosan Cipageran	2016	Bank Smapah SMPN 11 Cimahi	-					
117	Jl. Jend Amir Mahmud Kota Cimahi	2016	Bank Sampah MI Cimindi	-					
118	Jl. Sukimun Baros Cimahi	2016	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 1	-					
119	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2017	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 3	-					
120	Jl. Jend. Sudirman Cimahi	2017	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 5	-					
121	Perum Cijerah 2 Blok 15	2017	Bank Sampah SDN Melong Mandiri 3	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
122	Jl. Pesantren Cimahi	2017	Bank Sampah SDN Cibabat Mandiri 4	-					
123	Jl. Gatot Subroto Cimahi	2017	Bank Sampah SMPN 6 Cimahi	-					
124	Melong	2017	Bank Sampah SDN Melong Mandiri 1	-					
125	Melong	2017	Bank Sampah SDN Melong Mandiri 5	-					
126	Cibeber	2018	Bank Sampah BEM KMF Psikologi Unjani	-					
127	Cibeber	2018	Bank Sampah MI cerdas Nurani	-					
128	Citeureup	2018	Bank Sampah The Brings SLBN -A	-					
129	Jl. Sangkuriang	2018	Bank Sampah SMK Sangkuriang 2 Cimahi	-					
130	Baros	2018	Bank Sampah SMK KB Pusdikpal Cimahi	-					
131	Jl. Sam Ratulangi Cimahi	2018	Bank Sampah SMA Kartika XIX-4 Cimahi	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
132	Komplek Pemda Padasuka	2019	Bank sampah SDN Padasuka Mandiri 1	-					
133	Jl. Cihanjuang	2019	Bank Sampah SMP IT Nur Ar Rahman	-					
134	Cibeber	2019	Bank Sampah STIA Cimahi	-					
135	Cibeber	2019	Bank Sampah BEM KM FEB Unjani	-					
136	Jl. Amitr Mahmud Gg. Kelurahan No.11 Cibeureum Cimahi	2019	Bank Sampah SDN Cibeureum 5 Cimahi	-					
137	Jl. Abdul Halim Cigugur Tengah	2019	Bank Sampah SDN Sindangsari	-					
138	Jl. Rorojongrang 2 Melong	2019	Bank Sampah SD Juara Cimahi	-					
139	Jl. Baros	2019	Bank Sampah SD Santa Maria	-					
140	Jl. Encep Kartawirya no 75 Cimahi	2019	Bank Sampah BPK Penabur Cimahi	-					
141	Jl. Cibogo Leuwigajah	2019	Bank Sampah TK Nursaadah	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
142	Jl. Kihapit Barat Leuwigajah	2019	Bank Sampah TK Negeri Pembina Cimahi	-					
143	Jl. Encep Kartawirya Cimahi	2019	Bank Sampah SMk Bhakti Kencana	-					
144	Jl. Muara Takus Raya Pharmindo	2019	Bank Sampah TK Daya Nusa	-					
145	Jl. Daeng M. Ardiwinata	2019	Bank Sampah MTS-MA Asih Putera	-					
146	Jl. Raya Cibabat Cimahi	2019	Bank Sampah MI Asih Putera	-					
147	Jl. Kebon Cau Setiamanah	2019	Bank Sampah TK Asih Putera 2	-					
148	Jl. Pesantren permai Cibabat	2019	Bank Sampah TK Asih Putera 1	-					
149	Jl. Gatot Subroto Cimahi	2019	Bank Sampah SMAN 5 Cimahi	-					
150	Jl. Baros	2019	Bank Sampah SDN Baros Mandiri 4	-					
151	Cigugur Tengah	2019	Bank Sampah MTS Fatahillah	-					
152	Cipageran	2020	Bank Sampah Cipageran Mandiri 1	-					



No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
153	Jl. Maharmartanegara Kota Cimahi	2020	Bank Sampah Cibeureum Mandiri 1	-					
154	Komp. Cibaligo permai	2020	Bank Sampah SD IT Daarul Fikri	-					
155	Jl. Kolonel Masturi RT.01 RW.05 Kel. Cimahi	2020	Bank Sampah Tunas Bhakti Pertiwi	-					
156	Jl. Raya Cilember Cimindi	2020	Bank Sampah SMP Hikmah Teladan	-					

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



**Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeliharaan Gedung TPS, TPST dan Pengelolaan Persampahan	TPS Pasar Baros, TPS Akses Tol Baros, TPS Pasar Cimindi, TPS Pasar Atas, TPS 3R 31 Melong dan Bank Samici (Padasuka)	DLH
2	Pengadaan Peralatan Bahan Penunjang Operasional Kebersihan di TPPAS dan TPS	Kota Cimahi	DLH
3	Pengadaan Kompos, Peralatan dan perlengkapan Pengomposan serta dan Daur Ulang	Kota Cimahi	DLH
4	Pengadaan Motor Roda 3 Sampah	Kota Cimahi	DLH
5	Pengadaan Gerobak Dorong	Kota Cimahi	DLH
6	Peringatan HPSN Tingkat Kota Cimahi	Kota Cimahi	DLH
7	Pengadaan Peralatan Penunjang Bank Sampah	Kota Cimahi	DLH
8	Pemeliharaan Peralatan Persampahan	Kota Cimahi	DLH
9	Mall Pelayanan Publik	Jl. Aruman RT.003 dan RT.004 RW.004 Kel. Pasirkaliki Ke.Cimahi Utara Kota Cimahi	DPMPTSP
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	DPUPR
11	Pembangunan Lahan Parkir Museum TNI	Pusdik Armed Kodiklat TNI AD	DPUPR



No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Sarana dan Prasarana TNI (Kodim)	Kodim 0609 Cimahi	DPUPR
13	Pembangunan Pujasera Museum TNI	Pusdik Armed Kodiklat TNI AD	DPUPR
14	Pembangunan Taman Museum TNI	Pusdik Armed Kodiklat TNI AD	DPUPR
15	Penataan Interior Instansi Vertikal	Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	DPUPR
16	Penataan Halaman Instansi Vertikal	Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	DPUPR
17	Penataan Lahan Parkir Plaza Rakyat (sisa DAK)	Plaza Rakyat, 'Pemkot Cimahi	DPUPR
18	Sarana Pemkot Cimahi (Pembuatan Tempat Cuci Tangan)	Gedung A, B, C 'Pemkot Cimahi	DPUPR
19	Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres	Polres Kota Cimahi	DPUPR
20	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemkot Cimahi	Gedung A, B, C Pemkot Cimahi	DPUPR
21	Pengecatan Masjid Agung Kota Cimahi (sisa DAK)	Masjid Agung Kota Cimahi	DPUPR
22	Pengawasan Teknis Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kota cimahi I (DAK TA. 2020)	Kota Cimahi	DPUPR



No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Pemeliharaan Berkala Jalan Mahar Martanegara (DAK TA. 2020)	Jalan Mahar Martanegara	DPUPR
24	Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Kumenli (DAK TA. 2020)	Jalan Pasir Kumenli	DPUPR
25	Pengawasan Jalan Wilayah Tengah I	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Panday - Jalan Pacinan - Jalan KH Usman Dhomiri 	DPUPR
26	Pengawasan Jalan Wilayah Utara I	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Babakan Loa - Jalan Sirnarasa - Jalan Cikendal - Jalan Encep Kartawiria 	DPUPR
27	Pemeliharaan Berkala Jalan Karya Bakti (DAK TA. 2020)	- Jalan Karya Bakti	DPUPR
28	Pemeliharaan Berkala Jalan Paku Haji (DAK TA. 2020)	- Jalan Paku Haji	DPUPR
29	Pemeliharaan Berkala Jalan Cimenteng (DAK TA. 2020)	- Jalan Cimenteng	DPUPR
30	Pemeliharaan Berkala Jalan Budi (DAK TA. 2020)	- Jalan Budi	DPUPR
31	Pengawasan Teknis Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kota cimahi III (DAK TA. 2020)	Kota Cimahi	DPUPR
32	Pemeliharaan Berkala Jalan Kebon Kopi (DAK TA. 2020)	- Jalan Kebon Kopi	DPUPR

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
33	Pemeliharaan Berkala Jalan Ranca Bentang (DAK TA. 2020)	- Jalan Ranca Bentang	DPUPR
34	Pengawasan Jalan Wilayah Selatan II TA. 2020	- Jalan Melong Raya - Jalan Melong Asih - Jalan Kerkof - Jalan Ibu Ganirah - Jalan Ciseupan	DPUPR
35	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Baros Mandiri 3 Cimahi	Dinas Pendidikan
36	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Cibeber 4 Cimahi	Dinas Pendidikan
37	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Utama Mandiri 1 Cimahi	Dinas Pendidikan
38	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Bina Harapan Cimahi	Dinas Pendidikan
39	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Melong Mandiri 3 Cimahi	Dinas Pendidikan
40	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Baros Mandiri 4 Cimahi	Dinas Pendidikan
41	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Leuwigajah 2 Cimahi	Dinas Pendidikan
42	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Cibabat Mandiri 1 Cimahi	Dinas Pendidikan
43	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Setiawarga Cimahi	Dinas Pendidikan
44	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Cibodas 1 Cimahi	Dinas Pendidikan



No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
45	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Cimindi 5 Cimahi	Dinas Pendidikan
46	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Baros Mandiri 5 Cimahi	Dinas Pendidikan
47	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Sukanampa Cimahi	Dinas Pendidikan
48	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Tunas Harapan Cimahi	Dinas Pendidikan
49	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Melong Mandiri 4 Cimahi	Dinas Pendidikan
50	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Melong Mandiri 7 Cimahi	Dinas Pendidikan
51	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Padasuka Mandiri 4 Cimahi	Dinas Pendidikan
52	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Pasirkaliki Mandiri 1 Cimahi	Dinas Pendidikan
53	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Kihapit Cimahi	Dinas Pendidikan
54	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Leuwigajah 6 Cimahi	Dinas Pendidikan
55	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Cibodas 3 Cimahi	Dinas Pendidikan
56	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMPN 11 Cimahi	Dinas Pendidikan

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Okib Suryadi (mengadukan sumur sendiri)	Air sumur bau amis diduga dari <i>Septic tank</i> Warga yang letaknya 1 meter dari air sumur	1/13/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan penjelasan kepada pengadu bahwa ini bukan pengaduan yang disebabkan pencemaran lingkungan. 2. Dugaan air sumur berbau kemungkinan disebabkan letak air sumur berdekatan dengan septitank warga setempat. 3. Disarankan untuk melakukan uji lab air sumur ke UPTD Laboratorium DLH Kota Cimahi untuk memastikan air sumur tersebut layak tidaknya di konsumsi. 4. Pengaduan selesai
2	Surat dari kelurahan leuwigajah nomor surat 400/018/kel. LG	Sumur milik bp. Hambali mengeluarkan uap panas pada tanggal 29 No. 2020 (selama 5 jam) diduga dari limbah domestik	31/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH mengirimkan surat ke dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk dianalisa lebih lanjut. 2. Melakukan sampling air sumur di 2 titik. 3. Melakukan titik lokasi sampling dan uji air sampling di 7 titik di sekitar sumur Bpk Hambali tanggal 2 No. 2020 4. Rapat pembahasan sumur warga Kel. Leuwigajah tanggal 10 Juni 2020 dengan dinas terkait (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>kesehatan dan UPTD Lab Lingkungan Kota Cimahi)</p> <p>5. Hasil rapat telah dilaporkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadis DLH berupa nota dinas nomor 660/071/PHL tanggal 23 Juni 2020 - Wali Kota berupa Nota dinas nomor 660.3/679-ND/PHL tanggal 26 Juni 2020 <p>Hasil Rapat Pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akan meningkatkan program IPAL komunal - sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan lingkungan - menguatkan program PPM (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) di kelurahan leuwigajah agar diprioritaskan untuk pembuatan septic tank <p>6. Pengaduan selesai</p>
3	<p>Surat dari Kelurahan Melong Green Kecamatan Cimahi Selatan (RW 28)</p>	<p>-No. Cipta Aneka Pangan Prima melakukan kegiatan pengolahan biji coklat yang mengeluarkan bau tak sedap yang mengakibatkan pusing kepala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suara Bising dari mesin produksi - Pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan Kesehatan 	<p>20 Mei 2020</p>	<p>1. No. Cipta Aneka Pangan Prima untuk melakukan uji kualitas kebauan spesifik industri makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah melakukan uji lab kebisingan dan kebauan di lokasi sebanyak 6 titik - hasil uji lab dibawah baku mutu yang dipersyaratkan. <p>2. tanggal 16 Juni 2020 telah dilakukan mediasi dengan No. Cipta Aneka Pangan di kelurahan Melong.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil mediasi disampaikan ke Wali Kota berupa Nota dinas Nomor 337/674-ND/PHL

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>tanggal 25 Juni 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil mediasi tidak ada kesepakatan antara warga RW28 dan No. cipta aneka pangan. - Tanggal 23 Juni 2020 telah terjadi permufakatan dalam permusyawaratan tentang penanganan lingkungan akibat aktivitas produksi di No. Cipta Aneka Pangan Prima berupa perjanjian kesepakatan antara No. Cipta Aneka pangan Prima dengan masyarakat RW 28 Melong Green Garden yang ditandatangani oleh Natalia Alimmargono direktur No. CAPP dengan Tri Djoko Kuntjoro ketua RW 28 - Verifikasi pengaduan lanjutan pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan hasil : No. Cipta Aneka Pangan Prima telah melakukan usaha pengurangan bau di proses produksi, dengan cara memasang alat hepafilter dan filter karbon dan kebisingan dengan memasang peredam berupa pemasangan triplek permesin yaitu di lokasi blower di lantai 3, hummermill di lantai 2 dan pulvilizner di lantai 1. - Verifikasi pengaduan bersama DLH Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum Harum pada tanggal 1 September 2020, dengan hasil : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh No. Aneka Cipta Pangan Prima yang



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, dengan mengenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik No. Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan SK sanksi administratif nomor 660/Kep. 71-DLH/2020 tanggal 10 September 2020 kepada No. CAPP, penyerahan SK Sanksi diserahkan pada tanggal 15 September 2020. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah berkirim surat nomor 337/984/PHL tanggal 17 September 2020, ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah berkirim surat ke Direktur Pengaduan, pengawasan dan sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor surat 337/1144/PHL tanggal 27 Oktober 2020. - Hasil Verifikasi sudah disampaikan ke pengadu via telepon - Pengaduan Selesai



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Surat dari Kelurahan Citeureup Cimahi Utara (RT 5, RW 1)	adanya pembakaran sampah diduga dari warga RT5 RW1 yang menimbulkan asap , bau tidak sedap dan gangguan pernafasan .	2 Juli 2020 (No. BA 003)	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan hasil verifikasi pengaduan pembakaran sampah tanggal 13 juli 2020 yang dipimpin oleh Kepala DLH dan dihadiri oleh ketua RW 5 dan perwakilan warga RT1 dan RT5 Hasil rapat disimpulkan: <ul style="list-style-type: none"> Semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah Warga Di RT 05 / RW 01 siap untuk iuran sampah Petugas pengangkut sampah disiapkan oleh ketua RW 01 Motor sampah segera dipinjamkan dari DLH Kota Cimahi sampai diganti dengan motor bantuan yang baru. Setelah motor sampah diterima ketua RW 01 maka tempat sampah dibongkar dan tidak ada lagi pembakaran sampah. Membuat laporan berupa Nota dinas nomor 660/85/PHL ke kepala dinas DLH Tanggal 13 Juli 2020 Pengaduan Selesai
5	No. Suherman (Kp. Kihapit Barat No. 295, kel. Leuwigajah)	Diduga dari kegiatan operasional galian c yang menyebabkan Kebisingan dan getaran dari aktivitas peledakan dan mobilisasi unit	30 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Membuat surat pelimpahan pengananan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat nomor 067/870/PHL Hal Pelimpahan Pengaduan tanggal 14 agustus 2020, surat tembusan Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPMPTSP Provinsi, ESDM Prov, Sekda Kota



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>- Debu dan kemacetan akibat dari padatnya mobilisasi unit perusahaan.</p>		<p>Cimahi, Camat CimSEI, Lurah Leuwigajah, Lurah Cibeber</p> <p>2. DLH Kota Cimahi tidak memiliki kewenangan dalam penanganan pengaduan karena lokasi kegiatan di KBB sedangkan dampak tercemarnya Kota Cimahi sesuai Permen Nomor P.22 /MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang tatacara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan/atau perusakan hutan dan izin usaha operasional pertambangan dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Dan lokasi kegiatan di KBB</p> <p>3. Telah dilakukan pembahasan hasil verifikasi pengaduan terhadap pertambangan H Nunu Abidin pada tanggal 15 september 2020 di Kantor DLH Provinsi Jawa Barat dengan Nomor BA : 12/BA-Bid.IV/2020</p> <p>4. Telah mengirim surat ke lurah leuwigajah dan cibeber nomor 337/990/PHL perihal tindak lanjut pengaduan terkait rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan yang dilaksankn oleh DLH Provinsi Jawa Barat dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan H. Nunu Abidin wajib memasang patok batas wilayah izin usaha pertambangan dengan pengawasan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Tambang.

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> - Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan H. Nunu Abidin wajib menindaklanjuti temuan hasil verifikasi lapangan. - Sesuai Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti temuan hasil verifikasi dengan memberikan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pemberhentian Kegiatan Kepada Pertambangan H. Nunu Abidin sampai dilaksanakannya seluruh kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan dan dokumen lingkungan - Pengaduan dinyatakan selesai
6	Wartawan Saktimedianews.id	<p>Diduga adanya pencemaran udara dan suara bising dari mesin pengering limbah B3 di No. Ayoe Indotama Textile</p> <ul style="list-style-type: none"> - diduga Adanya suara bising dari mesin pengering limbah B3 yang mengganggu dari sisi kesehatan, ekonomi dan kenyamanan - diduga adanya pencemaran udara dari hasil pengegeringan <i>sludge</i> limbah B3 - diduga ada limbah batu bara dan limbah B3 yang 	24/09/2020	<p>Permasalahan akan diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan warga RW 7 kelurahan utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pihak perusahaan ada mis komunikasi dengan operator mesin pada waktu itu mesin pengering limbah dalam keadaan bermasalah seharusnya mesin dimatikan namun oleh operator mesin tetap digunakan dan melakukan proses pengeringan <i>sludge</i>. 2. Pihak perusahaan akan memberi peringatan kepada operator jika mesin masih bermasalah akan tetapi tetap dijalankan , akan ditindak sesuai dengan prosedur perusahaan. 3. Dilakukan uji kualitas udara ambien dan udara emisi tanggal 11 September 2020 oleh Lab



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>dibakar sehingga menimbulkan bau tidak sedap sehingga menimbulkan polusi di lingkungan RW 7 Kelurahan Utama</p>		<p>terakreditasi LPKL , No. hasil memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pada tanggal 16 November 2020 DLH memberikan SK sanksi administratif berupa teguran tertulis nomor 660/Kep.80-DLH/2020 5. Poin Sanksi yang diberikan berupa optimalisasi IPAL dengan batas waktu 120 hari kalender (No. Ayoutex melaporkan hasil uji kualitas air limbah di bln oktober, November dan Desember ke DLH Kota Cimahi) 6. Closing Sanksi Administratif tanggal 25 Februari 2021 7. Pengaduan Selesai.
7	H. Deden Hidayat	<p>- Aliran air sungai diduga tercemar, bau dan berbusa - kolam ikan milik p deden bau dan berwarna hitam , menurut pengakuannya iakn dalam kolam mati dan air tidak mengalir. - terdapat kebisingan yang berasal dari aktifitas pabrik dan asap dari cerobong atas kegiatan industri.</p> <p>Diduga dari pembuangan limbah produksi dari pabrik-</p>	5 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis dan kajian lebih lanjut atas pengaduan tersebut berupa : Hasil laboratorium sampling air yang telah diambil (14 hari kerja dar tanggal 5 Oktober) 2. Verifikasi lapangan lanjutan untuk mengetahui adanya rembesan /kebocoran atau bypass dari industri sekitar. 3. Kajian potensi cemaran lain di lokasi kejadian 4. Bila hasil uji laboratorium mengindikasikan bahwa pencemaran akibat kegiatan industri di sekitar lokasi maka diperlukan Verifikasi lapangan pada industri sekitar yaitu No. Nisshinbo, No. Ragam Jaya Utama, No. Long Sun dan No. Sukses Investa Anugrah Propertindo



No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pabrik industri di sekitar aliran Sungai Cisangkan Hilir		5. Dari hasil uji kualitas lab bahwa air permukaan sungai cisangkan diduga tercemar 6. Tanggal 5 November 2020 melakukan verifikasi pengaduan ke No. SIAP dengan hasil : - telah melakukan perbaikan dan No. arah cerobong asap ke lokasi No. SIAP - telah menutup saluran pembuangan air limbah domestik dari toilet karyawan. 7. akan menyampaikan laporan hasil verifikasi pengaduan ke H Deden Hidayat sebagai pengadu. 8. Pengaduan selesai

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-51. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LSM Sadar	Kota Cimahi	N/A	Jln. Sadarmanah Kelurahan Cibeber
2	KPPLH Zarambah	Kota Cimahi	N/A	Jln. Kolonel Masturi
3	GPI Kota Cimahi	Kota Cimahi	N/A	
4	Earth Hour Kota Cimahi	Kota Cimahi	N/A	Jl. Cihanjuang
5	Komunikasi Gowes Onthel	Kota Cimahi	N/A	Jln. Gunung Batu Pasirkaliki
6	Komunikasi Reptil	Kota Cimahi	N/A	
7	LSM Kompas	Kota Cimahi	N/A	
8	LSM Solusi	Kota Cimahi	N/A	Jln. Cisurupan Rt. 05/08 Kel. Citeureup Tlp. 081220165099 (Darmudji) Cimahi
9	KNPI	Kota Cimahi	N/A	Jln Kolonel Masturi No.2 B Rt.07/02 Kelurahan Cimahi
10	FPRB Kota Cimahi	Kota Cimahi	N/A	

Keterangan : Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada pendataan

Sumber : Kesatuan Pembangunan Kota Cimahi, 2020



**Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	6	2	8
2	S1	12	15	27
3	D IV	2	1	3
4	D III	1	2	3
5	SMA	28	-	28
6	SMP	8	1	9
7	SD	14	-	14

Keterangan :

Sumber : Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf yang sudah diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	PPLH	1	1	2	2
2.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS LH	2	0	2	0
3.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	0	0
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat staf yang dimaksud

Sumber: Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RW 5 Kelurahan Citeureup	Lokasi Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2020
2	RW 18 Kelurahan Padasuka	Lokasi Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2020
3	No. Trisula Textile Industries	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2020
4	No. Central Georgette Nusantara	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2020
5	No. Chitose Internasional Tbk	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2020
6	No. Kahatex Indah	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
7	No. Bina Nusantara Prima	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
8	No. Dewa Sutratex I	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
9	No. Guna Mitra Prima	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
10	No. Ayoe Indotama Textile	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
11	No. Oriental Embroidery	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	No. Sanbe Farma	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
13	No. Holy Pharma	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
14	No. Heksatex Indah	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020
15	No. Fuji Palapa Textile	Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) BIRU	Gubernur Jawa Barat	2020

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



**Tabel-55. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi dan Publikasi Satgas Citarum Harum Sektor 21	Sektor Citarum Harum		No. 2020
2	Pelatihan Online Menolah Sampah Organik	Universitas Muhammadiyah Bandung		No. 2020
3	Penanaman Pohon di Eks TPA Leuwigajah	Nemov Foundation		Februari 2020
4	Zero Waste Academy	YPBB		No. – April 2020
5	Jalan Sehat Lingkungan Bersih	SMK Sangkuriang 1		No. 2020
6	Webinar Series Zero Waste Academy Refleksi Berbagi Pengalaman	YPBB		Agustus 2020
7	Webminar Tantangan dan Peluang pelaksanaan pengurangan pembatasan plastik sekali pakai dan penanganan sampah dengan model zero waste	YPBB		Agustus 2020

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Silaturahmi dan Evaluasi Gerakan Mandiri Sampah (GEMAS) RW. 19 Padasuka	RW. 19 Padasuka		November 2020
9	Peningkatan kemampuan teknis kader perencana	Bappeda	Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Tingkat RW (152 orang)	Pelatihan selama 2 (dua) hari
10	Penguatan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berupa pelaksanaan fasilitasi kegiatan kompetisi inovasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kota Cimahi	Bappeda	Komunitas pegiat penanggulangan kemiskinan (komunitas yang menang adalah komunitas pengelolaan sampah organik melalui magot, komunitas daur ulang sampah organik bernilai ekonomi dan komunitas pendidikan non formal)	Kompetisi dilaksanakan bulan Oktober- Desember 2019

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

**Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	PERTANIAN	65.075	66.491
1	a. Pertanian Sempit	0	0
	- Tanaman Bahan Makanan	0	0
	- Tanaman Perkebunan	0	0
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	0	0
	b. Kehutanan	0	0
	c. Perikanan	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0
3	Industri Pengolahan	15.408.258	15.377.219
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	124.013	117.728
5	Bangunan	4.086.435	3.871.428
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.170.267	4.853.607
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.211.693	3.707.656
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.248.748	1.264.946
9	Jasa-Jasa	2.911.534	2.951.611
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	32.226.023	32.210.687
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	32.226.023	32.210.687

Keterangan: -

Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, 2021



Tabel-57. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	33.588,51	34031,8
	a. Pertanian Sempit	0,00	0,00
	- Tanaman Bahan Makanan	0,00	0,00
	- Tanaman Perkebunan	0,00	0,00
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,00	0,00
	b. Kehutanan	0,00	0,00
	c. Perikanan	0,00	0,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	10.584.561,09	10258472,6
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	67.507,62	67684,8
5	Bangunan	2.913.314,19	2747119,3
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.722.031,13	3426655,4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.652.387,61	3143286,1
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	888.221,22	902007,5
9	Jasa-Jasa	1.780.217,90	1761304,2
PRODUK DOMESTIK BRUTO		22.641.829,27	22.340.561,70
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		22.641.829,27	22.340.561,70

Keterangan: -

Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, 2021

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Daerah	-	3 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020	PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
2.	Peraturan Daerah	-	7 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	Peraturan Wali Kota	-	13 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020	REHABILITASI RUMAH YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DI KOTA CIMAHI
4.	Peraturan Wali Kota	-	42 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
5.	Peraturan Wali Kota	-	46 Tahun 2020 tanggal 17 September 2020	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI
6.	Peraturan Wali Kota	-	60 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020	IZIN TEMPAT USAHA

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak terdapat produk hukum yang dimaksud

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, 2020



Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBD	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	79.200.000	3.157.500
2	APBD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	650.597.200	468.304.160
3	APBD	Pengelolaan b3 dan limbah b3	50.190.000	1.532.000
4	APBD	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	104.047.040	0
5	APBD	Pengembangan produksi ramah lingkungan	51.267.800,0	-
6	APBD	Koordinasi penyusunan amdal	470.999.400	173.323.950
7	APBD	Penegakkan hukum lingkungan hidup	182.743.240	85.087.850
8	APBD	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	531.178.000	119.412.231
9	APBD	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	983.754.200	33.515.000
10	APBD	Pengendalian dampak perubahan iklim	174.838.400	36.894.880
11	APBD	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1.151.433.420	6.185.500
12	APBD	Peningkatan kinerja daur ulang sampah organik	1.581.800.400	777.160.300
13	APBD	Peningkatan kinerja daur ulang sampah non organik	210.790.000	922.609.500
14	APBD	Pemantauan kualitas udara	286.743.000	43.386.200
15	APBD	Pemantauan kualitas lingkungan	562.329.900	238.567.860
16	APBD	Peningkatan kapasitas pelayanan laboratorium	1.172.088.300	845.182.122



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	APBD	Pelayanan pengelolaan persampahan	10.263.934.500	10.217.870.000
18	APBD	Kerjasama pengelolaan persampahan	5.699.800.000	5.380.961.200
19	APBD	Peningkatan kinerja pengangkutan sampah terpilah	682.570.000	78.750.000
20	APBD	Peningkatan kinerja pengumpulan sampah terpilah	5.782.889.000	1.833.281.469
21	APBD	Pengadaan alat angkut sampah dump truck	808.421.000	0
22	APBD	Pengelolaan persampahan perkotaan - revitalisasi tps 3R	550.000.000	-
23	APBD	Pengelolaan persampahan perkotaan - penyediaan sarana dan prasarana persampahan	1.370.000.000	-
24	APBD	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	232.284.600	204.916.100
25	APBD	Pengembangan data dan informasi lingkungan	175.906.400	47.332.800
26	APBD	Pemeliharaan rth	217.681.480	778.759.917
27	APBD	Pembangunan ruang terbuka hijau	358.628.270	96.855.800
28	APBD	Penyediaan alat tulis kantor	55.000.000	33.646.292
29	APBD	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	122.515.000	81.048.000
30	APBD	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	113.010.000	87.210.000
31	APBD	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	6.450.500.000	6.203.082.652
32	APBD	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	126.450.449	55.375.000
33	APBD	Penyediaan gudang kantor	50.000.000	50.000.000
34	APBD	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.762.000	1.898.000
35	APBD	Penataan arsip daerah	65.513.800	67.780.900
36	APBD	Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	335.844.000	614.398.752



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	APBD	Penyediaan makanan dan minuman	49.610.000	21.545.000
38	APBD	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	200.000.000	153.756.332
39	APBD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000	9.727.500
40	APBD	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	86.142.200	48.491.200
41	APBD	Penyusunan laporan inventaris barang	7.353.000	0
42	APBD	Penyusunan laporan keuangan	17.559.800	0
43	APBD	Penyusunan renstra dan renja pd	76.315.000	34.670.000
44	APBD	Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, lkip dan lppd pd	21.264.000	2.654.750
45	APBD	Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	506.036.000	278.252.500
46	APBD	Program pengendalian pemanfaatan ruang	1.304.237.990	415.181.200
47	APBD	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	49.466.762.968	29.836.894.173
48	APBD	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	137.134.625	229.238.000
49	APBD	Peningkatan surveillance epidemiologi penanggulangan wabah	152.657.000	49.945.000
50	APBD	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	9.055.348.516	1.663.878.000
51	APBD	Pemeliharaan dekorasi kota	933.145.000	0
52	APBD	Pembangunan dekorasi kota baru	3.379.430.950	0
53	APBD	Pemeliharaan taman	3.180.379.537	2.548.024.572
54	APBD	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah	586.454.000,0	0
55	APBD	Pembangunan sarana prasarana air limbah	12.801.456.635	5.062.233.688



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	APBD	Pengelolaan pelayanan air limbah domestik	1.663.147.872	1.178.181.800
57	APBD	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.382.016.600	3.335.836.950
58	APBD	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	645.250.000	0
59	APBD	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	8.419.974.776	3.868.045.089
60	APBD	Pengelolaan pelayanan air bersih	1.898.390.528	2.200.100.716
61	APBD	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	1.772.930.000	1.154.900.000
62	APBD	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	4.373.732.578	20.754.698.153
63	APBD	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	294.172.200	9.827.394.809
64	APBD	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	7.876.561.000	7.912.192.388
65	APBD	Pengelolaan rusunawa	3.217.173.200	2.950.743.750
66	APBD	Pengadaan tanah untuk fasilitas perumahan dan permukiman	33.276.966.528	0
67	APBD	Pengadaan pemakaman	556.124.920	0
68	APBD	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	3.118.088.092	768.863.600
69	APBD	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	94.606.000	74.455.000
70	APBD	Pengelolaan pemakaman	556.124.920	444.461.000
71	APBD	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	291.225.200	112.619.500
72	APBD	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	1.247.400.000	1.309.016.100



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	APBD	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	0	426.801.556
74	APBD	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	0	92.909.500
75	APBD	Pengawasan pemanfaatan ruang	0	322.271.700
76	APBD	Penyediaan makanan dan minuman	0	21.545.000
77	APBD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	37.324.750
78	APBD	Pembinaan pegawai	0	101.500.000
79	APBD	Peningkatan saluran drainase	0	3.335.836.950
80	APBD	Program peningkatan pelayanan air bersih	0	6.068.145.805
81	APBD	Program peningkatan kapasitas sungai dan pengendali banjir	0	31.736.992.962
82	APBD	Pembangunan taman baru	0	291.779.880
83	APBD	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan	0	112.619.500
Jumlah			197.375.882.434	168.381.214.308

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat anggaran untuk kegiatan yang dimaksud

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2020



Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	Rp158.937.180.859
2	Retribusi	Rp15.093.060.235
3	Laba BUMD	Rp9.778.080.000
4	Pendapatan lainnya yang Sah	Rp165.816.663.138
	Jumlah	Rp349.624.984.232

Keterangan: -

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi, 2020

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7 RW DI Wilayah Kelurahan Melong dan 2 RW di Wilayah Kelurahan Leuwigajah	AWAS PANIK	Program AWAS PANIK atau Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik adalah program yang dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pengurangan sampah yang harus di angkut ke TPA. Program ini melibatkan Warga Masyarakat, Rumah Tangga sebagai penghasil sampah di sumber sampah, PARIKNIK (Petugas Penarik Sampah Organik) dan TIPEUTING (Tim Pengawas, Evaluasi dan Monitoring) yang berasal dari kader di wilayah. Tahapan dari Program ini adalah Profiling Wilayah yang dilakukan oleh Patugas PATIH, hal ini dilakukan untuk pemetaan dan melihat sejauh mana potensi yang dimiliki wilayah dalam melakukan pengelolaan sampah. Dari Profiling tersebut dihasilkan data jumlah Rumah, jumlah petugas penarik, data kader dan sarana persampahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kemudian dilakukan Sosialisasi secara Door To Door sekaligus pemberian fasilitas tempat sampah organik berupa ember tertutup yang dibagikan kepada warga. Setelah dilakukan Sosialisasi awal, edukasi selanjutnya dilakukan oleh Petugas PATIH dan TIPEUTING, yang melakukan pengecekan apakah rumah tersebut sudah melakukan pemilahan atau belum. Sampah yang telah dipilah dikumpulkan oleh PARIKNIK	PERDA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang selanjutnya disetorkan ke Tempat Pengelolaan Sampah yang telah ditentukan (TPS 3R 31 Melong dan TPS 3R Leuwigajah). Sampah Organik yang diterima dikelola di TPS 3R dengan cara pengomposan, biodigester dan maggot.	
2	DPMPTSP	SIPINTER	SIPINTER atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu berisi informasi izin -izin yang dikelola/diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi, sistem perizinan tersebut dilakukan secara online, untuk dapat melakukan permohonan lewat aplikasi ini pemohon terlebih dahulu wajib memiliki account dengan cara mendaftar melalui portal http://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/register .	
3	DPMPTSP	DADAKAN	DADAKAN atau Datang Daftar dan dapatKAN adalah sistem aplikasi permohonan izin via online dengan cara mendaftar melalui portal http://dpmptsp.cimahikota.go.id/member/register . yang memudahkan pemohon mengajukan izin yang bisa diakses dirumah, adapun izin yang sudah diterapkan via online tersebut baru Kartu pengawasan dan Izin reklame non permanen. dengan masuk ke portal tersebut pemohon cukup melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, selanjutnya daftar sesuai layanan yang disediakan. kemudian petugas memverifikasi permohonan tersebut, apabila lengkap akan langsung diproses hari itu juga.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	DPKP	SAHABAT GAGAH	Sejak Tahun 2016, Pemerintah Kota Cimahi sudah mulai menerapkan konsep eco-drainase secara selektif di lokasi-lokasi genangan. Pemkot Cimahi memberi nama konsepnya dengan SAHABAT GAGAH (Simpan Air HujAn BAwah Tanah, Genangan Air Genangan Air Hilang). Konsepnya sederhana, yaitu memindahkan air limpasan/genangan yang selama ini ada di permukaan tanah (dan masuk ke rumah-rumah penduduk) ke dalam suatu ruang penyimpanan air hujan di bawah tanah. (berupa kolam retensi atau kolam detensi yang tertanam di bawah tanah).	Perda APBD Kota Cimahi Tahun 2019, 2020
5	Disdagkoperin	IPAL	Pengelolaan IPAL melalui proses Coagulant dan Flokulant	
6	Disdagkoperin	IPAL	Pengelolaan IPAL melalui proses Coagulant dan Flokulant	
7	Disdagkoperin	Pemilahan Sampah	Sampah Organik yang sudah di pilah mendapatkan proses komposting yang akhirnya dapat digunakan menjadi Pupuk Tanaman	
8	Disdagkoperin	Pemilahan Sampah	Sampah Organik yang sudah di pilah mendapatkan proses komposting yang akhirnya dapat digunakan menjadi Pupuk Tanaman	
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	SIKONCI	SIKONCI adalah sebuah aplikasi pengembangan pengelolaan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dari mesin fingerprint menjadi foto selfie dan absensi GPS (geolocation atau geotagging attendance) menggunakan Smartphone di masing-masing ASN	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kota Cimahi, nama aplikasi Sistem Kehadiran Berlokasi ASN Kota Cimahi.	
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	SIMAKCI	SIMAKCI adalah Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Cimahi yang merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.	
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	SIKACI	SIKACI adalah singkatan dari Sistem Informasi Kinerja ASN Kota Cimahi, yang merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengukur kuantitas dan kualitas kerja pegawai dengan menetapkan indikator kinerja dan identifikasi performance serta penerapannya pada masing-masing jabatan yang ada berdasarkan Indikator Perilaku Kerja, Kehadiran, Kinerja Individu (SKP bulanan) dan Kinerja Organisasi (Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan)	
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SIBEDA	SIBEDA merupakan sistem integrasi kebencanaan yang menggabungkan antara Masyarakat-Pemerintah-Dunia Usaha-Relawan-Hingga Media Massa yang bersama-sama memberikan kontribusi dalam penanganan penanggulangan bencana. SIBEDA terdiri dari 4 Sistem diantaranya 1 (WEB system) dan 3 (System Berbasis Android) yaitu SIEMAN (Sistem Informasi Bencana Daerah)- SITANA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana)- SIRERE (Sistem Informasi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Rehabilitasi dan Rekontruksi) dengan fungsi sebagai berikut: 1. WEB : Merupakan fungsi diseminasi, rekapitulasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang didalamnya terdapat standar minimal konten web, peta rawan bencana, peta kejadian bencana, laporan kejadian eksisting, rekapitulasi bencana, trend kejadian tahunan, hingga grafikal; 2. SIEMAN : Merupakan fungsi internal dan eksternal dimana fungsi internal merupakan fungsi asesment potensi bencana ditambah fungsi eksternal untuk mengukur indeks ketahanan keluarga yang didalamnya terdapat indikator-indikator ketahanan keluarga yang diisi oleh kepala/anggota keluarga yang kedepannya akan dievaluasi oleh anggota BPBD di rumah. 3. SITANA : Merupakan fungsi internal dalam penanganan bencana yang dilakukan seksi kedaruratan dan logistik berupa management tanggap darurat bencana baik dari management informasi-asesment-pelaporan-hingga koordinasi dan pelaporan; 4. SIRERE : Merupakan fungsi Internal dalam pemulihan daerah terdampak bencana berupa management pemulihan (rehabilitasi dan Rekontruksi mulai dari asesment-managemen pemulihan-koordinasi-monitoring evaluasi-rekapitulasi- hingga pelaporan;</p>	
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Santunan Kematian	Adanya pemberian santunan kematian kepada masyarakat Kota Cimahi yang akan diimplementasikan melalui sistem informasi berupa aplikasi yang akan terintegrasi dengan sistem informasi di kependudukan serta sistem informasi bidang sosial	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	SMS Gateway	Aplikasi dengan fitur pengiriman pesan kepada Wajib Pajak yang berbasis Nomor Telepon Wajib Pajak	
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	SI PADE	SIPADE adalah Seputar Informasi Pajak Daerah, Hotline WA yang memuat informasi tentang pajak daerah yang ada di Kota Cimahi	
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	e-PAD	Sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB terdiri dari pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran	
17	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	SISMIOP/SIMPBB	Merupakan aplikasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dimulai dari pelayanan hingga proses akhir penerbitan SPPT dan Pembayaran yang terkoneksi dengan Bank	
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Aplikasi Pelayanan Keberatan NJOP Bumi dan Bangunan	Merupakan aplikasi pelayanan keberatan NJOP Bumi dan Bangunan yang memuat informasi : a. Alur proses pelayanan/ informasi perjalanan berkas Keberatan NJOP Bumi dan Bangunan b. Informasi data wajib pajak yang mengajukan Keberatan NJOP Bumi dan Bangunan c. Rekapitulasi data pelayanan Keberatan NJOP Bumi dan Bangunan d. Cetak SK mengabulkan / menolak Keberatan NJOP Bumi dan Bangunan	
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Aplikasi Pelayanan Pengurangan BPHTB	Merupakan aplikasi pelayanan pengurangan BPHTB yang memuat informasi : a. Alur proses pelayanan/ informasi perjalanan berkas Pengurangan BPHTB b. Informasi data wajib pajak yang mengajukan Pengurangan BPHTB c. Rekapitulasi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			data pelayanan pengurangan BPHTB d. Cetak SK mengabulkan / menolak Pengurangan BPHTB	
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Aplikasi Pelayanan Proses Pengurangan PBB	Merupakan aplikasi pelayanan pengurangan PBB yang memuat informasi : a. Alur proses pelayanan/ informasi perjalanan berkas pengurangan PBB b. Informasi data wajib pajak yang mengajukan pengurangan PBB c. Informasi dan perhitungan (dasar perhitungan) pemberian besaran pengurangan PBB d. Rekapitulasi data pelayanan pengurangan PBB e. Cetak SK mengabulkan / menolak pengurangan PBB	
21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Aplikasi Pelayanan Proses Restitusi PBB	Merupakan aplikasi Pelayanan Restitusi PBB yang memuat informasi : a. Alur proses pelayanan/ informasi perjalanan berkas Restitusi PBB b. Informasi data wajib pajak yang mengajukan Restitusi PBB c. Rekapitulasi data pelayanan Restitusi PBB d. Cetak Nota Dinas mengabulkan/ menolak Restitusi PBB	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Pengukuran Kinerja Inovasi Daerah		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan sentra keripik pedas Kota Cimahi	1. Pengembangan ekonomi lokal Kota Cimahi 2. pengembangan kalster mamin kota cimahi 3. perlunya pengembangan sentra produk sebagai pusat inovasi 4. pembajakan keripik kota cimahi oleh pengusaha besar di	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bandung 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Mengurangi masalah sosial (tawuran pemuda)	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KKN Kreatif (Tematik bersama FEB UNJANI)	KKN tematik telah dilakukan secara kontinue setiap tahun sejak tahun 2018. KKN Tematik bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Achmad Yani untuk mendampingi 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Cimahi oleh sekitar 40 dosen/pengajar dan 500 mahasiswa dari dua jurusan yaitu akutansi dan manajemen. KKN biasanya dilakukan selama 2 bulan (14 pertemuan) dan memebrikan pendampingan marketing (online), tatakelola usaha, pembukuan, branding maupun kewirausahaan. Khisis untuk tahun 2020 ini seluruh proses dilakukan secara tatap muka dan jika dilakukan secara langsung harus menerapkan protokol kesehatan dan dalam jumlah yang kecil serta diketahui/didampingi dosen pembimbing. KKN pun mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan riset/skripsi ataupun menulis jurnal ilmiah.	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Capaian SDGs Kota Cimahi	Dashboard Monitoring SDG's merupakan halaman yang menampilkan data rekap dan Langkah - langkah pengisian Monev SDGS di antaranya Dashboard, Output,Monev Kegiatan, Monev SDGS, dan Monev Indikator SDGS. Dashboard menampilkan data SDGS, pada Dashboard diantaranya Dashboard Data Penginputan monev SDGS di tahun tersebut, Tabel Data Indikator Kota di tahun tersebut, Tabel Data	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Indikator Nasional, Indikator Provinsi, dan Indikator Kota, Tabel Tujuan SDGS berdasarkan tahun tersebut, Tabel Data SKPD di tahun tersebut, Tabel Data Indikator Kota Berdasarkan Target berdasarkan tahun tersebut, Tabel Data Realisasi Indikator Kota, dan Tabel Data Bidang Berdasarkan RAD berdasarkan tahun tersebut. Tujuan Inovasi ini yaitu agar didapatkan rekapitulasi data Monev SDGS Output, Monev Kegiatan, Monev SDGS, dan Monev Indikator SDGS	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kerjasama Kelitbangan dengan 5 kabupaten di Provinsi Papua dan Maluku Utara selama 5 tahun		
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Collective and Place Branding Baros (BIAF), Cipageran (Sentra susu), dan Cireundeu		
28	Badan Perencanaan	Kompetisi Inovasi Antar	Inovasi Antar OPD dan Program/Kegiatan yaitu terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Daerah	SKPD dan Program	<p>orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tidak melulu berhubungan dengan aplikasi namun nilai inovasi yang paling tinggi yaitu keunikan dalam memecahkan suatu permasalahan di bidang pelayanan publik. Kompetisi Inovasi Antar OPD dan Program/Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Cimahi dimaksudkan untuk mendukung percepatan tercapainya visi reformasi birokrasi pada tahun 2025 yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.</p>	
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kerjasama Penelitian Antara Bappeda Kota Cimahi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D)	<p>Kerjasama kelitbangan berupa pendampingan dan sharing skill dan best practice pengembangan rantai nilai pada sektor pertanian dan pariwisata pada locus pilot project Wisata Pesisir di Kabupaten Cianjur. Knowledge yang akan dikembangkan berupa best practice dari beberapa negara, karena Bappeda Kota Cimahi juga telah menjadi anggota jaringan kerjasama riset internasional Value-chain Capacity Building Network (VCBN) yang beranggotakan 11 (sebelas) lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di Asia Pasifik. Pendampingan untuk proses pendaftaran merek kolektif</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Cireundeu dan/atau Cipageran Kota Cimahi. BP2D Provinsi Jabar membantu menyebarluaskan best practice dan menjadikan Cimahi sebagai locus pilot project teknologi sederhana dalam penanganan sampah organik di Kelurahan Padasuka Kota Cimahi. Kerjasama ini dapat terwujud sebagai inovasi bidang kelitbangan di Jawa Barat dan tonggak penguatan kelembagaan kelitbangan bagi kedua pemerintah daerah	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Agro-forestry di Bojong Jawa Kelurahan Cipageran		
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengolahan Bioteknologi Maggot Black Soldier Flies (BSF) di Kelurahan Padasuka	Piloting pengolahan sampah organik dengan metode Black Soldier Flies (BSF) di Kelurahan Padasuka Kota Cimahi. Best practice dan menjadikan Cimahi sebagai locus pilot project teknologi sederhana dalam penanganan sampah organik di Kelurahan Padasuka Kota Cimahi.	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Agro-forestry Bukit Padakasih Cibeber	Penanaman pohon Durian Kamajaya endemik Kota Cimahi, tanaman bunga matahari, kaliandra merah, tanaman telang dan budidaya lebah trygona sp di lahan tanah carik milik Pemerintah Kota Cimahi. Berlokasi di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Seni Pertunjukan Cireundeu		
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gastrodiplomacy Cireundeu	<p>Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, luas sawah di Kota Cimahi pada tahun 2018 hanya 173 Ha atau 3,3% dari total luas wilayah 4.248 Ha (40,2 km²). Kecilnya luas areal pertanian dapat mengancam ketersediaan pangan. Hal itu menjadi persoalan karena terdapat ungkapan 'belum makan jika belum makan nasi'. Padahal, makan tidak harus selalu nasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya merubah pola pikir dari awalnya berorientasi pada beras menjadi pangan non-beras. Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terdapat sebuah komunitas adat yang tidak mengonsumsi beras melainkan singkong beracun yang mengandung asam sianida (HCN) tinggi. Sebelum 2018 program ketahanan pangan Cimahi dilaksanakan dengan strategi (orientasi) mempromosikan atau menjual keluar (outward) produk-produk Cireundeu. Akan tetapi strategi ini cenderung hanya menjadikan produk Cireundeu sebagai oleh-oleh dan mengabaikan potensi seni/budaya serta pengetahuan/kearifan lokal konservasi alam dalam berkebun singkong warga adat Cireundeu. Perlu dilakukan perubahan strategi yang mampu mengoptimalkan upaya masyarakat adat dalam mengembangkan misi sosial dan ekonominya melalui</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>penyebaran pengetahuan/budaya ketahanan pangannya sehingga pembeli/pengunjung tertarik untuk datang, tinggal, memperoleh informasi yang tepat, belajar esensi budaya/seni yang terkait dengan praktik budidaya dan konservasi alam Cireundeu. Cireundeu sangat unik dengan produk olahannya yang terbuat dari singkong beracun. Sesuai ungkapan the best way to win the hearts and minds of global publics is through the stomach maka kuliner dipakai sebagai alat diplomasi (gastrodiplomasi) warga adat Cireundeu untuk membagi pengetahuan, kebiasaan, seni dan budaya serta memperoleh perhatian publik. Pada akhir tahun 2017 Litbang Bappeda Kota Cimahi mencoba inovasi melalui strategi inward pengembangan potensi di dalam. Dilakukan aktivasi branding ketahanan pangan dengan pengintegrasian kegiatan wisata kuliner, berkesenian, belajar konservasi alam, pemanfaatan media internet dan pengalaman tinggal di homestay. Inovasi pun dilakukan dengan menyusun proses penyelenggaraan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip atau aturan adat (kearifan lokal) yaitu usaha pengolahan produk turunan singkong dan kesenian dilakukan sebagai usaha bersama (komunal). Agar warga mendukung dan terlibat dalam pengembangan desa edukasi ketahanan pangan dilakukan pengembangan homestay rumah – rumah warga. Pengembangan pariwisata juga dilakukan dengan menjadikan Cireundeu sebagai lokus</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			summercourse bidang kewirausahaan sosial, seni, sosiologi/antropologi dan lingkungan hidup bagi mahasiswa nasional/internasional.	
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMRENDA "MUSRENBANG"	Media dalam menjangkau aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya	
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMRENDA "FORUM PERANGKAT DAERAH"	Sinkronisasi Usulan masyarakat dengan perencanaan perangkat daerah dilakukan berbasis IT	
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMRENDA "RESES"	Reses DPRD dilakukan secara digitasi dan berbasis IT	
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMRENDA "MONEV"	Pelaporan dilakukan secara digitasi dan berbasis IT	
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIMRENDA "Perencanaan"	Modul perencanaan untuk membantu Pemerintah Kota dalam perencanaan 5 tahunan dan tahunan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kader Perencana	Kader Perencana merupakan masyarakat yang dilatih dalam menentukan usulan masyarakat	
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemanfaatan Tanaman Endemik Daun Rendeu untuk Obat dan Kosmetik	Pemanfaatan tumbuhan asli kampung adat Cireundeu	
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penerapan Model Collective Brading	Gerakan kolektif untuk pelaku usaha di Cipageran dan Cireundeu	
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Klaster Susu dan Produk Olahan Susu Sapi Berbasis Kewirausahaan Sosial	Mengintegrasikan pembangunan ekonomi (rantai nilai) pada sektor peternakan dengan sektor sosial (pendidikan) dan budaya (kesenian dan tarian)	
44	Bagian Administrasi	SINTA PESONA (Sistem Integrasi Data PMKS dan	Mengelola dan mengintegrasikan data PMKS yang ada di DINSOSP2KBP3A dengan Baznas Kota Cimahi yang sesuai 8 ashnaf.	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kesejahteraan Rakyat	Baznas Kota Cimahi)		
45	Bagian Administrasi Pembangunan	e-Reporting (Pengendalian Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengelolaan, pengendalian, memonitor, mengevaluasi pelaporan rencana, realisasi pelaksanaan kegiatan berbasis TIK secara profesional, efisiensi, transparansi dan bertanggung jawab	
46	Bagian Hukum	Sistem Informasi jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Aplikasi untuk menyediakan Produk Hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan Berita-Berita Kegiatan Bagian Hukum	
47	Bagian Organisasi	Klinik Yanlik (Klinik Pelayanan Publik)	Klinik Yanlik Kota Cimahi adalah layanan bersama perangkat daerah yang memberikan layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bagi UPP di Kota Cimahi	
48	Bagian Organisasi	SIAKIP	SIAKIP adalah sistem informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, aplikasi SIAKIP memiliki fungsi untuk mempermudah input data, monitoring dan evaluasi serta publikasi data agar mudah diakses oleh masyarakat	
49	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SIPENABAGJA	SIPENABAGJA adalah sistem informasi penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, sistem aplikasi yang akan menjadi alat bantu dalam proses pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam kegiatan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Cimahi, dimana selama ini dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan waktu yang lama	
50	Bagian Tata Usaha	SIMANDA Mobile	<p>Sekretariat Daerah Kota Cimahi saat ini memang sudah memiliki aplikasi persuratan yaitu Aplikasi SIMANDA (Sistem Informasi Manajemen Naskah Dinas Aktif), namun aplikasi SIMANDA ini masih beroperasi secara intranet yang fungsinya hanya untuk mengarsipkan surat secara elektronik dan juga pengecekan/verifikasi surat yang hanya bisa dilakukan dikantor. Untuk itu, Aplikasi SIMANDA ini dirasa perlu untuk dikembangkan lagi agar dapat diakses secara online berbasis android, agar para pejabat struktural dilingkup Setda dan para Sekretaris Pimpinan dapat menerima dan menindaklanjuti surat tersebut melalui handphone, hal ini tentu dapat mempersingkat waktu dalam pengolahan ataupun pendistribusian surat yang akan ditujukan kepada para Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Para Asisten) ataupun Surat yang sudah di disposisi oleh Pimpinan. Selain itu manfaat dilakukannya pengembangan aplikasi ini agar para pejabat dan sekretaris pimpinan dapat melakukan pengecekan atau memonitor surat kapan pun dan dimana pun, sehingga fungsi SIMANDA sebelumnya sebagai aplikasi pengarsipan secara elektronik menjadi lebih baik. Pengembangan Aplikasi SIMANDA ini juga diharapkan dapat</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada pada Subbag TU Pimpinan dan Kepegawain Setda seperti distribusi surat yang tidak tepat tujuan.	
51	Bagian Tata Usaha	SIMANDA	SIMANDA adalah sistem informasi manajemen administrasi naskah dinas aktif. Sistem yang mengadministrasikan naskah dinas yang terdiri atas administrasi naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, administrasi balasan dan pencarian data. Dengan sistem ini kita dapat mengelola, mengendalikan dan memonitor seluruh naskah dinas dan disposisi yang telah diadministrasikan	
52	Bagian Umum dan Protokol	SIMADU	SIMADU adalah sistem informasi manajemen rumah tangga terpadu. aplikasi berbasis web/internet, yang digunakan oleh Bagian Umum dan Protokol, khususnya di Sub Bagian Rumah Tangga, dimana SIMADU dirancang dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada OPD dan organisasi lain dalam hal peminjaman atau fasilitasi aula/selasar gedung, peralatan dan perlengkapan acara, permohonan fasilitasi jamuan makan dan stop over (penataan dan penyajian). Aplikasi SIMADU terdiri dari menu-menu yang merepresentasikan kebutuhan pengguna (OPD atau organisasi lain) sehingga memudahkan di dalam proses penentuan tanggal kegiatan, informasi ketersediaan aula/selasar gedung, informasi ketersediaan peralatan dan perlengkapan acara serta fasilitasi jamuan makan/stop over.	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga	Wisata Edukasi Cagar Budaya Kota Cimahi "Cimahi Military Geritage Tourism (CMHT)"	Kota Cimahi memiliki karakteristik tersendiri yang telah dikenal sejak dahulu kala yaitu sebagai "Kota Hijau/Tentara", lebih dari 10 pusat pendidikan (Pusdik) Militer ada di Kota Cimahi, terbesar se-Nusantara, bangunan-bangunan tua bersejarah (heritage militer) yang dibangun sekitar tahun 1886 peninggalan jaman Pemerintahan Hindia Belanda yang masih berdiri dengan megahnya dan sampai saat ini masih dipergunakan dengan baik antara lain : 1. Rumah Sakit DUSTIRA (1887), exs rumah sakit militer (militari hospital) dahulunya pergunakan tempat perawatan tawanan tentara Belanda dan tentara Jepang, berarsitektur Eropa (artdeco) 2. PUSDIKARMED, ada banyak berbagai senjata lama dan baru, Meriam Peninggalan Zaman VOC (1786) ada Sumur Artesis, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya, di lokasi ini sedang dibuat Paket Wisata Militer. 3. STATSIUN KERETA API (1886), di masa lampau sebagai sarana pengangkutan logistik militer dari Batavia ke Cimahi Bandung. 4. Gedung THE HISTORICH / SUDIRMAN (1886), gedung peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda gedung ini diberi nama "Societeit Voor Offcieren – Tjimahi". Bergaya arsitektur Indische Empire Style, di peruntukan sebagai social club untuk mengakomodasi pesta, pertunjukan seni, acara dansa militer dan masyarakat. 5. Gedung Penjara PONCOL (1886)à "Het Militaire Huis van Arrest" (rumah tahanan militer) yang saat ini	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dikenal dengan "Penjara Poncol", masih dipergunakan. 6. GEREJA SANTO IGNATIUS (1886), Bangunan berarsitektur Eropa terdapat beberapa patung : Bunda Maria sedang membelai Yesus Kristus, Bunda Maria sedang menimang Yesus Kristus ketika kecil dan patung Ignatius, masih dipergunakan untuk beribadah. 7. TAMAN KARTINI, merupakan salah satu taman kota yang ada di Cimahi, pada jaman kolonial Belanda taman ini diberi nama Taman Wilhelmina nama Ratu Kerajaan Belanda kala itu, terdapat kolam air / air mancur. 8. KERKHOF Leuwigajah (1703) diresmikan 20 Desember 1949 TAMAN makam kehormatan Belanda (Erevelde) Leuwigajah Cimahi merupakan salah satu dari tujuh kompleks pemakaman Belanda yang berada di Indonesia 9. PURA AGUNG WIRA LOKA NATHA, Tempat peribadatan umat Hindu se Kota Cimahi Raya (1977) anggota militer Kota Cimahi dan merupakan Pura pertama yang dibangun di Kota Cimahi. Bangunan ini diresmikan oleh Komandan Militer 10. PUSDIKGUMIL PANGMILUM, Tempat membentuk prajurit TNI-AD yang profesional sesuai dengan jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, peran seorang guru militer (Gumil) dan pelatih militer (rtdeco). 11. MASJID AGUNG CIMAHI Peningggalan pemerintahan Hindia Belanda dan pendudukan penjajahan Jepang (1942). Menarik struktur atap masjid tidak menggunakan struktur baja berukuran besar</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>12. Kawasan Alun-laun Cimahi terdapat : GEDUNG RIO, di Jl. Ria (Rio) adalah nama sebuah bioskop dibangun pemerintah Hindia Belanda (1811) : LOJI atau Pos Penjagaan dibangun bersamaan dengan pembangunan Jl. Anyer – Panarukan, dan PENDOPO; 13. EXS GEDUNG/TOKO PUSAT PERDAGANGAN TIONGHOA, kawasan Jl. Pasar Atas/ Jl. Rd Djulaeha, bukti dulunya orang-orang Tionghoa (China) pernah dan masih berniaga di kawasan ini didekatnya ada jalan yang bernama Pecinan Lama 14. Puskid Hub, Puskid Bekang, dan Puskid-Puskid Militer lainnya yang berada di Kelurahan Baros dan sekitarnya; 15. Kampung Adat Budaya Cireundeu dengan segala keunikannya sudah dikenal luas karena mempunyai ciri khas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu keunikannya adalah makan pokoknya singkong (rasi) mulai beralih semenjak tahun 1918 M. didukung oleh lingkungan alam sekitarnya yang dapat dijadikan daya tarik wisata diantaranya camping tradisi jurit wengi, di bukit Salam, seren taun 1 Suro saka sunda, ngagogo, permainan urang lembur, adat damar, sewu dan ngagondang serta olahraga tradisional jajangkungan, dll. (Kebutuhan penataan di lingkungan zona/kawasan ODTW tersebut, dan perlunya ada paket wisata)</p>	
54	Dinas Kependudukan	One Day Service 3 in 1	Pelayanan 3 in 1 ini merupakan pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya masyarakat mendapatkan paket komplit (3 dokumen) untuk pengajuan satu dokumen kependudukan yang	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Pencatatan Sipil		dibutuhkan. Paket komplit 1 (Surat Pindah datang, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)), paket komplit 2 (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)); Paket komplit 3 (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-El Suami/Istri yang berubah status): paket komplit 4 (Pencatatan perkawinan, Kartu Keluarga baru dan KTP-el bagi suami/istri yang berubah status); dan paket komplit 5 (Pencatatan perceraian, Kartu Keluarga baru dan KTP-el bagi suami/istri yang berubah status)	
55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Moling	Layanan Moling ini merupakan pelayanan jemput bola ke tiap kelurahan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling. dokumen yang dibutuhkan langsung jadi pada hari yang sama.	
56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Hari Libur/Cuti	Tetap melayani masyarakat di hari libur/cuti bersama	
57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RW Tuntas	Penertiban Administrasi Kependudukan Tuntas dalam satu RW meliputi 1. Kartu Keluarga 2. KTP 3. Akte Kelahiran 4. Akte Kematian	
58	Dinas Kependudukan	NONA GISA	NONA GISA adalah inovasi online gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan. Sitem Informasi yang dibuat khusus unuk menangani pelayanan dokumen kependudukan.	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Pencatatan Sipil		System informasi ini berbasis Citizen Centric untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kota Cimahi. Inovasi ini merupakan rekayasa layanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dokumen kependudukan. Baik layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil dan layanan pemanfaatan database kependudukan, dengan mengintegrasikan proses layanan mulai dari RT s.d. Disduk. Sistem informasi ini juga memanfaatkan teknologi webservice untuk meningkatkan pemanfaatan database kependudukan. Inovasi kedua yaitu 3 In 1 (Three In One) tentang pencetakan 3 dokumen kependudukan dalam satu permohonan dan akan menjadi One Day Service untuk mewujudkan pelayanan prima yang menjadi motto pelayanan publik.	
59	Dinas Kesehatan	SIIDOLA	SIIDOLA adalah sistem informasi dokumen laporan online, Merupakan model pengiriman laporan Puskesmas kepada dinas kesehatan secara online Dokumen Laporan tersimpan dalam Data Center serta pengelolaan dokumen laporan terintegrasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan laporan, terutama jenis laporan rutin	
60	Dinas Kesehatan	Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19 (KSSC)	Program intervensi Kelurahan Siaga Sehat dan Aman COVID - 19, mempercepat perbaikan mendampingi dan membantu Masyarakat tingkat kelurahan dalam merancang dan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menstimulan dalam menciptakan inovasi dalam pengangulangan covid-19	
61	Dinas Kesehatan	Mobile Covid-19 Test Kota Cimahi	Dalam masa pandemi Covid 19 ini perlu ditingkatkan perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat dan tracing tes Covid 19 pada masyarak Kota Cimahi, maka dari itu dilakukan kegiatan penyuluhan dan test Covid melalui mobil keliling ke wilayah di Kota Cimahi	
62	Dinas Kesehatan	Kerjasama dengan Lab Poltekes Kemenkes untuk Percepatan SWAB	Dalam masa Pandemi COVID 19 hasil pemeriksaan hasil diperlukan secara cepat, hasi swab dilakukan di labkesda prov jabar membutuhkan waktu pemeriksaan yang cukup lama karena memfasilitasi kab kota se jabar sehingga proses antrian panjang. Dengan melihat fasilitas pendidikan Analis Kesehatan yang berlokasi di Kota Cimahi, maka di lakukanlah MOU untuk percepatan hasil swab	
63	Dinas Kesehatan	MOKA	MOKA adalah Mobile Konseling Remaja. Remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, masa dalam peralihan atau di atas jembatan goyang, yang menghubungkan masa kanakkanak yang penuh kebergantungan dengan masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri (Daradjat, 2005: 85). Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan baik fisik, psikis, maupun sosial. Berbagai perubahan tersebut dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang kemungkinan dapat mengganggu perkembangan remaja	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>selanjutnya. Menurut beberapa penelitian yang dihimpun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dari waktu ke waktu ternyata permasalahan kesehatan reproduksi yang di hadapi remaja semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai jenis Penyakit Menular Seksual (PMS) makin banyak terjadi pada remaja. Bahkan perilaku hubungan seksual sebelum menikahpun makin sering dilakukan oleh para remaja, dan sangat disayangkan tidak sedikit remaja yang melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan yang mencapai angka 28,4% dari kasus aborsi yang ada (BKKBN, 2008: 1) Keadaan tersebut menunjukkan bahwa betapa remaja membutuhkan bantuan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang dihadapinya melalui pengambilan keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan dirinya maupun masa depannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu remaja menyelesaikan masalah masalah kesehatan yang dihadapinya adalah melalui konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 2005: 7). Melalui proses konseling diharapkan dapat membantu remaja agar memiliki informasi yang memadai tentang masalah kesehatan ,</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa tekanan dan paksaan. Dalam upaya membantu remaja memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap kesehatan , maka kegiatan konseling sebagai bagian dari operasional program kesehatan merupakan kegiatan yang sangat strategis. Seperti diketahui bahwa remaja merupakan masa labil yang akan mengalami perubahan psikologis, dari menghadapi masalah-masalah ringan saat masih kanak-kanak beralih ke masalah-masalah yang lebih rumit ketika menginjak masa remaja. Oleh karena itu remaja harus mendapatkan pelayanan konseling kesehatan remaja, khususnya dalam menghadapi keadaan psikologisnya yang labil. Konseling kesehatan remaja merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah antara konselor dan klien dalam memecahkan masalah kesehatan remaja yang dihadapi. Konseling kesehatan remaja bertujuan untuk membantu remaja dengan menggali kondisi dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga remaja mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan permasalahannya. Puskesmas Melong Asih Memiliki sekolah binaan SMP sebanyak 2 sekolah,SMA 3 sekolah.dimana di sekolah tersebut siswanya yaitu berusia remaja.Pada tahun 2016 Cakupan Komunikasi interpersonal dan konseling (KIP/K) Puskesmas Melong Asih Hanya 2,6%.Sedangkan Cakupan Komunikasi Interpersonal</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dan konseling pada remaja di Puskesmas Melong Asih 1%.Dan dari hasil survey ke sekolah diwilayah binaan di dapatkan bahwa setiap hari sekitar 5 orang siswa berkunjung ke uks sekolah dikarenakan sakit (2016). Guna Meningkatkan Cakupan Komunikasi Interpersonal dan Konseling (KIP/K) dan untuk mengurangi angka kesakitan siswa remaja disekolah maka Puskesmas Melong Asih Membuat suatu inovasi yang di beri nama "MOKA' (Mobbile Konseling Remaja) Rincian Kegiatan 1. Konseling Interpersonal/Kelompok 2. Pemeriksaan Kesehatan secara Umum 3. Rujukan</p>	
64	Dinas Kesehatan	KURMA LARISMANIS	Kunjungan rumah lansia resiko tinggi masyarakat dinamis di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih Kelurahan Melong	
65	Dinas Kesehatan	KP ASI MACAN OCES	<p>KP ASI MACAN OCES adalah kelompok pendukung air susu ibu mamah cantik, optimis, cerdas dan sehat. Berdasarkan hasil dari BPB (Bulan Penimbangan Balita) pada bulan Agustus tahun 2016 di wilayah binaan Puskesmas Melong Tengah terdapat 274 balita stunting. Balita stunting di Puskesmas Melong Tengah Tahun Jumlah Balita Balita Stunting Tahun 2016 274 orang Balita Normal tahun 2016 1697 orang. Dari data cakupan Asi Eksklusif pada tahun 2016 di wilayah binaan Puskesmas Melong Tengah sangat rendah, yaitu sebesar 33 %. Dari hasil dari konseling ASI didapat banyak ibu-ibu menetek yang pesimis bahwa ASI nya kurang, sehingga dibantu dengan susu formula. Pada SDGS di tujuan ketiga yaitu kehidupan</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>sehat dan sejahtera untuk semua usia dan di 8 area perubahan reformasi birokrasi yang salah satunya yaitu pelayanan publik yang merupakan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga melahirkan inovasi yaitu untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif guna mencegah stunting. Sehingga diharapkan stunting tidak terjadi karena di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sudah diberikan pengertian pada ibu hamil tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk mencegah stunting. Dengan kegiatan ini bisa memotivasi bumil dan buteki supaya menjadi seorang mamah yang cantik yang selalu berfikiran optimis untuk memberikan ASI nya pada bayinya dan berfikir cerdas tentang banyaknya manfaat ASI yang bisa membuat sehat ibu dan bayinya Tujuan ("gagasan") munculnya inovasi ini yaitu untuk mencegah stunting dan meningkatkan cakupan ASI Eksklusif di wilayah binaan Puskesmas Melong Tengah khususnya, sehingga diharapkan stunting tidak terjadi karena di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sudah diberikan pengertian pada ibu hamil tentang pentingnya ASI Eksklusif untuk mencegah stunting. Dengan kegiatan ini bisa memotivasi bumil dan buteki supaya menjadi seorang mamah yang cantik yang selalu berfikiran optimis untuk memberikan ASI nya pada bayinya dan berfikir cerdas tentang banyaknya manfaat ASI yang bisa membuat sehat ibu dan bayinya.</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Dinas Kesehatan	PUCANG	PUCANG adalah pungut cangkang tablet Fe yang diberikan pada Rematri Sekolah di wilayah Kelurahan Cibabat	
67	Dinas Kesehatan	Siswa Siaga	Siswa siaga adalah siap antar jaga. Siswa Siaga berperan aktif dalam upaya pencegahan Anemia dan penanggulangan Anemia pada Remaja Putri. Berkomitmen untuk menjaga diri sendiri dan remaja putri dari perilaku yang dapat menyebabkan Anemia. Siswa Siaga (Siap Antar Jaga)... Siswa membantu Siapkan Tablet Fe untuk Siswi,Siswa Antar tablet Fe untuk Siswi,Siswa menjaGa dan memastikan Siswi mengkonsumsi tablet Fe	
68	Dinas Kesehatan	KOPDUNG ASI	KOPDUNG ASI adalah kelompok ibu menyusui agar tetap melaksanakan asi eksklusif selama 6 bulan di wilayah kelurahan Cibeureum	
69	Dinas Kesehatan	Twitder	Aplikasi timbal balik antara pemerintah Kota Cimahi dan Kader Pembangunan Kesehatan melalui notifikasi sms dari peralatan mobile, serta menyampaikan informasi mengenai kondisi kesehatan wilayahnya	
70	Dinas Kesehatan	SIMPATI	Sistem pelayanan pendaftaran terintegrasi	
71	Dinas Kesehatan	JUST CALL CIMA	sistem informasi rujukan ibu dan bayi	
72	Dinas Komunikasi dan Informatika,	PESDUK	PESDUK adalah Pesan singkat penduduk. Pesan Singkat Penduduk adalah sebuah platform informasi pelaporan warga Kota Cimahi dengan menggunakan media SMS. Program ini	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kearsipan dan Perpustakaan		menjadi salah satu andalan dalam hal pelayanan informasi publik. Program ini juga dibuat untuk memenuhi tuntutan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).	
73	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	Portal Smart City	Pengembangan aplikasi Portal Cimahi Smart City dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat serta Perangkat Daerah dalam mengakses layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintahan Daerah Kota Cimahi. Konsep pengembangan portal ini adalah untuk menyatukan keseluruhan layanan berbasis elektronik dalam satu wadah yang dapat diakses melalui gadget untuk memudahkan dalam mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Platform yang didukung dalam Aplikasi Cimahi Smart City berbasis web dan berbasis mobile. Modul atau fitur yang disediakan meliputi layanan aplikasi publik, layanan monitoring cctv lalu lintas, layanan akses open data, layanan informasi berita Kota Cimahi yang terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi (https://www.cimahikota.go.id)	
74	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	Call Center Pemerintah Kota Cimahi	Call Center Pemerintah Kota Cimahi merupakan wadah pelaporan masyarakat Kota Cimahi yang dapat digunakan untuk pelaporan/pengaduan dan Pelaporan kegawatdaruratan melalui Nomor Call Center 112. Melalui nomor layanan cepat terpadu, masyarakat tidak perlu menyimpan semua nomor	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>layanan pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Dengan menghubungi nomor call center ini, masyarakat akan langsung terhubung dengan operator yang akan menyambungkan ke setiap call center layanan yang terkait.</p>	
75	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</p>	<p>Sistem Manajemen CCTV Terintegrasi</p>	<p>Sistem Manajemen CCTV Terintegrasi Pemerintah Kota Cimahi merupakan fasilitas monitoring Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kota Cimahi yang dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan pengambilan tindakan. CCTV terintegrasi sudah dilengkapi dengan sistem penyimpanan dan terintegrasi dengan Monitoring Room</p>	
76	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</p>	<p>Wifi Ruang Publik</p>	<p>Wifi Ruang Publik merupakan jaringan internet gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka mengurangi kesenjangan digital dan akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk mengakses Pelayanan Publik Pemerintah Kota Cimahi dan mengakses informasi lainnya</p>	
77	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</p>	<p>Pembangunan Saluran Kabel Serat Optik Bawah Tanah Bersama Terintegrasi</p>	<p>Program Ducting Bersama ini merupakan hasil inisiatif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai solusi atas kebutuhan infrastruktur broadband, menunjang akses internet berkecepatan tinggi dan tuntutan estetika kota yang nyaman</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Integrated Sharing Ducting)		
78	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	Monitoring Room Cimahi Smart City	Monitoring Room Cimahi Smart City merupakan salah satu ikon smart city Kota Cimahi yang bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya fungsi K3I (Komando, Kendali, Komunikasi & Informasi). Dilengkapi dengan beberapa fitur, operasional Monitoring Room Cimahi Smart City ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi koordinasi secara vertikal maupun horisontal yang didukung menggunakan teknologi sehingga seluruh jajaran Dinas akan mendapat dukungan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, dengan ketersediaan informasi yang lengkap, real time, akurat, dan komprehensif.	
79	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	Sistem Inovasi Daerah	Sistem Inovasi Daerah (sid.cimahikota.go.id) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendata dan memantau perkembangan inovasi-inovasi dari perangkat-perangkat daerah di Pemkot Cimahi. Perangkat Daerah dapat meamsukan	
80	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	CRH (Cimahi Reading Habit)	CRH adalah gerakan utntuk membiasakan membaca pada siswa Sekolah Dasar dengan memberikan tantangan membaca dan penyampaian apresaisi bagi seiswa peserta CRH untuk setiap buku yang telah selesai dibaca, siswa membuat sinopsis dan disampaikan pada guru pembina di masing-masing sekolah, kemudian dicatatkan di buku report masing-masing. Apresiasi diberikan dalam bentuk reward berupa merchandise	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>bagi siswa yang telah menyelesaikan membaca buku secara bertingkat sampai dengan level 6, dimana setiap level terdiri dari 6 buku siswa yang telah menyelesaikan 30 buku atau level 6 diberikan piagam penghargaan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dan untuk siswa yang telah menyelesaikan bacaan 60 buku maka diberikan penghargaan dari Wali Kota Cimahi</p>	
81	Dinas Lingkungan Hidup	Cimahi Barengras	<p>Cimahi barengras adalah sebuah konsep pengelolaan sampah skala kawasan (RW) mulai dari hulu ke hilir, yang menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah di sumbernya. Konsep ini menekankan pada pemilahan sampah rumah tangga dan pengumpulan sampah secara terpilah.. Program Cimahi Barengras berupaya menjalin kemitraan dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah di skala RW, agar berpartisipasi dalam pengurangan dan penanganan sampah. Dengan program ini diharapkan seluruh sampah yang dihasilkan di kawasan (RW) bisa habis di kawasan itu juga dan tidak keluar ke TPA. Jika kawasan tersebut mempunyai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah setempat, maka diusahakan sampah yang ada dalam kawasan tersebut, khususnya sampah organik, diolah juga di kawasan tersebut.</p>	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Lingkungan	Sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain. Selain itu, sistem informasi lingkungan mempublikasikan berita juga artikel terkait dengan kegiatan dan isu lingkungan khususnya di Kota Cimahi	
83	Dinas Pangan dan Pertanian	MIEKONG	MIEKONG ADALAH DIVERSIVIKASI DARI SINGKONG	
84	Dinas Pangan dan Pertanian	DURIAN KAMAJAYA	DI KOTA CIMAHI TEDAPAT VARIETAS DURIAN UNGGLAN YANG HAMPIR PUNAH, SEHINGGA PERLU DIKEMBANGKAN INOVASI UNTUK MEMBUDIDAYAKAN DURIAN TERSEBUT DENGAN MELAKUKAN OKULASI DAN SERTIFIKASI JENIS DURIAN TERSEBUT SEBAGAI DURIAN UNGGULAN KOTA CIMAHI	
85	Dinas Pangan dan Pertanian	FOOD SAFETY LAB	Laboratorium makanan ini akan memeriksa secara cepat dan sederhana. Pemeriksaan memakan waktu 1-5 menit. Bahan pangan segar yang diperiksa yakni daging, susu, telur, beras, ikan, sayuran, dan buah-buahan, apabila hasilnya negatif, maka bahan makanan itu aman dikonsumsi. Namun, jika hasilnya positif, bahan makanan tidak boleh diperjualbelikan.	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Laboratoruim ini akan disediakan di pasar tradisional , minimarket dan akan dilengkapi dengan mobil keliling untuk melayani masyarakat di kota Cimahi	
86	Dinas Pangan dan Pertanian	RASI ANALOG	RASI ANALOG merupakan solusi bagi Kota Cimahi diversifikasi bahan baku pangan lokal. Kita kembangkan beras singkong dan beras ganyong .Bahan pangan alternatif pengganti beras yang bisa diolah jadi roti dan makanan lain-lain. Rasi ini tidak hanya bisa sebagai pengganti beras, tetapi juga dapat bermanfaat untuk meminimalisir penyakit diabetes, obesitas, kanker dan jantung.Dengan pembuatan Rasi Analog ini Cimahi punya khas tersendiri dan ketahanan pangannya terjaga.	
87	Dinas Pangan dan Pertanian	BUDIDAYA IKAN DENGAN METODE RAS DAN BIOFLOK	SAAT INI KEBUTUHAN AIR UNTUK MENGELOLA BALAI BENIH IKAN TAWAR DI KOTA CIMAHI MULAI TERBATAS, TERDAPAT POTENSI PASAR YANG CUKUP BAGUS UNTUK MENGEMBANGKAN BUDIDAYA IKAN HIAS DAN IKAN TAWAR, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN INOVASI DALAM PENGGUNAAN AIR SEBAGAI MEDIA PERIKANAN MELALUI FILTERING DENGAN METODE RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM DAN MEMBERIKAN FLOK DAN PREBIOTIK SERTA AERASI DI KOLAM IKAN. DENGAN INOVASI INI AKAN MENGHEMAT PENGGUNAAN AIR.	
88	Dinas Pangan dan Pertanian	TTIC (TOKO TANI INDONESIA	kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (volatile foods), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam dll. Perlu	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		CENTRE KOTA CIMAHI)	dilakukan mengendalikan harga-harga pangan, dengan memotong rantai pasok (supply chain) pangan yang semula 7-8 pihak menjadi hanya 3-4 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun. Salahsatu bentuk implementasi mendirikan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Kota Cimahi dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu	
89	Dinas Pangan dan Pertanian	CIMAHI AGRI MARKET	GELAR PANGAN SEGAR / CIMAHI AGRI MARKET MERUPAKAN INOVASI UNTUK MENGURANGI TINGGINYA DISPARITAS HARGA ANTARA PRODUSEN DAN KONSUMEN DENGAN MEMUTUS MATA RANTAI PEMASARAN YANG PANJANG DAN STRUKTIUR PASAR YANG TIDAK EFISIEN	
90	Dinas Pangan dan Pertanian	SIMPUSKESWAN	PEMBUATAN SISTEM MANAGEMEN PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN	
91	Dinas Pangan dan Pertanian	URBAN FARMING	Urban Farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanita tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan	
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SITARUNG	SITARUNG adalah Sistem Informasi Penataan Ruang, aplikasi berbasis web GIS (Geographic Information System) yang menyajikan semua bentuk informasi didalam hal Penataan Ruang dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian. Informasi/data yang disampaikan berbasis peta (spasial) yang dapat diakses oleh sektor terkait dan masyarakat, dan dapat dipergunakan dalam proses analisa sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW yang telah ditetapkan. Terdapat slot interaksi dengan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melaporkan dengan mudah jika terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan dan dapat terdeteksi langsung lokasinya didalam aplikasi SI Tarung.	
93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	GIS	Mapping GIS dengan tema minimarket berizin dan tidak berizin serta tertutup	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sarana / instrumen penilaian pemohon izin (masyarakat) terhadap kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara online (menggunakan google doc), penilaian diberikan setelah izin diterbitkan saat pengambilan izin.	
95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitas Gambar Konstruksi	Fasilitasi gambar konstruksi bangunan merupakan kegiatan fasilitasi pelayanan perizinan pembangunan dimana pemohon izin diberikan fasilitas atau bantuan oleh Pemerintah melalui APBD berupa Pembuatan gambar rencana bangunan berikut sondir dan perhitungan struktur secara gratis (tidak dipungut biaya) untuk selanjutnya dilakukan pengesahan gambar struktur	
96	Dinas Pendidikan	AKSI PEKA PAUD	AKSI PEKA PAUD adalah Aktualisasi Sikap Pelibatan Keluarga Dalam Penguatan Karakter Anak Usia Dini Pada Satdik PAUD. Adanya Aktualisasi Sikap Keterlibatan Keluarga dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan (Islam) Pada AUD 5-6 Tahun di 15 TK Percontohan (Jangka Pendek) yang akan dikembangkan ke semua Satdik PAUD (Jangka Menengah/Panjang)	
97	Dinas Pendidikan	MECING	MECING adalah Mulok mengedukasi Siswa Cimahi tumbuhkan Inspirasi dan Nilai tambah Generasi penerus bangsa Relevansi Pend Formal, Non Formal & Informal Saling Melengkapi & Memperkaya sehingga setiap lulusan di Kota	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Cimahi memiliki keunggulan dan nilai plus berbeda dengan lulusan di kota/Kab lain.	
98	Dinas Pendidikan	TANGAN TERSEMUTS	TANGAN TERSEMUTS adalah (Pengelolaan Ketersediaan Mutasi Siswa) Pelayanan bagi orang tua siswa yang melakukan mutasi siswa , dengan adanya sistem ini orang tua siswa bisa melihat sekolah mana saja yang sudah penuh dan belum sehingga mempermudah proses perpindahan.	
99	Dinas Pendidikan	SIPEMUDA	SIPEMUDA adalah sistem pelayanan mutasi daring. Pelayanan Mutasi siswa merupakan pelayanan yang diberikan kepada setiap orang tua siswa bila terjadi sesuatu yang berdampak pada sekolah siswa seperti perpindahan kerja orang tua mengakibatkan siswa ikut pindah mengikuti orang tuanya. Untuk mempermudah proses tersebut maka dinas pendidikan membuat sistem pelayanan berbasis daring.	
100	Dinas Pendidikan	SIPASOL	SIPASOL adalah sistem pelaporan aktivitas sekolah, Idealnya semua kegiatan sekolah dapat dilaporkan melalui pengawas sekolah dengan cepat, Semakin padatnya kegiatan Kepala Sekolah di sekolah dan di luar sekolah, sehingga perlu adanya usaha untuk mempercepat laporan, membutuhkan suatu transformasi terhadap sistem administrasi pelaporan sekolah	
101	Dinas Pendidikan	Seleksi Terbuka Kepala Sekolah Negeri	kepala sekolah dan calon kepala sekolah berkompetisi untuk menduduki jabatan kepala sekolah yang lowong, dimana mereka diharuskan melakukan analisa terhadap sekolah yang akan dituju, yang meliputi: 1) rapat mutu, 2) 8 standar	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			nasional pendidikan, 3) saran tindak tim saber pungli, 4) dan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. analisa tersebut di persentasikan kepada tim penilai yang terdiri dari: 1) unsur dinas pendidikan, 2) pengawas sekolah dan 3) dewan pendidikan	
102	Dinas Pendidikan	SIPEDA	SIPEDA adalah sistem pemantapan daring. Ujian Sekolah merupakan tahap akhir yang akan dihadapi oleh peserta didik, dimana pada tahap ini peserta didik dapat menentukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Untuk menghadapi hal tersebut dinas pendidikan kota cimahi membuat sistem yang dapat diakses oleh peserta didik dalam menghadapi ujian secara daring.	
103	Dinas Pendidikan	PENGKOLAN	PENGKOLAN adalah Penilaian kinerja guru online, aplikasi ini sebagai alat ukur untuk melihat kehadiran dan ketuntasan pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas, dimana setiap hari guru melaporkan kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran melalui smartphone.	
104	Dinas Pendidikan	Sistem pengendalian penyelenggaraan diklat dinas pendidikan Kota Cimahi	Sistem ini dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelatihan, workshop, bintek, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan komperensi pendidik dan tenaga kependidikan. dimana peserta diklat mengisi kuisioer tentang pelaksanaan diklat langsung melalui smartphone yang meliputi:	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1) narasumber, 2) panitia, 3) tempat, 4) fasilitas, 5) materi dan lain-lain	
105	Dinas Pendidikan	Pembekalan Kurikulum Muatan Lokal PAUD pada Satuan Pendidikan PAUD di Kota Cimahi	Pembekalan Kurikulum Muatan Lokal PAUD pada Satuan Pendidikan PAUD di Kota Cimahi merupakan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	
106	Dinas Pendidikan	SIMAT	SIMAT adalah sistem informasi manajemen absensi terintegrasi, merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan Disiplin dan Kompetensi seluruh ASN di Dinas Pendidikan	
107	Dinas Pendidikan	SIAP PPDB Online	SIAP PPDB Online merupakan sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online. Dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (real time online).	
108	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian	LKA-KCTP	LKA-KCTP adalah layanan konsultasi animasi - kawasan Cimahi Techno Park. Sesuai dengan data yang diperoleh saat penyusunan Masterplan Cimahi Technopark serta Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, dimana salah satu fungsi dari Kawasan Sains dan Teknologi (Cimahi Techno Park sebagai kawasan sains dan	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>teknologi ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 14 Tahun 2018), adalah untuk menyediakan layanan konsultasi/layanan teknologi bagi potensi yang sedang dikembangkannya. Ada 2 (dua) program utama yang didirikan oleh Pemerintah Kota Cimahi, yaitu INKUBASI Teknologi bagi para pelaku start up (Perusahaan Pemula berbasis Teknologi) dan juga AKSELERASI bari para UKM Inovatif. Pendampingan dan pembinaan para pelaku UKM memang didukung oleh anggaran Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi, namun untuk layanan yang bersifat teknis dan berkelanjutan Cimahi Techno Park dengan potensi pelaku desain dan animasi yang melimpah, berusaha untuk mendukung perkembangan usaha UKM Inovatif melalui Layanan desain kemasan dan desain video promosi produk. Semula layanan ini dilaksanakan oleh SDM Cimahi Techno Park, namun dengan konsultasi, koordinasi makan pada masa depan layanan ini akan beririsan langsung dengan para start up yang ada di Cimahi Techno Park (baik di Gedung Cimahi Techno Park maupun di Gedung BITC). Update dan Upgrade layanan ini terus dilakukan. Pada masa pandemi covid 19 ini, dimana seluruh UKM sedang mengalami penurunan omzet, maka promosi yang baik dari sisi Social Media harus dilakukan dan ini bisa didukung oleh Layanan Konsultasi Animasi dan Video Promosi oleh Cimahi Techno Park. Dengan layanan ini,</p>	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>maka para pelaku UKM Inovatif dapat mengencarkan promosi melalui IG, Youtube, Facebook, Twitter dan sosial media lainnya untuk meningkatkan omzet ataupun hanya untuk menaikan ekuitas merek produk yang akan bermanfaat baik di masa pandemi maupun saat pandemi telah berakhir dan daya beli masyarakat kembali normal dan meningkat. Layanan ini merupakan gambaran dasar dari potensi klaster animasi dan telematika yang ada pada Kawasan Cimahi Techno Park yang disambungkan dengan kebutuhan atas promosi produk dari para pelaku UKM di Kota Cimahi. Berdasarkan masterplan Cimahi Techno Park dan Road map pengembangan klaster inovasi bisnis digital kreatif yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Cimahi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, dan Kementerian Riset dan Teknologi, bahwa kolaborasi yang dilakukan harus mendukung program utama (Inkubasi dan Akselerasi), untuk itu kolaborasi antara ABCGM pada layanan ini sangat erat dan akan menjadi simbiosis mutualisme bagi semua pihak yang bergabung didalamnya.</p>	
109	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	SIMANTRI	SIMANTRI adalah sistem informasi manajemen industri, Sistem berupa data base pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Cimahi berbasis klaster yang meliputi : data pelaku usaha, data usaha, modal, pemasaran, dan lain-lain	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menengah dan Perindustrian			
110	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian	AR CTP	Aplikasi yang menjadi alternatif implementasi teknologi dan promosi produk lokal kota Cimahi lewat teknologi Augmented Reality yang sangat berpihak terhadap potensi lokal di era industri 4.0	
111	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian	Sistem Peminjaman sarana dan prasarana gedung Cimahi Techno Park via Website	Inovasi ini dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pola kerja kawasan Cimahi Technopark serta masyarakat yang membutuhkan akses untuk .peminjaman sarana dan prasarana di Gedung Cimahi Techno Park yang dapat mendukung pembuatan iklim ekonomi kreatif yang kondusif serta kawasan Cimahi Techno Park yang berdaya.	
112	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian	Smart CTP	Inovasi ini dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pola kerja kawasan Cimahi Technopark serta masyarakat yang membutuhkan akses untuk .peminjaman sarana dan prasarana di Gedung Cimahi Techno Park yang dapat mendukung pembuatan iklim ekonomi kreatif yang kondusif serta kawasan Cimahi Techno Park yang berdaya.	
113	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha	KATERPILLAR HI-PARK	KATERPILLAR HI-PARK adalah kolaborasi antar empat pilar di Cimahi Techno Park + Media. Kolaborasi, sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diwujudkan, namun tidak	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian		demikian yang terjadi di Cimahi Technopark. Melalui konsep kolaborasi Quadruple Helix yang permanen dan sinergis di antara pelaku akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas, menjadi kunci utama dalam menciptakan layanan-layanan yang inovatif bagi para pelaku UKM/IKM maupun dalam proses penciptaan pelaku wirausaha baru berbasis teknologi di Kawasan Cimahi Technopark, guna meningkatkan bangkitan ekonomi lokal masyarakat.	
114	Dinas Perhubungan	Smart PKB		
115	Dinas Perhubungan	Smart Angkutan Anak Sekolah		
116	Dinas Perhubungan	Smart Izin Angkutan		
117	Dinas Perhubungan	Smart Terminal & Parkir		
118	Dinas Perhubungan	Smart Traffic		
119	Dinas Perhubungan	Smart PJU		

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
120	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BEMARA NURSERIES	BEMARA adalah akronim dari BERbasis MAsyaRAkat, dan NURSERIES adalah kata dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah pembibitan tanaman, dalam pertamanan berarti pembibitan tanaman hias. Jadi BEMARA NURSERIES adalah pembibitan tanaman hias berbasis masyarakat. Dalam dunia industri pertamanan, pembibitan tanaman hias adalah pemasok tanaman hias untuk pembuatan taman. Maksud dari inovasi tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan pembibitan tanaman hias raksasa yang tersebar di setiap RW yang bermitra dengan Petani Tanaman Hias Cihideung.	
121	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SIMANDRA	SIMANDRA adalah akronim dari Sistem Informasi, MANajemen DRAinase. SIMANDRA merupakan aplikasi system informasi geospasial (GIS) berbasis web yang digunakan untuk menginput data dan memetakan saluran drainase permukiman yang ada di Kota Cimahi	
122	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	GRIYA PLUS	GRIYA artinya rumah, sedangkan PLUS adalah akronim dari Pastikan Layak huni, Upayakan Sehat. Maksud dari GRIYA PLUS tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan kondisi rumah masyarakat yang masuk kategori RUMah TIDak LAYak Huni (RUTILAHU) menjadi rumah yang tidak hanya layak huni saja tetapi dapat lebih menjadikan penghuninya sehat. GRIYA PLUS merupakan pengembangan dari program Perbaikan RUTILAHU reguler yang hanya menggarap perbaikan Atap, Lantai atau DINDing saja (ALADIN), dengan menambahkan	



No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perbaikan atau pembangunan jamban keluarga berikut sarana pengolahan air limbah domestiknya (Tanki Septik).	
123	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	CIMAHI WALAGRI	WALAGRI adalah akronim dari WAhangan LegA, linGkungan asRI. WALAGRI sendiri adalah kosa kata dari bahasa Sunda yang berarti SEHAT. Maksud dari kalimat tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan kondisi sungai yang lebar (sesuai dengan kapasitas optimumnya untuk mengalirkan air) sehingga perumahan dan permukiman yang ada di daerah aliran sungainya terbebas dari banjir, memenuhi standar sanitasi lingkungan serta memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang mendukung terciptanya lingkungan yang asri sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman dan sehat.	
124	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SIKS	SIKS adalah serangkaian sub sistem informasi PMKS dan PSKS yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain SIKS adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi semua pihak dengan kebutuhan yang telah ditentukan. SIKS dapat menggambarkan mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			khusus dan output dari model matematika. Output informasi digunakan dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah.	
125	Dinas Tenaga Kerja	SILIMA	SILIMA Kota Cimahi merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk warga Kota Cimahi dalam mencari pekerjaan dengan mudah dan informatif serta membantu pemberi kerja kemudahan dalam mencari pekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet.	
126	Dinas Tenaga Kerja	Temu Konsolidasi Serikat Pekerja	Kegiatan ini memberikan pencerahan tentang ketenagakerjaan kepada unsur PUK di perusahaan dengan cara di kumpulkan kemudian ada pemateri berkenaan dengan peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang ada/trend di perusahaan.	
127	Dinas Tenaga Kerja	Chimasistaker	Sistem ini menyediakan informasi ketenagakerjaan meliputi: - Data Perusahaan - Data Pencaker - Lowongan Kerja	
128	Inspektorat	Konsol Yuk	"KONSUL YUK" merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi oleh APIP Kota Cimahi, sesuai dengan peran Inspektorat dalam pengawasan intern pemerintahan, yaitu assurance and consulting	
129	Inspektorat	SI MAS NGAWAS KM 01-30	SI MAS NGAWAS KM 01-30 atau Sistem Informasi Manajemen Hasil PeNgawasan Kendali Mutu 01-30, merupakan aplikasi yang mencakup data hasil pengawasan, rekomendasi hasil pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang dapat diakses oleh pemangku kebijakan serta objek pengawasan melalui akses khusus. Sistem ini memenuhi kebutuhan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengawasan intern pemerintahan yang sesuai dengan peran assurance and consulting APIP, yang terintegrasi dengan peran pengawasan oleh Kepala Daerah dan Kepala OPD	
130	Kantor Kesatuan Bangsa	Simagang	sim yang diperuntukan para pemohon pelayanan di Kantor Kesbang, seperti pelayanan rekomendasi PKL/magang.KKN/penelitian/mencari data	
131	Kecamatan Cimahi Selatan	SIMPELMAS	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat (SIMPELMAS), 1. SIMPELMAS adalah sistem aplikasi Daring (dalam jaringan/ Online) pelayanan yang mengkoneksikan antara Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan 2. SIMPELMAS dibangun dan dikembangkan untuk menyederhanakan, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 3. SIMPELMAS menggunakan aplikasi web base melalui intranet dan internet sehingga dapat diakses dari mana saja	
132	Kecamatan Cimahi Selatan	Pelayanan Extra Administrasi Kependudukan	Pelayanan extra administrasi kependudukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan extra administrasi kependudukan dilaksanakan setiap hari Jum'at Minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya dimulai pukul 17.00 s.d 21.00 WIB. Pelayanan extra administrasi kependudukan dilaksanakan untuk melayani masyarakat CIMahi Selatan yang pada saat jam operasional biasa tidak bisa mengurus administrasi kependudukan karena aktivitas rutin yang tidak bisa ditinggalkan seperti bekerja atau sekolah. Pelayanan extra administrasi kependudukan melayani	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			: 1. Perekaman TP Elektronik 2. Pembuatan KK 3. Surat Pindah 4. Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran 5. Surat Keterangan	
133	Kecamatan Cimahi Tengah	SYANTIK	Syantik adalah sistem layanan terpadu dan informasi kecamatan, merupakan sistem untuk memberikan pelayanan kependudukan dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kec. Cimahi Tengah maupun kelurahan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website kecamatan secara interaktif	
134	Kecamatan Cimahi Utara	SAPAKAT Online	Syantik merupakan sistem untuk memberikan pelayanan kependudukan dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kec. Cimahi Tengah maupun kelurahan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website kecamatan secara interaktif	
135	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Sistem Penjadwalan Operasi dan Kamar Operasi	Sistem Penjadwalan Operasi dan Kamar Operasi diperlukan untuk mempermudah dan menertibkan jadwal operasi yang tadinya manual menjadi diatur oleh sistem	
136	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Update Mutasi dari Registrasi	permasalahan : a. Registrasi rawat inap tidak langsung merubah informasi kamar tidur b. Informasi tempat tidur tidak real time	
137	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Sistem Informasi Eksekutif	Kebutuhan Informasi eksekutif diperlukan untuk mempermudah pihak eksekutif dalam menganalisa dan pengambilan keputusan dari data yang ditampilkan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
138	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Sistem Informasi Bank Darah	Sistem Informasi Bank darah diperlukan untuk mengelola proses kerja unit UTD RS Cibabat guna meningkatkan kualitas pelayanan dan inventori darah secara akurat	
139	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Sistem Labelling Gizi		
140	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Expertise Lab PA	Untuk mendukung efisiensi pencatatan dan pencarian record medis expertise pasien dan mendukung aturan baru v-claim melampirkan expertise elektronik berbentuk pdf	
141	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Expertise Radiologi	Untuk mendukung efisiensi pencatatan dan pencarian record medis expertise pasien dan mendukung aturan baru v-claim melampirkan expertise elektronik berbentuk pdf	
142	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Grafik Baber Jhonson	Akibat dari perubahan info kamar grafik baber jhonson harus diupdate	
143	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	BOR dan TOI	Akibat dari perubahan info kamar BOR dan TOI harus diupdate	
144	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	Update Info Kamar dengan Mutasi Otomatis	Informasi tempat tidur dapat di update secara realtime saat pendaftaran rawat inap, tidak memerlukan proses mutasi yang seringkali terlupakan atau terlewatkan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengaduan Trantibum	Gangguan Trantibum dan pelanggaran Peraturan daerah yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung dan dapat disampaikan pada nomor pengaduan 081218964001	
146	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Patroli Wilayah Damkar	Lingkup Kegiatan : 1. Melakukan pendataan umum dan khusus berkenaan dengan perkembangan infrastruktur wilayah-wilayah yang berpotensi atau rawan kebakaran. 2. Menyusun dan melaporkan secara lengkap hasil patroli wilayah kepada pimpinan.	

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

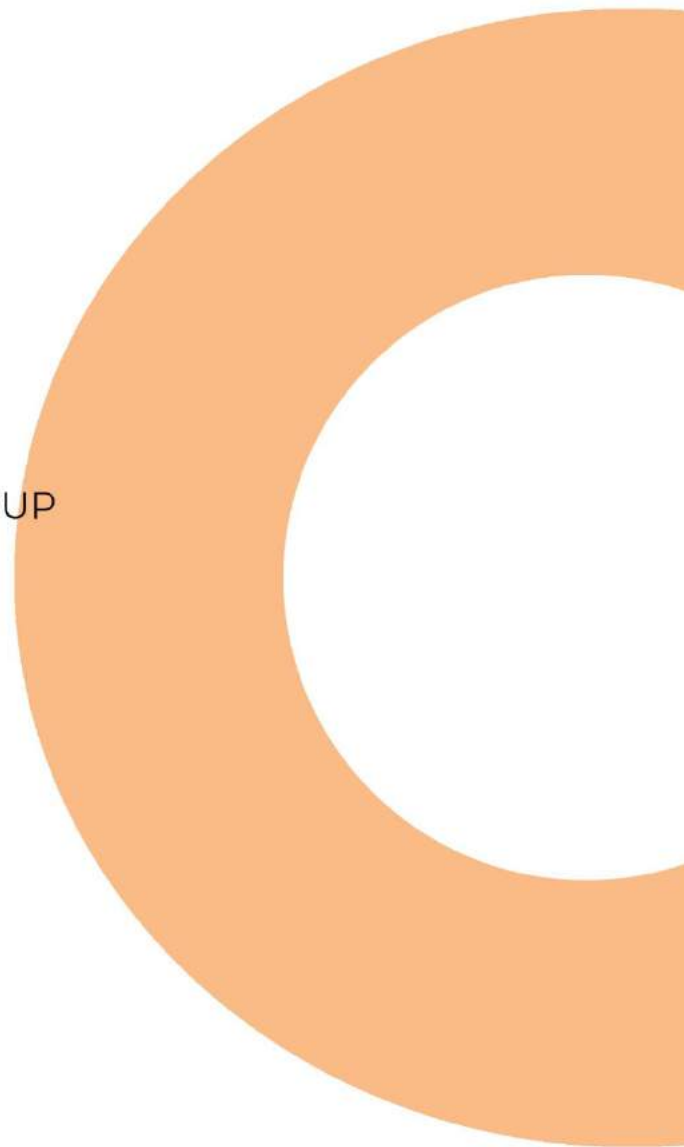
LAMPIRAN III

LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021

- TABEL TAMBAHAN



**Tabel-1a. Tabel Tambahan Rincian Kawasan Sempadan Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	Sempadan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Cimahi	11
2	Sungai Ciputri	2
3	Sungai Cibaligo	3
4	Sungai Cikendal	2
5	Sungai Cisangkan	7
6	Saluran Irigasi Bongkok	2
7	Saluran Irigasi Leuwitereup	2
8	Sungai Cibeureum	2
9	Sal. Pasirkaliki	1
10	Seluruh Embung	3

Keterangan: -

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati, 2016

**Tabel-1b. Tabel Tambahan Rincian Kawasan Sempadan DAS
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	DAS Kota Cimahi	Sempadan (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	DAS Cihaur	3,82
	Sungai Renggas	3,82
2	DAS Cimahi	5,85
	Sungai Cimahi	5,85
3	DAS Cilember	4,35
	Sungai Cilember	1,88
	Sungai Cibaligo	2,47
4	DAS Cibeureum	2,74
	Sungai Cibeureum	2,74
5	DAS Cibiuk	0,68
	Sungai Cibiuk	0,68
	Total	17,44

Keterangan:

Sumber: Masterplan Drainase Kota Cimahi, 2019



Tabel-1c. Tabel Tambahan Tren Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi Tahun : 2021

No.	Nama Kawasan	Luas Kawasan Lindung			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Resapan Air	58	58	16,69	697,12
2	Sempadan Sungai	35	35	29,2	258,26
3	Ruang Terbuka Hijau	755,46	755,46	772,5	4,17
4	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	0	0	0	1486,7
5	Kawasan Rawan Tanah Longsor	147	147	147	1061,25
6	Kawasan Rawan Banjir	0	0	0	181,72
7	Kawasan Rawan Bencana	0	0	0	1242,97

Keterangan:

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-2a. Tabel Tambahan Tren Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lahan non Pertanian	1,540,18	3,501,93	3,492,21	3,343,73
2	Lahan Sawah	272	137,14	136	136
3	Lahan Kering	1,901,77	185	198,64	191
4	Lahan Perkebunan	0	0	184	338,33
5	Lahan hutan	0	0	6,67	0
6	Lahan Badan Air	14,31	N/A	3,48	16,67

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-3a. Tabel Tambahan SK Wali Kota Cimahi Tahun 2012 tentang Hutan Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Blok Cimenteng	4,00
2	Kawasan Jl. Jend. H. Amir Machmud	0,864
3	Kawasan Jl. Baros	0,284
4	Kawasan Simpang Jl. Leuwigajah Nanjung	0,354
5	Kawasan Jl. Gandawijaya	0,080
6	Kawasan Jl. Sudirman	0,22
7	Kawasan Jl. Urip Sumihardjo	0,060
8	Kawasan Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	0,120
9	Kawasan Jl. Mahar Martanegara	0,156
10	Kawasan Jl. HMS Mintadiredja	0,280



No.	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
11	Kawasan Citeureup	0,25
	Total	6,668

Keterangan: -

Sumber: SK Walikota Cimahi Tahun 2007 tentang Hutan Kota

Tabel-3b. Tabel Tambahan Rincian Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kota Cimahi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Lokasi	Luas (m²)
(1)	(2)	(3)
1	Hutan Kota Publik dan privat lainnya	213,6
2	RW 18 Lebak Saat	0,48
3	Penambahan Taman Kehati	0,93
4	Peta Kawasan RTH dari PUPR (RTRW 2012-2022)	4,17
5	RW 8 Cibeber	0,9
6	RW 5 Citeureup PDU (Pusat Daur Ulang)	0,22
7	RW 12 Cipageran	0,86
8	RW 21 Cipageran	0,2
9	RW 21 Cipageran	0,43
10	RW 21 Cipageran	0,55
11	RW.15 Padasuka	0,098
12	Hutan Kota (SK 2007)	8,017
13	Hutan Kota (SK 2012)	6,668
	Total	237,123

Keterangan: Hanya terdapat hutan kota di Kota Cimahi

Sumber: SK Walikota Cimahi Tahun 2012

Tabel-3c. Tabel Tambah an Rincian Kawasan Hutan Publik dan Privat di Kota Cimahi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Fungsi Hutan	Luas (m²)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan RW 10 Kel Leuwigajah	50.000,00
2	Kawasan Sepanjang Jalan Tol Cipularang	188.000,00
3	Kawasan UNJANI	100.000,00
4	Kawasan Bukit Cirende u	250.000,00
5	Kawasan Perkantoran TTUC	50.000,00
6	Kawasan Lap Brigif TNI AD	140.000,00
7	Gunung Bohong	500.000,00
8	Bukit Cibogo	822.000,00
9	Tikungan Ciawitali	4.000,00
10	P4TK	30.000,00
11	Hutan Perumahan Kota Mas	1.650,00
12	DPRD Kota Cimahi	350
	Total dalam meter	2.136.000,00
	Total dalam ha	213,6

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-3d. Tabel Tambah an Tren Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nilai IKTL			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	28,96	26,2	25,87	22,19

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

**Tabel-6a. Tabel Tambahan Tren Luas Lahan Kritis di Luar
Kawasan Hutan**

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Lahan Kritis (Ha)				Lahan Sangat Kritis (Ha)			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cimahi Utara	N/A	19,08	84,95	84,95	N/A	335,71	439,99	439,99
2	Cimahi Tengah	N/A	3,43	3,43	3,43	N/A	2,97	2,97	2,97
3	Cimahi Selatan	N/A	99,35	33,48	33,48	N/A	228,95	124,66	124,66

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Tabel-8a. Tabel Tambahan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cileuweung Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0.98 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	63%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	23 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,1	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.111 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	-2.5 mV	Melebihi
	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	6,0 x 10 ⁹ cfu/g tanah	Tidak
Pakuhaji Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0.98 g/cm ³	Tidak



Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	62,85%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	7.39 cm/jam	Tidak
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,04	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.085 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	-13.1 mV	Melebihi
	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	12 x 10 ¹⁰ cfu/g tanah	Tidak
Terobosan Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.01 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	62,07%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	14.32 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,64	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.07 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	15.8mV	Melebihi
Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	6.1 x 10 ⁹ cfu/g tanah	Tidak	
Cimenteng 2 Utuh,	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-



Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kec. Cimahi Utara	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.13 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	57,36%	Tidak
	Derajat Peluluan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	23.64 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,9	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.067 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	-7.5 mV	Melebihi
	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.2 x 10 ¹⁰ cfu/g tanah	Tidak
Lebaksaat Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.19 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	55,27%	Tidak
	Derajat Peluluan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	27.02 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,79	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.123 mS/cm	Tidak



Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Redoks	< 200 mV	-11.6 mV	Melebihi
	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	7.5 x 10 ⁹ cfu/g tanah	Tidak
Ciuyah Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.25 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	52,88%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	29.7 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,41	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.201 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	6.9 mV	Melebihi
Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.4 x 10 ¹⁰ cfu/g tanah	Tidak	
Warung Muncang Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0.95 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	64,25%	Tidak



Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	26.92 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,28	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.081 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	11.6 mV	Melebihi
	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.6 x 10 ¹⁰ cfu/g tanah	Tidak
Permana Utuh, Kec. Cimahi Utara	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-
	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1.02 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	61,53%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	23.22 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,56	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.155 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	15.6 mV	Melebihi
Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	5.4 x 10 ⁹ cfu/g tanah	Tidak	
Cimenteng Utuh, Kec.	Ketebalan Solum	< 20 cm	0-60 cm	Tidak
	Kebatuan Permukaan	> 40%	-	-
	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	-	-



Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimahi Utara	Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	-	-
	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0.91 g/cm ³	Tidak
	Porositas Total	< 30% ; > 70%	65,92%	Tidak
	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	31.23 cm/jam	Melebihi
	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,41	Tidak
	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0.083 mS/cm	Tidak
	Redoks	< 200 mV	2.9 mV	Melebihi
Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	9.6 x 10 ⁹ cfu/g tanah	Tidak	

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan Pengukuran

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-13a. Tabel Tambahan Tren Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Permukiman	1.977,92	1.966,38	2.120,05	2.363,00
2	Industri	500,575	500,575	494,43	-
3	Tanah Kering	1.901,77	1901,773	198,64	191
4	Perkebunan	96,894	96,744	N/A	67,35
5	Semak Belukar	N/A	N/A	N/A	83,14
6	Tanah Kosong	133,509	122,329	N/A	42,92
7	Perairan/Kolam	9,13	N/A	16,69	25,05
8	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan Pengukuran

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-24a. Tabel Tambahan Tren Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Stasiun Geofisika Bandung	2017	94	162	483	234	177	109	101	38	102	191	467	137
		2018	174	215	192	221	53	45	12	22	28	66	76	56
		2019	35	35	45	78	25	12	0	2	0	0	42	57
		2020	27,38	22,75	28,15	26,13	18,09	19,92	11,83	11,9	16,01	15,9	35,04	32,09

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-29a. Tabel Tambahan Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06° 52' 15,69"	107° 32' 06,23"	20 Februari 2020	24,1	7,47	NA	268
		Sungai Cisangkan Tengah	06° 52' 57,26"	107° 31' 46,20"	18 Februari 2020	26,7	7,41	NA	330
		Sungai Cisangkan Hilir	06° 52' 57,2"	107° 31' 46,2"	18 Februari 2020	27	7,4	NA	440
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	06° 53' 87,6"	107° 03' 32,9"	19 Februari 2020	26,3	7,63	NA	416
		Sungai Cibaligo Tengah	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	19 Februari 2020	28	7,5	NA	672
		Sungai Cibaligo Hilir	06° 55' 29,5"	107° 32' 58,9"	19 Februari 2020	28,4	7,51	NA	1274
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06° 54' 37,45"	107° 34' 07,31"	17 Februari 2020	26,2	7,35	NA	477
		Sungai Cibeureum Tengah	06° 55' 09,7"	107° 33' 55,5"	17 Februari 2020	25,2	7,27	NA	464
		Sungai Cibeureum Hilir	06° 55' 55,0"	107° 33' 42,9"	17 Februari 2020	26	7,45	NA	712
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06° 52' 28,9"	107° 33' 41,3"	20 Februari 2020	24,3	7,64	NA	398
		Sungai Cilember Tengah	06° 53' 21,9"	107° 33' 24,3"	17 Februari 2020	25,9	7,17	NA	398
		Sungai Cilember Hilir	06° 54' 00,8"	107° 32' 54,6"	19 Februari 2020	30,4	7,65	NA	1522
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06° 51' 17,6"	107° 33' 44,6"	20 Februari 2020	22	7,81	NA	204
		Sungai Cimahi Tengah	06° 53' 37,37"	107° 32' 27,60"	18 Februari 2020	25,3	7,86	NA	193
		Sungai Cimahi Hilir	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	18 Februari 2020	25,5	7,64	NA	304

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	17	3,22	7	18	0,5	3,4	1,3	0,03	<0,29	0,03
		Sungai Cisangkan Tengah	27	1,65	17	54	0,4	<2	2,4	0,04	<0,29	0,099
		Sungai Cisangkan Hilir	10	2,34	14	46	0,29	2,2	2,2	0,02	<0,29	0,017
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	14	3,82	42	91	2,35	<2	1,7	0,04	0,3	0,083
		Sungai Cibaligo Tengah	30	1,88	46	78	<0,01	<2	1,8	<0,02	<0,29	0,008
		Sungai Cibaligo Hilir	62	<1	54	126	<0,01	2,1	6,8	0,02	0,6	0,048
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	53	6,7	7	28	0,51	5,7	1,1	0,03	<0,29	0,055
		Sungai Cibeureum Tengah	67	3,43	8	40	0,5	4,8	1,12	0,02	<0,29	0,023
		Sungai Cibeureum Hilir	60	3,88	10	37	0,49	6	1,74	0,02	<0,29	0,09
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	28	2,17	17	32	0,6	4,1	0,9	0,04	<0,29	0,02
		Sungai Cilember Tengah	24	2,53	38	74	0,3	<2	5,3	0,04	<0,29	0,004
		Sungai Cilember Hilir	13	3,82	47	97	0,02	<2	4,2	0,03	<0,29	0,055
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	96	1,77	27	59	0,07	<2	0,3	0,03	<0,29	0,07
		Sungai Cimahi Tengah	295	3,7	19	42	0,13	<2	0,67	0,03	<0,29	0,014
		Sungai Cimahi Hilir	149	5,91	8	26	0,15	2,6	0,8	0,03	<0,29	0,017

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Minyak dan Lemak ($\mu\text{g/L}$)	Detergen ($\mu\text{g/L}$)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)	Cd Terlarut (mg/L)	Cr ⁺⁶ (mg/L)	Cu Terlarut (mg/L)(*)	Pb Terlarut (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	1,65	0,5	275,5	1,789,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,028	NA
		Sungai Cisangkan Tengah	1,5	0,6	261,3	2,755,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,01	NA
		Sungai Cisangkan Hilir	<1,25	0,3	50,4	1,017,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	<1,25	0,43	789	1,793,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,06	NA
		Sungai Cibaligo Tengah	<1,25	0,3	1,046,200	1,523,000	0,04	<0,09	NA	<0,034	0,12	NA
		Sungai Cibaligo Hilir	1,7	0,5	3,873,000	46,110,000	<0,008	<0,09	NA	0,039	0,05	NA
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	<1,25	0,15	633	17,930,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
		Sungai Cibeureum Tengah	<1,25	0,2	645	12,500,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,019	NA
		Sungai Cibeureum Hilir	<1,25	0,19	196	2,359,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	1,7	0,144	214,3	689	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
		Sungai Cilember Tengah	1,56	0,51	2,419,600	12,033,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,01	NA
		Sungai Cilember Hilir	<1,25	0,6	1,413,000	3,873,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,01	NA
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	<1,25	0,05	31	200	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
		Sungai Cimahi Tengah	<1,25	<0,02	262	2,650,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA
		Sungai Cimahi Hilir	<1,25	0,04	860	4,040,000	<0,008	<0,09	NA	<0,034	0,02	NA

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Zn Terlarut (mg/L)(*)	Fe Terlarut (mg/L)(*)	Mn Terlarut (mg/L)(*)	Klorida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Arsen (mg/L)	Hg (mg/L)	Ba (mg/L)	Co (mg/L)	Se (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,02	tt	0,17	25,9	0,19	26	0,001	NA	0,015	NA	NA
		Sungai Cisangkan Tengah	0,03	0,02	0,37	32,3	0,28	21	0,002	NA	0,03	NA	NA
		Sungai Cisangkan Hilir	0,004	0,18	0,22	39,9	0,36	4	0,002	NA	NA	NA	NA
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	0,04	0,19	0,07	38,1	38,1	33	0,002	NA	0,01	NA	NA
		Sungai Cibaligo Tengah	1,72	NA	0,02	51,7	0,3	59	0,001	NA	0,024	NA	NA
		Sungai Cibaligo Hilir	0,004	NA	0,21	138	0,9	76	0,002	NA	NA	NA	NA
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,04	0,35	0,05	70,5	1,03	28	0,001	NA	0,023	NA	NA
		Sungai Cibeureum Tengah	0,03	0,34	0,12	64,7	0,8	32	0,002	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cibeureum Hilir	0,05	0,05	0,15	72,09	1,04	53	0,002	NA	0,01	NA	NA
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	0,01	NA	0,57	27,5	0,24	23	0,002	NA	0,02	NA	NA
		Sungai Cilember Tengah	0,08	0,03	0,4	43,5	0,26	16	0,002	NA	0,02	NA	NA
		Sungai Cilember Hilir	0,03	0,08	0,08	109,1	0,5	92	0,002	NA	NA	NA	NA
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,01	2,06	0,53	4,6	0,15	9	0,001	NA	0,012	NA	NA
		Sungai Cimahi Tengah	0,01	0,26	0,54	10,6	0,33	10	0,002	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cimahi Hilir	0,01	0,19	0,63	24,1	0,28	21	0	NA	NA	NA	NA



(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06° 52' 15,69"	107° 32' 06,23"	16 Juli 2020	23	8,1	393	246
		Sungai Cisangkan Tengah	06° 52' 57,26"	107° 31' 46,20"	16 Juli 2020	23	7,75	500	240
		Sungai Cisangkan Hilir	06° 52' 57,2"	107° 31' 46,2"	16 Juli 2020	25	7,55	1000	530
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	06° 53' 87,6"	107° 03' 32,9"	15 Juli 2020	24	7,96	500	268
		Sungai Cibaligo Tengah	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	15 Juli 2020	25	7,88	838	450
		Sungai Cibaligo Hilir	06° 55' 29,5"	107° 32' 58,9"	15 Juli 2020	27	8,19	19,7	1109
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06° 54' 37,45"	107° 34' 07,31"	15 Juli 2020	23	8	637	351
		Sungai Cibeureum Tengah	06° 55' 09,7"	107° 33' 55,5"	16 Juli 2020	24	7,86	721	460
		Sungai Cibeureum Hilir	06° 55' 55,0"	107° 33' 42,9"	15 Juli 2020	24	7,91	710	422
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06° 52' 28,9"	107° 33' 41,3"	15 Juli 2020	24	8,01	484	234
		Sungai Cilember Tengah	06° 53' 21,9"	107° 33' 24,3"	15 Juli 2020	24	8,33	489	272
		Sungai Cilember Hilir	06° 54' 00,8"	107° 32' 54,6"	15 Juli 2020	24	8,36	435	251
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06° 51' 17,6"	107° 33' 44,6"	15 Juli 2020	21	8,7	221	137
		Sungai Cimahi Tengah	06° 53' 37,37"	107° 32' 27,60"	16 Juli 2020	23	8,09	289	194
		Sungai Cimahi Hilir	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	16 Juli 2020	25	7,55	1507	888

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	27,2	3,11	115	330	0,28	1,7	0,053	NA	0,85	0,45
		Sungai Cisangkan Tengah	33,5	1,8	24,6	54,8	0,06	2,2	0,053	NA	0,827	0,79
		Sungai Cisangkan Hilir	56	1,11	43	130	0,05	3,1	0,053	NA	0,796	0,86
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	59	4,65	40,9	100	0,06	4,4	0,053	NA	1,1	1,09
		Sungai Cibaligo Tengah	41,5	3,83	27,6	69,9	0,08	0,9	0,053	NA	4,73	0,69
		Sungai Cibaligo Hilir	78	0,16	69	217	0,1	2,1	0,053	NA	2,6	1,36
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	72,5	8,28	34,8	68	0,81	5,6	0,053	NA	0,98	0,46
		Sungai Cibeureum Tengah	58	3,75	26,6	60,4	0,88	3	0,053	NA	3,57	0,66
		Sungai Cibeureum Hilir	116	3,46	45	138	0,55	2,7	0,053	NA	1,09	0,5
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	38,5	5,34	34,8	85	0,31	1,8	0,053	NA	4,02	0,47
		Sungai Cilember Tengah	34	4,61	20,4	41,5	0,25	1,5	0,053	NA	7,66	0,49
		Sungai Cilember Hilir	77,5	11,5	53,1	117	0,64	1,8	0,053	NA	2,76	1,13
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	31	8,04	16,4	47,2	0,04	3,6	0,053	NA	0,53	0,26
		Sungai Cimahi Tengah	77,5	7,05	18,5	41,5	0,28	3,1	0,053	NA	0,664	0,44
		Sungai Cimahi Hilir	34,5	2,16	36,8	75,5	0,03	2,2	0,053	NA	0,9	0,57

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Minyak dan Lemak ($\mu\text{g/L}$)	Detergen ($\mu\text{g/L}$)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)	Cd Terlarut (mg/L)	Cr ⁺⁶ (mg/L)	Cu Terlarut (mg/L)(*)	Pb Terlarut (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	4,95	2,72	10.700.000	800.000	0,013	0,067	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cisangkan Tengah	4,83	3,2	10.000	1.120.000	0,016	0,087	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cisangkan Hilir	3,44	2,011	4.400.000	140.000	0,012	0,364	NA	0,0367	0,0071	NA
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	7,55	2,74	15.200.000	1.400.000	0,015	0,095	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cibaligo Tengah	3,74	1,98	1.620.000	1.040.000	0,108	0,096	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cibaligo Hilir	13,8	4,24	19.600.000	1.400.000	0,045	0,464	NA	0,0367	0,0071	NA
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	6,17	0,574	900.000	1.100.000	0,011	0,05	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cibeureum Tengah	1,38	1,24	1.390.000	720.000	0,045	0,069	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cibeureum Hilir	3,18	1,34	3.400.000	440.000	0,023	0,1	NA	0,0367	0,0071	NA
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	4,89	3,88	1.360.000	760.000	0,014	0,056	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cilember Tengah	2,17	3,93	1.010.000	840.000	0,015	0,094	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cilember Hilir	5,96	1,83	15.500.000	1.480.000	0,016	0,07	NA	0,0367	0,0071	NA
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	1,38	2,87	12.000.000	160.000	0,007	0,031	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cimahi Tengah	4,19	0,655	820.000	320.000	0,0008	0,038	NA	0,0367	0,0071	NA
		Sungai Cimahi Hilir	8,2	1,43	1.360.000	920.000	0,012	0,121	NA	0,0367	0,0071	NA



(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Zn Terlarut (mg/L)(*)	Fe Terlarut (mg/L)(*)	Mn Terlarut (mg/L)(*)	Klorida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Arsen (mg/L)	Hg (mg/L)	Ba (mg/L)	Co (mg/L)	Se (mg/L)	
(1)	(2)	(3)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,0127	0,0198	0,26	33,3	0,1	28,6	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cisangkan Tengah	0,0127	0,05	0,64	45	0,1	24,1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cisangkan Hilir	0,0127	0,25	0,71	108	0,1	95,6	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	0,0127	0,03	0,23	47	0,1	24	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cibaligo Tengah	0,02	0,05	0,38	88,1	0,1	69,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cibaligo Hilir	0,0127	0,14	0,45	99,1	0,1	184	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,03	0,02	0,4	88,1	0,89	72,5	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cibeureum Tengah	0,0127	0,03	0,58	88,1	0,74	107	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cibeureum Hilir	0,01	0,1	0,38	78,3	0,7	127	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	0,02	0,04	0,31	66,5	0,1	22,6	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cilember Tengah	0,0127	0,0198	0,2	43	0,1	13,2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cilember Hilir	0,0127	0,1	0,38	78,3	0,1	30,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,0127	0,0198	0,0039	15,7	0,11	11,2	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cimahi Tengah	0,0127	0,0198	0,15	27,4	0,1	13,4	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cimahi Hilir	0,01	0,19	0,54	158	0,1	221	NA	NA	NA	NA	NA	NA



(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06° 52' 15,69"	107° 32' 06,23"	22 Oktober 2020	23	7,39	164	238
		Sungai Cisangkan Tengah	06° 52' 57,26"	107° 31' 46,20"	22 Oktober 2020	24	7,3	233	308
		Sungai Cisangkan Hilir	06° 52' 57,2"	107° 31' 46,2"	22 Oktober 2020	27	7,34	818	473
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	06° 53' 87,6"	107° 03' 32,9"	21 Oktober 2020	24	7,61	230	308
		Sungai Cibaligo Tengah	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	21 Oktober 2020	24	7,63	297	331
		Sungai Cibaligo Hilir	06° 55' 29,5"	107° 32' 58,9"	21 Oktober 2020	26	7,38	584	650
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06° 54' 37,45"	107° 34' 07,31"	21 Oktober 2020	24	7,33	678	435
		Sungai Cibeureum Tengah	06° 55' 09,7"	107° 33' 55,5"	22 Oktober 2020	24	6,84	302	350
		Sungai Cibeureum Hilir	06° 55' 55,0"	107° 33' 42,9"	21 Oktober 2020	25	7,5	500	614
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06° 52' 28,9"	107° 33' 41,3"	21 Oktober 2020	23,5	7,59	209	323
		Sungai Cilember Tengah	06° 53' 21,9"	107° 33' 24,3"	21 Oktober 2020	24	7,56	204	334
		Sungai Cilember Hilir	06° 54' 00,8"	107° 32' 54,6"	21 Oktober 2020	24	7,75	215	285
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06° 51' 17,6"	107° 33' 44,6"	21 Oktober 2020	21	7,72	78,7	650
		Sungai Cimahi Tengah	06° 53' 37,37"	107° 32' 27,60"	22 Oktober 2020	22	7,45	182	160
		Sungai Cimahi Hilir	06° 54' 31,2"	107° 33' 06,5"	22 Oktober 2020	22,5	7,55	316	200

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	27,5	4,77	22,4	72,8	0,42	5,1	<0,053	NA	0,478	550
		Sungai Cisangkan Tengah	29	1,96	40,8	162	0,07	2,3	<0,053	NA	0,608	600
		Sungai Cisangkan Hilir	23,7	3,14	20,4	76,5	0,04	1,8	<0,053	NA	0,531	520
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	37,5	8,01	24,4	71,8	0,615	3,55	<0,053	NA	0,521	700
		Sungai Cibaligo Tengah	55	7,02	26,5	76,5	0,6	2,9	<0,053	NA	0,636	660
		Sungai Cibaligo Hilir	68,9	0,86	42,8	188	0,16	4	<0,053	NA	0,881	890
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	33	9,34	22,4	73,7	0,47	5,5	<0,053	NA	0,518	510
		Sungai Cibeureum Tengah	55,8	8,13	14,3	46,6	0,37	4,3	<0,053	NA	0,454	420
		Sungai Cibeureum Hilir	54,2	8,2	24,4	76,5	0,34	1,7	<0,053	NA	0,449	340
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	32,3	8,06	16,3	50,4	0,43	3	<0,053	NA	0,34	330
		Sungai Cilember Tengah	17,3	6,12	14,3	42,9	0,44	1,8	<0,053	NA	0,487	310
		Sungai Cilember Hilir	66	6,07	54	300	0,43	1,6	<0,053	NA	0,493	800
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	145	9,52	22,4	72,8	0,13	3,1	<0,053	NA	0,505	670
		Sungai Cimahi Tengah	70,2	8,94	14,3	57,8	0,11	0,6	<0,053	NA	0,53	1290
		Sungai Cimahi Hilir	44,7	10,6	26,5	80,2	0,13	3,7	<0,053	NA	0,366	830



(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Minyak dan Lemak ($\mu\text{g/L}$)	Detergen ($\mu\text{g/L}$)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)	Cd Terlarut (mg/L)	Cr ⁺⁶ (mg/L)	Cu Terlarut (mg/L)(*)	Pb Terlarut (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	1000	1900	5400000	15900000	<0,01	0,047	NA	<0,0367	< 0,02	< 0,021
		Sungai Cisangkan Tengah	1000	1930	8600000	29300000	<0,01	0,057	NA	<0,0367	<0,02	< 0,021
		Sungai Cisangkan Hilir	1000	1500	1700000	3300000	<0,01	0,035	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	1000	1290	8700000	12800000	<0,01	0,069	NA	< 0,0367	<0,02	< 0,021
		Sungai Cibaligo Tengah	1720	904	> 20000000	12300000	<0,01	0,07	NA	<0,0367	< 0,02	< 0,021
		Sungai Cibaligo Hilir	2760	3280	> 20000000	> 20000000	<0,01	0,173	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	1000	664	600000	12800000	<0,01	0,026	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
		Sungai Cibeureum Tengah	1910	581	10900000	> 20000000	<0,01	0,037	NA	<0,0367	<0,02	< 0,021
		Sungai Cibeureum Hilir	1000	917	> 20000000	> 20000000	<0,01	0,04	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	1000	1050	4400000	11300000	<0,01	0,036	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
		Sungai Cilember Tengah	1000	1050	2900000	8300000	<0,01	0,041	NA	< 0,0367	< 0,02	< 0,021
		Sungai Cilember Hilir	1620	1030	2200000	700000	<0,02	0,06	NA	< 0,0367	<0,126	< 0,021
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	1000	499,9	16300000	9200000	<0,01	0,128	NA	<0,0367	<0,02	< 0,021
		Sungai Cimahi Tengah	1660	756	8400000	3300000	<0,01	0,045	NA	< 0,0367	<0,02	< 0,021
		Sungai Cimahi Hilir	1000	674	4500000	7000000	<0,01	0,045	NA	<0,0367	< 0,02	< 0,021



No	Nama Sungai	Titik Pantau	Zn Terlarut (mg/L)(*)	Fe Terlarut (mg/L)(*)	Mn Terlarut (mg/L)(*)	Klorida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Arsen (mg/L)	Hg (mg/L)	Ba (mg/L)	Co (mg/L)	Se (mg/L)	
(1)	(2)	(3)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	
1	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	0,0189	<0,126	<0,0595	25,7	< 0,1	20	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cisangkan Tengah	0,0189	<0,126	0,264	39,1	<0,1	32,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cisangkan Hilir	0,0376	0,312	0,144	48,9,	< 0,1	83,7	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Cibaligo	Sungai Cibaligo Hulu	0,0189	< 0,126	0,117	39,6	< 0,1	28	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cibaligo Tengah	0,098	0,824	0,399	48,9	0,11	51,3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cibaligo Hilir	0,0189	0,238	0,732	68,7	0,915	133	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	0,0189	0,204	0,351	97	1,22	57,5	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cibeureum Tengah	0,0189	< 0,126	<0,0595	83,4	1,04	69,2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cibeureum Hilir	0,0189	0,196	0,567	95,9	1,03	165	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Cilember	Sungai Cilember Hulu	0,0189	< 0,126	0,259	40,6	< 0,1	16,6	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cilember Tengah	0,0189	< 0,126	< 0,0595	39,1	<0,1	18,6	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cilember Hilir	0,0189	< 0,126	< 0,0595	39,6	<0,2	26,9	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	0,0189	0,404	< 0,0595	18,1	0,13	34,1	NA	NA	NA	NA	NA	
		Sungai Cimahi Tengah	0,0189	<0,126	< 0,0595	13,9	<0,1	12,9	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Sungai Cimahi Hilir	0,0189	<0,126	< 0,0595	29,4	0,17	46,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (NA) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020

Tabel-29b. Tabel Tambahan Tren Indeks Kualitas Air

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Air			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	18,67	10,67	12	10,67

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-31a. Tabel Tambahan Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat BAB

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	tahun			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sendiri (Jamban Sehat)	100.029	120.262	100.266	92.011
2	Bersama (IPAL Komunal)	5.295	8.039	244	1.677
3	Umum (MCK)	2.240	2.270	1.531	245
4	Sungai	57.339	35.472	69.099	84.901
	Jumlah	164.903	166.043	171.140	178.834

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-31a. Tabel Tambahan Tren Tingkat Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Sekolah	89.232	97.342	154.345	153.210
2	SD	71.663	71.356	71.653	68.921
3	SLTP	92.252	92.244	92.244	91.206
4	SLTA	161.591	164.455	164.455	140.979
5	Diploma	25.765	25.352	25.052	25.905
6	S1	34.834	35.851	35.551	39.552
7	S2	3.883	4.096	4.096	4.465
8	S3	474	487	487	506

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-33a. Tabel Tambahan Tren Jumlah Penyakit Bawaan Air
yang Diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyakit Kerongkongan, Lambung dan Duodenum	20.938	23.167	27.656	17.671
2	Dermatitis dan Eksim	7331	10351	13559	8323
3	Penyakit Infeksi usus	7827	8448	12139	6048

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021



**Tabel-34a. Tabel Tambahan Tren Rumah Tangga Miskin
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Persentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	2018	20,87%
2	Kota Cimahi	2019	28,21%
3	Kota Cimahi	2020	57,00%

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Tabel-35a. Tabel Tambahan Jumlah Potensi Pencemar Badan Air dari Industri/Kegiatan Usaha
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pasar Atas		Terminal dan Pasar	-	29,02	-	-	-
2	Pasar Antri			-	17,04	-	-	-
3	Stasiun kereta api		Stasiun	-		-	-	-
4	Pasar Baros	Kota Cimahi	Pasar	-	5,8	-	-	-
5	RS. Cibabat	Kota Cimahi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0,74	-	-	-
6	PT. Diamond	Kota Cimahi	Industri	-	0,46	-	-	-
7	Klinik Prodia	Kota Cimahi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	3303	146
8	PT. Kahatex	Kota Cimahi	Industri	-	0	0	2336084	92
9	PT. Dewa Sutrutex 1	Kota Cimahi	Industri	2,20	0	793,12	554600	0
10	PT. Triana Harvestindo	Kota Cimahi	Industri	4,822	0	323,45	579795	290
11	PT. Indah Jaya	Kota Cimahi	Industri	0,94	0	-	79010	0
12	PT. Jerditex	Kota Cimahi	Industri	-	0	0	459337	9790
13	PT. Logam Bima	Kota Cimahi	Industri	-	0	-	162	-
14	PT. Beast Jeans Indo Citranusa	Kota Cimahi	Industri	0,3254	0	-	6768	182
15	PT. Chitose International TBK	Kota Cimahi	Industri	2,5252	0	127,63	46844	8000
16	PT. Ayoe Indotama Textile	Kota Cimahi	Industri	4,8791	0	1029,19	751661	6
17	PT. Guna Mitra Prima	Kota Cimahi	Industri	4,5005	0	428,38	298731	136963
18	PT. Anugrah Sinar Abadi	Kota Cimahi	Industri	0,0015	-	0	103001	-



No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	PT. PLN UP3 Cimahi	Kota Cimahi		-	0	0	7	6
20	PT. Dewa Sutrutex 2	Kota Cimahi	Industri	15	0	3486,16	28337	14
21	PT. Hegar Mulya	Kota Cimahi	Industri	55,41	0	304,2	327907	3290
22	PT. Holi Pharma	Kota Cimahi	Industri	0,64	0	3,6	809	451
23	PT. Kawi Mekar	Kota Cimahi	Industri	-	0	-	76127	0
24	PT. Laju Makmur Sentosa	Kota Cimahi	Industri	1,1576	0	180	509883	124
25	PT. Long Sun Indonesia	Kota Cimahi	Industri	22,41	0	-	188430	0
26	PT. Mewah Niaga Jaya	Kota Cimahi	Industri	2,5505	0	0	573028	0
27	PT. Nisshinbo Indonesia	Kota Cimahi	Industri	5,6	0	876,7	995002	2
28	PT. Ragam Jaya Utama	Kota Cimahi	Industri	5,6	0	158,38	288784	780
29	PT. Ras Jaya	Kota Cimahi	Industri	0,27	0	57,02	145607	0
30	PT. San San Sudaratex Jaya 1	Kota Cimahi	Industri	5,5213	0	0	354770	0
31	PT. Setia Busanutex	Kota Cimahi	Industri	10,07	0	20,79	333055	95
32	PT. Sinar Austral	Kota Cimahi	Industri	1,5562	0	0	45275	1580
33	PT. WGI	Kota Cimahi	Pengumpul Limbah B3	-	0	0	0	2628383
34	RS. Dustira	Kota Cimahi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,525	0	-	35514	0
35	RSU Kasih Bunda	Kota Cimahi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,2724	0	1,35	16545	9341
36	Klinik Yudisman	Kota Cimahi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	0	535	0
37	PT. Dam Sinar Button Abadi	Kota Cimahi	Industri	1,5038	0	1,47	316	100
38	PT. Wijaya Karya	Kota Cimahi	Industri	-	0	0	28	15
39	CV. Daya Utama Logam	Kota Cimahi	Industri Pelapisan Logam	0,803	-	1,5	-	-



No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	CV. Suritex	Kota Cimahi	Industri Tekstil	11,4263	-	1157,08	-	-
41	PT. Afiat Industri Farmasi	Kota Cimahi	Industri Farmasi	3,2238	-	1	-	-
42	PT. Antelas	Kota Cimahi	Industri Tekstil	0,61	-	9	-	-
43	PT. Benang Warna Indonusa	Kota Cimahi	Industri Tekstil	1,27	-	2,40	-	-
44	PT. Bina Usaha Cipta Prima	Kota Cimahi	Industri Tekstil	-	-	11,38	-	-
45	PT. Central Gerorgette Nusantara	Kota Cimahi	Industri Tekstil	15,5	-	325,09	-	-
46	PT. Diamond Cold Storage	Kota Cimahi	Industri Makanan	-	-	-	-	-
47	PT. Dwimulya Tata Tunggal Utama Tekstil	Kota Cimahi	Industri Tekstil	0,62	-	5,56	-	-
48	PT. Elizabeth Hanjaya	Kota Cimahi	Industri Tas	2,681	-	-	-	-
49	PT. Fasilamindo Utama	Kota Cimahi	Industri Tekstil	0,3755	-	-	-	-
50	PT. Fuji Palapa Textile	Kota Cimahi	Industri Tekstil	2,11	-	-	-	-
51	PT. Garuda Mas Semesta	Kota Cimahi	Industri Tekstil	37,94	-	3,79	-	-
52	PT. Gede Indah	Kota Cimahi	Industri Tekstil	1,4117	-	0,87	-	-
53	PT. Ginatex	Kota Cimahi	Industri Tekstil	0,5	-	134,33	-	-
54	PT. Gucci Ratu Textile	Kota Cimahi	Industri Tekstil	8,82	-	-	-	-
55	PT. Indo Extrusions	Kota Cimahi	Industri Pelapisan Logam	1,86	-	0,91	-	-
56	PT. Indowira Putra	Kota Cimahi	Industri Cat	1,2206	-	0,97	-	-
57	PT. Jensihiang Nusantara	Kota Cimahi	Industri Tekstil	1,9495	-	-	-	-
58	PT. Jerdytex	Kota Cimahi	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
59	PT. Kamarga Kurnia Textile	Kota Cimahi	Industri Tekstil	-	-	-	-	-



No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60	PT. Leuwijaya Utama Tekstil	Kota Cimahi	Industri Tekstil	17,4547	-	1025	-	-
61	PT. Matahari Sentosa Jaya	Kota Cimahi	Industri Tekstil	2	-	5,18	-	-
62	PT. Mulia Lestari	Kota Cimahi	Industri Tekstil	1,8541	-	669,41	-	-
63	PT. Nickchrome Indojoya	Kota Cimahi	Industri Logam	0,3402	-	23,28	-	-
64	PT. Oriental Embroidery	Kota Cimahi	Industri Tekstil	40	-	76,54	-	-
65	PT. Rajawali Hiyoto	Kota Cimahi	Industri Cat	2,4938	-	6,38	-	-
66	PT. Sanbe Farma Unit I	Kota Cimahi	Farmasi	0,17	-	-	-	-
67	PT. Sanbe Farma Unit II	Kota Cimahi	Farmasi	0,56	-	-	-	-
68	PT. Sanbe Farma R&D	Kota Cimahi	Farmasi	-	-	-	-	-
69	PT. Sinar Continental	Kota Cimahi	Industri Tekstil	0,12	-	138,22	-	-
70	PT. Sinar Pang Jaya Mulya Textile	Kota Cimahi	Industri Tekstil	4,0956	-	1377,78	-	-
71	PT. Soko Lancar	Kota Cimahi	Industri Tekstil	4,99	-	102,01	-	-
72	PT. Tegar Prima Nusantara	Kota Cimahi	Industri Garmen	0,0217	-	2,41	-	-
73	PT. Trisula Textile Industries	Kota Cimahi	Industri Tekstil	13,42	-	383,04	-	-
74	RS Avisena	Kota Cimahi	Fasilitas Kesehatan	0,2183	-	1,1	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

**Tabel-36a. Tabel Tambahan Tren Suhu Udara Rata-Rata
Bulanan**

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Tahun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Stasiun Geofisika Bandung	2017	23,2	23,1	23,4	23,6	23,40	23,1	23,1	23,6	23,8	24,1	23,9	23,7
		2018	23	22,9	23,4	23,3	23,10	23,4	22,6	22,4	23,9	22,8	23,3	23
		2019	23,68	23,83	23,65	23,96	23,84	23,32	22,9	23,04	23,84	24,87	24,2	23,74
		2020	23,96	23,66	24,06	23,99	24,00	23,82	23,03	23,84	24,41	23,83	24	23,78

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-37a. Tabel Tambahan Tren Nilai Indeks Kualitas Udara
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Udara			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	39,21	27,03	73	69,74

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-38a. Tabel Tambahan Penggunaan Bahan Bakar di
Industri
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Penggunaan	Pelumas (liter)	Minyak Diesel
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kimia Dasar		
2	Mesin dan logam dasar		
3	Industri kecil		
4	Aneka Industri	1.732.765,97	

Keterangan: -

Sumber: Disdagkoperin Kota Cimahi, 2020

Tabel-39a. Tabel Tambahan Jumlah Kendaraan yang Diuji

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Jenis Kendaraan	Bensin		Solar		Jumlah
		U	TU	U	TU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Penumpang					
	Otolet	9				9
	Taxi					
	Angkutan Kota	873				873
2	Mobil Bis					
	Bis Besar			5	9	14
	Bis Sedang			25	62	87
	Bis Kecil		2	19	123	144
3	Mobil Barang					
	Bak Terbuka			47	814	861
	Bak Tertutup		68		33	101
	Box		442	15	1.549	2.006
	Blind Vand		431		2	433
	Pick Up	3	2.415	3	310	2.731
	Double Cabin		6		81	87
	Dump Truck			23	75	98
	Lost Bak		10	6	60	76
	Head Tractor			14	18	32
	Tempelan			7	23	30
4	Mobil Khusus					
	Ambulan	4		5	1	10
	Arm Roll			4	4	8
	Derek				2	2
	Kend. Khusus		1	1	18	20
	Kend. Khs. Gandengan					
	Rangkaian					
	Penjaja Makanan		6			6
	Tangki			12	74	86
	Jumlah	889	3381	186	3258	7714

Keterangan: -

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020

Tabel-44a. Tabel Tambahan Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Selatan	RT. 01, 02 dan 04 RW. 02 Melong	Banjir	3100			
2	Cimahi Tengah	Kp. Kebon Manggu RT. 04 RW. 20 Padasuka	Tanah Longsor	300	6		
3	Cimahi Utara	Jl. Cikendal RT. 01 RW. 04 Cipageran	Rumah Roboh	6	6		
4	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo RT. 03 RW. 06 Leuwigajah	Angin Puting Beliung (Angin Kencang)	100			
5	Cimahi Tengah	Jl. Dustira RT 02 Rw 20	Kebakaran	40	-	-	65,000,000
6	Cimahi Utara	Komp. Buciper Jl. Bina No.33 Rt.04 Rw.16 Kel. Citereup. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	63	-	-	23,000,000
7	Cimahi Selatan	Jl.Mukodar dalam No.67 Rt. 01 Rw. 08 Ciberem Cimahi Selatan	Kebakaran	0	-	-	20,000,000
8	Cimahi Tengah	Jl. Abdul Halim No. 14	Kebakaran	60	-	-	3,000,000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.70	Kebakaran	15	-	-	3,000,000,000
10	Cimahi Selatan	Jl. Melong asih gg delima 2 kel melong kecamatan cimahi selatan	Kebakaran	-	-	-	Tidak diketahui
11	Cimahi Selatan	jl. Nanjung no 108 rt 4 rw 13 kel. Utama	Kebakaran	-	-	-	1,000,000
12	Cimahi Selatan	Komp. Melong Green Garden Jl. Hercules Raya No 26. RT 2 RW 23 Kel. Melong	Kebakaran	100	-	-	450,000,000
13	Cimahi Tengah	Jl. Cisangkan Girang Rt6 Rw 2 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	-	-	-	80000000
14	Cimahi Selatan	Jl. Industri IV No.2 Kel Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	-	-	-	40000000
15	Cimahi Selatan	jl. Mahar Martanegara No. 151 RT.02 RW.08 Cimahi Selatan	Kebakaran	450	-	-	250000000
16	Cimahi Selatan	Jl. Mahar Martanegara, bawahflyofer cimindi	Kebakaran	-	-	-	35000000
17	Cimahi Utara	Jl. Paneli 1 2A Rt 5 Citereup	Kebakaran	-	-	-	Tidak diketahui
18	Cimahi Utara	Komplek Cimindi raya Blok B No 4 Rt 4 Rw4. Pasirkaliki, Cimahi Utara	Kebakaran	200	-	-	50000000
19	-	Tol km 124 DarI Arah Jakarta ke bandung	Kebakaran	-	-	-	100000000



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Cimahi Utara	Jl.Pasantren No 24 Rt 01 Rw 05 Kel. Cibabat. Kec Cimahi Utara	Kebakaran	25	-	-	900000000
21	Cimahi Tengah	Jl Cilember No 278 Kel. Cigugur	Kebakaran	7.5	-	-	Tidak diketahui
22	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Ganirah No.148 RT 05 Rw 05 Kel. Cibeber. Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	52	-	-	55000000
23	Cimahi Tengah	Jl. Mhs Mintareja Bo.234	Kebakaran	3	-	-	100000000
24	Cimahi Selatan	Jl.Nanggaleng Cirahayu Cibeber RW 07 Cimahi selatan	Kebakaran	-	-	-	Tidak diketahui
25	Cimahi Selatan	Jl.Ibu Ganirah RT.01 RW.06 Kel. Cibeber Kec. Cimahi selatan	Kebakaran	-	-	-	Tidak diketahui
26	Cimahi Selatan	Jl.Aki Gang Muasim 1 No. 266B Leuwigajah Kecamatan Cimahi selatan Kota Cimahi	Kebakaran	30	-	-	2015000000
27	Cimahi Utara	Jl. Kolonel Masturi No. 130 RT.03 RW.01 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	-	-	-	7000000
28	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Sangki Gg. Permata 5 RT.04 RW.13 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	15	-	-	10000000
29	Cimahi Tengah	Jl. Tarumanegara no 57 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	21	-	-	20000000



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	Cimahi Selatan	Jl. Dakota Selatan 3 Komp. Melong Green Garden No.369B RT.05 RW.23 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan.	Kebakaran	50	-	-	5000000
31	Cimahi Selatan	Jl. Karang Sari No12 Rt 01 Rw 02. Kel. Cibereum	Kebakaran	-	-	-	1000000
32	Cimahi Selatan	Jl. Cibaligo No.75 KM.1,75	Kebakaran	60	-	-	20000000
33	Cimahi Tengah	Jl. Purbasari 1 Gg. H.Didi RT 07 Rw 12 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	20	-	-	500000
34	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeui RT.05 RW. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	200	-	-	Tidak diketahui
35	Cimahi Utara	Jl. Pakuhaji Rt.03 Rw.17 Kel. Cipageran. Kec. Cimahi Utara	Kebakaran	1500	-	-	Tidak diketahui
36	Cimahi Selatan	Jl. Industri II NO.2 RT.06 RW.09 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	10	-	-	Tidak diketahui
37	Cimahi Tengah	Jl. HMS Mintareja RT. 01 RW. 09 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	50	-	-	Tidak diketahui
38	Cimahi Selatan	Jl. Ranca Bentang RT. 01 RW. 26 Kel. Cibereum Kec. Cimahi selatan	Kebakaran	9	-	-	7000000



No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	Cimahi Utara	Jalan Cidamar No. 14 RT.01 RW. 01 Kelurahan Pasir kaliki Cimahi utara	Kebakaran	30	-	-	Tidak diketahui
40	Cimahi Tengah	Jl. Stasiun Barat RT. 05 RW. 20 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	Kebakaran	12	-	-	1000000
41	Cimahi Utara	Jl. Pasantren No.101 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cibabat Cimahi Utara	Kebakaran	-	-	-	Tidak diketahui
42	Cimahi Selatan	Komp. Baros Indah RT.02 RW.03 Kel.Utama Kec. Cimahi Selatan	Kebakaran	-	-	-	3000000
43	Cimahi Selatan	Kp. Cirendeudeu RT.02 RW. 10 Kel. Leuwigajah Kec, Cimahi Selatan	Kebakaran	120	-	-	2000000000
44	Cimahi Selatan	Komp. Pondokmas Blok A10 No.26. RT1 RW16, Kel. Leuwigajah	Kebakaran	24	-	-	100000000
45	Cimahi Selatan	JL AMIRMAHMUD RT 01 RW 21 CIBEREUM	Kebakaran	850	-	-	2800000000

Keterangan: -

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2020

**Tabel-45a. Tabel Tambahan Tren Kepadatan Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cimahi Selatan	133,51	136,69	137,28	138,05
2	Cimahi Tengah	153,87	156,89	158,34	159,16
3	Cimahi Utara	115,52	118,70	120,89	122,49

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

**Tabel-45b. Tabel Tambahan Tren Jumlah Penduduk Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Selatan	226,167	231,56	232,555	233,85	252,822	271,054
2	Cimahi Tengah	155,61	158,663	160,134	160,906	174,511	187,472
3	Cimahi Utara	153,908	158,15	161,066	163,155	184,6	206,818
	Kota Cimahi	535,685	548,373	553,755	557,911	611,705	664,603

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-47a. Tabel Tambahan Tren Timbulan Sampah dan Proyeksi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	535.685	1.333,85
2	2018	548.373	1.365,45
3	2019	553.755	1.378,85
4	2020	557.911	1.389,20
5	2025	611.705	1.523,14
6	2030	664.603	1.654,86

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-48a. Tabel Tambahan Jumlah Sampah Terkelola Bank Sampah Induk Kota Cimahi (Bank Samici)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah Sampah (Kg/Tahun)	Jumlah Sampah (buah/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	kertas	150.492,90	
2	plastik	48.473,00	
3	plastik satuan (galon)		281
4	logam	13.635,12	
5	Kaca	10.392,07	
6	Lain-lain	381,04	
7	Elektronik		14

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-48b. Tabel Tambahan Tren Jumlah Bank Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Bank Sampah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	2014	26 Unit
2	Kota Cimahi	2015	16 Unit
3	Kota Cimahi	2016	7 Unit
4	Kota Cimahi	2017	17 Unit
5	Kota Cimahi	2018	32 Unit
6	Kota Cimahi	2019	43 Unit
7	Kota Cimahi	2020	12 Unit
		Total	153 Unit

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-54a. Tabel Tambahan Tren Nilai Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	29,948	21,79	35,848	32,999

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-56a. Tabel Tambahan Tren Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar harga berlaku
(1)	(2)	(3)
1	2016	Rp24.563,81
2	2017	Rp26.580,08
3	2018	Rp29.240,03
4	2019	Rp32.639,54
4	2020	Rp32.210,69

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-57a. Tabel Tambahan Tren Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2021

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar harga konstan
(1)	(2)	(3)
1	2016	Rp18.882,16
2	2017	Rp19.907,13
3	2018	Rp21.192,60
4	2019	Rp22.856,04
4	2020	Rp22.340,56

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-59a. Tabel Tambahan Tren Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	19	Rp59.635.443.526
2	2017	48	Rp83.019.714.186
3	2018	64	Rp89.153.134.394
4	2019	72	Rp197.375.882.434
5	2020	70	Rp168.381.214.308

Keterangan: -

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel-60a. Tabel Tambahan Pengamanan Aset Sumur Resapan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Kelurahan	Lokasi	Keterangan Lokasi	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KECAMATAN CIMAHI UTARA			
1	Kelurahan Cibabat	RT 05/RW 23	Jl. Pd. Mutiara IX 26, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
2	Kelurahan Cibabat	RT 06/RW 23	Jl. Pd. Mutiara X No.24, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
3	Kelurahan Cibabat	RT 06/RW 23	Jl. Pd. Mutiara Indah VI, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
4	Kelurahan Cibabat	RT 10/RW 23	Jl. Pd. Mutiara Indah VI No.17, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
5	Kelurahan Cibabat	RT 11/RW 23	Jl. Pd. Mutiara Indah VII 2, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
6	Kelurahan Cibabat	RT 05/RW 20	Jl. Cihanjuang Komp Blok B No. 190 RT.05/20, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan

No.	Kelurahan	Lokasi	Keterangan Lokasi	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kelurahan Cibabat	RT 05/RW 20	Jl. Cihanjuang Komp Blok B No. 190 RT.05/20, Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
8	Kelurahan Cibabat	RT 03/RW 01	Jl. Nasional III, gg.Sukawargi Cibabat, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
9	Kelurahan Cibabat	RT 02/RW 08	Griya Pesantren Indah, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
10	Kelurahan Cibabat	RT 02/RW 08	Griya Pesantren Indah, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
11	Kelurahan Cibabat	RT 02/RW 08	Griya Pesantren Indah, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
12	Kelurahan Cibabat	RT 05/RW 04	Dibelakang RS Cibabat	1 Sumur Resapan
13	Kelurahan Pasir Kaliki	RT 01/RW 03	Jl. Budhi Baru 1-13, Pasirkaliki, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
14	Kelurahan Pasir Kaliki	RT 02/RW 03	Jl. Budhi Bhakti VI, Pasirkaliki, Cimahi Utara	1 Sumur Resapan
B	KECAMATAN CIMAHI SELATAN			
15	Kelurahan Cibeber	RT 03/RW 05	Jl.Ibu Ganirah, Gg.H.Abdul Kadir	1 Sumur Resapan
16	Kelurahan Cibeber	RT 02/RW 05	Jl.Ibu Ganirah, Gg.Moch Yusuf	1 Sumur Resapan
17	Kelurahan Cibeber	RT 03/RW 05	Jl.Ibu Ganirah, Gg.H.Abdul Kadir	1 Sumur Resapan
18	Kelurahan Cibeber	RT 03/RW 05	Jl.Ibu Ganirah, Gg.Moch Yusuf	1 Sumur Resapan
19	Kelurahan Cibeber	RT 04/RW 03	Jl.Ibu Ganirah, Dkt Jalan Tipar	1 Sumur Resapan
20	Kelurahan Cibeber	RT 04/RW 10	Komplek Pemda Cibeber	1 Sumur Resapan
21	Kelurahan Cibeber	RT 04/RW 10	Komplek Pemda Cibeber	1 Sumur Resapan
22	Kelurahan Cibeber	RT 04/RW 10	Komplek Pemda Cibeber	1 Sumur Resapan
23	Kelurahan Cibeber	RT 04/RW 10	Komplek Pemda Cibeber	1 Sumur Resapan
24	Kelurahan Cibeureum	RT 04/RW 12	Jl.Tirta Indah III	Lagi dikerjakan

No.	Kelurahan	Lokasi	Keterangan Lokasi	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Kelurahan Cibeureum	RT 01/RW 12	Jl. Kebon Jeruk, RT. 01 / RW. 12, Cibeureum	1 Sumur Resapan
26	Kelurahan Cibeureum	RT 01/RW 12	Jl. Kebon Jeruk, RT. 01 / RW. 12, Cibeureum	1 Sumur Resapan
27	Kelurahan Cibeureum	RT 03/RW 12	Gg. Pahlawan, Cibeureum, Cimahi Sel., Kota Cimahi	1 Sumur Resapan
28	Kelurahan Cibeureum	RT 03/RW 12	Jl.Ranca Bentang Gg.Pahlawan	1 Sumur Resapan
29	Kelurahan Cibeureum	RT 02/RW 12	Jl.Ranca Bentang Gg.Makam	Cadangan
30	Cimahi Technopark	Lokasi 1	Jl Raya Baros No 14 Rt 05 Rw 03 Kelurahan Utama Cimahi Selatan	1 Sumur Resapan
31	Cimahi Technopark	Lokasi 2	Jl. Baros No.78, Utama	
32	Cimahi Technopark	Lokasi 3	Jl. Baros No.78, Utama	
33	Cimahi Technopark	Lokasi 4	Jl. Baros No.78, Utama	
34	Cimahi Technopark	Lokasi 5	Jl. Baros No.78, Utama	
B	KECAMATAN CIMAHI TENGAH			
35	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 03/RW 04	Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi	1 Sumur Resapan
36	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 03/RW 04	Citaman rt 3 rw 4, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
37	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 06/RW 08	Jl.Cigugur Tengah No.52, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
38	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 06/RW 08	Jln. No. 24 Rt 06 Rw 08, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
39	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 01/RW 06	JL. Raya Cilember, No. 27 Blok 283, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
40	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 04/RW 06	Jalan Raya Cilember No.325, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
41	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 06/RW 06	Jalan Panca Bhakti , samping Rel Kereta	1 Sumur Resapan
42	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 05/RW 19	Jl. Cigugur Tengah, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
43	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 02/RW 19	Gg. Mulyo Wijoyo, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah	1 Sumur Resapan
44	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 02/RW 03	Jl. Abdul Halim, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan



No.	Kelurahan	Lokasi	Keterangan Lokasi	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45	Kelurahan Cigugur Tengah	RT 04/RW 03	Jl. Cigugur Tengah, Cigugur Tengah	1 Sumur Resapan
46	Kelurahan Padasuka	RT 06/RW 06	Padasuka, Cimahi Tengah	1 Sumur Resapan
47	Kelurahan Padasuka	RT 07/RW 14	Jalan Pemda, Padasuka, Cimahi Tengah	1 Sumur Resapan
48	Kelurahan Padasuka	RT 04/RW 03	Jl. Terusan Kb.Manggu 1, Padasuka, Cimahi Tengah	1 Sumur Resapan

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

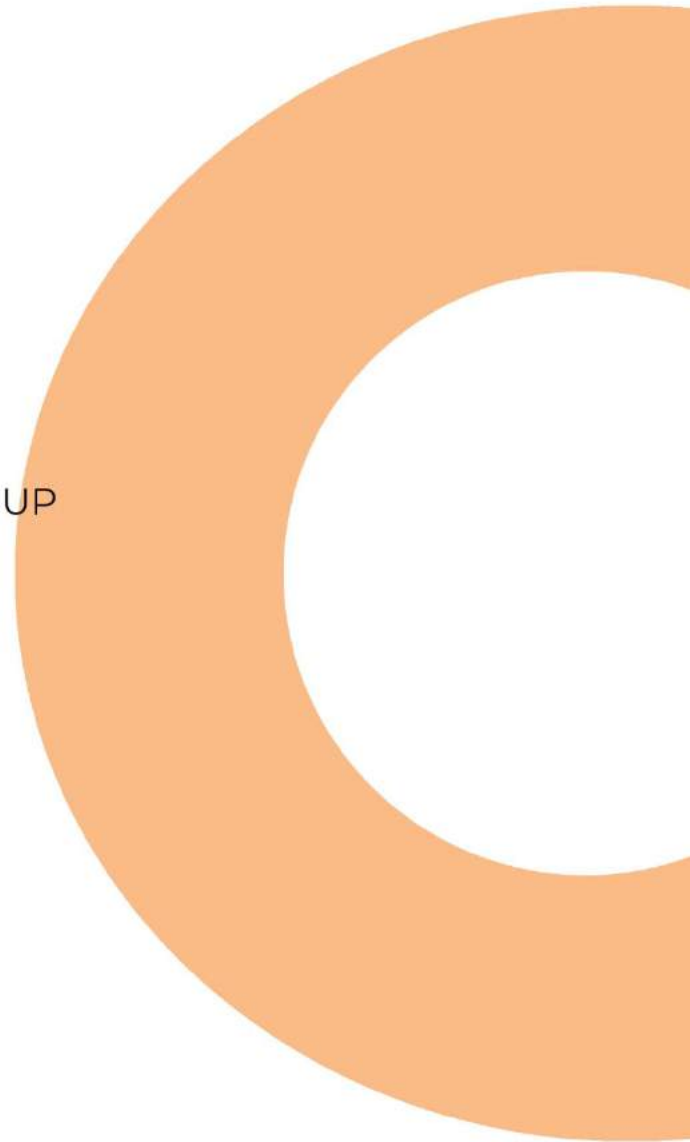
LAMPIRAN IV

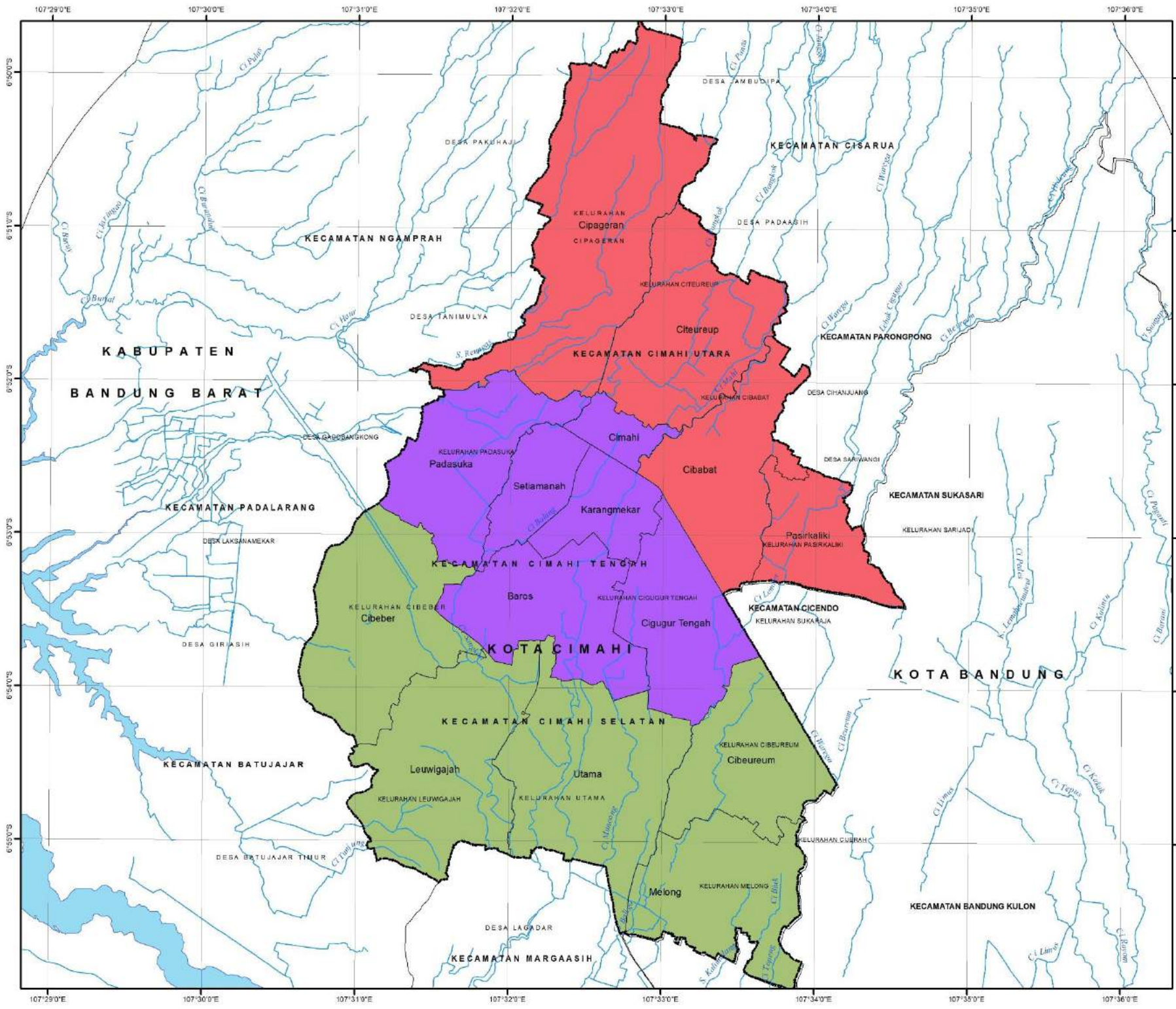
LAPORAN UTAMA

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH (DIKPLHD) KOTA CIMAHI

TAHUN 2021

- PETA SPASIAL

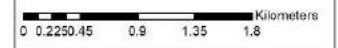




**PETA BATAS ADMINISTRASI
KOTA CIMAH**



SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai
- Batas Kecamatan**
- Kecamatan Cimahi Selatan
- Kecamatan Cimahi Tengah
- Kecamatan Cimahi Utara

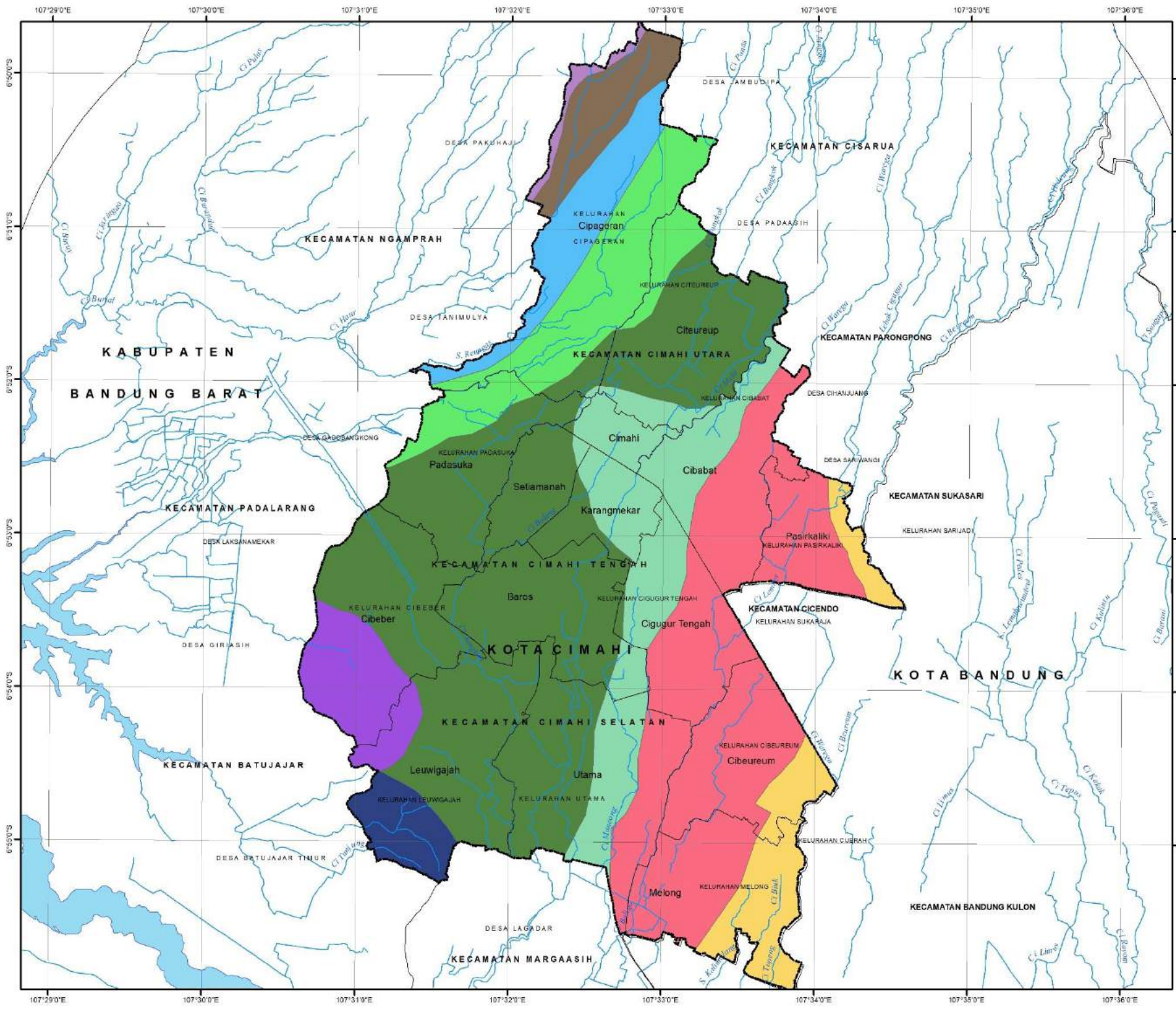
Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAH**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAH
2021**



**PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI
KOTA CIMAHI**



SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai

DAERAH ALIRAN SUNGAI

- Sistem Cibeuber
- Sistem Cihaur
- Sistem Cikawati
- Sistem Cimahi
- Sistem Cimancong
- Sistem Cimentang
- Sistem Cipanas
- Sistem Cisingkan
- Sistem Cibeureum
- Sistem Citunjang

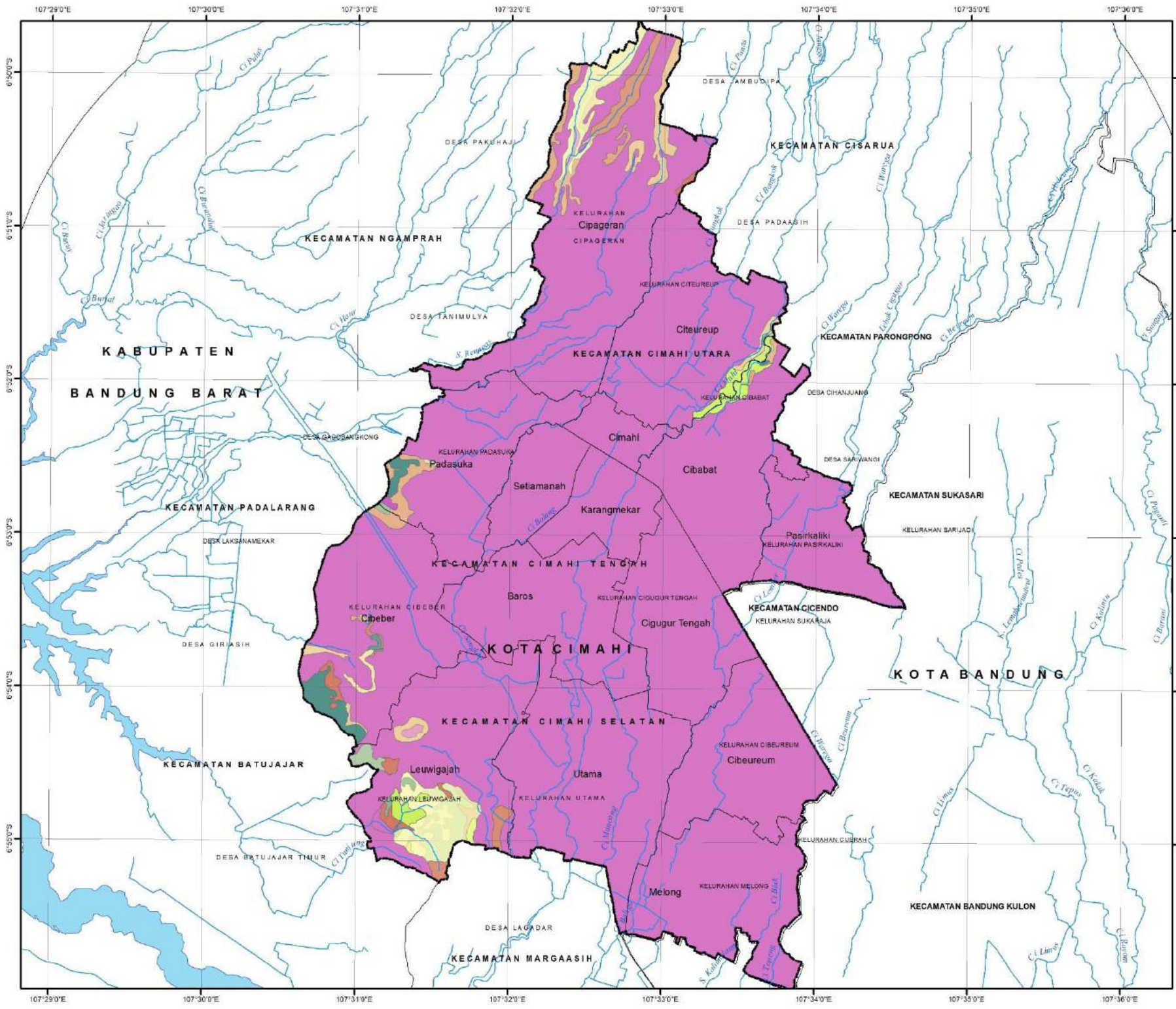
Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**



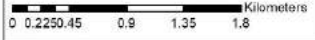
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2021**



**PETA KEMIRINGAN LERENG
KOTA CIMAH**



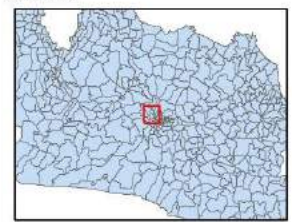
SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai
- Kemiringan Lereng**
- 0 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 40 %

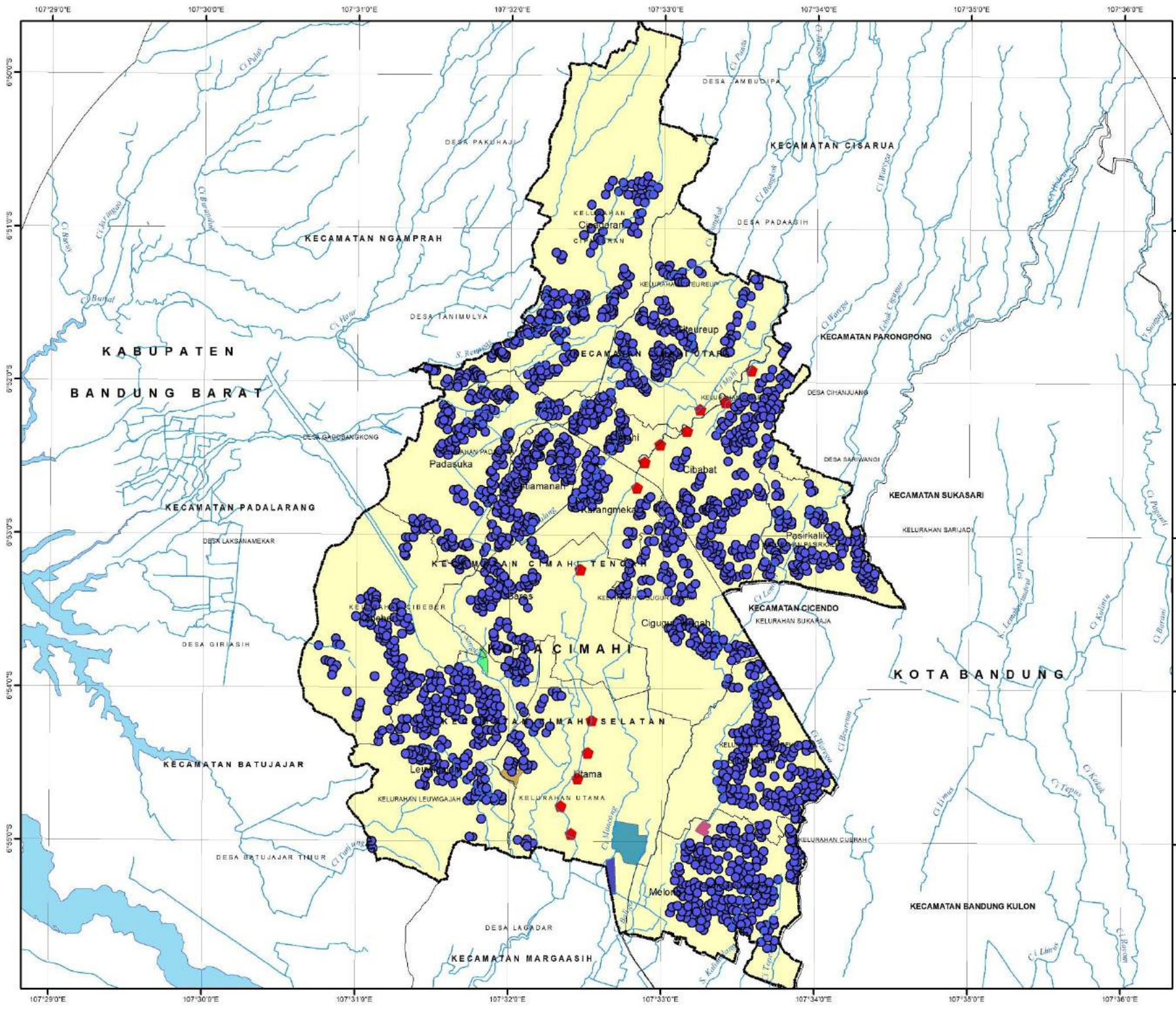
Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAH**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAH
2021**



PETA LOKASI PENGOLOHAN AIR LIMBAH KOTA CIMAH

SKALA 1:42.000

Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai

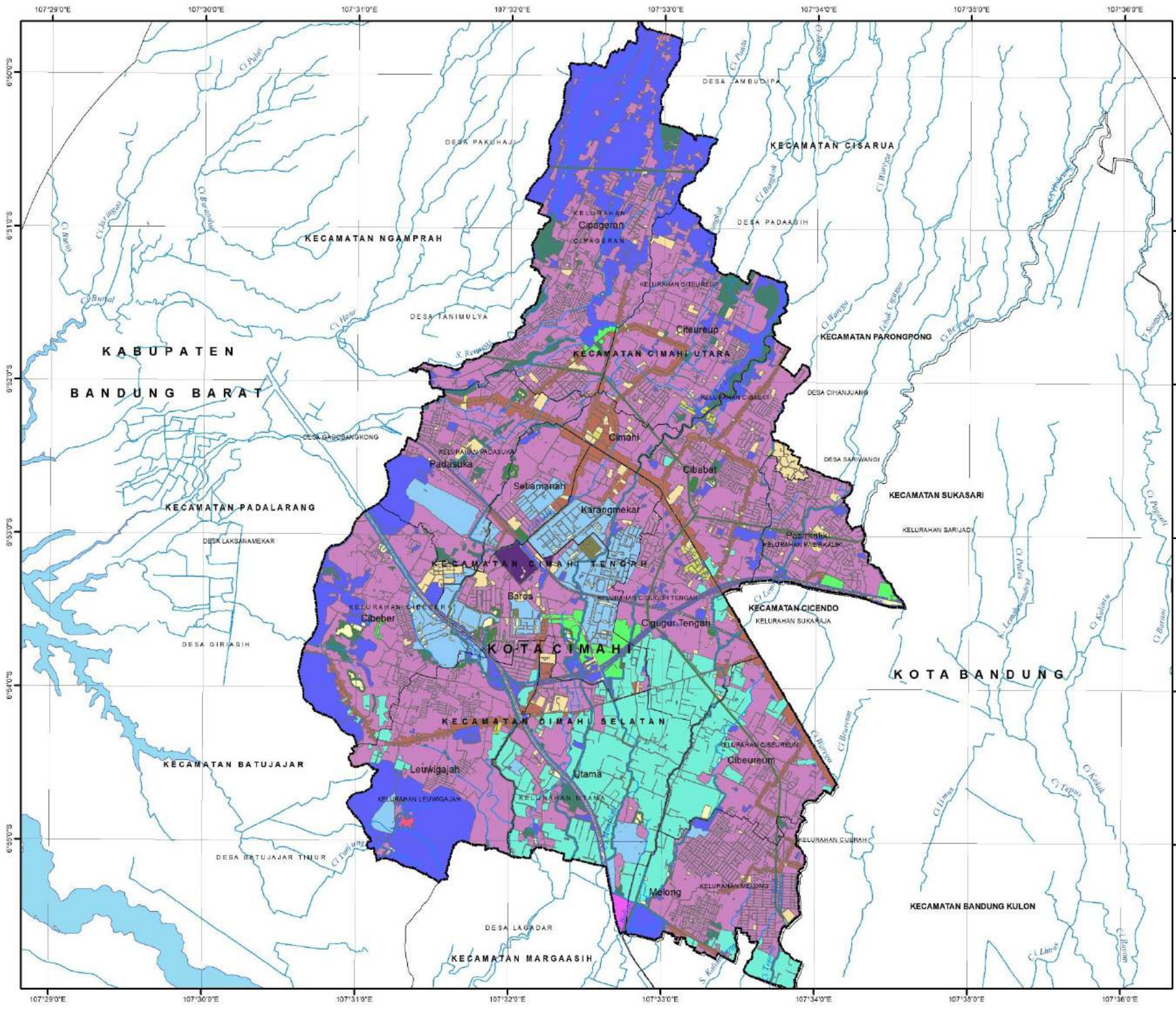
KETERANGAN

- MCK Komunal Model Tangki AG
- MCK Komunal SANIMAS
- IPAL Cibeureum
- IPAL Leuwigajah
- IPAL Utama
- Lokasi Cadangan IPAL Leuwigajah
- Lokasi Cadangan IPAL Utama



DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAH 2021



**PETA POLA RUANG
KOTA CIMAHI**

SKALA 1:42.000

Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai

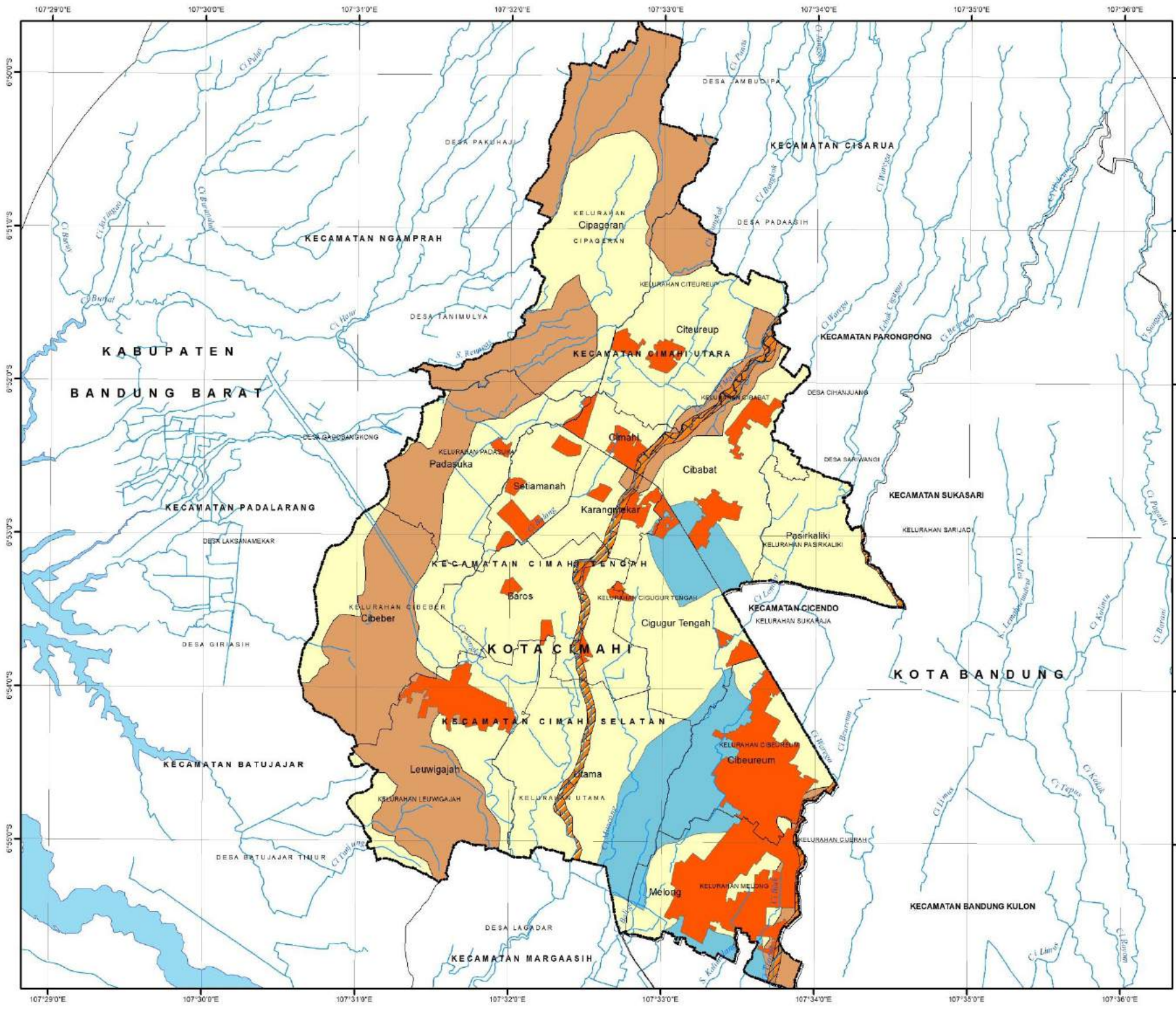
POLA RUANG

- Industri
- Perairan
- Perdagangan dan Jasa
- Perdagangan dan Jasa dan Cagar Budaya
- Perkantoran
- Perlindungan Setempat
- Perumahan
- Peruntukan Campuran
- Peruntukan Khusus
- Peruntukan Khusus dan Cagar Budaya
- Peruntukan Lainnya
- Peruntukan Lainnya dan Cagar Budaya
- Ruang Terbuka Hijau
- Ruang Terbuka Hijau dan Cagar Budaya
- Sarana Pelayanan Umum
- Sarana Pelayanan Umum dan Cagar Budaya



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**

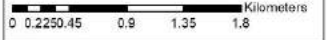
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2021**



**PETA RAWAN BENCANA
KOTA CIMAHI**



SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai
- KETERANGAN**
- Rawan Gunung Api
- Rawan Kebakaran
- Rawan Banjir
- Rawan Longsor

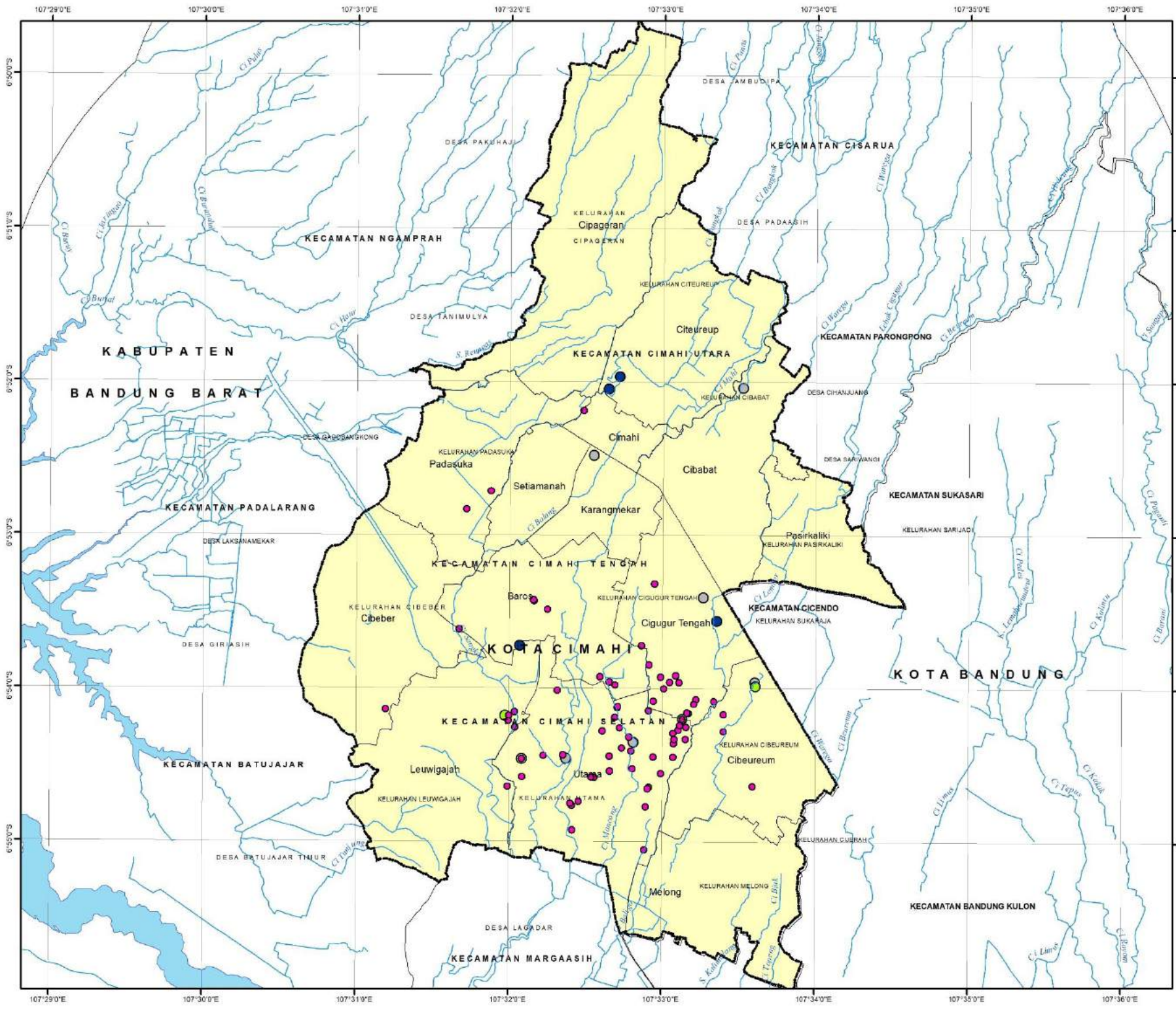
Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2021**



PETA SEBARAN INDUSTRI KOTA CIMAH



SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai

KETERANGAN

- Sebaran Industri Tekstil
- Sebaran Industri Sandang
- Sebaran Industri Pangan
- Sebaran Industri Logam

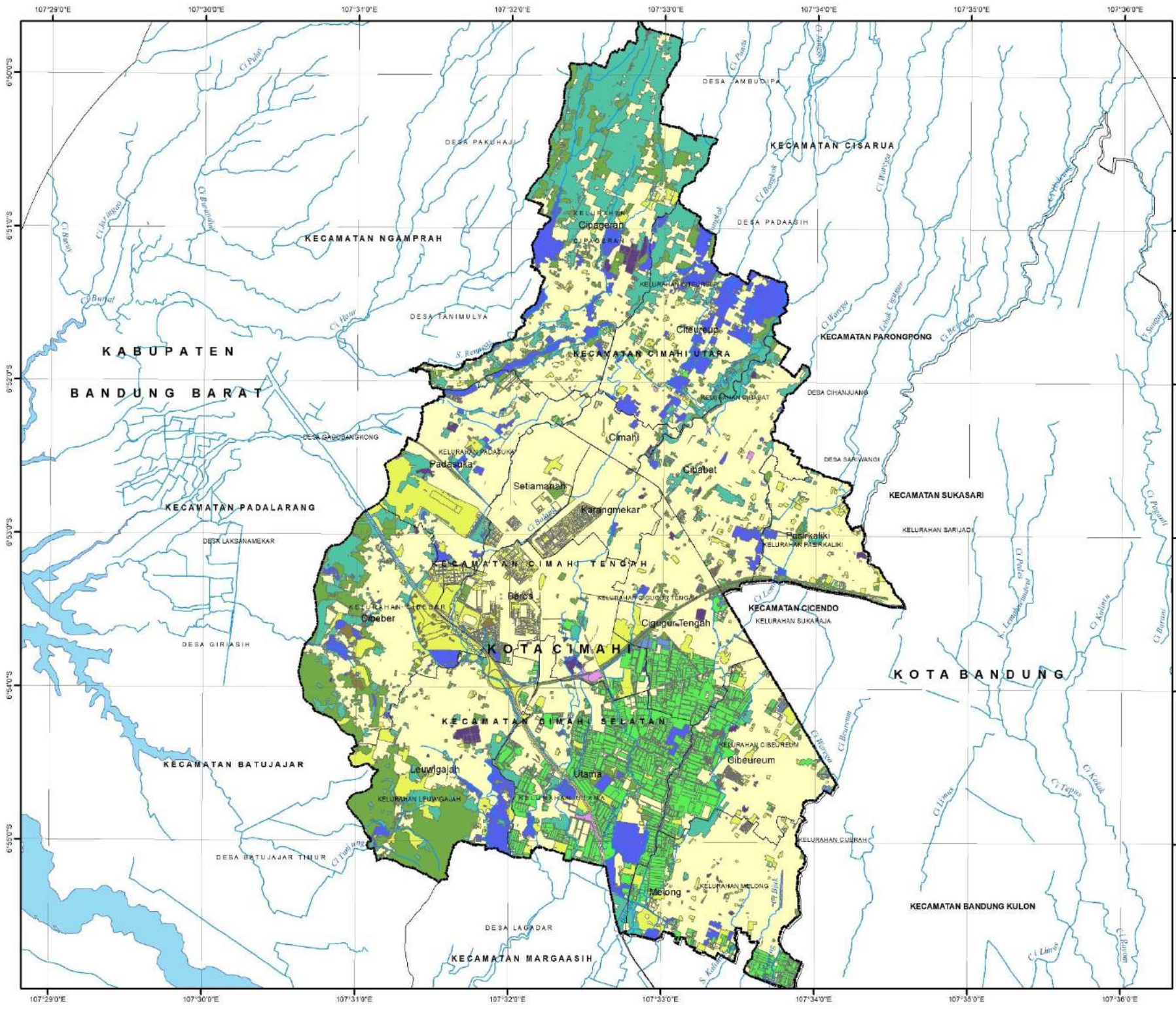
Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAH**



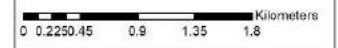
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAH
2021**



**PETA TATA GUNA LAHAN
KOTA CIMAHI**



SKALA 1:42.000



Legenda

- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- Danau
- Sungai

TATA GUNA LAHAN

- Embung
- Hutan Kerapatan Sedang
- Industri Aneka
- Industri Manufaktur
- Industri Tekstil
- Ladang
- Lahan Terbuka
- Makam
- Perkebunan
- Peternakan
- Sawah
- Taman

Indeks Peta:



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2021**